



PUTUSAN

Nomor 25/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : AGUSTINUS CHRISTOFORUS DULA
Tempat lahir : Reweng
Umur/Tanggal lahir : 62 tahun/ 19 Oktober 1958
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Padang RT.009 RW.002 Desa Batu Cermin
Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat
Agama : Katholik
Pekerjaan : Mantan Bupati Manggarai Barat Periode 2010 sampai dengan 2021

Terdakwa ditahan didalam Rumah Tahanan Negara oleh :

- Penyidik, tidak dilakukan penahanan
- Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 Maret 2021;
- Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 8 April 2021;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 9 April 2021 sampai dengan tanggal 7 Juni 2021;
- Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Kupang, sejak tanggal 8 Juni 2021 sampai dengan tanggal 7 Juli 2021;
- Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Kupang, sejak tanggal 8 Juli sampai dengan tanggal 6 Agustus 2021;
- Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan pasal 27 ayat (1) KUHAP sejak tanggal 5 Juli 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021;
- Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan pasal 27 ayat (2) KUHAP sejak tanggal 4 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2021;

Hal 1 dari 281 hal Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Dalam persidangan perkara ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum:

1. FRANSISKUS DJ.TULUNG, S.H
2. Dr. MELKIANUS NDAOMANU, S.H.,M.Hum
3. SUYARI TIMBO TULUNG, S.H.,M.H.

Kesemuanya Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Juli 2021 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang di bawah register Nomor 95/LGS/SK/TPK/2021/PN KPG tanggal 6 Juli 2021;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tersebut :

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 25/PID.SUS-TPK/2021/PT.KPG tanggal 23 Juli 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding ;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kpg. tanggal 30 Juni 2021 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, Nomor Reg.Perkara PDS-17 /N.3.24/Ft.1/01/2021 tanggal 10 Maret 2021, Terdakwa diajukan ke muka persidangan dengan dakwaan pada pokoknya sebagai berikut:

PRIMAIR:

- Bahwa Terdakwa AGUSTINUS CHRISTOFORUS DULA selaku Bupati Manggarai Barat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.53-461 Tahun 2010 tanggal 9 Agustus 2010 tentang Pengesahan Saudara Drs. AGUSTINUS CH DULA sebagai Bupati Manggarai Barat Masa Jabatan 2010 sampai dengan 2015 dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.53-700 Tahun 2016 tanggal 12 Februari 2016 tentang Pengesahan Saudara Drs. AGUSTINUS CH DULA sebagai Bupati Manggarai Barat Masa Jabatan 2016 sampai dengan Tahun 2021, bersama sama dengan terdakwa lain yang dilakukan penuntutan secara terpisah yaitu AMBROSIOUS SUKUR, ABDULLAH NUR, MARTHEN NDEO, MASSIMILIANO DE REVIZIIS, NIZZARDO FABIO, ANDI RIZKI NUR CAHYA D alias IBU ASMA, ENTE PUASA, VERONIKA SYUKUR, THERESIA DEWI KOROH DIMU, SUPARDI TAHIYA, H. SUKRI, DAI KAYUS, MAHMUD NIP, AFRIZAL alias UNYIL, CAITANO SOARES dan MUHAMMAD ACHYAR serta ADAM DJUDJE (tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penuntutan karena telah meninggal dunia), pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi di tahun 2013 sampai dengan tahun 2018, bertempat di Karanga/Torro Lemma Batu Kallo, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Kantor Bupati Manggarai Barat jalan Prof. W. Z. Johanes, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, rumah jabatan Bupati Manggarai Barat jalan SMA Negeri 1 Komodo, Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Kantor Kecamatan Komodo jalan Gabriel Gampur, Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat jalan Frans Nala Nomor 12, Labuan Bajo, Manggarai Barat, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kanwil BPN) Provinsi Nusa Tenggara Timur jalan Frans Seda Nomor 70, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Kantor Notaris THERESIA DEWI KOROH DIMU jalan Sukarno-Hatta, Labuan Bajo, Manggarai Barat, rumah ENTE PUASA di Kampung Ujung, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, rumah kontrakan ANTONIUS HANI di daerah Gua Firdaus, Labuan Bajo, di Kota Jambi, Provinsi Jambi, di Bank Permata D Sartika Bali jalan Dewi Sartika Nomor 88, Kota Denpasar, Provinsi Bali atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Klas IA, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi maupun Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi, namun karena satu sama lain ada sangkut pautnya serta sebahagian besar saksi berada di Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang (UU) RI Nomor 8 Tahun 1981 serta ketentuan Pasal 5 UU Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Klas IA berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *secara melawan hukum, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berlanjut*, yaitu pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2015, Terdakwa menyetujui data yuridis dan data fisik untuk proses permohonan Sertipikat Hak Milik (SHM) atas nama H. SUKRI, SUPARDI TAHIYA, SUAIB TAHIYA, MAHMUD NIP dan DAI KAYUS yang berada di lokasi tanah

Hal 3 dari 281 hal

Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat dan menyetujui peta bidang tanah milik Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat seluas kurang lebih 24 Ha yang diketahuinya secara pasti luas tanah milik Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat seluas kurang lebih 30 Ha di Karanga/Torro Lemma Batu Kallo, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat. Selanjutnya pada bulan Januari tahun 2018, Terdakwa membuat Surat Pernyataan tertanggal 8 Januari 2018 yang isinya menyatakan Pemkab merasa tidak bisa memaksa diri atau berniat memiliki lahan atau tanah tersebut karena antara lain tanah tersebut tidak memiliki dokumen atau bukti penyerahan yang asli, melanggar ketentuan Pasal 45 Ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 5 Jo Pasal 46 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2006 Jo Pasal 55 PP Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, *memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi* yaitu memperkaya orang lain yaitu ABDUL IPUR sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), SUPARDI TAHIYA sebesar Rp. 725.000.000,- (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah), SUAIB TAHIYA sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah), H. SUKRI sebesar Rp. 1.380.000.000,- (satu miliar tiga ratus delapan puluh juta rupiah), H. MUSTAJIB sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), DAI KAYUS sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), MAHMUD NIP sebesar Rp. 1.800.000.000,- (satu miliar delapan ratus juta rupiah), ENTE PUASA sebesar Rp. 1.870.000.000,- (satu miliar delapan ratus tujuh puluh juta rupiah), ANDI RIZKI NUR CAHYA D alias IBU ASMA sebesar Rp. 775.000.000,- (tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah), VERONIKA SYUKUR sebesar Rp. 3.068.947.211,- (tiga miliar enam puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus sebelas rupiah), THERESIA DEWI KOROH DIMU sebesar Rp. 1.123.270.000 (satu miliar seratus dua puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), BURHANUDIN sebesar Rp. 5.342.750.000,- (lima miliar tiga ratus empat puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), ARMANSYAH sebesar Rp. 557.000.000,- (lima ratus lima puluh tujuh juta rupiah), MASSIMILIANO DE REVIZIIS sebesar Rp 7.014.000.000,- (tujuh miliar empat belas juta rupiah), NIZZARDO FABIO sebesar Rp 5.729.000.000,- (lima miliar tujuh ratus dua puluh sembilan juta rupiah), ALFANDRI alias ANDI sebesar Rp 1.015.000.000,- (satu miliar lima belas juta rupiah), AFRIZAL alias UNYIL sebesar Rp 370.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah),

Hal 4 dari 281 hal

Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIRATURAHMI sebesar Rp 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah), FREDY E. J. MARAMIS sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), MARTHEN NDEO sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), MUHAMMAD ACHYAR sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), DAVID ANDRE PRATAMA menguasai tanah seluas 5 Hektar (Ha), ADAM DJUDJE penguasaan tanah seluas 30 Hektar (Ha) dalam bentuk pagar gapura menuju lokasi tanah tersebut, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yaitu merugikan keuangan negara sebesar Rp. 1.301.011.161.288,- (satu triliun tiga ratus satu miliar sebelas juta seratus enam puluh satu ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah) sebagaimana Laporan Akuntan Independen Nomor : 004/PH/OPKJ/AUP//XII/2020 tanggal 23 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh PUPUNG HERU, Ak, CPA pada Kantor Akuntan Publik (KAP) PUPUNG HERU atau setidaknya senilai itu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tahun 1989, H. ISHAKA dan HAKU MUSTAFA yang merupakan fungsionaris adat Kedaluan Nggorang memberikan tanah yang berlokasi di Karanga/Torro Lemma Batu Kallo, Desa Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat secara adat Kapu Manuk Lele Tuak kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Manggarai yang saat itu dijabat oleh GASPAR PARANG EHOK untuk kepentingan membangun Sekolah Perikanan dan ditunjukkan lokasinya oleh H. ISHAKA dan HAKU MUSTAFA yang berada di Karanga/Torro Lemma Batu Kallo, Desa Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai.
- Bahwa kemudian pada tanggal 20 Juli 1993, Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Manggarai membentuk Tim untuk melakukan pengecekan atas tanah yang sudah diserahkan kepada Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Manggarai di Lokasi Karanga/Torro Lemma Batu Kallo, Desa Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai yang beranggotakan antara lain G. FRANSISKUS NAHAS (Kabag Pemerintahan Kabupaten Manggarai) dan PETRUS TAGUS (Kabag Umum dan Perlengkapan Pemerintah Kabupaten Manggarai) dan tim tersebut ada menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang bersumber dari anggaran Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Manggarai sebagai uang tuak kepada H. ISHAKA dan HAKU MUSTAFA.

Hal 5 dari 281 hal Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 26 April 1997, H. ISHAKA meminta bantuan ADAM DJUDJE (penata tanah), DONATUS AMPUT (penata tanah), dan KAMNIS HAMNU (penata tanah) untuk melakukan penataan lokasi tanah yang akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah Tk. II Manggarai yaitu tanah yang berlokasi di Karanga/Torro Lemma Batu Kallo, Desa Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai. Selanjutnya berdasarkan penataan lokasi tanah yang dilakukan oleh ADAM DJUDJE, DONATUS AMPUT, dan KAMNIS HAMNU tersebut, lalu dibuatkan gambar lokasi tanah di Torro Lemma Batu Kallo dan Karanga tertanggal 26 April 1997 yang ditandatangani oleh ADAM DJUDJE, DONATUS AMPUT, KAMNIS HAMNU, ZULKARNAEN DJUDJE (anak ADAM DJUDJE) serta ditandatangani juga oleh H. ISHAKA dan HAKU MUSTAFA sebagai pihak yang mengetahui/disahkan gambar lokasi tanah tersebut.
- Bahwa pada bulan Mei 1997, tanah yang berada di Karanga/Torro Lemma Batu Kallo, Desa Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai dilakukan pengukuran oleh petugas ukur dari Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai yaitu TAGUR ALBERTUS, YULIUS SAE dan N. OKTOVIANUS RIHI, selanjutnya hasil dari pengukuran tersebut luas tanah di Karanga adalah seluas kurang lebih 300.988 M² yang dibuatkan surat ukur tertanggal 14 Mei 1997 yang ditandatangani oleh H. ISHAKA dan YOSEPH LATIF sebagai Kepala Desa Labuan Bajo.
- Bahwa pada tanggal 17 Januari 1998, H. ISHAKA dan HAKU MUSTAFA selaku fungsionaris adat Nggorang membuat Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Manggarai yang isinya Tanah adat yang telah diserahkan kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Manggarai pada tanggal 14 Mei 1997, yang letaknya di Karanga/Torro Lemma Batu Kallo, Desa Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai sesuai peta gambar sketsa hasil pengukuran oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai yang disaksikan oleh YOSEPH LATIF sebagai Kepala Desa Labuan Bajo dan YOS VINS NDAHUR sebagai Camat Komodo dengan uang sirih pinang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Manggarai, selanjutnya tanah di Karanga/Torro Lemma Batu Kallo, Desa Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manggarai seluas kurang lebih 300.988 M² tersebut dicatatkan di dalam aset Pemerintah Daerah Tingkat II Manggarai.

- Bahwa pada tahun 2003, terjadi Pemekaran Daerah Tingkat II Manggarai menjadi Kabupaten Manggarai dan Kabupaten Manggarai Barat. Selanjutnya di tahun 2005 dilakukan penyerahan Personil, Pendanaan, Sarana dan Prasarana serta Dokumen (P3D) dari Pemerintah Kabupaten Manggarai kepada Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat yang berdasarkan Berita Acara Serah Terima dan Lampiran Dokumen Hasil Klarifikasi P3D antara Pemerintah Kabupaten Manggarai kepada Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Nomor : Pem.115/30a/I/2005 tanggal 24 Januari 2005 yang ditanda tangani oleh DJIDON de HAAN selaku Penjabat Bupati Manggarai Barat dan ANTONY BAGUL DAGUR selaku Bupati Manggarai yang disaksikan oleh MATHEUS HAMSI selaku Ketua DPRD Kabupaten Manggarai Barat, ONGGE YOHANES selaku Ketua DPRD Kabupaten Manggarai yang dalam penyerahan tersebut tercantum dokumen terkait lokasi tanah di Karanga/Torro Lemma Batu Kallo, Desa Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai berupa :
 - Asli Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah (4 berkas);
 - Asli Kuitansi Panjar dari Uang Ganti Rugi Tanah Sebesar Rp. 10.000.000 (5 Lembar);
 - Asli Kuitansi Pelunasan Uang Ganti Rugi Tanah seperti Tersebut dalam Kuitansi tanggal 14 Mei 1997 (4 lembar);
 - Asli Legalisasi (4 Lembar);
 - Asli Kuitansi Uang Ganti Rugi Tanah Komunal/Tanah Adat yang terletak di lokasi Karanga, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai, dengan nilai uang sebesar Rp. 10.000.000 (5 Lembar).
- Selain itu pada tanggal 30 Mei 2006, Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat melalui SUWARDI (staf Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat) juga telah menerima dari ADAM DJUDJE berupa dokumen tanah Pemerintah Kabupaten Manggarai yang diserahkan oleh Fungsionaris Adat Nggorang 1 (satu buah), dokumen/pengukuran penataan tanah Pemda Tk II Manggarai tanggal 26 April 1997 sebanyak 1 (satu) buah dan data-data tanah persekutuan adat Nggorang yang telah diserahkan Fungsionaris adat

Hal 7 dari 281 hal Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemda Tk II Manggarai sebanyak 1 (satu) buah. Seharusnya pada saat Terdakwa selaku Bupati Manggarai Barat sekaligus selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah atas tanah di Karanga/Torro Lemma Batu Kallo, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat seluas kurang lebih 300.988 M² dan AMBROSIUS SUKUR yang saat itu menjabat sebagai Kabag Administrasi Pemerintahan Umum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat tahun 2010, mencatatkan ke dalam Kartu Inventaris Barang sebagai Aset Tanah Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat namun Terdakwa dan AMBROSIUS SUKUR tidak mencatatkannya.

- Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan Pasal 45 Ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 5 Jo. Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
- Bahwa setelah H. ISHAKA dan HAKU MUSTAFA meninggal dunia dan sebagai penggantinya adalah H. RAMANG ISHAKA, kemudian timbul klaim tanah yang dilakukan oleh ADAM DJUDJE dengan alasan tanah Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat yang terletak di Karanga/Torro Lemma Batu Kallo, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat seluas kurang lebih 300.988 M² adalah tanah miliknya dengan menggunakan dokumen alas hak yang seolah-olah dokumen alas hak tersebut didapatkan dari H. ISHAKA dan HAKU MUSTAFA pada tanggal 10 April 1991, dengan batas-batas tanah yaitu:
 - Sebelah Utara : Jalan Pertigaan menuju pantai/Laut
 - Sebelah selatan : Laut Flores/ tanah Negara
 - Sebelah Timur : Jalan Pertigaan menuju Toroh Batu Kalo
 - Sebelah Barat : Laut Flores/ Tanah Negara
- Penyerahan dokumen alas hak yang diterima oleh ADAM DJUDJE tersebut disaksikan oleh ANTON USABATAN selaku Camat Komodo akan tetapi ANTON USABATAN menyangkal dokumen alas hak tersebut. Adapun klaim dari ADAM DJUDJE ini tidak berdasar, oleh karena pada tahun 1997 tanah di Karanga/Torro Lemma Batu Kallo, Desa Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai seluas kurang lebih 300.988 M² tersebut sudah diserahkan kepada Pemerintah Daerah Tingkat II Manggarai dan ADAM DJUDJE sendiri terlibat langsung dalam melakukan penataan lokasi

Hal 8 dari 281 hal

Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah yang telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah Tk. II Manggarai termasuk penunjukan pilar batas-batas tanah.

- Bahwa pada tahun 2011, Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat melalui MAKSIMUS GASA selaku Wakil Bupati Manggarai Barat mengajukan permohonan pembuatan Sertipikat Hak Pakai (SHP) terhadap tanah di Karanga/Torro Lemma Batu Kallo, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat seluas kurang lebih 300.988 M² ke Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat namun belum ada tindak lanjut terhadap permohonan tersebut karena adanya klaim dari masyarakat diantaranya dari ADAM DJUDJE dengan cara membuat portal masuk ke lokasi tanah dimaksud sehingga proyek Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) salah satunya pembangunan akses jalan di Karanga/Torro Lemma Batu Kallo, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat tidak dapat dilaksanakan.
- Bahwa sekitar tahun 2012 dan 2013, MASSIMILIANO DE REVIZIIS (yang sering melakukan bisnis jual beli tanah) mencari tanah yang berlokasi dipinggiran pantai di Kabupaten Manggarai Barat untuk membuka usaha Resort dengan menggunakan nama grup investor PT. Navuto Indonesia yang sebenarnya belum ada di Indonesia. MASSIMILIANO DE REVIZIIS bertemu dengan ANDI RIZKI NUR CAHYA D alias IBU ASMA (Makelar tanah) dan menyampaikan keinginan tersebut, lalu ANDI RIZKI NUR CAHYA D alias IBU ASMA menunjukan lokasi tanah milik Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat di Karanga/Torro Lemma Batu Kallo, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat seluas kurang lebih 1 Ha, setelah ditunjukkan lokasi tanah tersebut, MASSIMILIANO DE REVIZIIS setuju atas lokasi tanah tersebut dan kemudian menyampaikan kepada NIZZARDO FABIO terkait tanah yang telah ditunjukkan oleh ANDI RIZKI NUR CAHYA D alias IBU ASMA, kemudian MASSIMILIANO DE REVIZIIS meminta uang tanda jadi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada NIZZARDO FABIO untuk diberikan kepada ANDI RIZKI NUR CAHYA D alias IBU ASMA.
- Bahwa untuk proses penerbitan sertipikat tanah Karanga sebagaimana yang disepakati dengan MASSIMILIANO DE REVIZIIS, pada tahun 2012 dan 2013, ANDI RIZKI NUR CAHYA D alias IBU ASMA mengajak ENTE PUASA untuk membuat alas hak atas tanah untuk perorangan agar nantinya digunakan sebagai syarat terbitnya SHM. Menindaklanjuti ajakan ANDI RIZKI NUR

Hal 9 dari 281 hal

Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CAHYA D alias IBU ASMA tersebut, ENTE PUASA mendatangi rumah SUPARDI TAHIYA untuk menyampaikan ada yang ingin membeli tanah milik SUPARDI TAHIYA dan SUAIB TAHIYA (adik SUPARDI TAHIYA) dengan harga Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) namun harus diurus dulu sertifikatnya oleh ENTE PUASA bersama dengan ANDI RIZKI NUR CAHYA D alias IBU ASMA, dan atas penyampaian dari ENTE PUASA tersebut, SUPARDI TAHIYA menyetujuinya karena SUPARDI TAHIYA maupun SUAIB TAHIYA tidak memiliki alas hak atas tanah berupa bukti pemilikan tanah dari fungsionaris adat. Selanjutnya ENTE PUASA juga menemui H. SUKRI dan menyampaikan hal yang sama yaitu ada yang ingin membeli tanahnya dengan harga sebesar Rp.1.275.000.000,- (satu miliar dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) namun harus diurus dulu sertifikatnya oleh ENTE PUASA dan ANDI RIZKI NUR CAHYA D atau IBU ASMA, atas penyampaian tersebut H. SUKRI menyetujuinya karena H. SUKRI memang tidak memiliki alas hak tanah berupa bukti pemilikan tanah dari fungsionaris adat.

- Bahwa pada tahun 2013, ENTE PUASA yang ditemani oleh DAHERING KORO meminta ANTONIUS HANI (Pensiunan POLRI) membuat surat alas hak pemilikan tanah di Karanga untuk SUPARDI TAHIYA, SUAIB TAHIYA serta sepuluh orang lainnya yaitu ENTE PUASA, SYARIFUDIN, SYAMSUDIN, BOHORUDING, MUHAYANG, ARI ROUFU, SUARDI, JUADI KORO, HASANUDING dan DAHERING KORO dengan biaya sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang seolah-olah alas hak tersebut berasal dari HAJI ISHAKA dan HAKU MUSTAFA (fungsionaris adat Nggorang) yang dibagikan melalui KAMNIS HAMNU di tahun 1993, padahal tanah yang dibagikan melalui KAMNIS HAMNU untuk SUPARDI TAHIYA dan SUAIB TAHIYA bukanlah tanah di Karanga/Torro Lemma Batu Kallo melainkan di daerah Wae Cicu sebagaimana yang tercantum dalam daftar nama-nama penerima sebagai berikut :

DAFTAR NAMA-NAMA YANG MENERIMA PEMBAGIAN TANAH ADAT
LOKASI SEBELAH TIMUR BUKIT WAECICU DAN SEKITARNYA DESA
LABUAN BAJO KECAMATAN KOMODO KAB. MANGGARAI
TAHUN 1993

No	Nama	Alamat	Ukuran Pembagian	Ket
01	Stefan Bahang	Lab. Bajo/B. Lanc II	20 x 70 mtr	Kel. I
02	Samsu Bahari	Lab. Bajo/Ujung	20 x 70 mtr	Sda
03	Ahmad Baco	Lab. Bajo/Ujung	20 x 70 mtr	Sda

Hal 10 dari 281 hal Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04	Sius	Lab. Bajo/Ujung	20 x 70 mtr	Sda
05	Azis Ati	Lab. Bajo/Ujung	40 x 70 mtr	Sda
06	Ambo Sadike	Lab. Bajo/Ujung	20 x 70 mtr	Sda
07	Sius	Lab. Bajo/Komplex	25 x 50 mtr	Sda
08	Stef	Lab. Bajo/Komplex	30 x 50 mtr	Sda
09	Abraham Papa	Lab. Bajo/Ujung	50 x 50 mtr	Sda
10	Maximus Gandur	Lab. Bajo/Complex	25 x 50 mtr	Sda
11	Zulkarnain Djudje	Lab. Bajo/Cempa	25 x 50 mtr	Sda
12	Oan Januari	Lab. Bajo/Ujung	25 x 50 mtr	Sda
13	Theo Januari	Lab. Bajo/Ujung	50 x 50 mtr	Sda
14	Gabriel	Lab. Bajo/Komplex	25 x 50 mtr	Sda
15	Thomas	Lab. Bajo/Komplex	25 x 50 mtr	Kel. II
16	Muhamad Sidik	Lab. Bajo/Wae Kelambu	25 x 50 mtr	Sda
17	Jhon Gajeng	Lab. Bajo/Lamtoro	50 x 50 mtr	Sda
18	Nuryadin Djudje	Lab. Bajo/Ujung	25 x 50 mtr	Sda
19	Ismaila Djudje	Lab. Bajo/Ujung	25 x 50 mtr	Sda
20	Ishaka Djafar	Lab. Bajo/B. Lanc. II	20 x 70 mtr	Sda
21	Jojon Suparjo	Lab. Bajo/Sda	25 x 50 mtr	Sda
22	Supardi Tahiya	Lab. Bajo/Ujung	25 x 50 mtr	Kel.
23	Suaib Tahiya	Lab. Bajo/Ujung	25 x 50 mtr	Sda
24	Herman Haliliman	Ruteng	50 x 50 mtr	Sda
25	Najib Djudje	Lab. Bajo/Cempa	25 x 50 mtr	Sda
26	H. Djafar Ali Rawi	Lab. Bajo/Ujung	50 x 50 mtr	Sda
27	Suleman Padju	Lab. Bajo/Ujung	20 x 70 mtr	Sda
28	Beni Padju	Lab. Bajo/Ujung	20 x 70 mtr	Sda
29	Nasrul Sinaga	Lab. Bajo/Ujung	20 x 70 mtr	Sda
30	Muhamad Padju	Lab. Bajo/Ujung	20 x 70 mtr	Sda
31	Indo Uga	Lab. Bajo/Cempa	25 x 50 mtr	Sda
32	Umar Ishaka	Lab. Bajo/Tengah	50 x 50 mtr	Sda
33	Lamber Jamila	Lab. Bajo/Wae Kelambu	25 x 50 mtr	Kel
34	Ruddin Temma	Lab. Bajo/Ujung	20 x 70 mtr	Sda
35	Moses Turuk	Lab. Bajo/Komplex	50 x 50 mtr	Sda
36	Hamid Mustafa	Lab. Bajo/Ujung	20 x 60 mtr	Sda
37	Ambo Tang	Lab. Bajo/Ujung	20 x 60 mtr	Sda
38	Niko Nuin	Lab. Bajo/Wae Kelambu	40 x 60 mtr	Sda
39	Yusuf H. Maudu	Lab. Bajo/Ujung	20 x 60 mtr	Sda
40	Sudir	Lab. Bajo/Tengah	20 x 60 mtr	Sda
41	H. Sudin	Lab. Bajo/Tengah	25 x 60 mtr	Sda
42	Ahmad Bas	Lab. Bajo/Wae Kelambu	25 x 60 mtr	Sda
43	Mustaram	Lab. Bajo/Sda	25 x 60 mtr	Sda
44	Abdul Haji	Lab. Bajo/Sda	25 x 60 mtr	Sda
45	Mihrang	Lab. Bajo/Cempa	20 x 70 mtr	Sda
46	H. Ilyas	Lab. Bajo/Tengah	20 x 70 mtr	Sda
47	Ridwan	Lab. Bajo/Cempa	20 x 70 mtr	Sda
48	Pajar Umar	Lab. Bajo/Lamtoro	20 x 70 mtr	Sda
49	Juhaera	Lab. Bajo/Tengah	20 x 70 mtr	Sda
50	Muh. Saleh H. Kuba	Lab. Bajo/Ujung	20 x 70 mtr	Kel
51	H. Adam Djudje	Lab. Bajo/Cempa	25 x 50 mtr	Sda
52	Usman Umar	Lab. Bajo/Cempa	25 x 50 mtr	Sda
53	Muh. Saleh Ince	Lab. Bajo/Komplex	50 x 50 mtr	Sda

Hal 11 dari 281 hal Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54	Drs. Yos Vins Nda	Lab. Bajo/Ujung	25 x 70 mtr	Sda
55	Benyamin Bahang	Lab. Bajo/B. Lanc II	20 x 70 mtr	Sda
56	Yohanes Sura	Lab. Bajo/B. Lanc II	40 x 60 mtr	Sda
57	Daniel Daeng Nabit	Lab. Bajo/Ujung	20 x 70 mtr	Sda
58	H. Kuba Usman	Lab. Bajo/Ujung	20 x 70 mtr	Sda
59	H. Ishaka	Lab. Bajo/Tengah	20 x 70 mtr	Sda
60	H. Adam Djudje	Lab. Bajo/Cempa	25 x 75 mtr	Kel VI
61	Yohanes E A Ndahur	Lab. Bajo/Ujung	20 x 100 mtr	Sda
62	Drs. Yos Vins Ndahur	Lab. Bajo/Ujung	25 x 100 mtr	Sda
63	Usman	Lab. Bajo/Wae Kelambu	20 x 100 mtr	Sda
64	Kamis Hamnu	Lab. Bajo/Ujung	50 x 100 mtr	Sda
65	Alimuddin	Lab. Bajo/Ujung	20 x 75 mtr	Sda
66	Baharudin	Lab. Bajo/Ujung	20 x 70 mtr	Sda
67	Drs. Arnol Djaok	Lab. Bajo/Komplex	40 x 70 mtr	Sda
68	Drs. Melkior	Lab. Bajo/Komplex	20 x 70 mtr	Sda
69	Gani	Lab. Bajo/Lamtoro	20 x 70 mtr	Sda
70	Dus	Lab. Bajo/Cempa	20 x 70 mtr	Sda
71	Anton	Lab. Bajo/Cempa	20 x 70 mtr	Sda
72	Muhamad Hatta	Lab. Bajo/Cempa	20 x 70 mtr	Sda
73	Haruna Djudje	Lab. Bajo/Cempa	20 x 70 mtr	Sda
74	Taswing Bakar	Lab. Bajo/Tengah	20 x 70 mtr	Sda
75	Muhamad Abiya Umar	Lab. Bajo/Cempa	20 x 70 mtr	Sda
76	Saparudin	Lab. Bajo/Ujung	20 x 70 mtr	Sda
77	Haku Mustafa	Lab. Bajo/B. Lancang II	50 x 70 mtr	Sda
78	Arsyad Yappa	Lab. Bajo/Cempa	25 x 60 mtr	Sda
79	Yayan Arsyad	Lab. Bajo/Cempa	25 x 60 mtr	Sda
80	Mukhrin K.	Lab. Bajo/Cempa	20 x 70 mtr	Sda
81	Rustam Efendi	Lab. Bajo/Cempa	25 x 50 mtr	Sda
82	Lius Yohanes	Lab. Bajo/Ruteng	25 x 50 mtr	Sda
83	Ismaele	Lab. Bajo/Lamtoro	25 x 60 mtr	Sda
84	Anton Jakung	Lab. Bajo/Komplex	25 x 50 mtr	Sda
85	Muhdin AR	Lab. Bajo/B. Lancang II	25 x 50 mtr	Sda
86	Drs. Jedadu Volent	Lab. Bajo/Komplex	40 x 70 mtr	Sda
87	Drs. NobarNala	Lab. Bajo/Komplex	40 x 70 mtr	Sda

- Bahwa untuk menindaklanjuti pembuatan surat alas hak atas tanah seolah-olah ada kepemilikan tanah oleh H. SUKRI di Karanga/Torro Lemma Batu Kallo sebagai syarat permohonan penerbitan sertifikat, ENTE PUASA dan H. SUKRI meminta bantuan ANTONIUS HANI untuk dibuatkan surat alas hak atas tanah untuk H. SUKRI, seolah olah ada hibah dari KETANG di tanggal 10 Maret 1997 dengan ukuran lebar 50 meter x panjang 340 meter dengan biaya yang diberikan kepada ANTONIUS HANI sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang mana uang biaya pengurusan surat alas hak atas tanah untuk SUPARDI TAHIYA, SUAIB TAHIYA dan 10 orang lainnya sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan Rp. 30.000.000,- (tiga

Hal 12 dari 281 hal Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah) berasal dari MASSIMILIANO DE REVIZIIS dan NIZZARDO FABIO yang diserahkan melalui ANDI RIZKI NUR CAHYA D alias IBU ASMA dan ENTE PUASA.

- Bahwa THERESIA DEWI KOROH DIMU yang merupakan Notaris di Labuan Bajo, ditunjuk oleh MASSIMILIANO DE REVIZIIS untuk membuat perjanjian jual beli tanah milik Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat di Karanga/Torro Lemma Batu Kallo, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat yang dilakukan oleh makelar tanah yang ditunjuk oleh MASSIMILIANO DE REVIZIIS serta melibatkan SUPARDI TAHIYA, SUAIB TAHIYA dan H. SUKRI yang seolah-olah memiliki tanah di Karanga/Torro Lemma Batu Kallo, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat. THERESIA DEWI KOROH DIMU, tanpa melakukan pengecekan kebenaran materiil dokumen alas hak tanah atas nama SUPARDI TAHIYA, SUAIB TAHIYA dan H. SUKRI pada Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat akan tetapi perjanjian jual beli tersebut tetap saja ditandatangani oleh THERESIA DEWI KOROH DIMU yang hanya berdasarkan data yuridis yang sudah ditanda tangani oleh ABDUL IPUR dan ABDULLAH NUR yang sebelumnya telah menerima uang dari ANDI RIZKI NUR CAHYA D alias IBU ASMA. Adapun perjanjian jual beli yang dibuat oleh THERESIA DEWI KOROH DIMU yaitu :

- Perjanjian jual beli tanggal 13 September 2013 antara H. SUKRI selaku penjual sebidang tanah seluas 17.000 M2 dengan VERONIKA SYUKUR selaku pembeli dengan harga tanah sebesar Rp. 3.200.000.000,- (tiga miliar dua ratus juta rupiah). Pada saat penandatanganan perjanjian tersebut, Terdakwa dan NIZZARDO FABIO sudah membayar uang tahapan harga tanah sebesar Rp.640.000.000,- (enam ratus empat puluh juta rupiah) kepada H. SUKRI yang sisa pelunasan sebesar Rp. 2.510.000.000,- (dua miliar lima ratus sepuluh juta rupiah) yang disepakati setelah terbitnya SHM. Adapun uang pembayaran tahapan sebesar Rp. 640.000.000,- (enam ratus empat puluh juta rupiah) tersebut yang diterima oleh H. SUKRI sebagian diambil oleh ANDI RIZKI NUR CAHYA D alias IBU ASMA sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk pengurusan data yuridis di kantor Kelurahan Labuan Bajo dan di kantor Kecamatan Komodo.
- Perjanjian jual beli tanggal tanggal 14 Oktober 2013 antara ANDI RIZKI NUR CAHYA D alias IBU ASMA selaku kuasa menjual tanah dari SUPARDI

Hal 13 dari 281 hal

Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAHIYA dan SUAIB TAHIYA masing-masing seluas 6000 M2 dengan VERONIKA SYUKUR selaku pembeli dengan harga kedua bidang tanah tersebut sebesar Rp. 1.800.000.000,- (satu miliar delapan ratus juta rupiah). Pada saat penandatanganan perjanjian tersebut, SUPARDI TAHIYA mengetahui harga tanah yang dibuat dalam perjanjian tersebut sebesar Rp.1.800.000.000,- (satu miliar delapan ratus juta rupiah) sehingga SUPARDI TAHIYA meminta tambahan harga tanahnya dan harga tanah SUAIB TAHIYA dari harga kesepakatan awal dengan ANDI RIZKI NUR CAHYA D alias IBU ASMA dan ENTE PUASA sebesar Rp. 300.000.000,- menjadi sebesar Rp.1.400.000.000,- (satu miliar empat ratus juta rupiah). Pada saat perjanjian tersebut ditandatangani, Terdakwa dan NIZZARDO FABIO sudah membayar uang tahapan yang tertera dalam perjanjian dengan total sebesar Rp. 380.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) kepada SUPARDI TAHIYA yang sisanya sebesar Rp.1.420.000.000,- (satu miliar empat ratus dua puluh juta rupiah) disepakati setelah terbitnya SHM.

- Bahwa setelah ANDI RIZKI NUR CAHYA D alias IBU ASMA menerima uang pembayaran tahapan atas tanah H. SUKRI yang berasal dari MASSIMILIANO DE REVIZIIS dan NIZZARDO FABIO, selanjutnya ANDI RIZKI NUR CAHYA D alias IBU ASMA memberikan uang kepada ENTE PUASA sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk diberikan kepada ABDUL IPUR selaku Lurah Labuan Bajo agar menandatangani data yuridis atas nama H. SUKRI, SUPARDI TAHIYA, SUAIB TAHIYA, selain itu ANDI RIZKI NUR CAHYA D alias IBU ASMA juga menyerahkan uang kepada BLASIUS BEO untuk diberikan kepada ABDULLAH NUR selaku Camat Komodo agar menandatangani data yuridis pemohon SHM atas nama H. SUKRI, SUPARDI TAHIYA dan SUAIB TAHIYA. Sebelum menandatangani data yuridis pemohon atas nama H. SUKRI, SUPARDI TAHIYA dan SUAIB TAHIYA tersebut, ABDULLAH NUR yang mengetahui pasti lokasi tanah Karanga/Torro Lemma Batu Kallo merupakan milik Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, melaporkan dan meminta persetujuan kepada Terdakwa di ruang kerjanya untuk menandatangani data yuridis pemohon atas nama H. SUKRI, SUPARDI TAHIYA dan SUAIB TAHIYA. Atas laporan ABDULLAH NUR tersebut, Terdakwa yang juga mengetahui dengan pasti tanah yang dimohonkan tersebut berada di lokasi tanah milik Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan kepada ABDULLAH NUR untuk menandatangani data yuridis. Atas persetujuan dari Terdakwa, ABDULLAH NUR menandatangani data yuridis pemohon atas nama H. SUKRI, SUPARDI TAHIYA dan SUAIB TAHIYA.

Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan Pasal 45 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 5 Jo. Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

- Bahwa setelah data-data yuridis pemohon atas nama H. SUKRI, SUPARDI dan SUAIB TAHIYA ditandatangani oleh ABDULLAH NUR, berkas permohonan tersebut kemudian dibawa oleh VERONIKA SYUKUR tanpa ada surat kuasa untuk didaftarkan ke Kantor Pertanahan Manggarai Barat melalui KAROLUS GEPA (Petugas Locket). Selanjutnya berkas permohonan tersebut diperiksa oleh KAROLUS GEPA dan pada saat itu KAROLUS GEPA sudah merasa adanya kejanggalan terhadap data yuridis yang diajukan oleh para pemohon tersebut, diantaranya terkait batas lokasi para pemohon dan luasan tanah, dan terhadap kejanggalan tersebut dilaporkan kepada MARTHEN NDEO selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat akan tetapi MARTHEN NDEO tetap mengarahkan KAROLUS GEPA untuk meluluskan berkas permohonan tersebut dengan diteruskan ke bidang pengukuran dan pemetaan tanah yang saat itu MARTHEN NDEO bertindak juga selaku Plt. Kasi Pengukuran dan Pemetaan Tanah.
- Bahwa pada saat proses pengurusan SHM atas nama SUPARDI TAHIYA, SUAIB TAHIYA dan H. SUKRI, mendapatkan sanggahan dari ADAM DJUDJE dan NIKOLAS NAPUT. Selanjutnya atas sanggahan tersebut, pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat mengundang ADAM DJUDJE, NIKOLAS NAPUT dan ABDULLAH NUR yang mewakili pihak Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat untuk dilakukan mediasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat. Pada mediasi tersebut dipimpin oleh FREDY E. J. MARAMIS selaku Kasi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah pada Kantor Pertanahan kabupaten Manggarai Barat, dijelaskan oleh FREDY E. J. MARAMIS bahwa tanah di Karanga/Torro Lemma Batu Kallo, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat adalah milik Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat sambil memperlihatkan sket peta pada tahun 1997. Atas penyampaian dari FREDY E. J. MARAMIS dalam mediasi tersebut, yang hadir pada saat itu tidak ada yang membantahnya. Setelah dari

Hal 15 dari 281 hal Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi tersebut, FREDY E. J. MARAMIS menyampaikan kepada VERONIKA SYUKUR bahwa permohonan SHM atas nama SUPARDI TAHIYA, SUAIB TAHIYA dan H. SUKRI yang diurus oleh VERONIKA SYUKUR merupakan tanah yang diklaim oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat. Atas informasi dari FREDY E. J. MARAMIS, VERONIKA SYUKUR menyampaikan kepada MASSIMILIANO DE REVIZIIS dan NIZZARDO FABIO.

- Bahwa hasil mediasi yang dipimpin oleh FREDY E. J. MARAMIS juga dilaporkan kepada MARTHEN NDEO, akan tetapi MARTHEN NDEO tetap meneruskan permohonan SHM atas nama SUPARDI TAHIYA, SUAIB TAHIYA dan H. SUKRI untuk dilakukan pengukuran tanah. Dalam pelaksanaan pengukuran tanah, MARTHEN NDEO tidak melibatkan pihak Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat. Adapun pihak yang hadir dalam proses pengukuran tanah diantaranya SUPARDI TAHIYA, ENTE PUASA, ANDI RIZKI NUR CAHYA D alias IBU ASMA dan ABDUL IPUR yang sudah menerima uang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebelumnya dari ANDI RIZKI NUR CAHYA D alias IBU ASMA melalui ENTE PUASA yang dalam pelaksanaan pengukuran, SUPARDI TAHIYA selaku pemohon tidak tahu dimana lokasi tanahnya dan yang menunjukkan lokasi dan batas-batas tanah para pemohon adalah ENTE PUASA.
- Bahwa setelah dilakukan pengukuran di tahun 2013 dan dibuatkan surat ukurnya, selanjutnya proses permohonan SHM atas nama SUPARDI TAHIYA, SUAIB TAHIYA dan H. SUKRI seharusnya diteruskan oleh bidang Pendaftaran Hak Atas Tanah untuk dilanjutkan dalam sidang Panitia A, akan tetapi karena sebelumnya telah mengetahui obyek tanah tersebut adalah milik Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, MARTHEN NDEO meminta FREDY E. J. MARAMIS untuk dipending berkas permohonan dari SUPARDI TAHIYA, SUAIB TAHIYA dan H. SUKRI.
- Bahwa pada tanggal 11 Juni 2014, Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat mengirim surat Nomor : Pem.130/184/VI/2014 tanggal 11 Juni 2014 yang ditandatangani oleh BENEDIKTUS BANU selaku Asisten Pemerintahan dan Kesra Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat perihal persertifikatan 9 (Sembilan) lokasi tanah milik Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat diantaranya Tanah Karanga di Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat dengan melampirkan bukti penyerahan alas hak kepemilikan Pemerintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah dalam bentuk fotokopi sedangkan bukti aslinya sudah diterima melalui SUWARDI namun hilang di Bagian Tata Pemerintahan dalam hal ini dijabat oleh AMBROSIUS SUKUR.

- Bahwa adanya permasalahan tanah milik Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat yang diklaim oleh ADAM DJUDJE seluas kurang lebih 30 Ha di Karanga, pada tanggal 21 Oktober 2014, Terdakwa mengundang rapat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOMPINDA) yang dihadiri oleh Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Manggarai Barat, Kapolres Manggarai Barat, Dandim 1612 Labuan Bajo, Kepala Kejaksaan Negeri Labuan Bajo, Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo untuk membahas tanah yang diklaim oleh ADAM DJUDJE di ruang kerja Bupati Manggarai Barat. Hasil pembahasan dengan FORKOMPINDA di rekomendasikan saat itu yaitu :
 - Terhadap pengklaiman oleh ADAM DJUDJE yang memanfaatkan surat pernyataan yang ditandatangani oleh mantan Bupati Kepala Daerah Tk. II Manggarai (GASPAR PARANG EHOK) dapat diketahui bahwa surat tersebut terkandung maksud hanya surat penyerahan yang belum ditandatangani, namun secara adat/budaya telah dilakukan penyerahan.
 - Terkait belum ditandatanganinya surat pelepasan hak oleh Bupati Kepala Daerah Tk. II Manggarai maka perlu ada penegasan penyerahan oleh ahli waris DALU ISHAKA kepada Pemda Manggarai.
 - Bahwa selain itu pada tanggal 22 Oktober 2014, Terdakwa juga melakukan pembahasan dengan GASPAR PARANG EHOK, HARUM FRANSISKUS, FRANS BORGIAS PADJU LEOK, FIDELIS KERONG, KORINUS BURENI (staf dinas perikanan), ANTON USABATAN, ABDUL IPUR, H. RAMANG ISHAKA, MARTHEN NDEO, AMBROSIUS SUKUR (Kabag Pemerintahan), ABDULLAH NUR dengan hasil pembahasan ditegaskan walaupun Surat Pelepasan Adat dari H. ISHAKA dan HAKU MUSTAFA (fungsiaris adat) tidak ditandatangani oleh GASPAR PARANG EHOK selaku Bupati Kepala Daerah Tk. II Manggarai tetapi penyerahan tanah ulayat di Karanga/Torro Lemma Batu Kallo seluas kurang lebih 30 Ha adalah sah milik Pemda Manggarai karena sudah dibayar uang sirih pinang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan diperuntukan untuk sekolah perikanan serta klaim tanah dari ADAM DJUDJE itu dibantah oleh ANTON USABATAN karena Surat pelepasan

Hal 17 dari 281 hal

Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak atas tanah dari H. ISHAKA dan HAKU MUSTAFA di tahun 1991 untuk ADAM DJUDJE tidaklah benar.

- Bahwa terhadap hasil pembahasan dengan FORKOMPINDA, pada tanggal 26 November 2014 Terdakwa mengirim surat ke masing-masing instansi yaitu Kapolres Manggarai Barat, Kepala Kejaksaan Negeri Labuan Bajo, Perwira Penghubung Kodim 1612 Ruteng sebagaimana dalam surat yang ditandatangani oleh Terdakwa pada tanggal 26 November 2014, selanjutnya diikuti oleh ABDULLAH NUR selaku Camat Komodo menyampaikan surat kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat perihal pertimbangan agar tidak melayani proses penerbitan hak atas tanah atas nama H. M. ABU BAKAR ADAM DJUDJE di Karanga karena tanah di Karanga seluas kurang lebih 30 Ha adalah tanah milik Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, sehingga terhadap surat permohonan SHM seluas kurang lebih 4 Ha di obyek yang sama oleh ADAM DJUDJE ditolak oleh MARTHEN NDEO, sedangkan ADAM DJUDJE di bulan November 2014 pernah menjual tanah di Karanga/Torro Lemma Batu Kallo seluas kurang lebih 4 Ha kepada orang Italia bernama VALERIO sebesar Rp. 5.500.000.000,- (lima miliar lima ratus juta rupiah) namun baru diterima uang jadi pembayaran sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) dan kepada JOHNI ASADOMA (mantan Wakapolda NTT) seluas 5.000 M² seharga Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang sudah diterima pembayaran oleh ADAM DJUDJE sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa pada bulan Maret 2015, Terdakwa memberikan kuasa kepada AMBROSIOUS SUKUR mengajukan kembali permohonan sertifikat tanah Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat di Karanga/Torro Lemma Batu Kallo, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat seluas kurang lebih 30 Ha ke Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat dengan dana yang sudah dianggarkan dalam APBD Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat tahun 2015, padahal Terdakwa sebelumnya sudah menyetujui permohonan data yuridis oleh H. SUKRI, SUPARDI TAHIYA dan SUAIB TAHIYA yang telah mengambil sebagian tanah milik Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat tersebut. Selanjutnya permohonan tersebut di proses oleh pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat dan oleh karena luas tanah yang dimohonkan lebih dari 10 Ha maka kewenangan untuk melakukan pengukuran berada pada Kanwil BPN Provinsi Nusa Tenggara Timur dan berkas

Hal 18 dari 281 hal

Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan tersebut selanjutnya dikirim oleh MARTHEN NDEO ke Kanwil BPN Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk dimintakan pengukuran.

- Bahwa berkas permohonan sertifikat yang diajukan oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat tersebut dinyatakan LENGKAP oleh pihak Kanwil BPN Provinsi Nusa Tenggara Timur sehingga bisa dilakukan pengukuran sebagaimana yang dimohonkan dengan rincian biaya pengukuran sebesar Rp. 32.925.000,- (tiga puluh dua juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) sebagaimana dalam Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur yang ditandatangani oleh JOSIAS BENYAMIN LONA selaku Kepala Kanwil BPN Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tanggal 20 April 2015.
- Bahwa pada tanggal 21 Februari 2015, DAI KAYUS dan MAHMUD NIP mengajukan permohonan SHM ke Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat dengan masing-masing seluas 5000 M² berdasarkan alas hak dari USMAN POTA tahun 1989 yang lokasi tanahnya sama yaitu di daerah Wae Cicu Utara bukan di Karanga/Torro Lemma Batu Kallo. Tanah DAI KAYUS ini sebelum terbit sertifikat sudah dicarikan pembelinya oleh AFRIZAL alias UNYIL dan MARIA SRIKANDI alias IBU KENDI kepada ISMAIL HIRAWAN dengan harga yang ditawarkan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) permeternya. Oleh karena ada jaminan oleh MARIA SRIKANDI alias IBU KENDI berupa rumah dan tanahnya, maka ISMAIL HIRAWAN menyetujui rencana membeli tanah tersebut dengan memberi tanda jadi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada MARIA SRIKANDI alias IBU KENDI melalui AFRIZAL alias UNYIL yang kemudian diberikan kepada ALFANDRI alias ANDI yang bertugas mengurus data yuridis ke kantor Kelurahan Labuan Bajo dan kantor Kecamatan Komodo dan termasuk juga permohonan atas nama MAHMUD NIP yang biayanya berasal dari MATHIUS SANIANG NAGA SIAGIAN. Terhadap permohonan SHM atas nama MAHMUD NIP tersebut, ALFANDRI alias ANDI mendapat uang dari MATHIUS SANIANG NAGA SIAGIAN sebesar Rp. 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) sehingga total uang yang diterima oleh ALFANDRI alias ANDI sebesar Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah).
- Bahwa terhadap alas hak atas tanah atas nama DAI KAYUS dan MAHMUD NIP sebelum ditandatangani oleh ABDULLAH NUR, ABDULLAH NUR melaporkan kepada Terdakwa di ruang kerjanya bahwa obyek tanah yang

Hal 19 dari 281 hal

Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimohonkan ini berada di atas tanah Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat. Atas laporan dari ABDULLAH NUR tersebut, Terdakwa menyetujui agar ditandatangani padahal Terdakwa mengetahui secara pasti bahwa tanah Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat di Karanga/Torro Lemma Batu Kallo adalah luasnya kurang lebih 30 Ha sebagaimana hasil rapat FORKOMPINDA dan juga sesuai hasil rapat dengan GASPAR PARANG EHOK, H. RAMANG ISHAKA dan MARTHEN NDEO.

Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan Pasal 45 Ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 5 Jo. Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

- Bahwa untuk pengurusan SHM atas nama DAI KAYUS di Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat dilakukan oleh AFRIZAL alias UNYIL yang merupakan orangnya MATHIUS SANIANG NAGA SIAGIAN yang merupakan teman dekat dari FREDY E. J. MARAMIS, sedangkan pengurusan SHM atas nama MAHMUD NIP di Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat diurus sendiri oleh MAHMUD NIP. Adapun untuk biaya pengurusan SHM atas nama DAI KAYUS dan MAHMUD NIP di Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat dibiayai oleh MATHIUS SANIANG NAGA SIAGIAN dan ISMAIL HERAWAN. Dalam proses pengurusan SHM DAI KAYUS dan MAHMUD NIP sempat dipending oleh FREDY E. J. MARAMIS atas arahan MARTHEN NDEO karena menunggu peta bidang tanah Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat yang berlokasi di Karanga/Torro Lemma Batu Kallo, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat terbit dan juga ada sanggahan dari ENTE PUASA.
- Bahwa pada tanggal 20 Mei 2015, dilakukan pengukuran tanah Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat di Karanga/Torro Lemma Batu Kallo di Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat seluas kurang lebih 30 Ha yang dilakukan oleh BALIYO MULYONO dan SUTARDI yang merupakan petugas ukur dari Kanwil BPN Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama ALIMIN sebagai petugas ukur pada Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat dan didampingi oleh AMBROSIUS SUKUR. Sebelum dilakukan pengukuran, AMBROSIUS SUKUR dan ABDULAH NUR mengajak H. RAMANG ISHAKA untuk mengecek pilar-pilar batas tanah di lokasi tersebut, dan pada saat pelaksanaan pengukuran, AMBROSIUS SUKUR menunjukkan

Hal 20 dari 281 hal

Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian tanah tersebut sebagai “tanah masyarakat”, sehingga hasil perhitungan pengukuran tanah yang dilakukan oleh BALIYO MULYONO dan SUTARDI seluas kurang lebih 28 Ha dan bukan seluas kurang lebih 30 Ha sesuai dengan permohonan dan dibuat gambar ukurnya yang dikirim ke Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat yang diterima oleh AMBROSIUS SUKUR. Setelah menerima gambar ukur hasil pengukuran seluas kurang lebih 28 Ha, selanjutnya AMBROSIUS SUKUR melapor kepada Terdakwa di ruang kerja Bupati Manggarai Barat yaitu luas tanah Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat di Karanga/Torro Lemma Batu Kallo, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat berkurang menjadi kurang lebih 28 Ha karena dalam gambar ukur ada tertulis “tanah masyarakat”, atas laporan AMBROSIUS SUKUR tersebut, Terdakwa menyetujui agar AMBROSIUS SUKUR menandatangani saja gambar ukur tersebut padahal Terdakwa mengetahui secara pasti bahwa tanah Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat di Karanga/Torro Lemma Batu Kallo di Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat adalah seluas kurang lebih 30 Ha sebagaimana hasil rapat FORKOMPINDA dan juga sesuai hasil rapat dengan GASPAR PARANG EHOK, H. RAMANG ISHAKA dan MARTHEN NDEO yang tidak pernah membahas adanya “tanah masyarakat” kecuali klaim dari ADAM DJUDJE.

Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan Pasal 45 Ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 5 Jo. Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

- Bahwa setelah gambar ukur tanah Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat di Karanga/Torro Lemma Batu Kallo di Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat seluas kurang lebih 28 Ha di tandatangi oleh AMBROSIUS SUKUR, maka dibuatkan peta bidangnya lalu ditandatangani oleh ALBERTINA RESDYANA NDAPAMERANG selaku Kepala Bidang Pengukuran dan Pemetaan pada Kanwil BPN Provinsi Nusa Tenggara Timur akan tetapi peta bidang ini tidak dikirimkan oleh ALBERTINA RESDYANA NDAPAMERANG ke Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat.
- Bahwa sekitar bulan Juni 2015, petugas Kanwil BPN Propinsi Nusa Tenggara Timur mendatangi AMBROSIUS SUKUR di ruang kerjanya dan menyodorkan gambar ukur peta bidang Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat yang sudah

Hal 21 dari 281 hal Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkurang lagi menjadi kurang lebih 24 Ha dan juga gambar ukur atas nama SUPARDI TAHIYA, SUAIB TAHIYA dan H. SUKRI untuk ditandatangani oleh AMBROSIUS SUKUR sebagai pihak tapal batas (Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat). Sebelum menandatangani gambar ukur seluas kurang lebih 24 Ha untuk permohonan sertifikat tanah Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat dan gambar ukur atas nama SUPARDI TAHIYA, SUAIB TAHIYA dan H. SUKRI tersebut, AMBROSIUS SUKUR melaporkan kepada Terdakwa di ruang kerjanya bahwa luas tanah Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat berkurang lagi menjadi kurang lebih 24 Ha dan juga ada gambar ukur atas nama SUPARDI TAHIYA, SUAIB TAHIYA dan H. SUKRI untuk ditandatangani oleh AMBROSIUS SUKUR sebagai pihak tapal batas (Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat), dan atas laporan itu, Terdakwa menyetujui agar AMBROSIUS SUKUR menandatangani saja gambar ukur Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat seluas kurang lebih 24 Ha dan gambar ukur atas nama SUPARDI TAHIYA, SUAIB TAHIYA dan H. SUKRI tersebut padahal Terdakwa mengetahui secara pasti bahwa tanah Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat di Karanga/Torro Lemma Batu Kallo di Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat seluas kurang lebih 30 Ha sebagaimana hasil rapat FORKOMPINDA dan juga sesuai hasil rapat dengan GASPAR PARANG EHOK, H. RAMANG ISHAKA dan MARTHEN NDEO.

Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan Pasal 45 Ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara, Pasal 5 Jo. Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

- Bahwa setelah gambar ukur tanah Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat di Karanga/Torro Lemma Batu Kallo di Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat seluas kurang lebih 24 Ha ditandatangani oleh AMBROSIUS SUKUR, maka ditandatangani peta bidangnya oleh ALBERTINA RESDYANA NDAPAMERANG lalu dikirim peta bidang ini ke Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat. Akibat peta bidang tanah Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat di Karanga/Torro Lemma Batu Kallo di Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat berkurang dari kurang lebih 30 Ha menjadi kurang lebih 24 Ha, maka proses permohonan penerbitan SHM atas nama SUPARDI TAHIYA,

Hal 22 dari 281 hal

Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUAIB TAHIYA, H. SUKRI, DAI KAYUS dan MAHMUD NIP yang awalnya dipending lalu dilanjutkan kembali prosesnya oleh MARTHEN NDEO. Untuk permohonan atas nama SUPARDI TAHIYA, SUAIB TAHIYA dan H. SUKRI dilakukan oleh MARTHEN NDEO yang memang sejak awal sudah dilakukan pendekatan oleh VERONIKA SYUKUR yang mengurus permohonan SHM atas nama SUPARDI TAHIYA, SUAIB TAHIYA dan H. SUKRI, sehingga seharusnya berkas permohonan tersebut yang masuk di tahun 2013 ditolak tetapi dengan sengaja dipending dulu lalu diproses kembali penerbitan SHM nya setelah terbit peta bidang tanah Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat di Karanga/Torro Lemma Batu Kallo di Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat seluas kurang lebih 24 Ha.

- Bahwa proses tersebut juga diterapkan oleh MARTHEN NDEO terhadap permohonan SHM atas nama DAI KAYUS dan MAHMUD NIP yang dipending oleh FREDY E. J. MARAMIS sesuai dengan arahan MARTHEN NDEO yang sejak awal seharusnya ditolak karena luas tanahnya tidak jelas dan alas hak tanahnya diragukan. Diprosesnya kembali permohonan SHM atas nama DAI KAYUS dan MAHMUD NIP dimulai dari pengukuran tanah yang dialihkan dari obyek tanah dalam berkas permohonan semula berada di Wae Cicu Utara dipindahkan ke lokasi tanah Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat di Karanga/Torro Lemma Batu Kallo di Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat yang sudah tertulis "tanah masyarakat" sesuai dengan peta bidang seluas 24 Ha atas DAI KAYUS karena I KETUT SUARSANA dijanjikan akan mendapatkan uang dari MAHMUD NIP. Pada saat proses pengukuran tanah atas nama DAI KAYUS dan MAHMUD NIP tersebut yang hadir saat itu adalah DAI KAYUS, MURSALIM, ZULKALDAH, ALFANDRI alias ANDI, AFRIZAL alias UNYIL, ANTONIUS JEMADUR dan yang menunjukan batas-batas tanah adalah AFRIZAL alias UNYIL padahal AFRIZAL alias UNYIL mengetahui kalau obyek tanah yang ditunjukkan adalah tanah Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat.
- Bahwa permohonan SHM atas nama DAI KAYUS dan MAHMUD NIP tersebut di proses kembali oleh MARTHEN NDEO oleh karena AFRIZAL alias UNYIL dan MAHMUD NIP memberikan sejumlah uang kepada MARTHEN NDEO dan FREDY E. J. MARAMIS dan I KETUT SUARSANA melalui rekening milik SIRATURAHMI yang sering digunakan oleh MARTHEN NDEO dan FREDY E. J. MARAMIS untuk menerima biaya pengurusan SHM. Adapun uang yang

Hal 23 dari 281 hal

Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima oleh MARTHEN NDEO, FREDY E. J. MARAMIS, I KETUT SUARSANA melalui SIRATURAHMI untuk biaya pengurusan SHM atas nama DAI KAYUS dan MAHMUD NIP dengan rincian sebagai berikut :

- Menerima uang dari MATHIUS SANIANG NAGA SIAGIAN total sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah);
- Menerima uang dari AFRIZAL alias UNYIL yang bersumber dari MATHIUS SANIANG NAGA SIAGIAN sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- Menerima uang dari MAHMUD NIP yang bersumber dari MATHIUS SANIANG NAGA SIAGIAN sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Sehingga total uang yang diterima oleh SIRATURAHMI dalam rekeningnya untuk pengurusan SHM atas nama DAI KAYUS dan MAHMUD NIP sebesar Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) dan dari uang tersebut diberikan kepada MARTHEN NDEO sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), I KETUT SUARSANA sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dan FREDY E. J. MARAMIS sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) serta ALIMIN sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

- Bahwa berkas permohonan atas nama SUPARDI TAHIYA, SUAIB TAHIYA dan H. SUKRI dilanjutkan untuk dilakukan sidang Panitia A yang dihadiri oleh ENTE PUASA, SUPARDI TAHIYA, H. MUSTAJIB, ALI ANTONIUS, H. RAMANG ISHAKA, ABDUL IPUR, ELI REIWUTI, ABDULAH NUR, I KETUT SUARSANA, H. SUKURING, akan tetapi Panitia A tidak pernah menguji kebenaran materiil dari data yuridis dan data fisik obyek tanah di lapangan akan tetapi tetap diterbitkan oleh MARTHEN NDEO masing-masing Surat Keputusan Persetujuan Pemberian Hak Milik tanggal 6 Juni 2006 sehingga selanjutnya diterbitkan SHM yaitu :

- SHM nomor 02446 luas tanah 6643 M² atas nama SUPARDI TAHIYA padahal luas tanah yang dimohonkan hanya seluas 6000 M²;
- SHM nomor 02447 luas tanah 8447 M² atas nama SUAIB TAHIYA padahal luas tanah yang dimohonkan hanya seluas 6000 M²;
- SHM nomor 02448 luas tanah 20.130 M² atas nama H. SUKRI padahal luas tanah yang dimohonkan hanya seluas 17.000 M².

- Bahwa untuk proses penerbitan SHM atas nama DAI KAYUS dan MAHMUD NIP mendapat sanggahan dari ENTE PUASA, akan tetapi MARTHEN NDEO

Hal 24 dari 281 hal Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap meneruskan permohonan SHM atas nama DAI KAYUS dan MAHMUD NIP ke sidang Panitia A. Pada saat sidang panitia A, H. RAMANG ISHAKA sudah mengingatkan kepada MARTHEN NDEO jika alas hak tanah atas nama DAI KAYUS tidak benar karena DAI KAYUS pernah datang ke rumahnya untuk meminta pengakuan alas hak yang dimilikinya tetapi tidak dilayani oleh H. RAMANG ISHAKA. Walaupun sudah diingatkan oleh H. RAMANG ISHAKA, MARTHEN NDEO tetap menerbitkan Surat Keputusan Persetujuan Pemberian Hak Milik dan telah diterbitkan SHM atas nama DAI KAYUS dan MAHMUD NIP dimana untuk sidang panitia A terhadap permohonan SHM atas nama MAHMUD NIP dan DAY KAYUS Panitia A tidak pernah menguji kebenaran materiil data yuridis dan data fisiknya sehingga MARTHEN NDEO juga tetap menerbitkan SHM yaitu:

- SHM Nomor 02482 luas tanah 12.020 M² atas nama DAI KAYUS padahal luas tanah yang dimohonkan hanya seluas 5000 M²;
- SHM Nomor 02490 luas tanah 8.824 M² atas nama MAHMUD NIP padahal luas tanah yang dimohonkan hanya seluas 5000 M², lalu dibatalkan dan dipecah menjadi 2 (dua) yaitu SHM nomor 02492 seluas 6094 M² dan SHM nomor 02493 seluas 2730 M².
- Bahwa setelah terbit SHM atas nama SUPARDI TAHIYA, SUAIB TAHIYA dan H. SUKRI, selanjutnya SHM tersebut diambil oleh VERONIKA SYUKUR di Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat berdasarkan surat kuasa yang dimintakan sebelumnya oleh VERONIKA SYUKUR kepada SUPARDI TAHIYA, SUAIB TAHIYA dan H. SUKRI di tanggal 6 April 2016. Setelah SHM tersebut dikuasai oleh VERONIKA SYUKUR, selanjutnya SHM atas nama SUPARDI TAHIYA, SUAIB TAHIYA dan H. SUKRI dititipkan di Notaris THERESIA DEWI KOROHO DIMU. Selanjutnya VERONIKA SYUKUR memberitahukan kepada MASSIMILIANO DE REVIZIIS jika SHM atas nama SUPARDI TAHIYA, SUAIB TAHIYA dan H. SUKRI telah selesai dan ada di Notaris THERESIA DEWI KOROHO DIMU. MASSIMILIANO DE REVIZIIS yang awalnya menggunakan PT. Navuto Indonesia yang seolah-olah ingin melakukan investasi di Labuan Bajo namun sebenarnya bertindak sebagai “makelar tanah” karena diawal sudah ada kesepakatan antara MASSIMILIANO DE REVIZIIS, NIZZARDO FABIO dan VERONIKA SYUKUR untuk membeli tanah dari SUPARDI TAHIYA, SUAIB TAHIYA dan H. SUKRI dengan harga lebih rendah yang modal awalnya bersumber dari NIZZARDO FABIO. Selanjutnya NIZZARDO FABIO

Hal 25 dari 281 hal

Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperkenalkan BURHANUDIN kepada MASSIMILIANO DE REVIZIIS dan saat itu BURHANUDIN menyampaikan telah mendapatkan calon pembeli tanah dari ARMANSYAH yaitu RUDYANTO SULIAWAN selaku pemilik Hotel Ayana Labuan Bajo.

- Bahwa sebelum menentukan harga ke calon pembeli, diketahui harga yang disepakati antara MASSIMILIANO DE REVIZIIS, NIZZARDO FABIO, VERONIKA SYUKUR untuk 3 (tiga) bidang tanah atas nama SUPARDI TAHIYA, SUAIB TAHIYA dan H. SUKRI termasuk jasa VERONIKA SYUKUR dengan total sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) yang kemudian harga tanah tersebut oleh MASSIMILIANO DE REVIZIIS dan NIZZARDO FABIO dinaikan menjadi kurang lebih sebesar Rp. 19.000.000.000,- (sembilan belas miliar rupiah) dengan perhitungan memasukan fee keuntungan MASSIMILIANO DE REVIZIIS dengan NIZZARDO FABIO sebesar Rp. 9.000.000.000,- (sembilan miliar rupiah) dengan pembagian MASSIMILIANO DE REVIZIIS 40% dan NIZZARDO FABIO 60%, selanjutnya oleh BURHANUDIN dinaikan harganya kepada RUDYANTO SULIAWAN menjadi Rp. 25.154.000.000,- (dua puluh lima miliar seratus lima puluh empat juta rupiah) dengan memasukan fee keuntungan BURHANUDIN, ARMANSYAH dan THERESIA DEWI KOROH DIMU.
- Bahwa transaksi jual beli tanah milik SUPARDI TAHIYA, SUAIB TAHIYA dan H. SUKRI dengan SANIATMA ADINOTO selaku kuasa dari RUDYANTO SULIAWAN dilakukan di Kantor Notaris THERESIA DEWI KOROH DIMU yang dihadiri oleh MASSIMILIANO DE REVIZIIS, NIZZARDO FABIO, VERONIKA SYUKUR, BURHANUDIN, ARMANSYAH, SUPARDI TAHIYA dan H. SUKRI.
- Bahwa dalam proses penandatanganan Akta Jual Beli (AJB) untuk bidang tanah milik SUPARDI TAHIYA, SUAIB TAHIYA dan H. SUKRI sebagai berikut :
 - Pembelian tanah SHM No. 2448 atas nama H. SUKRI :
 - Perjanjian ikatan jual beli antara H. SUKRI dengan VERONIKA SUKUR berdasarkan perjanjian tanggal 13 September 2013 sebesar Rp. 3.200.000.000,- (tiga miliar dua ratus juta rupiah) dibatalkan terlebih dahulu oleh THERESIA DEWI KOROH DIMU, selanjutnya THERESIA DEWI KOROH DIMU membuatkan AJB Nomor : 186/2016 tanggal 18 Agustus 2016 antara H. SUKRI dengan SANIATMA ADINOTO (selaku Kuasa dari RUDYANTO SULYAWAN) dengan harga tanah Rp. 5.032.500.000,- (lima miliar tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah),

Hal 26 dari 281 hal Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun saat penandatanganan AJB, THERESIA DEWI KOROH DIMU sengaja tidak membacakan harga tanah yang tercantum dalam AJB tersebut kepada H. SUKRI yang tidak bisa membaca.

- Pembelian tanah SHM No. 2446 atas nama SUPARDI TAHIYA dan Pembelian tanah SHM No. 2447 atas nama SUAIB TAHIYA :
- Perjanjian ikatan jual beli antara ANDI RIZKY NUR CAHYA D alias IBU ASMA selaku kuasa jual dari SUPARDI TAHIYA dan SUAIB TAHIYA dengan VERONIKA SYUKUR tanggal 14 Oktober 2013 dengan harga tanah sebesar Rp. 1.800.000.000,- (satu miliar delapan ratus juta rupiah), selanjutnya THERESIA DEWI KOROH DIMU membuatkan AJB Nomor : 185/2016 tanggal 18 Agustus 2016 antara SUPARDI TAHIYA dengan SANIATMA ADINOTO selaku Kuasa dari RUDIANTO SULYAWAN dengan harga tanah Rp. 1.660.750.000,- (satu miliar enam ratus enam puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi untuk penandatanganan AJB Nomor : 187/2016 tanggal 18 Agustus 2016 oleh SUAIB TAHIYA dilakukan di Kota Jambi yang dibawa langsung oleh THERESIA DEWI KOROH DIMU dan VERONIKA SYUKUR, diluar dari wilayah jabatan THERESIA DEWI KOROH DIMU selaku Notaris di Labuan Bajo.
- Bahwa pembayaran tanah milik SUPARDI TAHIYA, SUAIB TAHIYA, dan H. SUKRI dilakukan juga di hadapan Notaris THERESIA DEWI KOROH DIMU dengan cara SANIATMA ADINOTO memberikan 14 (empat belas) lembar cek Bank Permata atas nama PT. Prima Pratama Citra dengan total pembayaran sebesar Rp. 25.154.000.000,- (dua puluh lima miliar seratus lima puluh empat juta rupiah) yang besaran nominal uang dalam cek-cek tersebut atas permintaan BURHANUDIN yang di tulis pada setiap lembaran cek tertulis hanya nominal besaran jumlah uang sedangkan nama penerima tiap lembar ceknya tidak ditulis.
- Bahwa selanjutnya setelah menerima pembayaran dari SANIATMA ADINOTO tersebut, MASSIMILIANO DE REVIZIIS, NIZZARDO FABIO dan BURHANUDIN berangkat ke Bali untuk melakukan pencairan dengan membuka rekening pada Bank Permata dengan rincian sebagai berikut :
 - Rekening Nomor 9832655578 atas nama MASSIMILIANO DE REVIZIIS pada PT Bank Permata Cabang Denpasar D. Sartika terdapat transaksi uang masuk tanggal 11 Agustus 2016 sebanyak 5 (lima) kali berasal dari pembayaran uang transaksi tanah milik SUPARDI TAHIYA, SUAIB TAHIYA

Hal 27 dari 281 hal

Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan H. SUKRI yang dibayarkan oleh pihak PT. Prima Pratama Citra melalui cek sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), cek sebesar Rp. 1.862.000.000,- (satu miliar delapan ratus enam puluh dua juta rupiah), cek sebesar Rp. 1.902.000.000,- (satu miliar sembilan ratus dua juta rupiah) dan cek sebesar Rp. 1.600.000.000,- (satu miliar enam ratus juta rupiah) sehingga total cek tersebut sebesar Rp. 7.014.000.000,- (tujuh miliar empat belas juta rupiah). Selanjutnya oleh MASSIMILIANO DE REVIZIIS diberikan kepada THERESIA DEWI KOROH DIMU sebesar Rp. 123.270.000,- (seratus dua puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 6.890.730.000,- (enam miliar delapan ratus sembilan puluh juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) dinikmati oleh MASSIMILIANO DE REVIZIIS.

- Rekening Nomor 9832658488 atas nama MASSIMILIANO DE REVIZIIS dan NIZZARDO FABIO pada PT Bank Permata Cabang Denpasar D. Sartika terdapat transaksi uang masuk tanggal 11 Agustus 2016 sebanyak 3 (tiga) kali berasal dari pembayaran uang transaksi tanah milik SUPARDI TAHIYA, SUAIB TAHIYA dan H. SUKRI yang dibayarkan oleh pihak PT. Prima Pratama Citra melalui cek sebesar Rp.2.900.000.000,- (dua miliar sembilan ratus juta rupiah), cek sebesar Rp.440.250.000,- (empat ratus empat puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan cek sebesar Rp. 3.728.000.000,- (tiga miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta rupiah).
- Adapun penerimaan pembayaran yang diterima oleh MASSIMILIANO DE REVIZIIS dan NIZZARDO FABIO menggunakan rekening bersama dengan nomor 9832658488, dilakukan transaksi keluar untuk didistribusikan yaitu :
- Ditarik tunai beberapa kali untuk diberikan kepada VERONIKA SYUKUR total Rp. 2.618.947.211,- (dua miliar enam ratus delapan belas juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus sebelas rupiah).
- Di transfer ke rekening nomor 77262853 pada Bank Mandiri Cabang Dewi Sartika atas nama THERESIA DEWI KOROH DIMU sebesar Rp. 440.250.000,- (empat ratus empat puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pajak penjualan (SUPARDI TAHIYA, SUAIB TAHIYA dan H. SUKRI).
- Di transfer ke rekening nomor 77264236 pada Bank Mandiri atas nama SUPARDI TAHIYA sebesar Rp. 1.405.000.000,- (satu miliar empat ratus lima juta rupiah) dan SUPARDI TAHIYA hanya disuruh oleh VERONIKA

Hal 28 dari 281 hal

Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYUKUR dan THERESIA DEWI KOROH DIMU untuk menandatangani kuitansi tanpa mengetahui berapa jumlahnya. Dari uang masuk ke rekening sebesar Rp. 1.405.000.000,- (satu miliar empat ratus lima juta rupiah) diberikan kepada VERONIKA SYUKUR sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), ENTE PUASA sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), ANDI RIZKI NUR CAHYA D alias IBU ASMA sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan SUAIB TAHIYA sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) sehingga dinikmati oleh SUPARDI TAHIYA sebesar Rp. 730.000.000,- (tujuh ratus tiga puluh juta rupiah).

- Di transfer ke rekening nomor 77264497 pada Bank Mandiri atas nama H. SUKRI sebesar Rp. 2.453.000.000,- (dua miliar empat ratus lima puluh tiga juta rupiah). Namun dalam perjanjian awal antara H. SUKRI dengan ANDI RIZKI NUR CAHYA D alias IBU ASMA, harga tanah H. SUKRI sebesar Rp. 1.275.000.000,- (satu miliar dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah), sehingga ketika menerima pembayaran harga tanah, buku tabungan dan kartu ATM H. SUKRI dipegang oleh ANDI RIZKI NUR CAHYA D alias IBU ASMA yang memberikan uang ke H. SUKRI secara bertahap sehingga total yang diterima oleh H. SUKRI sebesar Rp. 1.380.000.000,- (satu miliar tiga ratus delapan puluh juta rupiah). Selain itu H. SUKRI juga meminta ke ANDI RIZKI NUR CAHYA D alias IBU ASMA untuk diberikan kepada ENTE PUASA sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan H. MUSTAJIB sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) sebagai pihak seolah-olah tapal batas tanah milik H. SUKRI. Adapun sisanya sekitar Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) di nikmati oleh ANDI RIZKI NUR CAHYA D alias IBU ASMA.
- Di transfer ke rekening THERESIA DEWI KOROH DIMU nomor 77262853 pada Bank Mandiri sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
- Rekening Nomor 9832655969 atas nama NIZZARDO FABIO pada PT Bank Permata Cabang Denpasar D. Sartika terdapat transaksi uang masuk tanggal 11 Agustus 2016 berasal dari pembayaran uang transaksi tanah milik SUPARDI TAHIYA, SUAIB TAHIYA dan H. SUKRI yang dibayarkan oleh pihak PT. Prima Pratama Citra melalui cek sebanyak 4 (empat) lembar yaitu cek sebesar Rp. 1.100.000.000,- (satu miliar seratus juta rupiah), cek sebesar Rp. 2.372.000.000,- (dua miliar tiga ratus tujuh



puluh dua juta rupiah), cek sebesar Rp. 1.100.000.000,- (satu miliar seratus juta rupiah) dan cek sebesar Rp. 1.157.000.000,- (satu miliar seratus lima puluh tujuh juta rupiah) sehingga total diterima Rp. 5.729.000.000,- (lima miliar tujuh ratus dua puluh sembilan juta rupiah). Selanjutnya penerimaan pembayaran yang diterima NIZZARDO FABIO tersebut diberikan kepada MASSIMILIANO DE REVIZIIS total sebesar Rp. 178.000.000,- (seratus tujuh puluh delapan juta rupiah), VERONIKA SYUKUR sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sisanya sebesar Rp. 5.201.000.000,- (lima miliar dua ratus satu juta rupiah) dinikmati oleh NIZZARDO FABIO.

- Rekening Nomor 9832655519 atas nama BURHANUDIN pada PT Bank Permata Cabang Denpasar D. Sartika terdapat transaksi uang masuk tanggal 11 Agustus 2016 berasal dari pembayaran uang transaksi tanah milik SUPARDI TAHIYA, SUAIB TAHIYA dan H. SUKRI yang dibayarkan oleh pihak PT. Prima Pratama Citra melalui cek yaitu sebanyak 2 (dua) kali yaitu cek sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan cek sebesar Rp. 4.842.750.000,- (empat miliar delapan ratus empat puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total diterima pembayaran oleh BURHANUDIN sebesar Rp. 5.342.750.000,- (lima miliar tiga ratus empat puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya penerimaan hasil pembayaran yang diterima oleh BURHANUDIN dengan nomor rekening 9832655519 diberikan kepada ARMANSYAH dengan total sebesar Rp. 557.000.000,- (lima ratus lima puluh tujuh juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 4.785.750.000,- (empat miliar tujuh ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dinikmati oleh BURHANUDIN.
- Bahwa setelah SHM nomor 02482 dengan luas tanah 12.020 M² atas nama DAI KAYUS terbit, langsung dibuat AJB dihadapan Notaris LALU MUHAMAD SUPRIANDI, Notaris pada Labuan Bajo dengan nilai harga tanah sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) disaksikan oleh AFRIZAL alias UNYIL, MARIA SRIKANDI alias IBU KENDI karena sejak awal memang sudah ditawarkan kepada ISMAIL HIRAWAN oleh AFRIZAL alias UNYIL, tetapi harga tanah yang dibayarkan oleh ISMAIL HIRAWAN untuk SHM nomor 02482 dengan luas tanah 12.020 M² atas nama DAI KAYUS sebesar Rp. 3.606.000.000,- (tiga miliar enam ratus enam juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pembayaran oleh ISMAIL HIRAWAN sebesar Rp. 3.606.000.000,- (tiga miliar enam ratus enam juta rupiah) diterima oleh DAI KAYUS sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), MURSALIM (anak DAI KAYUS) sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), ALFANDRI alias ANDI sebesar Rp. 735.000.000,- (tujuh ratus tiga puluh lima juta rupiah), AFRIZAL atau UNYIL sebesar Rp. 370.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah), ERLAN YUSRAN sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), MARIA SRIKANDI alias IBU KENDI sebesar Rp. 370.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah), SIRATURAHMI sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) namun biaya BPHTB sebenarnya hanya sebesar Rp.13.227.000,- (tiga belas juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah), selisih Rp. 46.773.000,- (empat puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) dinikmati SIRATURAHMI, ENTE PUASA sebesar Rp 100.000.000,-, (seratus juta rupiah), adapun sisa dari pembayaran oleh ISMAIL HIRAWAN sebesar Rp. 581.000.000,- (lima ratus delapan puluh satu juta rupiah) dinikmati oleh MATHEUS SANIANG NAGA SIAGIAN.
- Bahwa SHM nomor 02492 seluas 6094 M² dijual oleh MAHMUD NIP ke MATHIUS SANIANG NAGA SIAGIAN yang sejak awal membiayai pengurusan sertifikat dengan harga pada AJB No. 286/2016 tanggal 29 November 2016 seharga Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) namun dibayarkan sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta rupiah), selanjutnya oleh MATHIUS SANIANG NAGA SIAGIAN dijual kepada GREGORIUS ANTAR AWAL berdasarkan AJB Nomor : 15/2017 sebesar Rp. 1.350.000.000,- (satu miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan sertifikat hak milik MAHMUD NIP Nomor : 02493 dijual oleh MAHMUD NIP kepada TOPENOS TOREN JAP sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), sedangkan harga AJB Nomor : 02/JB/KK/II/2017 tanggal 19 Januari 2017 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah). Hasil transaksi penjualan tanah atas nama MAHMUD NIP terhadap kedua bidang tanah yang lokasinya berada di Karanga/Torro Lemma Batu Kallo, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, MAHMUD NIP menikmati sebesar Rp. 1.800.000.000,- (satu miliar delapan ratus juta rupiah) dan MATHIUS SANIANG NAGA SIAGIAN mendapat Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa selain telah diterbitkan SHM atas nama H. SUKRI, SUPARDI, SUAIB TAHIYA, DAI KAYUS, dan MAHMUD NIP diatas lokasi tanah Pemerintah

Hal 31 dari 281 hal

Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Manggarai Barat di Karanga/Torro Lemma Batu Kallo, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, terdapat juga pemohon lain yaitu ENTE PUASA, SYARIFUDIN, SYAMSUDIN, BOHORUDING, MUHAYANG, ARI ROUFU, SUARDI, JUADI KORO, HASANUDING dan DAHERING KORO yang dimohonkan sejak tahun 2013 oleh ENTE PUASA akan tetapi depending atau tidak diterbitkan Sertifikat Hak Miliknya oleh pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat dikarenakan ada sanggahan dari ADAM DJUDJE. Selanjutnya, agar bisa diproses oleh pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat, ENTE PUASA melakukan kesepakatan dengan ADAM DJUDJE yaitu apabila tanah permohonan ENTE PUASA dan kesembilan orang lainnya laku terjual, maka ENTE PUASA akan memberikan uang sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) kepada ADAM DJUDJE. Setelah ada kesepakatan antara ENTE PUASA dan ADAM DJUDJE, MARTHEN NDEO meneruskan permohonan sertifikat yang dimohonkan oleh ENTE PUASA, dan kesembilan orang lainnya tersebut sampai diterbitkan gambar ukur. Adapun alas hak atas tanah yang diajukan berupa Surat Penyerahan Tanah Adat (Ulayat) dari H. ISHAKA dan HAKU MUSTAFA yang diterima dari KAMNIS HAMNU seolah-olah di tahun 1993 adalah tidak benar karena alas hak tanah tersebut baru dibuat di tahun 2013 saat mengajukan sertifikat dengan cara membuat seolah-olah asli alas hak atas tanah tersebut dengan mengupah ANTONIUS HANI sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah). Selanjutnya, ENTE PUASA dan DAHERING KORO bertemu dengan FRANKY CH. LETIK untuk menawarkan tanah di Karanga/Torro Lemma Batu Kallo, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat tersebut.

- Bahwa ENTE PUASA dan DAHERING KORO sempat menunjukkan lokasi dari jarak jauh melalui perahu motor lokasi tanah tersebut kepada FRANKY CH. LETIK yang selanjutnya menyetujui penawaran tanah oleh ENTE PUASA dan DAHERING KORO yang ditindak lanjuti dengan pembayaran sebesar Rp. 2.800.000.000,- (dua miliar delapan ratus juta rupiah), yang dari pembayaran tersebut, DAHERING KORO mendapatkan sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) yang dibagikan kepada MUHANYANG, JUADI KORO, SUKAWATI masing-masing sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan sisanya DAHERING KORO menikmati sebesar Rp. 1.380.000.000,-

Hal 32 dari 281 hal Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu miliar tiga ratus delapan puluh juta rupiah), sedangkan ENTE PUASA mendapatkan Rp. 1.300.000.000,- (satu miliar tiga ratus juta rupiah).

- Bahwa pada tahun 2017, terdapat permohonan penerbitan sertifikat tanah diatas tanah Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat di Karanga/Torro Lemma Batu Kallo, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat atas nama FATIMA BADO SALAM yang pengurusan permohonan sertifikat dilakukan oleh ALIMUDIN SIDIK dengan menggunakan alas hak penyerahan tanah dari tua adat kepada KAMNIS HAMNU yang merupakan suami dari FATIMA BADO SALAM. Selanjutnya dalam proses permohonan sertifikat tersebut, I GUSTI MADE ANOM KALER selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat menyampaikan bahwa tanah tersebut merupakan tanah Pemda Kabupaten Manggarai Barat, selanjutnya ALIMUDN SIDIK bertemu dengan AMBROSIUS SUKUR dan hasil dari pertemuan tersebut selanjutnya AMBROSIUS SUKUR membuat surat kepada Terdakwa pada tanggal 22 September 2017 yang ditandatangani oleh FATIMA BADO SALAM, atas surat tersebut Terdakwa pada tanggal 02 Oktober 2017 menjawab surat dari FATIMA BADO SALAM yang menerangkan bahwa tanah warisan dari KAMNIS HAMNU yang terletak di Toro Lemma Batu Kallo, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat seluas kurang lebih 15.000 M2 dapat diproses sertifikat ke Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat sehingga akhirnya permohonan sertifikat atas nama FATIMA BADO SALAM diproses oleh CHRISTINA MUDASIH selaku Kasi Pengukuran dan Pemetaan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat sampai dibuatkan gambar ukur dan peta bidang.
- Bahwa permohonan Sertifikat Hak Pakai yang diajukan oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat pada tahun 2015 berkasnya sudah dinyatakan LENGKAP oleh JOSIAS BENYAMIN LONA selaku Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tanggal 20 April 2015, namun sampai dengan tahun 2017 tidak diterbitkan Sertifikat Hak Pakai sedangkan proses pengukuran telah dilakukan walaupun dalam proses pengukuran itu sengaja menghilangkan sebahagian tanah Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat dikarenakan ada persetujuan Terdakwa.
- Bahwa berkas permohonan Sertifikat Hak Pakai yang dinyatakan lengkap tersebut hilang di Bidang Pengukuran dan Pemetaan Kanwil BPN Provinsi Nusa Tenggara Timur yang Kepala Bidanganya adalah ALBERTINA RESDYANA

Hal 33 dari 281 hal

Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NDAPAMERANG. Selanjutnya masih di tahun 2017, terdapat pemohon lain untuk permohonan pembuatan SHM di atas tanah Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat di Karanga/Torro Lemma Batu Kallo, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat atas nama GORIES MERE dan SUKARNI ILYAS yang mengajukan permohonan penerbitan SHM seluas kurang lebih 30.000 M² (3 Ha) ke Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat melalui MUHAMMAD ACHYAR dengan menggunakan alas hak dari ABDULLAH TENGKU DAENG MALEWA.

- Bahwa tanah seluas 30.000 M² (3 Ha) yang diajukan oleh GORIES MERE dan SUKARNI ILYAS tersebut berasal dari jual beli antara GORIES MERE (pembeli) dan MUHAMMAD ACHYAR (penjual) dengan harga sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) dan dipanjar oleh GORIES MERE sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), sedangkan MUHAMMAD ACHYAR bisa menjual tanah tersebut berdasarkan kuasa dari LUKMAN HAKIM untuk mengurus dan menyelesaikan permasalahan terkait harta warisan tanah kurang lebih 40 Ha di daerah Wae Cicu.
- Bahwa permohonan penerbitan SHM seluas kurang lebih 30.000 M² (3 Ha) yang diajukan GORIES MERE dan SUKARNI ILYAS melalui MUHAMMAD ACHYAR sempat didaftarkan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat namun langsung ditolak oleh I GUSTI MADE ANOM KALER karena alas haknya menggunakan alas hak dari ABDULLAH TENGKU DAENG MALEWA yang bukan fungsionaris adat Kedaluan Nggorang dan lokasi obyek tanah berada di tanah Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat walaupun data yuridis alas hak atas tanah tersebut sudah ditandatangani oleh SYARIFUDIN MALIK selaku Lurah Labuan Bajo dan IMRAN selaku Camat Komodo.
- Bahwa pada bulan Desember 2017, Terdakwa memanggil ahli waris fungsionaris adat Kedaluan Nggorang yaitu H. RAMANG ISHAKA dan menyampaikan akan melepaskan tanah Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat di Karanga/Torro Lemma Batu Kallo, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat diantaranya untuk mengakomodir permohonan GORIES MERE dan SUKARNI ILYAS yang dibawa oleh MUHAMMAD ACHYAR, akan tetapi permintaan Terdakwa tersebut ditolak oleh H. RAMANG ISHAKA.
- Bahwa pada bulan Januari tahun 2018, MUHAMMAD ACHYAR dan GORIES MERE bertemu dengan Terdakwa di rumah jabatan Bupati Manggarai Barat,

Hal 34 dari 281 hal Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa memanggil I GUSTI MADE ANOM KALER. Dalam pertemuan tersebut membicarakan permohonan atas nama GORIES MERE dan SUKARNI ILYAS yang ditolak oleh I GUSTI MADE ANOM KALER dengan alasan karena lokasi tanah yang dimohonkan adalah tanah Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat. Hasil pembicaraan tersebut, Terdakwa mengeluarkan Surat Pernyataan tertanggal 8 Januari 2018 diatas materai 6000 tanpa adanya persetujuan dari DPRD Kabupaten Manggarai Barat yang isinya menyatakan Pemkab merasa tidak bisa memaksa diri atau berniat memiliki lahan atau tanah tersebut karena antara lain tanah tersebut tidak memiliki dokumen atau bukti penyerahan yang asli, pihak Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat sampai dengan sekarang tidak bisa memanfaatkan aset tanah di Karanga/Torro Lemma Batu Kallo, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat seluas kurang lebih 30 Ha.

Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan Pasal 45 Ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 5 Jo. Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

- Bahwa selanjutnya MUHAMMAD ACHYAR menemui CAITANO SOARES di ruang kerjanya dengan membawa Surat Pernyataan diatas materai 6000 yang dikeluarkan oleh Terdakwa tersebut diatas. Atas arahan CAITANO SOARES, MUHAMMAD ACHYAR mengajukan kembali penerbitan sertifikat ke Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat di lokasi yang sama namun luasnya menjadi 50.000 M² (5 Ha) dengan menggunakan alas hak dari ADAM DJUDJE dan yang menjadi pemohonnya adalah DAVID ANDRE PRATAMA. Adapun arahan dari CAITANO SOARES tersebut tidak disetujui oleh I GUSTI MADE ANOM KALER karena lokasi tanah yang dimohonkan adalah tanah Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat akan tetapi CAITANO SOARES tetap memproses permohonan yang diajukan oleh MUHAMMAD ACHYAR atas nama DAVID ANDRE PRATAMA.
- Bahwa dalam proses pengurusan SHM seluas 5 Ha, GORIES MERE bersama MUHAMMAD ACHYAR mendatangi I GUSTI MADE ANOM KALER di ruang kerjanya untuk menanyakan perkembangan dan tindak lanjut permohonan penerbitan SHM oleh DAVID ANDRE PRATAMA.
- Bahwa akibat dari diterbitkannya Surat Pernyataan diatas Materai 6000 oleh Terdakwa di atas tanah yang dimohonkan seluas kurang lebih 5 Ha, telah

Hal 35 dari 281 hal Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibangun vila oleh DAVID ANDRE PRATAMA, dan juga di bangun penyelesaian pagar gapura oleh ADAM DJUDJE sebagai pintu masuk di lokasi Karanga/Torro Lemma Batu Kallo, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat serta kunci pagar gapura dikuasai oleh ADAM DJUDJE dan DAVID ANDRE PRATAMA. Selain itu MUHAMMAD ACHYAR dan GABRIEL MAHAL memasang plang bertulisan "Tanah di Karanga seluas \pm 30 Ha milik H. ADAM DJUDJE di bawah pengawasan Pengacara/Advocad GABRIEL MAHAL dan MUHAMMAD ACHYAR" sedangkan MUHAMMAD ACHYAR mengetahui pasti tanah tersebut milik Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat.

- Bahwa akibat perbuatan melawan hukum Terdakwa pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 yang menyetujui data yuridis dan data fisik untuk proses permohonan Sertipikat Hak Milik (SHM) atas nama H. SUKRI, SUPARDI TAHIYA, SUAIB TAHIYA, MAHMUD NIP dan DAI KAYUS yang berada di lokasi tanah Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat dan menyetujui peta bidang tanah milik Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat seluas kurang lebih 24 Ha yang diketahuinya secara pasti luas tanah milik Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat seluas kurang lebih 30 Ha di Karanga/Torro Lemma Batu Kallo, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat. Selanjutnya pada bulan Januari tahun 2018, Terdakwa membuat Surat Pernyataan tertanggal 8 Januari 2018 yang isinya menyatakan Pemkab merasa tidak bisa memaksa diri atau berniat memiliki lahan atau tanah tersebut karena antara lain tanah tersebut tidak memiliki dokumen atau bukti penyerahan yang asli, memperkaya orang lain yaitu ABDUL IPUR sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), SUPARDI TAHIYA sebesar Rp. 725.000.000,- (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah), SUAIB TAHIYA sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah), H. SUKRI sebesar Rp. 1.380.000.000,- (satu miliar tiga ratus delapan puluh juta rupiah), H. MUSTAJIB sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), DAI KAYUS sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), MAHMUD NIP sebesar Rp. 1.800.000.000,- (satu miliar delapan ratus juta rupiah), ENTE PUASA sebesar Rp. 1.870.000.000,- (satu miliar delapan ratus tujuh puluh juta rupiah), ANDI RIZKI NUR CAHYA D alias IBU ASMA sebesar Rp. 775.000.000,- (tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah), VERONIKA SYUKUR sebesar Rp. 3.068.947.211,- (tiga miliar enam puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus sebelas rupiah), THERESIA DEWI KOROH DIMU sebesar Rp. 1.123.270.000 (satu

Hal 36 dari 281 hal

Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliar seratus dua puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), BURHANUDIN sebesar Rp. 5.342.750.000,- (lima miliar tiga ratus empat puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), ARMANSYAH sebesar Rp. 557.000.000,- (lima ratus lima puluh tujuh juta rupiah), MASSIMILIANO DE REVIZIIS sebesar Rp 7.014.000.000,- (tujuh miliar empat belas juta rupiah), NIZZARDO FABIO sebesar Rp 5.729.000.000,- (lima miliar tujuh ratus dua puluh sembilan juta rupiah), ALFANDRI alias ANDI sebesar Rp 1.015.000.000,- (satu miliar lima belas juta rupiah), AFRIZAL alias UNYIL sebesar Rp 370.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah), SIRATURAHMI sebesar Rp 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah), FREDY E. J. MARAMIS sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), MARTHEN NDEO sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), MUHAMMAD ACHYAR sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), DAVID ANDRE PRATAMA menguasai tanah seluas 5 Hektar (Ha), ADAM DJUDJE penguasaan tanah seluas 30 Hektar (Ha) dalam bentuk pagar gapura menuju lokasi tanah tersebut.

- Bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum Terdakwa pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 yang menyetujui data yuridis dan data fisik untuk proses permohonan Sertipikat Hak Milik (SHM) Atas Nama H. SUKRI, SUPARDI TAHIYA, SUAIB TAHIYA, MAHMUD NIP, DAI KAYUS yang berada di lokasi tanah Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat dan menyetujui peta bidang tanah milik Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat seluas kurang lebih 24 Ha yang diketahuinya secara pasti luas tanah milik Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat seluas kurang lebih 30 Ha di Karanga/Torro Lemma Batu Kallo, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat. Selanjutnya pada bulan Januari tahun 2018, Terdakwa membuat Surat Pernyataan tertanggal 8 Januari 2018 tanpa persetujuan DPRD Kabupaten Manggarai Barat yang isinya menyatakan Pemkab merasa tidak bisa memaksa diri atau berniat memiliki lahan atau tanah tersebut karena antara lain tanah tersebut tidak memiliki dokumen atau bukti penyerahan yang asli, pihak Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat sampai dengan sekarang tidak bisa memanfaatkan aset tanah di Karanga/Torro Lemma Batu Kallo, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat seluas kurang lebih 30 Ha sehingga mengakibatkan keuangan negara sebesar Rp. 1.301.011.161.288,- (satu triliun tiga ratus satu miliar sebelas juta seratus enam

Hal 37 dari 281 hal

Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh satu ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah) sebagaimana Laporan Akuntan Independen Nomor : 004/PH/OPKJ/AUP/II/XII/20 tanggal 23 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh PUPUNG HERU, Ak, CPA pada KAP. PUPUNG HERU.

Perbuatan Terdakwa bersama sama dengan terdakwa lain yang dilakukan penuntutan secara terpisah yakni AMBROSIOUS SUKUR, ABDULLAH NUR, MARTHEN NDEO, MASSIMILIANO DE REVIZIIS, NIZZARDO FABIO, ANDI RIZKI NUR CAHYA D alias IBU ASMA, ENTE PUASA, VERONIKA SYUKUR, THERESIA DEWI KOROH DIMU, SUPARDI TAHIYA, H. SUKRI, DAI KAYUS, MAHMUD NIP, AFRIZAL alias UNYIL, CAITANO SOARES dan MUHAMMAD ACHYAR serta ADAM DJUDJE sebagaimana diatur dan diancam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke - (1) KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

SUBSIDIAIR :

- Bahwa Terdakwa AGUSTINUS CHRISTOFORUS DULA selaku Bupati Manggarai Barat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.53-461 Tahun 2010 tanggal 9 Agustus 2010 tentang Pengesahan Saudara Drs. AGUSTINUS CH DULA sebagai Bupati Manggarai Barat Masa Jabatan 2010 sampai dengan 2015 dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.53-700 Tahun 2016 tanggal 12 Februari 2016 tentang Pengesahan Saudara Drs. AGUSTINUS CH DULA sebagai Bupati Manggarai Barat Masa Jabatan 2016 sampai dengan Tahun 2021, bersama sama dengan terdakwa lain yang dilakukan penuntutan secara terpisah yaitu AMBROSIOUS SUKUR, ABDULLAH NUR, MARTHEN NDEO, MASSIMILIANO DE REVIZIIS, NIZZARDO FABIO, ANDI RIZKI NUR CAHYA D alias IBU ASMA, ENTE PUASA, VERONIKA SYUKUR, THERESIA DEWI KOROH DIMU, SUPARDI TAHIYA, H. SUKRI, DAI KAYUS, MAHMUD NIP, AFRIZAL alias UNYIL, CAITANO SOARES dan MUHAMMAD ACHYAR serta ADAM DJUDJE (tidak dilakukan penuntutan karena telah meninggal dunia), pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi di tahun 2013 sampai dengan tahun 2018, bertempat di Karanga/Torro Lemma Batu Kallo, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Kantor Bupati Manggarai

Hal 38 dari 281 hal Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat jalan Prof. W. Z. Johanes, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, rumah jabatan Bupati Manggarai Barat jalan SMA Negeri 1 Komodo, Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Kantor Kecamatan Komodo jalan Gabriel Gampur, Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat jalan Frans Nala Nomor 12, Labuan Bajo, Manggarai Barat, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kanwil BPN) Provinsi Nusa Tenggara Timur jalan Frans Seda Nomor 70, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Kantor Notaris THERESIA DEWI KOROH DIMU jalan Sukarno-Hatta, Labuan Bajo, Manggarai Barat, rumah ENTE PUASA di Kampung Ujung, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, rumah kontrakan ANTONIUS HANI di daerah Gua Firdaus, Labuan Bajo, di Kota Jambi, Provinsi Jambi, di Bank Permata D Sartika Bali jalan Dewi Sartika Nomor 88, Kota Denpasar, Provinsi Bali atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Klas IA, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi maupun Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi, namun karena satu sama lain ada sangkut pautnya serta sebahagian besar saksi berada di Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang (UU) RI Nomor 8 Tahun 1981 serta ketentuan Pasal 5 UU Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Klas IA berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berlanjut, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu menguntungkan orang lain yaitu ABDUL IPUR sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), SUPARDI TAHIYA sebesar Rp. 725.000.000,- (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah), SUAIB TAHIYA sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah), H. SUKRI sebesar Rp. 1.380.000.000,- (satu miliar tiga ratus delapan puluh juta rupiah), H. MUSTAJIB sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), DAI KAYUS sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), MAHMUD NIP sebesar Rp.

Hal 39 dari 281 hal

Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.800.000.000,- (satu miliar delapan ratus juta rupiah), ENTE PUASA sebesar Rp. 1.870.000.000,- (satu miliar delapan ratus tujuh puluh juta rupiah), ANDI RIZKI NUR CAHYA D alias IBU ASMA sebesar Rp. 775.000.000,- (tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah), VERONIKA SYUKUR sebesar Rp. 3.068.947.211,- (tiga miliar enam puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus sebelas rupiah), THERESIA DEWI KOROH DIMU sebesar Rp. 1.123.270.000 (satu miliar seratus dua puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), BURHANUDIN sebesar Rp. 5.342.750.000,- (lima miliar tiga ratus empat puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), ARMANSYAH sebesar Rp. 557.000.000,- (lima ratus lima puluh tujuh juta rupiah), MASSIMILIANO DE REVIZIIS sebesar Rp 7.014.000.000,- (tujuh miliar empat belas juta rupiah), NIZZARDO FABIO sebesar Rp 5.729.000.000,- (lima miliar tujuh ratus dua puluh sembilan juta rupiah), ALFANDRI alias ANDI sebesar Rp 1.015.000.000,- (satu miliar lima belas juta rupiah), AFRIZAL alias UNYIL sebesar Rp 370.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah), SIRATURAHMI sebesar Rp 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah), FREDY E. J. MARAMIS sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), MARTHEN NDEO sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), MUHAMMAD ACHYAR sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), DAVID ANDRE PRATAMA menguasai tanah seluas 5 Hektar (Ha), ADAM DJUDJE penguasaan tanah seluas 30 Hektar (Ha) dalam bentuk pagar gapura menuju lokasi tanah tersebut, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yaitu Terdakwa sebagai Bupati Manggarai Barat dan juga selaku Pemegang Kekuasaan Barang Milik Daerah, pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2015, telah menyetujui data yuridis dan data fisik untuk proses permohonan Sertipikat Hak Milik (SHM) atas nama H. SUKRI, SUPARDI TAHIYA, SUAIB TAHIYA, MAHMUD NIP dan DAI KAYUS yang berada di lokasi tanah Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat dan menyetujui peta bidang tanah milik Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat seluas kurang lebih 24 Ha yang diketahuinya secara pasti luas tanah Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat seluas kurang lebih 30 Ha di Karanga/Torro Lemma Batu Kallo, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat. Selanjutnya pada bulan Januari tahun 2018, Terdakwa membuat Surat Pernyataan tertanggal 8 Januari 2018 tanpa persetujuan DPRD Kabupaten Manggarai

Hal 40 dari 281 hal

Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat yang isinya menyatakan Pemkab merasa tidak bisa memaksa diri atau berniat memiliki lahan atau tanah tersebut karena antara lain tanah tersebut tidak memiliki dokumen atau bukti penyerahan yang asli, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yaitu merugikan keuangan negara sebesar Rp. 1.301.011.161.288,- (satu triliun tiga ratus satu miliar sebelas juta seratus enam puluh satu ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah) sebagaimana Laporan Akuntan Independen Nomor : 004/PH/OPKJ/AUP/II/XII/20 tanggal 23 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh PUPUNG HERU, Ak, CPA pada KAP. PUPUNG HERU, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tahun 1989, H. ISHAKA dan HAKU MUSTAFA yang merupakan fungsionaris adat Kedaluan Nggorang memberikan tanah yang berlokasi di Karanga/Torro Lemma Batu Kallo, Desa Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat secara adat Kapu Manuk Lele Tuak kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Manggarai yang saat itu dijabat oleh GASPAR PARANG EHOK untuk kepentingan membangun Sekolah Perikanan dan ditunjukkan lokasinya oleh H. ISHAKA dan HAKU MUSTAFA yang berada di Karanga/Torro Lemma Batu Kallo, Desa Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai.
- Bahwa kemudian pada tanggal 20 Juli 1993, Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Manggarai membentuk Tim untuk melakukan pengecekan atas tanah yang sudah diserahkan kepada Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Manggarai di Lokasi Karanga/Torro Lemma Batu Kallo, Desa Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai yang beranggotakan antara lain G. FRANSISKUS NAHAS (Kabag Pemerintahan Kabupaten Manggarai) dan PETRUS TAGUS (Kabag Umum dan Perlengkapan Pemerintah Kabupaten Manggarai) dan tim tersebut ada menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang bersumber dari anggaran Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Manggarai sebagai uang tuak kepada H. ISHAKA dan HAKU MUSTAFA.
- Bahwa pada tanggal 26 April 1997, H. ISHAKA meminta bantuan ADAM DJUDJE (penata tanah), DONATUS AMPUT (penata tanah), dan KAMNIS HAMNU (penata tanah) untuk melakukan penataan lokasi tanah yang akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah Tk. II Mangarai yaitu tanah yang berlokasi di Karanga/Torro Lemma Batu Kallo, Desa Labuan Bajo,

Hal 41 dari 281 hal Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai. Selanjutnya berdasarkan penataan lokasi tanah yang dilakukan oleh ADAM DJUDJE, DONATUS AMPUT, dan KAMNIS HAMNU tersebut, lalu dibuatkan gambar lokasi tanah di Torro Lemma Batu Kallo dan Karanga tertanggal 26 April 1997 yang ditandatangani oleh ADAM DJUDJE, DONATUS AMPUT, KAMNIS HAMNU, ZULKARNAEN DJUDJE (anak ADAM DJUDJE) serta ditandatangani juga oleh H. ISHAKA dan HAKU MUSTAFA sebagai pihak yang mengetahui/disahkan gambar lokasi tanah tersebut.

- Bahwa pada bulan Mei 1997, tanah yang berada di Karanga/Torro Lemma Batu Kallo, Desa Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai dilakukan pengukuran oleh petugas ukur dari Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai yaitu TAGUR ALBERTUS, YULIUS SAE dan N. OKTOVIANUS RIHI, selanjutnya hasil dari pengukuran tersebut luas tanah di Karanga adalah seluas kurang lebih 300.988 M² yang dibuatkan surat ukur tertanggal 14 Mei 1997 yang ditandatangani oleh H. ISHAKA dan YOSEPH LATIF sebagai Kepala Desa Labuan Bajo.
- Bahwa pada tanggal 17 Januari 1998, H. ISHAKA dan HAKU MUSTAFA selaku fungsionaris adat Nggorang membuat Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Manggarai yang isinya Tanah adat yang telah diserahkan kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Manggarai pada tanggal 14 Mei 1997, yang letaknya di Karanga/Torro Lemma Batu Kallo, Desa Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai sesuai peta gambar sketsa hasil pengukuran oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai yang disaksikan oleh YOSEPH LATIF sebagai Kepala Desa Labuan Bajo dan YOS VINS NDAHUR sebagai Camat Komodo dengan uang sirih pinang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Manggarai, selanjutnya tanah di Karanga/Torro Lemma Batu Kallo, Desa Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai seluas kurang lebih 300.988 M² tersebut dicatatkan di dalam aset Pemerintah Daerah Tingkat II Manggarai.
- Bahwa pada tahun 2003, terjadi Pemekaran Daerah Tingkat II Manggarai menjadi Kabupaten Manggarai dan Kabupaten Manggarai Barat. Selanjutnya di tahun 2005 dilakukan penyerahan Personil, Pendanaan, Sarana dan Prasarana serta Dokumen (P3D) dari Pemerintah Kabupaten

Hal 42 dari 281 hal Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manggarai kepada Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat yang berdasarkan Berita Acara Serah Terima dan Lampiran Dokumen Hasil Klarifikasi P3D antara Pemerintah Kabupaten Manggarai kepada Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Nomor : Pem.115/30a/I/2005 tanggal 24 Januari 2005 yang ditanda tangani oleh DJIDON de HAAN selaku Penjabat Bupati Manggarai Barat dan ANTONY BAGUL DAGUR selaku Bupati Manggarai yang disaksikan oleh MATHEUS HAMSI selaku Ketua DPRD Kabupaten Manggarai Barat, ONGGE YOHANES selaku Ketua DPRD Kabupaten Manggarai yang dalam penyerahan tersebut tercantum dokumen terkait lokasi tanah di Karanga/Torro Lemma Batu Kallo, Desa Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai berupa :

- Asli Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah (4 berkas);
- Asli Kuitansi Panjar dari Uang Ganti Rugi Tanah Sebesar Rp. 10.000.000 (5 Lembar);
- Asli Kuitansi Pelunasan Uang Ganti Rugi Tanah seperti Tersebut dalam Kuitansi tanggal 14 Mei 1997 (4 lembar);
- Asli Legalisasi (4 Lembar);
- Asli Kuitansi Uang Ganti Rugi Tanah Komunal/Tanah Adat yang terletak di lokasi Karanga, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai, dengan nilai uang sebesar Rp. 10.000.000 (5 Lembar).

Selain itu pada tanggal 30 Mei 2006, Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat melalui SUWARDI (staf Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat) juga telah menerima dari ADAM DJUDJE berupa dokumen tanah Pemerintah Kabupaten Manggarai yang diserahkan oleh Fungsionaris Adat Nggorang 1 (satu buah), dokumen/pengukuran penataan tanah Pemda Tk II Manggarai tanggal 26 April 1997 sebanyak 1 (satu) buah dan data-data tanah persekutuan adat Nggorang yang telah diserahkan Fungsionaris adat kepada Pemda Tk II Manggarai sebanyak 1 (satu) buah. Seharusnya pada saat Terdakwa selaku Bupati Manggarai Barat sekaligus selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah atas tanah di Karanga/Torro Lemma Batu Kallo, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat seluas kurang lebih 300.988 M² dan AMBROSIOUS SUKUR yang saat itu menjabat sebagai Kabag Administrasi

Hal 43 dari 281 hal Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan Umum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat tahun 2010, mencatatkan ke dalam Kartu Inventaris Barang sebagai Aset Tanah Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat namun Terdakwa dan AMBROSIUS SUKUR tidak mencatatkannya.

- Bahwa setelah H. ISHAKA dan HAKU MUSTAFA meninggal dunia dan sebagai penggantinya adalah H. RAMANG ISHAKA, kemudian timbul klaim tanah yang dilakukan oleh ADAM DJUDJE dengan alasan tanah Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat yang terletak di Karanga/Torro Lemma Batu Kallo, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat seluas kurang lebih 300.988 M² adalah tanah miliknya dengan menggunakan dokumen alas hak yang seolah-olah dokumen alas hak tersebut didapatkan dari H. ISHAKA dan HAKU MUSTAFA pada tanggal 10 April 1991, dengan batas-batas tanah yaitu :

- Sebelah Utara : Jalan Pertigaan menuju pantai/Laut
- Sebelah selatan : Laut Flores/ tanah Negara
- Sebelah Timur : Jalan Pertigaan menuju Toroh Batu Kalo
- Sebelah Barat : Laut Flores/ Tanah Negara

Penyerahan dokumen alas hak yang diterima oleh ADAM DJUDJE tersebut disaksikan oleh ANTON USABATAN selaku Camat Komodo akan tetapi ANTON USABATAN menyangkal dokumen alas hak tersebut. Adapun klaim dari ADAM DJUDJE ini tidak berdasar, oleh karena pada tahun 1997 tanah di Karanga/Torro Lemma Batu Kallo, Desa Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai seluas kurang lebih 300.988 M² tersebut sudah diserahkan kepada Pemerintah Daerah Tingkat II Manggarai dan ADAM DJUDJE sendiri terlibat langsung dalam melakukan penataan lokasi tanah yang telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah Tk. II Manggarai termasuk penunjukan pilar batas-batas tanah.

- Bahwa pada tahun 2011, Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat melalui MAKSIMUS GASA selaku Wakil Bupati Manggarai Barat mengajukan permohonan pembuatan Sertipikat Hak Pakai (SHP) terhadap tanah di Karanga/Torro Lemma Batu Kallo, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat seluas kurang lebih 300.988 M² ke Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat namun belum ada tindak lanjut terhadap permohonan tersebut karena adanya klaim dari masyarakat diantaranya dari ADAM DJUDJE dengan cara membuat portal masuk ke

Hal 44 dari 281 hal Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi tanah dimaksud sehingga proyek Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) salah satunya pembangunan akses jalan di Karanga/Torro Lemma Batu Kallo, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat tidak dapat dilaksanakan.

- Bahwa sekitar tahun 2012 dan 2013, MASSIMILIANO DE REVIZIIS (yang sering melakukan bisnis jual beli tanah) mencari tanah yang berlokasi dipinggiran pantai di Kabupaten Manggarai Barat untuk membuka usaha Resort dengan menggunakan nama grup investor PT. Navuto Indonesia yang sebenarnya belum ada di Indonesia. MASSIMILIANO DE REVIZIIS bertemu dengan ANDI RIZKI NUR CAHYA D alias IBU ASMA (Makelar tanah) dan menyampaikan keinginan tersebut, lalu ANDI RIZKI NUR CAHYA D alias IBU ASMA menunjukan lokasi tanah milik Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat di Karanga/Torro Lemma Batu Kallo, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat seluas kurang lebih 1 Ha, setelah ditunjukkan lokasi tanah tersebut, MASSIMILIANO DE REVIZIIS setuju atas lokasi tanah tersebut dan kemudian menyampaikan kepada NIZZARDO FABIO terkait tanah yang telah ditunjukkan oleh ANDI RIZKI NUR CAHYA D alias IBU ASMA, kemudian MASSIMILIANO DE REVIZIIS meminta uang tanda jadi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada NIZZARDO FABIO untuk diberikan kepada ANDI RIZKI NUR CAHYA D alias IBU ASMA.
- Bahwa untuk proses penerbitan sertifikat tanah Karanga sebagaimana yang disepakati dengan MASSIMILIANO DE REVIZIIS, pada tahun 2012 dan 2013, ANDI RIZKI NUR CAHYA D alias IBU ASMA mengajak ENTE PUASA untuk membuat alas hak atas tanah untuk perorangan agar nantinya digunakan sebagai syarat terbitnya SHM. Menindaklanjuti ajakan ANDI RIZKI NUR CAHYA D alias IBU ASMA tersebut, ENTE PUASA mendatangi rumah SUPARDI TAHIYA untuk menyampaikan ada yang ingin membeli tanah milik SUPARDI TAHIYA dan SUAIB TAHIYA (adik SUPARDI TAHIYA) dengan harga Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) namun harus diurus dulu sertifikatnya oleh ENTE PUASA bersama dengan ANDI RIZKI NUR CAHYA D alias IBU ASMA, dan atas penyampaian dari ENTE PUASA tersebut, SUPARDI TAHIYA menyetujuinya karena SUPARDI TAHIYA maupun SUAIB TAHIYA tidak memiliki alas hak atas tanah berupa bukti pemilikan tanah dari fungsionaris adat. Selanjutnya ENTE PUASA juga

Hal 45 dari 281 hal

Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui H. SUKRI dan menyampaikan hal yang sama yaitu ada yang ingin membeli tanahnya dengan harga sebesar Rp.1.275.000.000,- (satu miliar dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) namun harus diurus dulu sertifikatnya oleh ENTE PUASA dan ANDI RIZKI NUR CAHYA D atau IBU ASMA, atas penyampaian tersebut H. SUKRI menyetujuinya karena H. SUKRI memang tidak memiliki alas hak tanah berupa bukti pemilikan tanah dari fungsionaris adat.

- Bahwa pada tahun 2013, ENTE PUASA yang ditemani oleh DAHERING KORO meminta ANTONIUS HANI (Pensiunan POLRI) membuat surat alas hak pemilikan tanah di Karanga untuk SUPARDI TAHIYA, SUAIB TAHIYA serta sepuluh orang lainnya yaitu ENTE PUASA, SYARIFUDIN, SYAMSUDIN, BOHORUDING, MUHAYANG, ARI ROUFU, SUARDI, JUADI KORO, HASANUDING dan DAHERING KORO dengan biaya sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang seolah-olah alas hak tersebut berasal dari HAJI ISHAKA dan HAKU MUSTAFA (fungsionaris adat Nggorang) yang dibagikan melalui KAMNIS HAMNU di tahun 1993, padahal tanah yang dibagikan melalui KAMNIS HAMNU untuk SUPARDI TAHIYA dan SUAIB TAHIYA bukanlah tanah di Karanga/Torro Lemma Batu Kallo melainkan di daerah Wae Cicu sebagaimana yang tercantum dalam daftar nama-nama penerima sebagai berikut :

DAFTAR NAMA-NAMA YANG MENERIMA PEMBAGIAN TANAH ADAT
LOKASI SEBELAH TIMUR BUKIT WAECICU DAN SEKITARNYA DESA
LABUAN BAJO KECAMATAN KOMODO KAB. MANGGARAI

TAHUN 1993

No	Nama	Alamat	Ukuran Pembagian	Ket
01	Stefan Bahang	Lab. Bajo/B. Lanc II	20 x 70 mtr	Kel. I
02	Samsu Bahari	Lab. Bajo/Ujung	20 x 70 mtr	Sda
03	Ahmad Baco	Lab. Bajo/Ujung	20 x 70 mtr	Sda
04	Sius	Lab. Bajo/Ujung	20 x 70 mtr	Sda
05	Azis Ati	Lab. Bajo/Ujung	40 x 70 mtr	Sda
06	Ambo Sadike	Lab. Bajo/Ujung	20 x 70 mtr	Sda
07	Sius	Lab. Bajo/Komplex	25 x 50 mtr	Sda
08	Stef	Lab. Bajo/Komplex	30 x 50 mtr	Sda
09	Abraham Papa	Lab. Bajo/Ujung	50 x 50 mtr	Sda
10	Maximus Gandur	Lab. Bajo/Complex	25 x 50 mtr	Sda
11	Zulkarnain Djudje	Lab. Bajo/Cempa	25 x 50 mtr	Sda
12	Oan Januari	Lab. Bajo/Ujung	25 x 50 mtr	Sda
13	Theo Januari	Lab. Bajo/Ujung	50 x 50 mtr	Sda
14	Gabriel	Lab. Bajo/Komplex	25 x 50 mtr	Sda

Hal 46 dari 281 hal Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15	Thomas	Lab. Bajo/Komplex	25 x 50 mtr	Kel. II
16	Muhamad Sidik	Lab. Bajo/Wae Kelambu	25 x 50 mtr	Sda
17	Jhon Gajeng	Lab. Bajo/Lamtoro	50 x 50 mtr	Sda
18	Nuryadin Djudje	Lab. Bajo/Ujung	25 x 50 mtr	Sda
19	Ismaila Djudje	Lab. Bajo/Ujung	25 x 50 mtr	Sda
20	Ishaka Djafar	Lab. Bajo/B. Lanc. II	20 x 70 mtr	Sda
21	Jojon Suparjo	Lab. Bajo/Sda	25 x 50 mtr	Sda
22	Supardi Tahiya	Lab. Bajo/Ujung	25 x 50 mtr	Kel.
23	Suaib Tahiya	Lab. Bajo/Ujung	25 x 50 mtr	Sda
24	Herman Haliliman	Ruteng	50 x 50 mtr	Sda
25	Najib Djudje	Lab. Bajo/Cempa	25 x 50 mtr	Sda
26	H. Djafar Ali Rawi	Lab. Bajo/Ujung	50 x 50 mtr	Sda
27	Suleman Padju	Lab. Bajo/Ujung	20 x 70 mtr	Sda
28	Beni Padju	Lab. Bajo/Ujung	20 x 70 mtr	Sda
29	Nasrul Sinaga	Lab. Bajo/Ujung	20 x 70 mtr	Sda
30	Muhamad Padju	Lab. Bajo/Ujung	20 x 70 mtr	Sda
31	Indo Uga	Lab. Bajo/Cempa	25 x 50 mtr	Sda
32	Umar Ishaka	Lab. Bajo/Tengah	50 x 50 mtr	Sda
33	Lamber Jamila	Lab. Bajo/Wae Kelambu	25 x 50 mtr	Kel
34	Ruddin Temma	Lab. Bajo/Ujung	20 x 70 mtr	Sda
35	Moses Turuk	Lab. Bajo/Komplex	50 x 50 mtr	Sda
36	Hamid Mustafa	Lab. Bajo/Ujung	20 x 60 mtr	Sda
37	Ambo Tang	Lab. Bajo/Ujung	20 x 60 mtr	Sda
38	Niko Nuin	Lab. Bajo/Wae Kelambu	40 x 60 mtr	Sda
39	Yusuf H. Maudu	Lab. Bajo/Ujung	20 x 60 mtr	Sda
40	Sudir	Lab. Bajo/Tengah	20 x 60 mtr	Sda
41	H. Sudin	Lab. Bajo/Tengah	25 x 60 mtr	Sda
42	Ahmad Bas	Lab. Bajo/Wae Kelambu	25 x 60 mtr	Sda
43	Mustaram	Lab. Bajo/Sda	25 x 60 mtr	Sda
44	Abdul Haji	Lab. Bajo/Sda	25 x 60 mtr	Sda
45	Mihrang	Lab. Bajo/Cempa	20 x 70 mtr	Sda
46	H. Ilyas	Lab. Bajo/Tengah	20 x 70 mtr	Sda
47	Ridwan	Lab. Bajo/Cempa	20 x 70 mtr	Sda
48	Pajar Umar	Lab. Bajo/Lamtoro	20 x 70 mtr	Sda
49	Juhaera	Lab. Bajo/Tengah	20 x 70 mtr	Sda
50	Muh. Saleh H. Kuba	Lab. Bajo/Ujung	20 x 70 mtr	Kel
51	H. Adam Djudje	Lab. Bajo/Cempa	25 x 50 mtr	Sda
52	Usman Umar	Lab. Bajo/Cempa	25 x 50 mtr	Sda
53	Muh. Saleh Ince	Lab. Bajo/Komplex	50 x 50 mtr	Sda
54	Drs. Yos Vins Nda	Lab. Bajo/Ujung	25 x 70 mtr	Sda
55	Benyamin Bahang	Lab. Bajo/B. Lanc II	20 x 70 mtr	Sda
56	Yohanes Sura	Lab. Bajo/B. Lanc II	40 x 60 mtr	Sda
57	Daniel Daeng Nabit	Lab. Bajo/Ujung	20 x 70 mtr	Sda
58	H. Kuba Usman	Lab. Bajo/Ujung	20 x 70 mtr	Sda
59	H. Ishaka	Lab. Bajo/Tengah	20 x 70 mtr	Sda
60	H. Adam Djudje	Lab. Bajo/Cempa	25 x 75 mtr	Kel VI
61	Yohanes E A Ndahur	Lab. Bajo/Ujung	20 x 100 mtr	Sda

Hal 47 dari 281 hal Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62	Drs. Yos Vins Ndahur	Lab. Bajo/Ujung	25 x 100 mtr	Sda
63	Usman	Lab. Bajo/Wae Kelambu	20 x 100 mtr	Sda
64	Kamis Hamnu	Lab. Bajo/Ujung	50 x 100 mtr	Sda
65	Alimuddin	Lab. Bajo/Ujung	20 x 75 mtr	Sda
66	Baharudin	Lab. Bajo/Ujung	20 x 70 mtr	Sda
67	Drs. Arnol Djaok	Lab. Bajo/Komplex	40 x 70 mtr	Sda
68	Drs. Melkior	Lab. Bajo/Komplex	20 x 70 mtr	Sda
69	Gani	Lab. Bajo/Lamtoro	20 x 70 mtr	Sda
70	Dus	Lab. Bajo/Cempa	20 x 70 mtr	Sda
71	Anton	Lab. Bajo/Cempa	20 x 70 mtr	Sda
72	Muhamad Hatta	Lab. Bajo/Cempa	20 x 70 mtr	Sda
73	Haruna Djudje	Lab. Bajo/Cempa	20 x 70 mtr	Sda
74	Taswing Bakar	Lab. Bajo/Tengah	20 x 70 mtr	Sda
75	Muhamad Abiya Umar	Lab. Bajo/Cempa	20 x 70 mtr	Sda
76	Saparudin	Lab. Bajo/Ujung	20 x 70 mtr	Sda
77	Haku Mustafa	Lab. Bajo/B. Lancang II	50 x 70 mtr	Sda
78	Arsyad Yappa	Lab. Bajo/Cempa	25 x 60 mtr	Sda
79	Yayan Arsyad	Lab. Bajo/Cempa	25 x 60 mtr	Sda
80	Mukhrin K.	Lab. Bajo/Cempa	20 x 70 mtr	Sda
81	Rustam Efendi	Lab. Bajo/Cempa	25 x 50 mtr	Sda
82	Lius Yohanes	Lab. Bajo/Ruteng	25 x 50 mtr	Sda
83	Ismaele	Lab. Bajo/Lamtoro	25 x 60 mtr	Sda
84	Anton Jakung	Lab. Bajo/Komplex	25 x 50 mtr	Sda
85	Muhdin AR	Lab. Bajo/B. Lancang II	25 x 50 mtr	Sda
86	Drs. Jedadu Volent	Lab. Bajo/Komplex	40 x 70 mtr	Sda
87	Drs. NobarNala	Lab. Bajo/Komplex	40 x 70 mtr	Sda

- Bahwa untuk menindaklanjuti pembuatan surat alas hak atas tanah seolah-olah ada kepemilikan tanah oleh H. SUKRI di Karanga/Torro Lemma Batu Kallo sebagai syarat permohonan penerbitan sertifikat, ENTE PUASA dan H. SUKRI meminta bantuan ANTONIUS HANI untuk dibuatkan surat alas hak atas tanah untuk H. SUKRI, seolah olah ada hibah dari KETANG di tanggal 10 Maret 1997 dengan ukuran lebar 50 meter x panjang 340 meter dengan biaya yang diberikan kepada ANTONIUS HANI sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang mana uang biaya pengurusan surat alas hak atas tanah untuk SUPARDI TAHIYA, SUAIB TAHIYA dan 10 orang lainnya sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) berasal dari MASSIMILIANO DE REVIZIIS dan NIZZARDO FABIO yang diserahkan melalui ANDI RIZKI NUR CAHYA D alias IBU ASMA dan ENTE PUASA.
- Bahwa THERESIA DEWI KOROH DIMU yang merupakan Notaris di Labuan Bajo, ditunjuk oleh MASSIMILIANO DE REVIZIIS untuk membuat perjanjian

Hal 48 dari 281 hal Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jual beli tanah milik Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat di Karanga/Torro Lemma Batu Kallo, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat yang dilakukan oleh makelar tanah yang ditunjuk oleh MASSIMILIANO DE REVIZIIS serta melibatkan SUPARDI TAHIYA, SUAIB TAHIYA dan H. SUKRI yang seolah-olah memiliki tanah di Karanga/Torro Lemma Batu Kallo, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat. THERESIA DEWI KOROH DIMU, tanpa melakukan pengecekan kebenaran materiil dokumen alas hak tanah atas nama SUPARDI TAHIYA, SUAIB TAHIYA dan H. SUKRI pada Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat akan tetapi perjanjian jual beli tersebut tetap saja ditandatangani oleh THERESIA DEWI KOROH DIMU yang hanya berdasarkan data yuridis yang sudah ditanda tangani oleh ABDUL IPUR dan ABDULLAH NUR yang sebelumnya telah menerima uang dari ANDI RIZKI NUR CAHYA D alias IBU ASMA. Adapun perjanjian jual beli yang dibuat oleh THERESIA DEWI KOROH DIMU yaitu :

- Perjanjian jual beli tanggal 13 September 2013 antara H. SUKRI selaku penjual sebidang tanah seluas 17.000 M2 dengan VERONIKA SYUKUR selaku pembeli dengan harga tanah sebesar Rp. 3.200.000.000,- (tiga miliar dua ratus juta rupiah). Pada saat penandatanganan perjanjian tersebut, Terdakwa dan NIZZARDO FABIO sudah membayar uang tahapan harga tanah sebesar Rp.640.000.000,- (enam ratus empat puluh juta rupiah) kepada H. SUKRI yang sisa pelunasan sebesar Rp. 2.510.000.000,- (dua miliar lima ratus sepuluh juta rupiah) yang disepakati setelah terbitnya SHM. Adapun uang pembayaran tahapan sebesar Rp. 640.000.000,- (enam ratus empat puluh juta rupiah) tersebut yang diterima oleh H. SUKRI sebagian diambil oleh ANDI RIZKI NUR CAHYA D alias IBU ASMA sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk pengurusan data yuridis di kantor Kelurahan Labuan Bajo dan di kantor Kecamatan Komodo.
- Perjanjian jual beli tanggal tanggal 14 Oktober 2013 antara ANDI RIZKI NUR CAHYA D alias IBU ASMA selaku kuasa menjual tanah dari SUPARDI TAHIYA dan SUAIB TAHIYA masing-masing seluas 6000 M2 dengan VERONIKA SYUKUR selaku pembeli dengan harga kedua bidang tanah tersebut sebesar Rp. 1.800.000.000,- (satu miliar delapan ratus juta rupiah). Pada saat penandatanganan perjanjian tersebut,

Hal 49 dari 281 hal

Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPARDI TAHIYA mengetahui harga tanah yang dibuat dalam perjanjian tersebut sebesar Rp.1.800.000.000,- (satu miliar delapan ratus juta rupiah) sehingga SUPARDI TAHIYA meminta tambahan harga tanahnya dan harga tanah SUAIB TAHIYA dari harga kesepakatan awal dengan ANDI RIZKI NUR CAHYA D alias IBU ASMA dan ENTE PUASA sebesar Rp. 300.000.000,- menjadi sebesar Rp.1.400.000.000,- (satu miliar empat ratus juta rupiah). Pada saat perjanjian tersebut ditandatangani, Terdakwa dan NIZZARDO FABIO sudah membayar uang tahapan yang tertera dalam perjanjian dengan total sebesar Rp. 380.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) kepada SUPARDI TAHIYA yang sisanya sebesar Rp.1.420.000.000,- (satu miliar empat ratus dua puluh juta rupiah) disepakati setelah terbitnya SHM.

- Bahwa setelah ANDI RIZKI NUR CAHYA D alias IBU ASMA menerima uang pembayaran tahapan atas tanah H. SUKRI yang berasal dari MASSIMILIANO DE REVIZIIS dan NIZZARDO FABIO, selanjutnya ANDI RIZKI NUR CAHYA D alias IBU ASMA memberikan uang kepada ENTE PUASA sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk diberikan kepada ABDUL IPUR selaku Lurah Labuan Bajo agar menandatangani data yuridis atas nama H. SUKRI, SUPARDI TAHIYA, SUAIB TAHIYA, selain itu ANDI RIZKI NUR CAHYA D alias IBU ASMA juga menyerahkan uang kepada BLASIUS BEO untuk diberikan kepada ABDULLAH NUR selaku Camat Komodo agar menandatangani data yuridis pemohon SHM atas nama H. SUKRI, SUPARDI TAHIYA dan SUAIB TAHIYA. Sebelum menandatangani data yuridis pemohon atas nama H. SUKRI, SUPARDI TAHIYA dan SUAIB TAHIYA tersebut, ABDULLAH NUR yang mengetahui pasti lokasi tanah Karanga/Torro Lemma Batu Kallo merupakan milik Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, melaporkan dan meminta persetujuan kepada Terdakwa di ruang kerjanya untuk menandatangani data yuridis pemohon atas nama H. SUKRI, SUPARDI TAHIYA dan SUAIB TAHIYA. Atas laporan ABDULLAH NUR tersebut, Terdakwa yang juga mengetahui dengan pasti tanah yang dimohonkan tersebut berada di lokasi tanah milik Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat memberikan persetujuan kepada ABDULLAH NUR untuk menandatangani data yuridis. Atas persetujuan dari Terdakwa, ABDULLAH NUR menandatangani data

Hal 50 dari 281 hal Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yuridis pemohon atas nama H. SUKRI, SUPARDI TAHIYA dan SUAIB TAHIYA.

- Bahwa setelah data-data yuridis pemohon atas nama H. SUKRI, SUPARDI dan SUAIB TAHIYA ditandatangani oleh ABDULAH NUR, berkas permohonan tersebut kemudian dibawa oleh VERONIKA SYUKUR tanpa ada surat kuasa untuk didaftarkan ke Kantor Pertanahan Manggarai Barat melalui KAROLUS GEPA (Petugas Loker). Selanjutnya berkas permohonan tersebut diperiksa oleh KAROLUS GEPA dan pada saat itu KAROLUS GEPA sudah merasa adanya kejanggalan terhadap data yuridis yang diajukan oleh para pemohon tersebut, diantaranya terkait batas lokasi para pemohon dan luasan tanah, dan terhadap kejanggalan tersebut dilaporkan kepada MARTHEN NDEO selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat akan tetapi MARTHEN NDEO tetap mengarahkan KAROLUS GEPA untuk meluluskan berkas permohonan tersebut dengan diteruskan ke bidang pengukuran dan pemetaan tanah yang saat itu MARTHEN NDEO bertindak juga selaku Plt. Kasi Pengukuran dan Pemetaan Tanah.
- Bahwa pada saat proses pengurusan SHM atas nama SUPARDI TAHIYA, SUAIB TAHIYA dan H. SUKRI, mendapatkan sanggahan dari ADAM DJUDJE dan NIKOLAS NAPUT. Selanjutnya atas sanggahan tersebut, pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat mengundang ADAM DJUDJE, NIKOLAS NAPUT dan ABDULLAH NUR yang mewakili pihak Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat untuk dilakukan mediasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat. Pada mediasi tersebut dipimpin oleh FREDY E. J. MARAMIS selaku Kasi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat, dijelaskan oleh FREDY E. J. MARAMIS bahwa tanah di Karanga/Torro Lemma Batu Kallo, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat adalah milik Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat sambil memperlihatkan sket peta pada tahun 1997. Atas penyampaian dari FREDY E. J. MARAMIS dalam mediasi tersebut, yang hadir pada saat itu tidak ada yang membantahnya. Setelah dari mediasi tersebut, FREDY E. J. MARAMIS menyampaikan kepada VERONIKA SYUKUR bahwa permohonan SHM atas nama SUPARDI TAHIYA, SUAIB TAHIYA dan H. SUKRI yang diurus oleh VERONIKA SYUKUR merupakan tanah yang

Hal 51 dari 281 hal Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diklaim oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat. Atas informasi dari FREDY E. J. MARAMIS, VERONIKA SYUKUR menyampaikan kepada MASSIMILIANO DE REVIZIIS dan NIZZARDO FABIO.

- Bahwa hasil mediasi yang dipimpin oleh FREDY E. J. MARAMIS juga dilaporkan kepada MARTHEN NDEO, akan tetapi MARTHEN NDEO tetap meneruskan permohonan SHM atas nama SUPARDI TAHIYA, SUAIB TAHIYA dan H. SUKRI untuk dilakukan pengukuran tanah. Dalam pelaksanaan pengukuran tanah, MARTHEN NDEO tidak melibatkan pihak Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat. Adapun pihak yang hadir dalam proses pengukuran tanah diantaranya SUPARDI TAHIYA, ENTE PUASA, ANDI RIZKI NUR CAHYA D alias IBU ASMA dan ABDUL IPUR yang sudah menerima uang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebelumnya dari ANDI RIZKI NUR CAHYA D alias IBU ASMA melalui ENTE PUASA yang dalam pelaksanaan pengukuran, SUPARDI TAHIYA selaku pemohon tidak tahu dimana lokasi tanahnya dan yang menunjukkan lokasi dan batas-batas tanah para pemohon adalah ENTE PUASA.
- Bahwa setelah dilakukan pengukuran di tahun 2013 dan dibuatkan surat ukurnya, selanjutnya proses permohonan SHM atas nama SUPARDI TAHIYA, SUAIB TAHIYA dan H. SUKRI seharusnya diteruskan oleh bidang Pendaftaran Hak Atas Tanah untuk dilanjutkan dalam sidang Panitia A, akan tetapi karena sebelumnya telah mengetahui obyek tanah tersebut adalah milik Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, MARTHEN NDEO meminta FREDY E. J. MARAMIS untuk dipending berkas permohonan dari SUPARDI TAHIYA, SUAIB TAHIYA dan H. SUKRI.
- Bahwa pada tanggal 11 Juni 2014, Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat mengirim surat Nomor : Pem.130/184/VI/2014 tanggal 11 Juni 2014 yang ditandatangani oleh BENEDIKTUS BANU selaku Asisten Pemerintahan dan Kesra Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat perihal persertifikatan 9 (Sembilan) lokasi tanah milik Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat diantaranya Tanah Karanga di Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat dengan melampirkan bukti penyerahan alas hak kepemilikan Pemerintah Daerah dalam bentuk fotokopi sedangkan bukti aslinya sudah diterima melalui SUWARDI namun hilang di Bagian Tata Pemerintahan dalam hal ini dijabat oleh AMBROSIOUS SUKUR.

Hal 52 dari 281 hal

Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adanya permasalahan tanah milik Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat yang diklaim oleh ADAM DJUDJE seluas kurang lebih 30 Ha di Karanga, pada tanggal 21 Oktober 2014, Terdakwa mengundang rapat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOMPINDA) yang dihadiri oleh Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Manggarai Barat, Kapolres Manggarai Barat, Dandim 1612 Labuan Bajo, Kepala Kejaksaan Negeri Labuan Bajo, Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo untuk membahas tanah yang diklaim oleh ADAM DJUDJE di ruang kerja Bupati Manggarai Barat. Hasil pembahasan dengan FORKOMPINDA di rekomendasikan saat itu yaitu :
 - Terhadap pengklaiman oleh ADAM DJUDJE yang memanfaatkan surat pernyataan yang ditandatangani oleh mantan Bupati Kepala Daerah Tk. II Manggarai (GASPAR PARANG EHOK) dapat diketahui bahwa surat tersebut terkandung maksud hanya surat penyerahan yang belum ditandatangani, namun secara adat/budaya telah dilakukan penyerahan.
 - Terkait belum ditandatanganinya surat pelepasan hak oleh Bupati Kepala Daerah Tk. II Manggarai maka perlu ada penegasan penyerahan oleh ahli waris DALU ISHAKA kepada Pemda Manggarai.
- Bahwa selain itu pada tanggal 22 Oktober 2014, Terdakwa juga melakukan pembahasan dengan GASPAR PARANG EHOK, HARUM FRANSISKUS, FRANS BORGIAS PADJU LEOK, FIDELIS KERONG, KORINUS BURENI (staf dinas perikanan), ANTON USABATAN, ABDUL IPUR, H. RAMANG ISHAKA, MARTHEN NDEO, AMBROSIUS SUKUR (Kabag Pemerintahan), ABDULLAH NUR dengan hasil pembahasan ditegaskan walaupun Surat Pelepasan Adat dari H. ISHAKA dan HAKU MUSTAFA (fungsiaris adat) tidak ditandatangani oleh GASPAR PARANG EHOK selaku Bupati Kepala Daerah Tk. II Manggarai tetapi penyerahan tanah ulayat di Karanga/Torro Lemma Batu Kallo seluas kurang lebih 30 Ha adalah sah milik Pemda Manggarai karena sudah dibayar uang sirih pinang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan diperuntukan untuk sekolah perikanan serta klaim tanah dari ADAM DJUDJE itu dibantah oleh ANTON USABATAN karena Surat pelepasan Hak atas tanah dari H. ISHAKA dan HAKU MUSTAFA di tahun 1991 untuk ADAM DJUDJE tidaklah benar.
- Bahwa terhadap hasil pembahasan dengan FORKOMPINDA, pada tanggal 26 November 2014 Terdakwa mengirim surat ke masing-masing instansi yaitu Kapolres Manggarai Barat, Kepala Kejaksaan Negeri Labuan Bajo,

Hal 53 dari 281 hal

Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perwira Penghubung Kodim 1612 Ruteng sebagaimana dalam surat yang ditandatangani oleh Terdakwa pada tanggal 26 November 2014, selanjutnya diikuti oleh ABDULLAH NUR selaku Camat Komodo menyampaikan surat kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat perihal pertimbangan agar tidak melayani proses penerbitan hak atas tanah atas nama H. M. ABU BAKAR ADAM DJUDJE di Karanga karena tanah di Karanga seluas kurang lebih 30 Ha adalah tanah milik Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, sehingga terhadap surat permohonan SHM seluas kurang lebih 4 Ha di obyek yang sama oleh ADAM DJUDJE ditolak oleh MARTHEN NDEO, sedangkan ADAM DJUDJE di bulan November 2014 pernah menjual tanah di Karanga/Torro Lemma Batu Kallo seluas kurang lebih 4 Ha kepada orang Italia bernama VALERIO sebesar Rp. 5.500.000.000,- (lima miliar lima ratus juta rupiah) namun baru diterima uang jadi pembayaran sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) dan kepada JOHNI ASADOMA (mantan Wakapolda NTT) seluas 5.000 M² seharga Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang sudah diterima pembayaran oleh ADAM DJUDJE sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

- Bahwa pada bulan Maret 2015, Terdakwa memberikan kuasa kepada AMBROSIUS SUKUR mengajukan kembali permohonan sertifikat tanah Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat di Karanga/Torro Lemma Batu Kallo, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat seluas kurang lebih 30 Ha ke Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat dengan dana yang sudah dianggarkan dalam APBD Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat tahun 2015, padahal Terdakwa sebelumnya sudah menyetujui permohonan data yuridis oleh H. SUKRI, SUPARDI TAHIYA dan SUAIB TAHIYA yang telah mengambil sebagian tanah milik Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat tersebut. Selanjutnya permohonan tersebut di proses oleh pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat dan oleh karena luas tanah yang dimohonkan lebih dari 10 Ha maka kewenangan untuk melakukan pengukuran berada pada Kanwil BPN Provinsi Nusa Tenggara Timur dan berkas permohonan tersebut selanjutnya dikirim oleh MARTHEN NDEO ke Kanwil BPN Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk dimintakan pengukuran.

Hal 54 dari 281 hal Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berkas permohonan sertifikat yang diajukan oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat tersebut dinyatakan LENGKAP oleh pihak Kanwil BPN Provinsi Nusa Tenggara Timur sehingga bisa dilakukan pengukuran sebagaimana yang dimohonkan dengan rincian biaya pengukuran sebesar Rp. 32.925.000,- (tiga puluh dua juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) sebagaimana dalam Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur yang ditandatangani oleh JOSIAS BENYAMIN LONA selaku Kepala Kanwil BPN Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tanggal 20 April 2015.
- Bahwa pada tanggal 21 Februari 2015, DAI KAYUS dan MAHMUD NIP mengajukan permohonan SHM ke Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat dengan masing-masing seluas 5000 M² berdasarkan alas hak dari USMAN POTA tahun 1989 yang lokasi tanahnya sama yaitu di daerah Wae Cicu Utara bukan di Karanga/Torro Lemma Batu Kallo. Tanah DAI KAYUS ini sebelum terbit sertifikat sudah dicarikan pembelinya oleh AFRIZAL alias UNYIL dan MARIA SRIKANDI alias IBU KENDI kepada ISMAIL HIRAWAN dengan harga yang ditawarkan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) permeternya. Oleh karena ada jaminan oleh MARIA SRIKANDI alias IBU KENDI berupa rumah dan tanahnya, maka ISMAIL HIRAWAN menyetujui rencana membeli tanah tersebut dengan memberi tanda jadi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada MARIA SRIKANDI alias IBU KENDI melalui AFRIZAL alias UNYIL yang kemudian diberikan kepada ALFANDRI alias ANDI yang bertugas mengurus data yuridis ke kantor Kelurahan Labuan Bajo dan kantor Kecamatan Komodo dan termasuk juga permohonan atas nama MAHMUD NIP yang biayanya berasal dari MATHIUS SANIANG NAGA SIAGIAN. Terhadap permohonan SHM atas nama MAHMUD NIP tersebut, ALFANDRI alias ANDI mendapat uang dari MATHIUS SANIANG NAGA SIAGIAN sebesar Rp. 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) sehingga total uang yang diterima oleh ALFANDRI alias ANDI sebesar Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah).
- Bahwa terhadap alas hak atas tanah atas nama DAI KAYUS dan MAHMUD NIP sebelum ditandatangani oleh ABDULLAH NUR, ABDULLAH NUR melaporkan kepada Terdakwa di ruang kerjanya bahwa obyek tanah yang dimohonkan ini berada di atas tanah Pemerintah Kabupaten Manggarai

Hal 55 dari 281 hal

Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat. Atas laporan dari ABDULLAH NUR tersebut, Terdakwa menyetujui agar ditandatangani padahal Terdakwa mengetahui secara pasti bahwa tanah Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat di Karanga/Torro Lemma Batu Kallo adalah luasnya kurang lebih 30 Ha sebagaimana hasil rapat FORKOMPINDA dan juga sesuai hasil rapat dengan GASPAR PARANG EHOK, H. RAMANG ISHAKA dan MARTHEN NDEO.

- Bahwa untuk pengurusan SHM atas nama DAI KAYUS di Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat dilakukan oleh AFRIZAL alias UNYIL yang merupakan orangnya MATHIUS SANIANG NAGA SIAGIAN yang merupakan teman dekat dari FREDY E. J. MARAMIS, sedangkan pengurusan SHM atas nama MAHMUD NIP di Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat diurus sendiri oleh MAHMUD NIP. Adapun untuk biaya pengurusan SHM atas nama DAI KAYUS dan MAHMUD NIP di Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat dibiayai oleh MATHIUS SANIANG NAGA SIAGIAN dan ISMAIL HERAWAN. Dalam proses pengurusan SHM DAI KAYUS dan MAHMUD NIP sempat dipending oleh FREDY E. J. MARAMIS atas arahan MARTHEN NDEO karena menunggu peta bidang tanah Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat yang berlokasi di Karanga/Torro Lemma Batu Kallo, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat terbit dan juga ada sanggahan dari ENTE PUASA.
- Bahwa pada tanggal 20 Mei 2015, dilakukan pengukuran tanah Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat di Karanga/Torro Lemma Batu Kallo di Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat seluas kurang lebih 30 Ha yang dilakukan oleh BALIYO MUYONO dan SUTARDI yang merupakan petugas ukur dari Kanwil BPN Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama ALIMIN sebagai petugas ukur pada Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat dan didampingi oleh AMBROSIUS SUKUR. Sebelum dilakukan pengukuran, AMBROSIUS SUKUR dan ABDULLAH NUR mengajak H. RAMANG ISHAKA untuk mengecek pilar-pilar batas tanah di lokasi tersebut, dan pada saat pelaksanaan pengukuran, AMBROSIUS SUKUR menunjukkan sebagian tanah tersebut sebagai "tanah masyarakat", sehingga hasil perhitungan pengukuran tanah yang dilakukan oleh BALIYO MUYONO dan SUTARDI seluas kurang lebih 28 Ha dan bukan seluas kurang lebih 30 Ha sesuai dengan permohonan dan

Hal 56 dari 281 hal

Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat gambar ukurnya yang dikirim ke Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat yang diterima oleh AMBROSIUS SUKUR. Setelah menerima gambar ukur hasil pengukuran seluas kurang lebih 28 Ha, selanjutnya AMBROSIUS SUKUR melapor kepada Terdakwa di ruang kerja Bupati Manggarai Barat yaitu luas tanah Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat di Karanga/Torro Lemma Batu Kallo, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat berkurang menjadi kurang lebih 28 Ha karena dalam gambar ukur ada tertulis “tanah masyarakat”, atas laporan AMBROSIUS SUKUR tersebut, Terdakwa menyetujui agar AMBROSIUS SUKUR menandatangani saja gambar ukur tersebut padahal Terdakwa mengetahui secara pasti bahwa tanah Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat di Karanga/Torro Lemma Batu Kallo di Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat adalah seluas kurang lebih 30 Ha sebagaimana hasil rapat FORKOMPINDA dan juga sesuai hasil rapat dengan GASPAR PARANG EHOK, H. RAMANG ISHAKA dan MARTHEN NDEO yang tidak pernah membahas adanya “tanah masyarakat” kecuali klaim dari ADAM DJUDJE.

- Bahwa setelah gambar ukur tanah Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat di Karanga/Torro Lemma Batu Kallo di Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat seluas kurang lebih 28 Ha di tandatangani oleh AMBROSIUS SUKUR, maka dibuatkan peta bidangnya lalu ditandatangani oleh ALBERTINA RESDYANA NDAPAMERANG selaku Kepala Bidang Pengukuran dan Pemetaan pada Kanwil BPN Provinsi Nusa Tenggara Timur akan tetapi peta bidang ini tidak dikirimkan oleh ALBERTINA RESDYANA NDAPAMERANG ke Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat.
- Bahwa sekitar bulan Juni 2015, petugas Kanwil BPN Propinsi Nusa Tenggara Timur mendatangi AMBROSIUS SUKUR di ruang kerjanya dan menyodorkan gambar ukur peta bidang Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat yang sudah berkurang lagi menjadi kurang lebih 24 Ha dan juga gambar ukur atas nama SUPARDI TAHIYA, SUAIB TAHIYA dan H. SUKRI untuk ditandatangani oleh AMBROSIUS SUKUR sebagai pihak tapal batas (Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat). Sebelum menandatangani gambar ukur seluas kurang lebih 24 Ha untuk permohonan sertifikat tanah Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat dan gambar ukur atas nama

Hal 57 dari 281 hal Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPARDI TAHIYA, SUAIB TAHIYA dan H. SUKRI tersebut, AMBROSIOUS SUKUR melaporkan kepada Terdakwa di ruang kerjanya bahwa luas tanah Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat berkurang lagi menjadi kurang lebih 24 Ha dan juga ada gambar ukur atas nama SUPARDI TAHIYA, SUAIB TAHIYA dan H. SUKRI untuk ditandatangani oleh AMBROSIOUS SUKUR sebagai pihak tapal batas (Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat), dan atas laporan itu, Terdakwa menyetujui agar AMBROSIOUS SUKUR menandatangani saja gambar ukur tanah Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat seluas kurang lebih 24 Ha dan gambar ukur atas nama SUPARDI TAHIYA, SUAIB TAHIYA dan H. SUKRI tersebut padahal Terdakwa mengetahui secara pasti bahwa tanah Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat di Karanga/Torro Lemma Batu Kallo di Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat seluas kurang lebih 30 Ha sebagaimana hasil rapat FORKOMPINDA dan juga sesuai hasil rapat dengan GASPAR PARANG EHOK, H. RAMANG ISHAKA dan MARTHEN NDEO.

- Bahwa setelah gambar ukur tanah Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat di Karanga/Torro Lemma Batu Kallo di Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat seluas kurang lebih 24 Ha ditandatangani oleh AMBROSIOUS SUKUR, maka ditandatangani peta bidangnya oleh ALBERTINA RESDYANA NDAPAMERANG lalu dikirim peta bidang ini ke Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat. Akibat peta bidang tanah Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat di Karanga/Torro Lemma Batu Kallo di Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat berkurang dari kurang lebih 30 Ha menjadi kurang lebih 24 Ha, maka proses permohonan penerbitan SHM atas nama SUPARDI TAHIYA, SUAIB TAHIYA, H. SUKRI, DAI KAYUS dan MAHMUD NIP yang awalnya dipending lalu dilanjutkan kembali prosesnya oleh MARTHEN NDEO. Untuk permohonan atas nama SUPARDI TAHIYA, SUAIB TAHIYA dan H. SUKRI dilakukan oleh MARTHEN NDEO yang memang sejak awal sudah dilakukan pendekatan oleh VERONIKA SYUKUR yang mengurus permohonan SHM atas nama SUPARDI TAHIYA, SUAIB TAHIYA dan H. SUKRI, sehingga seharusnya berkas permohonan tersebut yang masuk di tahun 2013 ditolak tetapi dengan sengaja dipending dulu lalu diproses kembali penerbitan SHM nya setelah terbit peta bidang

Hal 58 dari 281 hal

Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat di Karanga/Torro Lemma Batu Kallo di Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat seluas kurang lebih 24 Ha.

- Bahwa proses tersebut juga diterapkan oleh MARTHEN NDEO terhadap permohonan SHM atas nama DAI KAYUS dan MAHMUD NIP yang dipending oleh FREDY E. J. MARAMIS sesuai dengan arahan MARTHEN NDEO yang sejak awal seharusnya ditolak karena luas tanahnya tidak jelas dan alas hak tanahnya diragukan. Diprosesnya kembali permohonan SHM atas nama DAI KAYUS dan MAHMUD NIP dimulai dari pengukuran tanah yang dialihkan dari obyek tanah dalam berkas permohonan semula berada di Wae Cicu Utara dipindahkan ke lokasi tanah Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat di Karanga/Torro Lemma Batu Kallo di Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat yang sudah tertulis "tanah masyarakat" sesuai dengan peta bidang seluas 24 Ha atas DAI KAYUS karena I KETUT SUARSANA dijanjikan akan mendapatkan uang dari MAHMUD NIP. Pada saat proses pengukuran tanah atas nama DAI KAYUS dan MAHMUD NIP tersebut yang hadir saat itu adalah DAI KAYUS, MURSALIM, ZULKALDAH, ALFANDRI alias ANDI, AFRIZAL alias UNYIL, ANTONIUS JEMADUR dan yang menunjukkan batas-batas tanah adalah AFRIZAL alias UNYIL padahal AFRIZAL alias UNYIL mengetahui kalau obyek tanah yang ditunjukkan adalah tanah Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat.
- Bahwa permohonan SHM atas nama DAI KAYUS dan MAHMUD NIP tersebut di proses kembali oleh MARTHEN NDEO oleh karena AFRIZAL alias UNYIL dan MAHMUD NIP memberikan sejumlah uang kepada MARTHEN NDEO dan FREDY E. J. MARAMIS dan I KETUT SUARSANA melalui rekening milik SIRATURAHMI yang sering digunakan oleh MARTHEN NDEO dan FREDY E. J. MARAMIS untuk menerima biaya pengurusan SHM. Adapun uang yang diterima oleh MARTHEN NDEO, FREDY E. J. MARAMIS, I KETUT SUARSANA melalui SIRATURAHMI untuk biaya pengurusan SHM atas nama DAI KAYUS dan MAHMUD NIP dengan rincian sebagai berikut :
 - Menerima uang dari MATHIUS SANIANG NAGA SIAGIAN total sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima uang dari AFRIZAL alias UNYIL yang bersumber dari MATHIUS SANIANG NAGA SIAGIAN sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- Menerima uang dari MAHMUD NIP yang bersumber dari MATHIUS SANIANG NAGA SIAGIAN sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Sehingga total uang yang diterima oleh SIRATURAHMI dalam rekeningnya untuk pengurusan SHM atas nama DAI KAYUS dan MAHMUD NIP sebesar Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) dan dari uang tersebut diberikan kepada MARTHEN NDEO sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), I KETUT SUARSANA sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dan FREDY E. J. MARAMIS sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) serta ALIMIN sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa berkas permohonan atas nama SUPARDI TAHIYA, SUAIB TAHIYA dan H. SUKRI dilanjutkan untuk dilakukan sidang Panitia A yang dihadiri oleh ENTE PUASA, SUPARDI TAHIYA, H. MUSTAJIB, ALI ANTONIUS, H. RAMANG ISHAKA, ABDUL IPUR, ELI REIWUTI, ABDULAH NUR, I KETUT SUARSANA, H. SUKURING, akan tetapi Panitia A tidak pernah menguji kebenaran materiil dari data yuridis dan data fisik obyek tanah di lapangan akan tetapi tetap diterbitkan oleh MARTHEN NDEO masing-masing Surat Keputusan Persetujuan Pemberian Hak Milik tanggal 6 Juni 2006 sehingga selanjutnya diterbitkan SHM yaitu :
 - SHM nomor 02446 luas tanah 6643 M² atas nama SUPARDI TAHIYA padahal luas tanah yang dimohonkan hanya seluas 6000 M²;
 - SHM nomor 02447 luas tanah 8447 M² atas nama SUAIB TAHIYA padahal luas tanah yang dimohonkan hanya seluas 6000 M²;
 - SHM nomor 02448 luas tanah 20.130 M² atas nama H. SUKRI padahal luas tanah yang dimohonkan hanya seluas 17.000 M².
- Bahwa untuk proses penerbitan SHM atas nama DAI KAYUS dan MAHMUD NIP mendapat sanggahan dari ENTE PUASA, akan tetapi MARTHEN NDEO tetap meneruskan permohonan SHM atas nama DAI KAYUS dan MAHMUD NIP ke sidang Panitia A. Pada saat sidang panitia A, H. RAMANG ISHAKA sudah mengingatkan kepada MARTHEN NDEO jika alas hak tanah atas nama DAI KAYUS tidak benar karena DAI KAYUS pernah

Hal 60 dari 281 hal

Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang ke rumahnya untuk meminta pengakuan alas hak yang dimilikinya tetapi tidak dilayani oleh H. RAMANG ISHAKA. Walaupun sudah diingatkan oleh H. RAMANG ISHAKA, MARTHEN NDEO tetap menerbitkan Surat Keputusan Persetujuan Pemberian Hak Milik dan telah diterbitkan SHM atas nama DAI KAYUS dan MAHMUD NIP dimana untuk sidang panitia A terhadap permohonan SHM atas nama MAHMUD NIP dan DAY KAYUS Panitia A tidak pernah menguji kebenaran materiil data yuridis dan data fisiknya sehingga MARTHEN NDEO juga tetap menerbitkan SHM yaitu

- SHM Nomor 02482 luas tanah 12.020 M² atas nama DAI KAYUS padahal luas tanah yang dimohonkan hanya seluas 5000 M²;
- SHM Nomor 02490 luas tanah 8.824 M² atas nama MAHMUD NIP padahal luas tanah yang dimohonkan hanya seluas 5000 M², lalu dibatalkan dan dipecah menjadi 2 (dua) yaitu SHM nomor 02492 seluas 6094 M² dan SHM nomor 02493 seluas 2730 M².
- Bahwa setelah terbit SHM atas nama SUPARDI TAHIYA, SUAIB TAHIYA dan H. SUKRI, selanjutnya SHM tersebut diambil oleh VERONIKA SYUKUR di Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat berdasarkan surat kuasa yang dimintakan sebelumnya oleh VERONIKA SYUKUR kepada SUPARDI TAHIYA, SUAIB TAHIYA dan H. SUKRI di tanggal 6 April 2016. Setelah SHM tersebut dikuasai oleh VERONIKA SYUKUR, selanjutnya SHM atas nama SUPARDI TAHIYA, SUAIB TAHIYA dan H. SUKRI dititipkan di Notaris THERESIA DEWI KOROH DIMU. Selanjutnya VERONIKA SYUKUR memberitahukan kepada MASSIMILIANO DE REVIZIIS jika SHM atas nama SUPARDI TAHIYA, SUAIB TAHIYA dan H. SUKRI telah selesai dan ada di Notaris THERESIA DEWI KOROH DIMU. MASSIMILIANO DE REVIZIIS yang awalnya menggunakan PT. Navuto Indonesia yang seolah-olah ingin melakukan investasi di Labuan Bajo namun sebenarnya bertindak sebagai "makelar tanah" karena diawal sudah ada kesepakatan antara MASSIMILIANO DE REVIZIIS, NIZZARDO FABIO dan VERONIKA SYUKUR untuk membeli tanah dari SUPARDI TAHIYA, SUAIB TAHIYA dan H. SUKRI dengan harga lebih rendah yang modal awalnya bersumber dari NIZZARDO FABIO. Selanjutnya NIZZARDO FABIO memperkenalkan BURHANUDIN kepada MASSIMILIANO DE REVIZIIS dan saat itu BURHANUDIN menyampaikan telah mendapatkan calon pembeli tanah dari

Hal 61 dari 281 hal

Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARMANSYAH yaitu RUDYANTO SULIAWAN selaku pemilik Hotel Ayana Labuan Bajo.

- Bahwa sebelum menentukan harga ke calon pembeli, diketahui harga yang disepakati antara MASSIMILIANO DE REVIZIIS, NIZZARDO FABIO, VERONIKA SYUKUR untuk 3 (tiga) bidang tanah atas nama SUPARDI TAHIYA, SUAIB TAHIYA dan H. SUKRI termasuk jasa VERONIKA SYUKUR dengan total sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) yang kemudian harga tanah tersebut oleh MASSIMILIANO DE REVIZIIS dan NIZZARDO FABIO dinaikan menjadi kurang lebih sebesar Rp. 19.000.000.000,- (sembilan belas miliar rupiah) dengan perhitungan memasukan fee keuntungan MASSIMILIANO DE REVIZIIS dengan NIZZARDO FABIO sebesar Rp. 9.000.000.000,- (sembilan miliar rupiah) dengan pembagian MASSIMILIANO DE REVIZIIS 40% dan NIZZARDO FABIO 60%, selanjutnya oleh BURHANUDIN dinaikan harganya kepada RUDYANTO SULIAWAN menjadi Rp. 25.154.000.000,- (dua puluh lima miliar seratus lima puluh empat juta rupiah) dengan memasukan fee keuntungan BURHANUDIN, ARMANSYAH dan THERESIA DEWI KOROH DIMU.
- Bahwa transaksi jual beli tanah milik SUPARDI TAHIYA, SUAIB TAHIYA dan H. SUKRI dengan SANIATMA ADINOTO selaku kuasa dari RUDYANTO SULIAWAN dilakukan di Kantor Notaris THERESIA DEWI KOROH DIMU yang dihadiri oleh MASSIMILIANO DE REVIZIIS, NIZZARDO FABIO, VERONIKA SYUKUR, BURHANUDIN, ARMANSYAH, SUPARDI TAHIYA dan H. SUKRI.
- Bahwa dalam proses penandatanganan Akta Jual Beli (AJB) untuk bidang tanah milik SUPARDI TAHIYA, SUAIB TAHIYA dan H. SUKRI sebagai berikut :
 - Pembelian tanah SHM No. 2448 atas nama H. SUKRI :
 - Perjanjian ikatan jual beli antara H. SUKRI dengan VERONIKA SUKUR berdasarkan perjanjian tanggal 13 September 2013 sebesar Rp. 3.200.000.000,- (tiga miliar dua ratus juta rupiah) dibatalkan terlebih dahulu oleh THERESIA DEWI KOROH DIMU, selanjutnya THERESIA DEWI KOROH DIMU membuatkan AJB Nomor : 186/2016 tanggal 18 Agustus 2016 antara H. SUKRI dengan SANIATMA ADINOTO (selaku Kuasa dari RUDYANTO SULYAWAN) dengan harga tanah Rp.

Hal 62 dari 281 hal

Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.032.500.000,- (lima miliar tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), namun saat penandatanganan AJB, THERESIA DEWI KOROH DIMU sengaja tidak membacakan harga tanah yang tercantum dalam AJB tersebut kepada H. SUKRI yang tidak bisa membaca.

- Pembelian tanah SHM No. 2446 atas nama SUPARDI TAHIYA dan Pembelian tanah SHM No. 2447 atas nama SUAIB TAHIYA :
- Perjanjian ikatan jual beli antara antara ANDI RIZKY NUR CAHYA D alias IBU ASMA selaku kuasa jual dari SUPARDI TAHIYA dan SUAIB TAHIYA dengan VERONIKA SYUKUR tanggal 14 Oktober 2013 dengan harga tanah sebesar Rp. 1.800.000.000,- (satu miliar delapan ratus juta rupiah), selanjutnya THERESIA DEWI KOROH DIMU membuatkan AJB Nomor : 185/2016 tanggal 18 Agustus 2016 antara SUPARDI TAHIYA dengan SANIATMA ADINOTO selaku Kuasa dari RUDIANTO SULYAWAN dengan harga tanah Rp. 1.660.750.000,- (satu miliar enam ratus enam puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi untuk penandatanganan AJB Nomor : 187/2016 tanggal 18 Agustus 2016 oleh SUAIB TAHIYA dilakukan di Kota Jambi yang dibawa langsung oleh THERESIA DEWI KOROH DIMU dan VERONIKA SYUKUR, diluar dari wilayah jabatan THERESIA DEWI KOROH DIMU selaku Notaris di Labuan Bajo.
- Bahwa pembayaran tanah milik SUPARDI TAHIYA, SUAIB TAHIYA, dan H. SUKRI dilakukan juga di hadapan Notaris THERESIA DEWI KOROH DIMU dengan cara SANIATMA ADINOTO memberikan 14 (empat belas) lembar cek Bank Permata atas nama PT. Prima Pratama Citra dengan total pembayaran sebesar Rp. 25.154.000.000,- (dua puluh lima miliar seratus lima puluh empat juta rupiah) yang besaran nominal uang dalam cek-cek tersebut atas permintaan BURHANUDIN yang di tulis pada setiap lembar cek tertulis hanya nominal besaran jumlah uang sedangkan nama penerima tiap lembar ceknya tidak ditulis.
- Bahwa selanjutnya setelah menerima pembayaran dari SANIATMA ADINOTO tersebut, MASSIMILIANO DE REVIZIIS, NIZZARDO FABIO dan BURHANUDIN berangkat ke Bali untuk melakukan pencairan dengan membuka rekening pada Bank Permata dengan rincian sebagai berikut :
 - Rekening Nomor 9832655578 atas nama MASSIMILIANO DE REVIZIIS pada PT Bank Permata Cabang Denpasar D. Sartika terdapat transaksi

Hal 63 dari 281 hal

Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang masuk tanggal 11 Agustus 2016 sebanyak 5 (lima) kali berasal dari pembayaran uang transaksi tanah milik SUPARDI TAHIYA, SUAIB TAHIYA dan H. SUKRI yang dibayarkan oleh pihak PT. Prima Pratama Citra melalui cek sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), cek sebesar Rp. 1.862.000.000,- (satu miliar delapan ratus enam puluh dua juta rupiah), cek sebesar Rp. 1.902.000.000,- (satu miliar sembilan ratus dua juta rupiah) dan cek sebesar Rp. 1.600.000.000,- (satu miliar enam ratus juta rupiah) sehingga total cek tersebut sebesar Rp. 7.014.000.000,- (tujuh miliar empat belas juta rupiah). Selanjutnya oleh MASSIMILIANO DE REVIZIIS diberikan kepada THERESIA DEWI KOROH DIMU sebesar Rp. 123.270.000,- (seratus dua puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 6.890.730.000,- (enam miliar delapan ratus sembilan puluh juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) dinikmati oleh MASSIMILIANO DE REVIZIIS.

- Rekening Nomor 9832658488 atas nama MASSIMILIANO DE REVIZIIS dan NIZZARDO FABIO pada PT Bank Permata Cabang Denpasar D. Sartika terdapat transaksi uang masuk tanggal 11 Agustus 2016 sebanyak 3 (tiga) kali berasal dari pembayaran uang transaksi tanah milik SUPARDI TAHIYA, SUAIB TAHIYA dan H. SUKRI yang dibayarkan oleh pihak PT. Prima Pratama Citra melalui cek sebesar Rp. 2.900.000.000,- (dua miliar sembilan ratus juta rupiah), cek sebesar Rp. 440.250.000,- (empat ratus empat puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan cek sebesar Rp. 3.728.000.000,- (tiga miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta rupiah).
- Adapun penerimaan pembayaran yang diterima oleh MASSIMILIANO DE REVIZIIS dan NIZZARDO FABIO menggunakan rekening bersama dengan nomor 9832658488, dilakukan transaksi keluar untuk didistribusikan yaitu :
- Ditarik tunai beberapa kali untuk diberikan kepada VERONIKA SYUKUR total Rp. 2.618.947.211,- (dua miliar enam ratus delapan belas juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus sebelas rupiah).
- Di transfer ke rekening nomor 77262853 pada Bank Mandiri Cabang Dewi Sartika atas nama THERESIA DEWI KOROH DIMU sebesar Rp. 440.250.000,- (empat ratus empat puluh empat juta dua ratus lima puluh

Hal 64 dari 281 hal Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) untuk pajak penjualan (SUPARDI TAHIYA, SUAIB TAHIYA dan H. SUKRI).

- Di transfer ke rekening nomor 77264236 pada Bank Mandiri atas nama SUPARDI TAHIYA sebesar Rp. 1.405.000.000,- (satu miliar empat ratus lima juta rupiah) dan SUPARDI TAHIYA hanya disuruh oleh VERONIKA SYUKUR dan THERESIA DEWI KOROH DIMU untuk menandatangani kuitansi tanpa mengetahui berapa jumlahnya. Dari uang masuk ke rekening sebesar Rp. 1.405.000.000,- (satu miliar empat ratus lima juta rupiah) diberikan kepada VERONIKA SYUKUR sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), ENTE PUASA sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), ANDI RIZKI NUR CAHYA D alias IBU ASMA sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan SUAIB TAHIYA sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) sehingga dinikmati oleh SUPARDI TAHIYA sebesar Rp. 730.000.000,- (tujuh ratus tiga puluh juta rupiah).
- Di transfer ke rekening nomor 77264497 pada Bank Mandiri atas nama H. SUKRI sebesar Rp. 2.453.000.000,- (dua miliar empat ratus lima puluh tiga juta rupiah). Namun dalam perjanjian awal antara H. SUKRI dengan ANDI RIZKI NUR CAHYA D alias IBU ASMA, harga tanah H. SUKRI sebesar Rp. 1.275.000.000,- (satu miliar dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah), sehingga ketika menerima pembayaran harga tanah, buku tabungan dan kartu ATM H. SUKRI dipegang oleh ANDI RIZKI NUR CAHYA D alias IBU ASMA yang memberikan uang ke H. SUKRI secara bertahap sehingga total yang diterima oleh H. SUKRI sebesar Rp. 1.380.000.000,- (satu miliar tiga ratus delapan puluh juta rupiah). Selain itu H. SUKRI juga meminta ke ANDI RIZKI NUR CAHYA D alias IBU ASMA untuk diberikan kepada ENTE PUASA sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan H. MUSTAJIB sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) sebagai pihak seolah-olah tapal batas tanah milik H. SUKRI. Adapun sisanya sekitar Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) di nikmati oleh ANDI RIZKI NUR CAHYA D alias IBU ASMA.
- Di transfer ke rekening THERESIA DEWI KOROH DIMU nomor 77262853 pada Bank Mandiri sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

Hal 65 dari 281 hal

Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekening Nomor 9832655969 atas nama NIZZARDO FABIO pada PT Bank Permata Cabang Denpasar D. Sartika terdapat transaksi uang masuk tanggal 11 Agustus 2016 berasal dari pembayaran uang transaksi tanah milik SUPARDI TAHIYA, SUAIB TAHIYA dan H. SUKRI yang dibayarkan oleh pihak PT. Prima Pratama Citra melalui cek sebanyak 4 (empat) lembar yaitu cek sebesar Rp. 1.100.000.000,- (satu miliar seratus juta rupiah), cek sebesar Rp. 2.372.000.000,- (dua miliar tiga ratus tujuh puluh dua juta rupiah), cek sebesar Rp. 1.100.000.000,- (satu miliar seratus juta rupiah) dan cek sebesar Rp. 1.157.000.000,- (satu miliar seratus lima puluh tujuh juta rupiah) sehingga total diterima Rp. 5.729.000.000,- (lima miliar tujuh ratus dua puluh sembilan juta rupiah). Selanjutnya penerimaan pembayaran yang diterima NIZZARDO FABIO tersebut diberikan kepada MASSIMILIANO DE REVIZIIS total sebesar Rp. 178.000.000,- (seratus tujuh puluh delapan juta rupiah), VERONIKA SYUKUR sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sisanya sebesar Rp. 5.201.000.000,- (lima miliar dua ratus satu juta rupiah) dinikmati oleh NIZZARDO FABIO.
- Rekening Nomor 9832655519 atas nama BURHANUDIN pada PT Bank Permata Cabang Denpasar D. Sartika terdapat transaksi uang masuk tanggal 11 Agustus 2016 berasal dari pembayaran uang transaksi tanah milik SUPARDI TAHIYA, SUAIB TAHIYA dan H. SUKRI yang dibayarkan oleh pihak PT. Prima Pratama Citra melalui cek yaitu sebanyak 2 (dua) kali yaitu cek sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan cek sebesar Rp. 4.842.750.000,- (empat miliar delapan ratus empat puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total diterima pembayaran oleh BURHANUDIN sebesar Rp. 5.342.750.000,- (lima miliar tiga ratus empat puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya penerimaan hasil pembayaran yang diterima oleh BURHANUDIN dengan nomor rekening 9832655519 diberikan kepada ARMANSYAH dengan total sebesar Rp. 557.000.000,- (lima ratus lima puluh tujuh juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 4.785.750.000,- (empat miliar tujuh ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dinikmati oleh BURHANUDIN.
- Bahwa setelah SHM nomor 02482 dengan luas tanah 12.020 M² atas nama DAI KAYUS terbit, langsung dibuat AJB dihadapan Notaris LALU

Hal 66 dari 281 hal

Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMAD SUPRIANDI, Notaris pada Labuan Bajo dengan nilai harga tanah sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) disaksikan oleh AFRIZAL alias UNYIL, MARIA SRIKANDI alias IBU KENDI karena sejak awal memang sudah ditawarkan kepada ISMAIL HIRAWAN oleh AFRIZAL alias UNYIL, tetapi harga tanah yang dibayarkan oleh ISMAIL HIRAWAN untuk SHM nomor 02482 dengan luas tanah 12.020 M² atas nama DAI KAYUS sebesar Rp. 3.606.000.000,- (tiga miliar enam ratus enam juta rupiah).

- Bahwa dari pembayaran oleh ISMAIL HIRAWAN sebesar Rp. 3.606.000.000,- (tiga miliar enam ratus enam juta rupiah) diterima oleh DAI KAYUS sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), MURSALIM (anak DAI KAYUS) sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), ALFANDRI alias ANDI sebesar Rp. 735.000.000,- (tujuh ratus tiga puluh lima juta rupiah), AFRIZAL atau UNYIL sebesar Rp. 370.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah), ERLAN YUSRAN sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), MARIA SRIKANDI alias IBU KENDI sebesar Rp. 370.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah), SIRATURAHMI sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) namun biaya BPHTB sebenarnya hanya sebesar Rp.13.227.000,- (tiga belas juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah), selisih Rp. 46.773.000,- (empat puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) dinikmati SIRATURAHMI, ENTE PUASA sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), adapun sisa dari pembayaran oleh ISMAIL HIRAWAN sebesar Rp. 581.000.000,- (lima ratus delapan puluh satu juta rupiah) dinikmati oleh MATHEUS SANIANG NAGA SIAGIAN.
- Bahwa SHM nomor 02492 seluas 6094 M² dijual oleh MAHMUD NIP ke MATHIUS SANIANG NAGA SIAGIAN yang sejak awal membiayai pengurusan sertifikat dengan harga pada AJB No. 286/2016 tanggal 29 November 2016 seharga Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) namun dibayarkan sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta rupiah), selanjutnya oleh MATHIUS SANIANG NAGA SIAGIAN dijual kepada GREGORIUS ANTAR AWAL berdasarkan AJB Nomor : 15/2017 sebesar Rp. 1.350.000.000,- (satu miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan sertifikat hak milik MAHMUD NIP Nomor : 02493 dijual oleh MAHMUD NIP kepada TOPENOS TOREN JAP sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus

Hal 67 dari 281 hal Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juta rupiah), sedangkan harga AJB Nomor : 02/JB/KK/I/2017 tanggal 19 Januari 2017 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah). Hasil transaksi penjualan tanah atas nama MAHMUD NIP terhadap kedua bidang tanah yang lokasinya berada di Karanga/Torro Lemma Batu Kallo, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, MAHMUD NIP menikmati sebesar Rp. 1.800.000.000,- (satu miliar delapan ratus juta rupiah) dan MATHIUS SANIANG NAGA SIAGIAN mendapat Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

- Bahwa selain telah diterbitkan SHM atas nama H. SUKRI, SUPARDI, SUAIB TAHIYA, DAI KAYUS, dan MAHMUD NIP diatas lokasi tanah Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat di Karanga/Torro Lemma Batu Kallo, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, terdapat juga pemohon lain yaitu ENTE PUASA, SYARIFUDIN, SYAMSUDIN, BOHORUDING, MUHAYANG, ARI ROUFU, SUARDI, JUADI KORO, HASANUDING dan DAHERING KORO yang dimohonkan sejak tahun 2013 oleh ENTE PUASA akan tetapi dipending atau tidak diterbitkan Sertifikat Hak Miliknya oleh pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat dikarenakan ada sanggahan dari ADAM DJUDJE. Selanjutnya, agar bisa diproses oleh pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat, ENTE PUASA melakukan kesepakatan dengan ADAM DJUDJE yaitu apabila tanah permohonan ENTE PUASA dan kesembilan orang lainnya laku terjual, maka ENTE PUASA akan memberikan uang sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) kepada ADAM DJUDJE. Setelah ada kesepakatan antara ENTE PUASA dan ADAM DJUDJE, MARTHEN NDEO meneruskan permohonan sertifikat yang dimohonkan oleh ENTE PUASA, dan kesembilan orang lainnya tersebut sampai diterbitkan gambar ukur. Adapun alas hak atas tanah yang diajukan berupa Surat Penyerahan Tanah Adat (Ulayat) dari H. ISHAKA dan HAKU MUSTAFA yang diterima dari KAMNIS HAMNU seolah-olah di tahun 1993 adalah tidak benar karena alas hak tanah tersebut baru dibuat di tahun 2013 saat mengajukan sertifikat dengan cara membuat seolah-olah asli alas hak atas tanah tersebut dengan mengupah ANTONIUS HANI sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah). Selanjutnya, ENTE PUASA dan DAHERING KORO bertemu dengan FRANKY CH. LETIK untuk menawarkan tanah di Karanga/Torro



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lemma Batu Kallo, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat tersebut.

- Bahwa ENTE PUASA dan DAHERING KORO sempat menunjukkan lokasi dari jarak jauh melalui perahu motor lokasi tanah tersebut kepada FRANKY CH. LETIK yang selanjutnya menyetujui penawaran tanah oleh ENTE PUASA dan DAHERING KORO yang ditindak lanjuti dengan pembayaran sebesar Rp. 2.800.000.000,- (dua miliar delapan ratus juta rupiah), yang dari pembayaran tersebut, DAHERING KORO mendapatkan sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) yang dibagikan kepada MUHANYANG, JUADI KORO, SUKAWATI masing-masing sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan sisanya DAHERING KORO menikmati sebesar Rp. 1.380.000.000,- (satu miliar tiga ratus delapan puluh juta rupiah), sedangkan ENTE PUASA mendapatkan Rp. 1.300.000.000,- (satu miliar tiga ratus juta rupiah).
- Bahwa pada tahun 2017, terdapat permohonan penerbitan sertifikat tanah diatas tanah Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat di Karanga/Torro Lemma Batu Kallo, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat atas nama FATIMA BADO SALAM yang pengurusan permohonan sertifikat dilakukan oleh ALIMUDIN SIDIK dengan menggunakan alas hak penyerahan tanah dari tua adat kepada KAMNIS HAMNU yang merupakan suami dari FATIMA BADO SALAM. Selanjutnya dalam proses permohonan sertifikat tersebut, I GUSTI MADE ANOM KALER selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat menyampaikan bahwa tanah tersebut merupakan tanah Pemda Kabupaten Manggarai Barat, selanjutnya ALIMUDN SIDIK bertemu dengan AMBROSIUS SUKUR dan hasil dari pertemuan tersebut selanjutnya AMBROSIUS SUKUR membuat surat kepada Terdakwa pada tanggal 22 September 2017 yang ditandatangani oleh FATIMA BADO SALAM, atas surat tersebut Terdakwa pada tanggal 02 Oktober 2017 menjawab surat dari FATIMA BADO SALAM yang menerangkan bahwa tanah warisan dari KAMNIS HAMNU yang terletak di Toro Lemma Batu Kallo, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat seluas kurang lebih 15.000 M2 dapat diproses sertifikat ke Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat sehingga akhirnya permohonan sertifikat atas nama FATIMA BADO SALAM diproses oleh CHRISTINA MUDASIH selaku

Hal 69 dari 281 hal Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kasi Pengukuran dan Pemetaan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat sampai dibuatkan gambar ukur dan peta bidang.
- Bahwa permohonan Sertifikat Hak Pakai yang diajukan oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat pada tahun 2015 berkasnya sudah dinyatakan LENGKAP oleh JOSIAS BENYAMIN LONA selaku Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tanggal 20 April 2015, namun sampai dengan tahun 2017 tidak diterbitkan Sertifikat Hak Pakai sedangkan proses pengukuran telah dilakukan walaupun dalam proses pengukuran itu sengaja menghilangkan sebahagian tanah Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat dikarenakan ada persetujuan Terdakwa.
 - Bahwa berkas permohonan Sertifikat Hak Pakai yang dinyatakan lengkap tersebut hilang di Bidang Pengukuran dan Pemetaan Kanwil BPN Provinsi Nusa Tenggara Timur yang Kepala Bidanganya adalah ALBERTINA RESDYANA NDAPAMERANG. Selanjutnya masih di tahun 2017, terdapat pemohon lain untuk permohonan pembuatan SHM di atas tanah Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat di Karanga/Torro Lemma Batu Kallo, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat atas nama GORIES MERE dan SUKARNI ILYAS yang mengajukan permohonan penerbitan SHM seluas kurang lebih 30.000 M² (3 Ha) ke Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat melalui MUHAMMAD ACHYAR dengan menggunakan alas hak dari ABDULLAH TENGGU DAENG MALEWA.
 - Bahwa tanah seluas 30.000 M² (3 Ha) yang diajukan oleh GORIES MERE dan SUKARNI ILYAS tersebut berasal dari jual beli antara GORIES MERE (pembeli) dan MUHAMMAD ACHYAR (penjual) dengan harga sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) dan dipanjar oleh GORIES MERE sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), sedangkan MUHAMMAD ACHYAR bisa menjual tanah tersebut berdasarkan kuasa dari LUKMAN HAKIM untuk mengurus dan menyelesaikan permasalahan terkait harta warisan tanah kurang lebih 40 Ha di daerah Wae Cicu.
 - Bahwa permohonan penerbitan SHM seluas kurang lebih 30.000 M² (3 Ha) yang diajukan GORIES MERE dan SUKARNI ILYAS melalui MUHAMMAD ACHYAR sempat didaftarkan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat namun langsung ditolak oleh I GUSTI MADE ANOM KALER karena

Hal 70 dari 281 hal Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alas haknya menggunakan alas hak dari ABDULLAH TENGKU DAENG MALEWA yang bukan fungsionaris adat Kedaluan Nggorang dan lokasi obyek tanah berada di tanah Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat walaupun data yuridis alas hak atas tanah tersebut sudah ditandatangani oleh SYARIFUDIN MALIK selaku Lurah Labuan Bajo dan IMRAN selaku Camat Komodo.

- Bahwa pada bulan Desember 2017, Terdakwa memanggil ahli waris fungsionaris adat Kedaluan Nggorang yaitu H. RAMANG ISHAKA dan menyampaikan akan melepaskan tanah Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat di Karanga/Torro Lemma Batu Kallo, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat diantaranya untuk mengakomodir permohonan GORIES MERE dan SUKARNI ILYAS yang dibawa oleh MUHAMMAD ACHYAR, akan tetapi permintaan Terdakwa tersebut ditolak oleh H. RAMANG ISHAKA.
- Bahwa pada bulan Januari tahun 2018, MUHAMMAD ACHYAR dan GORIES MERE bertemu dengan Terdakwa di rumah jabatan Bupati Manggarai Barat, selanjutnya Terdakwa memanggil I GUSTI MADE ANOM KALER. Dalam pertemuan tersebut membicarakan permohonan atas nama GORIES MERE dan SUKARNI ILYAS yang ditolak oleh I GUSTI MADE ANOM KALER dengan alasan karena lokasi tanah yang dimohonkan adalah tanah Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat. Hasil pembicaraan tersebut, Terdakwa mengeluarkan Surat Pernyataan tertanggal 8 Januari 2018 diatas materai 6000 tanpa adanya persetujuan dari DPRD Kabupaten Manggarai Barat yang isinya menyatakan Pemkab merasa tidak bisa memaksa diri atau berniat memiliki lahan atau tanah tersebut karena antara lain tanah tersebut tidak memiliki dokumen atau bukti penyerahan yang asli, pihak Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat sampai dengan sekarang tidak bisa memanfaatkan aset tanah di Karanga/Torro Lemma Batu Kallo, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat seluas kurang lebih 30 Ha.
- Bahwa selanjutnya MUHAMMAD ACHYAR menemui CAITANO SOARES di ruang kerjanya dengan membawa Surat Pernyataan diatas materai 6000 yang dikeluarkan oleh Terdakwa tersebut diatas. Atas arahan CAITANO SOARES, MUHAMMAD ACHYAR mengajukan kembali penerbitan sertifikat ke Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat di lokasi yang sama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun luasnya menjadi 50.000 M² (5 Ha) dengan menggunakan alas hak dari ADAM DJUDJE dan yang menjadi pemohonnya adalah DAVID ANDRE PRATAMA. Adapun arahan dari CAITANO SOARES tersebut tidak disetujui oleh I GUSTI MADE ANOM KALER karena lokasi tanah yang dimohonkan adalah tanah Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat akan tetapi CAITANO SOARES tetap memproses permohonan yang diajukan oleh MUHAMMAD ACHYAR atas nama DAVID ANDRE PRATAMA.

- Bahwa dalam proses pengurusan SHM seluas 5 Ha, GORIES MERE bersama MUHAMMAD ACHYAR mendatangi I GUSTI MADE ANOM KALER di ruang kerjanya untuk menanyakan perkembangan dan tindak lanjut permohonan penerbitan SHM oleh DAVID ANDRE PRATAMA.
- Bahwa akibat dari diterbitkannya Surat Pernyataan diatas Materai 6000 oleh Terdakwa di atas tanah yang dimohonkan seluas kurang lebih 5 Ha, telah dibangun vila oleh DAVID ANDRE PRATAMA, dan juga di bangun penyelesaian pagar gapura oleh ADAM DJUDJE sebagai pintu masuk di lokasi Karanga/Torro Lemma Batu Kallo, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat serta kunci pagar gapura dikuasai oleh ADAM DJUDJE dan DAVID ANDRE PRATAMA. Selain itu MUHAMMAD ACHYAR dan GABRIEL MAHAL memasang plang bertulisan "Tanah di Karanga seluas \pm 30 Ha milik H. ADAM DJUDJE di bawah pengawasan Pengacara/Advocat GABRIEL MAHAL dan MUHAMMAD ACHYAR" sedangkan MUHAMMAD ACHYAR mengetahui pasti tanah tersebut milik Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat.
- Bahwa akibat perbuatan penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh Terdakwa pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 yang menyetujui data yuridis dan data fisik untuk proses permohonan Sertipikat Hak Milik (SHM) atas nama H. SUKRI, SUPARDI TAHIYA, SUAIB TAHIYA, MAHMUD NIP dan DAI KAYUS yang berada di lokasi tanah Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat dan menyetujui peta bidang tanah milik Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat seluas kurang lebih 24 Ha yang diketahuinya secara pasti luas tanah milik Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat seluas kurang lebih 30 Ha di Karanga/Torro Lemma Batu Kallo, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat. Selanjutnya pada bulan Januari tahun 2018, Terdakwa membuat Surat Pernyataan tertanggal 8 Januari 2018 tanpa persetujuan DPRD Kabupaten

Hal 72 dari 281 hal

Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manggarai Barat yang isinya menyatakan Pemkab merasa tidak bisa memaksa diri atau berniat memiliki lahan atau tanah tersebut karena antara lain tanah tersebut tidak memiliki dokumen atau bukti penyerahan yang asli, menguntungkan orang lain yaitu ABDUL IPUR sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), SUPARDI TAHIYA sebesar Rp. 725.000.000,- (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah), SUAIB TAHIYA sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah), H. SUKRI sebesar Rp. 1.380.000.000,- (satu miliar tiga ratus delapan puluh juta rupiah), H. MUSTAJIB sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), DAI KAYUS sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), MAHMUD NIP sebesar Rp. 1.800.000.000,- (satu miliar delapan ratus juta rupiah), ENTE PUASA sebesar Rp. 1.870.000.000,- (satu miliar delapan ratus tujuh puluh juta rupiah), ANDI RIZKI NUR CAHYA D alias IBU ASMA sebesar Rp. 775.000.000,- (tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah), VERONIKA SYUKUR sebesar Rp. 3.068.947.211,- (tiga miliar enam puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus sebelas rupiah), THERESIA DEWI KOROH DIMU sebesar Rp. 1.123.270.000 (satu miliar seratus dua puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), BURHANUDIN sebesar Rp. 5.342.750.000,- (lima miliar tiga ratus empat puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), ARMANSYAH sebesar Rp. 557.000.000,- (lima ratus lima puluh tujuh juta rupiah), MASSIMILIANO DE REVIZIIS sebesar Rp 7.014.000.000,- (tujuh miliar empat belas juta rupiah), NIZZARDO FABIO sebesar Rp 5.729.000.000,- (lima miliar tujuh ratus dua puluh sembilan juta rupiah), ALFANDRI alias ANDI sebesar Rp 1.015.000.000,- (satu miliar lima belas juta rupiah), AFRIZAL alias UNYIL sebesar Rp 370.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah), SIRATURAHMI sebesar Rp 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah), FREDY E. J. MARAMIS sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), MARTHEN NDEO sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), MUHAMMAD ACHYAR sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), DAVID ANDRE PRATAMA menguasai tanah seluas 5 Hektar (Ha), ADAM DJUDJE penguasaan tanah seluas 30 Hektar (Ha) dalam bentuk pagar gapura menuju lokasi tanah tersebut.

- Bahwa akibat dari perbuatan menyalahgunakan kewenangan oleh Terdakwa pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 yang menyetujui

Hal 73 dari 281 hal Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

data yuridis dan data fisik untuk proses permohonan Sertipikat Hak Milik (SHM) atas nama H. SUKRI, SUPARDI TAHIYA, SUAIB TAHIYA, MAHMUD NIP dan DAI KAYUS yang berada di lokasi tanah Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat dan menyetujui peta bidang tanah milik Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat seluas kurang lebih 24 Ha yang diketahuinya secara pasti luas tanah milik Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat seluas kurang lebih 30 ha di Karanga/Torro Lemma Batu Kallo, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat. Selanjutnya pada bulan Januari tahun 2018 dan selanjutnya Terdakwa membuat Surat Pernyataan tertanggal 8 Januari 2018 tanpa persetujuan DPRD Kabupaten Manggarai Barat yang isinya menyatakan Pemkab merasa tidak bisa memaksa diri atau berniat memiliki lahan atau tanah tersebut karena antara lain tanah tersebut tidak memiliki dokumen atau bukti penyerahan yang asli, pihak Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat sampai dengan sekarang tidak bisa memanfaatkan aset tanah di Karanga/Torro Lemma Batu Kallo, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat seluas kurang lebih 30 Ha sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 1.301.011.161.288,- (satu trilyun tiga ratus satu miliar sebelas juta seratus enam puluh satu ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah) sebagaimana Laporan Akuntan Independen Nomor: 004/PH/OPKJ/AUP/II/XII/20 tanggal 23 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh PUPUNG HERU, Ak, CPA pada KAP. PUPUNG HERU.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pasal 3, Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-(1) KUHP Jo Pasal 64 KUHP.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dengan Surat Tuntutan Pidannya Nomor PDS-17/N.3.24/Ft.1/03/2021 tanggal 21 Juni 2021, telah menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

Hal 74 dari 281 hal Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa AGUSTINUS CHRISTOFORUS DULA terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama – sama sebagaimana Dakwaan Primiar.
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) Tahun dan Denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (SATU MILIAR RUPIAH) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan jenis Rutan.
4. Menetapkan agar Barang bukti :
 1. 1 (satu) buah Buku Agenda Surat Masuk-Keluar Sub Bagian Adm. Pem Umum;
 2. 1 (satu) buah buku Surat Masuk-Keluar 2012;
 3. 1 (satu) buah Buku Keluar-Masuk Surat TAPEM 2012;
 4. 1 (satu) buah Buku (3) Agenda Surat Masuk-Keluar Tahun 2016;
 5. 1 (satu) buah Buku Surat Masuk-Keluar TAPEM 2013;
 6. 1 (satu) buah Buku Agenda Surat Masuk 2014 (2);
 7. 1 (satu) buah Buku Agenda Surat Masuk-Keluar 2015 Bagian Adm. Pem. Umum;
 8. 1 (satu) buah Buku Agenda Surat Masuk-Keluar (2) Tahun 2016;
 9. 1 (satu) buah Buku Surat Masuk TAPEM 2014 (1);
 10. 1 (satu) buah Buku Agenda Lanjutan 2015 Masuk-Keluar;
 11. 1 (satu) buah Buku Agenda Surat/ Keluar 2016 (1);
 12. 1 (satu) buah Buku Agenda Surat Keluar 2016 (4);
 13. 1 (satu) buah Buku Surat Keluar Masuk Thn 2017 (4);
 14. 1 (satu) buah Buku Agenda 2018 (2);
 15. 1 (satu) buah Buku Agenda Surat Keluar-Masuk Thn 2019;
 16. 1 (satu) bundel Asli Surat Undangan Tindak Lanjut Dari Peninjauan Lokasi;
 17. 1 (satu) lembar Asli Surat Undangan Rapat, Nomor: Pem.130/372/X/2014 Tgl 13 Oktober 2014;
 18. 1 (satu) lembar Dokumen Mohon Surat Penegasan, Nomor : Pem.131/192/VII/2018 Tgl 30 Juli 2018;
 19. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Penegasan, Nomor: Pem.131/148/VI/2018 Tgl 06 Juni 2018;
 20. 1 (satu) lembar Asli Surat Pensertifikatan Tanah Pemda, Nomor: Pem.130/184/VI/2014 Tgl 11 Juni 2014;
 21. 1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan Sertifikat Tanah Pemerintah Daerah, Nomor: Pem.130/113/V/2014 Tgl 14 Mei 2014;
 22. 1 (satu) bundel Fotocopy surat Keterangan, Nomor: Pem.131/205/XI/2017 Tgl 13 September 2017;
 23. 1 (satu) bundel Asli Surat Keterangan, Tanggal 8 Januari 2018;
 24. 1 (satu) lembar Asli Surat Undangan Mediasai, Nomor: Pem.130/28/II/2018 Tgl 8 Februari 2018;
 25. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Pendataan Masalah Tanah Pemda, Nomor: Pem.130/405/XII/2014 Tgl 12 Desember 2014;
 26. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Jawaban Atas Somasi, Nomor: Pem.131/277/XII/2017 Tgl 4 Desember 2014;
 27. 1 (satu) buah Buku Agenda Surat Keluar-Masuk 2018;

Hal 75 dari 281 hal Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. 1 (satu) bundel Telaahan Staf, Perihal : Tindak Lanjut Proses Sertifikat Hak Milik Tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat di Toroh Lemma Batu Kalo / Karangan, , Nomor : Pem.130/138/V/2018, tanggal 18 Mei 2018;
29. 1 (satu) lembar Asli Surat Mohon Pensertifikatan Tanah Pemda di Toroh Lemma Batu Kalo / Karangan, Nomor : Pem.130/84/III/2015, Tanggal 17 Maret 2015;
30. 1 (satu) bundel Asli Dokuman Tanggapan Atas Klarifikasi, Nomor : Pem.131/119/IV/2018, Tanggal 30 April 2018;
31. 1 (satu) lembar Asli Surat Undangan Nomor : Pem.131/155/VI/2018, Tanggal 26 Juni 2018;
32. 1 (satu) lembar Asli Surat Penyelesaian Setifikat Tanah Pemda di Kerangan, Nomor : Pem.130/115/IV/2016, Tanggal 27 April 2016;
33. 1 (satu) lembar Asli Surat Undangan Nomor : Pem.130/330/X/2014, Tanggal 16 Oktober 2014;
34. 1 (satu) lembar Asli Surat Undangan Nomor : Pem.130/331/X/2014, Tanggal 16 Oktober 2014;
35. 1 (satu) lembar Asli Surat Undangan Nomor : Pem.130/338/X/2014, Tanggal 20 Oktober 2014;
36. 1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan untuk Menentukan Batas-Batas Tanah Nomor : Pem.131/119/IV/2015, Tanggal 22 April 2015;
37. 1 (satu) lembar Asli Surat Undangan Rapat Nomor : Pem.130/172/VII/2015, Tanggal 02 Juli 2015;
38. 1 (satu) lembar Asli Surat Undangan Rapat Nomor : Pem.130/204/VIII/2015, Tanggal 11 Agustus 2015;
39. 1 (satu) lembar Asli Surat Undangan Rapat Nomor : Pem.130/183/VII/2015, Tanggal 28 Juli 2015;
40. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Permasalahan Tanah di Toroh Lemma Batu Kalo Kelurahan Labuan Bajo Kecamatan Komodo, Nomor : Pem.131/224/X/2017, tanggal 11 Oktober 2017;
41. 1 (satu) bundel Asli Surat Jawaban atas Somasi, Nomor : Pem.131/277/XII/2017, tanggal 4 Desember 2017;
42. 1 (satu) bundel Asli Surat Mohon Pensertifikatan Tanah Pemda di Toroh Lemma Batu Kalo / Kerangan, Nomor : pem.130/84/III/2015, tanggal : 17 Maret 2015;
43. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Mohon Pensertifikatan tanah Pemda di Toroh Lemma Batu Kalo / Karangan, Nomor : 553/53.15.300/VII/2018, tanggal 10 Juli 2018;
44. 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa Nomor : PEM.130/108/IV/205, tanggal 1 April 2015;
45. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Permohonan Penegasan Penyerahan Tanah, Nomor : Pem.131/76/III/2015, tanggal 06 Maret 2015;
46. 1 (satu) lembar Asli Surat Mohon Klarifikasi / Jawaban dan Petunjuk, Nomor : Pem.131/168/VII/2018, tanggal : 6 Juli 2018;
47. 1 (satu) jepit Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah, Nomor : Pem.130/189/IV/2015;
48. 1 (satu) bundel Asli Surat Tanda Terima Berkas Tanah Pemkab Manggarai Barat Lokasi Keranga, tanggal 8 April 2015;
49. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan/Penegasan, tanggal 22 Oktober 2014;
50. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Penjelasan tentang Tanah Pemda, Nomor : Pem.131/137/V/2015, tanggal 13 Mei 2015;

Hal 76 dari 281 hal

Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Pembatalan / Penarikan Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Hak Atas Tanah, Nomor : Pem.593/KLB/1873/XI/2014, tanggal 27 Nopember 2014;
52. 1 (satu) bundel Fotocopy Dokumen Kesimpulan Rapat Muspida Tentang Pembahasan Tanah Pemda di Keranga Kelurahan Labuan Bajo tanggal 21 Oktober 2014;
53. 1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan Penegasan Penyerahan Tanah, Nomor : Pem.131/76/III/2015, tanggal 06 Februari 2015;
54. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Surat Keterangan Penegasan tentang Perolehan Tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai di Karanga Kecamatan Komodo, tanggal 8 Maret 2018;
55. 1 (satu) lembar Asli Surat Penegasan Penyelesaian Sertifikat Tanah Pemda, Nomor : Pem.130/139/V/2016, tanggal 16 Mei 2016;
56. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Klarifikasi, Nomor : Pem.131/42/II/2018, tanggal 1 Februari 2018;
57. 1 (satu) lembar Asli Surat Undangan Rapat Lanjutan, Nomor : Pem.130/191/VIII/2017, tanggal 22 Agustus 2017;
58. 1 (satu) lembar Asli Surat Menghadap Bupati Manggarai Barat, Nomor : Pem.130/191/VI/2014, tanggal 16 Juni 2014;
59. 1 (satu) lembar Asli Surat Undangan, Nomor : Pem.130/208/VI/2014, tanggal 25 Juni 2014;
60. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pengiriman Notulen Rapat dan Berkas Tanah Kerangan, Nomor : Pem.131/378/XI/2014, tanggal 26 November 2014;
61. 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa, Nomor : Pem.131/40/III/2014, Tanggal 3 Maret 2014;
62. 1 (satu) bundel Fotocopy Peta Sketsa dikutip dari peta sketsa hasil penataan oleh H. Adam Djudje, tanggal 26-4-1997;
63. 1 (satu) bundel Fotocopy Dokumen Tanah Adat di Lokasi Toro Lema Batu Kallo (Kerangan) Luas 30 HA terjadi tumpang tindih penyerahan oleh Fungsionaris Adat/Tua Adat Nggorang, Nomor : 01/KDE/II/2014, tanggal 10-1-2014;
64. 1 (satu) jepit Asli Surat Penyampaian Copyan Dokumen Tanah Toro Lama Batu Kalo / Karangan, Nomor : Pem.130/212/X/2019, tanggal 02 Oktober 2019;
65. 1 (satu) bundel Fotocopy Dokumen Klarifikasi Tanah Adat di Lokasi Toro Lemma Batu Kalo (Karangan) Luas 30 Ha diserahkan oleh Fungsionaris Adat/Tua Adat Nggorang kepada Pemda Tigkat II Manggarai pada tahu 1997, tanggal 20-06-2013;
66. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Keterangan, tanggal 5-4-2013;
67. 1 (satu) jepit Asli Surat dari Dorman Paulus, S.H., & Partners (Advokat dan Konsultan Hukum) kepada Camat Komodo di Labuan bajo, tanggal 28 Nopember 2017;
68. 1 (satu) jepit Fotocopy Surat Pernyataan Sikap Bersama Ahli Waris dan Pelaku-Saksi Tanah Pemda Manggarai Barat di Karangan / Toroh Lemma Batu kallo, tanggal 3 Mei 2018;
69. 1 (satu) lembar Asli Surat Penegasan, Nomor : Pem.130/98/IV/2019, tanggal 01 April 2019;
70. 1 (satu) jepit Fotocopy Surat Ukur Gambar Situasi;
71. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh H. Moh. A. Adam Djudje, tanggal 30-3-2015;
72. 1 (satu) bundel Fotocopy Dokumen Tanah Pemda di Kranga Kelurahan Labuan Bajo Kecamatan Komodo;

Hal 77 dari 281 hal

Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73. 1 (satu) bundel Fotocopy Dokumen Laporan Penanganan Masalah tanah, Nomor : Trantib.300/1135/X/2014, tanggal 14 Oktober 2014;
74. 1 (satu) jepit Asli Surat Somasi / Peringatan, Nomor : 010/MAA-SOM/XI/2017, tanggal 28 November 2017;
75. 1 (satu) bundel Asli Surat Mohon Persetujuan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat, Nomor : Pem.130/319/XII/2016, tanggal 2 Desember 2016;
76. 75a. Asli Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat, Nomor: 217/KEP/HK/2015 Tanggal 24 Agustus 2015;
77. 1 (satu) jepit Fotocopy Dokumen Ringkasan Penjelasan Tentang Tanah Pemerintah Daerah di Krangan Kelurahan Labuan Bajo- Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
78. 1 (satu) lembar Asli Surat Pembangunan Jalan, Nomor: Pem.131/30/II/2018, Tanggal 24 Januari 2018;
79. 1 (satu) jepit Asli Surat Pemberitahuan, Nomor: Pem.131/131/V/2018, Tanggal 14 Mei 2018;
80. 78a. Asli Surat Penertiban Sertifikat, Nomor: Pem.130/29/II/2017, Tanggal 13 Pebruari 2017;
81. 1 (satu) jepit Asli Surat Undangan Mediasi Masalah Tanah, Nomor: Trantib.300/1532/X/2016 Tanggal 19 Oktober 2016;
82. 1 (satu) bundel Fotocopy Dokumen Sanggahan Atas Tanah Alm. Haji Sup Bin Makki Ahli Waris/ Pemegang Kuasa Menguru Tanah Warisan An. Haji Mutajib dan Wahyudin Bin Haji Mustajib;
83. 1 (satu) jepit Fotocopy Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Atas Tanah, Nomor: Lbj.593/111/II/2014 Tanggal 23 Januari 2014;
84. 1 (satu) jepit Asli Surat Permohonan Pengukuran dan Rincian Biaya Dalam Rangka Proses Pensertifikatan Tanah Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Seluas 30 Ha, Nomor: 291/53.14/300-6/III/2015 Tanggal 25 Maret 2015;
85. 1 (satu) jepit Asli Surat Pengantar Data Permasalahan Urrusan Pemerintahan Umum, Nomor: Pem.131/184/VIII/2019 Tanggal 19 Agustus 2019;
86. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keberatan dan Penegasan , Nomor: Pem.131/201/IX/2019 Tanggal 11 September 2019;
87. 1 (satu) lembar Asli Surat Klarifikasi dab Penegasan, Nomor: Pem.130/215/X/2019 Tanggal 03 Oktober 2019;
88. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keterangan, Nomor: Pem.131/220/X/2017 Tanggal 02 Oktober 2017;
89. 1 (satu) lembar Fotocopy Peta Situasi;
90. 1 (satu) jepit Asli Surat Permohonan Sertifikat, Nomor: Pem.131/45/II/2011 Tanggal 17 Pebruari 2011;
91. 1 (satu) jepit Asli Surat Pendataan Tanah Pemda, Nomor: Pem.130/171/X/2010 Tanggal 06 Oktober 2010;
92. 1 (satu) jepit Asli Surat Pendataan Tanah Pemerintah Daerah, Nomor: Pem.130/4/II/2011 Tanggal 6 Jabuari 2011;
93. 1((satu) buah Buku Sambungan Agenda Surat Masuk AS I 2013-2014;
94. 1 (satu) buah Buku AS I Sambungan Agenda Surat Masuk tahun 2014;
95. 1 (satu) buah Buku Peraturan Bupati Manggarai Barat, Nomor: 38 Tahun 2015 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Barat tahun Anggaran 2015;
96. 1 (satu) jepit Fotocopy Dokumen Masalah Hukum Adat Tanah di Kabupaten Manggarai di Kaitan Dengan Pelaksanaan Undang-Undang Pokok Agraria Tanggal 15 September 1983;

Hal 78 dari 281 hal Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

97. 1 (satu) bundel asli Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Tahun Anggaran 2015;
98. 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2015 Bagian Administrasi pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat;
99. 1 (satu) lembar bentuk materai dari tahun 1960 - 2005;
100. 1 (satu) bundel Fotocopy Arsip Tanjung Poko- Karanga;
101. 1 (satu) jepit Fotocopy Surat Pengukuhan Penyerahan Tanah Adat, tanggal 09 oktober 2019;
102. 1 (satu) berkas Fotocopy dalam map kuning Surat Keterangan yang ditanda tangani oleh Drs. Agustinus CH. Dula, Tanggal 08 Januari 2018;
103. 1 (satu) bundel Fotocopy Berita Acara Serah Terima Dokumen Hasil Klarifikasai P3D Antara Pemerintah Kabupaten Manggarai dengan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, Nomor: Pem.115/30.a/I/2005 Tanggal 24 Januari 2005;
104. 1 (satu) jepit Fotocopy Surat Kelengkapan Berkas pensertifikatan tanah tanah pemda di toro lemma batu kallo, nomor: Pem.130/205/VIII/2018 Tanggal 28 Agustus 2018;
105. 1 (satu) buah Buku Agenda Surat Masuk Tahun 2020;
106. 1 (satu) jepit Asli Surat Undangan Klarifikasi, Nomor: 92/53.15/600-13/I/2015 Tanggal 21 Januari 2015;
107. 1 (satu) berkas Fotocopy dalam Map Biru tentang Pencabutan Surat Kuasa An. Yohanes Ongge;
108. 1 (satu) bundel Fotocopy Undang-undang RI Nomor 8 Tahu 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
109. 1 (satu) Lembar fotocopy Daftar Sertifikat Tanah Pemda Tahun 2014/2015;
110. 1 (satu) jepit Asli Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah;
111. 1 (satu) buah Buku Agenda Warna Kuning Yang Berisi Daftar Tanah Pemda Manggarai Barat yang sudah di Sertifikat;
112. 1 (satu) map hijau yang bertuliskan Dokumen Tanah Pemda Kab. Manggarai Barat yang mau di Sertifikat;
113. 1 (satu) map Hijau yang bertuliskan Alas Hak Pensertifikatan tanah Pemda;
114. 1 (satu) buah Buku Agenda batik bertuliskan Agenda Surat Keluar & Masuk Bagian TAPEM Thn. 2017;
115. 1 (satu) Map warna merah muda bertuliskan SK 140 Asli (Tanah Pemempatan);
116. 1 (satu) Map Batik yang Bertuliskan TPU;
117. 1 (satu) warna merah muda yang bertuliskan Kementerian Agama (Permohonan Pengalihan Aset);
118. 1 (satu) bundel map snelhecter bertuliskan Asli Penyerahan & Berita Acara Tanah Kecamatan Welak;
119. 1 (satu) map Biru Bertuliskan dokumen Asli Penyerahan Tanah Pemda Luas : 328,79 Ha, Termasuk Luas Perkiraan \pm 70 Ha disebut dalam Surat penyerahan Tahun 1961;
120. 1 (satu) map snelhecter bertuliskan Dok. Water Treamen;
121. 1 (satu) buah Buku agenda Batik Bertuliskan Buku Inventaris Masalah Tanah TAPEM;
122. 1 (satu) bundel Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Milik;

Hal 79 dari 281 hal Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

123. 1 (satu) map snelhecter bertuliskan Dokumen Asli Tanah Lengkong Benteng kecamatan Komodo;
124. 1 (satu) Map hijau Bertuliskan bandara;
125. 1 (satu) Map Batik Warna Ungu Berisikan Peta Bidang Tanah;
126. 1 (satu) Map Warna Biru bertuliskan BA. Tanah Puskesmas Bari;
127. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Penyerahan Sertifikat, Tanggal 18 November 2014;
128. 1 (satu) jepit Fotocopy Surat Penyampaian Hasil Rekon/ Pengukuran Pengembalian Batas Sertifikat Tanah Bandara Komodo Labuan Bajo, Nomor: 636/PL.303/X/Kmd-2014 Tanggal 16 Oktober 2014;
129. 1 (satu) jepit Fotocopy Berita Acara Pnetapan Tapal Batas Luar dari tanah-tanah yang telah diserahkan oleh tua-tua adat sesuai Surat Pernyataan Penegasan Penyerahan Hak Atas Tanah Untuk Kota Baru Kecamatan Komodo dan Untuk Pengembangan Kota Labuan Bajo Kepada Pemerintah Daerah Tingkat II Manggarai Tanggal 16 Maret 1984;
130. 1 (satu) bundel fotocopy surat pernyataan sikap dari keluarga besar rahong bore tentang dan pora desa tentang Tanggal 24 Juni 2006;
131. 1 (satu) jepit Fotocopy sertifikat (Tanda Bukti Hak) Hak Pengelolaan;
132. 1 (satu) Map Kuning berisikan Surat Pernyataan Riwayat Penguasaan Tanah Pemda- Tingkat II Manggarai;
133. 1 (satu) bundel Map Snelhecter berisikan Surat Tugas, No: Pem.181.1/1384/VII/1993 Tanggal 20 Juli 1993;
134. 1 (satu) lembar Peta Kabupaten Manggarai Barat;
135. 1 (satu) Surat pertimbangan agar tidak melayani proses penerbitan hak atas tanah a.n H.M Abubakar Adam Djudje di Karang, Nomor: Pem.138/1311/XII/2014 Tanggal 02 Desember 2014;
136. 2 (dua) Berkas Surat Mohon tidak melakukan proses pengukuran tanah a.n H.M Abubakar Adam Djudje dan Ente Puasa, DKK Nomor: Pem.593/229/III/2014 Tanggal 01 Maret 2014;
137. 1 (satu) surat mediasi masalah tanah, Nomor: Trantib/300/1024/IX/2014 Tanggal 20 September 2014;
138. 1 (satu) surat peninjauan lokasi Nomor: 633/53.15/600.13/2014 Tanggal 06 juni 2014;
139. 1 (satu) surat Undangan Mediasi, nomor: 634/53.15/600.13/2014 Tanggal 10 Juni 2014;
140. 1 (satu) Surat Pemriksaan Sidan Panitia 'A' an. Suaib Taiya dan Supardi Tahiya yang terletak di karang, kelutahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nomor: 1004/53.15/200.3/IX/2014 Tanggal 16 September 2014;
141. 1 (satu) Surat Undangan Mediasi, Nomor:01/53.15/600-13/IX/2014 Tanggal 10 September 2014;
142. 1 (satu) surat kelengkapan berkas pensertifikatan tanah pemda di toro lemma batu kallo, Nomor: Pem.130/205/VIII/2018 Tanggal 28 Agustus 2018;
143. 1 (satu) Surat Pengukuhan penyerahan tanah adat, tanggal 06 Agustus 2018 di tanda tangani oleh H. Umar ishaka, H. Ramang Ishaka, Drs. Anton us ambatan, Yosep Latif, Sarifudin Malik,S.ST dan Abdullah Nur,S.IP;
144. 1 (satu) Surat Permohonana pengukuran dan rincian biaya ukur terhadap bidang tanah an. Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, Nomor: 156/6-53/IV/2015 Tanggal 20 April 2015;
145. 1 (satu) Asli Surat pengiriman gambar ukur, Nomor:Pem.130/205/VIII/2015 Tanggal 13 Agustus 2015;

Hal 80 dari 281 hal

Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

146. 1 (satu) Asli Surat Klarifikasi, Nomor: Pem.130/770/X/2013 Tanggal 25 Oktober 2013;
147. 1 (satu) bundel Map Merah bertuliskan Dokumen Arsip Keranga Lab. Bajo, 12-10-2020;
148. 1 (satu) unit Xiaomi Redmi warna putih imei 1: 880418043085482 dan imei 2: 880418043085490, beserta SIM Card;
149. 1 (satu) bundel asli dokumen penjelasan atau klarifikasi tanah pemda tanggal 07 Maret 2018 yang di tanda tangani oleh H.Adam Djudje;
150. 1 (satu) unit Handphone warna merah dengan nomor IMEI 1 : 861949044143390, IMEI 2 : 861949044143382, beserta 1 buah SIM Card
151. 1 (satu) lembar Gambar Ukur, NIB: 24.16.01-16: 02760 & 24.16.01.16: 02761 Tahun: 2420/2016, dengan nama Pemohon : MAHMUD NIP alamat LABUAN BAJO, tanggal: - ;
152. 1 (satu) lembar Gambar Ukur, NIB: 02392 & 02393, Tahun : 634, 633 / 2013, dengan nama Pemohon : SUKRI, SUPARDI TAHIYA, SUAIB TAHIYA, tanggal: ;
153. 1 (satu) lembar Gambar Ukur, NIB: 24.16.01.16. 02698, Tahun 2464 / 2015, dengan nama pemohon: MAHMUD NIP, alamat LABUAN BAJO, tanggal: 22 – 10 - 2015;
154. 1 (satu) lembar Gambar Ukur, NIB: -, Tahun 2013, dengan nama pemohon: ENTE PUASA, DAHERING KORO, HASANUDING, JUAIDI, SUHARDI, HASRA ORE, MEIHAYANG, SUKAWATI, SAMSUDING, SARIFUDIN, alamat LABUAN BAJO, tanggal: 10 – 10 - 2013;
155. 1 (satu) lembar Gambar Ukur, NIB: -, Tahun: -, dengan nama pemohon: DAVID ANDRE PRATAMA, alamat JL. PULOMAS TIMUR 2A2 JAKARTA TIMUR, tanggal: - ;
156. 1 (satu) lembar Gambar Ukur, NIB: 021651, Tahun: 64/2013, dengan nama pemohon: DAE KAYUS, alamat LABUAN BAJO, tanggal: 11 – 09 - 2015 ;
157. 1 (satu) lembar Gambar Ukur, NIB: 02537, 2393, 2392, Tahun: 541/2014, 634/2013, 633/2013, dengan nama pemohon: H. SUKRI, SUAIB, SUPARDI T, alamat: -, tanggal: - ;
158. 1 (satu) lembar fotocopy lampiran 13 tanggal 08 April 2016 atas nama FATIMA BADO SALAM;
159. 2 (dua) lembar fotocopy formulir isian 402 atas nama FATIMA BADO SALAM tanggal 08 April 2016;
160. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Pernyataan atas nama FATIMA BADO SALAM tanggal 08 April 2015;
161. 1 (satu) lembar fotocopy Data Subyek dan Obyek Hak atas nama FATIMA BADO SALAM tanggal 08 April 2016;
162. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Hak atas tanah nomor: Pem.593/631.a/IV/2016 atas nama KAMIS HAMNU (alm) tanggal 08 April 2016;
163. 2 (dua) lembar fotocopy Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Sporadik atas nama FATIMA BADO SALAM tanggal 08 April 2016;
164. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Tanah Tidak Dalam Sengketa atas nama FATIMA BADO SALAM tanggal 08 April 2016;
165. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Penanaman Tanda Batas Tanah atas nama FATIMA BADO SALAM tanggal 08 April 2016;
166. 1 (satu) lembar fotocopy Pengumuman tanpa nomor, tanpa nama, tanpa tanggal;
167. 1 (satu) lembar fotocopy data panitia pemeriksa tanah A;
168. 1 (satu) bendel fotocopy Risalah Penelitian data yuridis dan penetapan batas tanggal 08 April 2016;

Hal 81 dari 281 hal

Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

169. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keterangan dari Haji Muhammad Abubakar Adam Djuje tanggal 05 Januari 2016;
170. 4 (empat) lembar fotocopy Surat Bukti Penyerahan Tanah Adat atas nama KAMIS HAMNU tanpa tanggal;
171. 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Kematian atas nama KAMIS HAMNU tanggal 28 Februari 2019;
172. 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Terima Sementara Pajak Bumi dan Bangunan atas nama FATIMA BADO SALAM;
173. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama FATIMA BADO SALAM, lokasi Karang tanggal 15 Oktober 2018;
174. 2 (dua) lembar asli Surat Keterangan Waris tanggal 09 Mei 2016;
175. 2 (dua) lembar asli Surat Pernyataan Penolakan Waris tanggal 09 Mei 2016;
176. 2 (dua) lembar fotocopy Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas: 4624/2018 atas nama FATIMA BADO SALAM tanggal 16 Agustus 2016;
177. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Permohonan Keterangan dari FATIMA BADO SALAM kepada BUPATI MANGGARAI BARAT tanggal 22 September 2017;
178. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Bupati Manggarai Barat nomor: Pem.131/220/X/2017 perihal Surat Keterangan tanggal 02 Oktober 2017;
179. 1 (satu) lembar fotocopy laporan kehilangan barang nomor: LKB/018/II/2017/NTT/Res Mabar tanggal 11 Januari 2017;
180. 1 (satu) lembar fotocopy Peta Bidang Tanah atas nama FATIMA BADO SALAM tanggal 15 November 2018;
181. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemberitahuan Sidang Panitia A nomor: 93/53.15.HP.01/03/6/II/2019 tanggal 22 Februari 2019 atas nama FATIMA BADO SALAM;
182. 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Hadir Sidang Panitia A tanggal 27 Februari 2019 atas nama FATIMA BADO SALAM, DKK;
183. 1 (satu) bendel fotocopy Notulen Sidang Panitia A tanggal 27 Februari 2019 atas nama FATIMA BADO SALAM, STEFANUS EFFENDI, DOMINIKUS DALO, PT. ASDP PERSERO;
184. 2 (dua) lembar asli Lampiran 13 atas nama SUHARDI tanpa tanggal tahun 2013;
185. 4 (empat) lembar asli Formulir Isian 402 atas nama SUHARDI tanpa tanggal, tahun 2013;
186. 2 (dua) lembar asli Data Subyek dan Obyek Hak atas nama SUHARDI tanpa tanggal, tahun 2013;
187. 2 (dua) lembar asli Surat Pernyataan Penanaman Tanda Batas Tanah atas nama SUHARDI tanpa tanggal, tahun 2013;
188. 2 (dua) lembar asli pernyataan penguasaan fisik bidang tanah sporadik atas nama SUHARDI tanpa tanggal, tahun 2013;
189. 2 (dua) lembar asli surat pernyataan tidak dalam keadaan sengketa atas nama SUHARDI tanpa tanggal, tahun 2013;
190. 2 (dua) lembar asli Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Hak Atas Tanah atas nama SUHARDI, tanpa nomor, tanpa tanggal, tahun 2013;
191. 2 (dua) lembar asli dan 4 (empat) lembar fotocopy Surat Keterangan Belum/Tidak kena Pajak Nomor: Lbj.973/5038/VIII/2013 atas nama SUHARDI tanggal 03 Agustus 2013;
192. 2 (dua) lembar asli dan 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah, nomor: Lbj.593/5109/VIII/2013 atas nama SUHARDI, tanggal 19 Agustus 2013;

Hal 82 dari 281 hal Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

193. 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan Pemilikan Tanah / Penguasaan Tanah atas nama SUHARDI tanggal 02 Agustus 2013;
194. 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Bukti Penyerahan Tanah Adat atas nama SUHARDI tanpa tanggal & tahun;
195. 2 (lembar) fotocopy surat penyerahan kuasa atas nama Hj Ishaka kepada Hj. Adam Djuje tanggal 01 November 1996;
196. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Penyerahan Tanah Adat atas nama Hj. Muhammad Abubakar Adam Djuje tanggal 11 Februari 2013;
197. 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Drs. G. P. Ehok tanggal 10 Mei 2013;
198. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Surat Kuasa ENTE PUASA, dkk kepada FRANKY CH. LETIK tanggal 22 Agustus 2013;
199. 4 (empat) lembar fotocopy legalisir KTP atas nama SUHARDI ENTE;
200. 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama SUHARDI ENTE;
201. 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama SUHARDI ENTE;
202. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga atas nama SUHARDI ENTE;
203. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama ABDUL HARIS NASIPIN, lokasi Batu Gosok – Kenanga, tanggal 15 Maret 2013;
204. 1 (satu) lembar asli dan 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Laporan Kehilangan Barang Nomor: LKB/522/XI/2012/NTT/Res Mabar tanggal 22 November 2012;
205. 2 (dua) lembar asli pengumuman tanpa nomor, tanpa nama, tanpa tanggal, tahun 2013;
206. 2 (dua) lembar asli daftar nama Panitia Pemeriksa Tanah A, tanpa nomor, tanpa tanggal, tanpa tahun;
207. 2 (dua) bendel Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas;
208. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran permohonan SK Hak Nomor Berkas: 2416-2439/2013 atas nama SUHARDI ENTE tanggal 05 September 2013;
209. 2 (dua) lembar asli Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan: 2439/2013 atas nama SUHARDI ENTE, tanggal 05 September 2013;
210. 2 (dua) lembar asli tanda terima dokumen Nomor Berkas Permohonan: 2439/2013 atas nama SUHARDI ENTE, tanggal 05 September 2013;
211. 2 (dua) lembar asli surat tugas survey tematik dan potensi tanah nomor: 209/ST-24.16/X/2013 tanggal 07 Oktober 2013 atas nama pemohon SUHARDI ENTE;
212. 4 (empat) lembar asli surat tugas pengukuran nomor: 366/ST-24.16/X/2013 tanggal 07 Oktober 2013 atas nama pemohon SUHARDI ENTE;
213. 2 (dua) lembar asli lampiran 13 atas nama SARIFUDIN tanggal 02 September 2013;
214. 4 (empat) lembar asli formulir isian 402 atas nama SARIFUDIN tanpa tanggal, tahun 2013;
215. 2 (dua) lembar asli data subyek dan obyek hak atas nama SARIFUDIN tanpa tanggal, tahun 2013;
216. 2 (dua) lembar asli surat pernyataan penanaman tanda batas tanah atas nama SARIFUDIN tanpa tanggal, tahun 2013;
217. 2 (dua) lembar asli surat pernyataan fisik bidang tanah sporadik atas nama SARIFUDIN, tanpa tanggal, tahun 2013;
218. 2 (dua) lembar asli surat pernyataan tanah tidak dalam keadaan sengketa atas nama SARIFUDIN tanpa tanggal, tahun 2013;

Hal 83 dari 281 hal

Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

219. 2 (dua) lembar asli surat keterangan riwayat pemilikan hak atas tanah atas nama SARIFUDIN, tanpa nomor, tanpa tanggal, tahun 2013;
220. 2 (dua) lembar asli pengumuman tanpa nomor, tanpa tanggal, tahun 2013;
221. 2 (dua) lembar asli daftar nama panitia pemeriksa tanah A, tanpa nomor, tanpa tanggal, tanpa tahun;
222. 1 (satu) lembar asli dan 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir surat keterangan pemilikan tanah/penguasaan tanah atas nama SARIFUDIN, tanpa nomor, tanggal 02 Agustus 2013;
223. 1 (satu) bendel Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas;
224. 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Bukti Penyerahan Tanah adat kepada SARIFUDIN tanpa tanggal, tanpa tahun;
225. 1 (satu) lembar asli dan 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama SARIFUDIN nomor: Lbj.593/5111/VIII/2013 tanggal 17 Agustus 2013;
226. 1 (satu) lembar asli dan 4 (empat) lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan Belum/Kena Pajak nomor: Lbj.973/5043/VIII/2013 tanggal 03 Agustus 2013 atas nama SARIFUDIN;
227. 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan dari Drs. G. P. Ehok tanggal 10 Mei 2013;
228. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Penyerahan Kuasa dari Hj. Ishaka dan Haku Mustafa kepada Hj. Adam Djuje tanggal 01 November 1996;
229. 1 (satu) lembar surat keterangan penyerahan tanah adat dari Hj. Muhammad Abubakar Adam Djuje kepada ENTE PUAS, DKK tanggal 11 Februari 2013;
230. 1 (satu) lembar asli dan 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Laporan Kehilangan Barang nomor: LKB/519/XI/2012/NTT/Res Mabar tanggal 23 November 2012;
231. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Surat Kuasa dari ENTE PUASA, DKK kepada Franky Ch. Letik tanggal 24 Agustus 2013;
232. 4 (empat) lembar fotocopy legalisir KTP atas nama SARIFUDIN;
233. 5 (lima) lembar fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama SARIFUDIN;
234. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama ABDUL HARIS NASIPIN, lokasi Batu Gosok – Kenanga, tanggal 05 Maret 2013;
235. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran permohonan SK Hak nomor berkas: 2433/2013 atas nama SARIFUDIN tanggal 05 September 2013;
236. 2 (dua) lembar asli Surat Perintah Setor Nomor berkas permohonan: 2433/2013 atas nama SARIFUDIN tanggal 05 September 2013;
237. 2 (dua) lembar asli Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan: 2433/2013 atas nama SARIFUDIN tanggal 05 September 2013;
238. 2 (dua) lembar asli surat tugas survey tematik dan potensi tanah nomor: 202/ST-24.16/X/2013 atas nama pemohon SARIFUDIN tanggal 07 Oktober 2013;
239. 2 (dua) lembar asli Surat Tugas Pengukuran nomor: 361/ST-24.16/X/2013 atas nama pemohon SARIFUDIN tanggal 07 Oktober 2013;
240. 2 (dua) lembar asli Lampiran 13 atas nama JUAIDI KORO tanggal 02 September 2013;
241. 4 (empat) lembar asli formulir isian 402 atas nama JUAIDI KORO tanpa tanggal, tahun 2013;
242. 2 (dua) lembar asli data subyek dan obyek hak atas nama JUAIDI KORO tanpa tanggal tahun 2013;
243. 2 (dua) lembar asli surat pernyataan penanaman tanda batas tanah atas nama JUAIDI KORO tanpa tanggal, tahun 2013;

Hal 84 dari 281 hal Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

244. 2 (dua) lembar asli pernyataan penguasaan fisik bidang tanah sporadik atas nama JUAIDI KORO tanpa tanggal, tahun 2013;
245. 2 (dua) lembar asli surat pernyataan tanah tidak dalam keadaan sengketa atas nama JUAIDI KORO, tanpa tanggal, tahun 2013;
246. 2 (dua) lembar asli surat keterangan riwayat pemilikan hak atas tanah atas nama JUAIDI KORO, tanpa nomor, tanpa tanggal, tahun 2013;
247. 2 (dua) lembar asli pengumuman tanpa nomor, tanpa tanggal, tahun 2013;
248. 2 (dua) lembar asli daftar panitia pemeriksa tanah A, tanpa nomor, tanpa tanggal, tahun 2013;
249. 1 (satu) bundel Risalah Penelitian data yuridis dan penetapan batas;
250. 1 (satu) lembar asli dan 4 (empat) lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan Belum/Kena Pajak atas nama JUAIDI KORO nomor: Lbj.973/5033/VIII/2013 tanggal 03 Agustus 2013;
251. 1 (satu) lembar asli dan 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama JUAIDI KORO, nomor: Lbj.593/5108/VIII/2013 tanggal 19 Agustus 2013;
252. 1 (satu) lembar asli dan 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan Pemilikan/Penguasaan Tanah atas nama JUAIDI KORO tanggal 02 Agustus 2013;
253. 3 (tiga) lembar fotocopy surat bukti penyerahan tanah adat atas nama JUAIDI KORO tanpa tanggal & tahun;
254. 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan penyerahan tanah adat dari Hj. Muhammad Abubakar Adam Djuje kepada ENTE PUASA, DKK tanggal 11 Februari 2013;
255. 2 (dua) lembar fotocopy surat penyerahan kuasa dari Hj. Ishaka dan Haku Mustafa kepada Hj. Adam Djuje tanggal 01 November 1996;
256. 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan dari Drs. G. P. EHOK tanggal 10 Mei 2013;
257. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir surat kuasa dari ENTE PUASA DKK kepada FRANKY CH. LETIK tanggal 22 Agustus 2013;
258. 5 (lima) lembar fotocopy legalisir KTP atas nama JUAIDI;
259. 4 (empat) lembar fotocopy legalisir KK atas nama SUKAWATI;
260. 1 (satu) lembar fotocopy surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan atas nama ABDUL HARIS NASIPIN lokasi Batu Gosok – Kenanga, tanggal 05 Maret 2013;
261. 1 (satu) lembar asli dan 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Laporan Kehilangan Barang Nomor: LKB/523/XI/2012/NTT/Res Mabar tanggal 23 November 2013, atas nama pelapor JUAIDI;
262. 2 (dua) lembar asli surat perintah setor nomor berkas permohonan: 2441/2013 atas nama JUAIDI tanggal 05 September 2013;
263. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran permohonan SK Hak nomor berkas: 2441/2013 tanggal 05 September 2013;
264. 2 (dua) lembar asli tanda terima dokumen nomor berkas permohonan: 2441/2013 atas nama JUAIDI tanggal 05 September 2013;
265. 2 (dua) lembar asli surat tugas survey tematik dan potensi tanah nomor: 2112/ST-24.16/X/2013 tanggal 07 Oktober 2013;
266. 2 (dua) lembar asli surat tugas pengukuran nomor: 368/ST-24.16/X/2013 tanggal 07 Oktober 2013;
267. 2 (dua) lembar asli Lampiran 13 atas nama SAMSUDING tanggal 02 September 2013;
268. 4 (empat) lembar asli Formulir Isian 402 atas nama SAMSUDING tanpa tanggal, tahun 2013;

Hal 85 dari 281 hal

Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

269. 2 (dua) lembar asli data subyek dan obyek hak atas nama SAMSUDING tanpa tanggal tahun 2013;
270. 2 (dua) lembar asli surat pernyataan penanaman tanda batas tanah atas nama SAMSUDING tanpa tanggal tahun 2013;
271. 2 (dua) lembar asli pernyataan penguasaan fisik bidang tanah sporadik atas nama SAMSUDING ENTE tanpa tanggal, tahun 2013;
272. 2 (dua) lembar asli surat pernyataan tanah tidak dalam keadaan sengketa atas nama SAMSUDING tanpa tanggal, tahun 2013;
273. 2 (dua) lembar asli surat keterangan riwayat pemilikan hak atas tanah tanpa nomor, tanpa nama, tanpa tanggal, tahun 2013;
274. 2 (dua) lembar asli pengumuman tanpa nomor, tanpa nama, tanpa tanggal, tahun 2013;
275. 2 (dua) lembar asli daftar panitia pemeriksa tanah A tanpa nomor, tanpa tanggal, tanpa tahun;
276. 1 (satu) bendel Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas;
277. 1 (satu) lembar asli surat keterangan kepemilikan tanah atas nama SAMSUDING dari ENTE PUASA tanggal 31 Juli 2013
278. 2 (dua) lembar asli dan 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir surat keterangan belum/kena pajak atas nama SAMSUDING nomor: Lbj.973/5041/VIII/2013 tanggal 13 Agustus 2013;
279. 3 (tiga) lembar fotocopy surat bukti penyerahan tanah adat atas nama SAMSUDING tanpa nomor, tanpa tanggal, tanpa tahun;
280. 1 (satu) lembar asli dan 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir & 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama SAMSUDING Nomor: Lbj.593/5105/VIII/2013 tanggal 19 Agustus 2013;
281. 1 (satu) lembar asli dan 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir surat keterangan pemilikan tanah/penguasaan tanah tanpa nomor, atas nama SAMSUDING, tanggal 02 Agustus 2013;
282. 1 (satu) lembar asli dan 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir laporan kehilangan barang nomor: LKB/521/XI/2012/NTT/Res Mabar tanggal 23 November 2012, atas nama pelapor SAMSUDING;
283. 1 (Satu) lembar fotocopy surat keterangan penyerahan tanah adat dari Haji Muhammad Abubakar Adam Djuje kepada ENTE PUASA, DKK tanggal 11 Februari 2013;
284. 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan dari Drs. G. P. Ehok tanggal 10 Mei 2013;
285. 2 (dua) lembar fotocopy surat penyerahan kuasa dari Hj. Ishaka dan Haku Mustafa kepada Hj. Adam Djuje tanggal 01 November 1996;
286. 4 (empat) lembar fotocopy legalisir dan 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama SAMSUDING ENTE;
287. 4 (empat) lembar fotocopy legalisir dan 1 (satu) lembar fotocopy KK atas nama SAMSUDING ENTE;
288. 1 (satu) lembar fotocopy surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan atas nama ABDUL HARIS NASIPIN, lokasi Batu Gosok – Kenanga, tanggal 05 Maret 2013;
289. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran permohonan SK Hak Nomor Berkas: 2437/2013 tanggal 05 September 2013 atas nama SAMSUDING ENTE;
290. 2 (dua) lembar asli surat perintah setor nomor berkas permohonan: 2437/2013 tanggal 05 September 2013 atas nama SAMSUDING ENTE;
291. 2 (dua) lembar asli tanda terima dokumen nomor berkas permohonan: 2437/2013 tanggal 05 September 2013 atas nama SAMSUDING ENTE;

Hal 86 dari 281 hal

Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

292. 2 (dua) lembar asli surat tugas survey tematik dan potensi tanah nomor: 207/ST-24.16/X/2013 tanggal 07 Oktober 2013;
293. 2 (dua) lembar asli surat tugas pengukuran nomor: 364/ST-24.16/X/2013 tanggal 07 Oktober 2013;
294. 2 (dua) lembar asli dan 2 (dua) lembar fotocopy lampiran 13 atas nama HASMA tanggal 02 September 2013;
295. 4 (empat) lembar asli dan 2 (dua) lembar fotocopy formulir isian 402 atas nama HASMA tanpa tanggal, tahun 2013;
296. 2 (dua) lembar asli dan 1 (satu) lembar fotocopy Data Subyek dan Obyek Hak atas nama HASMA tanpa tanggal, tahun 2013;
297. 2 (dua) lembar asli dan 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Penanaman Tanda Batas Tanah tanpa tanggal, tahun 2013;
298. 2 (dua) lembar asli dan 1 (satu) lembar fotocopy Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Sporadik atas nama HASMA, tanpa tanggal, tahun 2013;
299. 2 (dua) lembar asli dan 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Tanah Tidak Dalam Keadaan Sengketa atas nama HASMA, tanpa tanggal, tahun 2013;
300. 2 (dua) lembar asli dan 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Hak Atas Tanah tanpa nomor, tanpa nama, tanpa tanggal, tahun 2013;
301. 2 (dua) lembar asli dan 1 (satu) lembar fotocopy pengumuman tanpa nomor, tanpa nama, tanpa tanggal, tahun 2013;
302. 2 (dua) lembar asli dan 1 (satu) fotocopy daftar nama panitia pemeriksa tanah A tanpa nomor, tanpa tanggal, tanpa tahun;
303. 1 (satu) bundel Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas tanpa tanggal, tahun 2013;
304. 4 (empat) lembar fotocopy Surat Bukti Penyerahan Tanah Adat dari Hj. ISHAKA dan HAKU MUSTAFA kepada ARE RAUFU tanpa nomor, tanpa tanggal, tanpa tahun;
305. 4 (empat) lembar fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor: Pem.042.2/475/IV/2006 tanggal 19 April 2006 atas nama ARE RAUFU;
306. 1 (satu) lembar asli dan 3 (tiga) fotocopy legalisir dan 2 (dua) fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama HASMA ARE nomor: Lbj.593/5116/VIII/2013 tanggal 19 Agustus 2013;
307. 1 (satu) lembar asli dan 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir dan 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan kepemilikan tanah/penguasaan tanah atas nama HASMA ARE tanggal 02 Agustus 2013, tanpa nomor;
308. 1 (satu) lembar asli dan 4 (empat) lembar fotocopy legalisir dan 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Belum/Kena Pajak Nomor: Lbj.973/5036/VIII/2013 tanggal 03 Agustus 2013 atas nama HASMA ARE;
309. 1 (satu) lembar asli dan 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir dan 4 (empat) lembar fotocopy surat keterangan waris 10 Februari 2013 atas nama HASMA ARE, DKK;
310. 1 (satu) lembar asli dan 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir dan 1 (satu) lembar fotocopy Laporan Kehilangan Barang nomor: LKB/526/VII/2013/NTT/Res Mabar tanggal 23 Juli 2013, atas nama pelapor HASMA ARE;
311. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Kepemilikan Tanah dari ENTE PUASA kepada HASMA ARE tanggal 31 Juli 2013;
312. 4 (empat) lembar fotocopy legalisir dan 2 (dua) lembar fotocopy KTP atas nama HASMA;

Hal 87 dari 281 hal

Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

313. 4 (empat) lembar fotocopy legalisir dan 2 (dua) lembar fotocopy KK atas nama ARE RAUFU;
314. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir dan 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kuasa dari ENTE PUASA, DKK kepada FRANKY CH. LETIK tanggal 22 Agustus 2013;
315. 4 (empat) lembar fotocopy Surat Penyerahan Kuasa dari Hj. ISHAKA dan HAKU MUSTAFA kepada Hj. ADAM DJUJE tanggal 01 November 1996;
316. 2 (dua) lembar fotocopy surat keterangan dari Drs. G. P. Ehok tanggal 10 Mei 2013;
317. 2 (dua) lembar fotocopy surat keterangan penyerahan tanah adat dari HJ. MUHAMMAD ABUBAKAR ADAM DJUJE kepada ENTE PUASA, DKK tanggal 11 Februari 2013;
318. 1 (satu) lembar asli dan 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Pembayaran Permohonan SK Hak atas nama HASMA Nomor Berkas: 2436/2013 tanggal 05 September 2013;
319. 2 (dua) lembar asli dan 1 (satu) fotocopy Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan: 2436/2013 atas nama HASMA tanggal 05 September 2013;
320. 2 (dua) lembar asli dan 1 (satu) fotocopy Tanda terima dokumen Nomor berkas permohonan: 2436/2013 atas nama HASMA tanggal 05 September 2013;
321. 2 (dua) lembar asli Surat Tugas Pengukuran Nomor: 363/ST-24.26/X/2013 tanggal 07 Oktober 2013 atas nama pemohon HASMA;
322. 1 (satu) lembar asli dan 2 (dua) lembar fotocopy surat tugas survey tematik dan potensi tanah nomor: 204/ST-24.16/X/2013 tanggal 07 Oktober 2013 atas nama pemohon: HASMA;
323. Asli Permohonan dari Muhanyang, tanggal 2 September, Tahun 2013 ;
324. Asli Permohonan tanpa tanggal tahun 2013 ;
325. Asli Surat Pernyataan Penanaman Tanda Batas, tanpa tanggal Tahun 2013;
326. Asli Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Sporadik tanpa tanggal Tahun 2013 ;
327. Asli Surat Pernyataan Tanah tidak Dalam Keadaan Sengketa tanpa tanggal tahun 2013 ;
328. Asli Surat Keterangan Riwayat Pemilik Hak Atas Tanah, tanpa tanggal Tahun 2013 ;
329. Foto Copy Surat Bukti Penyerahan Tanah Adat tanpa nomor dan tanggal dari H. Ishaka kepada Muhanyang ;
330. Asli Surat Keterangan Pemilikan tanah/ Penguasaan Tanah, tanggal 2 Agustus 2013 ;
331. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK), tanggal 19 Agustus 2013 ;
332. Asli Laporan Kehilangan Barang nomor : LKB/527/VII/2013/NTT/RES MABAR. Tanggal 23 Juli 2013 ;
333. Asli Surat Keterangan Belum/ Tidak Kena Pajak, Nomor : LBJ.973/ 5040/ VIII/ 2013, tanggal 3 Agustus 2013 ;
334. Foto Copy, Kartu Keluarga An. Kepala Keluarga Bakar Pasya ;
335. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Muhanyang ;
336. Foto Copy SPPT, tahun 2013, objek di Batu Gosok-Kenanga, Labuan Bajo, Kecamatan Komodo ;
337. Foto Copy Surat Kuasa Ente Puasa, Dkk, tanggal 22 Agustus 2013
338. Foto Copy Surat Keterangan tanggal 10 Mei 2013 oleh Mantan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Manggarai, Drs. G. P. Ehok

Hal 88 dari 281 hal Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

339. Foto Copy Surat Penyerahan Kuasa, tanggal 1 November 1996 ;
340. Foto Copy Surat Keterangan Penyerahan Tanah Adat, tanggal 11 Februari 2013 ;
341. Asli Data Subjek dan Objek Hak, tanpa tanggal, Tahun 2013 ;
342. Asli Pengumuman tanpa nomor, tanpa tanggal Tahun 2013 ;
343. Asli Risalah Penelitian data Yuridis, tanpa nomor dan tanggal, Tahun 2013, tanpa tanda tangan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat;
344. Asli Daftar Panitia Pemeriksaan Tanah A ;
345. Asli Surat Tugas Pengukuran Nomor: 365/St-24.16/X/2013, tanggal 7 Oktober 2013 ;
346. Asli Surat Tugas Survei Tematik dan Potensi Tanah, Nomor : 208/St-24.16/X/2013, tanggal 7 Oktober 2013
347. Peta Bidang Tanah Nomor : 61/2014, tanggal 20 Februari 2014 ;
348. Asli Tanda Terima Dokumen dengan nomor Berkas Permohonan : 2438/2013, tanggal 5 September 2013 ;
349. Asli Surat Perintah Setor dengan nomor Berkas Permohonan : 2438/2013, tanggal 5 September 2013;
350. Asli Kwitansi Permohonan Sk Hak Setor dengan nomor Berkas Permohonan : 2438 ;
351. Asli Pernyataan Ente Puasa, Dkk, tanggal 12 Juli 2015, yang dibuat oleh, Ente Puasa, Dkk (10 Orang);
352. Asli Blangko Sertipikta Hak Milik sesuai Surat Ukur Nomor 243/Labuan Bajo/ 2014
353. Asli Permohonan dari Salawing Ishaka Kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat, Tanggal 27 Maret 2015 (Lampiran 13)
354. Asli Permohonan dari Salawing Ishaka, tanggal 27 Maret 2015 (Formulir Isian 402)
355. Asli Surat Keterangan belum / Tidak kena Pajak nomor : Pem 593/KLB/885/V/2015, tanggal 5 Mei 2015
356. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Hak Atas Tanah Nomor : Pem. 593/KLB/884/V/2015, Tanggal 5 Mei 2015 ;
357. Asli Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Sporadik, Tanggal 27 Maret 2015 ;
358. Asli Surat Pernyataan Penanaman Tanda Batas Tanah, tanggal 27 Maret 2015 ;
359. Asli Surat Pernyataan Tanah Tidak Dalam Keadaan Sengketa, tanggal 27 Maret 2015 ;
360. Asli Daftar Panitia Pemeriksaan Tanah A
361. Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas, Kelurahan Labuan Bajo, tanpa tanggal dan Tahun ;
362. Asli Data Subjek dan Obyek Hak, tanggal 27 Maret 2015 ;
363. Asli Surat Perjanjian Jual Beli Bidang Tanah dari Abdul Latif H. A.R kepada Salawing Ishaka, tanggal 20 September Tahun 2013 ;
364. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Hak Atas Tanah, Nomor : Pem.014.2/6006.a/VIII/2013 ;
365. Foto Copy Surat Bukti Penyerahan Tanah dari Usman Pota Kepada Abdul Latif H.A.R, tanggal 5 Juli 1980 ;
366. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Sporadik An. Salawing Ishaka, tanggal 21 Aeptember 2013 ;
367. Asli SAurat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : Pem.5932/302/III/2014, An. Abdil Latif, H.A.R, kepada Salawing Ishaka, tanggal 14 Maret 2014 ;

Hal 89 dari 281 hal Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

368. Asli Surat Pernyataan Tanah Tidak sedang Dalam Sengketa, An. Salawing Ishaka, tanggal 21 September 2013 ;
369. Foto Copy Karti Keluarga Kpeala Keluarga An. Salawing Ishaka ;
370. Asli Surat Tugas Pengukuran Nomor : 529/St-24.16/XI/2015, Tanggal 18 November 2015
371. Asli Peta Bidang Tanah Nomor : 980/ 2018, tanggal 17 Desember 2018 ;
372. Asli Surat Pemberitahuan Sidang Panitia A, An. Salawing Ishaka (2 Bidang), Nomor : 34/53.15.HP.01.03.100/II/2019, tanggal 4 Februari 2019 ;
373. Foto Copy Daftar Hadir Sidang Panitia A, An. Salawing Ishaka, tanggal 11 Februari 2019.
374. Asli Surat Permohonan Hak Atas Tanah dari Hasanuding, tanggal 2 September 2013 ;
375. Asli Data Subjek dan Objek Hak, An. Hasanuding, tanpa tanggal, Tahun 2013 ;
376. Asli Surat Pernyataan Penanaman Tanda Batas Tanah, tanpa tanggal Tahun 2013 ;
377. Asli Surat Pernyataan Tanah Tidak Dalam Keadaan Sengketa, tanpa tanggal, Tahun 2013 ;
378. Asli Pengumuman, Tanpa nomor dan tanggal tahun 2013 ;
379. Asli Daftar Panitia Pemeriksaan Tanah A ;
380. Asli Laporan Kehilangan Barang, Nomor : LKB/520/XI/2012/NTT/RES MABAR, tanggal 23 November 2012 ;
381. Foto Copy Surat Bukti Penyerahan Tanah Adat, dari H. Ishaka Kepada Hasanuding, tanpa tanggal, Tahun 1993 ;
382. Foto Copy Surat Keterangan Belum/ Tidak Kena Pajak, Nomor : LBJ.973/5034/VIII/2013, dari Abdul Ipur kepada Hasanuding, tanggal 3 Agustus 2013 ;
383. Asli Surat Keterangan Kpemilikan Tanah dari Ketua Rt. 002 An. Ente Puasa kepada Sanuding, tanggal 31 Juli 2013 ;
384. Foto Copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), Hasanuding, tanpa tanggal tahun 2013 ;
385. Foto Copy KTP Hasanuding, tanggal 7 Desember 2012 ;
386. Foto Copy Karti Keluarga Kepala Keluarga An. Sanudin ;
387. Asli Surat Tugas Pengukuran Nomor : 367/ St-24.16/X/2013, tanggal 7 Oktober 2013 ;
388. Asli Surat Tugas Survei Tematik dan Potensi Tanah, Nomor : 210/St-24.16/X/2013, Tanggal 7 Oktober 2013 ;
389. Asli Surat Perintah Setor dengan Nomor Berkas 2440/2013, tanggal 5 September 2013 ;
390. Asli Tanda Terima Dokumen dengan Nomor Permohonan 2440/2013, An. Hasanuding, tanggal 5 September 2013 ;
391. Asli Kwitansi Permohonan SK Hak, tanggal 5 September 2013.
392. Asli Surat Permohonan Hak Atas Tanah dari Suka Wati Kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat, Tanggal 2 September 2013;
393. Asli Data Subjek dan Obyek Hak, An, Suka Wati, tanpa tanggal Tahun 2013 ;
394. Asli Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas, tanpa tanggal Tahun 2013 ;
395. Asli Surat Pernyataan Penanaman Tanda Batas Tanah, An. Suka Wati, tanpa tanggal Tahun 2013 ;
396. Asli Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Sporadik, tanpa tanggal, Tahun 2013 ;

Hal 90 dari 281 hal

Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

397. Asli Surat Pernyataan Tanah Tidak Dalam Keadaan Sengketa, tanpa tanggal Tahun 2013 ;
398. Asli Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Hak Atas Tanah, Tanpa Nomor, Tanpa Tanggal, Tahun 2013 ;
399. Asli Pengumuman Tanpa Nomor, Tanpa Tanggal, Tahun 2013 ;
400. Asli Daftar Hadi Pemeriksaan Tanah A ;
401. Asli Surat Keterangan Kepemilikan Tanah/ Penguasaan Tanah, An. Suka Wati, Tanggal 2 Agustus 2013 ;
402. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK), An. Suka Wati, Tanggal 19 Agustus 2013 ;
403. Asli Surat Keterangan Waris Alm. Bahoruding, Nomor : LBJ.593/5118/VIII/2013, Tanggal 19 Agustus 2013 ;
404. Asli Surat Keterangan Belum/Tidak Kena Pajak, Nomor : LBJ 973/5039/VIII/2013, dari Abdul Ipur kepada Suka Wati, tanggal 3 Agustus 2013 ;
405. Asli Laporan Kehilangan Barang Nomor : LKB/525/XI/2012/NTT/ RES MABAR, TANGGAL 23 November 2013 ;
406. Asli Surat Keterangan Kepemilikan Tanah dari Ketua RT. OO2, Ente Puasa, tanggal 31 Juli 2013 ;
407. Foto Copy KTP An. Suka Wati ;
408. Foto Copy Surat Bukti Penyerahan Tanah Adat dari Haji Ishaka kepada Bahorudding, tanpa tanggal ;
409. Foto Copy Kartu Keluarga, An Kepala Keluarga Suka Wati ;
410. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013, An wajib pajak Abdul Haris Nasipin, tanggal 5 Maret 2013 ;
411. Asli Surat Tugas Pengukuran Nomor : 362/St-24.16/X/2013, tanggal 7 Oktober 2013 ;
412. Asli surat Tugas Survei Tematik dan Potensi Tanah, Nomor : 205/St-24.16/X/2013, tanggal 7 Oktober 2013 ;
413. Foto Copy Surat Kuasa, dari EWnte Puasa Kepada Frangky CH. Letik, tanggal 22 Agustus 2013 ;
414. Foto Copy Surat Keterangan An. Drs. G. P Ehok, tanggal 10 Mei 2013
415. Foto Copy Surat Penyerahan Kuasa dari Haji Ishaka kepada Haji Adam Djudje, tanggal 1 November 1996 ;
416. Foto Copy, Surat Keterangan Penyerahan Tanah Adat, dari Haji. Muh. Abubakar Adam Djudje, tanggal 11 Februari 2013 ;
417. Asli Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan 2435/2013, An. Suka Wati, tanggal 5 September 2013 ;
418. Asli Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan 2435/2013, An. Suka Wati, tanggal 5 September 2013 ;
419. Asli Kwitansi Permohonan SK Hak, An. Suka Wati, tanggal 6 September 2013;
420. Foto Copy Surat Bukti Penyerahan Tanah Adat dari Haji Ishaka, Kepada Ente Puasa, tanpa tanggal dan Tahun;
421. Foto Copy Surat Keterangan Belum/ Tidak Kena Pajak, Nomor : LBJ.973/5037/VIII/2013, Tanggal 3 Agustus 2013 ;
422. Foto Copy Surat Laporan Kehilangan Barang, Nomor : LKB/524/XI/2012/NTT/RES MABAR, Tanggal 23 November 2013 ;
423. Foto Copy KTP An. Ente Puasa
424. Foto Copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK), An. Ente Puasa Nomor Regoister : LBJ.593/5114/VIII/2013, tanggal 19 Agustus 2013

Hal 91 dari 281 hal Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

425. Asli Surat Perintah Setor nomor berkas Permohonan :2791/2013, An. Ente Puasa, tanggal 21 Oktober 2013 ;
426. Asli Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan :2791/2013, An. Ente Puasa, tanggal 21 Oktober 2013 ;
427. Asli Kwitansi Permohonan SK Hak, An. Ente Puasa, Tanggal 24 Oktober 2013 ;
428. Asli Surat Bukti Penyerahan Tanah Adat dari Ishaka Kepada Ahmad Baco, tanggal 10 April 1990
429. Asli Kwitansi Jual Beli Djudin Aliman dengan Achamd Baco, tanggal 20 Maret 1999 ;
430. Asli Peta Bidang Tanah, An. Amran Aliman Nomor : 651/2018, tanggal 31 Agustus 2018;
431. 1 (satu) lembar asli lembar kendali berkas atas nama AMRAN ALIMAN tanggal masuk 10 Agustus 2017;
432. 1 (satu) lembar asli dan 1 (satu) lembar fotocopy lampiran 13 atas nama AMRAN ALIMAN tanggal 08 Agustus 2017;
433. 2 (dua) lembar asli dan 2 (dua) lembar fotocopy formulir isian 402 atas nama AMRAN ALIMAN tanggal 08 Agustus 2017;
434. 1 (satu) lembar asli dan 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan atas nama MASSA RAPI Bin H. ISHAKA tanggal 20 Juli 2018;
435. 1 (satu) lembar asli dan 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan atas nama AMRAN ALIMAN tanggal 08 Agustus 2017;
436. 1 (satu) lembar asli dan 1 (satu) lembar fotocopy data subyek dan obyek hak atas nama AMRAN ALIMAN tanggal 08 Agustus 2017;
437. 1 (satu) lembar asli dan 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan riwayat pemilikan hak atas tanah nomor: Pem.593/2600/VIII/2017 tanggal 08 Agustus 2017 atas nama AMRAN ALIMAN;
438. 1 (satu) lembar asli dan 1 (satu) lembar fotocopy pernyataan penguasaan fisik bidang tanah sporadik tanggal 08 Agustus 2017 atas nama AMRAN ALIMAN;
439. 1 (satu) lembar asli dan 1 (satu) lembar fotocopy pernyataan penguasaan fisik bidang tanah tanggal 08 Agustus 2017 atas nama AMRAN ALIMAN;
440. 1 (satu) lembar asli dan 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan tanah tidak dalam keadaan sengketa tanggal 08 Agustus 2017 atas nama AMRAN ALIMAN;
441. 1 (satu) lembar asli dan 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan penanaman tanda batas tanah tanggal 08 Agustus 2017 atas nama AMRAN ALIMAN;
442. 1 (satu) lembar asli dan 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan kepemilikan tanah nomor: Pem.539/2600/VIII/2017 tanggal 08 Agustus 2017 atas nama AMRAN ALIMAN;
443. 1 (satu) lembar asli dan 1 (satu) lembar fotocopy nama panitia pemeriksa tanah A tanpa tanggal dan tahun;
444. 1 (satu) bundel asli dan 1 (satu) bundel fotocopy Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas tanpa tanggal, tanpa tahun, atas nama AMRAN ALIMAN;
445. 1 (satu) lembar asli dan 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan kematian nomor: Pem.470/KLB/320/II/2016 tanggal 24 Februari 2016 atas nama DJUDIN ALIMAN;
446. 3 (tiga) lembar fotocopy surat bukti penyerahan tanah adat dari ISHAKA dan HAKU MUSTAFA kepada ACHMAD BACO tanggal 10 April 1990;

Hal 92 dari 281 hal

Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

447. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Pembayaran Harga Tanah Lokasi di Tanjung Batu Kallo dengan luas 30.000 m2 dari DJUDIN ALIMAN kepada AHMAD BACO tanggal 20 Maret 1999;
448. 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan waris tanggal 13 Juni 2017 dari DJUDIN ALIMAN kepada AMRAN ALIMAN, DKK;
449. 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan penolakan warisan tanggal 13 Juni 2017 dari HASNA ABUBAKAR, DKK kepada AMRAN ALIMAN, DKK;
450. 2 (dua) lembar fotocopy surat AMRAN ALIMAN kepada Bupati Manggarai Barat tanggal 08 September 2017;
451. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Bupati Manggarai Barat Nomor: Pem.131/205/IX/2017 tanggal 13 September 2017 perihal Surat Keterangan Kepada AMRAN ALIMAN;
452. 1 (satu) bendel fotocopy Surat Penolakan Setiap Permohonan Hak atas tanah diatas tanah yang merupakan tanah milik Ir. Nicolaus Naput yang terletak di Karang, Kel. Labuan Bajo, Kec. Komodo, Nomor: 04/IMYBS/IV/2017 tanggal 03 April 2017;
453. 1 (satu) lembar fotocopy surat kuasa khusus dari Nicolaus Naput kepada Yohanes B. Selatan, SH., tanggal 25 November 2016;
454. 2 (dua) lembar fotocopy KTP atas nama AMRAN ALIMAN;
455. 2 (dua) lembar fotocopy KTP atas nama Hj. SUKRI;
456. 2 (dua) lembar fotocopy KTP atas nama ENTE PUASA;
457. 2 (dua) lembar fotocopy KK atas nama AMRAN ALIMAN;
458. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama ANSARUDIN lokasi di Karang tanggal 01 Mei 2017, NOP: 53.16.010.030.003-0394.0;
459. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Permohonan SK Pemberian Hak Milik Perorangan Nomor Berkas: 3704/2017 tanggal 07 September 2018 atas nama AMRAN ALIMAN;
460. 2 (dua) lembar asli Kwitansi Pembayaran Permohonan SK Pemberian Hak Milik Perorangan Nomor Berkas: 3704/2017 tanggal 02 Oktober 2017 atas nama AMRAN ALIMAN;
461. 1 (satu) lembar asli Surat Undangan Pemeriksaan Lapangan dan Pengukuran Batas Bidang Tanah nomor: 616/5-53.15/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018 atas nama pemohon AMRAN ALIMAN;
462. 1 (satu) lembar asli Catatan Data Yuridis Bidang Tanah AMRAN ALIMAN di Lapangan tanggal 30 Juli 2018;
463. 1 (satu) lembar asli surat tugas pengukuran nomor: 648/ST-24.16/VIII/2018 tanggal 30 Juli 2018 atas nama pemohon AMRAN ALIMAN;
464. 2 (dua) lembar asli Surat Perintah Setor Nomor Berkas: 3704/2017 tanggal 02 Oktober 2017 atas nama AMRAN ALIMAN;
465. 2 (dua) lembar asli tanda terima dokumen nomor berkas pemohon: 3704/2017 tanggal 02 Oktober 2017 atas nama AMRAN ALIMAN;
466. 2 (dua) lembar asli gambar ukur NIB: 24.16.01.16.03060, tahun 648/2018, atas nama pemohon AMRAN ALIMAN, alamat LABUAN BAJO, tanggal 30 Juli 2018;
467. 2 (dua) lembar asli Peta Bidang Tanah Nomor: 651/2018 tanggal 31 Agustus 2018 atas nama AMRAN ALIMAN;
468. 1 (satu) lembar asli dan 1 (satu) lembar fotocopy lembar kendali berkas atas nama AMRAN ALIMAN tanggal masuk 19 September 2017;
469. 4 (empat) lembar fotocopy surat undangan sidang panitia A nomor: 243/6-53.15/X/2018 tanggal 23 Oktober 2018;
470. 1 (satu) lembar fotocopy daftar hadir sidang panitia A atas nama AMRAN ALIMAN tanggal 06 November 2018;

Hal 93 dari 281 hal Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

471. 1 (satu) bundel asli notulen sidang panitia A atas nama AMRAN ALIMAN tanggal 06 November 2018;
472. Surat Permohonan Tidak Lanjut Proses Sertipikat Hak Milik Tanah Pemohon Atas Nama Haji Ente Puasa, Dkk, tanggal 24 April 2017, dengan Lampiran Sebagai Berikut :
473. Foto Copy Surat Bukti Penyerahan Tanah Adat dari Haji Ishaka kepada, Dahering Koro, tanpa tanggal dan Tahun ;
474. Foto Copy Surat Bukti Penyerahan tanah adat dari Haji Ishaka kepada Ente Puasa, tanpa tanggal dan Tahun ;
475. Foto Copy Surat Keterangan Pemilikan Tanah/ Penguasaan Tanah An. Dahering Koro, Tanggal 2 Agustus 2013 ;
476. Foto Copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Sporadik, An. Dahering Koro, Tanggal 19 Agustus 2013 ;
477. Foto Copy Surat Keterangan Belum/ Tidak Kena Pajak, Nomor : LBJ.973/ VIII/2013, Tanggal 3 Agustus 2013 ;
478. Foto Copy Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan 2442/2013, An. Dahering Koro, Tanggal 5 September 2013 ;
479. Foto Copy Tanda Terima Dokumen dengan Nomor Berkas Permohonan : 2442/2013, An. Dahering Koro, tanggal 5 September 2013 ;
480. Foto Copy Surat Penyerahan Kuasa dari Haji Ishaka Kepada Haji Adam Djudje, tanggal 1 November 1996 ;
481. Foto Copy Surat Keterangan Penyerahan Tanah Adat dari Haji Muh. Abubakar Adam Djudje, tanggal 11 Februari 2013 ;
482. Foto Copy Surat Pencabutan Kembali Surat Keberatan Tertanggal 10 Juli 2011, Perihal Mohon Pembatalan Proses Pensertifikatan Tanah dilokasi Karang/ Tori Lemah Batu Kallo, Kelurahan Labuna Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, yang diajukan oleh Saudara Ente Puasa, Dkk, Tanggal 13 Oktober 2014 ;
483. Foto Copy Surat Kesepakatan Bersama antara Haji. Muh. A. ADAM DJUDJE, dan Ente Puasa, tanggal 13 Oktober 2014 ;
484. Foto Copy Surat Keterangan dari Drs. W. Fidelis Pranda, tanggal 31 Januari 2014 ;
485. Foto Copy Surat Keterangan dari Drs. Liber Habut, tanggal 10 April 2014 ;
486. Foto Copy Surat Pernyataan dari Petrus Tagus, tanggal 24 Oktober 2014;
487. Foto Copy Surat Keterangan dari Donatus Endo, tanggal 5 April 2014 ;
488. Foto Copy Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dari Haji Ishaka kepada, Drs. G. P. Ehok, tanpa tanggal dan Tahun ;
489. Foto Copy Surat Tugas Survei Tematik dan Potensi Tanah, Nomor : 211/St- 24.16/X/2013, tanggal 7 Oktober 2013 ;
490. Foto Copy Gambar Ukur An. Ente Puasa, Dkk
491. 1 (satu) bendel asli Arsip Surat Masuk Dari Kementrian ATR dan Kanwil BPN Provinsi NTT Tahun 2012 s/d 2015 Kantor Pertahanan Kabupaten Manggarai Barat;
492. 1 (satu) bendel asli Arsip Surat Masuk dari Masyarakat tahun 2017 Kantor Pertahanan Kabupaten Manggarai Barat;
493. 1 (satu) bendel Hasil Pengkajian Perkara Tanah Lokasi Wae Cicu, Kel. Labuan Bajo, Kec. Komodo, Kabupaten Manggarai Barat antara FATIMAH BADOSALAM dengan ALOYSIUS DIAZ tanggal 03 Oktober 2019;
494. 1 (satu) bendel Kronologis proses permohonan hak atas nama: SUPARDI TAHIYA, SUHAIB TAHIYA dan H. SUKRI yang terletak di Karang Kelurahan Labuan Bajo, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat, Provinsi NTT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

495. 1 (satu) bendel Dokumen Tanah Pemda Manggarai yang diserahkan oleh Fungsionaris Adat Nggorang untuk sekolah Perikanan tanggal 26 April 1997 dan diukur Petugas BPN Kabupaten Manggarai tanggal 14 Mei 1997 dibukukan oleh H. Muh. Abubakar Adam Djudje selaku Pelaksana Tugas Fungsionaris Adat Nggorang, yang terdiri dari:
- a. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan/Penegasan atas nama Drs. G. P. Ehok, tanpa nomor, tanggal 22 Oktober 2014;
 - b. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan atas nama Haji Ishaka dan Haku Mustafa, tanpa nomor, tanggal 17 Januari 1998;
 - c. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penyerahan Kuasa tanggal 21 April 1997;
 - d. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penyerahan Kuasa atas nama Hj. Ishaka dan Haku Mustafa kepada Haji Adam Djudje tanggal 01 November 1991;
 - e. 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama H. Muh. A. Adam Djudje;
 - f. 1 (satu) lembar fotocopy gambar lokasi jarak batu kallo karangan yang diserahkan fungsionaris adat/tua adat kepada Pemda tanggal 26 April 1997;
 - g. 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan atas nama Drs. G. P. Ehok tanggal 10 Mei 2013;
 - h. 1 (satu) lembar fotocopy surat ukur tanggal 14 Mei 1997;
 - i. 1 (satu) lembar fotocopy skets lapangan / lokasi kerangan;
 - j. 1 (satu) lembar fotocopy daftar hadir yang turut menyaksikan pada saat pengukuran;
 - k. 1 (satu) bendel fotocopy surat pernyataan pelepasan hak atas tanah atas nama Haji Ishaka dan Haku Mustafa kepada Drs. G. P. Ehok tanpa tanggal dan tahun;
 - l. 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan atas nama Haji Muhamad Abubakar Adam Djudje tanggal 10 Maret 2014;
 - m. 1 (satu) lembar fotocopy surat dari Camat Komodo kepada Kepala Desa Labuan Bajo Nomor: Pem.021.6/49/1984 perihal Karangan dan Sekitarnya perlu diamankan tanggal 02 Februari 1984;
 - n. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Bukti Penyerahan Hak Tanah Adat dari Ishaka dan Haku Mustafa kepada Hj. Adam Djudje tanggal 10 April 1990;
 - o. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Bupati Manggarai Barat nomor: Pem.131/201/IX/2015 tanggal 11 September 2019 perihal keberatan dan penegasan;
 - p. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Bupati Manggarai barat Nomor: Pem.130/215/X/2019 tanggal 03 Oktober 2019 perihal Klarifikasi dan Penegasan;
 - q. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari Drs. Frans B. Padju Leok kepada Haji Ishaka tanggal 14 Mei 1997;
 - r. 1 (satu) lembar fotocopy penyerahan tanah dari Usman Tota kepada Abdul latief A. A. R. tanggal 15 Juli 1989;
 - s. 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan riwayat kepemilikan hak atas tanah nomor: Pem.593/KLB/884/V/2015 tanggal 05 Mei 2015 atas nama SALAWI ISHAKA;
 - t. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Haji Ishaka dan Haku Mustafa tanggal 17 Januari 1998;
496. 1 (satu) bendel Laporan Hasil Mediasi Masalah Tanah antara Ibrahim Hanta dengan Nikolaus Naput, DKK lokasi tanah di Karang Kelurahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2014;
497. 2 (dua) lembar asli Daftar Hadir Peserta Gelar Mediasi Kasus Pertanahan Lokasi Di Gusoh Ngea-Toroh, Kelurahan Labuan Bajo, Kec. Komodo antara Sdr. Haji MUH. A. ADAM DJUDJE dengan sdr. DANIEL DAENG NABIT, DKK;
498. 1 (satu) lembar asli klarifikasi dalam bentuk tulisan tangan;
499. 1 (satu) bundel asli notulensi Mediasi Kasus Pertanahan Lokasi di Gusoh Ngea-Toroh, Kelurahan Labuan Bajo, Kec. Komodo antara Sdr. Haji MUH. A. ADAM DJUDJE dengan sdr. DANIEL DAENG NABIT, DKK tanggal 21 November 2018 dalam bentuk tulisan tangan;
500. 1 (satu) bundel fotocopy Berita Acara Mediasi Pelaksanaan Gelar Kasus Pertanahan No. 01/BAM/53.15-600.13/IX/2014 obyek tanah seluas 40 Ha, terleak di Karangang, kelurahan Labuan bajo, kecamatan komodo, kabupaten manggarai barat antara Sdr. IBRAHIM HANTA melawan sdr. NIKOLAUS NAPUT, DKK 9 orang, No. Reg Kasus: 02/IX/2014, nomor: DI. 507 B, tanggal 15 September 2014;
501. 1 (satu) bendel fotocopy perjanjian penyelesaian sengketa (perdamaian) no: PPS/01/53-01-600.13/IX/2014, nomor: DI. 509 C tanggal 15 September 2014;
502. 1 (satu) bendel Surat Keterangan Perolehan Tanah Adat tanggal 24 Januari 2019 bermaterai Rp 6.000,-;
503. 1 (satu) lembar scan Berita Acara Proses Mediasi Masalah Tanah antara Bapak Niko Naput dengan Bapak Ibrahim A. Hanta yang berlokasi di Karangang – Kelurahan Labuan Bajo – Kecamatan Komodo – Kabupaten Manggarai Barat tanggal 29 September 2014;
504. 1 (satu) lembar disposisi surat kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat tanpa nomor, perihal Keberatan Penerbitan Sertifikat dari Mikael Mensen dan Suwandi Ibrahim tanggal 22 Juni 2020;
505. 3 (tiga) bendel asli Berita Acara Pelaksanaan Paparan Sengketa Pertanahan Nomor: 2/BAP-53.15.MP.01.04/VII/2020 tanggal 20 Juni 2020 antara Suwandi dengan Nikolaus Naput;
506. 2 (dua) lembar asli surat keputusan pembentukan tim penyelesaian sengketa nomor: 33/KEP-53.15.600/VII/2020 tanggal 14 Juli 2020 antara Mikael Mensen, DKK dengan Nikolaus Naput, DKK;
507. 2 (dua) lembar fotocopy surat undangan mediasi dan klarifikasi nomor: MP.01.02/1061/53.15/VII/2020 tanggal 15 Juli 2020;
508. 1 (satu) bendel asli daftar hadir gelar mediasi dan klarifikasi antara Mikael Mensen, DKK dengan Nikolaus Naput, DKK tanggal 20 Juli 2020;
509. 1 (satu) bendel asli daftar hadir pemeriksaan lapangan antara Mikael Mensen, DKK dengan Nikolaus Naput, DKK tanggal 20 Juli 2020;
510. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kuasa Nomor: 02/SK/VII/2020 tanggal 17 Juli 2020 dari Paulus Grans Naput kepada Wilhelmus Preis Wua Lerek;
511. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kuasa Nomor: 01/SK/VII/2020 tanggal 17 Juli 2020 dari Nikolaus Naput kepada Wilhelmus Preis Wua Lerek;
512. 2 (dua) lembar fotocopy Kesepakatan antara Ibrahim Hanta dengan Nikolaus Naput melalui kuasanya Yohanes B. Selatan, SH. Terkait tindak lanjut klarifikasi tanah yang dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Manggarai Barat tanggal 23 Januari 2015 yang tertangga 11 Maret 2019;
513. 1 (satu) bendel asli hasil kajian sengketa pertanahan obyek tanah seluas 20 Ha di kelurahan Labuan Bajo Kecamatan Komodo Kabupaten

Hal 96 dari 281 hal

Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manggarai Barat antara Ibrahim Hanta dengan Nikolaus Naput tanggal 08 Mei 2020;

514. 1 (satu) lembar scan dan 2 (dua) lembar fotocopy surat bukti penyerahan tanah adat dari Ishaka dan Haku Mustafa kepada Beatrix Seran Nggebu tanggal 21 Oktober 1991;
515. 2 (dua) lembar asli gambar bidang Maria Fatima Nabut DKK;
516. 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan antara Haji Ishaka dan Haku Mustafa kepada Ir. Nikolaus Naput tanggal 17 Januari 1998;
517. 1 (satu) bendel fotocopy Berita Acara Mediasi nomor: 1/SKP-MABAR/VI/2014 antara Haji Djudje melawan ENTE PUASA, DKK 11 orang No. Reg. Kasus : 01/SKP/IV/2014 tanggal 10 Juni 2014;
518. 1 (satu) lembar Peta Lokasi Permasalahan Tanah Pemda Kabupaten Manggarai Barat versus Tanah Masyarakat, tanpa tanggal;
519. Gambar Ukur Nomor : 2446/2015, An. Salawing Ishaka, Tanggal 11 November 2015
520. Gambar Ukur Nomor : /2013, An. Ente Puasa Dan Dahering Koro, Tanggal 10 Oktober 2013 ;
521. Laporan Hasil Mediasi Masalah Tanah Antara Ibrahim Hanta Dengan Nikolaus Naput, Dkk Lokasi Tanah Di Karang Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Bata, Seksi Sengketa, Konflik Dan Perkara Tahun 2014 ;
522. Masalah Tanah Antara H. Adam Djudje Vs Ente Puasa, Dkk, Lokasi Karang, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo ;
523. Lokasi Karang Bagian Selatan Dan Timur ;
524. Laporan Penanganan Masalah Tanah, Nomor : Trantib.300/1135/X/2014, Tanggal 14 Oktober 2014 ;
525. Laporan Penanganan Kasus Pertanahan Antara Haji Mustajib, Dkk, Dengan Nikolaus Naput, Lokasi Tanah Di Karang, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat ;
526. Gabung Dengan Surat Dari Ahyar (Foto Copy KTP. Muh. A. Adam Djudje)
527. Foto Copy Surat Permohonan Hak Atas Tanah Dari David Andre Pratama Kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat Tanggal 30 Juli 2019 ;
528. Foto Copy Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Ha Katas Tanah, Nomor : Pem.593/1370/VII/2019, An. David Andre Pratama, Tanggal 29 Juli 2019 ;
529. Foto Copy Data Subjek Dan Obyek Hak, Tanggal 29 Juli 2019 ;
530. Foto Copy Surat Pernyataan An. David Andre Pratama, Tanggal 29 Juli 2019 ;
531. Foto Copy Surat Pernyataan Tanah Tidak Dalam Keadaan Sengketa, An. David Andre Pratama, Tanggal 29 Juli 2019 ;
532. Foto Copy Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Sporadik, An. David Andre Pratama, Tanggal 29 Juli 2019 ;
533. Foto Copy Surat Pernyataan Penanaman Tanda Batas Tanah, An. David Andre Pratama, Tanggal 29 Juli 2019 ;
534. Foto Copy Pengumuman Tanpa Nomor Dan Tanggal Tahun 2016 ;
535. Foto Copy Risalah Penelitian Data Yuridis Dan Penetapan Batas, Tanpa Tanggal ;
536. Foto Copy Ktp, An. David Andre Pratama ;
537. Foto Copy Kartu Keluarga An. Kepala Keluarga Paulus Yoga Pratama ;
538. Foto Copy Surat Kuasa Menjual Dari H. Muhamad Abubakar Adam Djudje Kepaa Muhamad Achyar, S.H, Tanggal 4 Juli 2019 ;

Hal 97 dari 281 hal

Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

539. Foto Copy Surat Jual Beli Tanah Toroh Lemma Batu Kallo, Antara Muhamad Achyar S.H, Dengan David Andre Pratama, Tanggal 8 Juli 2019 ;
540. Foto Copy Surat Pernyataan Tentang Bidang Tanah Telah Terjual Sebagian An. H. Muhamad Abubakar Adam Djudje, Tanggal 29 Juli 2019 ;
541. Foto Copy Surat Bukti Penyerahan Hak Tanah Adat Dari Ishaka Kepada H. Adam Djudje, Tanggal 10 April 1990 ;
542. Foto Copy Surat Keterangan Drs. W. Fidelis Pranda, Tanggal 31 Januari 2014 ;
543. Foto Copy Surat Keterangan Dari Drs. G. P. Ehok, Tanggal 10 Mei 2013 ;
544. Foto Copy Surat Pernyataan Dari Petrus Tagus, Tanggal 24 Oktober 2014 ;
545. Foto Copy Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor : Pem.593.2/913/VII/2019, Tanggal 29 Juli 2019 ;
546. Foto Copy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor : Pem.593/1371/Vii/2019, Tanggal 29 Juli 2019
547. Foto Copy Surat Keterangan Belum/ Tidak Kena Pajak Nomor : Pem 593/1372/Vii/2019, Tanggal 29 Juli 2019 ;
548. Foto Copy Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Ha Katas Tanah Nomor : Pem. 593/1370/Vii/2019, Tanggal 29 Juli 2019 ;
549. Foto Copy Surat Pernyataan An. David Andre Pratama, Tanggal 29 Juli 2019 ;
550. Asli Surat Tugas Pengukuran Nomor : 495/St-24.16/lx/2019, Tanggal 3 September 2019 ;
551. Asli Surat Tugas Pengukuran Nomor : 720/St-53.15.lx.02.03.200/lx/2019, Tanggal 3 September 2019 ;
552. Asli Undangan Pemeriksaan Lapangan Dan Pengukuran Batas Bidang Tanah Nomor : lx.02.03/1084.53.15/lx/2019, Tanggal 2 September 2019 ;
553. Asli Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan : 7697/2019, Tanggal 20 Agustus 2019 ;
554. Asli Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan : 7697/2019, Tanggal 20 Agustus 2019 ;
555. Asli Kwitansi Permohonan Sk Pemberian Hak Milik Perorangan, Tanggal 22 Agustus 2019 ;
556. Asli Lembar Disposisi, Perihal Mohon Pensertipikatkan Tanah Pemda Di Toro Lemma Batu Kallo/ Karangan, Tanggal 25 Maret 2017 ;
557. Foto Copy Surat Pernyataan/ Penegasan Dari Drs. Gasar. P. Ehok, Tanggal 22 Oktober 2014 ;
558. Foto Copy Surat Penyerahan Kuasa Dari H. Ishaka, Kepada H. Adam Djudje, Tanggal 21 April 1997 ;
559. Foto Copy Kesimpulan Rapar Muspida Tentang Pembahasan Tanah Pemda Di Karangan, Kelurahan Labuan Bajo, Tanggal 21 Oktober 2014 ;
560. Foto Copy Surat Dari Bupati Manggarai Barat Perihal Mohon Pensertipikatkan Tanah Pemda Di Tiro Lemma Batu Kallo/ Karangan, Tanggal 17 Maret 2015 ;
561. Foto Copy Legalisasi Tanpa Nomor, An. J Oematan, Ba, Tanpa Tanggal Dan Tahun ;
562. Foto Copy Dokymen Tanah Pemda Manggarai Yang Diserahkan Oleh Fungsionari Adat Nggorang Unutk Sekolah Perikanan, Tanggal 26 April 1997, Dan Diukur Petugas Bpn Kabupaten Manggarai Tanggal 14 Mei 1997, Dibukukan Oleh H. Muh. Abubakar Adam Djudje Selaku Pelaksana Tugas Fungsionaris Adat Nggorang ;
563. Foto Copy Peta Pendaftaran Nomor : 02/24.20/PDP/P3B2T/2015, Tanggal 29 Juni 2015 ;

Hal 98 dari 281 hal

Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

564. Buku Agenda Surat Keluar Tujuan Bupati Manggarai Barat, Tanggal 18 Juni 2014 ;
565. Buku Agenda Surat Masuk Dari Kanwil Bpn Prov NTT, Perihal Mohon Pembatalan Proses Pensertipikatkan Tanah Di Lokasi Karang/ Toro Lemma Batu Kallo, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Yang Diajukan Oleh Saudara Supardi Tahiya Dan Suaeb Tahiya, Nomor : 53.15/300.131/VII/2014, Tanggal 22 Juli 2014 ;
566. Buku Agenda Surat Masuk Dari Sekda Mabar, Perihal Pensertipikatan Tanah Pemda, Nomor : Pem .130/184/VI/2014, Tanggal 11 Juni 2014 ;
567. Buku Agenda Surat Keluar Kepada Sdr. Ente Puasa, Dkk, Perihal Peninjauan Lokasi, Tanggal 6 Juni 2014 ;
568. Buku Agenda Surat Masuk Dari Sekda Mabar Nomor : Pem.130/113/V/2014, Perihal Permohonan Sertipikat Tanah Pemda, Tanggal 14 Mei 2014 ;
569. Buku Agenda Surat Masuk Dari Haji Muh. A. Adam Djudge Perihal, Pembatalan Surat Keterangan Penyerahan Tanah Adat Tanggal 11 Februari 2014, Tanggal Surat 29 April 2014 ;
570. Buku Agenda Surat Masuk Dari Sekda Mabar Perihal Penjelasan Tanah Pt. Flobatim Makmur, Nomor : Pem.130/106/V/2014, Tanggal 5 Mei 2014 ;
571. Buku Agenda Surat Masuk Dari Sekda Mabar Perihal Permohonan Sertipikat Tanah Pemda Nomor : Pem 130/64/Pemda/III/2016, Tanggal 2 Maret 2016 ;
572. Buku Agenda Surat Masuk Dari Kementerian Atr/Bpn, Perihal Permohonan Pengakuan/ Penegasan Ha Katas Tanah Luas 4 Ha, Di Toro Lemma Batu Kallo, An. Haji Muh. Adam Djudge, Nomor : 4852/14.21.400.14/XI/2015, Tanggal 16 November 2015 ;
573. Buku Agenda Surat Masuk Dari Sekda Mabar Perihal Permohonan Sertipikat Tanah Pemda Nomor: Pem 130/57/II/2016, Tanggal 24 Februari 2016 ;
574. Buku Agenda Surat Keluar Kepada Muhamad Achyar Dari Mar Office Menter Agraria Inspektur Utama Bpn Kepala Kantor Wilayah Bpn, Perihal Permohonan Pemblokiran Shm No. 02492/Labuan Bajo Seluas 6.094 M2 , An. Muhamud Nip Dan Shm Nomor : 02482/ Labuan Bajo Seluas 12.020 M2 An. Dai Kayus ;
575. Buku Agenda Surat Masuk Dari Maa Low Office Muhamad Achyar And Associates Perihal Permohonan Pemblokiran Shm Nomor : 02492/Labuan Bajo Seluas Seluas 6.094 M2 , An. Muhamud Nip Dan Shm Nomor : 02482/ Labuan Bajo Seluas 12.020 M2 An. Dai Kayus ;
576. Buku Agenda Surat Masuk Dari Hj. Ente Puasa, Perihal Mohon Tindak Lanjut Proses Sertipikat Hak Milik Tanah Pemohon An. Haji Ente Puasa, Dkk;
577. Buku Agenda Surat Keluar Kepada Bupati Manggarai Barat Perihal Mohon Petunjuk Reklamsi Pantai Di Kelurahan Labuan Bajo, Tanggal 12 September 2015;
578. Buku Agenda Surat Keluar Kepada Bupati Manggarai Barat Perihal Penyelesaian Masalah Tanah Lokasi Toro Lemma, Tanggal 2 Juli 2015 ;
579. Buku Agenda Surat Masuk Dari Haji Muh. Adam Djudge Perihal Permohonan Pengakuan/ Penegasan Ha Katas Tanah Luas 4 Ha, Di Toro Lemma Batu Kallo, Atas Nama Haji Muh. Adam Djudge, Nomor : 4 HAD/V/2015, Tanggal 30 Mei 2015 ;
580. Buku Agenda Surat Keluar Kepada Bupati Mabar Perihal Penyelesaian Masalah Tanah Lokasi Toro Lemma, Tanggal 2 Juli 2015;

Hal 99 dari 281 hal Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

581. Buku Agenda Sureat Keluar Kepada Maria Hania Perihal Pengukuran Batas Bidang Tanah, Tanggal 15 Desember 2015 ;
582. Buku Agenda Surat Keluar Kepada Sdr. Ente Puasa, Dkk, Perihal Peninjauan Lokasi, Tanggal 6 Juni 2014;
583. Buku Agenda Surat Keluar Kepada Bupati Mabar Perihal Mohon Permintaan Surat Kuasa Dalam Rangka Proses Pensertipikatan Tanah Pemda Tahun 2014, Tanggal 18 Juni 2014;
584. Buku Agenda Surat Keluar Kepada Maria Hania Perihal Pengukuran Batas Bidang Tanah, Tanggal 15 Desember 2015;
585. Asli Tanda Terima dengan tanggal cetak 3 Agustus 2016;
586. Asli Tanda Terima dengan tanggal cetak 2 Agustus 2016;
587. Asli Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan Nomor: 4388/2016 tanggal 2 Agustus 2014;
588. Asli Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat Nomor: 354/HM/BPN-24.16/2016;
589. Asli Slip Stor Bank BRI ;
590. Asli Surat Setor Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) dari Mahmud Nip ;
591. Asli Risalah Panitia Pemeriksa Tanah A tanggal 11 Juli 2007 Nomor : 7 TAHUN 2007;
592. Asli Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Oleh Anggota Tim Pemeriksa Tanah A tanpa tanggal;
593. Asli Risalah Panitia Pemeriksa Tanah A tanggal 11 Juli 2007, Nomor: 7 Tahun 2007 dan Asli Risalah Pengolah Data;
594. Asli Peta Bidang Tanah tanggal 4 April 2016 Nomor Berkas: 1822/2015;
595. Asli Surat Tugas Pengukuran Nomor: 563/St-24-16/XI/2015, tanggal 26 November 2015;
596. Asli Data Subyek dan Obyek Hak an. Mahmud Nip tanggal 21 Februari 2015;
597. Asli Lampiran 13 Surat Permohonan dari Mahmud Nip tanggal 21 Februari 2015;
598. Asli Surat Permohonan dari Mahmud Nip tanggal 21 Februari 2015;
599. Asli Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Hak Atas Tanah Nomor: 593/KLB/319/II/2015, tanggal 21 Februari 2015;
600. Asli Pernyataan Penguasaan Fsik Bidang Tanah Sporadik, tanggal 21 Februari 2015;
601. Asli Surat Pernyataan Tanah Tidak Dalam Keadaan Sengketa, tanggal 21 Februari 2015;
602. Asli Surat Pernyataan Penanaman Tanda Batas Tanah tanggal 21 Februari 2015;
603. Asli Daftar Tim Peneliti Tanah, tanpa tanggal tanpa nomor;
604. Asli Daftar Panitia Pemeriksa Tanah A tanpa tanggal tanpa nomor ;
605. Asli Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas, Desa Labuan Bajo, NIB 2698;
606. Asli Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor: Pem.593/KLB/291/II/2015;
607. Asli Surat Keterangan Waris tanggal 20 Agustus 2014;
608. Asli Surat Keterangan Penolak Waris, tanggal 20 Agustus 2014;
609. Asli Surat Pernyataan Kesaksian Pembagian Hak, tanggal 20 Agustus 2014;
610. Asli Surat Keterangan Belum/Tidak Kena Pajak, Nomor: Pem.593/KLB/942/V/2015 tanggal 21 Februari 2015;
611. Asli Pengumuman No: 593/PENG/BPN/2014, tanpa tanggal;

Hal 100 dari 281 hal Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

612. Asli Surat Pemberitahuan Objek Pajak, tanggal 21 Februari 2015;
613. Asli Surat Bukti Penyerahan Tanah, dari Usman Pota kepada Abdul Hamid Har ;
614. Fotocopy KTP an. Mahmud Nip ;
615. Fotocopy KTP an. A. Hamid A. Rahim;
616. Fotocopy KTP an. Dai Kayus ;
617. Fotocopy KTP an. Mursaling.
618. Dokumen Pemecahan dan peralihan SHM Nomor 2490/Labuan Bajo menjadi SHM 2492/Labuan Bajo dan SHM 2490/Labuan Bajo warkah sebagai berikut:
619. Asli Surat Permohonan Pendaftaran Peralihan dari Notaris/PPAT Lalu Muhamad Supriandi, tanggal 29-11-2016;
620. Asli Surat Pernyataan Notaris/PPAT Lalu Muhamad Supriandi, tanggal 29-11-2016;
621. Asli Surat Kuasa Matheus Saniang Naga Siagian kepada Notaris/PPAT Lalu Muhamad Supriadi, tanggal 29-11-2016;
622. Asli Surat Pernyataan Matheus Saniang Naga Siagian, tanggal 29-11-2016;
623. Fotocopy KTP an. Mahmud Nip;
624. Fotocopy KTP an. Susi Yanti ;
625. Fotocopy KTP an. Matheus Saniang Naga Siagian;
626. Asli Akta Jual Beli Nomor: 286/2016 lembaran kedua, PPAT Lalu Muhamada Supriandi, SH., M.Kn.
627. Tanda Terima Dokumen dengan Nomor Berkas: 59/2017, tanggal cetak 11 Januari ;
628. Asli Surat Perintah Setor, Nomor Berkas Permohonan 59/2017;
629. Asli Bukti Setor dari Matheus Saniang Naga Siagian melalui Bank BNI ;
630. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016 an Mahmud Nip ;
631. Asli Salinan Surat Setor Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) an. Matheus Saniang Naga Siagian;
632. Asli Surat Permohonan Pendaftaran Peralihan dari Notaris/PPAT Lalu Muhamad Supriadi, tanggal 23-01-2017;
633. Asli Surat Kuasa Topenos Toren Jap kepada Notaris/PPAT Abdulah Nur, S.IP tanggal 21-1-2017;
634. Asli Surat Kuasa Abdulah Nur, S.IP kepada Sofia Poniam Porat tanggal 21-1-2017;
635. Asli Surat Pernyataan Tanah Tidak dalam Keadaan Sengketa, tanggal 20-01-2016;
636. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah Sporadik, tanpa Tanggal ;
637. Asli Surat Pernyataan Topenos Toren Jap ;
638. Fotocopy KTP an. Topenos Toren Jap ;
639. Fotocopy KTP an. Mahmud Nip ;
640. Fotocopy KTP an. Susi Yanti ;
641. Asli Akta Jual Beli Nomor: 02/JB/KK//2017, PPATS Camat Komodo;
642. Fotocopy legalisir Buku Tanah dan Surat Ukur Sertipikat Hak Milik 02446/Labuan Bajo an. Rudyanto Suliawan;
643. Asli Surat Permohonan dari Supardi Tahiya, lampiran 13, tanggal 30-10-2013;
644. Asli Surat Permohonan dari Supardi Tahiya, formulir isian 402, tanggal 11-04-2013;
645. Asli Data Subyek dan Obyek Hak, tanggal 30 Oktober 2013 oleh Supardi Tahiya;

Hal 101 dari 281 hal

Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

646. Asli Surat Keterangan Riwayat Pemilikan HAK atas Tanah, Nomor: Lbj.593/6022/IX/2013, tanggal 16 September 2013;
647. Asli Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Sporadik, tanggal 16 September 2013 oleh Supardi Tahiya;
648. Asli Surat Pernyataan Tanah tidak dalam keadaan Sengketa, tanggal 16 September 2013 oleh Supardi Tahiya;
649. Asli Surat Pernyataan Penanaman Tanda Batas Tanah, tanggal 16 September 2013, oleh Supardi Tahiya;
650. Asli Surat Pernyataan Penanaman Tanda Batas Tanah, tanggal 16 September 2013, oleh Supardi Tahiya;
651. Asli Data Subyek dan Obyek Pajak, tanggal 16 September 2013;
652. Asli Sketsa Gambar, tanggal 26 September 2013 oleh Supardi Tahiya;
653. Asli Surat Penguasaan Fisik bidang Tanah Sporadik tanggal 16 September 2013, yang dibuat oleh Supardi Tahiya;
654. Asli Surat Pernyataan Tanah Tidak Dalam Keadaan Sengketa, tanggal 16 September 2013;
655. Asli Surat Keterangan Belum/Tidak Kena Pajak Nomor: Lbj. 504/6027/IX/2013, tanggal 16 September 2013;
656. Asli Surat Keterangan Kepemilikan Tanah /Penguasaan Tanah Nomor: LBJ.593/6022/IX/2013, tanggal 16 September 2013
657. Fotocopy Surat Bukti Penyerahan tanah Adat, tanpa tanggal, dari Haji Ishaka dan Haku Mustafa kepada Supardi Tahiya;
658. Fotocopy KTP an. Supardi Tahiya;
659. Kartu Keluarga No. 531505260511016 AN. Supardi Tahiya;
660. Fotocopy SPPT, tanggal 1 Mei 2016, letak obyek Karanga-Waecicu;
661. Asli Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas Kel. Labuan Bajo, tanpa tanggal, tanpa nomor, belum tanda tangan Kepala Kantor;
662. Asli Tanda Terima Dokumen pendaftaran SK Hak, tanggal 8 Juni 2016 dari Supardi Tahiya;
663. Asli Surat Kuasa Supardi Tahiya kepada Veronika Syukur, tanggal 17 Juni 2016;
664. Asli Tanda Terima Dokumen Pendaftaran SK Hak, tanggal 2 Juni 2016;
665. Asli Pembayaran SK Hak, tanggal 6 Juni 2016, dari Supardi Tahiya;
666. Asli Surat Perintah Setor, tanggal 2 Juni 2016;
667. Asli SSPD-BPHTB an. Supardi Tahiya, tanggal 2 Juni 2016;
668. Asli Risalah Panitia Pemeriksa Tanah A Nomor: 561/2014 tanggal 13 Juni 2014 dan Risalah Pengolah Data (RPD) ;
669. Asli Daftar Hadir Sidang Panitia A atas Permohonan Sdr. Supardi Tahiya;
670. Asli Notulen Sidang Panitia A atas Permohonan Sdr. Supardi Tahiya dan Suaib Tahiya, tanggal 16 Juni 2014;
671. Asli Notulen Rapat Panitia A atas Permohonan Sdr. Supardi Tahiya, dkk., tanggal 16 Juni 2014;
672. Asli Pemberitahuan Sidang Panitia A dan Pemeriksaan Lokasi Permohoana Hak Atas Tanah an. Supardi Tahiya Dan Suaib Tahiya tanggal 13 Juni 2014;
673. Asli Surat Tugas Pengukuran Nomor: 476/ST-24.16.XI/2013, Tanggal 7 November 2013;
674. Asli Surat Tugas Survei Tematik dan Potensi Tanah, Nomor: 354/ST-24.16.XI/2013 tanggal 7 November 2013;
675. Asli Surat Nomor: 1138/53.15/200.2/2013, tanggal 6 November 2013, Prihal: Pengukuran Penetapan Batas Bidang Tanah an. Supardi Tahiya dkk.

Hal 102 dari 281 hal

Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

676. Asli Surat Nomor: 181/002-24.16/V/2014, tanggal 13 Mei 2014, Prihal Undangan Sidang Pemeriksaan Tanah;
677. Asli Tanda Terima Dokumen Permohonan SK Hak, tanggal 30 Oktober 2013;
678. Asli Surat Perintah Setor tanggal 30 Oktober 2013, nomor berkas 2901/2013;
679. Asli Surat Perintah Setor, tanggal 22 Desember 2013, nomor berkas 2901/2013;
680. Asli Pembayaran SK HAK, dari Supardi Tahiya Tanggal 30 Oktober 2013;
681. Asli Pembayaran Tambahan Biaya SK HAK dari Supardi Tahiya Tanggal 22 Desember 2015;
682. Pengumuman tanpa nomor, tanpa tanggal tahun 2013, belum ditandatangani Kepala Kantor Pertanahan;
683. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat Nomor: 1855/HM/BPN-24.16/2015, tanggal 22 Desember 2015 tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah Kepada Supardi ;
684. Asli Surat Permohonan Pendaftaran Peralihan dari Rudyanto Suliawan melalui kuasa Kosmas Hametono, tanpa tanggal ;
685. Asli Surat Kuasa Notaris/PPAT Theresia Dewi Koroh Dimu, SH., M.Kn. kepada Kosmas Hametono tanggal 18 Agustus 2016;
686. Asli Surat Kuasa dari Saniatma Adinoto substitusi dari Rudyanto Suliawan kepada Notaris/PPAT Theresia Dewi Koroh Dimu, SH., M.Kn. tanggal 18 Agustus 2016;
687. Fotocopy KTP an. Kosmas Hametono ;
688. Fotocopy KTP an. Theresia Dewi Koroh Dimu ;
689. Fotocopy KTP an. Suaib Tahiya ;
690. Fotocopy KTP an. Rahmawati ;
691. Fotocopy KTP an. Rudyanto Suliawan ;
692. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 5315052605110016;
693. Akta Jual Beli Nomor: 185/2016, Notaris/PPAT Theresia Dewi Koroh Dimu, SH., M.Kn.;
694. Tanda Terima Dokumen, tanggal cetak 8 September 2016.
695. Fotocopy legalisir Buku Tanah dan Surat Ukur Sertipikat Hak Milik 02447/Labuan Bajo an. Rudyanto Suliawan, seluas 8.447 M2;
696. Asli Surat Permohonan dari Suaib Tahiya, lampiran 13, tanggal 30-10-2013;
697. Asli Surat Permohonan dari Suaib Tahiya, formulir isian 402, tanggal 11-04-2013;
698. Asli surat kuasa, tanggal 6 April 2016, dari Suaib Tahiya kepada Veronika Syukur;
699. Asli Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Sporadik, tanggal 16 September 2013;
700. Asli Surat Pernyataan Tanah Tidak dalam Sengketa, tanggal 16 September 2013;
701. Asli Surat Keterangan Belum/Tidak Kena Pajak Nomor: Lbj. 504/6026/IX/2013, tanggal 16 September 2013;
702. Asli Surat Keterangan Kepemilikan Tanah /Penguasaan Tanah Nomor: LBJ.593/6023/IX/2013 tanggal 16 September 2013;
703. Asli Surat Pernyataan Penanaman Tanda Batas Tanah, tanggal 16 September 2013;
704. Fotocopy SPPT Tahun 2015, obyek Waecicu Luas 5.555 m2 nama wajib pajak Wida Ning Sri;

Hal 103 dari 281 hal

Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

705. Fotocopy SPPT Tahun 2016 obyek Waecicu Luas 8.457 m2 nama wajib pajak Suaib Tahiya, tanggal 1 Mei 2016;
706. Asli SSPD-BPHTB an. Suaib Tahiya, tanpa tanggal 2 Juni 2016;
707. Fotocopy Kartu Keluarga, an. Suaib;
708. Asli Surat Pernyataan Tanah Tidak dalam Keadaan Sengketa, tanggal 16 Septmebr 2013 oleh Suaib Tahiya;
709. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Sporadik, tanggal 16 September 2013 oleh Suaib Tahiya;
710. Asli Surat Keterangan Kepemilikan Hak Atas Tanah, Nomor: lbj.593/6023/IX/2013, tanggal 16 September 2013;
711. Asli Surat Pernyataan Penanaman Tanda Batas Tanah, tanggal 16 September 2013, oleh Suaib Tahiya;
712. Asli Data Subyek dan Obyek Hak tanggal 30 Oktober 20313 oleh Suaib Tahiya;
713. Daftar Pemeriksa Tanah A;
714. Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas Kel. Labuan Bajo, NIB 2393;
715. Asli Undangan Sidang Pemeriksaan Tanah, Nomor: 182/002-24.16/V/2014, tanggal 13 Mei 2014;
716. Asli Pemeriksaan sidang Panitia A an. Suaib Tahiya Dan Supardi Tahiya , Nomor : 1004/53.15/200/.3/IX/2014, Tangal 16 September 2014;
717. Asli Daftar Hadir Sidang Panitia A an. Suaib Tahiya dan Supardi Tahiya ;
718. Asli Notulen Sidang Panitia A atas Permohonan Hak Suaib Tahiya dan Supardi Tahiya, tanggal 19 September 2014;
719. Asli Daftar Lampiran Alas Hak an. Suaib Tahiya;
720. Asli Berita Acara Pemeriksaan Lapangan, tanpa tanggal bulan Maret 2014;
721. Fotocopy Risalah Panitia Pemeriksa Tanah A, tanpa nomor, tanpa tanggal tahun 2014, belum ditandatangani;
722. Asli Surat Perintah Setor Nomor Berkas : 2900/2013, tanggal 30 Oktober 2013;
723. Asli Surat Pembayaran Permohonan SK Hak, tanggal 30 Oktober 2013 Dari Suaib Tahiya;
724. Asli Tanda Terima Dokumen, tanggal 30 Oktober 2013, dari Suaib Tahiya;
725. Asli Surat Perintah Setor dari 2 Juni 2016, an. Pemohon Suaib Tahiya, tanpa ditandatangani;
726. Asli Surat Pembayaran Pendaftaran SK Hak, tanggal 6 Juni 2016 an. Suaib Tahiya;
727. Asli Surat Pembayaran Tambahan biaya untuk permohonan SK Hak, tanggal 22 Desmber 2015 an. Suaib Tahiya;
728. Asli Tanda Terima Dokumen tanggal 2 Juni 2016, an. Pemohon Suaib Tahiya;
729. Asli Surat Perintah Setor Nomor Berkas: 2900/2013 an. Suaib Tahiya;
730. Asli Surat Pengukuran Penetapan Batas Bidang Tanah an. Suaib Tahiya, tanggal 6 November 2013;
731. Asli Surat Tugas Survei Tematik dan Potensi Tanah, Nomor: 355/St-24.16/XI/2013, tanggal 7 November 2013;
732. Asli Surat Tugas Pengukuran Nomor; 475/St-24.16/XI/2013, tanggal 7 November 2013;
733. Peta Bidang Tanah, dengan Berkas Nomor: 2900/2013, TANGGAL 11/04/2014, Tanpa Tanda Tangan;
734. Asli Risalah Pengolah Data an. Suaib Tahiya, tanpa tanggal, tanpa nomor;
735. Asli Pengumuman: tanpa nomor tahun 2013, atas permohonan Suaib Tahiya;

Hal 104 dari 281 hal Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

736. Asli Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat Nomor: 1856/HM/BPN-24.16/2015.
737. Asli Surat Permohonan Pendaftaran Peralihan dari Rudyanto Suliawan melalui kuasa Kosmas Hametono ;
738. Asli Surat Kuasa Notaris/PPAT Theresia Dewi Koroh Dimu, SH., M.Kn. kepada Kosmas Hametono ;
739. Asli Surat Kuasa dari Saniatma Adinoto substitusi dari Rudyanto Suliawan kepada Notaris/PPAT Theresia Dewi Koroh Dimu, SH., M.Kn. ;
740. Fotocopy KTP an. Theresia Dewi Koroh Dimu ;
741. Fotocopy KTP an. Kosmas Hametono ;
742. Fotocopy KTP an. Supardi Tahiya ;
743. Fotocopy KTP an. Herawati ;
744. Fotocopy KTP an. Rudyanto Suliawan ;
745. Fotocopy Surat Kuasa tanggal 3 Agustus 2016 dari Rudiati Suliawan memberi kuasa kepada Saniatma Adinoto;
746. Foto copy KTP AN. Saniatma Adinoto;
747. Asli Akta Jual Beli Nomor: 187/2016, Notaris/PPAT Theresia Dewi Koroh Dimu, tanggal 18 Agustus 2016;
748. Asli Tanda Terima SHM 2447, tanggal 8 September 2016;
749. Asli Tanda Terima Dokumen dari Kosmas Hametono, tanggal 25 Agustus 2016;
750. Asli Tanda Terima Pembayaran Peralihan Hak dari Kosmas Hametono tanggal cetak 30 Agustus 2016;
751. Asli Surat Perintah Setor tanggal 29 Agustus 2016;
752. Foto copy Pernyataan Penjual oleh Suaib tanggal 18 Agustus 2016;
753. Foto copy Pernyataan Pembeli oleh Saniatma Adinoto tanggal 18 Agustus 2016;
754. Foto copy Pernyataan Jual Beli oleh Suaib dan Saniatma Adinoto, tanggal 18 Agustus 2016;
755. Foto copy Pernyataan Kekurangan Pajak tanggal 18 Agustus 2016;
756. Foto copy Pernyataan tidak sedang dijaminkan tanggal 17 Juni 2016;
757. Fotocopy NPWP Rudi Suliawan;
758. Asli SSPD-BPHTB an. Rudiato Suliawan, tanggal 18 Agustus 2016;
759. Fotocopy Surat Setor Pajak an. Suaib Tahiya 13 Agustus 2016;
760. Fotocopy SPT Sertipikat 2447;
761. Fotocopy Kwitansi Pembelian Tanah SHM 2447, tanggal 10 Agustus 2016 dari Bpk. Rudyanto Suliawan Senilai Rp. 2.111.750.000;
762. Tanda Terima Berkas Nomor: 5220/2016, tanggal cetak 8 September 2016;
763. Surat Perintah Setor Nomor Berkas 5220/2016;
764. Fotocopy legalisir Buku Tanah dan Surat Ukur Sertipikat Hak Milik 02448/Labuan Bajo an. Rudyanto Suliawan, seluas 8.447 M2;
765. Asli Surat Permohonan dari H. Sukri , lampiran 13, tanggal 28-08-2013;
766. Asli Surat Permohonan dari H. Sukri, formulir isian 402, tanggal 11 April 2014;
767. Asli Data Subyek dan Obyek Hak tanggal 28 Agustus 2013 oleh H. Sukri;
768. Asli Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Sporadik, tanggal 28 Agustus 2013;
769. Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Hak Atas Tanah tanpa tanggal Tahun 2013;
770. Asli Surat Pernyataan Tanah Tidak dalam Sengketa, tanggal 28 Agustus 2013 oleh H. Sukri;
771. Asli surat Pernyataan Penanaman Tanda Batas Tanahtanpa tanggal Tahun 2013 oleh H. Sukri;

Hal 105 dari 281 hal

Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

772. Asli Surat Pernyataan tentang Kepemilikan Tanah Haji Sukri berdasarkan hibah dari Bpk. Ketang 1987 tanggal 28 Agustus 2013;
773. Asli Surat Keterangan Penduduk, Nomor: Pem.0.470/379/IX/2013, tanggal 2 September 2013;
774. Asli Surat Keterangan Kepemilikan Tanah /Penguasaan Tanah Nomor: PEM.593/KLB/5219/VIII/2013 tanggal 28 Agustus 2013;
775. Asli Surat Keterangan Pajak Bumi dan Bangunan, Nomor: EK.504/5206/VIII/2013, tanggal 27 Agustus 2013;
776. Fotocopy Surat Bukti Penyerahan Hibah tanggal 10 Maret 1997, oleh Ketang kepada H. Sukri;
777. Fotocopy Kartu Keluarga H. Sukri;
778. Fotocopy SPPT tanggal 3 September 2013, lokasi Karang;
779. Fotocopy SPPT tanggal 1 Mei 2016, lokasi Karang;
780. Fotocopy KTP an. Haji Sukri;
781. Asli Surat Tugas Pengukuran dan Pemetaan, tanggal 24 April 2014;
782. Peta Bidang Tanah Nomor 521/2014;
783. Asli Pembayaran Permohonan SK Pemberian Hak, tanggal 23 April 2014;
784. Tanda Terima Dokumen Permohonan SK Pemberian Hak tanggal 23 April 2014;
785. Surat Perintah Setor, nomor berkas permohonan 1535.2014, tanggal 23 April 2014;
786. Asli Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Oleh Anggota Tim Pemeriksa Tanah A tanggal 4 Januari 2015 dan Risalah Pengolah Data (RPD);
787. Asli Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas, NIB 02537, tanggal 04-02-2015;
788. Asli Risalah Pemeriksa Tanah A, Nomor 108/2015, tanggal 4 Februari 2015;
789. Asli Pengumuman Tanpa Nomor Tahun 2013, belum ditandatangani Kakan;
790. Asli Surat Permohonan Pendaftaran Peralihan dari Rudyanto Suliawan melalui kuasa Kosmas Hametono tanpa tanggal;
791. Asli Surat Kuasa dari Saniatma Adinoto substitusi dari Rudyanto Suliawan kepada Notaris/PPAT Theresia Dewi Koroh Dimu, SH., M.Kn. ;
792. Asli Surat Kuasa Notaris/PPAT Theresia Dewi Koroh Dimu, SH., M.Kn. kepada Kosmas Hametono tanggal 18 Agustus 2016;
793. Fotocopy KTP an. Kosmas Hametono ;
794. Fotocopy KTP an. H. Sukri ;
795. Fotocopy Surat Keterangan Kematian Suami/Istri, tanggal 03-08-2016, Nomor: Pem.130/268/VIII/2016;
796. Fotocopy Kartu Keluarga, Nomor: 531505...;
797. Fotocopy KTP an. Rudyanto Suliawan ;
798. Fotocopy Surat Kuasa Rudyanto Suliawan kepada Saniatma Adinoto, tanggal 3 Agustus 2016 ;
799. Fotocopy KTP an. Saniatma Adinoto ;
800. Asli Akta Jual Beli Nomor: 186/2016 Notaris/PPAT Theresia Dewi Koroh Dimu, tanggal 18 Agustus 2016;
801. Asli Tanda Terima SHM 2448, tanggal 8 September 2016;
802. Asli Surat Perintah Setor, Nomor Berkas Permohonan 5212/2016 tanggal 29 Agustus 2016;
803. Foto copy Pernyataan Penjual oleh H. Sukri tanggal 18 Agustus 2016;
804. Foto copy Pernyataan Pembeli oleh Saniatma Adinoto tanggal 18 Agustus 2016;

Hal 106 dari 281 hal

Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

805. Foto copy Pernyataan Jual Beli oleh H. Sukri dan Saniatma Adinoto, tanggal 18 Agustus 2016;
806. Foto copy Pernyataan Kekurangan Pajak tanggal 18 Agustus 2016;
807. Foto copy Pernyataan Tidak Sedang Dijaminkan tanggal 20 Juni 2016;
808. Fotocopy SPPT Sertipikat 2448/Labuan Bajo;
809. Fotocopy Kwitansi Pembelian Tanah SHM 2448, tanggal 10 Agustus 2016 dari Bpk. Rudyanto Suliawan Senilai Rp. 5.032.500.000;
810. Asli SSPD-BPHTB an. Rudiato Suliawan, tanggal 18 Agustus 2016;
811. Fotocopy Surat Setor Pajak an. H. Sukri tanggal 13 Agustus 2016;
812. Asli Tanda Terima Dokumen, Nomro Berkas Permohonan 5212/2016.
813. Fotocopy legalisir Buku Tanah dan Surat Ukur Sertipikat Hak Milik 02482/Labuan Bajo an. Ismail Hirawan, seluas 12.020 M2;
814. Asli Surat Permohonan dari Dai Kayus, lampiran 13, tanggal 21 Februari 2015;
815. Asli Surat Permohonan dari Dai Kayus, formulir isian 402, tanggal 21 Februari 2015;
816. Asli Data Subyek dan Obyek Hak tanggal 21 Februari 2015 oleh Dai Kayus;
817. Asli Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor: Pem.593/KLB/290/II/2015;
818. Asli Surat Pernyataan Tanah Tidak dalam Sengketa, Nomor: 593/KLB/299/II/2015, tanggal 21 Februari 2015;
819. Asli Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Sporadik, tanggal 21 Februari 2015 dari Dai Kayus;
820. Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Hak Atas Tanah, Nomor 593/KLB/290/II/2015, tanggal 21 Februari 2015;
821. Asli Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Sporadik, tanggal 21 Februari 2015 dari Dai Kayus;
822. Asli Surat Pernyataan Tanah Tidak dalam Sengketa, tanpa Nomor, tanggal 21 Februari 2015;
823. Asli surat Pernyataan Penanaman Tanda Batas Tanah oleh Dai Kayus, tanggal 21 Februari 2015;
824. Asli Surat Bukti Penyerahan Tanah dari Usman Pota kepada Dai Kayus, tanggal 10 Oktober 1980;
825. Asli SPPT, lokasi tanah Karanga, an. Jaman Onestimus Tahun 2015;
826. Asli Surat Keterangan Dalam Proses Penerbitan SPPT PBB, Nomor: 970/Penda/448/VII/2015;
827. Fotocopy Surat Keterangan Kematian, Nomor: Pem.593/KLB/301/II/2015, tanggal 20 Mei 2015;
828. Surat Pernyataan Ahli Waris Muhamad Naser, dkk. tanggal 21 Februari 2015;
829. Fotocopy KTP an. Muhamad Naser;
830. Fotocopy KTP an. Malling Pembalas
831. Peta Bidang Tanah Nomor: 158/2016, tanggal 04/04/2016;
832. Asli Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas, Kelurahan Labuan Bajo, NIB 02651, tanggal 1-8-2016;
833. Asli Pengumuman Tanpa Nomor Tahun 2013, belum ditandatangani Kakan;
834. Asli Surat Pemberitahuan Obyek Pajak, an. DAI Kayus, tanggal 21 Februari 2015;
835. Asli Surat dari Pengadilan Negeri Labuan Bajo, tanggal 21 Juli 2016, nomor: W.26-U.15/726/HT.04.10/VII/2015 Prihal Mohon Informasi;

Hal 107 dari 281 hal Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

836. Asli Salinan Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor: 9/PDT.G/2016/PN.LBJ;
837. Asli Surat Keterangan Pengadilan Negeri Labuan Bajo, Nomor: W-26-U.15/725/S.KT/PDT/VII/2016, tanggal 21 Juli 2016;
838. Asli Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat, tanggal 19 Juli 2016, Nomor: 571/53.15-600.13/VII/2016, Prihal: Mohon Informasi;
839. Fotocopy Gugatan Nomor: 9/PDT.G/2016/PN.LBJ, tanggal 1 Mei 2016;
840. Asli Surat Pernyataan dari Ente Puasa, tanggal 15 Juli 2016;
841. Asli Notulen Sidang Panitia A, AN. Dai Kayus tanggal 8/12/2015;
842. Fotocopy Surat Keberatan dari Fatima Badosalam, dkk. Prihal Keberatan terhadap Permohonan Dai Kayus, tanggal 28 Desember 2015;
843. Fotocopy Surat Bukti Penyerahan Tanah Adat dari Haji Ishaka Keppada Kamis Hamnu, tanpa tanggal;
844. Fotocopy Surat Jual Beli Sebidang Tanah dari Abdul Latif Har kepada Onak, tanggal 3 Mei 2007;
845. Fotocopy Surat Kuasa Onak kepada Salawing Ishaka;
846. Asli Risalan Pemeriksa Tanah A , Nomor 7 Tahun 2007, tanggal 11 Juli 2007;
847. Asli Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Oleh Anggota Tim Pemeriksa Tanah a tanggal 1-08-2016 dan Risalah Pengolah Data;
848. Asli Bukti Pembayaran SSPD-BPHTB an. Dai Kayus melalui Bank BRI
849. Asli surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat Nomor: 351/HM/BPN-24.16/2016 tentang Pemberian Hak Milik Kepada Dai Kayus;
850. Asli Surat Permohonan Pendaftaran Peralihan dari Lalu Muhamad Supriadi selaku Kuasa dari Ismail Hirawan, tanggal 09-08-2017;
851. Fotocopy KTP an. Dai Kayus;
852. Fotocopy KTP an. Ismail Hirawan;
853. Fotocopy KTP an. Kevin Natasaputra;
854. Fotocopy KTP an. Megawati Setiadi;
855. Asli Surat Pernyataan tidak menjadi Jaminan, tanggal 09-08-2017;
856. Asli Surat Kuasa Ismail Hirawan, dkk. kepada Lalu M. Supriadi, tanggal 09-08-2017;
857. Asli Surat Pernyataan tanah tidak absente/guntai, tanggal 09-07-2017;
858. Surat Kuasa dari Lalu M. Supriadi kepada Arnoldus Y. Travolta, tanggal 09-08-2017;
859. Asli Akta Jual Beli Nomor 170/2017, Notaris/PPAT Lalu M. Supriandi, SH., M.Kn.
860. Asli Tanda Terima Nomor Bukti Penyerahan 2573, Nomor berkas Permohona 3149/2017, tanggal 6 September 2017;
861. Asli Surat Pembayaran Peralihan Hak, Nomor HM 02482/Labuan Bajo;
862. Asli Surat Perintah Setor, Nomor Berkas: 3149/2017;
863. Asli Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan 3149/2017;
864. Asli Pembayaran SSPD-BPHTB an. Ismail Hirawan;
865. Fotocopy Bukti Setor Tunai melalui BANK BNI untuk pembayaran SSPD-BPHTB;
866. Fotocopy Cetakan Kode Billing, Id Billing 017071907985781;
867. Fotocopy SPPT PBB, NOP: 531601003000305880;
868. Asli tanda Terima Sementara an Dai Kayus tahun 2017;
869. Asli Tanda Terima Dokumen, Nomor berkas Permohonan 3149/2017;
870. Asli Surat Perintah Setor Nomor berkas Permohonan 3149/2017, tanggal 28 Agustus 2017;

Hal 108 dari 281 hal Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

871. Fotocopy Surat dari Muh. A. Adam Djuje, tanggal 17-11-2014, kepada Kepala Kantor Pertanahan Kab. Manggarai Barat, Nomor: /HAD/XI/2014, Perihal Permohonan Pengakuan/Penegakkan Hak Atas Tanah Luas 4 Ha di Lokasi Toroh Lema Batu Kallo An. Muh. A. Adam Djuje;
872. Fotocopy Tanda terima dokumen Nomor Berkas Permohonan 2796/2014, an. Muh. A. Adam Djuje;
873. Fotocopy Pembayaran Pendaftaran Tanah Pertama Kali Pengakuan/Pemberian Hak, an. Muh. A. Adam Djuje, tanggal 7 Juli 2014;
874. Fotocopy Lembar Check List Berkas;
875. Fotocopy Surat Permohonan Hak Muh. A. Adam Djuje, tanpa tanggal, (lampiran 13);
876. Fotocopy KTP an. Muh. A. Adam Djuje
877. Fotocopy Surat Bukti Penyerahan Hak Atas Tanah Adat, dari Ishaka dan Haku Mustafa kepada H. Adam Djuje, tanggal 10 April Tahun tidak terbaca;
878. Fotocopy KK an. Muh. A. Adam Djuje;
879. Fotocopy SPPT, NOP: 53.16.010.030.003-0498.0;
880. Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Sporadik, yang dibuat oleh Muh. A. Adam Djuje, tanggal 06-11-2013;
881. Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Hak Atas Tanah, Nomor: LBJ.593/6218/XI/2013, tanggal 6 November 2013;
882. Fotocopy Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Hak Atas Tanah, Nomor: Lbj.593/III/I/2014;
883. Fotocopy Surat Keterangan Tanah Tidak Dalam Keadaan Sengketa, tanpa tanggal, yang dibuat oleh Muh. A. Adam Djuje;
884. Fotocopy Surat Pernyataan Penanaman Tanda Batas Tanah, tanpa tanggal, yang dibuat oleh Muh. A. Adam Djuje;
885. Fotocopy Data Subyek dan Obyek Hak, tanpa tanggal, yang dibuat oleh Muh. A. Adam Djuje;
886. Fotocopy Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas, Kel. Labuan Bajo, tanpa tanggal;
887. Fotocopy Surat Permohonan Muh. A. Adam Djuje, tanpa tanggal, (Formulir Isian 402);
888. Fotocopy KTP an. Abdul Haji;
889. Fotocopy KTP an. Alimudin Sidik;
890. Fotocopy Pengumuman, tanpa Nomor, tanpa tanggal;
891. Fotocopy Daftar Panitia Pemeriksa Tanah A;
892. Fotocopy Lembar Disposisi Kepala Kantor Pertanahan;
893. Surat Dari Bupati Manggarai Barat Drs. Agustinus CH. Dula, tanggal 28 Juli 2020, Nomor: Pem.131/145/VII/2020.
894. Asli Lembar disposisi Kepala Kantor Pertanahan, Surat Nomor: 01/HADD/II/2014, tanggal 5 Februari 2014;
895. Asli Surat Nomor: 01/HADD/II/2014, tanggal 5 Februari 2014, Perihal: Penangguhan Pengukuran/pensertipikatan tanah oleh Petugas BPN Kabupaten Manggarai Barat atas Permohonan saudara Ente Puasa, dkk. Lokasi Toroh Lemak Batu Kalo dan Karang;
896. Fotocopy Surat Keterangan Riwayat kepemilikan hak atas tanah, nomor: lbj.593/111/I/2014, tanggal 23 Januari 2014;
897. Fotocopy Peta Sket Hasil Penataan oleh H. Adam Djuje, tanggal 26-4-1997;
898. Fotocopy Lembar disposisi Kepala Kantor Pertanahan, Surat Nomor: PEM.593/KLB/1873/XI/2014, tanggal 27 November 2014;

Hal 109 dari 281 hal Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

899. Fotocopy Surat Nomor: PEM.593/KLB/1873/XI/2014, tanggal 27 November 2014, Perihal: Pembatalan/Penarikan Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Hak Atas Tanah;
900. Asli Lembar disposisi Kepala Kantor Pertanahan, Surat Nomor: PEM.138/1311/XII/2014, tanggal 2 Desember 2014;
901. Asli Surat Nomor: PEM.138/1311/XII/2014, tanggal 2 Desember 2014 Perihal: Pertimbangan Agar tidak melayani proses penerbitana ha katas tanah an. H. M. Abubakar Adam Djuje di Karangan;
902. Asli Analisis Kasus Pertanahan Obyek Tanah Seluas \pm 26.400m² terletak di Toroh Lema Batu Kalo Karangan Kel. Labuan Bajo, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat, Prov. NTT , antara H.M. Djuje melawan Ente Puasa, dkk (11 orang), Nomor Reg. Kasus: 01/SKP/IV/2014, tanggal 6 Juni 2014;
903. Satu Jepit Asli BA. Peninjauan Lokasi Sengketa, Obyek Tanah Seluas \pm 26.400m² terletak di Toroh Lema Batu Kalo, Karangan Kel. Labuan Bajo, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat, Prov. NTT , antara H.M. Djuje melawan Ente Puasa, dkk (11 orang), Nomor Reg. Kasus: 01/SKP/IV/2014, tanggal 10 Juni 2014
904. 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan yang ditanda tangani oleh H. Muhammad Abu Bakar Adam Djudje (belum ditanda tangani);
905. 1 (satu) lembar asli surat Himbauan. Nomor: Pem.138/ II/2018 Tanggal 17 Januari 2018;
906. 1 (satu) lembar fotocopy surat Mohon Tindak Lanjut Proses Pengukuran Tanah An. H.M Abubakar Adam Djudje dan Ente Puasa, dkk. Nomor: Pem.593/229/III/2014 Tanggal 1 Maret 2014;
907. 1 (satu) lembar Disposisi berisikan 4 (empat) lembar asli surat Perihal Mohon untuk sementara tidak memproses penerbitan sertifikat dari masing-masing pemilik tanah yang diajukan oleh saudara Andi Nabit dkk di Lokasi Gusoh Ngea-Toroh Sintangga dan Bukti di Sebelah Timur Karanga, Kelurahan Labuan Bajo, Nomor:01/HAD/X/18 Tanggal 12 Oktober 2018;
908. 1 (satu) lembar Disposisi berisikan 5 (lima) lembar asli surat Permohonan Penundaan Sementara Proses Penerbitan Sertipikat Tanah yang ditanda tangani oleh Muhammad Noval, Tanggal 11 Maret 2019;
909. 1 (satu) lembar asli surat Peninjauan Kembali Akta Hibah No.120/HB/KK/V/2017, Nomor: Pem.593/1713.a/XI/2017 Tanggal 01 november 2017;
910. 1 (satu) lembar Disposisi berisikan 6 (enam) lembar asli surat Permohonan Penundaan Sementara Proses Penerbitan Sertipikat Tanah, yang ditanda tangani oleh Soeharman Tanggal 11 Maret 2017;
911. 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar, No. 15/PPAT-KOM/III/2018 Tanggal 06 Maret 2018. Perihal Rekapan PPAT Kantor Camat Komodo Bulan Februari Tahun 2018;
912. 1 (satu) lembar asli surat Pemberitahuan Sidang Panitia 'A' an. Veronika Syukur, Nomor: 335/2-53.15/XII/2017 Tanggal 18 Desember 2017;
913. 1 (satu) lembar Disposisi berisikan 1 (satu) lembar asli surat Data Tanah Milik Pemerintah, Nomor: 500/406/HAT/2006 Tanggal 12 Juli 2006;
914. 1 (satu) lembar Disposisi berisikan 1 (satu) lembar asli surat Perihal Undangan Rapat, Nomor: Pem.130/385/IX/2006 Tanggal 19 September 2006;
915. 1 (satu) lembar Disposisi berisikan 1 (satu) lembar asli surat Perihal Penyelesaian Masalah Tanah Pemda, Nomor: Pem.130/405/IX/2006 Tanggal 29 September 2006;

Hal 110 dari 281 hal Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

916. 1 (satu) lembar Disposisi berisikan 1 (satu) lembar asli surat Perihal Pendataan Tanah Ulayat, Nomor: Pem.130/485/XII/2005 Tanggal 23 Desember 2005;
917. 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Penyerahan Kuasa yang di tanda tangani oleh H. Ishaka, Tanggal 21 April 1997;
918. 1 (satu) lembar Disposisi berisikan 5 (lima) lembar asli surat Perihal .Keberatan atas Pengukuran dan mohon Pembatalan Penerbitan Sertipikat atas bidang tanah Kering/ladang di Toroh Lema yang diajukan/Dimohonkan oleh sdr. Sukri,dkk, Nomor: A.03/LO.GKP.RF/II/2016 Tanggal 09 februari 2016;
919. 1 (satu) lembar Disposisi yang berisikan 3 (tiga) lembar Fotocopy surat Perihal Penolakan setiap Permohonan sertifikat Hak atas Tanah di atas tanah Milik Ir. Nicolaus Naput (Peta Terlampir) yang terletak di Toroh Lema Karang, kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten manggarai Barat. No. Ref: 14/IMYBS/XII/2018 Tanggal 5 Desmber 2018;
920. 1 (satu) lembar Disposisi berisikan 1 (satu) lembar asli Surat Undangan Klarifikasi, Nomor: 1235/53.15/600.13/XII/2014 Tanggal 03 Desember 2014;
921. 1 (satu) lembar Disposisi berisikan 2 (dua) lembar asli Surat Udangan Pengkajian dan Penelitian Lokasi Tanah Kasus Pertanahan dengan obyek Sengketa Kepemilikan Hak Atas Tanah, terletak di Karang Kelurahan Labuan Bajo Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur, Nomor: 878/53.15/600.13/IX/2017 Tanggal 12 September 2017;
922. 1 (satu) lembar Disposisi berisikan 1 (satu) lembar asli Surat Undangan Klarifiukasi Tanah di Karang, Nomor: Trantib.300/3464/XI/2017 Tanggal 10 November 2017;
923. 1 (satu) lembar Disposisi berisikan 1 (satu) lembar asli Surat Undangan, Nomor: DPRKPP.640/737/XII/2017 Tanggal 13 Desember 2017;
924. 1 (satu) lembar asli surat Pemberitahuan Sidang Panitia 'A' an. Fransiskus Subur (2 Bidang), Nomor: 263/2-53.15/IX/2017 Tanggal 07 September 2017;
925. 1 (satu) lembar Disposisi berisikan 2 (dua) asli Surat Permintaan Keterangan/ Klarifikasi atas Permohonan Penerbitan Hak Milik Tanah An.Sdr.Nikolaus Naput, Nomor: 1052/53.15/300.5/2016 Tanggal 27 Desember 2016;
926. 1 (satu) lembar Disposisi berisikan 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan, Nomor: 600/53.15-600.13/VIII/2016 Tanggal 1 Agustus 2016;
927. 1 (satu) bundel asli Dokumen Akta Jual Beli, Nomor: 02/JB/KK/II/2017;
928. 1 (satu) lembar Disposisi berisikan 1 (satu) lembar Asli surat Mohon Persertifikatan Tanah Pemda di Toroh Lemma Batu Kallo/Karang, Nomor: 553/53.15.300/VII/2018 Tanggal 10 Juli 2018;
929. 1 (satu) lembar Disposisi berisikan 1 (satu) lembar Asli Surat Undangan , Nomor: Pem.131/155/VI/2018 Tanggal 26 Juni 2018;
930. 1 (satu) buah buku Agenda Surat Masuk Tahun 2014;
931. 1 (satu) buah buku Agenda Surat Keluar Tahun 2014;
932. Data file dokumen .9 BERKAS PAKE dari Harddisk komputer Merek HP LVI56IX,CPU merek Acer Intel Core B-4130
933. 1 (satu) bundel asli dokumen permohonan atas nama DAVID ANDRE PRATAMA

Hal 111 dari 281 hal

Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

934. 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan penyerahan tanah adat yang telah ditandatangani oleh Haji Muh. Abubakar Adam Djuje pada tanggal 11 Februari 2013
935. 1 (satu) lembar surat asli perihal pemeriksaan sidang Panitia A atas nama SUAIB TAHIYA dan SUPARDI TAHIYA yang terletak di Karangan, Kel. Labuan Bajo, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat Nomor : 1004/53.15.200.3/IX/2014 tanggal 16 September 2014
936. 1 (satu) jepit foto copy dokumen surat bukti penyerahan tanah adat
937. 3 (tiga) lembar asli surat penolakan setiap permohonan hak atas tanah di atas tanah yang merupakan tanah milik Ir. Nikolaus Naput (Peta terlampir) yang terletak di Karangan, Kel. Labuan Bajo, Kec. Komodo, Nomor.Ref : 19/IMYBS/IV/2017 tanggal 8 Desember 2017.
938. 1 (satu) lembar asli Surat Undangan Mediasi, Nomor : 626/53.15/600.13/VIII/2016 tanggal 04 Agustus 2016
939. 1 (satu) lembar asli surat Undangan Mediasi ke dua, nomor : 432/53.15/600.13/V/2016 tanggal 25 Mei 2016
940. 1 (satu) lembar surat undangan mediasi, Nomor : 221/53.15/600.13/III/2016 tanggal 16 Maret 2016
941. 1 (satu) Lembar foto copy surat penyerahan Kuasa tanggal 1 November 1996
942. 1 (satu) bundel Fotocopy Dokumen Tanah an. AMRAN ALIMAN lokasi: Batu Kalo tanggal 8 – 8 – 2017 :
943. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen ACHYAR ABDURAHMAN, SH. Dalam map kertas berwarna biru;
944. 1 (satu) bundel dokumen tanah atas nama GORIS MERE dalam map plastic berwarna merah, yang terdiri dari :
- 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Kepemilikan Tanah nomor: Pem.593/3614/XI/2017 tanggal 21 November 2017 atas nama Drs. GORIS MERE;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Belum/Kena Pajak nomor: Pem.594/3615/XI/2017 tanggal 21 November 2017 atas nama Drs. GORIS MERE;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Hak Atas Tanah nomor: Pem.593/3616/XI/2017 tanggal 21 November 2017 atas nama Drs. GORIS MERE;
 - 2 (dua) lembar fotocopy Perjanjian Jual Beli Tanah hari Kamis, tanggal 17 November 2017 antara MUHAMMAD ACHYAR, SH. Kepada Drs. GORIS MERE;
945. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Bukti Penyerahan Tanah Adat tanpa tanggal dan tahun dari HAJI ISHAKA dan HAKU MUSTAFA kepada STEFAN BAHAN;
946. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan / Penyerahan Tanah Adat tanggal 18 Mei 1992 antara ISHAKA dan HAKU MUSTAFA kepada USMAN A. KAHAR;
947. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan tanggal 01 April 1995 atas nama KAMIS HAMNU;
948. 1 (satu) lembar fotocopy lampiran surat keterangan tanggal 01 April 1995 dengan nama yang membuat keterangan KAMIS HAMNU;
949. 1 (satu) lembar fotocopy peta;
950. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Kepemilikan Tanah nomor: Lbj.593/6206/XI/2013 tanggal 06 November 2013 atas nama HAMZAH SIDIK;

Hal 112 dari 281 hal

Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

951. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Bukti Penyerahan Tanah Adat dari HAJI ISHAKA dan HAKU MUSTAFA kepada GANI yang terletak di WAE CICU TIMUR, Desa Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Daerah Tingkat Dua Manggarai, tanpa tanggal, tahun dan nomor;
952. 1 (satu) jepitan asli lembaran disposisi Lurah Labuan Bajo dari Badan Pertanahan Nasional, Nomor Surat: 1123/5-53.15.200/XI/2018 tanggal 13 November 2018 perihal Mediasi atas Keberatan Sdr. Nahar, Wahyudin, dan Sarjono terhadap Permohonan Hak atas tanah atas nama Lutfin, dengan lampiran Kronologi Masalah Tanah yang diajukan Permohonan Hak oleh Lutfin atas tanah terletak di Desa Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
953. 1 (satu) jepitan asli lembaran disposisi Lurah Labuan Bajo dari Badan Pertanahan Nasional, Nomor: 882/5-53.15.200/X/2018 tanggal surat 09 Oktober 2018;
954. 1 (satu) jepitan asli lembaran disposisi Lurah Labuan Bajo dari Badan Pertanahan Nasional, nomor: 243/6-53.15/X/2018 tanggal 23 Oktober 2018 perihal Pemberitahuan Sidang Panitia 'A' an. AMRAN ALIMAN;
955. 1 (satu) jepitan asli lembaran disposisi Lurah Labuan Bajo dari Badan Pertanahan Nasional, nomor: 1130/5-53.15.200/XI/2018 tanggal 26 November 2018;
956. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Kepemilikan Tanah nomor: Pem.593/2293/VII/2017 tanggal 04 Juli 2017 an. GANI;
957. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanah Tidak Dalam Keadaan Sengketa tanggal 04 Juli 2017;
958. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Belum/Tidak Kena Pajak nomor: Pem. 593/2295/VII/2017 tanggal 04 Juni 2017 an. GANI;
959. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Tidak Dalam Sengketa Nomor: Pem. 593/2294/VII/2017 tanggal 04 Juli 2017 an. GANI;
960. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Tidak Dalam Sengketa nomor: Pem. 593/2483/VII/2017 tanggal 24 Juli 2017 an. DUS;
961. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanah Tidak Dalam Keadaan Sengketa tanggal 24 Juli 2017 an. DUS;
962. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Kepemilikan Tanah nomor: Pem. 593/2463/VII/2017 tanggal 24 Juli 2017 an. DUS;
963. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Belum/Tidak Kena Pajak nomor: 593/2465/VII/2017 tanggal 24 Juli 2017 an. DUS;
964. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Belum/Tidak Kena Pajak Nomor: Pem.593/957/IV/2018 tanggal 26 April 2018 an. ALIMUDIN KAMIS;
965. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Kematian nomor: Pem. 470/958/IV/2018 tanggal 26 April 2018;
966. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Belum/Tidak Kena Pajak nomor: Pem. 593/957/IV/2018 tanggal 26 April 2018 an. KAMIS HAMNU;
967. 1 (satu) lembar asli Surat dari Badan Pertanahan Nasional nomor: 548/002-24.15/VI/2016 tanggal 16 Juni 2016 tentang Pemberitahuan Sidang Panitia 'A' an. Muhamat Tayeb;
968. 1 (satu) bundel Dokumen Tanah an. KAMIS HAMNU als. FATIMA BADO SALAM lokasi KARANGAN – 28/08/2017, yang terdiri dari :
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepemilikan Tanah nomor: Pem. 593/2718/VIII/2017 tanggal 25 Agustus 2017 an. FATIMA BADO SALAM. (tanda tangan Lurah tanpa cap);
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Belum/Tidak Kena Pajak nomor: Pem. 593/2720/VIII/2017 tanggal 25 Agustus 2017 an. FATIMA BADO SALAM (tanda tangan Lurah tanpa cap);

Hal 113 dari 281 hal Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanah Tidak Dalam Sengketa nomor: Pem. 593/2719/VIII/2017 tanggal 25 Agustus 2017 an. FATIMA BADO SALAM (tanda tangan lurah tanpa cap);
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanah Tidak Dalam Keadaan Sengketa tanggal 25 Agustus 2017 (tanda tangan lurah tanpa cap, tidak ada tanda tangan dari FATIMA BADO SALAM);
- 2 (dua) lembar fotocopy pengajuan data baru kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Barat;
- 1 (satu) lembar fotocopy KTP an. FATIMA BADO SALAM;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Bukti Penyerahan Tanah Adat dari HAJI ISHAKA dan HAKU MUSTAFA kepada KAMIS HAMNU, tanpa tanggal;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Penolakan Warisan tanggal 09 Mei 2016;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Waris tanggal 09 Mei 2016.
- 969. 1 (satu) bendel asli Rekomendasi nomor: Ekbang.552.2/1676/IX/2016 tanggal 27 September 2016;
- 970. 1 (satu) bendel Dokumen tanah an. ALWI CHANDRA dalam map kertas warna kuning, yang terdiri dari:
 - 1 (satu) lembar Surat dari Bupati Manggarai Barat nomor: Pem.131/28/I/2016 tanggal 18 Januari 2016 kepada Bpk. H. Muhammad A. A. Djudje perihal Penegasan;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Pemilikan Tanah/Penguasaan Tanah nomor: Lbj. 593/3276/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 17 Oktober 2012, Reg. No: Lbj. 593/3276/X/2012;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Penyerahan Kuasa tanggal 23 Maret 2000 dari ISMAIL DJUDJE, DKK kepada HAJI MUHAMAD ABUBAKAR ADAM DJUDJE;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Silsilah Keturunan Haruna Djudje tanggal 23 Maret 2004;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Kronologis Kepemilikan Tanah Haruna Djudje (Mbo Haruna) di Pulau Bajo bagian Utara;
 - 1 (satu) lembar fotocopy gambar/sketsa Tanah Mbo haruna (Haruna Djudje) lokasi Pulau Bajo bagian Utara an. Ahli Waris : Haji Muhamad Abubakar Adam Djudje;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan an. H. Muh. Abubakar Adam Djudje, beralamat Cempa – Lingkungan II, Labuan Bajo, Manggarai Barat sebesar Rp 2.970.000,- (dua juta Sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) tanggal 30 November 2012;
 - 1 (satu) lembar fotocopy peta;
 - 1 (satu) jepitan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah nomor: Lbj. 593/26/I/2014 tanggal 06 Januari 2014;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Surat dari Badan Pertanahan Nasional nomor: 858/53.15/200.3/X/2016 tanggal 25 Oktober 2016;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Pembayaran Permohonan SK Pemberian Hak, nomor berkas: 5683/2016 dari ALWI CHANDRA IBRAHIM sebesar Rp 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Hal 114 dari 281 hal

Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy Pengumuman tanpa nomor & tanggal, tahun 2016;
- 1 (satu) lembar fotocopy Panitia Pemeriksa Tanah A, tanpa nomor, tanggal, dan tahun;
- 1 (satu) jepitan data tentang Pemilikan dan Penguasaan Hak atas Tanah;
- 1 (satu) jepitan fotocopy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah nomor: Lbj. 593/26/II/2014 tanggal 06 Januari 2014 an. HAJI MUH. A. ADAM DJUDJE;
- 1 (satu) jepitan fotocopy Kronologis Kepemilikan Tanah Warisan atas nama H. Adam Djudje di Pulau Bajo Bagian Barat
- 971. 1 (satu) jepitan asli Surat Keterangan Belum/Tidak Kena Pajak nomor: Pem. 593/2039/X/2016 tanggal 17 Oktober 2016 an. FAROUK DJAWAS;
- 972. 1 (satu) bendel Berkas Tanah an. DAENG NGINTAN dan ABU SOUFIAAN DG PABETA dalam map berwarna hijau, yang terdiri dari:
 - 1 (satu) jepitan fotocopy Surat Kepada Bapak Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Manggarai Barat dari WAHYUDIN perihal Tindak Lanjuti Susulan Hasil Gelar Kasus poin (e) dan Pembatalan Penerbitan Sertifikat an. Nikolaus Naput;
 - 1 (satu) jepitan fotocopy Surat Kejaksaan Agung Republik Indonesia nomor: B-230/E/Ejp/01/2013 tanggal 22 Januari 2013 perihal Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum yang obyeknya berupa tanah;
 - 1 (satu) jepitan fotocopy surat kepada Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Manggarai Barat dari H. MUSTAJIB dan WAHYUDIN tanggal 17 September 2015;
 - 1 (satu) lembar asli surat Bupati Manggarai Barat nomor: Pem. 131/212/VIII/2015 tanggal 28 Agustus 2015;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kepada Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Manggarai Barat dari Hj. Enting Martini, Muhamad Thasrif Daeng Pabeta, Nurhayati Daeng Mawera, Haji Mustajib, Haji Sukri tanggal 11 Juni 2015;
 - 1 (satu) lembar tulisan tangan.
- 973. 1 (satu) bendel Masalah Tanah Batu Gosok – Karang, H. Abasido – J Mekes dalam map berwarna biru, yang terdiri dari:
 - Surat Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Manggarai Barat kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo up. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata nomor: 03/Pdt.G/2012/PN-LBJ tanggal 28 Mei 2012;
 - Surat Law Office Gabriel Kou, SH. & Partners kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo perihal Eksepsi dan Jawaban Tergugat II dalam Perkara Perdata nomor: 03/Pdt.G/2012/PN-LBJ tanggal 23 Mei 2012;
 - Surat Eduardus Gunung, SH. & Rekan kepada Majelis Hakim Perkara Perdata No. 03/Pdt.G/2012/PN-LBJ tanggal 23 Mei 2012;
 - Surat Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Insani (PKBHI) Bima-NTB perihal Replik terhadap Eksepsi/Jawaban dalam Pokok Perkara Tergugat I, II, dan tergugat III / Gugatan Rekonvensi dari Tergugat III Konvensi tanggal 13 Juni 2012.
- 974. 1 (satu) jepitan asli Surat Keterangan Kepemilikan Tanah nomor: Pem. 539/361/II/2016 tanggal 29 Februari 2016 an. MATHEUS ARMON;

Hal 115 dari 281 hal Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

975. 1 (satu) bendel Dokumen Tanah an. FATIMA BADO SALAM – KAMIS HAMNU, lokasi Wae Cicu Timur, Karang – 15/04/2018 dalam Map kertas berwarna kuning;
976. 1 (satu) bendel Dokumen Tanah an. WAHYUDIN, lokasi Karang – 12/01/2017 dalam Map plastik berwarna biru, yang terdiri dari:
- 1 (satu) jepitan fotocopy surat nomor : 01/YAW/I/2018 tanggal 15 Januari 2018 perihal Sanggahan;
 - 2 (dua) lembar fotocopy Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Manggarai nomor: Pem. 014/395/78 tanggal 11 Agustus 1978 perihal Persoalan Tanah an. Haji Makki Almarhum;
 - 2 (dua) lembar fotocopy surat Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara RI nomor: 123/M.PAN/12/2000 tanggal 18 Desember 2000 perihal Persoalan Tanah : Abu Soufyan Daeng Pabeta;
 - 2 (dua) lembar fotocopy Izin Penggunaan Tanah Makam nomor: 00842/1.776.121.101 tanggal 28 Mei 2014;
 - 2 (dua) lembar fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 14 Juli 2014;
 - 1 (satu) jepitan fotocopy Surat Kuasa Mengurus Tanah Warisan tanggal 17 Maret 2016;
 - 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Susunan Silsilah Keturunan (alm) H. Makki
 - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 20 Maret 2016;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Warisan tanggal 01 April 2016;
 - 1 (satu) jepitan fotocopy Surat Pemberian Hibah/Pelimpahan Hak Milik Tanah tidak ada nomor, tanggal 15 Mei 1990;
 - 1 (satu) jepitan fotocopy Surat Pernyataan Penolakan Warisan tanggal 09 Januari 2017;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah nomor: Pem. 593/48/I/2017 tanggal 10 Januari 2017 an. MUHAMMAD THASYRIT DAENG M.;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Tanah Tidak Dalam Sengketa nomor: Pem. 593/ 49/ I/ 2017 tanggal 10 Januari 2017 an. MUHAMMAD THASYRIT DAENG M.;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Belum/Tidak Kena Pajak nomor: Pem. 593/ 50/ I/ 2017 tanggal 10 Januari 2017 an. MUHAMMAD THASYRIT DAENG M.;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 10 Januari 2017 an. MUHAMMAD THASYRIT DAENG M.;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Tanah Tidak Dalam Keadaan Sengketa tanggal 10 Januari 2017 an. MUHAMMAD THASYRIT DAENG M.;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Penanaman Tanda Batas Tanah tanggal 10 Januari 2017 an. MUHAMMAD THASYRIT DAENG M.;
 - 1 (satu) jepitan Surat Pernyataan Hibah tanggal 20 September 2016 dari Hj. ENTIN MARTINI, S.Pd., DKK kepada WAHYUDIN;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemberitahuan Objek Pajak lokasi Karang, Kel. Labuan Bajo dengan luas tanah +/- 25.000 m2;

Hal 116 dari 281 hal

Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah nomor: Pem. 593/ 2093/ X/ 2016 tanggal 26 Oktober 2016 an. WAHYUDIN;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Tanah Tidak Dalam Sengketa nomor: Pem. 593/2096/X/2016 tanggal 26 Oktober 2016 an. WAHYUDIN;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 26 Oktober 2016 an. WAHYUDIN;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Tanah Tidak Dalam Keadaan Sengketa tanggal 26 Oktober 2016 an. WAHYUDIN;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Belum/Tidak Kena Pajak nomor: Pem. 593/2097/X/2016 tanggal 26 Oktober 2016 an. WAHYUDIN;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Penanaman Tanda Batas Tanah tanggal 26 Oktober 2016 an. WAHYUDIN;
 - 2 (dua) lembar fotocopy Surat BPN Kabupaten Manggarai Barat nomor: 467/53.15/200.4/V/2017 tanggal 15 Mei 2017 perihal Pengukuran Batas Bidang Tanah an. WAHYUDIN;
 - 1 (satu) jepitan fotocopy Surat Keterangan Kepemilikan Hak atas Tanah nomor: Pem. Pem. 593/ 559.a/IV/2016 tanggal 01 April 2016 an. ABDULMANAN SIKING, DKK.
977. 1 (satu) bundel Dokumen an. HENDRIKUS HARDIMAN dalam Map Kertas berwarna Merah, yang terdiri dari:
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Bukti Penyerahan Tanah Adat dari HAJI ISHAKA dan HAKU MUSTAFA kepada HENDRIKUS HADIRMAN, DKK yang terletak di TANAH GENANG UTARA, desa Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Dati II Manggarai tanggal 01 Juli 1993;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan tanggal 06 Agustus 2019;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Kepemilikan Tanah nomor: Pem. 593/1897/IX/2019 tanggal 26 September 2019 an. HENDRIKUS HADIRMAN;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Tidak Dalam Sengketa nomor: Pem. 593/1898/IX/2019 tanggal 26 September 2019 an. HENDRIKUS HADIRMAN;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanah Tidak Dalam Keadaan Sengketa tanggal 26 September 2019 an. HENDRIKUS HADIRMAN;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Belum/Tidak Kena Pajak nomor: Pem. 593/ 1899/ IX/ 2019 tanggal 26 September 2019 an. HENDRIKUS HADIRMAN.
978. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kecamatan Komodo nomor: Pem.021.6/49/1984 tanggal 02 Februari 1984 perihal Kawasan Wae Cicu/Sekitarnya perlu disusulkan, sifat Instruksi;
979. 1 (satu) lembar asli surat BPN Kabupaten Manggarai nomor: 630/974 tanggal 12 Mei 1997 perihal Pengukuran dan Penetapan Batas Tanah Pemda Tk. II Manggarai;
980. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Bukti Penyerahan Tanah dari USMAN POTA kepada LATIF H.A.R tanggal 05 Juli 1989;
981. 1 (satu) bendel asli Surat Keterangan/Penyerahan Tanah Adat dari ISHAKA dan HAKU MUSTAFA kepada SATAR DJUDJE tanpa tanggal dan tahun;
982. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Penyerahan Tanah Adat dari HAJI ISHAKA kepada SITI AISYAH H. ISHAKA tanggal 19 Februari 1994;

Hal 117 dari 281 hal

Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

983. 2 (dua) lembar blanko kosong tanggal 27 November 1990 dan tanpa tanggal tahun 1996;
984. 1 (satu) bundel Berkas Surat Tanah an. ARMAN;
985. 1 (satu) bundel berkas an. Bapak NIKO NAPUT;
986. 1 (satu) jepitan fotocopy Surat Penyerahan Kuasa tanpa nomor tanggal 21 April 1997.
987. 1 (satu) jepitan asli Surat Pernyataan Pelepasan Atas Sebidang Tanah Kering Untuk Menjadi milik seterusnya tanggal 20 Oktober 1988;
988. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan/Penyerahan Tanah Adat antara ISHAKA dan HAKU MUSTAFA kepada KUBA USMAN tanggal 18 Juli 1990;
989. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Penyerahan antara ISHAKA dan HAKU MUSTAFA kepada IGNATIUS TUNUK tanggal 20 Agustus 1990;
990. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Bukti Penyerahan Tanah Adat antara HAJI ISHAKA dan HAKU MUSTAFA kepada SUDI lokasi WAE CICU TIMUR tanpa tanggal, tanpa tahun;
991. 1 (satu) bundel Berkas an. Bapak MUHAMMAD HARIS;
992. 1 (satu) bundel Arsip Jual-Beli Tanah Pariman – ABD. HARIS NASIPIN (Karangan – Wae Cicu);
993. 1 (satu) Buku Agenda Kantor Kelurahan Labuan Bajo;
994. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Penyerahan Tanah Adat lokasi Keranga, kel. Labuan Bajo, Kec. : Komodo, Kab: Manggarai Barat, dari RAMANG ISHAKA dan UMAR ISHAKA kepada YADIN tanggal 20 Desember 2005.
SARIFUDIN MALIK, S.ST, NIP : 19681231 200604 1 195, Umur : 52 tahun, Pekerjaan : Lurah Labuan Bajo
995. 1 (satu) lembar kertas foto yang berisi 8 (delapan) gambar yang berjudul foto penanaman pilar tanah Kerangan tanpa tanggal dan tahun.
996. 3 (tiga) lembar kertas foto yang berisi 24 (dua puluh empat) gambar yang berjudul foto rapat tanah Kerangan tanpa tanggal dan tahun.
997. 1 (satu) lembar tulisan tangan berjudul kronologi pembuatan peta hasil ukur BPN Bulan Mei tahun 2015 yang membuat AMBROSIUS SUKUR tanggal 16 Oktober 2020 dan laporan pelayanan pengukuran dan pemetaan batas bidang tanah degan nama pemohon an Drs. AMBROSIUS SUKUR atas nama Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat seluas 280.472 m2.
998. 1 (satu) Buku asli Berita Acara Serah Terima Dokumen Hasil Klarifikasi P3D antara Pemerintah Kabupaten Manggarai dengan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Nomor : PEM.115/30.a//2005 tanggal 24 Januari 2005
999. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran belanja sertifikasi tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat (Tanah Keraga) yang berlokasi di Kel. Labuan Bajo. Kec. Komod, Kab. Manggarai Barat denngan luas 30 Ha
1000. 3 (tiga) lembar foto kopi permohonan Pegnukuran dan rincian biaya ukur terhadap bidang tanah atas nama Peerintah Kab. Manggarai Barat.
1001. 1 (satu) Lembar Asli Anggaran Pada Saat Pengukuran Tanah PEMDA Tanggal 14 Mei 1997;
1002. 1 (satu) Lembar Asli Anggaran Pembuatan Pilar Bantu Tanah PEMDA Di Labuan Bajo (10 Pilar Ukuran 30x30x70 Cm).Tanggal 28 Oktober 1997;
1003. 1 (satu) Lembar Fotocopy SURAT PERNYATAAN Tanggal 17 Januari 1998 Yang di buat oleh Fungsionaris Adat Nggorang (Haji Ishaka dan

Hal 118 dari 281 hal

Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Haku Mustafa) Terkait Penyerahan Tanah seluas 30 Hektar Terletak di TOROH LEMMA BATU KALLO KEL.LABUAN BAJO;
1004. 1 (satu) Lembar Fotocopy Pernyataan Bersama ahli Waris dan Pelaku Saksi TANAH PEMDA MANGGARAI BARAT DI KERANGAN/TOROH LEMMA BATU KALLO Pada tanggal 03 Mei 2018;
1005. 1 (satu) Album Foto didalamnya berisi 18 (delapan belas) lembar foto.
1006. 2 (dua) lembar asli surat daftar nama-nama yang menerima pembagian tanah adat lokasi sebelah timur bukit wa cicu dan sekitarnya desa labuan bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Tahun 1993 yang telah ditanda tangani oleh Fungsionaris Adat/Tua Adat Ngorang an. H. Ishaka dan an. Haku Mustafa;
1007. 1 (satu) lembar asli surat pernyataan Bersama yang dibuat oleh Haji Ishaka, Haku Mustafa, Donatus Amput (An. Ir. Niko Naput) pada tanggal 06 Mei 1996
1008. 1 (satu) lembar foto kopi surat bukti penyerahan tanah adata dari Hhaji Ishakan dan Hau Mustafa kepada Abdul latif Har tanggal 1 Juli 1993 beserta Foto Kopi KTP atas nama Abdulatif Har.
1009. 1 (satu) lembar Foto kopi sketsa pembagian tanah di Wai Cicu tanpa tanggal dan tahun.
1010. 1 (satu) lembar foto kopi daftar nama-nama yang menerima pembagian tanah adat lokasi Karang, Desa Labuan Bajo, Ke. Komodo, Kab Dati II Manggarai Tahun 1993 tanggal 23 Desember 1993 beserta Peta Daftar Nama-nama yang menerima Pembagian Tanah Adat Lokasi Keranga, Desa Labuan Bajo. Kec. Komodo, Kab. Dati II Manggarai Tahun 1993.
1011. 1 (satu) bundel foto copy map warna kuning, Permohonan Tanah Pemda Manggara Barat;
1012. 1 (satu) bundel foto copy permasalahan tanah Pemda Kab. Manggarai Barat versus Tanah Masyarakat yang terletak di Kelurahan Labuan Bajo, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat (Karangan Toroh Lema Batu Kalo);
1013. 1 (satu) Petunjuk Teknis Inventarisasi Tanah Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2020, Nomor 5/Juknis-600.TP.03.01/XII tanggal 30 Desember 2019;
1014. Register I, Register Sub Bagian Umum Tata Usaha, 15 Mabar;
1015. Surat Law Office Muhammad Achyar and Acociates, Nomor 01/MAA-Permh/III/2019 tanggal 19 Maret 2019 beserta lampiran;
1016. Surat Kuasa Khusus Nomor: MP.02.02/385/53.15/III/2019 Tanggal 12 Maret 2019;
1017. Surat dari Kuasa Pemohon Makarius Paskalis Baut, S.H. tanggal 28 Februari 2019;
1018. Jawaban Termohon dalam Perkara TUN Nomor 1/P/FP/2019/PTUN.KPG antara Amran Aliman selaku Pemohon melawan Kepala BPN Manggarai Barat selaku Termohon;
1019. Putusan PTUN KPG Nomor: 1/P/FP/2019/PTUN-KPG;
1020. Surat Kakanwil BPN Prov. NTT Nomor: 156/6-53/IV/2015 tanggal 20 April 2015 perihal Permohonan Pengukuran dan Rincian Biaya Ukur terhadap Bidang Tanah an. Pemkab Manggarai Barat;
1021. 1 (satu) bundel foto copy Permohonan Hak Tanah an. David Andre Pratama;
1022. 1 (satu) jepitan kronologi masalah tanah di Karang Toroh Lema Batu Kalo, Kel Labuan Bajo, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat;
1023. 1 (satu) lembar Data Bidang Tanah Kepemilikan Sesuai Permohonan Yang Terdaftar di Kantor Pertanahan Manggarai Barat, Lokasi Karang/Toroh Lema Batu Kalo, tanggal 28 Oktober 2019;

Hal 119 dari 281 hal Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1024. 1 (satu) jepitan Progres Data Kegiatan Peningkatan Kualitas Data Pertanahan Mandiri Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat tanggal 21 November 2019;
1025. 1 (satu) buah flash disk warna merah hitam.
1026. 1 (satu) lembar asli surat Nomor : 291/53.15/300-6/III/2015 tanggal 25 Maret 2015 Perihal Permohonan Pengukuran dan Rincian Biaya dalam rangka Proses Pensertifikatan Tanah Pemerintah Kabupaten manggarai Barat seluas 30 ha beserta 1 lembar Disposisi Surat Masuk Nomor Anggenda : 200/65-I tanggal 1 April 2015
1027. 1 (satu) lembar Asli Peta Bidang Tanah No. 02/24.20/PBT/P3B2T/2015 Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kaupaten Manggarai Barat, dengan luasan 280.472 m² Yang di tandagangani oleh A. RESDIYANA NDAPAMERANG, B.Sc, SH selaku Kepala Bidang Survey Pengukuran dan Pemetaan An. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi NTT tanggal 26 Mei 2015.
1028. 1 (satu) Map warna hijau Pengukuran dan Pemetaan batas Bidang Tanah An. Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2015 berisikan :
- 1) 1 (satu) CD Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan Batas Bidang Tanah Tahun Anggaran 2015 Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat
 - 2) 19 (sembilan belas) Gambar Ukur Nomor : 2/Tahun 2015 Pemohon atas nama Pemkab Manggrai Barat Drs. AMBROSIUS SUKUR tanggal 19 - 25 Mei 2015
 - 3) 1 (satu) jepitan Peta (berisi 4 lembar peta) Tanah Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Lokasi kerangka Kelurahan Labuan bajo, Kecamatan Komodo luas 31,84 ha terdiri dari :
 - Lahan Pemda : 29,17 ha
 - Lahan milik : 2,67 ha
 - 4) 1 (satu) jepitan Surat Bupati Manggarai Barat Nomor : Pem.131/137/V/2015 tanggal 13 Mei 2015 perihal penjelasan Tentang Tanah Pemda yang ditandatangani oleh DRS. AGUSTINUS CH. DULA selaku Bupati Manggarai Barat yang ditujukan kepada Sdr. Haji Muhammad Abubakar Adam Djudje.
 - 5) Asli Surat nomor : 15/SPP-01/V/2015 tanggal 25 Mei 2015 perihal Laporan Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan Batas Bidang Tanah An. Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat yang dibuat dan ditandatangani oleh Petugas ukur An Baliyo Muryono, ST.MT dan Sutardi yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi NTT beserta lampiran .
 - 6) 1 (satu) jepitan fotokopi Gambar Ukur Nomor : 634, 635/2013 tanggal 11 Novmber 2013 Pemohon atas nama :
 - SUKRI
 - SUPARDI TAHIYA
 - SUAIB TAHIYA
 - 7) 1 (satu) lembar Asli Surat Pemberitahuan pelaksanaan Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan Batas Bidang Tanah An. Pemerintah Kabupaten manggarai Barat Nomor : 190/4-53.200/V/2015 tanggal 13 Mei 2015 yang ditandatangani oleh A. RESDIYANA NDAPAMERANG, B.Sc, SH selaku Kepala Bidang Survey Pengukuran dan Pemetaan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi NTT ;
 - 8) 1 (satu) lembar asli Surat SPPD Tugas Nomor : 65/TU/V/2015 tanggal 4 Mei 2015 Kepada SUTARDI dan Surat Tugas Nomor : 64/TU/V/2015 tanggal 4 Mei 2015 kepada BALIYO MURYONO, ST.MT untuk

Hal 120 dari 281 hal Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan pelayanan pengukuran Pengukuran dan Pemetaan Batas Bidang Tanah An. Pemerintah Kabupaten manggarai Barat yang berlokasi di Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, kabupaten Manggarai Barat beserta informasi tanggal 04 Mei 2015.

- 9) 1 (satu) lembar asli surat Nomor : 156/6-53/IV/2015 tanggal 20 April 2015 Perihal Permohonan Pengukuran dan Rincian Biaya ukur terhadap Bidang tanah Tanah An. Pemerintah Kabupaten manggarai Barat.
1029. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Bupati Manggarai Barat, Drs. Agustinus CH Dula tanggal 10 November 2020;
1030. 2 (dua) lembar Peta Pembagian Tanah di Lokasi Gusongea dan Torositangga Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
1031. 1 (satu) bundel asli Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah tanggal 31 Desember 2012, dengan total asset tanah sebesar 106.484.377.000,- (seratus enam milyar empat ratus delapan puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
1032. 2 (tiga) bundel asli Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah tanggal 31 Desember 2014, dengan total asset tanah sebesar Rp 77.507.405.000,- (tujuh puluh tujuh milyar lima ratus tujuh juta empat ratus lima ribu rupiah).
1033. 1 (satu) bendel Surat Keterangan No: 900/BPKD/1969/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020;
1034. 1 (satu) bendel Surat Keterangan No: 900/BPKD/1968/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020;
1035. 1 (satu) lembar Asli Kartu Disposisi tanggal 21 Januari 2012 perihal Surat Pengantar Laporan Daftar Barang Inventaris pada bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda KMB TA. 2012 dari Kepala Bagian Adm. Pemerintahan Umum Setda KMB dan 1 (satu) bundel Daftar Inventaris Barang Milik Daerah Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat tahun 2012;
1036. 1 (satu) bundel asli Daftar Inventaris Barang Milik Daerah Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat tahun 2012 bercoverkan Mika Hijau;
1037. 1 (satu) bundel odner asli Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Lampiran Daftar Aset Daerah Sekretariat Daerah Pendataan dan Penilaian Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat TA. 2007.
1038. 1 (satu) jepitan fotocopy Surat Keterangan No: 900/BPKD/1969/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020, yang berisi:
- a. 1 (satu) lembar informasi data pembayarn, nomor obyek pajak: 53.16.010.030.003-0403.0, luas bumi 40.000 m2, alamat obyek pajak : Toh Lemma Batu Kalo dengan nama wajib pajak MUH. A. ADAM DJUDJE tanggal 26 Oktober 2020 sebesar Rp 49.462.400,- (empat puluh Sembilan
 - b. 1 (satu) lembar informasi data pembayaran, nomor obyek pajak: 53.16.010.030.001-0302.0, luas bumi 28.310 m2, alamat obyek pajak : Karang dengan nama wajib pajak PAULUS GRANS NAPUT tanggal 26 Oktober 2020, sebesar Rp 51.659.181,- (lima puluh satu juta enam ratus lima puluh Sembilan ribu seratus delapan puluh satu rupiah);
 - c. 1 (satu) lembar informasi data pembayaran, nomor obyek pajak: 53.16.010.030.001-0299.0, luas bumi 39.380 m2, alamat obyek pajak : Karang dengan nama wajib pajak NIKOLAUS NAPUT tanggal 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Oktober 2020, sebesar Rp 71.859.363,- (tujuh puluh satu juta delapan ratus lima puluh Sembilan ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah);
- d. 1 (satu) lembar informasi data pembayaran, nomor obyek pajak: 53.16.010.030.001-0300.0, luas bumi 27.720 m2, alamat obyek pajak : Karanganyar dengan nama wajib pajak MARIA FATMAWATI NAPUT tanggal 26 Oktober 2020, sebesar Rp 50.582.568,- (lima puluh juta lima ratus delapan puluh dua ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah);
- e. 1 (satu) lembar informasi data pembayaran, nomor obyek pajak: 53.16.010.030.001-0301.0, luas bumi 28.230 m2, alamat obyek pajak : Karanganyar dengan nama wajib pajak IRENE ELISA WINARTHY NAPUT tanggal 26 Oktober 2020, sebesar Rp 51.513.200,- (lima puluh satu juta lima ratus tiga belas ribu dua ratus rupiah);
- f. 1 (satu) lembar informasi data pembayaran, nomor obyek pajak: 53.16.010.030.003-0399.0, luas bumi 8.447 m2, alamat obyek pajak : Karanganyar dengan nama wajib pajak RUDYANTO SULIAWAN tanggal 26 Oktober 2020, sebesar Rp 11.376.284,- (sebelas juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah);
- g. 1 (satu) lembar informasi data pembayaran, nomor obyek pajak: 53.16.010.030.001-0303.0, luas bumi 28.220 m2, alamat obyek pajak : Karanganyar dengan nama wajib pajak JOHANES VANS NAPUT tanggal 26 Oktober 2020, sebesar Rp 51.494.952,- (lima puluh satu juta empat ratus Sembilan puluh empat ribu Sembilan ratus lima puluh dua rupiah).
1039. Satu (1) jilidan berkas tanda terima penyerahan (301 A) tahun 2017 Buku III, tanggal penyerahan mulai dari tanggal 11-04-2017 sampai tanggal 16-06-2017.
1040. Satu (1) jilidan berkas tanda terima penyerahan (301 A) tahun 2017 Buku II, tanggal penyerahan mulai dari tanggal 13-02-2017 sampai tanggal 11-04-2017.
1041. Satu (1) jilidan berkas tanda terima penyerahan (301 A) tahun 2017, tanggal penyerahan mulai dari tanggal 05-01-2017 sampai tanggal 10-02-2017.
1042. Satu (1) jilidan berkas tanda terima penyerahan (301 A) tahun 2017 s/d 2018, tanggal penyerahan mulai dari tanggal 04-10-2017 sampai tanggal 29-12-2017.
1043. Satu (1) jilidan berkas tanda terima penyerahan (301 A) tahun 2014, tanggal penyerahan mulai dari tanggal 17-04-2014 sampai tanggal 08-08-2014.
1044. Satu (1) jilidan berkas tanda terima penyerahan (301 A) tahun 2013, tanggal penyerahan mulai dari tanggal 24-10-2013 sampai tanggal 24-04-2014.
1045. Satu (1) jilidan berkas tanda terima penyerahan (301 A) tahun 2015, tanggal penyerahan mulai dari tanggal 03-02-2015 sampai tanggal 21-03-2016, 1-10-2016.
1046. Satu (1) jilidan berkas tanda terima penyerahan (301 A) tahun 2014 s/d 2015, tanggal penyerahan mulai dari tanggal 11-11-2014 sampai tanggal 02-03-2015.
1047. Satu (1) jilidan berkas tanda terima penyerahan (301 A) tahun 2016 Buku II, tanggal penyerahan mulai dari tanggal 21-03-2016 sampai tanggal 02-08-2016.

Hal 122 dari 281 hal

Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1048. Satu (1) jilidan berkas tanda terima penyerahan (301 A) tahun 2016 buku 3, tanggal penyerahan mulai dari tanggal 02-08-2016 sampai tanggal 28-11-2016.
1049. Satu (1) jilidan berkas tanda terima penyerahan (301 A) tahun 2017 buku IV, tanggal penyerahan mulai dari tanggal 16-06-2017 sampai tanggal 04-10-2017.
1050. Satu (1) jilidan berkas tanda terima penyerahan (301 A), tanggal penyerahan mulai dari tanggal 11-12-2009 sampai tanggal 23-10-2013.
1051. Satu Lembar Peta Situasi, terdiri dari satu bidang tanah Pemda dan 6 (enam) bidang tanah perorangan.
1052. Satu Jilidan Permohonan Pengakuan / Penegasan Hak atas Tanah Luas 4 Ha di Toroh Lemma Batu Kallo An. Haji Moh. Adam Djudje, Labuan Bajo 30-05-2015.
1053. Satu Jepitan surat Masuk Nomor 030/MAA-Sgghn/V/2018, tanggal 07 Mei 2018 dari Law Office, Muhamad Achyar dan Associates Advocades dan Legal Consultants Perihal Sanggahan/Keberatan.
1054. Satu Jepitan surat Masuk Nomor 030/MAA-Som/XI/2018, tanggal 30 November 2018 dari Muhamad Achyar dan Associates Advocades dan Legal Consultants Perihal Peringatan (Somasi).
1055. Satu jilidan Klarifikasi Tanah Muh.A. Adam Djudje (Haji Adam Djudje) di Lokasi Toroh Lemma Batu Kallo luas \pm 30 HA, Sebagian Luas \pm 7 HA diklaim oleh Ente Puasa, dkk.
1056. 1 (satu) lembar asli perhitungan luas koordinat lokasi tanah pemda di Kerangan Desa/Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo
1057. 1 (satu) buku agenda kerja dari Bapak Tagur Albertus
1058. 1 (satu) jepitan Hasil Ploting bidang tanah lokasi Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat.
1059. 1 (satu) lembar fotocopy Peta Bidang Tanah no. 02/24.20/PBT/P3B2T/2015 tanggal 26 Mei 2015, luas tanah 280.472 m2, yang di tanda tangani oleh A. RESDYANA NDAPAMERANG, B.Sc. SH;
1060. 1 (satu) lembar fotocopy Peta Bidang Tanah no. 02/24.20/PBT/P3B2T/2015 tanggal 26 Mei 2015, luas tanah 242.212 m2, yang di tanda tangani oleh A. RESDYANA NDAPAMERANG, B.Sc. SH;
1061. 2 (dua) lembar fotocopy Peta Dasar Pendaftaran no. 02/24.20/PDP/P3B2T/2015 tanggal 26 Juni 2015, luas tanah 242.212 m2, yang ditanda tangani oleh A. RESDYANA NDAPAMERANG, B.Sc. SH;
1062. 2 (dua) lembar fotocopy Peta Pendaftaran no. 02/24.20/PP/P3B2T/2015 tanggal 29 Juni 2015, luas tanah 242.212 m2, yang ditanda tangani oleh A. RESDYANA NDAPAMERANG, B.Sc. SH dan Peta Situasi.
1063. 1 (satu) asli Buku Tabungan BRI Britama, dengan nomor rekening: 0039-01-083846-50-7 atas nama CH MUDASIH, S ST yang beralamat di RT. 020 RW. 006, Kel. Naikolan, Kec. Maulafa Kota Kupang;
1064. 8 (delapan) lembar print out rekening koran Tabungan BRI Britama, dengan nomor rekening: 0039-01-083846-50-7 atas nama CH MUDASIH, S ST yang beralamat di RT. 020 RW. 006, Kel. Naikolan, Kec. Maulafa Kota Kupang;
1065. 1 (satu) asli Buku Tabungan BRI Simpedes, dengan nomor rekening: 0039-01-015944-53-3 atas nama CH MUDASIH, S ST yang beralamat di Jl. Komodo No. 33 RT. 011 RW. 003, Kel. Air Nona
1066. 3 (tiga) lembar print out rekening koran Tabungan BRI Simpedes, dengan nomor rekening: 0039-01-015944-53-3 atas nama CH MUDASIH, S ST yang beralamat di Jl. Komodo No. 33 RT. 011 RW. 003, Kel. Air Nona.

Hal 123 dari 281 hal Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1067. 1 (satu) bendel asli Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat nomot: 15/KEP/53.15/100-1/I/2016 tentang Pengangkatan Satuan Pengamanan (Satpam), Sopir, Cleaning Service, Pesuruh, dan Pramubakti pada Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2016 tanggal 05 Januari 2016;
1068. 1 (satu) bendel asli Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat Nomor: 17/KEP/53.15/100-1/I/2017 tentang Pengangkatan Tenaga Pramubakti pada Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat tahun anggaran 2017 tanggal 09 Januari 2017;
1069. 1 (satu) bendel asli Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat Nomor: 51/SK-53.15.UP.02.03/VII/2019 tentang Pemberhentian Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat tahun 2019 tanggal 05 Juli 2019;
1070. 1 (satu) bendel asli Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) pada Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat tahun 2019 nomor: 20/SK-53.15.KP.02.03/I/2019 tanggal 24 Januari 2019;
1071. 1 (satu) jepitan asli Kwitansi Pembayaran yang bermaterai Rp 6000,-, yang telah terima dari MATHEUS SANIANG NAGA SIAGIAN sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk pembayaran kelebihan luas bidang tanah seluas 2.750 m2 yang terletak di Karang Timur Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kab. Manggarai Barat tanggal 04 April 2016;
1072. 1 (satu) jepitan asli Kwitansi Pembayaran untuk pembayaran DP Tanda Jadi Tanah dengan harga jual lima puluh juta rupiah di lokasi bandara lama desa batu cermin, kecamatan Komodo, kab. Manggarai Barat dengan ukuran 15x35, seluas 525 m2 dengan batas-batas sebagai berikut: Utara : H. Jafar, Barat: Jalan, Timur: N. Jepo, Selatan: Laane sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Bayu S. dan disaksikan oleh Agus Wanto tanggal 21 Mei 2017;
1073. 1 (satu) bendel Rekening Koran Tabungan BRI Britama dengan nomor rekening : 1112-01-010523-50-3 atas nama SIRATURRAHMI alamat Langka Kabe RT. 004 RW. 002, Kel. Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, dari tanggal 07 September 2015 sampai dengan 22 Desember 2018;
1074. 1 (satu) bendel Rekening Koran Tabungan BRI Britama dengan nomor rekening : 1112-01-008570-50-6 atas nama SIRATURRAHMI alamat Langka Kabe RT. 004 RW. 002, Kel. Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, dari tanggal 03 Desember 2013 sampai dengan 30 Desember 2018;
1075. 1 (satu) bendel Rekening Koran Tabungan BNI Taplus dengan nomor rekening : 0457094557 atas nama SIRATURRAHMI alamat Langka Kabe RT. 004 RW. 002, Kel. Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, dari tanggal 03 Agustus 2016 sampai dengan 10 November 2020;
1076. 1 (satu) buah Laptop berwarna hitam beserta charger merk Lenovo G40-45
1077. 1 (satu) buah notebook berwarna coklat tulisan Bank BRI milik SIRATURRAHMI.
1078. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Bukti Penyerahan Hak Tanah Adat antara ISAHAKA dan HAKU MUSTAFA kepada H. ADAM DJUDJE tanggal 10 April 1990;
1079. 1 (satu) lembar peta yang diambil dari Google Maps (tanah karangan);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1080. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pembatalan Pembagian Tanah Adat di Lokasi Karangang (di dalam lokasi Ir. NIKO NAPUT) th. 1993 tanggal 06 Mei 1990;
1081. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Bersama (Haji Ishaka, Haku Mustafa, Donatus Amput (an. Ir. Niko Naput)) tanggal 06 Mei 1996;
1082. 1 (satu) lembar Surat dari Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat nomor: IP.02.03/1637.53.15/IX/2020 tanggal 22 September 2020;
1083. 1 (satu) jepitan Surat dari HAJI MUH. ABUBAKAR ADAM DJUDJE nomor: 01/HAD/X/2020 tanggal 05 Oktober 2020 kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Kab. Manggarai Barat;
1084. 1 (satu) lembar asli Gambar Lokasi Toroh Batu Kallo dan Karanga yang diserahkan Fungsionaris Adat/Tua Adat Kepada Pemda tanggal 26 April 1997;
1085. 1 (satu) amplop berwarna coklat yang bertuliskan "segel th 80 5 lembar harga Rp 75.000," yang berisikan 5 (lima) lembar segel;
1086. 1 (satu) amplop berwarna coklat yang bertuliskan "segel thn 81 5 lembar harga Rp. 1.500, jumlah Rp 7.500," yang berisikan 5 (lima) lembar segel;
1087. 1 (satu) amplop berwarna coklat yang bertuliskan "segel 1982 10 lbr : Rp 150.000," yang berisikan 10 (sepuluh) lembar segel;
1088. 1 (satu) amplop berwarna coklat yang bertuliskan "segel 1983 10 : Rp 150.000," yang berisikan 10 (sepuluh) lembar segel;
1089. 1 (satu) amplop berwarna coklat yang bertuliskan "segel thn 89 5 lembar harga Rp 75.000" yang berisikan 5 (lima) lembar segel;
1090. 1 (satu) amplop berwarna coklat yang bertuliskan "segel 90 Thn 90 10 lembar harga Rp 150.000" yang berisikan 6 (enam) lembar segel;
1091. 1 (satu) amplop berwarna coklat yang bertuliskan "segel thn 1993 15 lembar harga Rp 225.000" yang berisikan 9 (Sembilan) lembar segel tahun 1993, 1 (satu) lembar segel tahun 2002 dan 1 (satu) lembar kertas putih (buram);
1092. 1 (satu) bendel Daftar Penerima Pembagian Tanah Adat Lengkong Gusoh Ngea dan Toro Sitangga Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Propinsi NTT;
1093. 1 (satu) jepitan yang berisi 4 (empat) lembar peta lokasi dan ukuran;
1094. 1 (satu) lembar fotocopy surat nomor: Pem.051.9/630/XII/1994 tanggal 05 Desember 1994;
1095. 1 (satu) jepitan fotocopy Surat Kesepakatan tanggal 20 Agustus 2014 ;
1096. 2 (dua) lembar asli Daftar Nama-Nama Anggota yang tidak dipindahkan/tetap dalam lokasi Karangang sesuai kesepakatan antara Bapak Haji Ishaka – Bapak Haku Mustafa Bapak Donatus Amput mengatasnamakan Ir. Nikolaus Naput tanggal 06 Mei 1996;
1097. 1 (satu) jepitan Daftar yang menerima pembagian tanah adat di lokasi sebelah timur wae cicu dan karangan dan sekitarnya desa Labuan bajo kecamatan komodo kabupaten mamggarai tahun 1993;
1098. 1 (satu) lembar asli Gambar Lokasi Toroh Batu Kallo dan Karanga yang diserahkan Fungsionaris Adat/Tua Adat tanggal 26 April 1997;
1099. 1 (satu) jepitan fotocopy Surat Bukti Penyerahan Hak Tanah Adat dari ISHAKA dan HAKU MUSTAFA kepada Hj. ADAM DJUDJE tanggal 10 April 1990;
1100. 1 (satu) map berwarna oranye yang bertuliskan Surat Kuasa Haji Sukri dan Haji Mustajib;
1101. 1 (satu) jepitan surat kuasa, Ir. Nikolaus Naput menyerahkan kuasa kepada Donatus Amput pada tanggal 03 Mei 1996 disaksikan Benyamin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahan mengetahui Sekretaris Desa Haji Adam Djudje yang belum ditanda tangani berjumlah 4 (empat) lembar;

1102. 1 (satu) lembar asli surat kuasa haji Muhammad abubakar adam djudje kepada sarjono bin sardi, SP untuk mencari pihak ketiga atau pembeli menawarkan jual beli tanah seluas ± 30 Ha yang berlokasi di Toroh Lemma Kallo, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kab. Manggarai Barat tanggal 18 Oktober 2014 dengan saksi ZULKARNAIN DJUDJE, Mappiana djudje, Sarifudin Djudje, Suharni Djudje, Zuhaidin Djudje, Sasli Rais Djudje, Abdul Rifai Djudje, herawati Djudje, Fiqran Aziz Djudje, yang telah ditanda tangani selain Zulkarnain Djudje;
1103. 1 (satu) jepitan asli surat pernyataan kesepakatan Haji Moh. A. Adam Djudje kepada Donatus Endo bahwa pihak pertama sebagai pemilik tanah di Toroh Lemma Kallo dasar penyerahan adat tanggal 10 April 1990 luas ± 30 Ha dijual luas 20 Ha tanggal 12 Februari 2015;
1104. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir dan 1 (satu) lembar fotocopy gambar kasar situasi tanah pembagian adat lokasi karanga desa labuan bajo kecamatan Komodo pada tanggal 02 Juni 1992 penata Kamis Hamnu penggambar Haji Adam Djudje diketahui Kepala Desa Labuan Bajo an. Haji Adam Djudje;
1105. 2 (dua) jepitan asli penyerahan adat kepada Paulus Panis pada tanggal 27 Juli 1990;
1106. 1 (satu) lembar asli berita acara pembagian tanah adat lokasi Golo Binongko Desa Labuan Bajo Kec. Komodo, Kab. Mabar, pada hari Senin tanggal 28 September 1992 yang belum ditanda tangani;
1107. 1 (satu) jepit fotocopy catatan yang dibutuhkan kwitansi pembayaran yang diselesaikan oleh Palirio (Italia) sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
1108. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Penyerahan Tanah Adat kepada Haji Adam Djudje tanggal 27 Juli 1990 lokasi Tanah Genang Desa Labuan bajo Kecamatan Komodo Daerah tingkat II Manggarai luas 20x50 m²;
1109. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Penyerahan Tanah Adat kepada Zulkarnain Djudje tanggal 23 Maret 1990 lokasi Loho Binongko Desa Labuan Bajo Kec Komodo Daerah Tingkat II Manggarai luas 115 x 15 m²;
1110. 1 (satu) copy kwitansi uang ganti rugi tanah komunal/adat yang diterima tanah lokasi keranga kelurahan labuan bajo kecamatan Komodo kabupaten daerah tingkat II manggarai pada tanggal 14 Mei 1997 dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II Manggarai yang menerima Haji Ishaka dan Haku Mustafa disaksikan Drs. Yos Vin Ndahur dan Yosef Latief diketahui J. Oematan BA;
1111. 1 (satu) lembar Surat Bukti Penyerahan Tanah Adat kepada Haji Adam Djudje tanggal 01 Juli 1993 lokasi sebelah timur keranga desa labuan bajo kecamatan Komodo kabupaten dati II Manggarai dengan luas 40x60 m²;
1112. 1 (satu) jepitan Riwayat Pekerjaan Haji Adam Djudje (Haji MA. Adam Djudje sejak tahun 1954 sampai dengan sekarang tahun, berjumlah 8 (delapan) lembar;
1113. 1 (satu) bendel daftar pembagian kapling tanah Gusoh Ngea dan Toroh Sitangga Kelurahan Labuan Bajo Kecamatan Komodo Kab. Mabar tanggal 01 Desember 2015;
1114. 1 (satu) jepit data kepemilikan tanah donatus amput sejumlah 3 (tiga) lembar;

Hal 126 dari 281 hal

Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1115. 1 (satu) bendel klarifikasi/pemilikan atas tanah adat di lokasi Toroh Lemma Batu Kallo oleh Haji Adam Djudje (Haji Muhammad Abubakar Adam Djudje), Ir. Nikolaus Naput an. Yayasan Pembangunan Sosial Manggarai dan Pemda Tingkat II Manggarai terletak di Kelurahan Labuan Bajo, Kec. Komodo, Kab. Mabar tanggal 30 April 2014;
1116. 1 (satu) map Lampiran Berita Acara Pembagian Tanah Adat di Lokasi Gusoh Ngea Kelurahan Labuan Bajo Kec. Komodo tanggal 15 Mei 1997, yang menata/membagi H. Adam Djudje, diketahui/disyahkan oleh Fungsionaris Adat/Tua Adat Nggorang Haji Ishaka dan Haku Mustafa diketahui Kepala Kelurahan Labuan Bajo Yoseph Latip;
1117. 1 (satu) lembar fotocopy Peta Lokasi yang telah di tipex tanggal 26 April 1997;
1118. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas sebidang tanah yang belum diisi batas-batasnya tanggal 02 November 1988 kepada Pemerintah Desa Labuan Bajo;
1119. 1 (satu) lembar asli Pengukuran Jalan Setapak dan tanah/batas tanah sekolah SDN 1 Labuan Bajo 1, tanggal 27 April 1997;
1120. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah Adat tanggal 21 Juli 1977 dari Haku Mustafa kepada Haji Djudje seluas ± 1 Ha letak Labuan Bajo, Desa Labuan Bajo, Kec. Komodo, Kab. Manggarai;
1121. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan an. Drs. YATUNG DJAFAR tanpa tanggal dan tahun;
1122. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Bukti Penyerahan Tanah Adat antara ISHAKA dan HAKU MUSTAFA kepada STANIS VILIS SUMARDI lokasi Lengkong Bune, Desa Labuan Bajo, Kec. Komodo, Kab. Daerah Tingkat II Manggarai, luas tanah ± 3.250 m² tanggal 27 Juli 1990;
1123. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Jual Beli atas sebidang tanah kering terletak di Desa Labuan Bajo tanggal 24 Oktober 1988;
1124. 1 (satu) jepitan Daftar Nama Nama Calon Pemilik Tanah yang mendapat Pembagian Tanah Adat dari Fungsionaris Adat/Tua Adat Nggorang di Lokasi Gusoh Ngea, Kelurahan Labuan Bajo, Kec. Komodo, pada tanggal 15 Mei 1997 dan telah ditata Kembali, setelah mengalami perubahan batas tanah bagian timur dari lokasi tersebut dengan pemilik tanah G. Tahija pada tahun 2001, tanggal 23 Maret 2002;
1125. 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1990 atas nama H. Adam Juje sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah), tanggal 01 Maret 1990;
1126. 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1990 atas nama H. Adam Juje sebesar Rp 1.349,- (seribu tiga ratus empat puluh Sembilan rupiah) tanggal 01 Maret 1990;
1127. 1 (satu) jepitan asli Surat Pernyataan atas nama PETRUS TAGUS tanggal 24 Oktober 2014;
1128. 1 (satu) jepitan fotocopy Surat Keterangan atas nama DONATUS ENDO tanggal 05 April 2014;
1129. 1 (satu) jepitan fotocopy Surat Bukti Penyerahan Tanah Adat dari HAJI ISHAKA dan HAKU MUSTAFA kepada TASWING BAKKAR TALAH, lokasi Wae Cicu Timur, Ds. Labuan Bajo, Kec. Komodo, Kab. Daerah Tingkat II Manggarai dengan luas 20x70, tanpa tanggal dan tahun;
1130. 8 (delapan) lembar fotocopy Surat Bukti Penyerahan Hak Tanah Adat antas ISHAKA dan HAKU MUSTAFA kepada H. Adam Djudje, lokasi Toh Lemma Batu Kallo, Ds. Labuan Bajo, Kec. Komodo, Kab. Dati II Manggarai seluas ± 30 Ha, tanggal 10 April 1990;

Hal 127 dari 281 hal Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1131. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kuasa dari Hj. Fatima bin Amina kepada Blasius Janu, tanpa tanggal dan tahun;
1132. 1 (satu) lembar fotocopy peta skala 1 :2500 yang bertuliskan "Tanah Pemda Kab. Mabar", Dahering Koro, Salawing;
1133. 1 (satu) lembar fotocopy peta dengan tulisan "VS H. M. A. Djudje";
1134. 1 (satu) lembar Surat dari Haji Muh. A. Adam Djudje perihal : pencabutan Kembali surat keberatan tertanggal 10 juli 2014 prihal mohon pembatalan proses pensertifikatan Tanah di Lokasi Karang/Toh Lemma Batu Kallo, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kab. Manggarai Barat yang diajukan oleh sdr. Ente Puasa, DKK tanggal 13 Oktober 2014;
1135. 1 (satu) jepitan fotocopy Surat Kontrak antara MUHAMAD ABU BAKAR ADAM DJUDJE dengan ALI ANTONIUS, SH., MH. Tanggal 18 Juli 2014;
1136. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan atas nama HAJI MOH. A. ADAM DJUDJE tanggal 30 Maret 2015;
1137. 1 (satu) jepitan Surat Pernyataan atas nama HAJI MUHAMMAD ABUBAKAR ADAM DJUDJE tanggal 19 Maret 2018 tidak ditandatangani
1138. 1 (satu) lembar peta/sket tanah yang sebenarnya tanpa skla yang bertuliskan Tanah Milik Sasli Djudje, yang dibuat oleh Haji M. A. Adam Djudje tanpa tanggal dan tahun;
1139. 1 (satu) jepitan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah atas nama HAJI ISHAKA dan HAKU MUSTAFA kepada Drs. G. P. EHOK, tanpa tanggal dan tahun;
1140. 1 (satu) amplop berwarna putih yang bertuliskan "Matrei th 19 harga yg 500 RP 200.000" sejumlah 44 (empat puluh empat);
1141. 1 (satu) amplop berwarna putih yang bertuliskan "Matrei th 90 s.d 95, harga yang 1000 = Rp 7500 harga yang 500 Rp 5.500. yang 1000 10 lembar 275.000, yang 500 50 lembar;
1142. 1 (satu) buah agenda personal milik H. MA Adam Djudje;
1143. 1 (satu) buah agenda personal milik Adam Djudje;
1144. 1 (satu) buah agenda personal milik Adam Djudje;
1145. 2 (dua) lembar Peta Penataan Ulang Tanah lokasi Gusongea dan Torositangga, kelurahan Labuan Bajo, Kec, Komodo, Kab. Mabar, skala 1 : 1000, tanggal 01 Februari 2017;
1146. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Penyerahan Kuasa tanggal 21 April 1997 yang ditandatangani oleh Ketua Fungsionaris Adat/Tua Adat Nggorang, H. ISHAKA;
1147. 1 (satu) lembar Peta Gambar Kasar Tanah Adat yang diserahkan kepada Ir. Niko Naput, Masyarakat dan Pemda. Lokasi: Karangang – toroh batu kallo, toroh lemma dan wae cicu yang ditandatangani oleh Fungsionaris Adat Nggorang, H. Ishaka dan yang gambar, H. Adam Djudje tanggal 01 Januari 1998;
1148. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Situasi Tanah Persekutuan Adat Nggorang Lokasi Golo Karangang yang ditata oleh Sdr. A. Kamis Hamnu dibawah pengawasan H. Adam Djudje tanggal 17 Mei 1997;
1149. 1 (satu) buah mesin ketik merk OLYMPIA dengan label HY. GRADE Typewriter & Stationery Co. 78 south street phone JE 9-2868 Morristown, N. J., L. F. Wescott, W. J. Zilka;
1150. 1 (satu) buah pita mesin listrik merk CANON ES 3 – II;
1151. 1 (satu) buah mesin tik merk COMPANION;
1152. 1 (satu) buah mesin tik merk OLIVETTI;
1153. 1 (satu) buah mesin tik merk DAITO;
1154. 1 (satu) buah mesin tik tanpa merk yang bertuliskan HIL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1155. 2 (dua) lembar Asli Surat Bukti Penyerahan Tanah Adat dari Ishaka dan Haku Mustafa selaku Fungsionaris Adat yang membagi dan menyerahkan tanah adat kepada Nicolaus Naput selaku wakil dari Yayasan Pembangunan Sosial Manggarai, tanggal 21 Oktober 1991
1156. 1 (satu) lembar kuitansi uang tanda pengakuan hak adat atas tanah adat yang terletak di Lokasi Toroh Lema Desa Labuan Bajo, yang diserahkan oleh Fungsionaris Adat/Dalu Nggorang/Bapak Ishaka dan Haku Mustafa dengan batas-batas sesuai dengan Isi Berita Acara Penyerahan Tanah Adat tertanggal 21 Oktober 1991 bertempat di Labuan Bajo dari Nicolaus Naput, terbilang Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang menerima Bapak Ishaka-Dalu Nggorang, dan Bapak Haku Mustafa-Wakil Dalu.
1157. 1 (satu) lembar asli Laporan Kehilangan Barang Nomor: LKB/018/I/2017/NTT Res Mabar tanggal 11 Januari 2017;
1158. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan atas nama Haji Muhamad Abubakar Adam Djudje tanggal 05 Januari 2016;
1159. 1 (satu) jepitan asli yang berisi Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan 4624/2016 atas nama pemohon FATIMA BADOSALAM tanggal 16 Agustus 2016 dan Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan 4624/2016 atas nama pemohon FATIMA BADO SALAM tanggal 16 Agustus 2016
1160. 1 (satu) lembar asli Buku Tabungan Mandiri, dengan nomor rekening: 161-00-0330445-3, atas nama SUPARDI TAHIYA yang beralamat di Kampung Ujung, RT. 002, RW. 001, Kel. Labuan Bajo, Komodo
1161. 1 (satu) asli Buku Tabungan BNI Taplus dengan nomor rekening: 0354395948 atas nama Bpk. Alfandri
1162. 1(satu) bendel Rekening Koran BNI Taplus dengan nomor rekening: 0354395948 atas nama Bpk. ALFANDRI, periode 06 Oktober 2014 sampai dengan 05 November 2020
1163. 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama FRANSISKUS SUBUR yang terletak di Karanga RT/RW Labuan Bajo, Komodo, Manggarai Barat tanggal jatuh tempo 30 Desember 2017 sebesar Rp 219.840,- (dua ratus Sembilan belas ribu delapan ratus empat puluh rupiah);
1164. 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Terima Setoran atas nama FRANSISKUS SUBUR, letak obyek pajak kecamatan Komodo, Desa/Kel Labuan Bajo, no SPPT (NOP): 531601003000103560 sebesar Rp 219.840,- (dua ratus Sembilan belas ribu delapan ratus empat puluh rupiah);
1165. 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama FRANSISKUS SUBUR yang terletak di Karanga RT/RW Labuan Bajo, Komodo, Manggarai Barat tanggal jatuh tempo 30 Desember 2017 sebesar Rp 204.160,- (dua ratus empat ribu seratus enam puluh);
1166. 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Terima Setoran atas nama FRANSISKUS SUBUR, letak obyek pajak kecamatan Komodo, Desa/Kel Labuan Bajo, no SPPT (NOP): 531601003000103570 sebesar Rp 204.160,- (dua ratus empat ribu seratus enam puluh);
1167. 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama ABDUL HARIS yang terletak di Karanga RT/RW Labuan Bajo, Komodo, Manggarai Barat tanggal jatuh tempo 30 Desember 2017 sebesar Rp 95.680,- (Sembilan puluh lima ribu enam ratus delapan puluh);

Hal 129 dari 281 hal

Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1168. 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Terima Setoran atas nama ABDUL HARIS, letak obyek pajak kecamatan Komodo, Desa/Kel Labuan Bajo, no SPPT (NOP): 531601003000103610 sebesar sebesar Rp 95.680,- (Sembilan puluh lima ribu enam ratus delapan puluh);
1169. 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama MATHEUS SANIANG NAGA yang terletak di Link. III RT/RW Labuan Bajo, Manggarai Barat tanggal jatuh tempo 31 Desember 2018 sebesar Rp 299.187,- (dua ratus Sembilan puluh Sembilan ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah);
1170. 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama MATHEUS SANIANG NAGA yang terletak di Link. III RT/RW Labuan Bajo, Manggarai Barat tanggal jatuh tempo 31 Desember 2018 sebesar Rp 187.827,- (seratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah);
1171. 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama MATHEUS SANIANG NAGA yang terletak di Link. III RT/RW Labuan Bajo, Manggarai Barat tanggal jatuh tempo 31 Desember 2018 sebesar Rp 306.982,- (tiga ratus enam ribu Sembilan ratus delapan puluh dua rupiah);
1172. 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama MATHEUS SANIANG NAGA yang terletak di Link. III RT/RW Labuan Bajo, Manggarai Barat tanggal jatuh tempo 31 Desember 2018 sebesar Rp 187.085,- (seratus delapan puluh tujuh ribu delapan puluh lima rupiah);
1173. 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama MATHEUS SANIANG NAGA yang terletak di Link. III RT/RW Labuan Bajo, Manggarai Barat tanggal jatuh tempo 31 Desember 2018 sebesar Rp 196.365,- (seratus Sembilan puluh enam ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah);
1174. 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama MUHAMMAD DAHLAN R yang terletak di Lingk. IV Kamp. air RT/RW Labuan Bajo, Manggarai Barat tanggal jatuh tempo 31 Desember 2018 sebesar Rp 180.032,- (seratus delapan puluh ribu rupiah tiga puluh dua rupiah);
1175. 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama BACO M. ALI yang terletak di Kampung Tengah RT/RW Labuan Bajo, Manggarai Barat tanggal jatuh tempo 31 Desember 2018 sebesar Rp 179.661,- (seratus tujuh puluh Sembilan ribu enam ratus enam puluh satu rupiah);
1176. 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama KOSMAS SEMEN yang terletak di Batu Cermin RT/RW Batu Cermin, Manggarai Barat tanggal jatuh tempo 31 Desember 2018 sebesar Rp 236.826,- (dua ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah);
1177. 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama ABDUL HARIS yang terletak di Kp. Air RT/RW Labuan Bajo, Manggarai Barat tanggal jatuh tempo 31 Desember 2018 sebesar Rp 110.989,- (seratus sepuluh ribu Sembilan ratus delapan puluh Sembilan);
1178. 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama ABDUL HARIS yang terletak di Labuan Bajo RT/RW Labuan Bajo, Manggarai Barat tanggal jatuh tempo 31 Desember

Hal 130 dari 281 hal

Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2018 sebesar Rp 306.982,- (tiga ratus enam ribu Sembilan ratus delapan puluh dua rupiah);
1179. 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama KALISONG yang terletak di Air Kemiri RT/RW Gorontalo, Manggarai Barat tanggal jatuh tempo 31 Desember 2018 sebesar Rp 248.333,- (dua ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah);
1180. 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama ALDINA NES yang terletak di Cowang Dereng RT/RW Batu Cermin, Manggarai Barat tanggal jatuh tempo 31 Desember 2018 sebesar Rp 191.168,- (seratus Sembilan puluh satu ribu seratus enam puluh delapan rupiah);
1181. 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama YULIANUS RAYEN yang terletak di Sernaru RT/RW Wae Kelambu, Manggarai Barat tanggal jatuh tempo 31 Desember 2018 sebesar Rp 179.661,- (seratus tujuh puluh Sembilan ribu enam ratus enam puluh satu rupiah);
1182. 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama KALISONG yang terletak di Air Kemiri RT/RW Gorontalo, Manggarai Barat tanggal jatuh tempo 31 Desember 2019 sebesar Rp 248.333,- (dua ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah);
1183. 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama ABDUL HARIS yang terletak di Labuan Bajo RT/RW Labuan Bajo, Manggarai Barat tanggal jatuh tempo 31 Desember 2019 sebesar Rp 306.982,- (tiga ratus enam ribu Sembilan ratus delapan puluh dua rupiah);
1184. 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama ALDINA NES yang terletak di Cowang Dereng RT/RW Batu Cermin, Manggarai Barat tanggal jatuh tempo 31 Desember 2019 sebesar Rp 191.168,- (seratus Sembilan puluh satu ribu seratus enam puluh delapan rupiah);
1185. 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama KOSMAS SEMEN yang terletak di Batu Cermin RT/RW Batu Cermin, Manggarai Barat tanggal jatuh tempo 31 Desember 2019 sebesar Rp 236.826,- (dua ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah);
1186. 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama SIPRIANUS TAMBU yang terletak di Sernaru RT/RW Wae Kelambu, Manggarai Barat tanggal jatuh tempo 31 Desember 2019 sebesar Rp 179.290,- (seratus tujuh puluh Sembilan ribu dua ratus Sembilan puluh rupiah);
1187. 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama MATHEUS SANIANG NAGA yang terletak di Link. III RT/RW Labuan Bajo, Manggarai Barat tanggal jatuh tempo 31 Desember 2019 sebesar Rp 187.827,- (seratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah);
1188. 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama MUHAMMAD DAHLAN R yang terletak di Lingk. IV Kamp. Air RT/RW Labuan Bajo, Manggarai Barat tanggal jatuh tempo 31 Desember 2019 sebesar Rp 180.032,- (seratus delapan puluh ribu tiga puluh dua rupiah);

Hal 131 dari 281 hal

Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1189. 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama YOHANES HEPITUS MULIADI yang terletak di Komp. SDN II RT/RW Gorontalo, Manggarai Barat tanggal jatuh tempo 31 Desember 2018 sebesar Rp 220.864,- (dua ratus dua puluh ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah);
1190. 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama MATHEUS SANIANG NAGA yang terletak di Link. III RT/RW Labuan Bajo, Manggarai Barat tanggal jatuh tempo 31 Desember 2019 sebesar Rp 299.187,- (dua ratus Sembilan puluh Sembilan ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah);
1191. 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama MATHEUS SANIANG NAGA yang terletak di Link. III RT/RW Labuan Bajo, Manggarai Barat tanggal jatuh tempo 31 Desember 2019 sebesar Rp 306.982,- (tiga ratus enam ribu Sembilan ratus delapan puluh dua rupiah);
1192. 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama MATHEUS SANIANG NAGA yang terletak di Link. III RT/RW Labuan Bajo, Manggarai Barat tanggal jatuh tempo 31 Desember 2019 sebesar Rp 187.085,- (seratus delapan puluh tujuh ribu delapan puluh lima rupiah);
1193. 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama BACO M. ALI yang terletak di Kampung Tengah RT/RW Labuan Bajo, Manggarai Barat tanggal jatuh tempo 31 Desember 2019 sebesar Rp 179.661,- (seratus tujuh puluh Sembilan ribu enam ratus enam puluh satu rupiah);
1194. 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama ABDUL HARIS yang terletak di Kp. Air RT/RW Labuan Bajo, Manggarai Barat tanggal jatuh tempo 31 Desember 2019 sebesar Rp 110.989,- (seratus sepuluh ribu Sembilan ratus delapan puluh Sembilan rupiah);
1195. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran dari MATHEUS SANIANG NAGA SIAGIAN untuk pembayaran uang muka tanah di mts alia dengan batas berikut utara : -, selatan : -, timur : -, barat : -, dengan luas 8.000 m2 *kesepakatan harga 725.000/m sebesar Rp 155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah) tanggal 15 Januari 2018 yang ditanda tangani oleh Syarifudin di atas materai 6000;
1196. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran dari MATHEUS SANIANG NAGA SIAGIAN untuk pembayaran sebidang tanah yang terletak di belakang made in Italy ristorante italiano dengan ukuran 13 x 60 m2 dengan harga Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 08 Desember 2017 sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang ditanda tangani oleh SYAIFUL RAMADHAN REGI di atas materai 6000;
1197. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran dari MATHEUS SANIANG NAGA SIAGIAN untuk pembayaran sebidang tanah yang terletak di belakang made in Italy ristorante italiano dengan ukuran 13 x 60 m2 dengan harga Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 14 Januari 2018 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang ditanda tangani oleh SYAIFUL RAMADHAN REGI di atas materai 6000;
1198. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran dari MATHEUS SANIANG NAGA SIAGIAN untuk pembayaran pengurusan sebidang tanah di Karanganyar milik Bpk. Matheus Armon, ukuran 20m x 100m, Batas Utara: Baharudin, Selatan: Ismaela Djudje, Timur: Bukit, Barat: rencana jalan, PJ: Negosiasi setelah lihat lokasi suka harga 500jt sebesar Rp

Hal 132 dari 281 hal Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 03 Juni 2019 yang ditanda tangani oleh Matheus Armon, Saksi 1 : Lydia, saksi 2: Stevanus L, dan saksi 3 : Petrus Panta Pati;

1199. 1 (satu) lembar asli tulisan tangan dengan judul perkembangan haris tanggal 02 Maret 2020;
1200. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran dari MATHEUS S. N. SIAGIAN untuk pembayaran tanah yang terletak di karangan dengan luas 616 m2 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 03 Juni 2020 yang ditandatangani oleh ABDURAHMAN ISHAKA;
1201. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran dari MATHEUS S. N. SIAGIAN untuk pembayaran sebidang tanah yang terletak di karangan dengan ukuran 10 x 45 m sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanggal 04 Januari 2019 yang ditandatangani oleh ABDUL FATAH yang bermaterai 6000;
1202. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran dari MATHEUS S. N. SIAGIAN untuk pembayaran sebidang tanah yang terletak di karangan dengan ukuran 10 x 45 m2 sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 15 Maret 2020 yang ditandatangani oleh ABDUL FATAH yang bermaterai 6000;
1203. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran dari MATHEUS S. N. SIAGIAN untuk pembayaran sebidang tanah yang terletak di karangan dengan ukuran 10 x 45 m2 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 20 Desember 2019 yang ditandatangani oleh ABDUL FATAH yang bermaterai 6000;
1204. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran dari MATHEUS S. N. SIAGIAN untuk pembayaran sebidang tanah kering yang terletak di karangan dengan ukuran 10 x 45 m2 sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 04 Juli 2019 yang ditandatangani oleh ABDUL FATAH yang bermaterai 6000;
1205. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran dari MATHEUS S. N. SIAGIAN untuk pembayaran sebidang tanah kering yang terletak di karangan dengan ukuran 10 x 45 m2 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 14 Desember 2019 yang ditandatangani oleh ABDUL FATAH yang bermaterai 6000;
1206. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran dari MATHEUS SANIANG NAGA SIAGIAN untuk pembayaran ketiga tanah di karangan dengan ukuran 10x45 m2 sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 29 September 2018 yang ditandatangani oleh ABDUL FATAH yang bermaterai 6000;
1207. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran dari MATHEUS S. N. SIAGIAN untuk pembayaran tanah yang terletak di karangan dengan L. 565m2 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 03 Juni 2020 yang ditandatangani oleh ABDUL FATAH yang bermaterai 6000;
1208. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran dari MATHEUS SANIANG NAGA SIAGIAN untuk pembayaran tanah di karangan milik Bpk. Abdul Fatah luas kurang lebih 500 m2, pelunasan setelah sidang panitia A. tolong segera berkas kasih masuk ke BPN. sebesar Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 09 Februari 2019 yang ditandatangani oleh A. FATAH yang bermaterai 6000;
1209. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran dari MATHEUS SANIANG NAGA SIAGIAN untuk pembayaran tanah di karangan milik Bpk. Abdul Fatah, pembayaran kedua sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

Hal 133 dari 281 hal

Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 20 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh A. FATAH yang bermaterai 6000;
1210. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran dari MATHIUS SIA GIA untuk pembayaran sebidang tanah yang terletak di karangan dengan ukuran 10 x 45 m2. sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tanggal 12 November 2018 yang ditandatangani oleh ABDUL FATA yang bermaterai 6000;
1211. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran dari MATHEUS SANIANG NAGA SIAGIAN untuk pembayaran tanda jadi pembelian tanah milik Bp. Abdul Fatah yang terletak di karangan, luas kurang lebih 500 m2, utara : maria milan, S : marselinus, Barat: rencana jalan, timur : rencana jalan harga total keseluruhan 130.000.000, sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanggal 10 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh ABDUL FATAH yang bermaterai 6000;
1212. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran dari MATEUS SANIAGAN untuk pembayaran lanjutan pembayaran kesisaan uang tanah di karangan timur sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 13 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh A. FATAH yang bermaterai 6000;
1213. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran dari MAHMUD NIP untuk tanah milik alias Rahim dan mahidin, dengan penerimaan ini tanah akan beres di urus sampai AJB, kita terima surat penolakan waris yang dibutuhkan BPN sebesar Rp 36.500.000,- (tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 21 Maret 2019 yang ditandatangani oleh SUHARNING yang bermaterai 6000;
1214. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran dari MATHEUS SANIANG NAGA SIAGIAN untuk pembayaran bagian dari tanah karangan yg tiga org baru (maria milan, dkk) sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanggal 28 Juli 2019 yang ditandatangani oleh YOHANES T. D IBA dan A. HARIS;
1215. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran dari MATHEUS SANIANG NAGA SIAGIAN untuk pembayaran sebidang tanah yang terletak di Wae Cicu Utara sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 22 Juni 2016 yang ditandatangani oleh MAHMUD NIP yang bermaterai 6000;
1216. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran dari MATHEUS S.N SIAGIAN untuk pembayaran pelunasan harga tanah yang terletak di karangan sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tanggal 17 Juni 2020 yang ditandatangani oleh TRI WAHYUNI yang bermaterai 6000;
1217. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran dari MATHEUS S.N. SIAGIAN untuk pembayaran sebidang tanah yang terletak di karangan dengan ukuran 10x45 m2 dengan luas 450 m2 kurang lebih sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 09 Februari 2020 yang ditandatangani oleh TRI WAHYUNI IRIANI yang bermaterai 6000;
1218. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran dari MATHEUS SANIAG NAGA SIAGIAN untuk pembayaran sebidang tanah yang terletak di karangn dengan ukuran 10x45 m2 sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 13 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh ALOISIUS NALA yang bermaterai 6000;
1219. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran dari MATHEUS S. N. SIAGIAN untuk pembayaran tanah milik bpk. Aloisius Nala, yg terletak di Karang, Wae Cicu. sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanpa tanggal dan tahun yang ditandatangani oleh ALOISIUS NALA yang bermaterai 6000;
1220. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran dari MATHEUS SANIANG NAGA SIAGIAN untuk pembayaran tanah milik Mahmudin Nip yang

Hal 134 dari 281 hal Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Karangannya seluas 6.800 m² sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 19 Mei 2016 yang ditandatangani oleh MAHMUD NIP yang bermaterai 6000;

1221. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran dari MATHEUS SANIANG NAGA SIAGIAN untuk pembayaran satu bidang tanah di Karangannya yang berbatasan dengan Dai Kayus. Seluas kurang lebih 6.000 m² yang dibatasi dengan Laut dan Tanah negara. sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 29 April 2016 yang ditandatangani oleh MAHMUD NIP yang bermaterai 6000;
1222. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran dari MATHEUS SANIANG NAGA SIAGIAN untuk pembayaran tanah karangannya seluas 6.800 m², milik Mahmudin Nip sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 01 Juli 2016 yang ditandatangani oleh MAHMUD NIP yang bermaterai 6000;
1223. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran dari MATHEUS SANIANG NAGA SIAGIAN untuk pembayaran tanah di karangannya seluas 6.080 m² yang terletak di Karangannya, berbatasan dengan SHM milik Dai Kayus sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tanggal 12 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh MAHMUD NIP yang bermaterai 6000;
1224. 1 (satu) lembar asli tulisan tangan yang berjudul Penerimaan dari 29 April 2016 sampai dengan 12 Agustus 2016 atas nama MAHMUDIN NIP;
1225. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran dari MATHEUS SANIANG NAGA SIAGIAN untuk pembayaran tiket pesawat Mahmud suami istri di potong nanti di pembayaran tanahnya sebesar Rp 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) tanggal 29 Juli 2016 yang ditandatangani oleh MAHMUD dengan cap Treetop;
1226. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran dari MATHEUS SANIANG NAGA SIAGIAN untuk pembayaran tanah milik Nuryadin Umar, lokasi di Kranga berbatasan dengan tanah-tanah plataran, dengan pengambilan ini tidak ada lagi pengambilan hingga sertifikat keluar sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tanggal 10 Maret 2018 yang ditandatangani oleh NURYADIN yang bermaterai 6000;
1227. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran dari MATHEUS SANIANG NAGA SIAGIAN untuk pembayaran komisi dari Matheus s. n. siagian tanah yang dibeli dari Topenus sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 04 September 2019 yang ditandatangani oleh ABDUL HARIS yang bermaterai 6000;
1228. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran dari MATHEUS S. N. SIAGIAN untuk pembayaran keuntungan dari Safarudin dan Tupenus yang sudah dijanjikan oleh Matheus S.N. Siagian sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 29 November 2019 yang ditandatangani oleh ABDUL HARIS yang bermaterai 6000;
1229. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran dari MATHEUS S. N. SIAGIAN untuk pembayaran keuntungan dari Otus Keleng sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 29 November 2019 yang ditandatangani oleh ABDUL HARIS yang bermaterai 6000;
1230. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran dari MATHEUS S. N. SIAGIAN untuk pembayaran tanda jadi atas sebidang tanah kering yang berlokasi di Karangannya, dengan ukuran 10x45 m², dengan harga : Rp 150.000.000,-, sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tanggal 24 Juli 2019 yang ditandatangani oleh H. Ramang H. Ishaka yang bermaterai 6000;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1231. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran dari MATHEUS S. N. SIAGIAN untuk pembayaran sebidang tanah yang terletak di Karang dengan ukuran 10x45 m2 sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 29 November 2019 yang ditandatangani oleh H. Ramang yang bermaterai 6000;
1232. 4 (empat) lembar print out screen shoot percakapan whatsapp messenger yang ditandatangani oleh MATHEUS SANIANG NAGA SIAGIAN tanggal 12 November 2020;
1233. 1 (satu) lembar asli Kwitansi pembayaran dari MATHEUS SIAGIAN untuk pembayaran sebidang tanah kering yang terletak di karangan dengan ukuran 15 x 50 m2 (ansuran ke dua) sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang di tandatangani oleh ABDURAHMAN tanggal 03 Desember 2018.
1234. 1 (satu) lembar asli Kwitansi pembayaran dari MATHEUS SANIANG NAGA SIAGIAN untuk pembayaran uang keuntungan dari tanah karangan tetap masuk dalam tabungan sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang dt andatangani oleh A.HARIS tanggal 24 Juni 2017.
1235. 1 (satu) lembar asli Kwitansi dari MATHEUS S.N SIAGIAN untuk pembayaran sebidang tanah kering di karangan ukuran 10 x 45 m2 sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang di tandatangani oleh YOSEF JAMALUDIN tanggal 24 Januari 2018.
1236. 1 (satu) lembar asli Kwitansi pembayaran dari MATHEUS SANIANG NAGA SIAGIAN untuk pembayaran sebidang tanah terletak di karangan dengan ukuran 10 x 45 m2 sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang di tandatangani oleh YOSEF JAMALUDIN tanggal 13 Oktober 2017.
1237. 1 (satu) lembar asli Kwitansi dari MATHEUS SANIANG NAGA SIAGIAN untuk pembayaran sebidang tanah di karangan dengan ukuran 10 x 45 m2 sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang di tandatangani oleh MARIA MILAN tanggal 13 Oktober 2017.
1238. 1 (satu) lembar asli Kwitansi dari MATEHUS SANIANG NAGA SIAGIAN untuk pembayaran sebidang tanah di karangan ,Kel Labuan Bajo dengan ukuran 10 x 45 m2 sebesar Rp. 10.00.000,- (sepuluh jutan rupiah) yang di tandatangani oleh MARSELUS GADU tanggal 22 April 2017.
1239. 1 (satu) lembar asli Kwitansi pembayaran dari MATHEUS SANIANG NAGA SIAGIAN untuk pembayaran tanah milik Bpk.MULYADI,di karangan.masih ada sisa 15jt yang butuh pertanggung jawaban Ali dan Jhonny akan di bayarkan setelah selesai balik nama /sertifikat di notaris TTD AJB sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang di tandatangani oleh YOH. HEPITUS MULIADI,ST tanggal 19 April 2016.
1240. 1 (satu) lembar asli Kwitansi pembayaran dari MATHEUS SANIANG NAGA SIAGIAN untuk pembayaran sebidang tanah mllik Harris yang terletak dikarangan waecicu sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 10 Juni 2016.
1241. 1 (satu) lembar asli Kwitansi pembayaran dari MATHEUS SANIANG NAGA SIAGIAN untuk pembayaran sebidang tanah kering yang terletak di karangan,Kel.labuan bajo dengan ukuran 10 x 45 m2 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang di tandatangani oleh YULIANUS KAYEN tanggal 28 Juni 2017.
1242. 1 (satu) lembar asli Kwitansi pembayaran dari MATHEUS SANIANG NAGA SIAGIAN untuk pembayaran sebidang tanah kering yang terletak di karangan Kel.labuan Bajo dengan ukuran 20 x 35 m2 sebesar Rp

Hal 136 dari 281 hal Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang di tandatangani oleh THEO DIAZ tanggal 23 Juni 2017.
1243. 1 (satu) lembar asli Kwitansi pembayaran dari MATHEUS SANIANG NAGA SIAGIAN untuk pembayaran sebidang tanah kering yang terletak di karangan Kel.Labuan Bajo,Kec.Komodo sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang di tandatangani oleh ALDINA NES tanggal 23 Juni 2017.
1244. 1 (satu) lembar asli Kwitansi pembayaran dari MATHEUS SANIANG NAGA SIAGIAN untuk pembayaran sebidang tanah kering di karangan,Kel.Labuan Bajo dengan ukuran 10 x 45 m2 sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh SALVADOR PINTO tanggal 23 April 2017.
1245. 1 (satu) lembar asli Kwitansi pembayaran dari MATHEUS SANIANG NAGA SIAGIAN untuk pembayaran tanah di karangan An. Alm. YOHANES SALAM (Aldina Nes) dengan ukuran 10 x 45 m2 sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang di tandatangani oleh ABDUL HARIS tanggal 24 Januari 2017.
1246. 1 (satu) lembar asli Kwitansi untuk pembayaran 2jt Harris + 2jt Jhonny iba juga,tanah di karangan yang 4 org sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) yang di tandatangani oleh A.HARRIS dan JHONNY tanggal 30 Maret 2016.
1247. 1 (satu) lembar asli Kwitansi pembayaran dari MATHEUS SANIANG NAGA SIAGIAN untuk pembayaran sebidang tanah kering di karangan,Kel.labuan bajo dengan ukuran 10 x 30 m2 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang di tandatangani oleh ABDUL HARIS tanggal 03 April 2017.
1248. 1 (satu) lembar asli Kwitansi pembayaran dari MATHEUS SANIANG NAGA SIAGIAN untuk pembayaran tanah 5 kapling di karangan dengan ukuran 10 x 45 m2 An.YULIANUS RAYEN,SIPRIANUS TAMBU,ALDINA NES,MUHAMAD BACO,MUHAMAD DAHLAN R. sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang di tandatangani oleh ALI MUSTAFA tanggal 23 Desember 2016.
1249. 1 (satu) lembar asli Kwitansi pembayaran dari MATHEUS SANIANG NAGA SIAGIAN untuk pembayaran tanah di karangan ukuran 10 x 45 m2 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang di tandatangani oleh MUHAMAD DAHLAN R. tanggal 24 Juni 2017.
1250. 1 (satu) lembar asli Kwitansi pembayaran dari MATHEUS SANIANG NAGA SIAGIAN untuk pembayaran sebidang tanah kering yang terletak di karangan Kel.Labuan Bajo dengan ukuran 20 x 35 m2 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang di tandatangani oleh FRANSISKUS SUBUR tanggal 28 Juni 2017.
1251. 1 (satu) lembar asli Kwitansi pembayaran dari MATHEUS SANIANG NAGA SIAGIAN untuk pembayaran tanah di karangan ukuran 10 x 30 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang di tandatangani oleh TAKSIM tanggal 24 Juni 2017.
1252. 1 (satu) lembar asli Kwitansi pembayaran dari MATHEUS SANIANG NAGA SIAGIAN untuk pembayaran sebidang tanah kering di karangan kel.Labuan Bajo dengan ukuran 10 x 45 m2 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang di tandatangani oleh KOSMAS JANGGAT tanggal 23 Mei 2017.
1253. 1 (satu) lembar asli Kwitansi pembayaran dari MATHEUS SANIANG NAGA SIAGIAN untuk pembayaran sebidang tanah kering di karangan kel.Labuan Bajo dengan ukuran 10 x 45 m2 sebesar Rp.30.000.000,-

Hal 137 dari 281 hal Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (tiga puluh juta rupiah) yang di tandatangani oleh MARSELUS GADU tanggal 23 Februari 2017.
1254. 1 (satu) lembar asli Kwitansi pembayaran dari MATHEUS SANIANG NAGA SIAGIAN untuk pembayaran tanah di karangan ukuran 10 x 45 sebesar Rp.10.000.000-, (sepuluh juta rupiah) yang di tandatangani oleh M.BACO ALI tanggal 24 Juni 2017.
1255. 1 (satu) lembar asli Kwitansi pembayaran dari MATHEUS SANIANG NAGA SIAGIAN untuk pembayaran pelunasan tanah karangan milik Bpk.HEPITUS MULYADI seluas ±579 m2,seharga 95jt rupiah dimana 15jt nya Ali dan Jhonny iba terima sebesar Rp.15.000.000-, (lima belas juta rupiah) yang di tandatangani oleh YOH.HEPITUS MULYADI tanggal 31 Mei 2017.
1256. 1 (satu) lembar asli Kwitansi pembayaran dari MATHEUS SANIANG NAGA SIAGIAN untuk pembayaran sebidang tanah kering yang terletak di karangan Kel.Labuan Bajo dengan ukuran 10 x 45 m2 sebesar Rp.10.000.000-, (sepuluh juta rupiah) yang di tandatangani oleh SIPRIANUS TAMBU tanggal 23 Juni 2017.
1257. 1 (satu) lembar asli Kwitansi pembayaran dari MATHEUS SANIANG NAGA SIAGIAN untuk pembayaran DP sebidang tanah yang terletak di karangan dengan ukuran 15 x 50 dan batas-batas Utara dengan MOH.ALI,Selatan dengan BLASIUS JANU, Timur dan Barat rencana jalan. N.B: sisanya setelah sertifikat selesai. Sebesar Rp.50.000.000-, (lima puluh juta rupiah) yang di tandatangani oleh YOHANES HEPITUS MULYADI tanggal 11 Oktober 2016.
1258. 1 (satu) lembar asli Kwitansi pembayaran dari MATHEUS SANIANG NAGA SIAGIAN untuk pembayaran sisa uang tanah milik HEPITUS MULYADI batas Barat JALAN,Timur JALAN,Utara MUHAMAD ALI,Selatan BLASIUS PANDUR.pelunasan akan di lakukan saat balik nama selesai sebesar Rp.25.000.000-, (dua puluh lima juta rupiah) yang di tandatangani oleh YOHANES HEPITUS MULYADI tnggal 06 April 2017.
1259. 1 (satu) lembar asli Kwitansi pembayaran dari MATHEUS SANIANG NAGA SIAGIAN untuk pembayaran pengurusan tanah 6 kampling yang di karangan sebesar Rp.5.000.000-, (lima juta rupiah) yang di tandatangani oleh ABDUL HARRIS tanggal 23 Mei 2017.
1260. 1 (satu) lembar asli Kwitansi pembayaran dari MATHEUS SANIANG NAGA SIAGIAN untuk pembayaran sebidang tanah kering di karangan kel.Labuan Bajo dengfan ukuran 20 x 35 m2 sebesar Rp.20.000.000-, (dua puluh juta rupiah) yang di tandatangani oleh THEO DIAZ tanggal 20 Februari 2017.
1261. 1 (satu) lembar asli Kwitansi pembayaran dari MATHEUS SANIANG NAGA SIAGIAN untuk pembayaran sebidang tanah kering di karangan kel.Labuan Bajo dengan ukuran 20 x 35 m2 sebesar Rp.20.000.000-, (dua puluh juta rupiah) yang di tandatangani oleh FRANSISKUS SUBUR tanggal 20 Februari 2017.
1262. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Bukti Penyerahan Tanah Adat HAJI ISHAKA dan HAKU MUSTAFA kepada M.RIDWAN tanggal 01 Juli 1993.
1263. 1 (satu) bendel asli AKTA JUAL BELI Nomor: 16/2018 antara ABDUL HARIS dengan MATHEUS SANIANG NAGA SIAGIAN tanggal 21 Mei 2018.
1264. 1 (satu) lembar asli surat keterangan bebas (SKB) bea perolehan hak atas tanah dan bangunan Nomor : 900/BPKD/ /V/2018 tanggal 16 Mei 2018

Hal 138 dari 281 hal Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1265. 1 (satu) bendel asli AKTA JUAL BELI Nomor: 18/2018 antara FRANSISKUS SUBUR dengan MATHEUS SANIANG NAGA SIAGIAN tanggal 31 Mei 2018.
1266. 1 (satu) lembar asli bukti penyetoran dari KAMA PUTRA KUSDIANTO sebesar Rp.2.104.000,-, (dua juta seratus empat ribu rupiah) tanggal 28 Mei 2018.
1267. 1 (satu) lembar asli surat setoran pajak daerah bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (SSPD-BPHTB) atas nama KAMA PUTRA KUSDIANTO sebesar Rp.2.104.000,-, (dua juta seratus empat ribu rupiah) tanpa tanggal dan tahun.
1268. 1 (satu) lembar asli bukti penyetoran dari KAMA PUTRA KUSDIANTO sebesar Rp.2.496.000,-, (dua juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) tanggal 28 Mei 2018.
1269. 1 (satu) lembar asli surat setoran pajak daerah bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (SSPD-BPHTB) atas nama KAMA PUTRA KUSDIANTO sebesar Rp.2.496.000,-, (dua juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) tanpa tanggal dan tahun.
1270. 1 (satu) jepitan Fotocopy Akta Jual Beli Nomor: 15/2017 antara MATHEUS SANIANG NAGA SIAGIAN dengan GREGORIUS ANTAR AWAL tanggal 21 Februari 2017 di hadapan notaris CAROLINA DESIANI DJERABU
1271. Rekening Koran BNI nomor: 250425052 atas nama MATHEUS SANIANG NAGA SIAGIA, periode 00 Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2017;
1272. Rekening Koran BRI nomor: 383501021442536 atas nama PT. BAKA INTENSI GANI, periode 01 April 2016 sampai dengan 31 Desember 2017;
1273. Rekening Koran Mandiri Nomor: 16100228882 atas nama MATHEUS SANIANG NAGA SIAGIAN, periode 01 Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2017;
1274. 1 (satu) lembar peta berjudul Scan Data.pdf dengan keterangan Peta Karangannya Lokasi Beda.
1275. 1 (satu) lembar Foto Kwitansi pembayaran dari MATHEUS NAGA SIAGIAN uang sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran Sebidang Tanah di Wae Cicu Utara dengan batas sebagai berikut, Utara: Abdul Latif, Selatan: Laut, Timur: Dai Kayus, Barat: Tanjung Batu Kalut, luas ± 5000 m² yang ditandatangani oleh MAHMUD NIP tanggal 19 Juni 2015;
1276. 1 (satu) lembar Foto Kwitansi Pembayaran dari MATHEUS SANIANG NAGA SIAGIAN uang sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran Sebidang Tanah di Wae Cicu Utara dengan batas sebagai berikut Utara : Abdul Latif, Selatan: Laut, Timur: Dai Kayus, Barat: Tanjung Batu Kalut, luas ± 5000 m² yang di tandatangi oleh MAHMUD NIP pada tanggal 22 Juni 2015;
1277. 1 (satu) lembar Foto Bukti Transfer dengan keterangan Transfer dari Bank Mandiri dengan nomor rekening: 16100228xxxxx ke Bank BNI atas nama IBU ARIANI KURNI dengan nomor rekening: 0273291699 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 07 Februari 2015 pukul 11.24.
1278. 1 (satu) bendel Rekening Koran dengan nomor rekening: 1610002340359 atas nama MAHMUD NIP, periode: 01 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1279. 2 (dua) lembar fotocopy Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 02447 seluas 8.447 m2 atas nama SUAIB TAHIYA, tanggal 06 Juni 2016;
1280. 2 (dua) lembar fotocopy Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 02448 seluas 20.130 m2 atas nama H. Sukri, tanggal 06 Juni 2016;
1281. 1 (satu) bendel fotocopy Surat Bukti Penyerahan Hibah atas nama Ketang tanggal 10 Maret 1997;
1282. 1 (satu) bendel asli Surat Perjanjian antara H. SUKRI dengan VERONIKA SUKUR tanggal 13 September 2013;
1283. 1 (satu) bendel asli Surat Perjanjian antara ANDI RISKI NUR CAHYA dengan VERONIKA SUKUR tanggal 14 Oktober 2013;
1284. 1 (satu) bendel fotocopy Surat Bukti Penyerahan Tanah Adat dari HAJI ISHAKA dan HAKU MUSTAFA kepada SUAIP TAHIYA tanpa tanggal dan tahun;
1285. 1 (satu) bendel fotocopy Surat Bukti Penyerahan Tanah Adat dari HAJI ISHAKA dan HAKU MUSTAFA kepada SUPARDI TAHIYA tanpa tanggal dan tahun;
1286. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran dari IBU VERONIKA SYUKUR untuk pembayaran tambah uang DP Jual Beli tanah di Karanganyar milik H. SUKRI dengan luas 20.130 m2 sebanyak Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 03 Juni 2016;
1287. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran dari ADRIANUS ARAT untuk pembayaran DP Tanah Karanganyar sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tanggal 08 April 2016;
1288. 1 (satu) map berwarna biru dengan tulisan "sukri untuk arsip saya";
1289. 2 (dua) lembar fotocopy Gambar Ukur atas nama H. SUKRI, SUAIB T., SUPARDI T., tanpa nomor, tanpa tanggal, dan tanpa tahun;
1290. 1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor: 02446 seluas 6.643 m2 atas nama SUPARDI TAHIYA, tanggal 06 Juni 2016;
1291. 1 (satu) map berwarna biru dengan tulisan "supardi untuk arsip saya";
1292. 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa atas nama SUAIB TAHIYA kepada VERONIKA SYUKUR dan ENTE PUASA tanggal 06 April 2016 di hadapan notaris THERESIA DEWI KOROH DIMU, SH., MKn.;
1293. 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) an. H. SUKRI sebesar Rp 158.040.000,- (seratus lima puluh delapan juta empat puluh ribu rupiah) tanpa tanggal dan tahun;
1294. 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) an. SUAIB TAHIYA sebesar Rp 64.576.000,- (enam puluh empat juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) tanpa tanggal dan tahun;
1295. 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) an. SUPARDI TAHIYA sebesar Rp 50.114.000,- (lima puluh juta seratus empat belas ribu rupiah) tanpa tanggal dan tahun;
1296. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan atas nama H. SYUKRI tanggal 02 Juli 2015;
1297. 1 (satu) map berwarna biru dengan tulisan "suaip untuk arsip saya";
1298. 1 (satu) jepitan fotocopy Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat nomor: 115/KEP/53.15/400-09/VI/2016 tentang Pemberian Izin Perubahan Penggunaan Tanah dari Tanah Pertanian menjadi Tanah Pekarangan seluas 20.130 m2 di Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat kepada H. SUKRI tanggal 30 Juni 2016;

Hal 140 dari 281 hal Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1299. 1 (satu) jepitan fotocopy Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat nomor: 117/KEP/53.15/400-09/VI/2016 tentang Pemberian Izin Perubahan Penggunaan Tanah dari Tanah Pertanian menjadi Tanah Pekarangan seluas 8.447 m² di Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat kepada SUAIB TAHIYA tanggal 30 Juni 2016;
1300. 1 (satu) jepitan fotocopy Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat nomor: 116/KEP/53.15/400-09/VI/2016 tentang Pemberian Izin Perubahan Penggunaan Tanah dari Tanah Pertanian menjadi Tanah Pekarangan seluas 6.643 m² di Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat kepada SUPARDI TAHIYA tanggal 30 Juni 2016;
1301. 3 (tiga) lembar gambar map;
1302. 1 (satu) jepitan asli buku rekening BNI dengan nomor rekening: 0139762723 an. Ibu VERONIKA SYUKUR;
1303. 1 (satu) asli buku rekening Mandiri dengan nomor rekening: 161-00-0135145-6 atas nama CF Komodo Hotel yang beralamat di Cowang Dereng RT/RW 007/002, Batu Cermin, Komodo;
1304. 1 (satu) asli buku rekening Kopdit Suka Damai dengan nomor rekening: 0886 atas nama VERONIKA SYUKUR yang beralamat di Cowang Dereng Desa Batu Cermin, Labuan Bajo;
1305. 1 (satu) asli buku rekening BRITAMA Bisnis dengan nomor rekening: 1112-01-000214-56-2 atas nama VERONIKA SYUKUR yang beralamat di Cowang Dereng, Kel. Batu Cermin, Kecamatan Komodo, dengan NIK: 5315056910680001;
1306. 1 (satu) unit Handphone Oppo F9 berwarna hitam, nomor IMEI 1: 864091048102036 dan IMEI 2: 864091048102036.
1307. 1 (satu) bendel Rekening Koran Tabungan Mandiri dengan nomor rekening: 161-00-0133254-8 atas nama AFRIZAL periode:
a. 01 Januari 2018 sampai dengan 18 November 2020;
b. 01 Maret 2020 sampai dengan 30 April 2020.
1308. 1 (satu) bendel Rekening Koran Tabungan Mandiri dengan nomor rekening: 181-00-0091485-4 atas nama AFRIZAL, periode 13 Agustus 2020 sampai dengan 19 November 2020;
1309. 1 (satu) bendel Rekening Koran BNI Taplus dengan nomor rekening: 0469329317 atas nama AFRIZAL, periode:
a. 17 November 2015 sampai dengan 31 Desember 2015;
b. 01 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2016;
c. 28 September 2016 sampai dengan 31 Desember 2016;
d. 01 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017.
1310. 1 (satu) lembar asli surat undangan mediasi ke 2, Nomor: 432/53.15/600.13/V/2016 tanggal 25 Mei 2016
1311. 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Perihal Somasi Pertama dan Terakhir, Nomor: 06/1/2018 tanggal 29 Januari 2018 dari Makarius Paskalis Baut & Parteners (Advocat – Konsultan Hukum) Kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat;
1312. 1 (satu) lembar fotocopy surat pemberitahuan pajak terhitung pajak bumi dan bangunan tahun;
1313. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan yang telah di tanda tangani oleh yang membuat pernyataan Amran Aliman dan telah di tanda tangani oleh yang menerima Callano Soares pada tanggal 12 November 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1314. 2 (dua) lembar fotocopy surat yang di tujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat dan telah di tanda tangani oleh Amran Aliman pada tanggal 13 Desember 2018;
1315. 1 (satu) lembar fotocopy surat pemberitahuan, Nomor: 99/2-53.15/1/2018 tanggal 20 Januari 2018;
1316. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perdamaian tanggal 26 Juni 2018;
1317. 2 (dua) lembar fotocopy surat Perihal mohon Tindakan kongkrit dari Bapak Menteri ATR/ Kepala BPN atas Tindakan kepala kantor pertanahan manggarai barat yang tidak mematuhi putusan PTUN serta PP 24 / 1997 tanggal 15 Januari 2019;
1318. 1 (satu) lembar fotocopy surat Undangan pemeriksaan lapangan dan pengukuran batas bidang tanah, Nomor: 616/5-53.15/VII/2018 Tanggal 27 Juli 2018;
1319. 1 (satu) lembar fotocopy surat Undangan pemeriksaan lapangan dan pengukuran batas bidang tanah, tanggal 19 oktober 2017;
1320. 1 (satu) lembar fotocopy surat pemberitahuan sidang panitia 'A' an. Amran Aliman, tanggal 23 oktober 2018;
1321. 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan, Nomor: Pem.131/205/IX/2017 tanggal 13 September 2017;
1322. 1 (satu) lembar fotocopy surat tanda terima dokumen dari Amran Aliman, Nomor berkas permohonan 3704/2017 tanggal 2 oktober 2017;
1323. 1 (satu) lembar fotocopy surat bukti penyerahan tanah adat tanggal 10 April 1990;
1324. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi untuk pembayaran harga tanah yang berlokasi di tanjung batu kalo dengan luas 30.000 m2 (tiga puluh ribu meter persegi) dari Djudin Aliman sebesar Rp. 5.000.000,- yang di tanda tangani oleh Achmad Baco tanggal 20-03-1999;
1325. 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan yang telah di tanda tangani oleh Amran Aliman selaku pembuat pernyataan dan Sarifudin Malik,S.ST Mengetahui Kepala Desa/Lurah pada tanggal 08 Agustus 2017;
1326. 1 (satu) lembar fotocopy surat yang ditujukan Kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat dan telah di tanda tangani oleh Amran Aliman selaku pemohon pada tanggal 08 Agustus 2017;
1327. 1 (satu) lembar fotocopy surat Data Obyek dan Obyek Hak yang telah di tanda tangani oleh Amran Aliman selaku pemberi keterangan dan Sarifudin Malik,S.ST selaku Kepala Desa/Lurah, tanggal 08 Agustus 2017;
1328. 2 (dua) lembar fotocopy surat permohonan yang ditujukan kepada Bapak Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta UP. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat di Labuan Bajo tanggal 08 Agustus 2017;
1329. 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan Riwayat hak milik ha katas tanah, Nomor: Pem.593/2600/VIII/2017 Tanggal 08 Agustus 2017;
1330. 1 (satu) lembar fotocopy surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Sporadik, yang telah di tanda tangani oleh Amran Aliman selaku Pembuat Peryataan, Abdul Haji (saksi 1), H. Ente Puasa (saksi II) dan Sarifudin Malik,S.ST selaku Kepala Desa/Lurah tanggal 08 Agustus 2017;
1331. 1 (satu) lembar fotocopy surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, tanggal 08 Agustus 2017;
1332. 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan penanaman tanda batas tanah tanggal 08 Agustus 2017;

Hal 142 dari 281 hal Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1333. 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan tanah tidak dalam keadaan sengketa, tanggal 08 Agustus 2017;
1334. 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan kepemilikan tanah, Nomor: Pem.593/2601/VII/2017 Tanggal 08 Agustus 2017;
1335. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Panitia Pemeriksaan Tanah A;
1336. 6 (enam) lembar fotocopy surat Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas;
1337. 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan waris yang telah di tanda tangani oleh 4 (empat) ahli waris masing-masing. Amran Aliman, Gairia Aliman, Sahrudin Aliman, Ar Rahman Aliman. Tanggal 13 Juni 2017;
1338. 1 (satu) lembar fotocopy Lembar Kendali Berkas an. Pemohon Amran Aliman tanggal 10 Agustus 2017;
1339. 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan penolakan warisan tanggal 10 Agustus 2017;
1340. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Kematian, Nomor: Pem.470/KLB/320/II/2016 tanggal 24 Februari 2016;
1341. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhitung Pajak Bumi dan Bangunan Tahun an. Ansamudin tanggal 01 Mei 2017;
1342. 1 (satu) lembar fotocopy KTP an. Amran Aliman
1343. 1 (satu) lembar fotocopy KTP an. H. Sukri;
1344. 1 (satu) lembar fotocopy KTP an. Ente Puasa.
1345. 1 (satu) lembar asli Tanda terima tanpa nomor, diterima dari Kantor Notaris Billy Yohanes Ginta, SH., M.Kn berupa Sertifikat Hak Milik nomor: 02492, Nomor Surat Ukur : 604/Labuan Bajo/2016, Luas : 6094, tercatat atas nama GREGORIUS ANTAR AWAL. Akta Jual Beli nomor 15/2017 PPAT Carolina Desiani Djerabu, BPHTB Gregorius Antar Awal. Untuk keperluan PPJB Nomor 01 tanggal 02 Februari 2017, tanggal 17 Maret 2017 yang ditanda tangani oleh MATHEUS SANIANG NAGA SIAGIAN (penerima) dan BILLY YOHANES GINTA, SH., M.Kn (yang menyerahkan);
1346. 1 (satu) lembar asli Slip Setoran Bank Mandiri tanggal 17 Februari 2017 kepada PT. BAKA INTENSI GANI dengan nomor rekening BRI : 383501121442536 sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
1347. 1 (satu) lembar asli Slip Setoran Bank Mandiri tanggal 17 Februari 2017 kepada MATHEUS SANIANG NAGA SIAGIAN dengan nomor rekening mandiri: 1610022888882 sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
1348. 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) an. GREGORIUS ANTAR AWAL sebesar Rp 64.500.000,- (enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
1349. 1 (satu) lembar asli Akta Jual Beli nomor 15 / 2017 antara MATHEUS SANIANG NAGA SIAGIAN dan GREGORIUS ANTAR AWAL tanggal 21 Januari 2017;
1350. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan berupa Hotel "Cahya Adrian" beralamat di Cowang Ndereng, Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat.
1351. Gedung / Bangunan berupa hotel "CF Komodo" dan sebidang tanah seluas 3.250 m2 yang beralamat di Jl. Alo Tanis, Lamtoro, Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat.
1352. 1 (satu) bendel asli Surat Perintah Pencairan Dana, dengan No. SPM: 0013/1.20.3.2/SPM-GU/RKUD/2015 tanggal 11 Mei 2015;

Hal 143 dari 281 hal Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1353. 1 (satu) bendel asli Surat Perintah Pencairan Dana, dengan No. SPM: 0017/1.20.3.2/SPM-GU/RKUD/2015 tanggal 08 Juni 2015.
1354. 1 (satu) bundel scan Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 10 Tahun 2020 tentang Ketentuan Pemanfaatan Ruang dan Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang tanggal 05 Februari 2020;
1355. 1 (satu) lembar scan Rencana Pola Ruang Perkotaan Labuan Bajo.
1356. 1 (satu) unit laptop merk HP type HP 348 G4 SN# 5CG8363523;
1357. 1 (satu) unit handphone merk Samsung type SM-N960F/DS, dengan nomor IMEI 1 : 359447/09/587293/3 dan IMEI 2 : 359448/09/587293/1, S/N: RR8K906LSVH.
1358. 1 (satu) bendel rekening koran BNI TAPLUS No. Rekening 0496529379 An. Bpk MARTHEN NDEO periode 01 Januari 2016 sampai dengan 16 Desember 2020
1359. 1 asli rekening koran Bank BRI dengan No. Rekening 467601024327538 atas nama Bpk MARTHEN NDEO periode 01 Januari 2016 sampai dengan 31 Januari 2016;
1360. 1 asli rekening koran Bank BRI dengan No. Rekening 467601024327538 atas nama Bpk MARTHEN NDEO periode 01 Januari 2017 sampai dengan 31 Januari 2017;
1361. 1 asli rekening koran Bank BRI dengan No. Rekening 467601024327538 atas nama Bpk MARTHEN NDEO periode 01 Januari 2018 sampai dengan 31 Januari 2018;
1362. 1 asli rekening koran Bank BRI dengan No. Rekening 467601024327538 atas nama Bpk MARTHEN NDEO periode 01 Januari 2019 sampai dengan 31 Januari 2019;
1363. 1 asli rekening koran Bank BRI dengan No. Rekening 467601024327538 atas nama Bpk MARTHEN NDEO periode 01 Januari 2020 sampai dengan 31 Januari 2020.
1364. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Tanda Terima Setoran tanggal 01 Maret 2017;
1365. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tanggal 01 Mei 2016, nama Wajib Pajak Day Kayus, obyek Pajak di Wae Cicu Utara;
1366. 1 (satu) lembar fotokopy BPHTB tanggal 10 April 2017, wajib pajak Ismail Hirawan/Kevin Natasaputra
1367. Fotocopy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor: Pem.593/KLB/290/II/2015 tanggal 21 Februari 2015 beserta lampirannya (19 lembar)
1368. 1 (satu) buah Dokumen Akta Jual Beli (AJB) No. 170/2017, PPAT LALU MUHAMAD SUPRIANDI, SH., M.Kn dari Dai Kayus (pihak pertama)/penjual dengan Ismail Hirawan dan Kevin Natasaputra (pihak kedua)/pembeli.
1369. 1 (satu) lembar sketsa peta yang saya terima dari Unyil/Kandi/Mathius yang ditanda tangani oleh Ismail Hirawan.
1370. 1 (satu) jepitan fotocopy surat perjanjian jual beli tanah antara Gories Mere dan Gabriel Mahal tanggal 07 bulan Agustus tahun 2017;
1371. 1 (satu) jepitan fotocopy surat perjanjian jual beli tanah antara Gories Mere dan Muhammad Achyar tanggal 07 bulan Agustus tahun 2017;
1372. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kuasa nomor: 011/MAA-SK/X/2017/pdt tanggal 03 Oktober 2017;
1373. 1 (satu) lembar print out peta bertuliskan Tanah Pemda L=242.212 m2;
1374. 1 (satu) lembar printout peta tanah dengan bidang kapling nama-nama kaplingan tanah;

Hal 144 dari 281 hal Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1375. 1 (satu) lembar printout peta tanah dengan tulisan Google.
1376. 1 (satu) lembar fotocopy Silsilah Keluarga Besar Ahmad Dg. Malewa tanggal 05 Januari 2016;
1377. 1 (satu) lembar fotocopy Riwayat Kepemilikan Tanah Wae Cicu Utara tanggal 19 Januari 2016 yang ditandatangani oleh Muhamad Qurais Dg. Maga, Muhammad Naser, Muhammad Tahir Dg. Paguli;
1378. 2 (dua) lembar fotocopy surat tanpa nomor tanggal 05 maret 2016 perihal bukti-bukti tentang adanya raja-raja Labuan Bajo, sebelum adanya raja Manggarai yang pertama : ALEXANDER BARUK, yang ditandatangani oleh Muhammad Naser (hli Waris Abdulah Tengku Dg. Malewa beserta lampiran;
1379. 3 (tiga) lembar fotocopy surat perjanjian penyerahan tanah sebagian tanggal 22 februari 2016 yang ditandatangani oleh Dai Kayus selaku yang menyerahkan Tanah (pihak pertama) dan Muhammad Naser,cs selaku yang menerima tanah/ahli waris alm. Abdullah Tengku Daeng Malewa (Pihak Kedua);
1380. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan tulis tangan tanggal 22 Februari 2016, yang dibuat oleh Muhamad Naser, M. Qurais Dg. Maga, Muhamad Tahir, dan Dai Kayus.
1381. 1 (satu) lembar Surat Bukti Penyerahan Tanah tanggal 10 Oktober 1986 oleh Usman Pota kepada Dai Kayus;
1382. 2 (dua) lembar fotocopy Riwayat Peralihan Hak Atas Sebidang Tanah di Desa L. Bajo kepada Pemerintah Kecamatan Komodo, Kab. Manggarai tanggal 6 Juli 1987 yang ditandatangani oleh Usman Pota.
1383. 2 (dua) lembar fotocopy Surat tanpa nomor perihal keberatan atas Proses Pensertifikatan Tanah tanggal 22 Juni 2016;
1384. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat nomor: 1251/53.15/200.3/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015.
1385. 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Kuasa Substitusi Nomor: 09/MAA-SKSUB/VIII/2016 tanggal 12 Agustus 2016
1386. 6 (enam) lembar fotocopy Perjanjian Jual Beli Tanah dari Hasanuding Dg. Mantara, Cs kepaa Sukarni Ilyas, SH.
1387. 7 (tujuh) lembar Print Out Foto Transaksi Pembayaran Tanah;
1388. 2 (dua) lembar Print Out Foto lokasi tanah atas kepemilikan oleh Rudyanto Suliawan.
1389. Akta Jual Beli No. 187/2016 tanggal 18 Agustus 2016 asli;
1390. Akta Jual Beli No. 186/2016 tanggal 18 Agustus 2016 asli;
1391. Akta Jual Beli No. 185/2016 tanggal 18 Agustus 2016 asli;
1392. Asli Akta Notaris dan PPAT Lalu Muhamad Supriandi, SH., M.Kn., No 04 tanggal 14 September 2017;
1393. 1 (satu) jepitan asli Kwitansi senilai Dua Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah untuk Pembelian tanah tanggal 14 September 2017;
1394. Asli 14 (empat belas) lembar kwitansi pembayaran tanah senilai Rp 25.154.000.000.000,-;
1395. 14 (empat belas) lembar fotocopy CEK dari Permata Bank tanggal 10 Agustus 2016 senilai Rp 25.154.000.000.000,-;
1396. 1 (satu) lembar Fotocopy surat kuasa dari Rudyanto Suliawan kepda Saniatma Adinoto tanggal 3 Agustus 2016;
1397. 1 (satu) lembar Fotocopy surat kuasa dari Rudyanto Suliawan kepada Saniatma Adinoto tanggal 8 September 2017;
1398. 1 (satu) lembar fotocopy Print Out Rekening Koran Permata Bank nomor rekening 701463226 periode 01 Agustus 2016 sampai 31 Agustus 2016;

Hal 145 dari 281 hal Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1399. 1 (satu) lembar fotocopy Print Out Rekening Koran Permata Bank periode 01 September 2017 sampai dengan 30 September 2017.
1400. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kartu Kendali dari Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk pengurusan jenis izin TDUP Hotel;
1401. 2 (dua) lembar asli surat Berita Acara Pemeriksaan Penyediaan Akomodasi yang telah di tandatangi oleh Yohanes B.D.Madul,SE selaku Ketua Tim Teknis;
1402. 1 (satu) lembar asli surat Lampiran yang telah di tanda tangani oleh Yohanes B.D.Madul,SE selaku Ketua Tim Teknis pada tanggal 20 November 2020;
1403. 1 (satu) lembar asli surat Daftar Hadir Pemeriksa Lapangan telah di tandatangi oleh Yohanes B.D.Madul,SE, Gilbertus E. Muwa, Ermilinda Murniwati, Isabela Y. Pratiwi. Pada tanggal 20 November 2020;
1404. 1 (satu) lembar asli surat Chek List CF Komodo Hotel yang di tandatangi atas nama pemohon Veronika Syukur dan di tanda tangani oleh petugas Front Office atas nama Menty pada tanggal November 2020;
1405. 2 (dua) lembar asli surat Formulir Permohonan Izin Usaha Pariwisata (Penyediaan Akomodasi) yang di tandatangi oleh Veronika Syukurtanggal 11 November 2020;
1406. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Keabsahan Dan Kebenaran Dokumen yang telah di tandatangi oleh Veronika Syukur Tanggal 11 November 2020;
1407. 1 (satu) lembar asli Surat dari Badan Pimpinan Cabang Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia/ BPC.PHRI Kabupaten Manggarai Barat, Nomor:01/CFKH/MB/2012 tanggal 22 Juni 2012, Perihal Permohonan Surat Rekomendasi dari PHRI Cab. Manggarai Barat;
1408. 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Badan Pengelolaan Keuangan Daerah atas nama : CF KOMODO yang di tandatangi oleh VERONIKA SYUKUR Tanggal 28 Februari 2020;
1409. 1 (satu) Lembar Fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD - Pajak Hotel) atas nama CF KOMODO tanpa tandatangan penyetor tanggal 28 Februari 2020;
1410. 1 (satu) Lembar asli Surat dari Pemerintah Republik Indonesia IZIN LOKASI atas nama VERONIKA SYUKUR dengan lokasi yang di setujui Jl.Alo Tanis.Lamtoro Kel.Labuan Bajo Kec.Komodo Kab.Manggarai Barat yang di terbitkan tanggal 30 Juli 2019 oleh Bupati Kab.Manggarai Barat;
1411. 1 (satu) Lembar asli surat Izin Usaha (Tanda Daftar Usaha Pariwisata) atas nama pemilik Veronika Syukur, nama usaha CF Komodo yang di terbitkan tanggal 4 Agustus 2020;
1412. 1 (satu) lembar asli surat Izin Lingkungan kepada Veronika Syukur yang diterbitkan pada tanggal 27 Oktober 2020 oleh Bupati Kabupaten manggarai Barat;
1413. 1 (satu) lembar fotocopy surat dari Pemerintah Republik Indonesia, Nomor Induk Berusaha (NIB) 0220202810745 kepada Veronika Syukur yang di terbitkan tanggal 4 Agustus 2020 oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal;
1414. 4 (empat) lembar fotocopy surat DPLH Operasional Hotel CF Komodo Di Jl. Alo Tanis, Lamtoro Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo,

Hal 146 dari 281 hal

Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabupaten Manggarai Barat Nomor: DLHK.660.1/08/VII/2020 Tanggal 07 Juli 2020;
1415. 1 (satu) lembar asli surat Rekomendasi Nomor :PPT.503.650/017/IX/2012 Tanggal 25 September 2012 untuk Ijin Prinsip Lokal (IPL) pekerjaan Pembangunan Hotel yang telah di tanda tangani oleh Drs. Naaman M. Jalesy,MM selaku Kepala Kantor Perijinan Terpadu Kabupaten Manggarai Barat;
1416. 1 (satu) lembar fotocopy surat Rekomendasi Nomor :DPMPTSP.503.650/092/VII/2019 Tanggal 30 Juli 2019 untuk Ijin Ptrinsip Pemanfaatn Ruang (IPPR) pekerjaan Hotel yang telah di tanda tangani oleh Ir. Abdurahman,MM selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
1417. 1 (satu) lembar fotocopy surat dari Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu untuk Izin Mendirikan Bangunan Nomor: KPPT.503.640/IMB/007/X/2012 tanggal 1 Oktober 2012 yang di berikan kepada Veronika Syukur dan telah di tanda tangani oleh Drs. Naaman M.Jalesy,MM selaku Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu;
1418. 1 (satu) lembar asli Surat Izin Jasa Penyedia Akomodasi Wisata Nomor : KPPT.503.556/09/XI/2012 Tanggal 10 November 2012;
1419. 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama Veronika Syukur;
1420. 1 (satu) lembar fotocopy NPWP atas nama Veronika Syukur;
1421. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Persetujuan Penyitaan Pemenuhan Komitmen Tanggal 27 Oktober 2020;
1422. 2 (dua) lembar fotocopy surat Perihal Rekomendasi UKL-UPL Nomor: BLH.660.1/Rek/62/VI/2012 Tanggal 20 Juni 2012;
1423. 1 (satu) unit Mesin Ketik merek Brother Deluxe 2213;
1424. 1 (Satu) berkas copian Permohonan Realisasi Permohonan Pendaftaran Tanah dari H. M. ADAM DJUDJE Di Lokasi Torro Lemma Batu Kallo, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat tanggal 12 November 2014.
1425. 1 (satu) Lembar asli slip aplikasi transfer / slip penyetoran Permata Bank atas nama pengirim Massimiliano De Reviziis kepada Supardi Tahiya sebesar Rp. 1,405,000,000,- (Satu Miliar Empat Ratus Lima Juta Rupiah) ke Nomor Rek. 1610003304453 Tanggal 12 Agustus 2016 sebagai pelunasan Karangan Supardi dan Suaib;
1426. 1 (satu) Lembar asli slip aplikasi transfer / slip penyetoran Permata Bank atas nama pengirim Massimiliano De Reviziis kepada Theresia Dewi Koroh Dimu sebesar Rp. 123,270,000,- (Seratus Dua Puluh Tiga Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah), ke Nomor Rek. 1610001345078 Tanggal 12 Agustus 2016 sebagai Honorarium PPAT Karangan;
1427. 1 (satu) Lembar asli slip aplikasi transfer / slip penyetoran Permata Bank atas nama pengirim Massimiliano De Reviziis kepada Ulce Irithrina Sudjateruna, SH. sebesar Rp. 605,000,000,- (Enam Ratus Lima Juta Rupiah), ke Nomor Rek. 1450005164252 Tanggal 12 Agustus 2016 sebagai Kembalikan Uang di Pinjam;
1428. 1 (satu) Lembar asli slip aplikasi transfer / slip penyetoran Permata Bank atas nama pengirim Massimiliano De Reviziis kepada Andrea Ferrero sebesar Rp. 50,000,000,- (Lima Puluh Juta Rupiah), ke Nomor Rek. 0265020446 Tanggal 12 Agustus 2016 (Uang dari Manfredi);
1429. 1 (satu) Lembar asli slip aplikasi transfer / slip penyetoran Permata Bank atas nama pengirim Massimiliano De Reviziis kepada Theresia Dewi Koroh Dimu sebesar Rp. 440,250,000,- (Empat Ratus Empat

Hal 147 dari 281 hal Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Puluh Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), ke Nomor Rek. 1610001345078 Tanggal 12 Agustus 2016 sebagai Pajak Penjual Karangan;
1430. 1 (satu) Lembar asli slip aplikasi transfer / slip penyetoran Permata Bank atas nama pengirim Massimiliano De Reviziis kepada Theresia Dewi Koroh Dimu sebesar Rp. 1,000,000,000,- (Satu Miliar Rupiah), ke Nomor Rek. 1610001345078 Tanggal 12 Agustus 2016 sebagai Titipan Uang Untuk Jalan;
1431. 1 (satu) Lembar asli slip aplikAasi transfer / slip penyetoran Permata Bank atas nama pengirim Massimiliano De Reviziis kepada H. Sukri sebesar Rp. 2,453,000,000,- (Dua Miliar Empat Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah), ke Nomor Rek. 1610003304289 Tanggal 12 Agustus 2016 sebagai Pelunasan Karangan;
1432. 3 (tiga) Lembar Fotocopy Surat Perjanjian yang telah ditanda tangani oleh H.Sukri dan Veronika Syukur sebagai Pihak Pertama tanggal 13 September 2013;
1433. 1 (satu) buku copy Kuasa yang dibuat oleh Notaris/PPAT SITI ZUBAIDAH, SH. tanggal 07 Oktober 2013, Nomor: 07.
1434. Uang Sejumlah Rp. 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah);
1435. 1 (satu) Lembar fotocopy Kwitansi pembayaran Harga Sebuah Mobil Rush Dengan Nomor Polisi EB 1219 GA sebesar Rp 47.500.000 (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) Tanggal 1 Oktober 2020 yang telah di tanda tangani oleh bapak Blasius Beo selaku penerima dan Bapak Agus Subagio selaku saksi;
1436. 2 (dua) lembar foto mobil Rush;
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain.
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang telah menjatuhkan Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kpg tanggal 30 Juni 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AGUSTINUS CHRISTOFORUS DULA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal 148 dari 281 hal Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah Buku Agenda Surat Masuk-Keluar Sub Bagian Adm. Pem Umum;
2. 1 (satu) buah buku Surat Masuk-Keluar 2012;
3. 1 (satu) buah Buku Keluar-Masuk Surat TAPEM 2012;
4. 1 (satu) buah Buku (3) Agenda Surat Masuk-Keluar Tahun 2016;
5. 1 (satu) buah Buku Surat Masuk-Keluar TAPEM 2013;
6. 1 (satu) buah Buku Agenda Surat Masuk 2014 (2);
7. 1 (satu) buah Buku Agenda Surat Masuk-Keluar 2015 Bagian Adm. Pem. Umum;
8. 1 (satu) buah Buku Agenda Surat Masuk-Keluar (2) Tahun 2016;
9. 1 (satu) buah Buku Surat Masuk TAPEM 2014 (1);
10. 1 (satu) buah Buku Agenda Lanjutan 2015 Masuk-Keluar;
11. 1 (satu) buah Buku Agenda Surat/ Keluar 2016 (1);
12. 1 (satu) buah Buku Agenda Surat Keluar 2016 (4);
13. 1 (satu) buah Buku Surat Keluar Masuk Thn 2017 (4);
14. 1 (satu) buah Buku Agenda 2018 (2);
15. 1 (satu) buah Buku Agenda Surat Keluar-Masuk Thn 2019;
16. 1 (satu) bundel Asli Surat Undangan Tindak Lanjut Dari Peninjauan Lokasi;
17. 1 (satu) lembar Asli Surat Undangan Rapat, Nomor: Pem.130/372/X/2014 Tgl 13 Oktober 2014;
18. 1 (satu) lembar Dokumen Mohon Surat Penegasan, Nomor : Pem.131/192/VII/2018 Tgl 30 Juli 2018;
19. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Penegasan, Nomor: Pem.131/148/VI/2018 Tgl 06 Juni 2018;
20. 1 (satu) lembar Asli Surat Pensertifikatan Tanah Pemda, Nomor: Pem.130/184/VI/2014 Tgl 11 Juni 2014;
21. 1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan Sertifikat Tanah Pemerintah Daerah, Nomor: Pem.130/113/V/2014 Tgl 14 Mei 2014;
22. 1 (satu) bundel Fotocopy surat Keterangan, Nomor: Pem.131/205/XI/2017 Tgl 13 September 2017;
23. 1 (satu) bundel Asli Surat Keterangan, Tanggal 8 Januari 2018;
24. 1 (satu) lembar Asli Surat Undangan Mediasai, Nomor: Pem.130/28/II/2018 Tgl 8 Februari 2018;
25. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Pendataan Masalah Tanah Pemda, Nomor: Pem.130/405/XII/2014 Tgl 12 Desember 2014;
26. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Jawaban Atas Somasi, Nomor: Pem.131/277/XII/2017 Tgl 4 Desember 2014;
27. 1 (satu) buah Buku Agenda Surat Keluar-Masuk 2018;
28. 1 (satu) bundel Telaahan Staf, Perihal : Tindak Lanjut Proses Sertifikat Hak Milik Tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat di Toroh Lemma Batu Kalo / Karang, , Nomor : Pem.130/138/V/2018, tanggal 18 Mei 2018;
29. 1 (satu) lembar Asli Surat Mohon Pensertifikatan Tanah Pemda di Toroh Lemma Batu Kalo / Karang, Nomor : Pem.130/84/III/2015, Tanggal 17 Maret 2015;
30. 1 (satu) bundel Asli Dokuman Tanggapan Atas Klarifikasi, Nomor : Pem. 131/119/IV/2018, Tanggal 30 April 2018;
31. 1 (satu) lembar Asli Surat Undangan Nomor : Pem.131/155/VI/2018, Tanggal 26 Juni 2018;
32. 1 (satu) lembar Asli Surat Penyelesaian Setifikat Tanah Pemda di Kerangan, Nomor : Pem.130/115/IV/2016, Tanggal 27 April 2016;

Hal 149 dari 281 hal Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. 1 (satu) lembar Asli Surat Undangan Nomor : Pem.130/330/X/2014, Tanggal 16 Oktober 2014;
34. 1 (satu) lembar Asli Surat Undangan Nomor : Pem.130/331/X/2014, Tanggal 16 Oktober 2014;
35. 1 (satu) lembar Asli Surat Undangan Nomor : Pem.130/338/X/2014, Tanggal 20 Oktober 2014;
36. 1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan untuk Menentukan Batas-Batas Tanah Nomor : Pem.131/119/IV/2015, Tanggal 22 April 2015;
37. 1 (satu) lembar Asli Surat Undangan Rapat Nomor : Pem.130/172/VII/2015, Tanggal 02 Juli 2015;
38. 1 (satu) lembar Asli Surat Undangan Rapat Nomor : Pem.130/204/VIII/2015, Tanggal 11 Agustus 2015;
39. 1 (satu) lembar Asli Surat Undangan Rapat Nomor : Pem.130/183/VII/2015, Tanggal 28 Juli 2015;
40. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Permasalahan Tanah di Toroh Lemma Batu Kallo Kelurahan Labuan Bajo Kecamatan Komodo, Nomor : Pem.131/224/X/2017, tanggal 11 Oktober 2017;
41. 1 (satu) bundel Asli Surat Jawaban atas Somasi, Nomor : Pem.131/277/XII/2017, tanggal 4 Desember 2017;
42. 1 (satu) bundel Asli Surat Mohon Pensertifikatan Tanah Pemda di Toroh Lemma Batu kallo / Kerangan, Nomor : pem.130/84/III/2015, tanggal : 17 Maret 2015;
43. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Mohon Pensertifikatan tanah Pemda di Toroh Lemma Batu Kallo / Karangan, Nomor : 553/53.15.300/VII/2018, tanggal 10 Juli 2018;
44. 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa Nomor : PEM.130/108/IV/205, tanggal 1 April 2015;
45. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Permohonan Penegasan Penyerahan Tanah, Nomor : Pem.131/76/III/2015, tanggal 06 Maret 2015;
46. 1 (satu) lembar Asli Surat Mohon Klarifikasi / Jawaban dan Petunjuk, Nomor : Pem.131/168/VII/2018, tanggal : 6 Juli 2018;
47. 1 (satu) jepit Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah, Nomor : Pem.130/189/IV/2015;
48. 1 (satu) bundel Asli Surat Tanda Terima Berkas Tanah Pemkab Manggarai Barat Lokasi Keranga, tanggal 8 April 2015;
49. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan/Penegasan, tanggal 22 Oktober 2014;
50. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Penjelasan tentang Tanah Pemda, Nomor : Pem.131/137/V/2015, tanggal 13 Mei 2015;
51. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Pembatalan / Penarikan Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Hak Atas Tanah, Nomor : Pem.593/KLB/1873/XI/2014, tanggal 27 Nopember 2014;
52. 1 (satu) bundel Fotocopy Dokumen Kesimpulan Rapat Muspida Tentang Pembahasan Tanah Pemda di Keranga Kelurahan Labuan Bajo tanggal 21 Oktober 2014;
53. 1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan Penegasan Penyerahan Tanah, Nomor : Pem.131/76/III/2015, tanggal 06 Februari 2015;
54. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Surat Keterangan Penegasan tentang Perolehan Tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai di Karanga Kecamatan Komodo, tanggal 8 Maret 2018;
55. 1 (satu) lembar Asli Surat Penegasan Penyelesaian Sertifikat Tanah Pemda, Nomor : Pem.130/139/V/2016, tanggal 16 Mei 2016;

Hal 150 dari 281 hal Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Klarifikasi, Nomor : Pem.131/42/II/2018, tanggal 1 Februari 2018;
57. 1 (satu) lembar Asli Surat Undangan Rapat Lanjutan, Nomor : Pem.130/191/VIII/2017, tanggal 22 Agustus 2017;
58. 1 (satu) lembar Asli Surat Menghadap Bupati Manggarai Barat, Nomor : Pem.130/191/VI/2014, tanggal 16 Juni 2014;
59. 1 (satu) lembar Asli Surat Undangan, Nomor : Pem.130/208/VI/2014, tanggal 25 Juni 2014;
60. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pengiriman Notulen Rapat dan Berkas Tanah Kerangan, Nomor : Pem.131/378/XI/2014, tanggal 26 November 2014;
61. 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa, Nomor : Pem.131/40/III/2014, Tanggal 3 Maret 2014;
62. 1 (satu) bundel Fotocopy Peta Sketsa dikutip dari peta sketsa hasil penataan oleh H. Adam Djudje, tanggal 26-4-1997;
63. 1 (satu) bundel Fotocopy Dokumen Tanah Adat di Lokasi Toro Lema Batu Kallo (Kerangan) Luas 30 HA terjadi tumpang tindih penyerahan oleh Fungsionaris Adat/Tua Adat Nggorang, Nomor : 01/KDE/II/2014, tanggal 10-1-2014;
64. 1 (satu) jepit Asli Surat Penyampaian Copyan Dokumen Tanah Toro Lama Batu Kalo / Karangan, Nomor : Pem.130/212/X/2019, tanggal 02 Oktober 2019;
65. 1 (satu) bundel Fotocopy Dokumen Klarifikasi Tanah Adat di Lokasi Toro Lemma Batu Kalo (Karangan) Luas 30 Ha diserahkan oleh Fungsionaris Adat/Tua Adat Nggorang kepada Pemda Tigkat II Manggarai pada tahu 1997, tanggal 20-06-2013;
66. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Keterangan, tanggal 5-4-2013;
67. 1 (satu) jepit Asli Surat dari Dorman Paulus, S.H., & Partners (Advokat dan Konsultan Hukum) kepada Camat Komodo di Labuan bajo, tanggal 28 Nopember 2017;
68. 1 (satu) jepit Fotocopy Surat Pernyataan Sikap Bersama Ahli Waris dan Pelaku-Terdakwa Tanah Pemda Manggarai Barat di Karangan / Toroh Lemma Batu kallo, tanggal 3 Mei 2018;
69. 1 (satu) lembar Asli Surat Penegasan, Nomor : Pem.130/98/IV/2019, tanggal 01 April 2019;
70. 1 (satu) jepit Fotocopy Surat Ukur Gambar Situasi;
71. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh H. Moh. A. Adam Djudje, tanggal 30-3-2015;
72. 1 (satu) bundel Fotocopy Dokumen Tanah Pemda di Kranga Kelurahan Labuan Bajo Kecamatan Komodo;
73. 1 (satu) bundel Fotocopy Dokumen Laporan Penanganan Masalah tanah, Nomor : Trantib.300/1135/X/2014, tanggal 14 Oktober 2014;
74. 1 (satu) jepit Asli Surat Somasi / Peringatan, Nomor : 010/MAA-SOM/XI/2017, tanggal 28 November 2017;
75. 1 (satu) bundel Asli Surat Mohon Persetujuan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat, Nomor : Pem.130/319/XII/2016, tanggal 2 Desember 2016;
76. 75a. Asli Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat, Nomor: 217/KEP/HK/2015 Tanggal 24 Agustus 2015;
77. 1 (satu) jepit Fotocopy Dokumen Ringkasan Penjelasan Tentang Tanah Pemerintah Daerah di Krangan Kelurahan Labuan Bajo- Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
78. 1 (satu) lembar Asli Surat Pembangunan Jalan, Nomor: Pem.131/30/II/2018, Tanggal 24 Januari 2018;

Hal 151 dari 281 hal Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79. 1 (satu) jepit Asli Surat Pemberitahuan, Nomor: Pem.131/131/V/2018, Tanggal 14 Mei 2018;
80. 78a. Asli Surat Penertiban Sertifikat, Nomor: Pem.130/29/II/2017, Tanggal 13 Pebruari 2017;
81. 1 (satu) jepit Asli Surat Undangan Mediasi Masalah Tanah, Nomor: Trantib.300/1532/X/2016 Tanggal 19 Oktober 2016;
82. 1 (satu) bundel Fotocopy Dokumen Sanggahan Atas Tanah Alm. Haji Sup Bin Makki Ahli Waris/ Pemegang Kuasa Menguru Tanah Warisan An. Haji Mutajib dan Wahyudin Bin Haji Mustajib;
83. 1 (satu) jepit Fotocopy Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Atas Tanah, Nomor: Lbj.593/111/I/2014 Tanggal 23 Januari 2014;
84. 1 (satu) jepit Asli Surat Permohonan Pengukuran dan Rincian Biaya Dalam Rangka Proses Pensertifikatan Tanah Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Seluas 30 Ha, Nomor: 291/53.14/300-6/III/2015 Tanggal 25 Maret 2015;
85. 1 (satu) jepit Asli Surat Pengantar Data Permasalahan Urrusan Pemerintahan Umum, Nomor: Pem.131/184/VIII/2019 Tanggal 19 Agustus 2019;
86. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keberatan dan Penegasan , Nomor: Pem.131/201/IX/2019 Tanggal 11 September 2019;
87. 1 (satu) lembar Asli Surat Klarifikasi dab Penegasan, Nomor: Pem.130/215/X/2019 Tanggal 03 Oktober 2019;
88. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keterangan, Nomor: Pem.131/220/X/2017 Tanggal 02 Oktober 2017;
89. 1 (satu) lembar Fotocopy Peta Situasi;
90. 1 (satu) jepit Asli Surat Permohonan Sertifikat, Nomor: Pem.131/45/II/2011 Tanggal 17 Pebruari 2011;
91. 1 (satu) jepit Asli Surat Pendataan Tanah Pemda, Nomor: Pem.130/171/X/2010 Tanggal 06 Oktober 2010;
92. 1 (satu) jepit Asli Surat Pendataan Tanah Pemerintah Daerah, Nomor: Pem.130/4/I/2011 Tanggal 6 Jabuari 2011;
93. 1((satu) buah Buku Sambungan Agenda Surat Masuk AS I 2013-2014;
94. 1 (satu) buah Buku AS I Sambungan Agenda Surat Masuk tahun 2014;
95. 1 (satu) buah Buku Peraturan Bupati Manggarai Barat, Nomor: 38 Tahun 2015 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Barat tahun Anggaran 2015;
96. 1 (satu) jepit Fotocopy Dokumen Masalah Hukum Adat Tanah di Kabupaten Manggarai di Kaitan Dengan Pelaksanaan Undang-Undang Pokok Agraria Tanggal 15 September 1983;
97. 1 (satu) bundel asli Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Tahun Anggaran 2015;
98. 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2015 Bagian Administrasi pemrintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat;
99. 1 (satu) lembar bentuk materai dari tahun 1960 - 2005;
100. 1 (satu) bundel Fotocopy Arsip Tanjung Poko- Karanga;
101. 1 (satu) jepit Fotocopy Surat Pengukuhan Penyerahan Tanah Adat, tanggal 09 oktober 2019;
102. 1 (satu) berkas Fotocopy dalam map kuning Surat Keterangan yang ditanda tangani oleh Drs. Agustinus CH. Dula, Tanggal 08 Januari 2018;

Hal 152 dari 281 hal

Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

103. 1 (satu) bundel Fotocopy Berita Acara Serah Terima Dokumen Hasil Klarifikasai P3D Antara Pemerintah Kabupaten Manggarai dengan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, Nomor: Pem.115/30.a/I/2005 Tanggal 24 Januari 2005;
104. 1 (satu) jepit Fotocopy Surat Kelengkapan Berkas pensertifikatan tanah tanah pemda di toro lemma batu kallo, nomor: Pem.130/205/VIII/2018 Tanggal 28 Agustus 2018;
105. 1 (satu) buah Buku Agenda Surat Masuk Tahun 2020;
106. 1 (satu) jepit Asli Surat Undangan Klarifikasi, Nomor: 92/53.15/600-13/I/2015 Tanggal 21 Januari 2015;
107. 1 (satu) berkas Fotocopy dalam Map Biru tentang Pencabutan Surat Kuasa An. Yohanes Ongge;
108. 1 (satu) bundel Fotocopy Undang-undang RI Nomor 8 Tahu 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
109. 1 (satu) Lembar fotocopy Daftar Sertifikat Tanah Pemda Tahun 2014/2015;
110. 1 (satu) jepit Asli Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah;
111. 1 (satu) buah Buku Agenda Warna Kuning Yang Berisi Daftar Tanah Pemda Manggarai Barat yang sudah di Sertifikat;
112. 1 (satu) map hijau yang bertuliskan Dokumen Tanah Pemda Kab. Manggarai Barat yang mau di Sertifikat;
113. 1 (satu) map Hijau yang bertuliskan Alas Hak Pensertifikatan tanah Pemda;
114. 1 (satu) buah Buku Agenda batik bertuliskan Agenda Surat Keluar & Masuk Bagian TAPEM Thn. 2017;
115. 1 (satu) Map warna merah muda bertuliskan SK 140 Asli (Tanah Pemempatan);
116. 1 (satu) Map Batik yang Bertuliskan TPU;
117. 1 (satu) warna merah muda yang bertuliskan Kementerian Agama (Permohonan Pengalihan Aset);
118. 1 (satu) bundel map snelhecter bertuliskan Asli Penyerahan & Berita Acara Tanah Kecamatan Welak;
119. 1 (satu) map Biru Bertuliskan dokumen Asli Penyerahan Tanah Pemda Luas : 328,79 Ha, Termasuk Luas Perkiraan \pm 70 Ha disebut dalam Surat penyerahan Tahun 1961;
120. 1 (satu) map snelhecter bertuliskan Dok. Water Treamen;
121. 1 (satu) buah Buku agenda Batik Bertuliskan Buku Inventaris Masalah Tanah TAPEM;
122. 1 (satu) bundel Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Milik;
123. 1 (satu) map snelhecter bertuliskan Dokumen Asli Tanah Lengkong Benteng kecamatan Komodo;
124. 1 (satu) Map hijau Bertuliskan bandara;
125. 1 (satu) Map Batik Warna Ungu Berisikan Peta Bidang Tanah;
126. 1 (satu) Map Warna Biru bertuliskan BA. Tanah Puskesmas Bari;
127. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Penyerahan Sertifikat, Tanggal 18 November 2014;
128. 1 (satu) jepit Fotocopy Surat Penyampaian Hasil Rekon/ Pengukuran Pengembalian Batas Sertifikat Tanah Bandara Komodo Labuan Bajo, Nomor: 636/PL.303/X/Kmd-2014 Tanggal 16 Oktober 2014;
129. 1 9satu) jepit Fotocopy Berita Acara Pnetapan Tapal Batas Luar dari tanah-tanah yang telah diserahkan ioleh tua-tua adat sesuai Surat Pernyataan Penegasan Penyerahan Hak Atas Tanah Untuk Kota Baru

Hal 153 dari 281 hal Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kecamatan Komodo dan Untuk Pengembangan Kota Labuan Bajo Kepada Pemerintah Daerah Tingkat II Manggarai Tanggal 16 Maret 1984;
130. 1 (satu) bundel fotocopy surat pernyataan sikap dari keluarga besar rahong bore tentang dan pora desa tentang Tanggal 24 Juni 2006;
131. 1 (satu) jepit Fotocopy sertifikat (Tanda Bukti Hak) Hak Pengelolaan;
132. 1 (satu) Map Kuning berisikan Surat Pernyataan Riwayat Penguasaan Tanah Pemda- Tingkat II Manggarai;
133. 1 (satu) bundel Map Snelhecter berisikan Surat Tugas, No: Pem.181.1/1384/VII/1993 Tanggal 20 Juli 1993;
134. 1 (satu) lembar Peta Kabupaten Manggarai Barat;
135. 1 (satu) Surat pertimbangan agar tidak melayani proses penerbitan hak atas tanah a.n H.M Abubakar Adam Djudje di Karang, Nomor: Pem.138/1311/XII/2014 Tanggal 02 Desember 2014;
136. 2 (dua) Berkas Surat Mohon tidak melakukan proses pengukuran tanah a.n H.M Abubakar Adam Djudje dan Ente Puasa, DKK Nomor: Pem.593/229/III/2014 Tanggal 01 Maret 2014;
137. 1 (satu) surat mediasi masalah tanah, Nomor: Trantib/300/1024/IX/2014 Tanggal 20 September 2014;
138. 1 (satu) surat peninjauan lokasi Nomor: 633/53.15/600.13/2014 Tanggal 06 juni 2014;
139. 1 (satu) surat Undangan Mediasi, nomor: 634/53.15/600.13/2014 Tanggal 10 Juni 2014;
140. 1 (satu) Surat Pemriksaan Sidan Panitia 'A' an. Suaib Taiya dan Supardi Tahiya yang terletak di karang, kelutahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nomor: 1004/53.15/200.3/IX/2014 Tanggal 16 September 2014;
141. 1 (satu) Surat Undangan Mediasi, Nomor:01/53.15/600-13/IX/2014 Tanggal 10 September 2014;
142. 1 (satu) surat kelengkapan berkas pensertifikatan tanah pemda di toro lemma batu kallo, Nomor: Pem.130/205/VIII/2018 Tanggal 28 Agustus 2018;
143. 1 (satu) Surat Pengukuhan penyerahan tanah adat, tanggal 06 Agustus 2018 di tanda tangani oleh H. Umar ishaka, H. Ramang Ishaka, Drs. Anton us ambatan, Yosep Latif, Sarifudin Malik,S.ST dan Abdullah Nur,S.IP;
144. 1 (satu) Surat Permohonana pengukuran dan rincian biaya ukur terhadap bidang tanah an. Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, Nomor: 156/6-53/IV/2015 Tanggal 20 April 2015;
145. 1 (satu) Asli Surat pengiriman gambar ukur, Nomor:Pem.130/205/VIII/2015 Tanggal 13 Agustus 2015;
146. 1 (satu) Asli Surat Klarifikasi, Nomor: Pem.130/770/X/2013 Tanggal 25 Oktober 2013;
147. 1 (satu) bundel Map Merah bertuliskan Dokumen Arsip Keranga Lab. Bajo, 12-10-2020;
148. 1 (satu) unit Xiaomi Redmi warna putih imei 1: 880418043085482 dan imei 2: 880418043085490, beserta SIM Card;
149. 1 (satu) bundel asli dokumen penjelasan atau klarifikasi tanah pemda tanggal 07 Maret 2018 yang di tanda tangani oleh H.Adam Djudje;
150. 1 (satu) unit Handphone warna merah dengan nomor IMEI 1 : 861949044143390, IMEI 2 : 861949044143382, beserta 1 buah SIM Card



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

151. 1 (satu) lembar Gambar Ukur, NIB: 24.16.01-16: 02760 & 24.16.01.16: 02761 Tahun: 2420/2016, dengan nama Pemohon : MAHMUD NIP alamat LABUAN BAJO, tanggal: - ;
152. 1 (satu) lembar Gambar Ukur, NIB: 02392 & 02393, Tahun : 634, 633 / 2013, dengan nama Pemohon : SUKRI, SUPARDI TAHIYA, SUAIB TAHIYA, tanggal: ;
153. 1 (satu) lembar Gambar Ukur, NIB: 24.16.01.16. 02698, Tahun 2464 / 2015, dengan nama pemohon: MAHMUD NIP, alamat LABUAN BAJO, tanggal: 22 – 10 - 2015;
154. 1 (satu) lembar Gambar Ukur, NIB: -, Tahun 2013, dengan nama pemohon: ENTE PUASA, DAHERING KORO, HASANUDING, JUAIDI, SUHARDI, HASRA ORE, MEIHAYANG, SUKAWATI, SAMSUDING, SARIFUDIN, alamat LABUAN BAJO, tanggal: 10 – 10 - 2013;
155. 1 (satu) lembar Gambar Ukur, NIB: -, Tahun: -, dengan nama pemohon: DAVID ANDRE PRATAMA, alamat JL. PULOMAS TIMUR 2A2 JAKARTA TIMUR, tanggal: - ;
156. 1 (satu) lembar Gambar Ukur, NIB: 021651, Tahun: 64/2013, dengan nama pemohon: DAE KAYUS, alamat LABUAN BAJO, tanggal: 11 – 09 - 2015 ;
157. 1 (satu) lembar Gambar Ukur, NIB: 02537, 2393, 2392, Tahun: 541/2014, 634/2013, 633/2013, dengan nama pemohon: H. SUKRI, SUAIB, SUPARDI T, alamat: -, tanggal: - ;
158. 1 (satu) lembar fotocopy lampiran 13 tanggal 08 April 2016 atas nama FATIMA BADO SALAM;
159. 2 (dua) lembar fotocopy formulir isian 402 atas nama FATIMA BADO SALAM tanggal 08 April 2016;
160. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Pernyataan atas nama FATIMA BADO SALAM tanggal 08 April 2015;
161. 1 (satu) lembar fotocopy Data Subyek dan Obyek Hak atas nama FATIMA BADO SALAM tanggal 08 April 2016;
162. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Hak atas tanah nomor: Pem.593/631.a/IV/2016 atas nama KAMIS HAMNU (alm) tanggal 08 April 2016;
163. 2 (dua) lembar fotocopy Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Sporadik atas nama FATIMA BADO SALAM tanggal 08 April 2016;
164. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Tanah Tidak Dalam Sengketa atas nama FATIMA BADO SALAM tanggal 08 April 2016;
165. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Penanaman Tanda Batas Tanah atas nama FATIMA BADO SALAM tanggal 08 April 2016;
166. 1 (satu) lembar fotocopy Pengumuman tanpa nomor, tanpa nama, tanpa tanggal;
167. 1 (satu) lembar fotocopy data panitia pemeriksa tanah A;
168. 1 (satu) bendel fotocopy Risalah Penelitian data yuridis dan penetapan batas tanggal 08 April 2016;
169. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keterangan dari Haji Muhammad Abubakar Adam Djuje tanggal 05 Januari 2016;
170. 4 (empat) lembar fotocopy Surat Bukti Penyerahan Tanah Adat atas nama KAMIS HAMNU tanpa tanggal;
171. 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Kematian atas nama KAMIS HAMNU tanggal 28 Februari 2019;
172. 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Terima Sementara Pajak Bumi dan Bangunan atas nama FATIMA BADO SALAM;

Hal 155 dari 281 hal

Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

173. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama FATIMA BADO SALAM, lokasi Karanganyar tanggal 15 Oktober 2018;
174. 2 (dua) lembar asli Surat Keterangan Waris tanggal 09 Mei 2016;
175. 2 (dua) lembar asli Surat Pernyataan Penolakan Waris tanggal 09 Mei 2016;
176. 2 (dua) lembar fotocopy Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas: 4624/2018 atas nama FATIMA BADO SALAM tanggal 16 Agustus 2016;
177. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Permohonan Keterangan dari FATIMA BADO SALAM kepada BUPATI MANGGARAI BARAT tanggal 22 September 2017;
178. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Bupati Manggarai Barat nomor: Pem.131/220/X/2017 perihal Surat Keterangan tanggal 02 Oktober 2017;
179. 1 (satu) lembar fotocopy laporan kehilangan barang nomor: LKB/018/II/2017/NTT/Res Mabar tanggal 11 Januari 2017;
180. 1 (satu) lembar fotocopy Peta Bidang Tanah atas nama FATIMA BADO SALAM tanggal 15 November 2018;
181. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemberitahuan Sidang Panitia A nomor: 93/53.15.HP.01/03/6/II/2019 tanggal 22 Februari 2019 atas nama FATIMA BADO SALAM;
182. 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Hadir Sidang Panitia A tanggal 27 Februari 2019 atas nama FATIMA BADO SALAM, DKK;
183. 1 (satu) bendel fotocopy Notulen Sidang Panitia A tanggal 27 Februari 2019 atas nama FATIMA BADO SALAM, STEFANUS EFFENDI, DOMINIKUS DALO, PT. ASDP PERSERO;
184. 2 (dua) lembar asli Lampiran 13 atas nama SUHARDI tanpa tanggal tahun 2013;
185. 4 (empat) lembar asli Formulir Isian 402 atas nama SUHARDI tanpa tanggal, tahun 2013;
186. 2 (dua) lembar asli Data Subyek dan Obyek Hak atas nama SUHARDI tanpa tanggal, tahun 2013;
187. 2 (dua) lembar asli Surat Pernyataan Penanaman Tanda Batas Tanah atas nama SUHARDI tanpa tanggal, tahun 2013;
188. 2 (dua) lembar asli pernyataan penguasaan fisik bidang tanah sporadik atas nama SUHARDI tanpa tanggal, tahun 2013;
189. 2 (dua) lembar asli surat pernyataan tidak dalam keadaan sengketa atas nama SUHARDI tanpa tanggal, tahun 2013;
190. 2 (dua) lembar asli Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Hak Atas Tanah atas nama SUHARDI, tanpa nomor, tanpa tanggal, tahun 2013;
191. 2 (dua) lembar asli dan 4 (empat) lembar fotocopy Surat Keterangan Belum/Tidak kena Pajak Nomor: Lbj.973/5038/VIII/2013 atas nama SUHARDI tanggal 03 Agustus 2013;
192. 2 (dua) lembar asli dan 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah, nomor: Lbj.593/5109/VIII/2013 atas nama SUHARDI, tanggal 19 Agustus 2013;
193. 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan Pemilikan Tanah / Penguasaan Tanah atas nama SUHARDI tanggal 02 Agustus 2013;
194. 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Bukti Penyerahan Tanah Adat atas nama SUHARDI tanpa tanggal & tahun;
195. 2 (lembar) fotocopy surat penyerahan kuasa atas nama Hj Ishaka kepada Hj. Adam Djuje tanggal 01 November 1996;
196. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Penyerahan Tanah Adat atas nama Hj. Muhammad Abubakar Adam Djuje tanggal 11 Februari 2013;

Hal 156 dari 281 hal Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

197. 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Drs. G. P. Ehok tanggal 10 Mei 2013;
198. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Surat Kuasa ENTE PUASA, dkk kepada FRANKY CH. LETIK tanggal 22 Agustus 2013;
199. 4 (empat) lembar fotocopy legalisir KTP atas nama SUHARDI ENTE;
200. 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama SUHARDI ENTE;
201. 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama SUHARDI ENTE;
202. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga atas nama SUHARDI ENTE;
203. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama ABDUL HARIS NASIPIN, lokasi Batu Gosok – Kenanga, tanggal 15 Maret 2013;
204. 1 (satu) lembar asli dan 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Laporan Kehilangan Barang Nomor: LKB/522/XI/2012/NTT/Res Jabar tanggal 22 November 2012;
205. 2 (dua) lembar asli pengumuman tanpa nomor, tanpa nama, tanpa tanggal, tahun 2013;
206. 2 (dua) lembar asli daftar nama Panitia Pemeriksa Tanah A, tanpa nomor, tanpa tanggal, tanpa tahun;
207. 2 (dua) bendel Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas;
208. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran permohonan SK Hak Nomor Berkas: 2416-2439/2013 atas nama SUHARDI ENTE tanggal 05 September 2013;
209. 2 (dua) lembar asli Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan: 2439/2013 atas nama SUHARDI ENTE, tanggal 05 September 2013;
210. 2 (dua) lembar asli tanda terima dokumen Nomor Berkas Permohonan: 2439/2013 atas nama SUHARDI ENTE, tanggal 05 September 2013;
211. 2 (dua) lembar asli surat tugas survey tematik dan potensi tanah nomor: 209/ST-24.16/X/2013 tanggal 07 Oktober 2013 atas nama pemohon SUHARDI ENTE;
212. 4 (empat) lembar asli surat tugas pengukuran nomor: 366/ST-24.16/X/2013 tanggal 07 Oktober 2013 atas nama pemohon SUHARDI ENTE;
213. 2 (dua) lembar asli lampiran 13 atas nama SARIFUDIN tanggal 02 September 2013;
214. 4 (empat) lembar asli formulir isian 402 atas nama SARIFUDIN tanpa tanggal, tahun 2013;
215. 2 (dua) lembar asli data subyek dan obyek hak atas nama SARIFUDIN tanpa tanggal, tahun 2013;
216. 2 (dua) lembar asli surat pernyataan penanaman tanda batas tanah atas nama SARIFUDIN tanpa tanggal, tahun 2013;
217. 2 (dua) lembar asli surat pernyataan fisik bidang tanah sporadik atas nama SARIFUDIN, tanpa tanggal, tahun 2013;
218. 2 (dua) lembar asli surat pernyataan tanah tidak dalam keadaan sengketa atas nama SARIFUDIN tanpa tanggal, tahun 2013;
219. 2 (dua) lembar asli surat keterangan riwayat pemilikan hak atas tanah atas nama SARIFUDIN, tanpa nomor, tanpa tanggal, tahun 2013;
220. 2 (dua) lembar asli pengumuman tanpa nomor, tanpa tanggal, tahun 2013;
221. 2 (dua) lembar asli daftar nama panitia pemeriksa tanah A, tanpa nomor, tanpa tanggal, tanpa tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

222. 1 (satu) lembar asli dan 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir surat keterangan pemilikan tanah/penguasaan tanah atas nama SARIFUDIN, tanpa nomor, tanggal 02 Agustus 2013;
223. 1 (satu) bendel Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas;
224. 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Bukti Penyerahan Tanah adat kepada SARIFUDIN tanpa tanggal, tanpa tahun;
225. 1 (satu) lembar asli dan 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama SARIFUDIN nomor: Lbj.593/5111/VIII/2013 tanggal 17 Agustus 2013;
226. 1 (satu) lembar asli dan 4 (empat) lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan Belum/Kena Pajak nomor: Lbj.973/5043/VIII/2013 tanggal 03 Agustus 2013 atas nama SARIFUDIN;
227. 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan dari Drs. G. P. Ehok tanggal 10 Mei 2013;
228. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Penyerahan Kuasa dari Hj. Ishaka dan Haku Mustafa kepada Hj. Adam Djuje tanggal 01 November 1996;
229. 1 (satu) lembar surat keterangan penyerahan tanah adat dari Hj. Muhammad Abubakar Adam Djuje kepada ENTE PUAS, DKK tanggal 11 Februari 2013;
230. 1 (satu) lembar asli dan 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Laporan Kehilangan Barang nomor: LKB/519/XI/2012/NTT/Res Mabar tanggal 23 November 2012;
231. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Surat Kuasa dari ENTE PUASA, DKK kepada Franky Ch. Letik tanggal 24 Agustus 2013;
232. 4 (empat) lembar fotocopy legalisir KTP atas nama SARIFUDIN;
233. 5 (lima) lembar fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama SARIFUDIN;
234. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama ABDUL HARIS NASIPIN, lokasi Batu Gosok – Kenanga, tanggal 05 Maret 2013;
235. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran permohonan SK Hak nomor berkas: 2433/2013 atas nama SARIFUDIN tanggal 05 September 2013;
236. 2 (dua) lembar asli Surat Perintah Setor Nomor berkas permohonan: 2433/2013 atas nama SARIFUDIN tanggal 05 September 2013;
237. 2 (dua) lembar asli Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan: 2433/2013 atas nama SARIFUDIN tanggal 05 September 2013;
238. 2 (dua) lembar asli surat tugas survey tematik dan potensi tanah nomor: 202/ST-24.16/X/2013 atas nama pemohon SARIFUDIN tanggal 07 Oktober 2013;
239. 2 (dua) lembar asli Surat Tugas Pengukuran nomor: 361/ST-24.16/X/2013 atas nama pemohon SARIFUDIN tanggal 07 Oktober 2013;
240. 2 (dua) lembar asli Lampiran 13 atas nama JUAIDI KORO tanggal 02 September 2013;
241. 4 (empat) lembar asli formulir isian 402 atas nama JUAIDI KORO tanpa tanggal, tahun 2013;
242. 2 (dua) lembar asli data subyek dan obyek hak atas nama JUAIDI KORO tanpa tanggal tahun 2013;
243. 2 (dua) lembar asli surat pernyataan penanaman tanda batas tanah atas nama JUAIDI KORO tanpa tanggal, tahun 2013;
244. 2 (dua) lembar asli pernyataan penguasaan fisik bidang tanah sporadik atas nama JUAIDI KORO tanpa tanggal, tahun 2013;
245. 2 (dua) lembar asli surat pernyataan tanah tidak dalam keadaan sengketa atas nama JUAIDI KORO, tanpa tanggal, tahun 2013;

Hal 158 dari 281 hal

Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

246. 2 (dua) lembar asli surat keterangan riwayat pemilikan hak atas tanah atas nama JUAIDI KORO, tanpa nomor, tanpa tanggal, tahun 2013;
247. 2 (dua) lembar asli pengumuman tanpa nomor, tanpa tanggal, tahun 2013;
248. 2 (dua) lembar asli daftar panitia pemeriksa tanah A, tanpa nomor, tanpa tanggal, tahun 2013;
249. 1 (satu) bundel Risalah Penelitian data yuridis dan penetapan batas;
250. 1 (satu) lembar asli dan 4 (empat) lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan Belum/Kena Pajak atas nama JUAIDI KORO nomor: Lbj.973/5033/VIII/2013 tanggal 03 Agustus 2013;
251. 1 (satu) lembar asli dan 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama JUAIDI KORO, nomor: Lbj.593/5108/VIII/2013 tanggal 19 Agustus 2013;
252. 1 (satu) lembar asli dan 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan Pemilikan/Penguasaan Tanah atas nama JUAIDI KORO tanggal 02 Agustus 2013;
253. 3 (tiga) lembar fotocopy surat bukti penyerahan tanah adat atas nama JUAIDI KORO tanpa tanggal & tahun;
254. 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan penyerahan tanah adat dari Hj. Muhammad Abubakar Adam Djuje kepada ENTE PUASA, DKK tanggal 11 Februari 2013;
255. 2 (dua) lembar fotocopy surat penyerahan kuasa dari Hj. Ishaka dan Haku Mustafa kepada Hj. Adam Djuje tanggal 01 November 1996;
256. 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan dari Drs. G. P. EHOK tanggal 10 Mei 2013;
257. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir surat kuasa dari ENTE PUASA DKK kepada FRANKY CH. LETIK tanggal 22 Agustus 2013;
258. 5 (lima) lembar fotocopy legalisir KTP atas nama JUAIDI;
259. 4 (empat) lembar fotocopy legalisir KK atas nama SUKAWATI;
260. 1 (satu) lembar fotocopy surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan atas nama ABDUL HARIS NASIPIN lokasi Batu Gosok – Kenanga, tanggal 05 Maret 2013;
261. 1 (satu) lembar asli dan 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Laporan Kehilangan Barang Nomor: LKB/523/XI/2012/NTT/Res Mabar tanggal 23 November 2013, atas nama pelapor JUAIDI;
262. 2 (dua) lembar asli surat perintah setor nomor berkas permohonan: 2441/2013 atas nama JUAIDI tanggal 05 September 2013;
263. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran permohonan SK Hak nomor berkas: 2441/2013 tanggal 05 September 2013;
264. 2 (dua) lembar asli tanda terima dokumen nomor berkas permohonan: 2441/2013 atas nama JUAIDI tanggal 05 September 2013;
265. 2 (dua) lembar asli surat tugas survey tematik dan potensi tanah nomor: 2112/ST-24.16/X/2013 tanggal 07 Oktober 2013;
266. 2 (dua) lembar asli surat tugas pengukuran nomor: 368/ST-24.16/X/2013 tanggal 07 Oktober 2013;
267. 2 (dua) lembar asli Lampiran 13 atas nama SAMSUDING tanggal 02 September 2013;
268. 4 (empat) lembar asli Formulir Isian 402 atas nama SAMSUDING tanpa tanggal, tahun 2013;
269. 2 (dua) lembar asli data subyek dan obyek hak atas nama SAMSUDING tanpa tanggal tahun 2013;
270. 2 (dua) lembar asli surat pernyataan penanaman tanda batas tanah atas nama SAMSUDING tanpa tanggal tahun 2013;

Hal 159 dari 281 hal Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

271. 2 (dua) lembar asli pernyataan penguasaan fisik bidang tanah sporadik atas nama SAMSUDING ENTE tanpa tanggal, tahun 2013;
272. 2 (dua) lembar asli surat pernyataan tanah tidak dalam keadaan sengketa atas nama SAMSUDING tanpa tanggal, tahun 2013;
273. 2 (dua) lembar asli surat keterangan riwayat pemilikan hak atas tanah tanpa nomor, tanpa nama, tanpa tanggal, tahun 2013;
274. 2 (dua) lembar asli pengumuman tanpa nomor, tanpa nama, tanpa tanggal, tahun 2013;
275. 2 (dua) lembar asli daftar panitia pemeriksa tanah A tanpa nomor, tanpa tanggal, tanpa tahun;
276. 1 (satu) bendel Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas;
277. 1 (satu) lembar asli surat keterangan kepemilikan tanah atas nama SAMSUDING dari ENTE PUASA tanggal 31 Juli 2013
278. 2 (dua) lembar asli dan 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir surat keterangan belum/kena pajak atas nama SAMSUDING nomor: Lbj.973/5041/VIII/2013 tanggal 13 Agustus 2013;
279. 3 (tiga) lembar fotocopy surat bukti penyerahan tanah adat atas nama SAMSUDING tanpa nomor, tanpa tanggal, tanpa tahun;
280. 1 (satu) lembar asli dan 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir & 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama SAMSUDING Nomor: Lbj.593/5105/VIII/2013 tanggal 19 Agustus 2013;
281. 1 (satu) lembar asli dan 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir surat keterangan pemilikan tanah/penguasaan tanah tanpa nomor, atas nama SAMSUDING, tanggal 02 Agustus 2013;
282. 1 (satu) lembar asli dan 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir laporan kehilangan barang nomor: LKB/521/XI/2012/NTT/Res Mabar tanggal 23 November 2012, atas nama pelapor SAMSUDING;
283. 1 (Satu) lembar fotocopy surat keterangan penyerahan tanah adat dari Haji Muhammad Abubakar Adam Djuje kepada ENTE PUASA, DKK tanggal 11 Februari 2013;
284. 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan dari Drs. G. P. Ehok tanggal 10 Mei 2013;
285. 2 (dua) lembar fotocopy surat penyerahan kuasa dari Hj. Ishaka dan Haku Mustafa kepada Hj. Adam Djuje tanggal 01 November 1996;
286. 4 (empat) lembar fotocopy legalisir dan 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama SAMSUDING ENTE;
287. 4 (empat) lembar fotocopy legalisir dan 1 (satu) lembar fotocopy KK atas nama SAMSUDING ENTE;
288. 1 (satu) lembar fotocopy surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan atas nama ABDUL HARIS NASIPIN, lokasi Batu Gosok – Kenanga, tanggal 05 Maret 2013;
289. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran permohonan SK Hak Nomor Berkas: 2437/2013 tanggal 05 September 2013 atas nama SAMSUDING ENTE;
290. 2 (dua) lembar asli surat perintah setor nomor berkas permohonan: 2437/2013 tanggal 05 September 2013 atas nama SAMSUDING ENTE;
291. 2 (dua) lembar asli tanda terima dokumen nomor berkas permohonan: 2437/2013 tanggal 05 September 2013 atas nama SAMSUDING ENTE;
292. 2 (dua) lembar asli surat tugas survey tematik dan potensi tanah nomor: 207/ST-24.16/X/2013 tanggal 07 Oktober 2013;
293. 2 (dua) lembar asli surat tugas pengukuran nomor: 364/ST-24.16/X/2013 tanggal 07 Oktober 2013;

Hal 160 dari 281 hal

Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

294. 2 (dua) lembar asli dan 2 (dua) lembar fotocopy lampiran 13 atas nama HASMA tanggal 02 September 2013;
295. 4 (empat) lembar asli dan 2 (dua) lembar fotocopy formulir isian 402 atas nama HASMA tanpa tanggal, tahun 2013;
296. 2 (dua) lembar asli dan 1 (satu) lembar fotocopy Data Subyek dan Obyek Hak atas nama HASMA tanpa tanggal, tahun 2013;
297. 2 (dua) lembar asli dan 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Penanaman Tanda Batas Tanah tanpa tanggal, tahun 2013;
298. 2 (dua) lembar asli dan 1 (satu) lembar fotocopy Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Sporadik atas nama HASMA, tanpa tanggal, tahun 2013;
299. 2 (dua) lembar asli dan 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Tanah Tidak Dalam Keadaan Sengketa atas nama HASMA, tanpa tanggal, tahun 2013;
300. 2 (dua) lembar asli dan 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Hak Atas Tanah tanpa nomor, tanpa nama, tanpa tanggal, tahun 2013;
301. 2 (dua) lembar asli dan 1 (satu) lembar fotocopy pengumuman tanpa nomor, tanpa nama, tanpa tanggal, tahun 2013;
302. 2 (dua) lembar asli dan 1 (satu) fotocopy daftar nama panitia pemeriksa tanah A tanpa nomor, tanpa tanggal, tanpa tahun;
303. 1 (satu) bundel Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas tanpa tanggal, tahun 2013;
304. 4 (empat) lembar fotocopy Surat Bukti Penyerahan Tanah Adat dari Hj. ISHAKA dan HAKU MUSTAFA kepada ARE RAUFU tanpa nomor, tanpa tanggal, tanpa tahun;
305. 4 (empat) lembar fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor: Pem.042.2/475/IV/2006 tanggal 19 April 2006 atas nama ARE RAUFU;
306. 1 (satu) lembar asli dan 3 (tiga) fotocopy legalisir dan 2 (dua) fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama HASMA ARE nomor: Lbj.593/5116/VIII/2013 tanggal 19 Agustus 2013;
307. 1 (satu) lembar asli dan 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir dan 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan kepemilikan tanah/penguasaan tanah atas nama HASMA ARE tanggal 02 Agustus 2013, tanpa nomor;
308. 1 (satu) lembar asli dan 4 (empat) lembar fotocopy legalisir dan 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Belum/Kena Pajak Nomor: Lbj.973/5036/VIII/2013 tanggal 03 Agustus 2013 atas nama HASMA ARE;
309. 1 (satu) lembar asli dan 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir dan 4 (empat) lembar fotocopy surat keterangan waris 10 Februari 2013 atas nama HASMA ARE, DKK;
310. 1 (satu) lembar asli dan 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir dan 1 (satu) lembar fotocopy Laporan Kehilangan Barang nomor: LKB/526/VII/2013/NTT/Res Mabar tanggal 23 Juli 2013, atas nama pelapor HASMA ARE;
311. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Kepemilikan Tanah dari ENTE PUASA kepada HASMA ARE tanggal 31 Juli 2013;
312. 4 (empat) lembar fotocopy legalisir dan 2 (dua) lembar fotocopy KTP atas nama HASMA;
313. 4 (empat) lembar fotocopy legalisir dan 2 (dua) lembar fotocopy KK atas nama ARE RAUFU;
314. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir dan 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kuasa dari ENTE PUASA, DKK kepada FRANKY CH. LETIK tanggal 22 Agustus 2013;

Hal 161 dari 281 hal

Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

315. 4 (empat) lembar fotocopy Surat Penyerahan Kuasa dari Hj. ISHAKA dan HAKU MUSTAFA kepada Hj. ADAM DJUJE tanggal 01 November 1996;
316. 2 (dua) lembar fotocopy surat keterangan dari Drs. G. P. Ehok tanggal 10 Mei 2013;
317. 2 (dua) lembar fotocopy surat keterangan penyerahan tanah adat dari HJ. MUHAMMAD ABUBAKAR ADAM DJUJE kepada ENTE PUASA, DKK tanggal 11 Februari 2013;
318. 1 (satu) lembar asli dan 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Pembayaran Permohonan SK Hak atas nama HASMA Nomor Berkas: 2436/2013 tanggal 05 September 2013;
319. 2 (dua) lembar asli dan 1 (satu) fotocopy Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan: 2436/2013 atas nama HASMA tanggal 05 September 2013;
320. 2 (dua) lembar asli dan 1 (satu) fotocopy Tanda terima dokumen Nomor berkas permohonan: 2436/2013 atas nama HASMA tanggal 05 September 2013;
321. 2 (dua) lembar asli Surat Tugas Pengukuran Nomor: 363/ST-24.26/X/2013 tanggal 07 Oktober 2013 atas nama pemohon HASMA;
322. 1 (satu) lembar asli dan 2 (dua) lembar fotocopy surat tugas survey tematik dan potensi tanah nomor: 204/ST-24.16/X/2013 tanggal 07 Oktober 2013 atas nama pemohon: HASMA;
323. Asli Permohonan dari Muhanyang, tanggal 2 September, Tahun 2013 ;
324. Asli Permohonan tanpa tanggal tahun 2013 ;
325. Asli Surat Pernyataan Penanaman Tanda Batas, tanpa tanggal Tahun 2013;
326. Asli Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Sporadik tanpa tanggal Tahun 2013 ;
327. Asli Surat Pernyataan Tanah tidak Dalam Keadaan Sengketa tanpa tanggal tahun 2013 ;
328. Asli Surat Keterangan Riwayat Pemilik Hak Atas Tanah, tanpa tanggal Tahun 2013 ;
329. Foto Copy Surat Bukti Penyerahan Tanah Adat tanpa nomor dan tanggal dari H. Ishaka kepada Muhanyang ;
330. Asli Surat Keterangan Pemilikan tanah/ Penguasaan Tanah, tanggal 2 Agustus 2013 ;
331. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK), tanggal 19 Agustus 2013 ;
332. Asli Laporan Kehilangan Barang nomor : LKB/527/VII/2013/NTT/RES MABAR. Tanggal 23 Juli 2013 ;
333. Asli Surat Keterangan Belum/ Tidak Kena Pajak, Nomor : LBJ.973/ 5040/ VIII/ 2013, tanggal 3 Agustus 2013 ;
334. Foto Copy, Kartu Keluarga An. Kepala Keluarga Bakar Pasya ;
335. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Muhanyang ;
336. Foto Copy SPPT, tahun 2013, objek di Batu Gosok-Kenanga, Labuan Bajo, Kecamatan Komodo ;
337. Foto Copy Surat Kuasa Ente Puasa, Dkk, tanggal 22 Agustus 2013
338. Foto Copy Surat Keterangan tanggal 10 Mei 2013 oleh Mantan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Manggarai, Drs. G. P. Ehok
339. Foto Copy Surat Penyerahan Kuasa, tanggal 1 November 1996 ;
340. Foto Copy Surat Keterangan Penyerahan Tanah Adat, tanggal 11 Februari 2013 ;
341. Asli Data Subjek dan Objek Hak, tanpa tanggal, Tahun 2013 ;
342. Asli Pengumuman tanpa nomor, tanpa tanggal Tahun 2013 ;

Hal 162 dari 281 hal Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

343. Asli Risalah Penelitian data Yuridis, tanpa nomor dan tanggal, Tahun 2013, tanpa tanda tangan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat;
344. Asli Daftar Panitia Pemeriksaan Tanah A ;
345. Asli Surat Tugas Pengukuran Nomor: 365/St-24.16/X/2013, tanggal 7 Oktober 2013 ;
346. Asli Surat Tugas Survei Tematik dan Potensi Tanah, Nomor : 208/St-24.16/X/2013, tanggal 7 Oktober 2013
347. Peta Bidang Tanah Nomor : 61/2014, tanggal 20 Februari 2014 ;
348. Asli Tanda Terima Dokumen dengan nomor Berkas Permohonan : 2438/2013, tanggal 5 September 2013 ;
349. Asli Surat Perintah Setor dengan nomor Berkas Permohonan : 2438/2013, tanggal 5 September 2013;
350. Asli Kwitansi Permohonan Sk Hak Setor dengan nomor Berkas Permohonan : 2438 ;
351. Asli Pernyataan Ente Puasa, Dkk, tanggal 12 Juli 2015, yang dibuat oleh, Ente Puasa, Dkk (10 Orang);
352. Asli Blangko Sertipikta Hak Milik sesuai Surat Ukur Nomor 243/Labuan Bajo/ 2014
353. Asli Permohonan dari Salawing Ishaka Kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat, Tanggal 27 Maret 2015 (Lampiran 13)
354. Asli Permohonan dari Salawing Ishaka, tanggal 27 Maret 2015 (Formulir Isian 402)
355. Asli Surat Keterangan belum / Tidak kena Pajak nomor : Pem 593/KLB/885/V/2015, tanggal 5 Mei 2015
356. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Hak Atas Tanah Nomor : Pem. 593/KLB/884/V/2015, Tanggal 5 Mey 2015 ;
357. Asli Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Sporadik, Tanggal 27 Maret 2015 ;
358. Asli Surat Pernyataan Penanaman Tanda Batas Tanah, tanggal 27 Maret 2015 ;
359. Asli Surat Pernyataan Tanah Tidak Dalam Keadaan Sengketa, tanggal 27 Maret 2015 ;
360. Asli Daftar Panitia Pemeriksaan Tanah A
361. Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas, Kelurahan Labuan Bajo, tanpa tanggal dan Tahun ;
362. Asli Data Subjek dan Obyek Hak, tanggal 27 Maret 2015 ;
363. Asli Surat Perjanjian Jual Beli Bidang Tanah dari Abdul Latif H. A.R kepada Salawing Ishaka, tanggal 20 September Tahun 2013 ;
364. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Hak Atas Tanah, NOmor : Pem.014.2/6006.a/VIII/2013 ;
365. Foto Copy Surat Bukti Penyerahan Tanah dari Usman Pota Kepada Abdul Latif H.A.R, tanggal 5 Juli 1980 ;
366. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Sporadik An. Salawing Ishaka, tanggal 21 Aeptember 2013 ;
367. Asli SAurat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : Pem.5932/302/III/2014, An. Abdil Latif, H.A.R, kepada Salawing Ishaka, tanggal 14 Maret 2014 ;
368. Asli Surat Peryataan Tanah Tidak sedang Dalam Sengketa, An. Salawing Ishaka, tanggal 21 September 2013 ;
369. Foto Copy Karti Keluarga Kpeala Keluarga An. Salawing Ishaka ;
370. Asli Surat Tugas Pengukuran Nomor : 529/St-24.16/XI/2015, Tanggal 18 November 2015

Hal 163 dari 281 hal Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

371. Asli Peta Bidang Tanah Nomor : 980/ 2018, tanggal 17 Desember 2018 ;
372. Asli Surat Pemberitahuan Sidang Panitia A, An. Salawing Ishaka (2 Bidang), Nomor : 34/53.15.HP.01.03.100/II/2019, tanggal 4 Februari 2019 ;
373. Foto Copy Daftar Hadir Sidang Panitia A, An. Salawing Ishaka, tanggal 11 Februari 2019.
374. Asli Surat Permohonan Hak Atas Tanah dari Hasanuding, tanggal 2 September 2013 ;
375. Asli Data Subjek dan Objek Hak, An. Hasanuding, tanpa tanggal, Tahun 2013 ;
376. Asli Surat Pernyataan Penanaman Tanda Batas Tanah, tanpa tanggal Tahun 2013 ;
377. Asli Surat Pernyataan Tanah Tidak Dalam Keadaan Sengketa, tanpa tanggal, Tahun 2013 ;
378. Asli Pengumuman, Tanpa nomor dan tanggal tahun 2013 ;
379. Asli Daftar Panitia Pemeriksaan Tanah A ;
380. Asli Laporan Kehilangan Barang, Nomor : LKB/520/XI/2012/NTT/RES MABAR, tanggal 23 November 2012 ;
381. Foto Copy Surat Bukti Penyerahan Tanah Adat, dari H. Ishaka Kepada Hasanuding, tanpa tanggal, Tahun 1993 ;
382. Foto Copy Surat Keterangan Belum/ Tidak Kena Pajak, Nomor : LBJ.973/5034/VIII/2013,d dari Abdul Ipur kepada Hasanuding, tanggal 3 Agustus 2013 ;
383. Asli Surat Keterangan Kpemilikan Tanah dari Ketua Rt. 002 An. Ente Puasa kepada Sanuding, tanggal 31 Juli 2013 ;
384. Foto Copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), Hasanuding, tanpa tanggal tahun 2013 ;
385. Foto Copy KTP Hasanuding, tanggal 7 Desember 2012 ;
386. Foto Copy Karti Keluarga Kepala Keluarga An. Sanudin ;
387. Asli Surat Tugas Pengukuran Nomor : 367/ St-24.16/X/2013, tanggal 7 Oktober 2013 ;
388. Asli Surat Tugas Survei Tematik dan Potensi Tanah, Nomor : 210/St-24.16/X/2013, Tanggal 7 Oktober 2013 ;
389. Asli Surat Perintah Setor dengan Nomor Berkas 2440/2013, tanggal 5 September 2013 ;
390. Asli Tanda Terima Dokumen dengan Nomor Permohonan 2440/2013, An. Hasanuding, tanggal 5 September 2013 ;
391. Asli Kwitansi Permohonan SK Hak, tanggal 5 September 2013.
392. Asli Surat Permohonan Hak Atas Tanah dari Suka Wati Kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat, Tanggal 2 September 2013;
393. Asli Data Subjek dan Obyek Hak, An, Suka Wati, tanpa tanggal Tahun 2013 ;
394. Asli Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas, tanpa tanggal Tahun 2013 ;
395. Asli Surat Pernyataan Penanaman Tanda Batas Tanah, An. Suka Wati, tanpa tanggal Tahun 2013 ;
396. Asli Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Sporadik, tanpa tanggal, Tahun 2013 ;
397. Asli Surat Pernyataan Tanah Tidak Dalam Keadaan Sengketa, tanpa tanggal Tahun 2013 ;
398. Asli Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Hak Atas Tanah, Tanpa Nomor, Tanpa Tanggal, Tahun 2013 ;

Hal 164 dari 281 hal Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

399. Asli Pengumuman Tanpa Nomor, Tanpa Tanggal, Tahun 2013 ;
400. Asli Daftar Hadi Pemeriksaan Tanah A ;
401. Asli Surat Keterangan Kepemilikan Tanah/ Penguasaan Tanah, An. Suka Wati, Tanggal 2 Agustus 2013 ;
402. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK), An. Suka Wati, Tanggal 19 Agustus 2013 ;
403. Asli Surat Keterangan Waris Alm. Bahoruding, Nomor : LBJ.593/5118/VIII/2013, Tanggal 19 Agustus 2013 ;
404. Asli Surat Keterangan Belum/Tidak Kena Pajak, Nomor : LBJ 973/5039/VIII/2013, dari Abdul Ipur kepada Suka Wati, tanggal 3 Agustus 2013 ;
405. Asli Laporan Kehilangan Barang Nomor : LKB/525/XI/2012/NTT/ RES MABAR, TANGGAL 23 November 2013 ;
406. Asli Surat Keterangan Kepemilikan Tanah dari Ketua RT. OO2, Ente Puasa, tanggal 31 Juli 2013 ;
407. Foto Copy KTP An. Suka Wati ;
408. Foto Copy Surat Bukti Penyerahan Tanah Adat dari Haji Ishaka kepada Bahorudding, tanpa tanggal ;
409. Foto Copy Kartu Keluarga, An Kepala Keluarga Suka Wati ;
410. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013, An wajib pajak Abdul Haris Nasipin, tanggal 5 Maret 2013 ;
411. Asli Surat Tugas Pengukuran Nomor : 362/St-24.16/X/2013, tanggal 7 Oktober 2013 ;
412. Asli surat Tugas Survei Tematik dan Potensi Tanah, Nomor : 205/St-24.16/X/2013, tanggal 7 Oktober 2013 ;
413. Foto Copy Surat Kuasa, dari EWnte Puasa Kepada Frangky CH. Letik, tanggal 22 Agustus 2013 ;
414. Foto Copy Surat Keterangan An. Drs. G. P Ehok, tanggal 10 Mei 2013
415. Foto Copy Surat Penyerahan Kuasa dari Haji Ishaka kepada Haji Adam Djudje, tanggal 1 November 1996 ;
416. Foto Copy, Surat Keterangan Penyerahan Tanah Adat, dari Haji. Muh. Abubakar Adam Djudje, tanggal 11 Februari 2013 ;
417. Asli Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan 2435/2013, An. Suka Wati, tanggal 5 September 2013 ;
418. Asli Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan 2435/2013, An. Suka Wati, tanggal 5 September 2013 ;
419. Asli Kwitansi Permohonan SK Hak, An. Suka Wati, tanggal 6 September 2013;
420. Foto Copy Surat Bukti Penyerahan Tanah Adat dari Haji Ishaka, Kepada Ente Puasa, tanpa tanggal dan Tahun;
421. Foto Copy Surat Keterangan Belum/ Tidak Kena Pajak, Nomor : LBJ.973/5037/VIII/2013, Tanggal 3 Agustus 2013 ;
422. Foto Copy Surat Laporan Kehilangan Barang, Nomor : LKB/524/XI/2012/NTT/RES MABAR, Tanggal 23 November 2013 ;
423. Foto Copy KTP An. Ente Puasa
424. Foto Copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK), An. Ente Puasa Nomor Regoister : LBJ.593/5114/VIII/2013, tanggal 19 Agustus 2013
425. Asli Surat Perintah Setor nomor berkas Permohonan :2791/2013, An. Ente Puasa, tanggal 21 Oktober 2013 ;
426. Asli Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Perrmohonan :2791/2013, An. Ente Puasa, tanggal 21 Oktober 2013 ;

Hal 165 dari 281 hal Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

427. Asli Kwitansi Permohonan SK Hak, An. Ente Puasa, Tanggal 24 Oktober 2013 ;
428. Asli Surat Bukti Penyerahan Tanah Adat dari Ishaka Kepada Ahmad Baco, tanggal 10 April 1990
429. Asli Kwitansi Jual Beli Djudin Aliman dengan Achamd Baco, tanggal 20 Maret 1999 ;
430. Asli Peta Bidang Tanah, An. Amran Aliman Nomor : 651/2018, tanggal 31 Agustus 2018;
431. 1 (satu) lembar asli lembar kendali berkas atas nama AMRAN ALIMAN tanggal masuk 10 Agustus 2017;
432. 1 (satu) lembar asli dan 1 (satu) lembar fotocopy lampiran 13 atas nama AMRAN ALIMAN tanggal 08 Agustus 2017;
433. 2 (dua) lembar asli dan 2 (dua) lembar fotocopy formulir isian 402 atas nama AMRAN ALIMAN tanggal 08 Agustus 2017;
434. 1 (satu) lembar asli dan 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan atas nama MASSA RAPI Bin H. ISHAKA tanggal 20 Juli 2018;
435. 1 (satu) lembar asli dan 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan atas nama AMRAN ALIMAN tanggal 08 Agustus 2017;
436. 1 (satu) lembar asli dan 1 (satu) lembar fotocopy data subyek dan obyek hak atas nama AMRAN ALIMAN tanggal 08 Agustus 2017;
437. 1 (satu) lembar asli dan 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan riwayat pemilikan hak atas tanah nomor: Pem.593/2600/VIII/2017 tanggal 08 Agustus 2017 atas nama AMRAN ALIMAN;
438. 1 (satu) lembar asli dan 1 (satu) lembar fotocopy pernyataan penguasaan fisik bidang tanah sporadik tanggal 08 Agustus 2017 atas nama AMRAN ALIMAN;
439. 1 (satu) lembar asli dan 1 (satu) lembar fotocopy pernyataan penguasaan fisik bidang tanah tanggal 08 Agustus 2017 atas nama AMRAN ALIMAN;
440. 1 (satu) lembar asli dan 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan tanah tidak dalam keadaan sengketa tanggal 08 Agustus 2017 atas nama AMRAN ALIMAN;
441. 1 (satu) lembar asli dan 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan penanaman tanda batas tanah tanggal 08 Agustus 2017 atas nama AMRAN ALIMAN;
442. 1 (satu) lembar asli dan 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan kepemilikan tanah nomor: Pem.539/2600/VIII/2017 tanggal 08 Agustus 2017 atas nama AMRAN ALIMAN;
443. 1 (satu) lembar asli dan 1 (satu) lembar fotocopy nama panitia pemeriksa tanah A tanpa tanggal dan tahun;
444. 1 (satu) bundel asli dan 1 (satu) bundel fotocopy Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas tanpa tanggal, tanpa tahun, atas nama AMRAN ALIMAN;
445. 1 (satu) lembar asli dan 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan kematian nomor: Pem.470/KLB/320/II/2016 tanggal 24 Februari 2016 atas nama DJUDIN ALIMAN;
446. 3 (tiga) lembar fotocopy surat bukti penyerahan tanah adat dari ISHAKA dan HAKU MUSTAFA kepada ACHMAD BACO tanggal 10 April 1990;
447. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Pembayaran Harga Tanah Lokasi di Tanjung Batu Kallo dengan luas 30.000 m2 dari DJUDIN ALIMAN kepada AHMAD BACO tanggal 20 Maret 1999;
448. 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan waris tanggal 13 Juni 2017 dari DJUDIN ALIMAN kepada AMRAN ALIMAN, DKK;

Hal 166 dari 281 hal Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

449. 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan penolakan warisan tanggal 13 Juni 2017 dari HASNA ABUBAKAR, DKK kepada AMRAN ALIMAN, DKK;
450. 2 (dua) lembar fotocopy surat AMRAN ALIMAN kepada Bupati Manggarai Barat tanggal 08 September 2017;
451. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Bupati Manggarai Barat Nomor: Pem.131/205/IX/2017 tanggal 13 September 2017 perihal Surat Keterangan Kepada AMRAN ALIMAN;
452. 1 (satu) bendel fotocopy Surat Penolakan Setiap Permohonan Hak atas tanah diatas tanah yang merupakan tanah milik Ir. Nicolaus Naput yang terletak di Karang, Kel. Labuan Bajo, Kec. Komodo, Nomor: 04/IMYBS/IV/2017 tanggal 03 April 2017;
453. 1 (satu) lembar fotocopy surat kuasa khusus dari Nicolaus Naput kepada Yohanes B. Selatan, SH., tanggal 25 November 2016;
454. 2 (dua) lembar fotocopy KTP atas nama AMRAN ALIMAN;
455. 2 (dua) lembar fotocopy KTP atas nama Hj. SUKRI;
456. 2 (dua) lembar fotocopy KTP atas nama ENTE PUASA;
457. 2 (dua) lembar fotocopy KK atas nama AMRAN ALIMAN;
458. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama ANSARUDIN lokasi di Karang tanggal 01 Mei 2017, NOP: 53.16.010.030.003-0394.0;
459. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Permohonan SK Pemberian Hak Milik Perorangan Nomor Berkas: 3704/2017 tanggal 07 September 2018 atas nama AMRAN ALIMAN;
460. 2 (dua) lembar asli Kwitansi Pembayaran Permohonan SK Pemberian Hak Milik Perorangan Nomor Berkas: 3704/2017 tanggal 02 Oktober 2017 atas nama AMRAN ALIMAN;
461. 1 (satu) lembar asli Surat Undangan Pemeriksaan Lapangan dan Pengukuran Batas Bidang Tanah nomor: 616/5-53.15/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018 atas nama pemohon AMRAN ALIMAN;
462. 1 (satu) lembar asli Catatan Data Yuridis Bidang Tanah AMRAN ALIMAN di Lapangan tanggal 30 Juli 2018;
463. 1 (satu) lembar asli surat tugas pengukuran nomor: 648/ST-24.16/VIII/2018 tanggal 30 Juli 2018 atas nama pemohon AMRAN ALIMAN;
464. 2 (dua) lembar asli Surat Perintah Setor Nomor Berkas: 3704/2017 tanggal 02 Oktober 2017 atas nama AMRAN ALIMAN;
465. 2 (dua) lembar asli tanda terima dokumen nomor berkas pemohon: 3704/2017 tanggal 02 Oktober 2017 atas nama AMRAN ALIMAN;
466. 2 (dua) lembar asli gambar ukur NIB: 24.16.01.16.03060, tahun 648/2018, atas nama pemohon AMRAN ALIMAN, alamat LABUAN BAJO, tanggal 30 Juli 2018;
467. 2 (dua) lembar asli Peta Bidang Tanah Nomor: 651/2018 tanggal 31 Agustus 2018 atas nama AMRAN ALIMAN;
468. 1 (satu) lembar asli dan 1 (satu) lembar fotocopy lembar kendali berkas atas nama AMRAN ALIMAN tanggal masuk 19 September 2017;
469. 4 (empat) lembar fotocopy surat undangan sidang panitia A nomor: 243/6-53.15/X/2018 tanggal 23 Oktober 2018;
470. 1 (satu) lembar fotocopy daftar hadir sidang panitia A atas nama AMRAN ALIMAN tanggal 06 November 2018;
471. 1 (satu) bundel asli notulen sidang panitia A atas nama AMRAN ALIMAN tanggal 06 November 2018;

Hal 167 dari 281 hal

Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

472. Surat Permohonan Tidak Lanjut Proses Sertipikat Hak Milik Tanah Pemohon Atas Nama Haji Ente Puasa, Dkk, tanggal 24 April 2017, dengan Lampiran Sebagai Berikut :
473. Foto Copy Surat Bukti Penyerahan Tanah Adat dari Haji Ishaka kepada, Dahering Koro, tanpa tanggal dan Tahun ;
474. Foto Copy Surat Bukti Penyerahan tanah adat dari Haji Ishaka kepada Ente Puasa, tanpa tanggal dan Tahun ;
475. Foto Copy Surat Keterangan Pemilikan Tanah/ Penguasaan Tanah An. Dahering Koro, Tanggal 2 Agustus 2013 ;
476. Foto Copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Sporadik, An. Dahering Koro, Tanggal 19 Agustus 2013 ;
477. Foto Copy Surat Keterangan Belum/ Tidak Kena Pajak, Nomor : LBJ.973/ VIII/2013, Tanggal 3 Agustus 2013 ;
478. Foto Copy Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan 2442/2013, An. Dahering Koro, Tanggal 5 September 2013 ;
479. Foto Copy Tanda Terima Dokumen dengan Nomor Berkas Permohonan : 2442/2013, An. Dahering Koro, tanggal 5 September 2013 ;
480. Foto Copy Surat Penyerahan Kuasa dari Haji Ishaka Kepada Haji Adam Djudge, tanggal 1 November 1996 ;
481. Foto Copy Surat Keterangan Penyerahan Tanah Adat dari Haji Muh. Abubakar Adam Djudge, tanggal 11 Februari 2013 ;
482. Foto Copy Surat Pencabutan Kembali Surat Keberatan Tertanggal 10 Juli 2011, Perihal Mohon Pembatalan Proses Pensertifikatan Tanah dilokasi Karang/ Tori Lemah Batu Kallo, Kelurahan Labuna Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, yang diajukan oleh Saudara Ente Puasa, Dkk, Tanggal 13 Oktober 2014 ;
483. Foto Copy Surat Kesepakatan Bersama antara Haji. Muh. A. ADAM DJUDJE, dan Ente Puasa, tanggal 13 Oktober 2014 ;
484. Foto Copy Surat Keterangan dari Drs. W. Fidelis Pranda, tanggal 31 Januari 2014 ;
485. Foto Copy Surat Keterangan dari Drs. Liber Habut, tanggal 10 April 2014 ;
486. Foto Copy Surat Pernyataan dari Petrus Tagus, tanggal 24 Oktober 2014 ;
487. Foto Copy Surat Keterangan dari Donatus Endo, tanggal 5 April 2014 ;
488. Foto Copy Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dari Haji Ishaka kepada, Drs. G. P. Ehok, tanpa tanggal dan Tahun ;
489. Foto Copy Surat Tugas Survei Tematik dan Potensi Tanah, Nomor : 211/St-24.16/X/2013, tanggal 7 Oktober 2013 ;
490. Foto Copy Gambar Ukur An. Ente Puasa, Dkk
491. 1 (satu) bendel asli Arsip Surat Masuk Dari Kementrian ATR dan Kanwil BPN Provinsi NTT Tahun 2012 s/d 2015 Kantor Pertahanan Kabupaten Manggarai Barat;
492. 1 (satu) bendel asli Arsip Surat Masuk dari Masyarakat tahun 2017 Kantor Pertahanan Kabupaten Manggarai Barat;
493. 1 (satu) bendel Hasil Pengkajian Perkara Tanah Lokasi Wae Cicu, Kel. Labuan Bajo, Kec. Komodo, Kabupaten Manggarai Barat antara FATIMAH BADOSALAM dengan ALOYSIUS DIAZ tanggal 03 Oktober 2019;
494. 1 (satu) bendel Kronologis proses permohonan hak atas nama: SUPARDI TAHIYA, SUHAIB TAHIYA dan H. SUKRI yang terletak di Karang Kelurahan Labuan Bajo, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat, Provinsi NTT;

Hal 168 dari 281 hal

Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

495. 1 (satu) bendel Dokumen Tanah Pemda Manggarai yang diserahkan oleh Fungsionaris Adat Nggorang untuk sekolah Perikanan tanggal 26 April 1997 dan diukur Petugas BPN Kabupaten Manggarai tanggal 14 Mei 1997 dibukukan oleh H. Muh. Abubakar Adam Djudje selaku Pelaksana Tugas Fungsionaris Adat Nggorang, yang terdiri dari:
- a. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan/Penegasan atas nama Drs. G. P. Ehok, tanpa nomor, tanggal 22 Oktober 2014;
 - b. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan atas nama Haji Ishaka dan Haku Mustafa, tanpa nomor, tanggal 17 Januari 1998;
 - c. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penyerahan Kuasa tanggal 21 April 1997;
 - d. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penyerahan Kuasa atas nama Hj. Ishaka dan Haku Mustafa kepada Haji Adam Djudje tanggal 01 November 1991;
 - e. 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama H. Muh. A. Adam Djudje;
 - f. 1 (satu) lembar fotocopy gambar lokasi jarak batu kallo karangan yang diserahkan fungsionaris adat/tua adat kepada Pemda tanggal 26 April 1997;
 - g. 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan atas nama Drs. G. P. Ehok tanggal 10 Mei 2013;
 - h. 1 (satu) lembar fotocopy surat ukur tanggal 14 Mei 1997;
 - i. 1 (satu) lembar fotocopy skets lapangan / lokasi kerangan;
 - j. 1 (satu) lembar fotocopy daftar hadir yang turut menyaksikan pada saat pengukuran;
 - k. 1 (satu) bendel fotocopy surat pernyataan pelepasan hak atas tanah atas nama Haji Ishaka dan Haku Mustafa kepada Drs. G. P. Ehok tanpa tanggal dan tahun
 - l. 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan atas nama Haji Muhamad Abubakar Adam Djudje tanggal 10 Maret 2014;
 - m. 1 (satu) lembar fotocopy surat dari Camat Komodo kepada Kepala Desa Labuan Bajo Nomor: Pem.021.6/49/1984 perihal Karangan dan Sekitarnya perlu diamankan tanggal 02 Februari 1984;
 - n. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Bukti Penyerahan Hak Tanah Adat dari Ishaka dan Haku Mustafa kepada Hj. Adam Djudje tanggal 10 April 1990;
 - o. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Bupati Manggarai Barat nomor: Pem.131/201/IX/2015 tanggal 11 September 2019 perihal keberatan dan penegasan;
 - p. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Bupati Manggarai barat Nomor: Pem.130/215/X/2019 tanggal 03 Oktober 2019 perihal Klarifikasi dan Penegasan;
 - q. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari Drs. Frans B. Padju Leok kepada Haji Ishaka tanggal 14 Mei 1997;
 - r. 1 (satu) lembar fotocopy penyerahan tanah dari Usman Tota kepada Abdul latief A. A. R. tanggal 15 Juli 1989;
 - s. 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan riwayat kepemilikan hak atas tanah nomor: Pem.593/KLB/884/V/2015 tanggal 05 Mei 2015 atas nama SALAWI ISHAKA;
 - t. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Haji Ishaka dan Haku Mustafa tanggal 17 Januari 1998;
496. 1 (satu) bendel Laporan Hasil Mediasi Masalah Tanah antara Ibrahim Hanta dengan Nikolaus Naput, DKK lokasi tanah di Karangan Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2014;
497. 2 (dua) lembar asli Daftar Hadir Peserta Gelar Mediasi Kasus Pertanahan Lokasi Di Gusoh Ngea-Toroh, Kelurahan Labuan Bajo, Kec. Komodo antara Sdr. Haji MUH. A. ADAM DJUDJE dengan sdr. DANIEL DAENG NABIT, DKK;
498. 1 (satu) lembar asli klarifikasi dalam bentuk tulisan tangan;
499. 1 (satu) bundel asli notulensi Mediasi Kasus Pertanahan Lokasi di Gusoh Ngea-Toroh, Kelurahan Labuan Bajo, Kec. Komodo antara Sdr. Haji MUH. A. ADAM DJUDJE dengan sdr. DANIEL DAENG NABIT, DKK tanggal 21 November 2018 dalam bentuk tulisan tangan;
500. 1 (satu) bundel fotocopy Berita Acara Mediasi Pelaksanaan Gelar Kasus Pertanahan No. 01/BAM/53.15-600.13/IX/2014 obyek tanah seluas 40 Ha, terleak di Karangang, kelurahan Labuan bajo, kecamatan komodo, kabupaten manggarai barat antara Sdr. IBRAHIM HANTA melawan sdr. NIKOLAUS NAPUT, DKK 9 orang, No. Reg Kasus: 02/IX/2014, nomor: DI. 507 B, tanggal 15 September 2014;
501. 1 (satu) bendel fotocopy perjanjian penyelesaian sengketa (perdamaian) no: PPS/01/53-01-600.13/IX/2014, nomor: DI. 509 C tanggal 15 September 2014;
502. 1 (satu) bendel Surat Keterangan Perolehan Tanah Adat tanggal 24 Januari 2019 bermaterai Rp 6.000,-;
503. 1 (satu) lembar scan Berita Acara Proses Mediasi Masalah Tanah antara Bapak Niko Naput dengan Bapak Ibrahim A. Hanta yang berlokasi di Karangang – Kelurahan Labuan Bajo – Kecamatan Komodo – Kabupaten Manggarai Barat tanggal 29 September 2014;
504. 1 (satu) lembar disposisi surat kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat tanpa nomor, perihal Keberatan Penerbitan Sertifikat dari Mikael Mensen dan Suwandi Ibrahim tanggal 22 Juni 2020;
505. 3 (tiga) bendel asli Berita Acara Pelaksanaan Paparan Sengketa Pertanahan Nomor: 2/BAP-53.15.MP.01.04/VII/2020 tanggal 20 Juni 2020 antara Suwandi dengan Nikolaus Naput;
506. 2 (dua) lembar asli surat keputusan pembentukan tim penyelesaian sengketa nomor: 33/KEP-53.15.600/VII/2020 tanggal 14 Juli 2020 antara Mikael Mensen, DKK dengan Nikolaus Naput, DKK;
507. 2 (dua) lembar fotocopy surat undangan mediasi dan klarifikasi nomor: MP.01.02/1061/53.15/VII/2020 tanggal 15 Juli 2020;
508. 1 (satu) bendel asli daftar hadir gelar mediasi dan klarifikasi antara Mikael Mensen, DKK dengan Nikolaus Naput, DKK tanggal 20 Juli 2020;
509. 1 (satu) bendel asli daftar hadir pemeriksaan lapangan antara Mikael Mensen, DKK dengan Nikolaus Naput, DKK tanggal 20 Juli 2020;
510. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kuasa Nomor: 02/SK/VII/2020 tanggal 17 Juli 2020 dari Paulus Grans Naput kepada Wilhelmus Preis Wua Lerek;
511. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kuasa Nomor: 01/SK/VII/2020 tanggal 17 Juli 2020 dari Nikolaus Naput kepada Wilhelmus Preis Wua Lerek;
512. 2 (dua) lembar fotocopy Kesepakatan antara Ibrahim Hanta dengan Nikolaus Naput melalui kuasanya Yohanes B. Selatan, SH. Terkait tindak lanjut klarifikasi tanah yang dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Manggarai Barat tanggal 23 Januari 2015 yang tertangga 11 Maret 2019;
513. 1 (satu) bendel asli hasil kajian sengketa pertanahan obyek tanah seluas 20 Ha di kelurahan Labuan Bajo Kecamatan Komodo Kabupaten

Hal 170 dari 281 hal

Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Manggarai Barat antara Ibrahim Hanta dengan Nikolaus Naput tanggal 08 Mei 2020;
514. 1 (satu) lembar scan dan 2 (dua) lembar fotocopy surat bukti penyerahan tanah adat dari Ishaka dan Haku Mustafa kepada Beatrix Seran Nggebu tanggal 21 Oktober 1991;
 515. 2 (dua) lembar asli gambar bidang Maria Fatima Nabut DKK;
 516. 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan antara Haji Ishaka dan Haku Mustafa kepada Ir. Nikolaus Naput tanggal 17 Januari 1998;
 517. 1 (satu) bendel fotocopy Berita Acara Mediasi nomor: 1/SKP-MABAR/VI/2014 antara Haji Djudje melawan ENTE PUASA, DKK 11 orang No. Reg. Kasus : 01/SKP/IV/2014 tanggal 10 Juni 2014;
 518. 1 (satu) lembar Peta Lokasi Permasalahan Tanah Pemda Kabupaten Manggarai Barat versus Tanah Masyarakat, tanpa tanggal;
 519. Gambar Ukur Nomor : 2446/2015, An. Salawing Ishaka, Tanggal 11 November 2015
 520. Gambar Ukur Nomor : /2013, An. Ente Puasa Dan Dahering Koro, Tanggal 10 Oktober 2013 ;
 521. Laporan Hasil Mediasi Masalah Tanah Antara Ibrahim Hanta Dengan Nikolaus Naput, Dkk Lokasi Tanah Di Karang Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Bata, Seksi Sengketa, Konflik Dan Perkara Tahun 2014 ;
 522. Masalah Tanah Antara H. Adam Djudje Vs Ente Puasa, Dkk, Lokasi Karang, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo ;
 523. Lokasi Karang Bagian Selatan Dan Timur ;
 524. Laporan Penanganan Masalah Tanah, Nomor : Trantib.300/1135/X/2014, Tanggal 14 Oktober 2014 ;
 525. Laporan Penanganan Kasus Pertanahan Antara Haji Mustajib, Dkk, Dengan Nikolaus Naput, Lokasi Tanah Di Karang, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat ;
 526. Gabung Dengan Surat Dari Ahyar (Foto Copy KTP. Muh. A. Adam Djudje)
 527. Foto Copy Surat Permohonan Hak Atas Tanah Dari David Andre Pratama Kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat Tanggal 30 Juli 2019 ;
 528. Foto Copy Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Ha Katas Tanah, Nomor : Pem,593/1370/VII/2019, An. David Andre Pratama, Tanggal 29 Juli 2019 ;
 529. Foto Copy Data Subjek Dan Obyek Hak, Tanggal 29 Juli 2019 ;
 530. Foto Copy Surat Pernyataan An. David Andre Pratama, Tanggal 29 Juli 2019 ;
 531. Foto Copy Surat Pernyataan Tanah Tidak Dalam Keadaan Sengketa, An. David Andre Pratama, Tanggal 29 Juli 2019 ;
 532. Foto Copy Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Sporadik, An. David Andre Pratama, Tanggal 29 Juli 2019 ;
 533. Foto Copy Surat Pernyataan Penanaman Tanda Batas Tanah, An. David Andre Pratama, Tanggal 29 Juli 2019 ;
 534. Foto Copy Pengumuman Tanpa Nomor Dan Tanggal Tahun 2016 ;
 535. Foto Copy Risalah Penelitian Data Yuridis Dan Penetapan Batas, Tanpa Tanggal ;
 536. Foto Copy Ktp, An. David Andre Pratama ;
 537. Foto Copy Kartu Keluarga An. Kepala Keluarga Paulus Yoga Pratama ;
 538. Foto Copy Surat Kuasa Menjual Dari H. Muhamad Abubakar Adam Djudje Kepaa Muhamad Achyar, S.H, Tanggal 4 Juli 2019 ;

Hal 171 dari 281 hal Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

539. Foto Copy Surat Jual Beli Tanah Toroh Lemma Batu Kallo, Antara Muhamad Achyar S.H, Dengan David Andre Pratama, Tanggal 8 Juli 2019 ;
540. Foto Copy Surat Pernyataan Tentang Bidang Tanah Telah Terjual Sebagian An. H. Muhamad Abubakar Adam Djudje, Tanggal 29 Juli 2019 ;
541. Foto Copy Surat Bukti Penyerahan Hak Tanah Adat Dari Ishaka Kepada H. Adam Djudje, Tanggal 10 April 1990 ;
542. Foto Copy Surat Keterangan Drs. W. Fidelis Pranda, Tanggal 31 Januari 2014 ;
543. Foto Copy Surat Keterangan Dari Drs. G. P. Ehok, Tanggal 10 Mei 2013 ;
544. Foto Copy Surat Pernyataan Dari Petrus Tagus, Tanggal 24 Oktober 2014 ;
545. Foto Copy Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor : Pem.593.2/913/VII/2019, Tanggal 29 Juli 2019 ;
546. Foto Copy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor : Pem.593/1371/Vii/2019, Tanggal 29 Juli 2019
547. Foto Copy Surat Keterangan Belum/ Tidak Kena Pajak Nomor : Pem 593/1372/Vii/2019, Tanggal 29 Juli 2019 ;
548. Foto Copy Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Ha Katas Tanah Nomor : Pem. 593/1370/Vii/2019, Tanggal 29 Juli 2019 ;
549. Foto Copy Surat Pernyataan An. David Andre Pratama, Tanggal 29 Juli 2019 ;
550. Asli Surat Tugas Pengukuran Nomor : 495/St-24.16/Ix/2019, Tanggal 3 September 2019 ;
551. Asli Surat Tugas Pengukuran Nomor : 720/St-53.15.Ip.02.03.200/Ix/2019, Tanggal 3 September 2019 ;
552. Asli Undangan Pemeriksaan Lapangan Dan Pengukuran Batas Bidang Tanah Nomor : Ip.02.03/1084.53.15/Ix/2019, Tanggal 2 September 2019 ;
553. Asli Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan : 7697/2019, Tanggal 20 Agustus 2019 ;
554. Asli Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan : 7697/2019, Tanggal 20 Agustus 2019 ;
555. Asli Kwitansi Permohonan Sk Pemberian Hak Milik Perorangan, Tanggal 22 Agustus 2019 ;
556. Asli Lembar Disposisi, Perihal Mohon Pensertipikatkan Tanah Pemda Di Toro Lemma Batu Kallo/ Karangan, Tanggal 25 Maret 2017 ;
557. Foto Copy Surat Pernyataan/ Penegasan Dari Drs. Gasar. P. Ehok, Tanggal 22 Oktober 2014 ;
558. Foto Copy Surat Penyerahan Kuasa Dari H. Ishaka, Kepada H. Adam Djudje, Tanggal 21 April 1997 ;
559. Foto Copy Kesimpulan Rapar Muspida Tentang Pembahasan Tanah Pemda Di Karangan, Kelurahan Labuan Bajo, Tanggal 21 Oktober 2014 ;
560. Foto Copy Surat Dari Bupati Manggarai Barat Perihal Mohon Pensertipikatkan Tanah Pemda Di Tiro Lemma Batu Kallo/ Karangan, Tanggal 17 Maret 2015 ;
561. Foto Copy Legalisasi Tanpa Nomor, An. J Oematan, Ba, Tanpa Tanggal Dan Tahun ;
562. Foto Copy Dokymen Tanah Pemda Manggarai Yang Diserahkan Oleh Fungsionari Adat Nggorang Unutk Sekolah Perikanan, Tanggal 26 April 1997, Dan Diukur Petugas Bpn Kabupaten Manggarai Tanggal 14 Mei 1997, Dibukukan Oleh H. Muh. Abubakar Adam Djudje Selaku Pelaksana Tugas Fungsionaris Adat Nggorang ;

Hal 172 dari 281 hal Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

563. Foto Copy Peta Pendaftaran Nomor : 02/24.20/PDP/P3B2T/2015, Tanggal 29 Juni 2015 ;
564. Buku Agenda Surat Keluar Tujuan Bupati Manggarai Barat, Tanggal 18 Juni 2014 ;
565. Buku Agenda Surat Masuk Dari Kanwil Bpn Prov NTT, Perihal Mohon Pembatalan Proses Pensertipikatkan Tanah Di Lokasi Karangan/ Toro Lemma Batu Kallo, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Yang Diajukan Oleh Saudara Supardi Tahiya Dan Suaeb Tahiya, Nomor : 53.15/300.131/VII/2014, Tanggal 22 Juli 2014 ;
566. Buku Agenda Surat Masuk Dari Sekda Mabar, Perihal Pensertipikatan Tanah Pemda, Nomor : Pem .130/184/VI/2014, Tanggal 11 Juni 2014 ;
567. Buku Agenda Surat Keluar Kepada Sdr. Ente Puasa, Dkk, Perihal Peninjauan Lokasi, Tanggal 6 Juni 2014 ;
568. Buku Agenda Surat Masuk Dari Sekda Mabar Nomor : Pem.130/113/V/2014, Perihal Permohonan Sertipikat Tanah Pemda, Tanggal 14 Mei 2014 ;
569. Buku Agenda Surat Masuk Dari Haji Muh. A. Adam Djudge Perihal, Pembatalan Surat Keterangan Penyerahan Tanah Adat Tanggal 11 Februari 2014, Tanggal Surat 29 April 2014 ;
570. Buku Agenda Surat Masuk Dari Sekda Mabar Perihal Penjelasan Tanah Pt. Flobatim Makmur, Nomor : Pem.130/106/V/2014, Tanggal 5 Mei 2014 ;
571. Buku Agenda Surat Masuk Dari Sekda Mabar Perihal Permohonan Sertipikat Tanah Pemda Nomor : Pem 130/64/Pemda/III/2016, Tanggal 2 Maret 2016 ;
572. Buku Agenda Surat Masuk Dari Kementerian Atr/Bpn, Perihal Permohonan Pengakuan/ Penegasan Ha Katas Tanah Luas 4 Ha, Di Toro Lemma Batu Kallo, An. Haji Muh. Adam Djudge, Nomor : 4852/14.21.400.14/XI/2015, Tanggal 16 November 2015 ;
573. Buku Agenda Surat Masuk Dari Sekda Mabar Perihal Permohonan Sertipikat Tanah Pemda Nomor: Pem 130/57/II/2016, Tanggal 24 Februari 2016 ;
574. Buku Agenda Surat Keluar Kepada Muhamad Achyar Dari Mar Office Menter Agraria Inspektur Utama Bpn Kepala Kantor Wilayah Bpn, Perihal Permohonan Pemblokiran Shm No. 02492/Labuan Bajo Seluas 6.094 M2 , An. Muhamud Nip Dan Shm Nomor : 02482/ Labuan Bajo Seluas 12.020 M2 An. Dai Kayus ;
575. Buku Agenda Surat Masuk Dari Maa Low Office Muhamad Achyar And Associates Perihal Permohona Pemblokiran Shm Nomor : 02492/Labuan Bajo Seluas Seluas 6.094 M2 , An. Muhamud Nip Dan Shm Nomor : 02482/ Labuan Bajo Seluas 12.020 M2 An. Dai Kayus ;
576. Buku Agenda Surat Masuk Dari Hj. Ente Puasa, Perihal Mohon Tindak Lanjut Proses Sertipikat Hak Milik Tanah Pemohon An. Haji Ente Puasa, Dkk;
577. Buku Agenda Surat Keluar Kepada Bupati Manggarai Barat Perihal Mohon Petunjuk Reklamsi Pantai Di Kelurahan Labuan Bajo, Tanggal 12 September 2015;
578. Buku Agenda Surat Keluar Kepada Bupati Manggarai Barat Perihal Penyelesaian Masalah Tanah Lokasi Toro Lemma, Tanggal 2 Juli 2015 ;
579. Buku Agenda Surat Masuk Dari Haji Muh. Adam Djudge Perihal Permohonan Pengakuan/ Penegasan Ha Katas Tanah Luas 4 Ha, Di Toro

Hal 173 dari 281 hal Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lemma Batu Kallo, Atas Nama Haji Muh. Adam Djudje, Nomor : 4
HAD/V/2015, Tanggal 30 Mei 2015 ;
580. Buku Agenda Surat Keluar Kepada Bupati Mabar Perihal Penyelesaian Masalah Tanah Lokasi Toro Lemma, Tanggal 2 Juli 2015;
581. Buku Agenda Sureat Keluar Kepada Maria Hania Perihal Pengukuran Batas Bidang Tanah, Tanggal 15 Desember 2015 ;
582. Buku Agenda Surat Keluar Kepada Sdr. Ente Puasa, Dkk, Perihal Peninjauan Lokasi, Tanggal 6 Juni 2014;
583. Buku Agenda Surat Keluar Kepada Bupati Mabar Perihal Mohon Permintaan Surat Kuasa Dalam Rangka Proses Pensertipikatan Tanah Pemda Tahun 2014, Tanggal 18 Juni 2014;
584. Buku Agenda Surat Keluar Kepada Maria Hania Perihal Pengukuran Batas Bidang Tanah, Tanggal 15 Desember 2015;
585. Asli Tanda Terima dengan tanggal cetak 3 Agustus 2016;
586. Asli Tanda Terima dengan tanggal cetak 2 Agustus 2016;
587. Asli Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan Nomor: 4388/2016 tanggal 2 Agustus 2014;
588. Asli Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat Nomor: 354/HM/BPN-24.16/2016;
589. Asli Slip Stor Bank BRI ;
590. Asli Surat Setor Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) dari Mahmud Nip ;
591. Asli Risalah Panitia Pemeriksa Tanah A tanggal 11 Juli 2007 Nomor : 7 TAHUN 2007;
592. Asli Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Oleh Anggota Tim Pemeriksa Tanah A tanpa tanggal;
593. Asli Risalah Panitia Pemeriksa Tanah A tanggal 11 Juli 2007, Nomor: 7 Tahun 2007 dan Asli Risalah Pengolah Data;
594. Asli Peta Bidang Tanah tanggal 4 April 2016 Nomor Berkas: 1822/2015;
595. Asli Surat Tugas Pengukuran Nomor: 563/St-24-16/XI/2015, tanggal 26 November 2015;
596. Asli Data Subyek dan Obyek Hak an. Mahmud Nip tanggal 21 Februari 2015;
597. Asli Lampiran 13 Surat Permohonan dari Mahmud Nip tanggal 21 Februari 2015;
598. Asli Surat Permohonan dari Mahmud Nip tanggal 21 Februari 2015;
599. Asli Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Hak Atas Tanah Nomor: 593/KLB/319/II/2015, tanggal 21 Februari 2015;
600. Asli Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Sporadik, tanggal 21 Februari 2015;
601. Asli Surat Pernyataan Tanah Tidak Dalam Keadaan Sengketa, tanggal 21 Februari 2015;
602. Asli Surat Pernyataan Penanaman Tanda Batas Tanah tanggal 21 Februari 2015;
603. Asli Daftar Tim Peneliti Tanah, tanpa tanggal tanpa nomor;
604. Asli Daftar Panitia Pemeriksa Tanah A tanpa tanggal tanpa nomor ;
605. Asli Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas, Desa Labuan Bajo, NIB 2698;
606. Asli Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor: Pem.593/KLB/291/II/2015;
607. Asli Surat Keterangan Waris tanggal 20 Agustus 2014;
608. Asli Surat Keterangan Penolak Waris, tanggal 20 Agustus 2014;

Hal 174 dari 281 hal Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

609. Asli Surat Pernyataan KeTerdakwaan Pembagian Hak, tanggal 20 Agustus 2014;
610. Asli Surat Keterangan Belum/Tidak Kena Pajak, Nomor: Pem.593/KLB/942/V/2015 tanggal 21 Februari 2015;
611. Asli Pengumuman No: 593/PENG/BPN/2014, tanpa tanggal;
612. Asli Surat Pemberitahuan Objek Pajak, tanggal 21 Februari 2015;
613. Asli Surat Bukti Penyerahan Tanah, dari Usman Pota kepada Abdul Hamid Har ;
614. Fotocopy KTP an. Mahmud Nip ;
615. Fotocopy KTP an. A. Hamid A. Rahim;
616. Fotocopy KTP an. Dai Kayus ;
617. Fotocopy KTP an. Mursaling.
618. Dokumen Pemecahan dan peralihan SHM Nomor 2490/Labuan Bajo menjadi SHM 2492/Labuan Bajo dan SHM 2490/Labuan Bajo warkah sebagai berikut:
619. Asli Surat Permohonan Pendaftaran Peralihan dari Notaris/PPAT Lalu Muhamad Supriandi, tanggal 29-11-2016;
620. Asli Surat Pernyataan Notaris/PPAT Lalu Muhamad Supriandi, tanggal 29-11-2016;
621. Asli Surat Kuasa Matheus Saniang Naga Siagian kepada Notaris/PPAT Lalu Muhamad Supriadi, tanggal 29-11-2016;
622. Asli Surat Pernyataan Matheus Saniang Naga Siagian, tanggal 29-11-2016;
623. Fotocopy KTP an. Mahmud Nip;
624. Fotocopy KTP an. Susi Yanti ;
625. Fotocopy KTP an. Matheus Saniang Naga Siagian;
626. Asli Akta Jual Beli Nomor: 286/2016 lembaran kedua, PPAT Lalu Muhamada Supriandi, SH., M.Kn.
627. Tanda Terima Dokumen dengan Nomor Berkas: 59/2017, tanggal cetak 11 Januari ;
628. Asli Surat Perintah Setor, Nomor Berkas Permohonan 59/2017;
629. Asli Bukti Setor dari Matheus Saniang Naga Siagian melalui Bank BNI ;
630. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016 an Mahmud Nip ;
631. Asli Salinan Surat Setor Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) an. Matheus Saniang Naga Siagian;
632. Asli Surat Permohonan Pendaftaran Peralihan dari Notaris/PPAT Lalu Muhamad Supriadi, tanggal 23-01-2017;
633. Asli Surat Kuasa Topenos Toren Jap kepada Notaris/PPAT Abdulah Nur, S.IP tanggal 21-1-2017;
634. Asli Surat Kuasa Abdulah Nur, S.IP kepada Sofia Poniam Porat tanggal 21-1-2017;
635. Asli Surat Pernyataan Tanah Tidak dalam Keadaan Sengketa, tanggal 20-01-2016;
636. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah Sporadik, tanpa Tanggal ;
637. Asli Surat Pernyataan Topenos Toren Jap ;
638. Fotocopy KTP an. Topenos Toren Jap ;
639. Fotocopy KTP an. Mahmud Nip ;
640. Fotocopy KTP an. Susi Yanti ;
641. Asli Akta Jual Beli Nomor: 02/JB/KK/I/2017, PPATS Camat Komodo;
642. Fotocopy legalisir Buku Tanah dan Surat Ukur Sertipikat Hak Milik 02446/Labuan Bajo an. Rudyanto Suliawan;

Hal 175 dari 281 hal Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

643. Asli Surat Permohonan dari Supardi Tahiya, lampiran 13, tanggal 30-10-2013;
644. Asli Surat Permohonan dari Supardi Tahiya, formulir isian 402, tanggal 11-04-2013;
645. Asli Data Subyek dan Obyek Hak, tanggal 30 Oktober 2013 oleh Supardi Tahiya;
646. Asli Surat Keterangan Riwayat Pemilikan HAK atas Tanah, Nomor: Lbj.593/6022/IX/2013, tanggal 16 September 2013;
647. Asli Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Sporadik, tanggal 16 September 2013 oleh Supardi Tahiya;
648. Asli Surat Pernyataan Tanah tidak dalam keadaan Sengketa, tanggal 16 September 2013 oleh Supardi Tahiya;
649. Asli Surat Pernyataan Penanaman Tanda Batas Tanah, tanggal 16 September 2013, oleh Supardi Tahiya;
650. Asli Surat Pernyataan Penanaman Tanda Batas Tanah, tanggal 16 September 2013, oleh Supardi Tahiya;
651. Asli Data Subyek dan Obyek Pajak, tanggal 16 September 2013;
652. Asli Sketsa Gambar, tanggal 26 September 2013 oleh Supardi Tahiya;
653. Asli Surat Penguasaan Fisik bidang Tanah Sporadik tanggal 16 September 2013, yang dibuat oleh Supardi Tahiya;
654. Asli Surat Pernyataan Tanah Tidak Dalam Keadaan Sengketa, tanggal 16 September 2013;
655. Asli Surat Keterangan Belum/Tidak Kena Pajak Nomor: Lbj. 504/6027/IX/2013, tanggal 16 September 2013;
656. Asli Surat Keterangan Kepemilikan Tanah /Penguasaan Tanah Nomor: LBJ.593/6022/IX/2013, tanggal 16 September 2013
657. Fotocopy Surat Bukti Penyerahan tanah Adat, tanpa tanggal, dari Haji Ishaka dan Haku Mustafa kepada Supardi Tahiya;
658. Fotocopy KTP an. Supardi Tahiya;
659. Kartu Keluarga No. 531505260511016 AN. Supardi Tahiya;
660. Fotocopy SPPT, tanggal 1 Mei 2016, letak obyek Karanga-Waecicu;
661. Asli Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas Kel. Labuan Bajo, tanpa tanggal, tanpa nomor, belum tanda tangan Kepala Kantor;
662. Asli Tanda Terima Dokumen pendaftaran SK Hak, tanggal 8 Juni 2016 dari Supardi Tahiya;
663. Asli Surat Kuasa Supardi Tahiya kepada Veronika Syukur, tanggal 17 Juni 2016;
664. Asli Tanda Terima Dokumen Pendaftaran SK Hak, tanggal 2 Juni 2016;
665. Asli Pembayaran SK Hak, tanggal 6 Juni 2016, dari Supardi Tahiya;
666. Asli Surat Perintah Setor, tanggal 2 Juni 2016;
667. Asli SSPD-BPHTB an. Supardi Tahiya, tanggal 2 Juni 2016;
668. Asli Risalah Panitia Pemeriksa Tanah A Nomor: 561/2014 tanggal 13 Juni 2014 dan Risalah Pengolah Data (RPD) ;
669. Asli Daftar Hadir Sidang Panitia A atas Permohonan Sdr. Supardi Tahiya;
670. Asli Notulen Sidang Panitia A atas Permohonan Sdr. Supardi Tahiya dan Suaib Tahiya, tanggal 16 Juni 2014;
671. Asli Notulen Rapat Panitia A atas Permohonan Sdr. Supardi Tahiya, dkk., tanggal 16 Juni 2014;
672. Asli Pemberitahuan Sidang Panitia A dan Pemeriksaan Lokasi Permohoana Hak Atas Tanah an. Supardi Tahiya Dan Suaib Tahiya tanggal 13 Juni 2014;
673. Asli Surat Tugas Pengukuran Nomor: 476/ST-24.16.XI/2013, Tanggal 7 November 2013;

Hal 176 dari 281 hal Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

674. Asli Surat Tugas Survei Tematik dan Potensi Tanah, Nomor: 354/ST-24.16.XI/2013 tanggal 7 November 2013;
675. Asli Surat Nomor: 1138/53.15/200.2/2013, tanggal 6 November 2013, Prihal: Pengukuran Penetapan Batas Bidang Tanah an. Supardi Tahiya dkk.
676. Asli Surat Nomor: 181/002-24.16/V/2014, tanggal 13 Mei 2014, Prihal Undangan Sidang Pemeriksaan Tanah;
677. Asli Tanda Terima Dokumen Permohonan SK Hak, tanggal 30 Oktober 2013;
678. Asli Surat Perintah Setor tanggal 30 Oktober 2013, nomor berkas 2901/2013;
679. Asli Surat Perintah Setor, tanggal 22 Desember 2013, nomor berkas 2901/2013;
680. Asli Pembayaran SK HAK, dari Supardi Tahiya Tanggal 30 Oktober 2013;
681. Asli Pembayaran Tambahan Biaya SK HAK dari Supardi Tahiya Tanggal 22 Desember 2015;
682. Pengumuman tanpa nomor, tanpa tanggal tahun 2013, belum ditandatangani Kepala Kantor Pertanahan;
683. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat Nomor: 1855/HM/BPN-24.16/2015, tanggal 22 Desember 2015 tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah Kepada Supardi ;
684. Asli Surat Permohonan Pendaftaran Peralihan dari Rudyanto Suliawan melalui kuasa Kosmas Hametono, tanpa tanggal ;
685. Asli Surat Kuasa Notaris/PPAT Theresia Dewi Koroh Dimu, SH., M.Kn. kepada Kosmas Hametono tanggal 18 Agustus 2016;
686. Asli Surat Kuasa dari Saniatma Adinoto substitusi dari Rudyanto Suliawan kepada Notaris/PPAT Theresia Dewi Koroh Dimu, SH., M.Kn. tanggal 18 Agustus 2016;
687. Fotocopy KTP an. Kosmas Hametono ;
688. Fotocopy KTP an. Theresia Dewi Koroh Dimu ;
689. Fotocopy KTP an. Suaib Tahiya ;
690. Fotocopy KTP an. Rahmawati ;
691. Fotocopy KTP an. Rudyanto Suliawan ;
692. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 5315052605110016;
693. Akta Jual Beli Nomor: 185/2016, Notaris/PPAT Theresia Dewi Koroh Dimu, SH., M.Kn.;
694. Tanda Terima Dokumen, tanggal cetak 8 September 2016.
695. Fotocopy legalisir Buku Tanah dan Surat Ukur Sertipikat Hak Milik 02447/Labuan Bajo an. Rudyanto Suliawan, seluas 8.447 M2;
696. Asli Surat Permohonan dari Suaib Tahiya, lampiran 13, tanggal 30-10-2013;
697. Asli Surat Permohonan dari Suaib Tahiya, formulir isian 402, tanggal 11-04-2013;
698. Asli surat kuasa, tanggal 6 April 2016, dari Suaib Tahiya kepada Veronika Syukur;
699. Asli Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Sporadik, tanggal 16 September 2013;
700. Asli Surat Pernyataan Tanah Tidak dalam Sengketa, tanggal 16 September 2013;
701. Asli Surat Keterangan Belum/Tidak Kena Pajak Nomor: Lbj. 504/6026/IX/2013, tanggal 16 September 2013;
702. Asli Surat Keterangan Kepemilikan Tanah /Penguasaan Tanah Nomor: LBJ.593/6023/IX/2013 tanggal 16 September 2013;

Hal 177 dari 281 hal Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

703. Asli Surat Pernyataan Penanaman Tanda Batas Tanah, tanggal 16 September 2013;
704. Fotocopy SPPT Tahun 2015, obyek Waecicu Luas 5.555 m2 nama wajib pajak Wida Ning Sri;
705. Fotocopy SPPT Tahun 2016 obyek Waecicu Luas 8.457 m2 nama wajib pajak Suaib Tahiya, tanggal 1 Mei 2016;
706. Asli SSPD-BPHTB an. Suaib Tahiya, tanpa tanggal 2 Juni 2016;
707. Fotocopy Kartu Keluarga, an. Suaib;
708. Asli Surat Pernyataan Tanah Tidak dalam Keadaan Sengketa, tanggal 16 Septmebr 2013 oleh Suaib Tahiya;
709. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Sporadik, tanggal 16 September 2013 oleh Suaib Tahiya;
710. Asli Surat Keterangan Kepemilikan Hak Atas Tanah, Nomor: lbj.593/6023/IX/2013, tanggal 16 September 2013;
711. Asli Surat Pernyataan Penanaman Tanda Batas Tanah, tanggal 16 September 2013, oleh Suaib Tahiya;
712. Asli Data Subyek dan Obyek Hak tanggal 30 Oktober 20313 oleh Suaib Tahiya;
713. Daftar Pemeriksa Tanah A;
714. Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas Kel. Labuan Bajo, NIB 2393;
715. Asli Undangan Sidang Pemeriksaan Tanah, Nomor: 182/002-24.16/V/2014, tanggal 13 Mei 2014;
716. Asli Pemeriksaan sidang Panitia A an. Suaib Tahiya Dan Supardi Tahiya , Nomor : 1004/53.15/200/.3/IX/2014, Tangal 16 September 2014;
717. Asli Daftar Hadir Sidang Panitia A an. Suaib Tahiya dan Supardi Tahiya ;
718. Asli Notulen Sidang Panitia A atas Permohona Hak Suaib Tahiya dan Supardi Tahiya, tanggal 19 September 2014;
719. Asli Daftar Lampiran Alas Hak an. Suaib Tahiya;
720. Asli Berita Acara Pemeriksaan Lapangan, tanpa tanggal bulan Maret 2014;
721. Fotocopy Risalah Panitia Pemeriksa Tanah A, tanpa nomor, tanpa tanggal tahun 2014, belum ditandatangani;
722. Asli Surat Perintah Setor Nomor Berkas : 2900/2013, tanggal 30 Oktober 2013;
723. Asli Surat Pembayaran Permohonan SK Hak, tanggal 30 Oktober 2013 Dari Suaib Tahiya;
724. Asli Tanda Terima Dokumen, tanggal 30 Oktober 2013, dari Suaib Tahiya;
725. Asli Surat Perintah Setor dari 2 Juni 2016, an. Pemohon Suaib Tahiya, tanpa ditandatangani;
726. Asli Surat Pembayaran Pendaftaran SK Hak, tanggal 6 Juni 2016 an. Suaib Tahiya;
727. Asli Surat Pembayaran Tambahan biaya untuk permohonan SK Hak, tanggal 22 Desmber 2015 an. Suaib Tahiya;
728. Asli Tanda Terima Dokumen tanggal 2 Juni 2016, an. Pemohon Suaib Tahiya;
729. Asli Surat Perintah Setor Nomor Berkas: 2900/2013 an. Suaib Tahiya;
730. Asli Surat Pengukuran Penetapan Batas Bidang Tanah an. Suaib Tahiya, tanggal 6 November 2013;
731. Asli Surat Tugas Survei Tematik dan Potensi Tanah, Nomor: 355/St-24.16/XI/2013, tanggal 7 November 2013;
732. Asli Surat Tugas Pengukuran Nomor; 475/St-24.16/XI/2013, tanggal 7 November 2013;

Hal 178 dari 281 hal Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

733. Peta Bidang Tanah, dengan Berkas Nomor: 2900/2013, TANGGAL 11/04/2014, Tanpa Tanda Tangan;
734. Asli Risalah Pengolah Data an. Suaib Tahiya, tanpa tanggal, tanpa nomor;
735. Asli Pengumuman: tanpa nomor tahun 2013, atas permohonan Suaib Tahiya;
736. Asli Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat Nomor: 1856/HM/BPN-24.16/2015.
737. Asli Surat Permohonan Pendaftaran Peralihan dari Rudyanto Suliawan melalui kuasa Kosmas Hametono ;
738. Asli Surat Kuasa Notaris/PPAT Theresia Dewi Koroh Dimu, SH., M.Kn. kepada Kosmas Hametono ;
739. Asli Surat Kuasa dari Saniatma Adinoto substitusi dari Rudyanto Suliawan kepada Notaris/PPAT Theresia Dewi Koroh Dimu, SH., M.Kn. ;
740. Fotocopy KTP an. Theresia Dewi Koroh Dimu ;
741. Fotocopy KTP an. Kosmas Hametono ;
742. Fotocopy KTP an. Supardi Tahiya ;
743. Fotocopy KTP an. Herawati ;
744. Fotocopy KTP an. Rudyanto Suliawan ;
745. Fotocopy Surat Kuasa tanggal 3 Agustus 2016 dari Rudiati Suliawan memberi kuasa kepada Saniatma Adinoto;
746. Foto copy KTP AN. Saniatma Adinoto;
747. Asli Akta Jual Beli Nomor: 187/2016, Notaris/PPAT Theresia Dewi Koroh Dimu, tanggal 18 Agustus 2016;
748. Asli Tanda Terima SHM 2447, tanggal 8 September 2016;
749. Asli Tanda Terima Dokumen dari Kosmas Hametono, tanggal 25 Agustus 2016;
750. Asli Tanda Terima Pembayaran Peralihan Hak dari Kosmas Hametono tanggal cetak 30 Agustus 2016;
751. Asli Surat Perintah Setor tanggal 29 Agustus 2016;
752. Foto copy Pernyataan Penjual oleh Suaib tanggal 18 Agustus 2016;
753. Foto copy Pernyataan Pembeli oleh Saniatma Adinoto tanggal 18 Agustus 2016;
754. Foto copy Pernyataan Jual Beli oleh Suaib dan Saniatma Adinoto, tanggal 18 Agustus 2016;
755. Foto copy Pernyataan Kekurangan Pajak tanggal 18 Agustus 2016;
756. Foto copy Pernyataan tidak sedang dijaminkan tanggal 17 Juni 2016;
757. Fotocopy NPWP Rudi Suliawan;
758. Asli SSPD-BPHTB an. Rudiato Suliawan, tanggal 18 Agustus 2016;
759. Fotocopy Surat Setor Pajak an. Suaib Tahiya 13 Agustus 2016;
760. Fotocopy SPT Sertipikat 2447;
761. Fotocopy Kwitansi Pembelian Tanah SHM 2447, tanggal 10 Agustus 2016 dari Bpk. Rudyanto Suliawan Senilai Rp. 2.111.750.000;
762. Tanda Terima Berkas Nomor; 5220/2016, tanggal cetak 8 September 2016;
763. Surat Perintah Setor Nomor Berkas 5220/2016;
764. Fotocopy legalisir Buku Tanah dan Surat Ukur Sertipikat Hak Milik 02448/Labuan Bajo an. Rudyanto Suliawan, seluas 8.447 M2;
765. Asli Surat Permohonan dari H. Sukri , lampiran 13, tanggal 28-08-2013;
766. Asli Surat Permohonan dari H. Sukri, formulir isian 402, tanggal 11 April 2014;
767. Asli Data Subyek dan Obyek Hak tanggal 28 Agustus 2013 oleh H. Sukri;

Hal 179 dari 281 hal Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

768. Asli Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Sporadik, tanggal 28 Agustus 2013;
769. Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Hak Atas Tanah tanpa tanggal Tahun 2013;
770. Asli Surat Pernyataan Tanah Tidak dalam Sengketa, tanggal 28 Agustus 2013 oleh H. Sukri;
771. Asli surat Pernyataan Penanaman Tanda Batas Tanahtanpa tanggal Tahun 2013 oleh H. Sukri;
772. Asli Surat Pernyataan tentang Kepemilikan Tanah Haji Sukri berdasarkan hibah dari Bpk. Ketang 1987 tanggal 28 Agustus 2013;
773. Asli Surat Keterangan Penduduk, Nomor: Pem.0.470/379/IX/2013, tanggal 2 September 2013;
774. Asli Surat Keterangan Kepemilikan Tanah /Penguasaan Tanah Nomor: PEM.593/KLB/5219/VIII/2013 tanggal 28 Agustus 2013;
775. Asli Surat Keterangan Pajak Bumi dan Bangunan, Nomor: EK.504/5206/VIII/2013, tanggal 27 Agustus 2013;
776. Fotocopy Surat Bukti Penyerahan Hibah tanggal 10 Maret 1997, oleh Ketang kepada H. Sukri;
777. Fotocopy Kartu Keluarga H. Sukri;
778. Fotocopy SPPT tanggal 3 September 2013, lokasi Karang;
779. Fotocopy SPPT tanggal 1 Mei 2016, lokasi Karang;
780. Fotocopy KTP an. Haji Sukri;
781. Asli Surat Tugas Pengukuran dan Pemetaan, tanggal 24 April 2014;
782. Peta Bidang Tanah Nomor 521/2014;
783. Asli Pembayaran Permohonan SK Pemberian Hak, tanggal 23 April 2014;
784. Tanda Terima Dokumen Permohonan SK Pemberian Hak tanggal 23 April 2014;
785. Surat Perintah Setor, nomor berkas permohonan 1535.2014, tanggal 23 April 2014;
786. Asli Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Oleh Anggota Tim Pemeriksa Tanah A tanggal 4 Januari 2015 dan Risalah Pengolah Data (RPD);
787. Asli Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas, NIB 02537, tanggal 04-02-2015;
788. Asli Risalah Pemeriksa Tanah A, Nomor 108/2015, tanggal 4 Februari 2015;
789. Asli Pengumuman Tanpa Nomor Tahun 2013, belum ditandatangani Kakan;
790. Asli Surat Permohonan Pendaftaran Peralihan dari Rudyanto Suliawan melalui kuasa Kosmas Hametono tanpa tanggal;
791. Asli Surat Kuasa dari Saniatma Adinoto substitusi dari Rudyanto Suliawan kepada Notaris/PPAT Theresia Dewi Koroh Dimu, SH., M.Kn. ;
792. Asli Surat Kuasa Notaris/PPAT Theresia Dewi Koroh Dimu, SH., M.Kn. kepada Kosmas Hametono tanggal 18 Agustus 2016;
793. Fotocopy KTP an. Kosmas Hametono ;
794. Fotocopy KTP an. H. Sukri ;
795. Fotocopy Surat Keterangan Kematian Suami/Istri, tanggal 03-08-2016, Nomor: Pem.130/268/VIII/2016;
796. Fotocopy Kartu Keluarga, Nomor: 531505...;
797. Fotocopy KTP an. Rudyanto Suliawan ;
798. Fotocopy Surat Kuasa Rudyanto Suliawan kepada Saniatma Adinoto, tanggal 3 Agustus 2016 ;
799. Fotocopy KTP an. Saniatma Adinoto ;

Hal 180 dari 281 hal Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

800. Asli Akta Jual Beli Nomor: 186/2016 Notaris/PPAT Theresia Dewi Koroh Dimu, tanggal 18 Agustus 2016;
801. Asli Tanda Terima SHM 2448, tanggal 8 September 2016;
802. Asli Surat Perintah Setor, Nomor Berkas Permohonan 5212/2016 tanggal 29 Agustus 2016;
803. Foto copy Pernyataan Penjual oleh H. Sukri tanggal 18 Agustus 2016;
804. Foto copy Pernyataan Pembeli oleh Saniatma Adinoto tanggal 18 Agustus 2016;
805. Foto copy Pernyataan Jual Beli oleh H. Sukri dan Saniatma Adinoto, tanggal 18 Agustus 2016;
806. Foto copy Pernyataan Kekurangan Pajak tanggal 18 Agustus 2016;
807. Foto copy Pernyataan Tidak Sedang Dijaminkan tanggal 20 Juni 2016;
808. Fotocopy SPPT Sertipikat 2448/Labuan Bajo;
809. Fotocopy Kwitansi Pembelian Tanah SHM 2448, tanggal 10 Agustus 2016 dari Bpk. Rudyanto Suliawan Senilai Rp. 5.032.500.000;
810. Asli SSPD-BPHTB an. Rudiato Suliawan, tanggal 18 Agustus 2016;
811. Fotocopy Surat Setor Pajak an. H. Sukri tanggal 13 Agustus 2016;
812. Asli Tanda Terima Dokumen, Nomor Berkas Permohonan 5212/2016.
813. Fotocopy legalisir Buku Tanah dan Surat Ukur Sertipikat Hak Milik 02482/Labuan Bajo an. Ismail Hirawan, seluas 12.020 M2;
814. Asli Surat Permohonan dari Dai Kayus, lampiran 13, tanggal 21 Februari 2015;
815. Asli Surat Permohonan dari Dai Kayus, formulir isian 402, tanggal 21 Februari 2015;
816. Asli Data Subyek dan Obyek Hak tanggal 21 Februari 2015 oleh Dai Kayus;
817. Asli Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor: Pem.593/KLB/290/II/2015;
818. Asli Surat Pernyataan Tanah Tidak dalam Sengketa, Nomor: 593/KLB/299/II/2015, tanggal 21 Februari 2015;
819. Asli Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Sporadik, tanggal 21 Februari 2015 dari Dai Kayus;
820. Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Hak Atas Tanah, Nomor 593/KLB/290/II/2015, tanggal 21 Februari 2015;
821. Asli Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Sporadik, tanggal 21 Februari 2015 dari Dai Kayus;
822. Asli Surat Pernyataan Tanah Tidak dalam Sengketa, tanpa Nomor, tanggal 21 Februari 2015;
823. Asli surat Pernyataan Penanaman Tanda Batas Tanah oleh Dai Kayus, tanggal 21 Februari 2015;
824. Asli Surat Bukti Penyerahan Tanah dari Usman Pota kepada Dai Kayus, tanggal 10 Oktober 1980;
825. Asli SPPT, lokasi tanah Karanga, an. Jaman Onestimus Tahun 2015;
826. Asli Surat Keterangan Dalam Proses Penerbitan SPPT PBB, Nomor: 970/Penda/448/VII/2015;
827. Fotocopy Surat Keterangan Kematian, Nomor: Pem.593/KLB/301/II/2015, tanggal 20 Mei 2015;
828. Surat Pernyataan Ahli Waris Muhamad Naser, dkk. tanggal 21 Februari 2015;
829. Fotocopy KTP an. Muhamad Naser;
830. Fotocopy KTP an. Mallang Pembalas
831. Peta Bidang Tanah Nomor: 158/2016, tanggal 04/04/2016;

Hal 181 dari 281 hal Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

832. Asli Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas, Kelurahan Labuan Bajo, NIB 02651, tanggal 1-8-2016;
833. Asli Pengumuman Tanpa Nomor Tahun 2013, belum ditandatangani Kakan;
834. Asli Surat Pemberitahuan Obyek Pajak, an. DAI Kayus, tanggal 21 Februari 2015;
835. Asli Surat dari Pengadilan Negeri Labuan Bajo, tanggal 21 Juli 2016, nomor: W.26-U.15/726/HT.04.10/VII/2015 Prihal Mohon Informasi;
836. Asli Salinan Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor: 9/PDT.G/2016/PN.LBJ;
837. Asli Surat Keterangan Pengadilan Negeri Labuan Bajo, Nomor: W-26-U.15/725/S.KT/PDT/VII/2016, tanggal 21 Juli 2016;
838. Asli Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat, tanggal 19 Juli 2016, Nomor: 571/53.15-600.13/VII/2016, Prihal: Mohon Informasi;
839. Fotocopy Gugatan Nomor: 9/PDT.G/2016/PN.LBJ, tanggal 1 Mei 2016;
840. Asli Surat Pernyataan dari Ente Puasa, tanggal 15 Juli 2016;
841. Asli Notulen Sidang Panitia A, AN. Dai Kayus tanggal 8/12/2015;
842. Fotocopy Surat Keberatan dari Fatima Badosalam, dkk. Prihal Keberatan terhadap Permohonan Dai Kayus, tanggal 28 Desember 2015;
843. Fotocopy Surat Bukti Penyerahan Tanah Adat dari Haji Ishaka Keppada Kamis Hamnu, tanpa tanggal;
844. Fotocopy Surat Jual Beli Sebidang Tanah dari Abdul Latif Har kepada Onak, tanggal 3 Mei 2007;
845. Fotocopy Surat Kuasa Onak kepada Salawing Ishaka;
846. Asli Risalan Pemeriksa Tanah A , Nomor 7 Tahun 2007, tanggal 11 Juli 2007;
847. Asli Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Oleh Anggota Tim Pemeriksa Tanah a tanggal 1-08-2016 dan Risalah Pengolah Data;
848. Asli Bukti Pembayaran SSPD-BPHTB an. Dai Kayus melalui Bank BRI
849. Asli surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat Nomor: 351/HM/BPN-24.16/2016 tentang Pemberian Hak Milik Kepada Dai Kayus;
850. Asli Surat Permohonan Pendaftaran Peralihan dari Lalu Muhamad Supriadi selaku Kuasa dari Ismail Hirawan, tanggal 09-08-2017;
851. Fotocopy KTP an. Dai Kayus;
852. Fotocopy KTP an. Ismail Hirawan;
853. Fotocopy KTP an. Kevin Natasaputra;
854. Fotocopy KTP an. Megawati Setiadi;
855. Asli Surat Pernyataan tidak menjadi Jaminan, tanggal 09-08-2017;
856. Asli Surat Kuasa Ismail Hirawan, dkk. kepada Lalu M. Supriadi, tanggal 09-08-2017;
857. Asli Surat Pernyataan tanah tidak absente/guntai, tanggal 09-07-2017;
858. Surat Kuasa dari Lalu M. Supriadi kepada Arnoldus Y. Travolta, tanggal 09-08-2017;
859. Asli Akta Jual Beli Nomor 170/2017, Notaris/PPAT Lalu M. Supriandi, SH., M.Kn.
860. Asli Tanda Terima Nomor Bukti Penyerahan 2573, Nomor berkas Permohona 3149/2017, tanggal 6 September 2017;
861. Asli Surat Pembayaran Peralihan Hak, Nomor HM 02482/Labuan Bajo;
862. Asli Surat Perintah Setor, Nomor Berkas: 3149/2017;
863. Asli Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan 3149/2017;
864. Asli Pembayaran SSPD-BPHTB an. Ismail Hirawan;

Hal 182 dari 281 hal Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

865. Fotocopy Bukti Setor Tunai melalui BANK BNI untuk pembayaran SSPD-BPHTB;
866. Fotocopy Cetakan Kode Billing, Id Billing 017071907985781;
867. Fotocopy SPPT PBB, NOP: 531601003000305880;
868. Asli tanda Terima Sementara an Dai Kayus tahun 2017;
869. Asli Tanda Terima Dokumen, Nomor berkas Permohonan 3149/2017;
870. Asli Surat Perintah Setor Nomor berkas Permohonan 3149/2017, tanggal 28 Agustus 2017;
871. Fotocopy Surat dari Muh. A. Adam Djuje, tanggal 17-11-2014, kepada Kepala Kantor Pertanahan Kab. Manggarai Barat, Nomor: /HAD/XI/2014, Perihal Permohonan Pengakuan/Penegakkan Hak Atas Tanah Luas 4 Ha di Lokasi Toroh Lema Batu Kallo An. Muh. A. Adam Djuje;
872. Fotocopy Tanda terima dokumen Nomor Berkas Permohonan 2796/2014, an. Muh. A. Adam Djuje;
873. Fotocopy Pembayaran Pendaftaran Tanah Pertama Kali Pengakuan/Pemberian Hak, an. Muh. A. Adam Djuje, tanggal 7 Juli 2014;
874. Fotocopy Lembar Check List Berkas;
875. Fotocopy Surat Permohonan Hak Muh. A. Adam Djuje, tanpa tanggal, (lampiran 13);
876. Fotocopy KTP an. Muh. A. Adam Djuje
877. Fotocopy Surat Bukti Penyerahan Hak Atas Tanah Adat, dari Ishaka dan Haku Mustafa kepada H. Adam Djuje, tanggal 10 April Tahun tidak terbaca;
878. Fotocopy KK an. Muh. A. Adam Djuje;
879. Fotocopy SPPT, NOP: 53.16.010.030.003-0498.0;
880. Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Sporadik, yang dibuat oleh Muh. A. Adam Djuje, tanggal 06-11-2013;
881. Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Hak Atas Tanah, Nomor; LBJ.593/6218/XI/2013, tanggal 6 November 2013;
882. Fotocopy Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Hak Atas Tanah, Nomor: Lbj.593/III/I/2014;
883. Fotocopy Surat Keterangan Tanah Tidak Dalam Keadaan Sengketa, tanpa tanggal, yang dibuat oleh Muh. A. Adam Djuje;
884. Fotocopy Surat Pernyataan Penanaman Tanda Batas Tanah, tanpa tanggal, yang dibuat oleh Muh. A. Adam Djuje;
885. Fotocopy Data Subyek dan Obyek Hak, tanpa tanggal, yang dibuat oleh Muh. A. Adam Djuje;
886. Fotocopy Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas, Kel. Labuan Bajo, tanpa tanggal;
887. Fotocopy Surat Permohonan Muh. A. Adam Djuje, tanpa tanggal, (Formulir Isian 402);
888. Fotocopy KTP an. Abdul Haji;
889. Fotocopy KTP an. Alimudin Sidik;
890. Fotocopy Pengumuman, tanpa Nomor, tanpa tanggal;
891. Fotocopy Daftar Panitia Pemeriksa Tanah A;
892. Fotocopy Lembar Disposisi Kepala Kantor Pertanahan;
893. Surat Dari Bupati Manggarai Barat Drs. Agustinus CH. Dula, tanggal 28 Juli 2020, Nomor: Pem.131/145/VII/2020.
894. Asli Lembar disposisi Kepala Kantor Pertanahan, Surat Nomor: 01/HADD/II/2014, tanggal 5 Februari 2014;
895. Asli Surat Nomor: 01/HADD/II/2014, tanggal 5 Februari 2014, Perihal; Penangguhan Pengukuran/pensertipikatan tanah oleh Petugas BPN

Hal 183 dari 281 hal

Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabupaten Manggarai Barat atas Permohonan saudara Ente Puasa, dkk. Lokasi Toroh Lemak Batu Kalo dan Karang;
896. Fotocopy Surat Keterangan Riwayat kepemilikan hak atas tanah, nomor: lbj.593/111/I/2014, tanggal 23 Januari 2014;
897. Fotocopy Peta Sket Hasil Penataan oleh H. Adam Djuje, tanggal 26-4-1997;
898. Fotocopy Lembar disposisi Kepala Kantor Pertanahan, Surat Nomor: PEM.593/KLB/1873/XI/2014, tanggal 27 November 2014;
899. Fotocopy Surat Nomor: PEM.593/KLB/1873/XI/2014, tanggal 27 November 2014, Perihal: Pembatalan/Penarikan Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Hak Atas Tanah;
900. Asli Lembar disposisi Kepala Kantor Pertanahan, Surat Nomor: PEM.138/1311/XII/2014, tanggal 2 Desember 2014;
901. Asli Surat Nomor: PEM.138/1311/XII/2014, tanggal 2 Desember 2014 Perihal: Pertimbangan Agar tidak melayani proses penerbitan hak atas tanah an. H. M. Abubakar Adam Djuje di Karang;
902. Asli Analisis Kasus Pertanahan Obyek Tanah Seluas $\pm 26.400\text{m}^2$ terletak di Toroh Lema Batu Kalo Karang Kel. Labuan Bajo, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat, Prov. NTT, antara H.M. Djuje melawan Ente Puasa, dkk (11 orang), Nomor Reg. Kasus: 01/SKP/IV/2014, tanggal 6 Juni 2014;
903. Satu Jepit Asli BA. Peninjauan Lokasi Sengketa, Obyek Tanah Seluas $\pm 26.400\text{m}^2$ terletak di Toroh Lema Batu Kalo, Karang Kel. Labuan Bajo, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat, Prov. NTT, antara H.M. Djuje melawan Ente Puasa, dkk (11 orang), Nomor Reg. Kasus: 01/SKP/IV/2014, tanggal 10 Juni 2014
904. 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan yang ditanda tangani oleh H. Muhammad Abu Bakar Adam Djude (belum ditanda tangani);
905. 1 (satu) lembar asli surat Hibauan. Nomor: Pem.138/ I/2018 Tanggal 17 Januari 2018;
906. 1 (satu) lembar fotocopy surat Mohon Tindak Lanjut Proses Pengukuran Tanah An. H.M Abubakar Adam Djude dan Ente Puasa, dkk. Nomor: Pem.593/229/III/2014 Tanggal 1 Maret 2014;
907. 1 (satu) lembar Disposisi berisikan 4 (empat) lembar asli surat Perihal Mohon untuk sementara tidak memproses penerbitan sertifikat dari masing-masing pemilik tanah yang diajukan oleh saudara Andi Nabit dkk di Lokasi Gusoh Ngea-Toroh Sintangga dan Bukti di Sebelah Timur Karanga, Kelurahan Labuan Bajo, Nomor:01/HAD/X/18 Tanggal 12 Oktober 2018;
908. 1 (satu) lembar Disposisi berisikan 5 (lima) lembar asli surat Permohonan Penundaan Sementara Proses Penerbitan Sertipikat Tanah yang ditanda tangani oleh Muhammad Noval, Tanggal 11 Maret 2019;
909. 1 (satu) lembar asli surat Peninjauan Kembali Akta Hibah No.120/HB/KK/V/2017, Nomor: Pem.593/1713.a/XI/2017 Tanggal 01 november 2017;
910. 1 (satu) lembar Disposisi berisikan 6 (enam) lembar asli surat Permohonan Penundaan Sementara Proses Penerbitan Sertipikat Tanah, yang ditanda tangani oleh Soeharman Tanggal 11 Maret 2017;
911. 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar, No. 15/PPAT-KOM/III/2018 Tanggal 06 Maret 2018. Perihal Rekap PPAT Kantor Camat Komodo Bulan Februari Tahun 2018;
912. 1 (satu) lembar asli surat Pemberitahuan Sidang Panitia 'A' an. Veronika Syukur, Nomor: 335/2-53.15/XII/2017 Tanggal 18 Desember 2017;

Hal 184 dari 281 hal Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

913. 1 (satu) lembar Disposisi berisikan 1 (satu) lembar asli surat Data Tanah Milik Pemerintah, Nomor: 500/406/HAT/2006 Tanggal 12 Juli 2006;
914. 1 (satu) lembar Disposisi berisikan 1 (satu) lembar asli surat Perihal Undangan Rapat, Nomor: Pem.130/385/IX/2006 Tanggal 19 September 2006;
915. 1 (satu) lembar Disposisi berisikan 1 (satu) lembar asli surat Perihal Penyelesaian Masalah Tanah Pemda, Nomor: Pem.130/405/IX/2006 Tanggal 29 September 2006;
916. 1 (satu) lembar Disposisi berisikan 1 (satu) lembar asli surat Perihal Pendaftaran Tanah Ulayat, Nomor: Pem.130/485/XII/2005 Tanggal 23 Desember 2005;
917. 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Penyerahan Kuasa yang di tanda tangani oleh H. Ishaka, Tanggal 21 April 1997;
918. 1 (satu) lembar Disposisi berisikan 5 (lima) lembar asli surat Perihal .Keberatan atas Pengukuran dan mohon Pembantalan Penerbitan Sertipikat atas bidang tanah Kering/ladang di Toroh Lema yang diajukan/Dimohonkan oleh sdr. Sukri,dkk, Nomor: A.03/LO.GKP.RF/II/2016 Tanggal 09 februari 2016;
919. 1 (satu) lembar Disposisi yang berisikan 3 (tiga) lembar Fotocopy surat Perihal Penolakan setiap Permohonan sertifikat Hak atas Tanah di atas tanah Milik Ir. Nicolaus Naput (Peta Terlampir) yang terletak di Toroh Lema Karang, kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten manggarai Barat. No. Ref: 14/IMYBS/XII/2018 Tanggal 5 Desmber 2018;
920. 1 (satu) lembar Disposisi berisikan 1 (satu) lembar asli Surat Undangan Klarifikasi, Nomor: 1235/53.15/600.13/XII/2014 Tanggal 03 Desember 2014;
921. 1 (satu) lembar Disposisi berisikan 2 (dua) lembar asli Surat Udangan Pengkajian dan Penelitian Lokasi Tanah Kasus Pertanahan dengan obyek Sengketa Kepemilikan Hak Atas Tanah, terletak di Karang Kelurahan Labuan Bajo Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur, Nomor: 878/53.15/600.13/IX/2017 Tanggal 12 September 2017;
922. 1 (satu) lembar Disposisi berisikan 1 (satu) lembar asli Surat Undangan Klarifiukasi Tanah di Karang, Nomor: Trantib.300/3464/XI/2017 Tanggal 10 November 2017;
923. 1 (satu) lembar Disposisi berisikan 1 (satu) lembar asli Surat Undangan, Nomor: DPRKPP.640/737/XII/2017 Tanggal 13 Desember 2017;
924. 1 (satu) lembar asli surat Pemberitahuan Sidang Panitia 'A' an. Fransiskus Subur (2 Bidang), Nomor: 263/2-53.15/IX/2017 Tanggal 07 September 2017;
925. 1 (satu) lembar Disposisi berisikan 2 (dua) asli Surat Permintaan Keterangan/ Klarifikasi atas Permohonan Penerbitan Hak Milik Tanah An.Sdr.Nikolaus Naput, Nomor: 1052/53.15/300.5/2016 Tanggal 27 Desember 2016;
926. 1 (satu) lembar Disposisi berisikan 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan, Nomor: 600/53.15-600.13/VIII/2016 Tanggal 1 Agustus 2016;
927. 1 (satu) bundel asli Dokumen Akta Jual Beli, Nomor: 02/JB/KK/I/2017;
928. 1 (satu) lembar Disposisi berisikan 1 (satu) lembar Asli surat Mohon Persertifikatan Tanah Pemda di Toroh Lemma Batu Kallo/Karang, Nomor: 553/53.15.300/VII/2018 Tanggal 10 Juli 2018;

Hal 185 dari 281 hal

Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

929. 1 (satu) lembar Disposisi berisikan 1 (satu) lembar Asli Surat Undangan , Nomor: Pem.131/155/VI/2018 Tanggal 26 Juni 2018;
930. 1 (satu) buah buku Agenda Surat Masuk Tahun 2014;
931. 1 (satu) buah buku Agenda Surat Keluar Tahun 2014;
932. Data file dokumen .9 BERKAS PAKE dari Harddisk komputer Merek HP LVI56IX,CPU merek Acer Intel Core B-4130
933. 1 (satu) bundel asli dokumen permohonan atas nama DAVID ANDRE PRATAMA
934. 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan penyerahan tanah adat yang telah ditandatangani oleh Haji Muh. Abubakar Adam Djuje pada tanggal 11 Februari 2013
935. 1 (satu) lembar surat asli perihal pemeriksaan sidang Panitia A atas nama SUAIB TAHIYA dan SUPARDI TAHIYA yang terletak di Karangan, Kel. Labuan Bajo, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat Nomor : 1004/53.15.200.3/IX/2014 tanggal 16 September 2014
936. 1 (satu) jepit foto copy doumen surat bukti penyerahan tanah adat
937. 3 (tiga) lembar asli surat penolakan setiap permohonan hak atas tanah di atas tanah yang merupakan tanah milik Ir. Nikolaus Naput (Peta terlampir) yang terletak di Karangan, Kel. Labuan Bajo, Kec. Komodo, Nomor.Ref : 19/IMYBS/IV/2017 tanggal 8 Desember 2017.
938. 1 (satu) lembar asli Surat Undangan Mediasi, Nomor : 626/53.15/600.13/VIII/2016 tanggal 04 Agustus 2016
939. 1 (satu) lembar asli surat Undangan Mediasi ke dua, nomor : 432/53.15/600.13/V/2016 tanggal 25 Mei 2016
940. 1 (satu) lembar surat undangan mediasi, Nomor : 221/53.15/600.13/III/2016 tanggal 16 Maret 2016
941. 1 (satu) Lembar footo copy surat penyerahan Kuasa tanggal 1 November 1996
942. 1 (satu) bundel Fotocopy Dokumen Tanah an. AMRAN ALIMAN lokasi: Batu Kalo tanggal 8 – 8 – 2017 :
943. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen ACHYAR ABDURAHMAN, SH. Dalam map kertas berwarna biru;
944. 1 (satu) bundel dokumen tanah atas nama GORIS MERE dalam map plastic berwarna merah, yang terdiri dari :
- 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Kepemilikan Tanah nomor: Pem.593/3614/XI/2017 tanggal 21 November 2017 atas nama Drs. GORIES MERE;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Belum/Kena Pajak nomor: Pem.594/3615/XI/2017 tanggal 21 November 2017 atas nama Drs. GORIES MERE;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Hak Atas Tanah nomor: Pem.593/3616/XI/2017 tanggal 21 November 2017 atas nama Drs. GORIES MERE;
 - 2 (dua) lembar fotocopy Perjanjian Jual Beli Tanah hari Kamis, tanggal 17 November 2017 antara MUHAMMAD ACHYAR, SH. Kepada Drs. GORIES MERE;
945. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Bukti Penyerahan Tanah Adat tanpa tanggal dan tahun dari HAJI ISHAKA dan HAKU MUSTAFA kepada STEFAN BAHAN;
946. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan / Penyerahan Tanah Adat tanggal 18 Mei 1992 antara ISHAKA dan HAKU MUSTAFA kepada USMAN A. KAHAR;

Hal 186 dari 281 hal

Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

947. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan tanggal 01 April 1995 atas nama KAMIS HAMNU;
948. 1 (satu) lembar fotocopy lampiran surat keterangan tanggal 01 April 1995 dengan nama yang membuat keterangan KAMIS HAMNU;
949. 1 (satu) lembar fotocopy peta;
950. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Kepemilikan Tanah nomor: Lbj.593/6206/XI/2013 tanggal 06 November 2013 atas nama HAMZAH SIDIK;
951. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Bukti Penyerahan Tanah Adat dari HAJI ISHAKA dan HAKU MUSTAFA kepada GANI yang terletak di WAE CICU TIMUR, Desa Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Daerah Tingkat Dua Manggarai, tanpa tanggal, tahun dan nomor;
952. 1 (satu) jepitan asli lembaran disposisi Lurah Labuan Bajo dari Badan Pertanahan Nasional, Nomor Surat: 1123/5-53.15.200/XI/2018 tanggal 13 November 2018 perihal Mediasi atas Keberatan Sdr. Nahar, Wahyudin, dan Sarjono terhadap Permohonan Hak atas tanah atas nama Lutfin, dengan lampiran Kronologi Masalah Tanah yang diajukan Permohonan Hak oleh Lutfin atas tanah terletak di Desa Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
953. 1 (satu) jepitan asli lembaran disposisi Lurah Labuan Bajo dari Badan Pertanahan Nasional, Nomor: 882/5-53.15.200/X/2018 tanggal surat 09 Oktober 2018;
954. 1 (satu) jepitan asli lembaran disposisi Lurah Labuan Bajo dari Badan Pertanahan Nasional, nomor: 243/6-53.15/X/2018 tanggal 23 Oktober 2018 perihal Pemberitahuan Sidang Panitia 'A' an. AMRAN ALIMAN;
955. 1 (satu) jepitan asli lembaran disposisi Lurah Labuan Bajo dari Badan Pertanahan Nasional, nomor: 1130/5-53.15.200/XI/2018 tanggal 26 November 2018;
956. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Kepemilikan Tanah nomor: Pem.593/2293/VII/2017 tanggal 04 Juli 2017 an. GANI;
957. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanah Tidak Dalam Keadaan Sengketa tanggal 04 Juli 2017;
958. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Belum/Tidak Kena Pajak nomor: Pem. 593/2295/VII/2017 tanggal 04 Juni 2017 an. GANI;
959. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Tidak Dalam Sengketa Nomor: Pem. 593/2294/VII/2017 tanggal 04 Juli 2017 an. GANI;
960. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Tidak Dalam Sengketa nomor: Pem. 593/2483/VII/2017 tanggal 24 Juli 2017 an. DUS;
961. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanah Tidak Dalam Keadaan Sengketa tanggal 24 Juli 2017 an. DUS;
962. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Kepemilikan Tanah nomor: Pem. 593/2463/VII/2017 tanggal 24 Juli 2017 an. DUS;
963. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Belum/Tidak Kena Pajak nomor: 593/2465/VII/2017 tanggal 24 Juli 2017 an. DUS;
964. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Belum/Tidak Kena Pajak Nomor: Pem.593/957/IV/2018 tanggal 26 April 2018 an. ALIMUDIN KAMIS;
965. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Kematian nomor: Pem. 470/958/IV/2018 tanggal 26 April 2018;
966. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Belum/Tidak Kena Pajak nomor: Pem. 593/957/IV/2018 tanggal 26 April 2018 an. KAMIS HAMNU;
967. 1 (satu) lembar asli Surat dari Badan Pertanahan Nasional nomor: 548/002-24.15/VI/2016 tanggal 16 Juni 2016 tentang Pemberitahuan Sidang Panitia 'A' an. Muhamat Tayeb;

Hal 187 dari 281 hal Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

968. 1 (satu) bundel Dokumen Tanah an. KAMIS HAMNU als. FATIMA BADO SALAM lokasi KARANGAN – 28/08/2017, yang terdiri dari :
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepemilikan Tanah nomor: Pem. 593/2718/VIII/2017 tanggal 25 Agustus 2017 an. FATIMA BADO SALAM. (tanda tangan Lurah tanpa cap);
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Belum/Tidak Kena Pajak nomor: Pem. 593/2720/VIII/2017 tanggal 25 Agustus 2017 an. FATIMA BADO SALAM (tanda tangan Lurah tanpa cap);
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanah Tidak Dalam Sengketa nomor: Pem. 593/2719/VIII/2017 tanggal 25 Agustus 2017 an. FATIMA BADO SALAM (tanda tangan lurah tanpa cap);
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanah Tidak Dalam Keadaan Sengketa tanggal 25 Agustus 2017 (tanda tangan lurah tanpa cap, tidak ada tanda tangan dari FATIMA BADO SALAM);
 - 2 (dua) lembar fotocopy pengajuan data baru kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Barat;
 - 1 (satu) lembar fotocopy KTP an. FATIMA BADO SALAM;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Bukti Penyerahan Tanah Adat dari HAJI ISHAKA dan HAKU MUSTAFA kepada KAMIS HAMNU, tanpa tanggal;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Penolakan Warisan tanggal 09 Mei 2016;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Waris tanggal 09 Mei 2016.
969. 1 (satu) bendel asli Rekomendasi nomor: Ekbang.552.2/1676/IX/2016 tanggal 27 September 2016;
970. 1 (satu) bendel Dokumen tanah an. ALWI CHANDRA dalam map kertas warna kuning, yang terdiri dari:
- 1 (satu) lembar Surat dari Bupati Manggarai Barat nomor: Pem.131/28/I/2016 tanggal 18 Januari 2016 kepada Bpk. H. Muhammad A. A. Djudje perihal Penegasan;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Pemilikan Tanah/ Penguasaan Tanah nomor: Lbj. 593/3276/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 17 Oktober 2012, Reg. No: Lbj. 593/3276/X/2012;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Penyerahan Kuasa tanggal 23 Maret 2000 dari ISMAIL DJUDJE, DKK kepada HAJI MUHAMAD ABUBAKAR ADAM DJUDJE;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Silsilah Keturunan Haruna Djudje tanggal 23 Maret 2004;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Kronologis Kepemilikan Tanah Haruna Djudje (Mbo Haruna) di Pulau Bajo bagian Utara;
 - 1 (satu) lembar fotocopy gambar/sketsa Tanah Mbo haruna (Haruna Djudje) lokasi Pulau Bajo bagian Utara an. Ahli Waris : Haji Muhamad Abubakar Adam Djudje;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan an. H. Muh. Abubakar Adam Djudje, beralamat Cempa – Lingkungan II, Labuan Bajo, Manggarai Barat sebesar Rp 2.970.000,- (dua juta Sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) tanggal 30 November 2012;
 - 1 (satu) lembar fotocopy peta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) jepitan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah nomor: Lbj. 593/26/II/2014 tanggal 06 Januari 2014;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat dari Badan Pertanahan Nasional nomor: 858/53.15/200.3/X/2016 tanggal 25 Oktober 2016;
- 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Pembayaran Permohonan SK Pemberian Hak, nomor berkas: 5683/2016 dari ALWI CHANDRA IBRAHIM sebesar Rp 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar fotocopy Pengumuman tanpa nomor & tanggal, tahun 2016;
- 1 (satu) lembar fotocopy Panitia Pemeriksa Tanah A, tanpa nomor, tanggal, dan tahun;
- 1 (satu) jepitan data tentang Pemilikan dan Penguasaan Hak atas Tanah;
- 1 (satu) jepitan fotocopy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah nomor: Lbj. 593/26/II/2014 tanggal 06 Januari 2014 an. HAJI MUH. A. ADAM DJUDJE;
- 1 (satu) jepitan fotocopy Kronologis Kepemilikan Tanah Warisan atas nama H. Adam Djude di Pulau Bajo Bagian Barat
- 971. 1 (satu) jepitan asli Surat Keterangan Belum/Tidak Kena Pajak nomor: Pem. 593/2039/X/2016 tanggal 17 Oktober 2016 an. FAROUK DJAWAS;
- 972. 1 (satu) bendel Berkas Tanah an. DAENG NGINTAN dan ABU SOUFIAAN DG PABETA dalam map berwarna hijau, yang terdiri dari:
 - 1 (satu) jepitan fotocopy Surat Kepada Bapak Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Manggarai Barat dari WAHYUDIN perihal Tindak Lanjuti Susulan Hasil Gelar Kasus poin (e) dan Pembatalan Penerbitan Sertifikat an. Nikolaus Naput;
 - 1 (satu) jepitan fotocopy Surat Kejaksaa Agung Republik Indonesia nomor: B-230/E/Ejp/01/2013 tanggal 22 Januari 2013 perihal Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum yang obyeknya berupa tanah;
 - 1 (satu) jepitan fotocopy surat kepada Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Manggarai Barat dari H. MUSTAJIB dan WAHYUDIN tanggal 17 September 2015;
 - 1 (satu) lembar asli surat Bupati Manggarai Barat nomor: Pem. 131/212/VIII/2015 tanggal 28 Agustus 2015;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kepada Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Manggarai Barat dari Hj. Enting Martini, Muhamad Thasrif Daeng Pabeta, Nurhayati Daeng Mawera, Haji Mustajib, Haji Sukri tanggal 11 Juni 2015;
 - 1 (satu) lembar tulisan tangan.
- 973. 1 (satu) bendel Masalah Tanah Batu Gosok – Karangan, H. Abasido – J Mekes dalam map berwarna biru, yang terdiri dari:
 - Surat Badan Pertahanan Nasional Kabupaten Manggarai Barat kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo up. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata nomor: 03/Pdt.G/2012/PN-LBJ tanggal 28 Mei 2012;
 - Surat Law Office Gabriel Kou, SH. & Partners kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo perihal Eksepsi dan Jawaban Tergugat II dalam Perkara Perdata nomor: 03/Pdt.G/2012/PN-LBJ tanggal 23 Mei 2012;

Hal 189 dari 281 hal

Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Eduardus Gunung, SH. & Rekan kepada Majelis Hakim Perkara Perdata No. 03/Pdt.G/2012/PN-LBJ tanggal 23 Mei 2012;
- Surat Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Insani (PKBHI) Bima-NTB perihal Replik terhadap Eksepsi/Jawaban dalam Pokok Perkara Tergugat I, II, dan tergugat III / Gugatan Rekonvensi dari Tergugat III Konvensi tanggal 13 Juni 2012.
- 974. 1 (satu) jepitan asli Surat Keterangan Kepemilikan Tanah nomor: Pem. 539/361/II/2016 tanggal 29 Februari 2016 an. MATHEUS ARMON;
- 975. 1 (satu) bendel Dokumen Tanah an. FATIMA BADO SALAM – KAMIS HAMNU, lokasi Wae Cicu Timur, Karang – 15/04/2018 dalam Map kertas berwarna kuning;
- 976. 1 (satu) bendel Dokumen Tanah an. WAHYUDIN, lokasi Karang – 12/01/2017 dalam Map plastik berwarna biru, yang terdiri dari:
 - 1 (satu) jepitan fotocopy surat nomor : 01/YAW/I/2018 tanggal 15 Januari 2018 perihal Sanggahan;
 - 2 (dua) lembar fotocopy Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Manggarai nomor: Pem. 014/395/78 tanggal 11 Agustus 1978 perihal Persoalan Tanah an. Haji Makki Almarhum;
 - 2 (dua) lembar fotocopy surat Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara RI nomor: 123/M.PAN/12/2000 tanggal 18 Desember 2000 perihal Persoalan Tanah : Abu Soufyan Daeng Pabeta;
 - 2 (dua) lembar fotocopy Izin Penggunaan Tanah Makam nomor: 00842/1.776.121.101 tanggal 28 Mei 2014;
 - 2 (dua) lembar fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 14 Juli 2014;
 - 1 (satu) jepitan fotocopy Surat Kuasa Mengurus Tanah Warisan tanggal 17 Maret 2016;
 - 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Susunan Silsilah Keturunan (alm) H. Makki
 - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 20 Maret 2016;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Warisan tanggal 01 April 2016;
 - 1 (satu) jepitan fotocopy Surat Pemberian Hibah/Pelimpahan Hak Milik Tanah tidak ada nomor, tanggal 15 Mei 1990;
 - 1 (satu) jepitan fotocopy Surat Pernyataan Penolakan Warisan tanggal 09 Januari 2017;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah nomor: Pem. 593/48/I/2017 tanggal 10 Januari 2017 an. MUHAMMAD THASYRIT DAENG M.;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Tanah Tidak Dalam Sengketa nomor: Pem. 593/ 49/ I/ 2017 tanggal 10 Januari 2017 an. MUHAMMAD THASYRIT DAENG M.;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Belum/Tidak Kena Pajak nomor: Pem. 593/ 50/ I/ 2017 tanggal 10 Januari 2017 an. MUHAMMAD THASYRIT DAENG M.;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 10 Januari 2017 an. MUHAMMAD THASYRIT DAENG M.;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Tanah Tidak Dalam Keadaan Sengketa tanggal 10 Januari 2017 an. MUHAMMAD THASYRIT DAENG M.;

Hal 190 dari 281 hal

Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Penanaman Tanda Batas Tanah tanggal 10 Januari 2017 an. MUHAMMAD THASYRIT DAENG M;
 - 1 (satu) jepitan Surat Pernyataan Hibah tanggal 20 September 2016 dari Hj. ENTIN MARTINI, S.Pd., DKK kepada WAHYUDIN;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemberitahuan Objek Pajak lokasi Karang, Kel. Labuan Bajo dengan luas tanah +/- 25.000 m²;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah nomor: Pem. 593/ 2093/ X/ 2016 tanggal 26 Oktober 2016 an. WAHYUDIN;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Tanah Tidak Dalam Sengketa nomor: Pem. 593/2096/X/2016 tanggal 26 Oktober 2016 an. WAHYUDIN;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 26 Oktober 2016 an. WAHYUDIN;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Tanah Tidak Dalam Keadaan Sengketa tanggal 26 Oktober 2016 an. WAHYUDIN;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Belum/Tidak Kena Pajak nomor: Pem. 593/2097/X/2016 tanggal 26 Oktober 2016 an. WAHYUDIN;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Penanaman Tanda Batas Tanah tanggal 26 Oktober 2016 an. WAHYUDIN;
 - 2 (dua) lembar fotocopy Surat BPN Kabupaten Manggarai Barat nomor: 467/53.15/200.4/V/2017 tanggal 15 Mei 2017 perihal Pengukuran Batas Bidang Tanah an. WAHYUDIN;
 - 1 (satu) jepitan fotocopy Surat Keterangan Kepemilikan Hak atas Tanah nomor: Pem. Pem. 593/ 559.a/IV/2016 tanggal 01 April 2016 an. ABDULMANAN SIKING, DKK.
977. 1 (satu) bundel Dokumen an. HENDRIKUS HARDIMAN dalam Map Kertas berwarna Merah, yang terdiri dari:
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Bukti Penyerahan Tanah Adat dari HAJI ISHAKA dan HAKU MUSTAFA kepada HENDRIKUS HADIRMAN, DKK yang terletak di TANAH GENANG UTARA, desa Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Dati II Manggarai tanggal 01 Juli 1993;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan tanggal 06 Agustus 2019;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Kepemilikan Tanah nomor: Pem. 593/1897/IX/2019 tanggal 26 September 2019 an. HENDRIKUS HADIRMAN;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Tidak Dalam Sengketa nomor: Pem. 593/1898/IX/2019 tanggal 26 September 2019 an. HENDRIKUS HADIRMAN;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanah Tidak Dalam Keadaan Sengketa tanggal 26 September 2019 an. HENDRIKUS HADIRMAN;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Belum/Tidak Kena Pajak nomor: Pem. 593/ 1899/ IX/ 2019 tanggal 26 September 2019 an. HENDRIKUS HADIRMAN.
978. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kecamatan Komodo nomor: Pem.021.6/49/1984 tanggal 02 Februari 1984 perihal Kawasan Wae Cicu/Sekitarnya perlu disusulkan, sifat Instruksi;
979. 1 (satu) lembar asli surat BPN Kabupaten Manggarai nomor: 630/974 tanggal 12 Mei 1997 perihal Pengukuran dan Penetapan Batas Tanah Pemda Tk. II Manggarai;

Hal 191 dari 281 hal

Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

980. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Bukti Penyerahan Tanah dari USMAN POTA kepada LATIF H.A.R tanggal 05 Juli 1989;
981. 1 (satu) bendel asli Surat Keterangan/Penyerahan Tanah Adat dari ISHAKA dan HAKU MUSTAFA kepada SATAR DJUDJE tanpa tanggal dan tahun;
982. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Penyerahan Tanah Adat dari HAJI ISHAKA kepada SITI AISYAH H. ISHAKA tanggal 19 Februari 1994;
983. 2 (dua) lembar blanko kosong tanggal 27 November 1990 dan tanpa tanggal tahun 1996;
984. 1 (satu) bundel Berkas Surat Tanah an. ARMAN;
985. 1 (satu) bundel berkas an. Bapak NIKO NAPUT;
986. 1 (satu) jepitan fotocopy Surat Penyerahan Kuasa tanpa nomor tanggal 21 April 1997.
987. 1 (satu) jepitan asli Surat Pernyataan Pelepasan Atas Sebidang Tanah Kering Untuk Menjadi milik seterusnya tanggal 20 Oktober 1988;
988. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan/Penyerahan Tanah Adat antara ISHAKA dan HAKU MUSTAFA kepada KUBA USMAN tanggal 18 Juli 1990;
989. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Penyerahan antara ISHAKA dan HAKU MUSTAFA kepada IGNATIUS TUNUK tanggal 20 Agustus 1990;
990. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Bukti Penyerahan Tanah Adat antara HAJI ISHAKA dan HAKU MUSTAFA kepada SUDI lokasi WAE CICU TIMUR tanpa tanggal, tanpa tahun;
991. 1 (satu) bundel Berkas an. Bapak MUHAMMAD HARIS;
992. 1 (satu) bundel Arsip Jual-Beli Tanah Pariman – ABD. HARIS NASIPIN (Karangan – Wae Cicu);
993. 1 (satu) Buku Agenda Kantor Kelurahan Labuan Bajo;
994. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Penyerahan Tanah Adat lokasi Keranga, kel. Labuan Bajo, Kec. : Komodo, Kab: Manggarai Barat, dari RAMANG ISHAKA dan UMAR ISHAKA kepada YADIN tanggal 20 Desember 2005.
SARIFUDIN MALIK, S.ST, NIP : 19681231 200604 1 195, Umur : 52 tahun, Pekerjaan : Lurah Labuan Bajo
995. 1 (satu) lembar kertas foto yang berisi 8 (delapan) gambar yang berjudul foto penanaman pilar tanah Kerangan tanpa tanggal dan tahun.
996. 3 (tiga) lembar kertas foto yang berisi 24 (dua puluh empat) gambar yang berjudul foto rapat tanah Kerangan tanpa tanggal dan tahun.
997. 1 (satu) lembar tulisan tangan berjudul kronologi pembuatan peta hasil ukur BPN Bulan Mei tahun 2015 yang membuat AMBROSIUS SUKUR tanggal 16 Oktober 2020 dan laporan pelayanan pengukuran dan pemetaan batas bidang tanah degan nama pemohon an Drs. AMBROSIUS SUKUR atas nama Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat seluas 280.472 m2.
998. 1 (satu) Buku asli Berita Acara Serah Terima Dokumen Hasil Klarifikasi P3D antara Pemerintah Kabupaten Manggarai dengan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Nomor : PEM.115/30.a/I/2005 tanggal 24 Januari 2005
999. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran belanja sertifikasi tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat (Tanah Keraga) yang berlokasi di Kel. Labuan Bajo. Kec. Komod, Kab. Manggarai Barat denngan luas 30 Ha
1000. 3 (tiga) lembar foto kopi permohonan Pegnukuran dan rincian biaya ukur terhadap bidang tanah atas nama Peerintah Kab. Manggarai Barat.

Hal 192 dari 281 hal Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1001. 1 (satu) Lembar Asli Anggaran Pada Saat Pengukuran Tanah PEMDA Tanggal 14 Mei 1997;
1002. 1 (satu) Lembar Asli Anggaran Pembuatan Pilar Bantu Tanah PEMDA Di Labuan Bajo (10 Pilar Ukuran 30x30x70 Cm). Tanggal 28 Oktober 1997;
1003. 1 (satu) Lembar Fotocopy SURAT PERNYATAAN Tanggal 17 Januari 1998 Yang di buat oleh Fungsionaris Adat Nggorang (Haji Ishaka dan Haku Mustafa) Terkait Penyerahan Tanah seluas 30 Hektar Terletak di TOROH LEMMA BATU KALLO KEL.LABUAN BAJO;
1004. 1 (satu) Lembar Fotocopy Pernyataan Bersama ahli Waris dan Pelaku Terdakwa TANAH PEMDA MANGGARAI BARAT DI KERANGAN/TOROH LEMMA BATU KALLO Pada tanggal 03 Mei 2018;
1005. 1 (satu) Album Foto didalamnya berisi 18 (delapan belas) lembar foto.
1006. 2 (dua) lembar asli surat daftar nama-nama yang menerima pembagian tanah adat lokasi sebelah timur bukit wa cicu dan sekitarnya desa labuan bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Tahun 1993 yang telah ditanda tangani oleh Fungsionaris Adat/Tua Adat Ngorang an. H. Ishaka dan an. Haku Mustafa;
1007. 1 (satu) lembar asli surat pernyataan Bersama yang dibuat oleh Haji Ishaka, Haku Mustafa, Donatus Amput (An. Ir. Niko Naput) pada tanggal 06 Mei 1996
1008. 1 (satu) lembar foto kopi surat bukti penyerahan tanah adata dari Hhaji Ishakan dan Hau Mustafa kepada Abdul latif Har tanggal 1 Juli 1993 beserta Foto Kopi KTP atas nama Abdulatif Har.
1009. 1 (satu) lembar Foto kopi sketsa pembagian tanah di Wai Cicu tanpa tanggal dan tahun.
1010. 1 (satu) lembar foto kopi daftar nama-nama yang menerima pembagian tanah adat lokasi Karang, Desa Labuan Bajo, Ke. Komodo, Kab Dati II Manggarai Tahun 1993 tanggal 23 Desember 1993 beserta Peta Daftar Nama-nama yang menerima Pembagian Tanah Adat Lokasi Keranga, Desa Labuan Bajo. Kec. Komodo, Kab. Dati II Manggarai Tahun 1993.
1011. 1 (satu) bundel foto copy map warna kuning, Permohonan Tanah Pemda Manggara Barat;
1012. 1 (satu) bundel foto copy permasalahan tanah Pemda Kab. Manggarai Barat versus Tanah Masyarakat yang terletak di Kelurahan Labuan Bajo, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat (Karangan Toroh Lema Batu Kalo);
1013. 1 (satu) Petunjuk Teknis Inventarisasi Tanah Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2020, Nomor 5/Juknis-600.TP.03.01/XII tanggal 30 Desember 2019;
1014. Register I, Register Sub Bagian Umum Tata Usaha, 15 Mabar;
1015. Surat Law Office Muhammad Achyar and Acociates, Nomor 01/MAA-Permh/III/2019 tanggal 19 Maret 2019 beserta lampiran;
1016. Surat Kuasa Khusus Nomor: MP.02.02/385/53.15/III/2019 Tanggal 12 Maret 2019;
1017. Surat dari Kuasa Pemohon Makarius Paskalis Baut, S.H. tanggal 28 Februari 2019;
1018. Jawaban Termohon dalam Perkara TUN Nomor 1/P/FP/2019/PTUN.KPG antara Amran Aliman selaku Pemohon melawan Kepala BPN Manggarai Barat selaku Termohon;
1019. Putusan PTUN KPG Nomor: 1/P/FP/2019/PTUN-KPG;
1020. Surat Kakanwil BPN Prov. NTT Nomor: 156/6-53/IV/2015 tanggal 20 April 2015 perihal Permohonan Pengukuran dan Rincian Biaya Ukur terhadap Bidang Tanah an. Pemkab Manggarai Barat;

Hal 193 dari 281 hal

Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1021. 1 (satu) bundel foto copy Permohonan Hak Tanah an. David Andre Pratama;
1022. 1 (satu) jepitan kronologi masalah tanah di Karang Toroh Lema Batu Kalo, Kel Labuan Bajo, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat;
1023. 1 (satu) lembar Data Bidang Tanah Kepemilikan Sesuai Permohonan Yang Terdaftar di Kantor Pertanahan Manggarai Barat, Lokasi Karang Toroh Lema Batu Kalo, tanggal 28 Oktober 2019;
1024. 1 (satu) jepitan Progres Data Kegiatan Peningkatan Kualitas Data Pertanahan Mandiri Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat tanggal 21 November 2019;
1025. 1 (satu) buah flash disk warna merah hitam.
1026. 1 (satu) lembar asli surat Nomor : 291/53.15/300-6/III/2015 tanggal 25 Maret 2015 Perihal Permohonan Pengukuran dan Rincian Biaya dalam rangka Proses Penetapan Tanah Pemerintah Kabupaten manggarai Barat seluas 30 ha beserta 1 lembar Disposisi Surat Masuk Nomor Anggenda : 200/65-I tanggal 1 April 2015
1027. 1 (satu) lembar Asli Peta Bidang Tanah No. 02/24.20/PBT/P3B2T/2015 Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kaupaten Manggarai Barat, dengan luasan 280.472 m² Yang di tandagangani oleh A. RESDIYANA NDAPAMERANG, B.Sc, SH selaku Kepala Bidang Survey Pengukuran dan Pemetaan An. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi NTT tanggal 26 Mei 2015.
1028. 1 (satu) Map warna hijau Pengukuran dan Pemetaan batas Bidang Tanah An. Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2015 berisikan :
- 1) 1 (satu) CD Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan Batas Bidang Tanah Tahun Anggaran 2015 Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat
 - 2) 19 (sembilan belas) Gambar Ukur Nomor : 2/Tahun 2015 Pemohon atas nama Pemkab Manggrai Barat Drs. AMBROSIUS SUKUR tanggal 19 - 25 Mei 2015
 - 3) 1 (satu) jepitan Peta (berisi 4 lembar peta) Tanah Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Lokasi kerangka Kelurahan Labuan bajo, Kecamatan Komodo luas 31,84 ha terdiri dari :
 - Lahan Pemda : 29,17 ha
 - Lahan milik : 2,67 ha
 - 4) 1 (satu) jepitan Surat Bupati Manggarai Barat Nomor : Pem.131/137/V/2015 tanggal 13 Mei 2015 perihal penjelasan Tentang Tanah Pemda yang ditandatangani oleh DRS. AGUSTINUS CH. DULA selaku Bupati Manggarai Barat yang ditujukan kepada Sdr. Haji Muhammad Abubakar Adam Djudje.
 - 5) Asli Surat nomor : 15/SPP-01/V/2015 tanggal 25 Mei 2015 perihal Laporan Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan Batas Bidang Tanah An. Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat yang dibuat dan ditandatangani oleh Petugas ukur An Baliyo Muryono, ST.MT dan Sutardi yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi NTT beserta lampiran .
 - 6) 1 (satu) jepitan fotokopi Gambar Ukur Nomor : 634, 635/2013 tanggal 11 Novmber 2013 Pemohon atas nama :
 - SUKRI
 - SUPARDI TAHIYA
 - SUAIB TAHIYA
 - 7) 1 (satu) lembar Asli Surat Pemberitahuan pelaksanaan Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan Batas Bidang Tanah An. Pemerintah

Hal 194 dari 281 hal

Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabupaten manggarai Barat Nomor : 190/4-53.200/V/2015 tanggal 13 Mei 2015 yang ditandatangani oleh A. RESDIYANA NDAPAMERANG, B.Sc, SH selaku Kepala Bidang Survey Pengukuran dan Pemetaan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi NTT
- 8) 1 (satu) lembar asli Surat SPPD Tugas Nomor : 65/TU/V/2015 tanggal 4 Mei 2015 Kepada SUTARDI dan Surat Tugas Nomor : 64/TU/V/2015 tanggal 4 Mei 2015 kepada BALIYO MURYONO, ST.MT untuk melaksanakan pelayanan pengukuran Pengukuran dan Pemetaan Batas Bidang Tanah An. Pemerintah Kabupaten manggarai Barat yang berlokasi di Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, kabupaten Manggarai Barat beserta informasi tanggal 04 Mei 2015.
- 9) 1 (satu) lembar asli surat Nomor : 156/6-53/IV/2015 tanggal 20 April 2015 Perihal Permohonan Pengukuran dan Rincian Biaya ukur terhadap Bidang tanah Tanah An. Pemerintah Kabupaten manggarai Barat.
- 1029.1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Bupati Manggarai Barat, Drs. Agustinus CH Dula tanggal 10 November 2020;
1030. 2 (dua) lembar Peta Pembagian Tanah di Lokasi Gusongea dan Torositangga Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
1031. 1 (satu) bundel asli Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah tanggal 31 Desember 2012, dengan total asset tanah sebesar 106.484.377.000,- (seratus enam milyar empat ratus delapan puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
1032. 2 (tiga) bundel asli Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah tanggal 31 Desember 2014, dengan total asset tanah sebesar Rp 77.507.405.000,- (tujuh puluh tujuh milyar lima ratus tujuh juta empat ratus lima ribu rupiah).
1033. 1 (satu) bendel Surat Keterangan No: 900/BPKD/1969/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020;
1034. 1 (satu) bendel Surat Keterangan No: 900/BPKD/1968/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020;
1035. 1 (satu) lembar Asli Kartu Disposisi tanggal 21 Januari 2012 perihal Surat Pengantar Laporan Daftar Barang Inventaris pada bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda KMB TA. 2012 dari Kepala Bagian Adm. Pemerintahan Umum Setda KMB dan 1 (satu) bundel Daftar Inventaris Barang Milik Daerah Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat tahun 2012;
1036. 1 (satu) bundel asli Daftar Inventaris Barang Milik Daerah Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat tahun 2012 bercoverkan Mika Hijau;
1037. 1 (satu) bundel odner asli Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Lampiran Daftar Aset Daerah Sekretariat Daerah Pendataan dan Penilaian Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat TA. 2007.
1038. 1 (satu) jepitan fotocopy Surat Keterangan No: 900/BPKD/1969/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020, yang berisi:
- a. 1 (satu) lembar informasi data pembayar, nomor obyek pajak: 53.16.010.030.003-0403.0, luas bumi 40.000 m2, alamat obyek pajak : Toh Lemma Batu Kalo dengan nama wajib pajak MUH. A. ADAM DJUDJE tanggal 26 Oktober 2020 sebesar Rp 49.462.400,- (empat puluh Sembilan
- b. 1 (satu) lembar informasi data pembayaran, nomor obyek pajak: 53.16.010.030.001-0302.0, luas bumi 28.310 m2, alamat obyek pajak :

Hal 195 dari 281 hal

Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Karangan dengan nama wajib pajak PAULUS GRANS NAPUT tanggal 26 Oktober 2020, sebesar Rp 51.659.181,- (lima puluh satu juta enam ratus lima puluh Sembilan ribu seratus delapan puluh satu rupiah);
- c. 1 (satu) lembar informasi data pembayaran, nomor obyek pajak: 53.16.010.030.001-0299.0, luas bumi 39.380 m2, alamat obyek pajak : Karangan dengan nama wajib pajak NIKOLAUS NAPUT tanggal 26 Oktober 2020, sebesar Rp 71.859.363,- (tujuh puluh satu juta delapan ratus lima puluh Sembilan ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah);
- d. 1 (satu) lembar informasi data pembayaran, nomor obyek pajak: 53.16.010.030.001-0300.0, luas bumi 27.720 m2, alamat obyek pajak : Karangan dengan nama wajib pajak MARIA FATMAWATI NAPUT tanggal 26 Oktober 2020, sebesar Rp 50.582.568,- (lima puluh juta lima ratus delapan puluh dua ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah);
- e. 1 (satu) lembar informasi data pembayaran, nomor obyek pajak: 53.16.010.030.001-0301.0, luas bumi 28.230 m2, alamat obyek pajak : Karangan dengan nama wajib pajak IRENE ELISA WINARTHY NAPUT tanggal 26 Oktober 2020, sebesar Rp 51.513.200,- (lima puluh satu juta lima ratus tiga belas ribu dua ratus rupiah);
- f. 1 (satu) lembar informasi data pembayaran, nomor obyek pajak: 53.16.010.030.003-0399.0, luas bumi 8.447 m2, alamat obyek pajak : Karangan dengan nama wajib pajak RUDYANTO SULIAWAN tanggal 26 Oktober 2020, sebesar Rp 11.376.284,- (sebelas juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah);
- g. 1 (satu) lembar informasi data pembayaran, nomor obyek pajak: 53.16.010.030.001-0303.0, luas bumi 28.220 m2, alamat obyek pajak : Karangan dengan nama wajib pajak JOHANES VANS NAPUT tanggal 26 Oktober 2020, sebesar Rp 51.494.952,- (lima puluh satu juta empat ratus Sembilan puluh empat ribu Sembilan ratus lima puluh dua rupiah).
1039. Satu (1) jilitan berkas tanda terima penyerahan (301 A) tahun 2017 Buku III, tanggal penyerahan mulai dari tanggal 11-04-2017 sampai tanggal 16-06-2017.
1040. Satu (1) jilitan berkas tanda terima penyerahan (301 A) tahun 2017 Buku II, tanggal penyerahan mulai dari tanggal 13-02-2017 sampai tanggal 11-04-2017.
1041. Satu (1) jilitan berkas tanda terima penyerahan (301 A) tahun 2017, tanggal penyerahan mulai dari tanggal 05-01-2017 sampai tanggal 10-02-2017.
1042. Satu (1) jilitan berkas tanda terima penyerahan (301 A) tahun 2017 s/d 2018, tanggal penyerahan mulai dari tanggal 04-10-2017 sampai tanggal 29-12-2017.
1043. Satu (1) jilitan berkas tanda terima penyerahan (301 A) tahun 2014, tanggal penyerahan mulai dari tanggal 17-04-2014 sampai tanggal 08-08-2014.
1044. Satu (1) jilitan berkas tanda terima penyerahan (301 A) tahun 2013, tanggal penyerahan mulai dari tanggal 24-10-2013 sampai tanggal 24-04-2014.
1045. Satu (1) jilitan berkas tanda terima penyerahan (301 A) tahun 2015, tanggal penyerahan mulai dari tanggal 03-02-2015 sampai tanggal 21-03-2016, 1-10-2016.

Hal 196 dari 281 hal

Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1046. Satu (1) jilitan berkas tanda terima penyerahan (301 A) tahun 2014 s/d 2015, tanggal penyerahan mulai dari tanggal 11-11-2014 sampai tanggal 02-03-2015.
1047. Satu (1) jilitan berkas tanda terima penyerahan (301 A) tahun 2016 Buku II, tanggal penyerahan mulai dari tanggal 21-03-2016 sampai tanggal 02-08-2016.
1048. Satu (1) jilitan berkas tanda terima penyerahan (301 A) tahun 2016 buku 3, tanggal penyerahan mulai dari tanggal 02-08-2016 sampai tanggal 28-11-2016.
1049. Satu (1) jilitan berkas tanda terima penyerahan (301 A) tahun 2017 buku IV, tanggal penyerahan mulai dari tanggal 16-06-2017 sampai tanggal 04-10-2017.
1050. Satu (1) jilitan berkas tanda terima penyerahan (301 A), tanggal penyerahan mulai dari tanggal 11-12-2009 sampai tanggal 23-10-2013.
1051. Satu Lembar Peta Situasi, terdiri dari satu bidang tanah Pemda dan 6 (enam) bidang tanah perorangan.
1052. Satu Jilitan Permohonan Pengakuan / Penegasan Hak atas Tanah Luas 4 Ha di Toroh Lemma Batu Kallo An. Haji Moh. Adam Djudje, Labuan Bajo 30-05-2015.
1053. Satu Jepitan surat Masuk Nomor 030/MAA-Sggghn/V/2018, tanggal 07 Mei 2018 dari Law Office, Muhamad Achyar dan Associates Advocades dan Legal Consultants Perihal Sanggahan/Keberatan.
1054. Satu Jepitan surat Masuk Nomor 030/MAA-Som/XI/2018, tanggal 30 November 2018 dari Muhamad Achyar dan Associates Advocades dan Legal Consultants Perihal Peringatan (Somasi).
1055. Satu jilitan Klarifikasi Tanah Muh.A. Adam Djudje (Haji Adam Djudje) di Lokasi Toroh Lemma Batu Kallo luas \pm 30 HA, Sebagian Luas \pm 7 HA diklaim oleh Ente Puasa, dkk.
1056. 1 (satu) lembar asli perhitungan luas koordinat lokasi tanah pemda di Kerangan Desa/Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo
1057. 1 (satu) buku agenda kerja dari Bapak Tagur Albertus
1058. 1 (satu) jepitan Hasil Ploting bidang tanah lokasi Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat.
1059. 1 (satu) lembar fotocopy Peta Bidang Tanah no. 02/24.20/PBT/P3B2T/2015 tanggal 26 Mei 2015, luas tanah 280.472 m², yang di tanda tangani oleh A. RESDYANA NDAPAMERANG, B.Sc. SH;
1060. 1 (satu) lembar fotocopy Peta Bidang Tanah no. 02/24.20/PBT/P3B2T/2015 tanggal 26 Mei 2015, luas tanah 242.212 m², yang di tanda tangani oleh A. RESDYANA NDAPAMERANG, B.Sc. SH;
1061. 2 (dua) lembar fotocopy Peta Dasar Pendaftaran no. 02/24.20/PDP/P3B2T/2015 tanggal 26 Juni 2015, luas tanah 242.212 m², yang ditanda tangani oleh A. RESDYANA NDAPAMERANG, B.Sc. SH;
1062. 2 (dua) lembar fotocopy Peta Pendaftaran no. 02/24.20/PP/P3B2T/2015 tanggal 29 Juni 2015, luas tanah 242.212 m², yang ditanda tangani oleh A. RESDYANA NDAPAMERANG, B.Sc. SH dan Peta Situasi.
1063. 1 (satu) asli Buku Tabungan BRI Britama, dengan nomor rekening: 0039-01-083846-50-7 atas nama CH MUDASIH, S ST yang beralamat di RT. 020 RW. 006, Kel. Naikolan, Kec. Maulafa Kota Kupang;
1064. 8 (delapan) lembar print out rekening koran Tabungan BRI Britama, dengan nomor rekening: 0039-01-083846-50-7 atas nama CH MUDASIH, S ST yang beralamat di RT. 020 RW. 006, Kel. Naikolan, Kec. Maulafa Kota Kupang;

Hal 197 dari 281 hal Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1065. 1 (satu) asli Buku Tabungan BRI Simpedes, dengan nomor rekening: 0039-01-015944-53-3 atas nama CH MUDASIH, S ST yang beralamat di Jl. Komodo No. 33 RT. 011 RW. 003, Kel. Air Nona
1066. 3 (tiga) lembar print out rekening koran Tabungan BRI Simpedes, dengan nomor rekening: 0039-01-015944-53-3 atas nama CH MUDASIH, S ST yang beralamat di Jl. Komodo No. 33 RT. 011 RW. 003, Kel. Air Nona.
1067. 1 (satu) bendel asli Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat nomot: 15/KEP/53.15/100-1/I/2016 tentang Pengangkatan Satuan Pengamanan (Satpam), Sopir, Cleaning Service, Pesuruh, dan Pramubakti pada Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2016 tanggal 05 Januari 2016;
1068. 1 (satu) bendel asli Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat Nomor: 17/KEP/53.15/100-1/I/2017 tentang Pengangkatan Tenaga Pramubakti pada Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat tahun anggaran 2017 tanggal 09 Januari 2017;
1069. 1 (satu) bendel asli Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat Nomor: 51/SK-53.15.UP.02.03/VII/2019 tentang Pemberhentian Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat tahun 2019 tanggal 05 Juli 2019;
1070. 1 (satu) bendel asli Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) pada Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat tahun 2019 nomor: 20/SK-53.15.KP.02.03/I/2019 tanggal 24 Januari 2019;
1071. 1 (satu) jepitan asli Kwitansi Pembayaran yang bermaterai Rp 6000,-, yang telah terima dari MATHEUS SANIANG NAGA SIAGIAN sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk pembayaran kelebihan luas bidang tanah seluas 2.750 m2 yang terletak di Karang Timur Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kab. Manggarai Barat tanggal 04 April 2016;
1072. 1 (satu) jepitan asli Kwitansi Pembayaran untuk pembayaran DP Tanda Jadi Tanah dengan harga jual lima puluh juta rupiah di lokasi bandara lama desa batu cermin, kecamatan Komodo, kab. Manggarai Barat dengan ukuran 15x35, seluas 525 m2 dengan batas-batas sebagai berikut: Utara : H. Jafar, Barat: Jalan, Timur: N. Jopo, Selatan: Laane sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Bayu S. dan diTerdakwakan oleh Agus Wanto tanggal 21 Mei 2017;
1073. 1 (satu) bendel Rekening Koran Tabungan BRI Britama dengan nomor rekening : 1112-01-010523-50-3 atas nama SIRATURRAHMI alamat Langka Kabe RT. 004 RW. 002, Kel. Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, dari tanggal 07 September 2015 sampai dengan 22 Desember 2018;
1074. 1 (satu) bendel Rekening Koran Tabungan BRI Britama dengan nomor rekening : 1112-01-008570-50-6 atas nama SIRATURRAHMI alamat Langka Kabe RT. 004 RW. 002, Kel. Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, dari tanggal 03 Desember 2013 sampai dengan 30 Desember 2018;
1075. 1 (satu) bendel Rekening Koran Tabungan BNI Taplus dengan nomor rekening : 0457094557 atas nama SIRATURRAHMI alamat Langka Kabe RT. 004 RW. 002, Kel. Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, dari tanggal 03 Agustus 2016 sampai dengan 10 November 2020;
1076. 1 (satu) buah Laptop berwarna hitam beserta charger merk Lenovo G40-45



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1077. 1 (satu) buah notebook berwarna coklat tulisan Bank BRI milik SIRATURRAHMI.
1078. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Bukti Penyerahan Hak Tanah Adat antara ISAHAKA dan HAKU MUSTAFA kepada H. ADAM DJUDJE tanggal 10 April 1990;
1079. 1 (satu) lembar peta yang diambil dari Google Maps (tanah karangan);
1080. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pembatalan Pembagian Tanah Adat di Lokasi Karangang (di dalam lokasi Ir. NIKO NAPUT) th. 1993 tanggal 06 Mei 1990;
1081. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Bersama (Haji Ishaka, Haku Mustafa, Donatus Amput (an. Ir. Niko Naput)) tanggal 06 Mei 1996;
1082. 1 (satu) lembar Surat dari Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat nomor: IP.02.03/1637.53.15/IX/2020 tanggal 22 September 2020;
1083. 1 (satu) jepitan Surat dari HAJI MUH. ABUBAKAR ADAM DJUDJE nomor: 01/HAD/X/2020 tanggal 05 Oktober 2020 kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Kab. Manggarai Barat;
1084. 1 (satu) lembar asli Gambar Lokasi Toroh Batu Kallo dan Karanga yang diserahkan Fungsionaris Adat/Tua Adat Kepada Pemda tanggal 26 April 1997;
1085. 1 (satu) amplop berwarna coklat yang bertuliskan "segel th 80 5 lembar harga Rp 75.000," yang berisikan 5 (lima) lembar segel;
1086. 1 (satu) amplop berwarna coklat yang bertuliskan "segel thn 81 5 lembar harga Rp. 1.500, jumlah Rp 7.500," yang berisikan 5 (lima) lembar segel;
1087. 1 (satu) amplop berwarna coklat yang bertuliskan "segel 1982 10 lbr : Rp 150.000," yang berisikan 10 (sepuluh) lembar segel;
1088. 1 (satu) amplop berwarna coklat yang bertuliskan "segel 1983 10 : Rp 150.000," yang berisikan 10 (sepuluh) lembar segel;
1089. 1 (satu) amplop berwarna coklat yang bertuliskan "segel thn 89 5 lembar harga Rp 75.000" yang berisikan 5 (lima) lembar segel;
1090. 1 (satu) amplop berwarna coklat yang bertuliskan "segel 90 Thn 90 10 lembar harga Rp 150.000" yang berisikan 6 (enam) lembar segel;
1091. 1 (satu) amplop berwarna coklat yang bertuliskan "segel thn 1993 15 lembar harga Rp 225.000" yang berisikan 9 (Sembilan) lembar segel tahun 1993, 1 (satu) lembar segel tahun 2002 dan 1 (satu) lembar kertas putih (buram);
1092. 1 (satu) bendel Daftar Penerima Pembagian Tanah Adat Lengkong Gusoh Ngea dan Toro Sitangga Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Propinsi NTT;
1093. 1 (satu) jepitan yang berisi 4 (empat) lembar peta lokasi dan ukuran;
1094. 1 (satu) lembar fotocopy surat nomor: Pem.051.9/630/XII/1994 tanggal 05 Desember 1994;
1095. 1 (satu) jepitan fotocopy Surat Kesepakatan tanggal 20 Agustus 2014 ;
1096. 2 (dua) lembar asli Daftar Nama-Nama Anggota yang tidak dipindahkan/tetap dalam lokasi Karangang sesuai kesepakatan antara Bapak Haji Ishaka – Bapak Haku Mustafa Bapak Donatus Amput mengatasnamakan Ir. Nikolaus Naput tanggal 06 Mei 1996;
1097. 1 (satu) jepitan Daftar yang menerima pembagian tanah adat di lokasi sebelah timur wae cicu dan karangan dan sekitarnya desa Labuan bajo kecamatan komodo kabupaten manggarai tahun 1993;
1098. 1 (satu) lembar asli Gambar Lokasi Toroh Batu Kallo dan Karanga yang diserahkan Fungsionaris Adat/Tua Adat tanggal 26 April 1997;

Hal 199 dari 281 hal

Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1099. 1 (satu) jepitan fotocopy Surat Bukti Penyerahan Hak Tanah Adat dari ISHAKA dan HAKU MUSTAFA kepada Hj. ADAM DJUDJE tanggal 10 April 1990;
1100. 1 (satu) map berwarna oranye yang bertuliskan Surat Kuasa Haji Sukri dan Haji Mustajib;
1101. 1 (satu) jepitan surat kuasa, Ir. Nikolaus Naput menyerahkan kuasa kepada Donatus Amput pada tanggal 03 Mei 1996 diTerdakwakan Benyamin Bahan mengetahui Sekretaris Desa Haji Adam Djudje yang belum ditanda tangani berjumlah 4 (empat) lembar;
1102. 1 (satu) lembar asli surat kuasa haji Muhammad abubakar adam djudje kepada sarjono bin sardi, SP untuk mencari pihak ketiga atau pembeli menawarkan jual beli tanah seluas ± 30 Ha yang berlokasi di Toroh Lemma Kallo, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kab. Manggarai Barat tanggal 18 Oktober 2014 dengan Terdakwa ZULKARNAIN DJUDJE, Mappiana djudje, Sarifudin Djudje, Suharni Djudje, Zuhaidin Djudje, Sasli Rais Djudje, Abdul Rifai Djudje, herawati Djudje, Fiqran Aziz Djudje, yang telah ditanda tangani selain Zulkarnain Djudje;
1103. 1 (satu) jepitan asli surat pernyataan kesepakatan Haji Moh. A. Adam Djudje kepada Donatus Endo bahwa pihak pertama sebagai pemilik tanah di Toroh Lemma Kallo dasar penyerahan adat tanggal 10 April 1990 luas ± 30 Ha dijual luas 20 Ha tanggal 12 Februari 2015;
1104. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir dan 1 (satu) lembar fotocopy gambar kasar situasi tanah pembagian adat lokasi karanga desa labuan bajo kecamatan Komodo pada tanggal 02 Juni 1992 penata Kamis Hamnu penggambar Haji Adam Djudje diketahui Kepala Desa Labuan Bajo an. Haji Adam Djudje;
1105. 2 (dua) jepitan asli penyerahan adat kepada Paulus Panis pada tanggal 27 Juli 1990;
1106. 1 (satu) lembar asli berita acara pembagian tanah adat lokasi Golo Binongko Desa Labuan Bajo Kec. Komodo, Kab. Mabar, pada hari Senin tanggal 28 September 1992 yang belum ditanda tangani;
1107. 1 (satu) jepit fotocopy catatan yang dibutuhkan kwitansi pembayaran yang diselesaikan oleh Palirio (Italia) sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
1108. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Penyerahan Tanah Adat kepada Haji Adam Djudje tanggal 27 Juli 1990 lokasi Tanah Genang Desa Labuan bajo Kecamatan Komodo Daerah tingkat II Manggarai luas 20x50 m²;
1109. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Penyerahan Tanah Adat kepada Zulkarnain Djudje tanggal 23 Maret 1990 lokasi Loho Binongko Desa Labuan Bajo Kec Komodo Daerah Tingkat II Manggarai luas 115 x 15 m²;
1110. 1 (satu) copy kwitansi uang ganti rugi tanah komunal/adat yang diterima tanah lokasi keranga kelurahan labuan bajo kecamatan Komodo kabupaten daerah tingkat II manggarai pada tanggal 14 Mei 1997 dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II Manggarai yang menerima Haji Ishaka dan Haku Mustafa diTerdakwakan Drs. Yos Vin Ndahur dan Yosef Latief diketahui J. Oematan BA;
1111. 1 (satu) lembar Surat Bukti Penyerahan Tanah Adat kepada Haji Adam Djudje tanggal 01 Juli 1993 lokasi sebelah timur keranga desa labuan bajo kecamatan Komodo kabupaten dati II Manggarai dengan luas 40x60 m²;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1112. 1 (satu) jepitan Riwayat Pekerjaan Haji Adam Djudje (Haji MA. Adam Djudje sejak tahun 1954 sampai dengan sekarang tahun, berjumlah 8 (delapan) lembar;
1113. 1 (satu) bendel daftar pembagian kapling tanah Gusoh Ngea dan Toroh Sitangga Kelurahan Labuan Bajo Kecamatan Komodo Kab. Mabar tanggal 01 Desember 2015;
1114. 1 (satu) jepit data kepemilikan tanah donatus amput sejumlah 3 (tiga) lembar;
1115. 1 (satu) bendel klarifikasi/pemilikan atas tanah adat di lokasi Toroh Lemma Batu Kallo oleh Haji Adam Djudje (Haji Muhammad Abubakar Adam Djudje), Ir. Nikolaus Naput an. Yayasan Pembangunan Sosial Manggarai dan Pemda Tingkat II Manggarai terletak di Kelurahan Labuan Bajo, Kec. Komodo, Kab. Mabar tanggal 30 April 2014;
1116. 1 (satu) map Lampiran Berita Acara Pembagian Tanah Adat di Lokasi Gusoh Ngea Kelurahan Labuan Bajo Kec. Komodo tanggal 15 Mei 1997, yang menata/membagi H. Adam Djudje, diketahui/disyahkan oleh Fungsionaris Adat/Tua Adat Nggorang Haji Ishaka dan Haku Mustafa diketahui Kepala Kelurahan Labuan Bajo Yoseph Latip;
1117. 1 (satu) lembar fotocopy Peta Lokasi yang telah di tipex tanggal 26 April 1997;
1118. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas sebidang tanah yang belum diisi batas-batasnya tanggal 02 November 1988 kepada Pemerintah Desa Labuan Bajo;
1119. 1 (satu) lembar asli Pengukuran Jalan Setapak dan tanah/batas tanah sekolah SDN 1 Labuan Bajo 1, tanggal 27 April 1997;
1120. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah Adat tanggal 21 Juli 1977 dari Haku Mustafa kepada Haji Djudje seluas ± 1 Ha letak Labuan Bajo, Desa Labuan Bajo, Kec. Komodo, Kab. Manggarai;
1121. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan an. Drs. YATUNG DJAFAR tanpa tanggal dan tahun;
1122. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Bukti Penyerahan Tanah Adat antara ISHAKA dan HAKU MUSTAFA kepada STANIS VILIS SUMARDI lokasi Lengkong Bune, Desa Labuan Bajo, Kec. Komodo, Kab. Daerah Tingkat II Manggarai, luas tanah ± 3.250 m² tanggal 27 Juli 1990;
1123. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Jual Beli atas sebidang tanah kering terletak di Desa Labuan Bajo tanggal 24 Oktober 1988;
1124. 1 (satu) jepitan Daftar Nama Nama Calon Pemilik Tanah yang mendapat Pembagian Tanah Adat dari Fungsionaris Adat/Tua Adat Nggorang di Lokasi Gusoh Ngea, Kelurahan Labuan Bajo, Kec. Komodo, pada tanggal 15 Mei 1997 dan telah ditata Kembali, setelah mengalami perubahan batas tanah bagian timur dari lokasi tersebut dengan pemilik tanah G. Tahija pada tahun 2001, tanggal 23 Maret 2002;
1125. 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1990 atas nama H. Adam Juje sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah), tanggal 01 Maret 1990;
1126. 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1990 atas nama H. Adam Juje sebesar Rp 1.349,- (seribu tiga ratus empat puluh Sembilan rupiah) tanggal 01 Maret 1990;
1127. 1 (satu) jepitan asli Surat Pernyataan atas nama PETRUS TAGUS tanggal 24 Oktober 2014;
1128. 1 (satu) jepitan fotocopy Surat Keterangan atas nama DONATUS ENDO tanggal 05 April 2014;

Hal 201 dari 281 hal

Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1129. 1 (satu) jepitan fotocopy Surat Bukti Penyerahan Tanah Adat dari HAJI ISHAKA dan HAKU MUSTAFA kepada TASWING BAKKAR TALAH, lokasi Wae Cicu Timur, Ds. Labuan Bajo, Kec. Komodo, Kab. Daerah Tingkat II Manggarai dengan luas 20x70, tanpa tanggal dan tahun;
1130. 8 (delapan) lembar fotocopy Surat Bukti Penyerahan Hak Tanah Adat antas ISAHAKA dan HAKU MUSTAFA kepada H. Adam Djudje, lokasi Toh Lemma Batu Kallo, Ds. Labuan Bajo, Kec. Komodo, Kab. Dati II Manggarai seluas ±30 Ha, tanggal 10 April 1990;
1131. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kuasa dari Hj. Fatima bin Amina kepada Blasius Janu, tanpa tanggal dan tahun;
1132. 1 (satu) lembar fotocopy peta skala 1 :2500 yang bertuliskan "Tanah Pemda Kab. Mabar", Dahering Koro, Salawing;
1133. 1 (satu) lembar fotocopy peta dengan tulisan "VS H. M. A. Djudje";
1134. 1 (satu) lembar Surat dari Haji Muh. A. Adam Djudje perihal : pencabutan Kembali surat keberatan tertanggal 10 juli 2014 prihal mohon pembatalan proses pensertifikatan Tanah di Lokasi Karang/Toh Lemma Batu Kallo, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kab. Manggarai Barat yang diajukan oleh sdr. Ente Puasa, DKK tanggal 13 Oktober 2014;
1135. 1 (satu) jepitan fotocopy Surat Kontrak antara MUHAMAD ABU BAKAR ADAM DJUDJE dengan ALI ANTONIUS, SH., MH. Tanggal 18 Juli 2014;
1136. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan atas nama HAJI MOH. A. ADAM DJUDJE tanggal 30 Maret 2015;
1137. 1 (satu) jepitan Surat Pernyataan atas nama HAJI MUHAMMAD ABUBAKAR ADAM DJUDJE tanggal 19 Maret 2018 tidak ditandatangani
1138. 1 (satu) lembar peta/sket tanah yang sebenarnya tanpa skla yang bertuliskan Tanah Milik Sasli Djudje, yang dibuat oleh Haji M. A. Adam Djudje tanpa tanggal dan tahun;
1139. 1 (satu) jepitan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah atas nama HAJI ISHAKA dan HAKU MUSTAFA kepada Drs. G. P. EHOK, tanpa tanggal dan tahun;
1140. 1 (satu) amplop berwarna putih yang bertuliskan "Matrei th 19 harga yg 500 RP 200.000" sejumlah 44 (empat puluh empat);
1141. 1 (satu) amplop berwarna putih yang bertuliskan "Matrei th 90 s.d 95, harga yang 1000 = Rp 7500 harga yang 500 Rp 5.500. yang 1000 10 lembar 275.000, yang 500 50 lembar;
1142. 1 (satu) buah agenda personal milik H. MA Adam Djudje;
1143. 1 (satu) buah agenda personal milik Adam Djudje;
1144. 1 (satu) buah agenda personal milik Adam Djudje;
1145. 2 (dua) lembar Peta Penataan Ulang Tanah lokasi Gusongea dan Torositangga, kelurahan Labuan Bajo, Kec, Komodo, Kab. Mabar, skala 1 : 1000, tanggal 01 Februari 2017;
1146. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Penyerahan Kuasa tanggal 21 April 1997 yang ditandatangani oleh Ketua Fungsionaris Adat/Tua Adat Nggorang, H. ISHAKA;
1147. 1 (satu) lembar Peta Gambar Kasar Tanah Adat yang diserahkan kepada Ir. Niko Naput, Masyarakat dan Pemda. Lokasi: Karangang – toroh batu kallo, toroh lemma dan wae cicu yang ditandatangani oleh Fungsionaris Adat Nggorang, H. Ishaka dan yang gambar, H. Adam Djudje tanggal 01 Januari 1998;
1148. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Situasi Tanah Persekutuan Adat Nggorang Lokasi Golo Karangang yang ditata oleh Sdr. A. Kamis Hamnu dibawah pengawasan H. Adam Djudje tanggal 17 Mei 1997;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1149. 1 (satu) buah mesin ketik merk OLYMPIA dengan label HY. GRADE Typewriter & Stationery Co. 78 south street phone JE 9-2868 Morristown, N. J., L. F. Wescott, W. J. Zilka;
1150. 1 (satu) buah pita mesin listrik merk CANON ES 3 – II;
1151. 1 (satu) buah mesin tik merk COMPANION;
1152. 1 (satu) buah mesin tik merk OLIVETTI;
1153. 1 (satu) buah mesin tik merk DAITO;
1154. 1 (satu) buah mesin tik tanpa merk yang bertuliskan HIL.
1155. 2 (dua) lembar Asli Surat Bukti Penyerahan Tanah Adat dari Ishaka dan Haku Mustafa selaku Fungsionaris Adat yang membagi dan menyerahkan tanah adat kepada Nicolaus Naput selaku wakil dari Yayasan Pembangunan Sosial Manggarai, tanggal 21 Oktober 1991
1156. 1 (satu) lembar kuitansi uang tanda pengakuan hak adat atas tanah adat yang terletak di Lokasi Toroh Lema Desa Labuan Bajo, yang diserahkan oleh Fungsionaris Adat/Dalu Nggorang/Bapak Ishaka dan Haku Mustafa dengan batas-batas sesuai dengan Isi Berita Acara Penyerahan Tanah Adat tertanggal 21 Oktober 1991 bertempat di Labuan Bajo dari Nicolaus Naput, terbilang Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang menerima Bapak Ishaka-Dalu Nggorang, dan Bapak Haku Mustafa-Wakil Dalu.
1157. 1 (satu) lembar asli Laporan Kehilangan Barang Nomor: LKB/018/I/2017/NTT Res Mabar tanggal 11 Januari 2017;
1158. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan atas nama Haji Muhamad Abubakar Adam Djudge tanggal 05 Januari 2016;
1159. 1 (satu) jepitan asli yang berisi Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan 4624/2016 atas nama pemohon FATIMA BADOSALAM tanggal 16 Agustus 2016 dan Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan 4624/2016 atas nama pemohon FATIMA BADO SALAM tanggal 16 Agustus 2016
1160. 1 (satu) lembar asli Buku Tabungan Mandiri, dengan nomor rekening: 161-00-0330445-3, atas nama SUPARDI TAHIYA yang beralamat di Kampung Ujung, RT. 002, RW. 001, Kel. Labuan Bajo, Komodo
1161. 1 (satu) asli Buku Tabungan BNI Taplus dengan nomor rekening: 0354395948 atas nama Bpk. Alfandri
1162. 1(satu) bendel Rekening Koran BNI Taplus dengan nomor rekening: 0354395948 atas nama Bpk. ALFANDRI, periode 06 Oktober 2014 sampai dengan 05 November 2020
1163. 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama FRANSISKUS SUBUR yang terletak di Karanga RT/RW Labuan Bajo, Komodo, Manggarai Barat tanggal jatuh tempo 30 Desember 2017 sebesar Rp 219.840,- (dua ratus Sembilan belas ribu delapan ratus empat puluh rupiah);
1164. 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Terima Setoran atas nama FRANSISKUS SUBUR, letak obyek pajak kecamatan Komodo, Desa/Kel Labuan Bajo, no SPPT (NOP): 531601003000103560 sebesar Rp 219.840,- (dua ratus Sembilan belas ribu delapan ratus empat puluh rupiah);
1165. 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama FRANSISKUS SUBUR yang terletak di Karanga RT/RW Labuan Bajo, Komodo, Manggarai Barat tanggal jatuh tempo 30 Desember 2017 sebesar Rp 204.160,- (dua ratus empat ribu seratus enam puluh);

Hal 203 dari 281 hal

Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1166. 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Terima Setoran atas nama FRANSISKUS SUBUR, letak obyek pajak kecamatan Komodo, Desa/Kel Labuan Bajo, no SPPT (NOP): 531601003000103570 sebesar Rp 204.160,- (dua ratus empat ribu seratus enam puluh);
1167. 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama ABDUL HARIS yang terletak di Karanga RT/RW Labuan Bajo, Komodo, Manggarai Barat tanggal jatuh tempo 30 Desember 2017 sebesar Rp 95.680,- (Sembilan puluh lima ribu enam ratus delapan puluh);
1168. 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Terima Setoran atas nama ABDUL HARIS, letak obyek pajak kecamatan Komodo, Desa/Kel Labuan Bajo, no SPPT (NOP): 531601003000103610 sebesar Rp 95.680,- (Sembilan puluh lima ribu enam ratus delapan puluh);
1169. 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama MATHEUS SANIANG NAGA yang terletak di Link. III RT/RW Labuan Bajo, Manggarai Barat tanggal jatuh tempo 31 Desember 2018 sebesar Rp 299.187,- (dua ratus Sembilan puluh Sembilan ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah);
1170. 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama MATHEUS SANIANG NAGA yang terletak di Link. III RT/RW Labuan Bajo, Manggarai Barat tanggal jatuh tempo 31 Desember 2018 sebesar Rp 187.827,- (seratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah);
1171. 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama MATHEUS SANIANG NAGA yang terletak di Link. III RT/RW Labuan Bajo, Manggarai Barat tanggal jatuh tempo 31 Desember 2018 sebesar Rp 306.982,- (tiga ratus enam ribu Sembilan ratus delapan puluh dua rupiah);
1172. 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama MATHEUS SANIANG NAGA yang terletak di Link. III RT/RW Labuan Bajo, Manggarai Barat tanggal jatuh tempo 31 Desember 2018 sebesar Rp 187.085,- (seratus delapan puluh tujuh ribu delapan puluh lima rupiah);
1173. 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama MATHEUS SANIANG NAGA yang terletak di Link. III RT/RW Labuan Bajo, Manggarai Barat tanggal jatuh tempo 31 Desember 2018 sebesar Rp 196.365,- (seratus Sembilan puluh enam ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah);
1174. 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama MUHAMMAD DAHLAN R yang terletak di Lingk. IV Kamp. air RT/RW Labuan Bajo, Manggarai Barat tanggal jatuh tempo 31 Desember 2018 sebesar Rp 180.032,- (seratus delapan puluh ribu rupiah tiga puluh dua rupiah);
1175. 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama BACO M. ALI yang terletak di Kampung Tengah RT/RW Labuan Bajo, Manggarai Barat tanggal jatuh tempo 31 Desember 2018 sebesar Rp 179.661,- (seratus tujuh puluh Sembilan ribu enam ratus enam puluh satu rupiah);
1176. 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama KOSMAS SEMEN yang terletak di Batu Cermin RT/RW Batu Cermin, Manggarai Barat tanggal jatuh tempo 31 Desember 2018 sebesar Rp 236.826,- (dua ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1177. 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama ABDUL HARIS yang terletak di Kp. Air RT/RW Labuan Bajo, Manggarai Barat tanggal jatuh tempo 31 Desember 2018 sebesar Rp 110.989,- (seratus sepuluh ribu Sembilan ratus delapan puluh Sembilan);
1178. 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama ABDUL HARIS yang terletak di Labuan Bajo RT/RW Labuan Bajo, Manggarai Barat tanggal jatuh tempo 31 Desember 2018 sebesar Rp 306.982,- (tiga ratus enam ribu Sembilan ratus delapan puluh dua rupiah);
1179. 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama KALISONG yang terletak di Air Kemiri RT/RW Gorontalo, Manggarai Barat tanggal jatuh tempo 31 Desember 2018 sebesar Rp 248.333,- (dua ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah);
1180. 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama ALDINA NES yang terletak di Cowang Dereng RT/RW Batu Cermin, Manggarai Barat tanggal jatuh tempo 31 Desember 2018 sebesar Rp 191.168,- (seratus Sembilan puluh satu ribu seratus enam puluh delapan rupiah);
1181. 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama YULIANUS RAYEN yang terletak di Sernaru RT/RW Wae Kelambu, Manggarai Barat tanggal jatuh tempo 31 Desember 2018 sebesar Rp 179.661,- (seratus tujuh puluh Sembilan ribu enam ratus enam puluh satu rupiah);
1182. 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama KALISONG yang terletak di Air Kemiri RT/RW Gorontalo, Manggarai Barat tanggal jatuh tempo 31 Desember 2019 sebesar Rp 248.333,- (dua ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah);
1183. 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama ABDUL HARIS yang terletak di Labuan Bajo RT/RW Labuan Bajo, Manggarai Barat tanggal jatuh tempo 31 Desember 2019 sebesar Rp 306.982,- (tiga ratus enam ribu Sembilan ratus delapan puluh dua rupiah);
1184. 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama ALDINA NES yang terletak di Cowang Dereng RT/RW Batu Cermin, Manggarai Barat tanggal jatuh tempo 31 Desember 2019 sebesar Rp 191.168,- (seratus Sembilan puluh satu ribu seratus enam puluh delapan rupiah);
1185. 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama KOSMAS SEMEN yang terletak di Batu Cermin RT/RW Batu Cermin, Manggarai Barat tanggal jatuh tempo 31 Desember 2019 sebesar Rp 236.826,- (dua ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah);
1186. 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama SIPRIANUS TAMBU yang terletak di Sernaru RT/RW Wae Kelambu, Manggarai Barat tanggal jatuh tempo 31 Desember 2019 sebesar Rp 179.290,- (seratus tujuh puluh Sembilan ribu dua ratus Sembilan puluh rupiah);
1187. 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama MATHEUS SANIANG NAGA yang terletak di Link. III RT/RW Labuan Bajo, Manggarai Barat tanggal jatuh tempo 31

Hal 205 dari 281 hal

Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Desember 2019 sebesar Rp 187.827,- (seratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah);
1188. 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama MUHAMMAD DAHLAN R yang terletak di Lingk. IV Kamp. Air RT/RW Labuan Bajo, Manggarai Barat tanggal jatuh tempo 31 Desember 2019 sebesar Rp 180.032,- (seratus delapan puluh ribu tiga puluh dua rupiah);
1189. 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama YOHANES HEPITUS MULIADI yang terletak di Komp. SDN II RT/RW Gorontalo, Manggarai Barat tanggal jatuh tempo 31 Desember 2018 sebesar Rp 220.864,- (dua ratus dua puluh ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah);
1190. 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama MATHEUS SANIANG NAGA yang terletak di Link. III RT/RW Labuan Bajo, Manggarai Barat tanggal jatuh tempo 31 Desember 2019 sebesar Rp 299.187,- (dua ratus Sembilan puluh Sembilan ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah);
1191. 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama MATHEUS SANIANG NAGA yang terletak di Link. III RT/RW Labuan Bajo, Manggarai Barat tanggal jatuh tempo 31 Desember 2019 sebesar Rp 306.982,- (tiga ratus enam ribu Sembilan ratus delapan puluh dua rupiah);
1192. 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama MATHEUS SANIANG NAGA yang terletak di Link. III RT/RW Labuan Bajo, Manggarai Barat tanggal jatuh tempo 31 Desember 2019 sebesar Rp 187.085,- (seratus delapan puluh tujuh ribu delapan puluh lima rupiah);
1193. 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama BACO M. ALI yang terletak di Kampung Tengah RT/RW Labuan Bajo, Manggarai Barat tanggal jatuh tempo 31 Desember 2019 sebesar Rp 179.661,- (seratus tujuh puluh Sembilan ribu enam ratus enam puluh satu rupiah);
1194. 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama ABDUL HARIS yang terletak di Kp. Air RT/RW Labuan Bajo, Manggarai Barat tanggal jatuh tempo 31 Desember 2019 sebesar Rp 110.989,- (seratus sepuluh ribu Sembilan ratus delapan puluh Sembilan rupiah);
1195. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran dari MATHEUS SANIANG NAGA SIAGIAN untuk pembayaran uang muka tanah di mts alia dengan batas berikut utara : -, selatan : -, timur : -, barat : -, dengan luas 8.000 m2 *kesepakatan harga 725.000/m sebesar Rp 155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah) tanggal 15 Januari 2018 yang ditanda tangani oleh Syarifudin di atas materai 6000;
1196. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran dari MATHEUS SANIANG NAGA SIAGIAN untuk pembayaran sebidang tanah yang terletak di belakang made in Italy ristorante italiano dengan ukuran 13 x 60 m2 dengan harga Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 08 Desember 2017 sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang ditanda tangani oleh SYAIFUL RAMADHAN REGI di atas materai 6000;
1197. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran dari MATHEUS SANIANG NAGA SIAGIAN untuk pembayaran sebidang tanah yang terletak di belakang made in Italy ristorante italiano dengan ukuran 13 x 60 m2 dengan harga Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 14 Januari

Hal 206 dari 281 hal Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2018 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang ditanda tangani oleh SYAIFUL RAMADHAN REGI di atas materai 6000;
1198. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran dari MATHEUS SANIANG NAGA SIAGIAN untuk pembayaran pengurusan sebidang tanah di Karanganyar milik Bpk. Matheus Armon, ukuran 20m x 100m, Batas Utara: Baharudin, Selatan: Ismaela Djudje, Timur: Bukit, Barat: rencana jalan, PJ: Negosiasi setelah lihat lokasi suka harga 500jt sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 03 Juni 2019 yang ditanda tangani oleh Matheus Armon, Terdakwa 1 : Lydia, Terdakwa 2: Stevanus L, dan Terdakwa 3 : Petrus Panta Pati;
1199. 1 (satu) lembar asli tulisan tangan dengan judul perkembangan haris tanggal 02 Maret 2020;
1200. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran dari MATHEUS S. N. SIAGIAN untuk pembayaran tanah yang terletak di karangan dengan luas 616 m2 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 03 Juni 2020 yang ditandatangani oleh ABDURAHMAN ISHAKA;
1201. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran dari MATHEUS S. N. SIAGIAN untuk pembayaran sebidang tanah yang terletak di karangan dengan ukuran 10 x 45 m sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanggal 04 Januari 2019 yang ditandatangani oleh ABDUL FATAH yang bermaterai 6000;
1202. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran dari MATHEUS S. N. SIAGIAN untuk pembayaran sebidang tanah yang terletak di karangan dengan ukuran 10 x 45 m2 sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 15 Maret 2020 yang ditandatangani oleh ABDUL FATAH yang bermaterai 6000;
1203. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran dari MATHEUS S. N. SIAGIAN untuk pembayaran sebidang tanah yang terletak di karangan dengan ukuran 10 x 45 m2 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 20 Desember 2019 yang ditandatangani oleh ABDUL FATAH yang bermaterai 6000;
1204. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran dari MATHEUS S. N. SIAGIAN untuk pembayaran sebidang tanah kering yang terletak di karangan dengan ukuran 10 x 45 m2 sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 04 Juli 2019 yang ditandatangani oleh ABDUL FATAH yang bermaterai 6000;
1205. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran dari MATHEUS S. N. SIAGIAN untuk pembayaran sebidang tanah kering yang terletak di karangan dengan ukuran 10 x 45 m2 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 14 Desember 2019 yang ditandatangani oleh ABDUL FATAH yang bermaterai 6000;
1206. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran dari MATHEUS SANIANG NAGA SIAGIAN untuk pembayaran ketiga tanah di karangan dengan ukuran 10x45 m2 sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 29 September 2018 yang ditandatangani oleh ABDUL FATAH yang bermaterai 6000;
1207. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran dari MATHEUS S. N. SIAGIAN untuk pembayaran tanah yang terletak di karangan dengan L. 565m2 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 03 Juni 2020 yang ditandatangani oleh ABDUL FATAH yang bermaterai 6000;
1208. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran dari MATHEUS SANIANG NAGA SIAGIAN untuk pembayaran tanah di karangan milik Bpk. Abdul Fatah luas kurang lebih 500 m2, pelunasan setelah sidang panitia A.

Hal 207 dari 281 hal Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tolong segera berkas kasih masuk ke BPN. sebesar Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 09 Februari 2019 yang ditandatangani oleh A. FATAH yang bermaterai 6000;

1209. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran dari MATHEUS SANIANG NAGA SIAGIAN untuk pembayaran tanah di karangan milik Bpk. Abdul Fatah, pembayaran kedua sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 20 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh A. FATAH yang bermaterai 6000;
1210. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran dari MATHIUS SIA GIA untuk pembayaran sebidang tanah yang terletak di karangan dengan ukuran 10 x 45 m2. sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tanggal 12 November 2018 yang ditandatangani oleh ABDUL FATA yang bermaterai 6000;
1211. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran dari MATHEUS SANIANG NAGA SIAGIAN untuk pembayaran tanda jadi pembelian tanah milik Bp. Abdul Fatah yang terletak di karangan, luas kurang lebih 500 m2, utara : maria milan, S : marselinus, Barat: rencana jalan, timur : rencana jalan harga total keseluruhan 130.000.000, sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanggal 10 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh ABDUL FATAH yang bermaterai 6000;
1212. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran dari MATEUS SANIAGAN untuk pembayaran lanjutan pembayaran kesisaan uang tanah di karangan timur sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 13 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh A. FATAH yang bermaterai 6000;
1213. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran dari MAHMUD NIP untuk tanah milik alias Rahim dan mahidin, dengan penerimaan ini tanah akan beres di urus sampai AJB, kita terima surat penolakan waris yang dibutuhkan BPN sebesar Rp 36.500.000,- (tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 21 Maret 2019 yang ditandatangani oleh SUHARNING yang bermaterai 6000;
1214. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran dari MATHEUS SANIANG NAGA SIAGIAN untuk pembayaran bagian dari tanah karangan yg tiga org baru (maria milan, dkk) sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanggal 28 Juli 2019 yang ditandatangani oleh YOHANES T. D IBA dan A. HARIS;
1215. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran dari MATHEUS SANIANG NAGA SIAGIAN untuk pembayaran sebidang tanah yang terletak di Wae Cicu Utara sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 22 Juni 2016 yang ditandatangani oleh MAHMUD NIP yang bermaterai 6000;
1216. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran dari MATHEUS S.N SIAGIAN untuk pembayaran pelunasan harga tanah yang terletak di karangan sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tanggal 17 Juni 2020 yang ditandatangani oleh TRI WAHYUNI yang bermaterai 6000;
1217. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran dari MATHEUS S.N. SIAGIAN untuk pembayaran sebidang tanah yang terletak di karangan dengan ukuran 10x45 m2 dengan luas 450 m2 kurang lebih sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 09 Februari 2020 yang ditandatangani oleh TRI WAHYUNI IRIANI yang bermaterai 6000;
1218. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran dari MATHEUS SANIAG NAGA SIAGIAN untuk pembayaran sebidang tanah yang terletak di karangn dengan ukuran 10x45 m2 sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 13 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh ALOISIUS NALA yang bermaterai 6000;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1219. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran dari MATHEUS S. N. SIAGIAN untuk pembayaran tanah milik bpk. Aloisius Nala, yg terletak di Karang, Wae Cicu. sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanpa tanggal dan tahun yang ditandatangani oleh ALOISIUS NALA yang bermaterai 6000;
1220. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran dari MATHEUS SANIANG NAGA SIAGIAN untuk pembayaran tanah milik Mahmudin Nip yang terletak di Karang seluas 6.800 m2 sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 19 Mei 2016 yang ditandatangani oleh MAHMUD NIP yang bermaterai 6000;
1221. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran dari MATHEUS SANIANG NAGA SIAGIAN untuk pembayaran satu bidang tanah di Karang yang berbatasan dengan Dai Kayus. Seluas kurang lebih 6.000 m2 yang dibatasi dengan Laut dan Tanah negara. sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 29 April 2016 yang ditandatangani oleh MAHMUD NIP yang bermaterai 6000;
1222. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran dari MATHEUS SANIANG NAGA SIAGIAN untuk pembayaran tanah karangan seluas 6.800 m2, milik Mahmudin Nip sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 01 juli 2016 yang ditandatangani oleh MAHMUD NIP yang bermaterai 6000;
1223. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran dari MATHEUS SANIANG NAGA SIAGIAN untuk pembayaran tanah di karangan seluas 6.080 m2 yang terletak di Karang, berbatasan dengan SHM milik Dai Kayus sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tanggal 12 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh MAHMUD NIP yang bermaterai 6000;
1224. 1 (satu) lembar asli tulisan tangan yang berjudul Penerimaan dari 29 April 2016 sampai dengan 12 Agustus 2016 atas nama MAHMUDIN NIP;
1225. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran dari MATHEUS SANIANG NAGA SIAGIAN untuk pembayaran tiket pesawat Mahmud suami istri di potong nanti di pembayaran tanahnya sebesar Rp 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) tanggal 29 Juli 2016 yang ditandatangani oleh MAHMUD dengan cap Treetop;
1226. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran dari MATHEUS SANIANG NAGA SIAGIAN untuk pembayaran tanah milik Nuryadin Umar, lokasi di Kranga berbatasan dengan tanah-tanah plataran, dengan pengambilan ini tidak ada lagi pengambilan hingga sertifikat keluar sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tanggal 10 Maret 2018 yang ditandatangani oleh NURYADIN yang bermaterai 6000;
1227. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran dari MATHEUS SANIANG NAGA SIAGIAN untuk pembayaran komisi dari Matheus s. n. siagian tanah yang dibeli dari Topenus sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 04 September 2019 yang ditandatangani oleh ABDUL HARIS yang bermaterai 6000;
1228. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran dari MATHEUS S. N. SIAGIAN untuk pembayaran keuntungan dari Safarudin dan Tupenus yang sudah dijanjikan oleh Matheus S.N. Siagian sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 29 November 2019 yang ditandatangani oleh ABDUL HARIS yang bermaterai 6000;
1229. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran dari MATHEUS S. N. SIAGIAN untuk pembayaran keuntungan dari Otus Keleng sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 29 November 2019 yang ditandatangani oleh ABDUL HARIS yang bermaterai 6000;

Hal 209 dari 281 hal Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1230. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran dari MATHEUS S. N. SIAGIAN untuk pembayaran tanda jadi atas sebidang tanah kering yang berlokasi di Karangan, dengan ukuran 10x45 m², dengan harga : Rp 150.000.000,-, sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tanggal 24 Juli 2019 yang ditandatangani oleh H. Ramang H. Ishaka yang bermaterai 6000;
1231. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran dari MATHEUS S. N. SIAGIAN untuk pembayaran sebidang tanah yang terletak di Karangan dengan ukuran 10x45 m² sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 29 November 2019 yang ditandatangani oleh H. Ramang yang bermaterai 6000;
1232. 4 (empat) lembar print out screen shoot percakapan whatsapp messenger yang ditandatangani oleh MATHEUS SANIANG NAGA SIAGIAN tanggal 12 November 2020;
1233. 1 (satu) lembar asli Kwitansi pembayaran dari MATHEUS SIAGIAN untuk pembayaran sebidang tanah kering yang terletak di karangan dengan ukuran 15 x 50 m² (ansuran ke dua) sebesar Rp.25.000.000,-, (dua puluh lima juta rupiah) yang di tandatangi oleh ABDURAHMAN tanggal 03 Desember 2018.
1234. 1 (satu) lembar asli Kwitansi pembayaran dari MATHEUS SANIANG NAGA SIAGIAN untuk pembayaran uang keuntungan dari tanah karangan tetap masuk dalam tabungan sebesar Rp.20.000.000,-, (dua puluh juta rupiah) yang dt andatangi oleh A.HARIS tanggal 24 Juni 2017.
1235. 1 (satu) lembar asli Kwitansi dari MATHEUS S.N SIAGIAN untuk pembayaran sebidang tanah kering di karangan ukuran 10 x 45 m² sebesar Rp.30.000.000,-, (tiga puluh juta rupiah) yang di tandatangi oleh YOSEF JAMALUDIN tanggal 24 Januari 2018.
1236. 1 (satu) lembar asli Kwitansi pembayaran dari MATHEUS SANIANG NAGA SIAGIAN untuk pembayaran sebidang tanah terletak di karangan dengan ukuran 10 x 45 m² sebesar Rp.30.000.000,-, (tiga puluh juta rupiah) yang di tandatangi oleh YOSEF JAMALUDIN tanggal 13 Oktober 2017.
1237. 1 (satu) lembar asli Kwitansi dari MATHEUS SANIANG NAGA SIAGIAN untuk pembayaran sebidang tanah di karangan dengan ukuran 10 x 45 m² sebesar Rp.30.000.000,-, (tiga puluh juta rupiah) yang di tandatangi oleh MARIA MILAN tanggal 13 Oktober 2017.
1238. 1 (satu) lembar asli Kwitansi dari MATEHUS SANIANG NAGA SIAGIAN untuk pembayaran sebidang tanah di karangan ,Kel Labuan Bajo dengan ukuran 10 x 45 m² sebesar Rp. 10.00.000,-, (sepuluh jutan rupiah) yang di tandatangi oleh MARSELUS GADU tanggal 22 April 2017.
1239. 1 (satu) lembar asli Kwitansi pembayaran dari MATHEUS SANIANG NAGA SIAGIAN untuk pembayaran tanah milik Bpk.MULYADI,di karangan.masih ada sisa 15jt yang butuh pertanggung jawaban Ali dan Jhonny akan di bayarkan setelah selesai balik nama /sertifikat di notaris TTD AJB sebesar Rp. 10.000.000,-, (sepuluh juta rupiah) yang di tandatangi oleh YOH. HEPITUS MULIADI,ST tanggal 19 April 2016.
1240. 1 (satu) lembar asli Kwitansi pembayaran dari MATHEUS SANIANG NAGA SIAGIAN untuk pembayaran sebidang tanah mllik Harris yang terletak dikarangan waecicu sebesar Rp.5.000.000,-, (lima juta rupiah) tanggal 10 Juni 2016.
1241. 1 (satu) lembar asli Kwitansi pembayaran dari MATHEUS SANIANG NAGA SIAGIAN untuk pembayaran sebidang tanah kering yang terletak

Hal 210 dari 281 hal Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- di karangan, Kel. Labuan Bajo dengan ukuran 10 x 45 m² sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang di tandatangani oleh YULIANUS KAYEN tanggal 28 Juni 2017.
1242. 1 (satu) lembar asli Kwitansi pembayaran dari MATHEUS SANIANG NAGA SIAGIAN untuk pembayaran sebidang tanah kering yang terletak di karangan Kel. Labuan Bajo dengan ukuran 20 x 35 m² sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang di tandatangani oleh THEO DIAZ tanggal 23 Juni 2017.
1243. 1 (satu) lembar asli Kwitansi pembayaran dari MATHEUS SANIANG NAGA SIAGIAN untuk pembayaran sebidang tanah kering yang terletak di karangan Kel. Labuan Bajo, Kec. Komodo sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang di tandatangani oleh ALDINA NES tanggal 23 Juni 2017.
1244. 1 (satu) lembar asli Kwitansi pembayaran dari MATHEUS SANIANG NAGA SIAGIAN untuk pembayaran sebidang tanah kering di karangan, Kel. Labuan Bajo dengan ukuran 10 x 45 m² sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh SALVADOR PINTO tanggal 23 April 2017.
1245. 1 (satu) lembar asli Kwitansi pembayaran dari MATHEUS SANIANG NAGA SIAGIAN untuk pembayaran tanah di karangan An. Alm. YOHANES SALAM (Aldina Nes) dengan ukuran 10 x 45 m² sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang di tandatangani oleh ABDUL HARIS tanggal 24 Januari 2017.
1246. 1 (satu) lembar asli Kwitansi untuk pembayaran 2jt Harris + 2jt Jhonny iba juga, tanah di karangan yang 4 org sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) yang di tandatangani oleh A.HARRIS dan JHONNY tanggal 30 Maret 2016.
1247. 1 (satu) lembar asli Kwitansi pembayaran dari MATHEUS SANIANG NAGA SIAGIAN untuk pembayaran sebidang tanah kering di karangan, Kel. Labuan Bajo dengan ukuran 10 x 30 m² sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang di tandatangani oleh ABDUL HARIS tanggal 03 April 2017.
1248. 1 (satu) lembar asli Kwitansi pembayaran dari MATHEUS SANIANG NAGA SIAGIAN untuk pembayaran tanah 5 kapling di karangan dengan ukuran 10 x 45 m² An. YULIANUS RAYEN, SIPRIANUS TAMBU, ALDINA NES, MUHAMAD BACO, MUHAMAD DAHLAN R. sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang di tandatangani oleh ALI MUSTAFA tanggal 23 Desember 2016.
1249. 1 (satu) lembar asli Kwitansi pembayaran dari MATHEUS SANIANG NAGA SIAGIAN untuk pembayaran tanah di karangan ukuran 10 x 45 m² sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang di tandatangani oleh MUHAMAD DAHLAN R. tanggal 24 Juni 2017.
1250. 1 (satu) lembar asli Kwitansi pembayaran dari MATHEUS SANIANG NAGA SIAGIAN untuk pembayaran sebidang tanah kering yang terletak di karangan Kel. Labuan Bajo dengan ukuran 20 x 35 m² sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang di tandatangani oleh FRANSISKUS SUBUR tanggal 28 Juni 2017.
1251. 1 (satu) lembar asli Kwitansi pembayaran dari MATHEUS SANIANG NAGA SIAGIAN untuk pembayaran tanah di karangan ukuran 10 x 30 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang di tandatangani oleh TAKSIM tanggal 24 Juni 2017.
1252. 1 (satu) lembar asli Kwitansi pembayaran dari MATHEUS SANIANG NAGA SIAGIAN untuk pembayaran sebidang tanah kering di karangan

Hal 211 dari 281 hal Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kel.Labuan Bajo dengan ukuran 10 x 45 m2 sebesar Rp.5.000.000-, (lima juta rupiah) yang di tandatangani oleh KOSMAS JANGGAT taggal 23 Mei 2017.
1253. 1 (satu) lembar asli Kwitansi pembayaran dari MATHEUS SANIANG NAGA SIAGIAN untuk pembayaran sebidang tanah kering di karangan kel.Labuan Bajo dengan ukuran 10 x 45 m2 sebesar Rp.30.000.000-, (tiga puluh juta rupiah) yang di tandatangani oleh MARSELUS GADU tanggal 23 Februari 2017.
1254. 1 (satu) lembar asli Kwitansi pembayaran dari MATHEUS SANIANG NAGA SIAGIAN untuk pembayaran tanah di karangan ukuran 10 x 45 sebesar Rp.10.000.000-, (sepuluh juta rupiah) yang di tandatangani oleh M.BACO ALI tanggal 24 Juni 2017.
1255. 1 (satu) lembar asli Kwitansi pembayaran dari MATHEUS SANIANG NAGA SIAGIAN untuk pembayaran pelunasan tanah karangan milik Bpk.HEPITUS MULYADI seluas ±579 m2,seharga 95jt rupiah dimana 15jt nya Ali dan Jhonny iba terima sebesar Rp.15.000.000-, (lima belas juta rupiah) yang di tandatangani oleh YOH.HEPITUS MULYADI tanggal 31 Mei 2017.
1256. 1 (satu) lembar asli Kwitansi pembayaran dari MATHEUS SANIANG NAGA SIAGIAN untuk pembayaran sebidang tanah kering yang terletak di karangan Kel.Labuan Bajo dengan ukuran 10 x 45 m2 sebesar Rp.10.000.000-, (sepuluh juta rupiah) yang di tandatangani oleh SIPRIANUS TAMBU tanggal 23 Juni 2017.
1257. 1 (satu) lembar asli Kwitansi pembayaran dari MATHEUS SANIANG NAGA SIAGIAN untuk pembayaran DP sebidang tanah yang terletak di karangan dengan ukuran 15 x 50 dan batas-batas Utara dengan MOH.ALI,Selatan dengan BLASIUS JANU, Timur dan Barat rencana jalan. N.B: sisanya setelah sertifikat selesai. Sebesar Rp.50.000.000-, (lima puluh juta rupiah) yang di tandatangani oleh YOHANES HEPITUS MULYADI tanggal 11 Oktober 2016.
1258. 1 (satu) lembar asli Kwitansi pembayaran dari MATHEUS SANIANG NAGA SIAGIAN untuk pembayaran sisa uang tanah milik HEPITUS MULYADI batas Barat JALAN,Timur JALAN,Utara MUHAMAD ALI,Selatan BLASIUS PANDUR.pelunasan akan di lakukan saat balik nama selesai sebesar Rp.25.000.000-, (dua puluh lima juta rupiah) yang di tandatangani oleh YOHANES HEPITUS MULYADI tnggal 06 April 2017.
1259. 1 (satu) lembar asli Kwitansi pembayaran dari MATHEUS SANIANG NAGA SIAGIAN untuk pembayaran pengurusan tanah 6 kampling yang di karangan sebesar Rp.5.000.000-, (lima juta rupiah) yang di tandatangani oleh ABDUL HARRIS tanggal 23 Mei 2017.
1260. 1 (satu) lembar asli Kwitansi pembayaran dari MATHEUS SANIANG NAGA SIAGIAN untuk pembayaran sebidang tanah kering di karangan kel.Labuan Bajo dengfan ukuran 20 x 35 m2 sebesar Rp.20.000.000-, (dua puluh juta rupiah) yang di tandatangani oleh THEO DIAZ tanggal 20 Februari 2017.
1261. 1 (satu) lembar asli Kwitansi pembayaran dari MATHEUS SANIANG NAGA SIAGIAN untuk pembayaran sebidang tanah kering di karangan kel.Labuan Bajo dengan ukuran 20 x 35 m2 sebesar Rp.20.000.000-, (dua puluh juta rupiah) yang di tandatangani oleh FRANSISKUS SUBUR tanggal 20 Februari 2017.
1262. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Bukti Penyerahan Tanah Adat HAJI ISHAKA dan HAKU MUSTAFA kepada M.RIDWAN tanggal 01 Juli 1993.

Hal 212 dari 281 hal Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1263. 1 (satu) bendel asli AKTA JUAL BELI Nomor: 16/2018 antara ABDUL HARIS dengan MATHEUS SANIANG NAGA SIAGIAN tanggal 21 Mei 2018.
1264. 1 (satu) lembar asli surat keterangan bebas (SKB) bea perolehan hak atas tanah dan bangunan Nomor : 900/BPKD/ /V/2018 tanggal 16 Mei 2018
1265. 1 (satu) bendel asli AKTA JUAL BELI Nomor: 18/2018 antara FRANSISKUS SUBUR dengan MATHEUS SANIANG NAGA SIAGIAN tanggal 31 Mei 2018.
1266. 1 (satu) lembar asli bukti penyetoran dari KAMA PUTRA KUSDIANTO sebesar Rp.2.104.000-, (dua juta seratus empat ribu rupiah) tanggal 28 Mei 2018.
1267. 1 (satu) lembar asli surat setoran pajak daerah bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (SSPD-BPHTB) atas nama KAMA PUTRA KUSDIANTO sebesar Rp.2.104.000-, (dua juta seratus empat ribu rupiah) tanpa tanggal dan tahun.
1268. 1 (satu) lembar asli bukti penyetoran dari KAMA PUTRA KUSDIANTO sebesar Rp.2.496.000-, (dua juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) tanggal 28 Mei 2018.
1269. 1 (satu) lembar asli surat setoran pajak daerah bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (SSPD-BPHTB) atas nama KAMA PUTRA KUSDIANTO sebesar Rp.2.496.000-, (dua juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) tanpa tanggal dan tahun.
1270. 1 (satu) jepitan Fotocopy Akta Jual Beli Nomor: 15/2017 antara MATHEUS SANIANG NAGA SIAGIAN dengan GREGORIUS ANTAR AWAL tanggal 21 Februari 2017 di hadapan notaris CAROLINA DESIANI DJERABU
1271. Rekening Koran BNI nomor: 250425052 atas nama MATHEUS SANIANG NAGA SIAGIA, periode 00 Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2017;
1272. Rekening Koran BRI nomor: 383501021442536 atas nama PT. BAKA INTENSI GANI, periode 01 April 2016 sampai dengan 31 Desember 2017;
1273. Rekening Koran Mandiri Nomor: 16100228882 atas nama MATHEUS SANIANG NAGA SIAGIAN, periode 01 Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2017;
1274. 1 (satu) lembar peta berjudul Scan Data.pdf dengan keterangan Peta Karangan Lokasi Beda.
1275. 1 (satu) lembar Foto Kwitansi pembayaran dari MATHEUS NAGA SIAGIAN uang sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran Sebidang Tanah di Wae Cicu Utara dengan batas sebagai berikut, Utara: Abdul Latif, Selatan: Laut, Timur: Dai Kayus, Barat: Tanjung Batu Kalut, luas ± 5000 m² yang ditandatangani oleh MAHMUD NIP tanggal 19 Juni 2015;
1276. 1. (satu) lembar Foto Kwitansi Pembayaran dari MATHEUS SANIANG NAGA SIAGIAN uang sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran Sebidang Tanah di WaeCicu Utara dengan batas sebagai berikut Utara : Abdul Latif, Selatan: Laut, Timur: Dai Kayus, Barat: Tanjung Batu Kalut, luas ± 5000 m² yang di tandatangani oleh MAHMUD NIP pada tanggal 22 Juni 2015;
1277. 1 (satu) lembar Foto Bukti Transfer dengan keterangan Transfer dari Bank Mandiri dengan nomor rekening: 16100228xxxxx ke Bank BNI atas nama IBU ARIANI KURNI dengan nomor rekening: 0273291699 sebesar

Hal 213 dari 281 hal Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 07 Februari 2015 pukul 11.24.
1278. 1 (satu) bendel Rekening Koran dengan nomor rekening: 1610002340359 atas nama MAHMUD NIP, periode: 01 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2016.
1279. 2 (dua) lembar fotocopy Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 02447 seluas 8.447 m² atas nama SUAIB TAHIYA, tanggal 06 Juni 2016;
1280. 2 (dua) lembar fotocopy Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 02448 seluas 20.130 m² atas nama H. Sukri, tanggal 06 Juni 2016;
1281. 1 (satu) bendel fotocopy Surat Bukti Penyerahan Hibah atas nama Ketang tanggal 10 Maret 1997;
1282. 1 (satu) bendel asli Surat Perjanjian antara H. SUKRI dengan VERONIKA SUKUR tanggal 13 September 2013;
1283. 1 (satu) bendel asli Surat Perjanjian antara ANDI RISKI NUR CAHYA dengan VERONIKA SUKUR tanggal 14 Oktober 2013;
1284. 1 (satu) bendel fotocopy Surat Bukti Penyerahan Tanah Adat dari HAJI ISHAKA dan HAKU MUSTAFA kepada SUAIP TAHIYA tanpa tanggal dan tahun;
1285. 1 (satu) bendel fotocopy Surat Bukti Penyerahan Tanah Adat dari HAJI ISHAKA dan HAKU MUSTAFA kepada SUPARDI TAHIYA tanpa tanggal dan tahun;
1286. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran dari IBU VERONIKA SYUKUR untuk pembayaran tambah uang DP Jual Beli tanah di Karanganyar milik H. SUKRI dengan luas 20.130 m² sebanyak Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 03 Juni 2016;
1287. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran dari ADRIANUS ARAT untuk pembayaran DP Tanah Karanganyar sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tanggal 08 April 2016;
1288. 1 (satu) map berwarna biru dengan tulisan "sukri untuk arsip saya";
1289. 2 (dua) lembar fotocopy Gambar Ukur atas nama H. SUKRI, SUAIB T., SUPARDI T., tanpa nomor, tanpa tanggal, dan tanpa tahun;
1290. 1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor: 02446 seluas 6.643 m² atas nama SUPARDI TAHIYA, tanggal 06 Juni 2016;
1291. 1 (satu) map berwarna biru dengan tulisan "supardi untuk arsip saya";
1292. 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa atas nama SUAIB TAHIYA kepada VERONIKA SYUKUR dan ENTE PUASA tanggal 06 April 2016 di hadapan notaris THERESIA DEWI KOROH DIMU, SH., MKn.;
1293. 1(satu) lembar asli Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) an. H. SUKRI sebesar Rp 158.040.000,- (seratus lima puluh delapan juta empat puluh ribu rupiah) tanpa tanggal dan tahun;
1294. 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) an. SUAIB TAHIYA sebesar Rp 64.576.000,- (enam puluh empat juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) tanpa tanggal dan tahun;
1295. 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) an. SUPARDI TAHIYA sebesar Rp 50.114.000,- (lima puluh juta seratus empat belas ribu rupiah) tanpa tanggal dan tahun;
1296. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan atas nama H. SYUKRI tanggal 02 Juli 2015;
1297. 1 (satu) map berwarna biru dengan tulisan "suaip untuk arsip saya";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1298. 1 (satu) jepitan fotocopy Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat nomor: 115/KEP/53.15/400-09/VI/2016 tentang Pemberian Izin Perubahan Penggunaan Tanah dari Tanah Pertanian menjadi Tanah Pekarangan seluas 20.130 m2 di Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat kepada H. SUKRI tanggal 30 Juni 2016;
1299. 1 (satu) jepitan fotocopy Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat nomor: 117/KEP/53.15/400-09/VI/2016 tentang Pemberian Izin Perubahan Penggunaan Tanah dari Tanah Pertanian menjadi Tanah Pekarangan seluas 8.447 m2 di Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat kepada SUAIB TAHIYA tanggal 30 Juni 2016;
1300. 1 (satu) jepitan fotocopy Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat nomor: 116/KEP/53.15/400-09/VI/2016 tentang Pemberian Izin Perubahan Penggunaan Tanah dari Tanah Pertanian menjadi Tanah Pekarangan seluas 6.643 m2 di Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat kepada SUPARDI TAHIYA tanggal 30 Juni 2016;
1301. 3 (tiga) lembar gambar map;
1302. 1 (satu) jepitan asli buku rekening BNI dengan nomor rekening: 0139762723 an. Ibu VERONIKA SYUKUR;
1303. 1 (satu) asli buku rekening Mandiri dengan nomor rekening: 161-00-0135145-6 atas nama CF Komodo Hotel yang beralamat di Cowang Dereng RT/RW 007/002, Batu Cermin, Komodo;
1304. 1 (satu) asli buku rekening Kopdit Suka Damai dengan nomor rekening: 0886 atas nama VERONIKA SYUKUR yang beralamat di Cowang Dereng Desa Batu Cermin, Labuan Bajo;
1305. 1 (satu) asli buku rekening BRITAMA Bisnis dengan nomor rekening: 1112-01-000214-56-2 atas nama VERONIKA SYUKUR yang beralamat di Cowang Dereng, Kel. Batu Cermin, Kecamatan Komodo, dengan NIK: 5315056910680001;
1306. 1 (satu) unit Handphone Oppo F9 berwarna hitam, nomor IMEI 1: 864091048102036 dan IMEI 2: 864091048102036.
1307. 1 (satu) bendel Rekening Koran Tabungan Mandiri dengan nomor rekening: 161-00-0133254-8 atas nama AFRIZAL periode:
1 Januari 2018 sampai dengan 18 November 2020;
2 Periode 01 Maret 2020 sampai dengan 30 April 2020.
1308. 1 (satu) bendel Rekening Koran Tabungan Mandiri dengan nomor rekening: 181-00-0091485-4 atas nama AFRIZAL, periode 13 Agustus 2020 sampai dengan 19 November 2020;
1309. 1 (satu) bendel Rekening Koran BNI Taplus dengan nomor rekening: 0469329317 atas nama AFRIZAL, periode:
- November 2015 sampai dengan 31 Desember 2015;
- 01 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2016;
- September 2016 sampai dengan 31 Desember 2016;
- Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017.
1310. 1 (satu) lembar asli surat undangan mediasi ke 2, Nomor: 432/53.15/600.13/V/2016 tanggal 25 Mei 2016
1311. (tiga) lembar fotocopy Surat Perihal Somasi Pertama dan Terakhir, Nomor: 06/1/2018 tanggal 29 Januari 2018 dari Makarius Paskalis Baut & Parteners (Advocat – Konsultan Hukum) Kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat;

Hal 215 dari 281 hal Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1312. 1 (satu) lembar fotocopy surat pemberitahuan pajak terhitung pajak bumi dan bangunan tahun;
1313. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan yang telah di tanda tangani oleh yang membuat pernyataan Amran Aliman dan telah di tanda tangani oleh yang menerima Callano Soares pada tanggal 12 November 2018;
1314. 2 (dua) lembar fotocopy surat yang di tujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat dan telah di tanda tangani oleh Amran Aliman pada tanggal 13 Desember 2018;
1315. 1 (satu) lembar fotocopy surat pemberitahuan, Nomor: 99/2-53.15/II/2018 tanggal 20 Januari 2018;
1316. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perdamaian tanggal 26 Juni 2018;
1317. 2 (dua) lembar fotocopy surat Perihal mohon Tindakan kongkrit dari Bapak Menteri ATR/ Kepala BPN atas Tindakan kepala kantor pertanahan manggarai barat yang tidak mematuhi putusan PTUN serta PP 24 / 1997 tanggal 15 Januari 2019;
1318. 1 (satu) lembar fotocopy surat Undangan pemeriksaan lapangan dan pengukuran batas bidang tanah, Nomor: 616/5-53.15/VII/2018 Tanggal 27 Juli 2018;
1319. 1 (satu) lembar fotocopy surat Undangan pemeriksaan lapangan dan pengukuran batas bidang tanah, tanggal 19 oktober 2017;
1320. 1 (satu) lembar fotocopy surat pemberitahuan sidang panitia 'A' an. Amran Aliman, tanggal 23 oktober 2018;
1321. (satu) lembar fotocopy surat keterangan, Nomor: Pem.131/205/IX/2017 tanggal 13 September 2017;
1322. 1 (satu) lembar fotocopy surat tanda terima dokumen dari Amran Aliman, Nomor berkas permohonan 3704/2017 tanggal 2 oktober 2017;
1323. (satu) lembar fotocopy surat bukti penyerahan tanah adat tanggal 10 April 1990;
1324. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi untuk pembayaran harga tanah yang berlokasi di tanjung batu kalo dengan luas 30.000 m2 (tiga puluh ribu meter persegi) dari Djudin Aliman sebesar Rp. 5.000.000,- yang di tanda tangani oleh Achmad Baco tanggal 20-03-1999;
1325. (satu) lembar fotocopy surat pernyataan yang telah di tanda tangani oleh Amran Aliman selaku pembuat pernyataan dan Sarifudin Malik,S.ST Mengetahui Kepala Desa/Lurah pada tanggal 08 Agustus 2017;
1326. 1 (satu) lembar fotocopy surat yang ditujukan Kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat dan telah di tanda tangani oleh Amran Aliman selaku pemohon pada tanggal 08 Agustus 2017;
1327. 1 (satu) lembar fotocopy surat Data Obyek dan Obyek Hak yang telah di tanda tangani oleh Amran Aliman selaku pemberi keterangan dan Sarifudin Malik,S.ST selaku Kepala Desa/Lurah, tanggal 08 Agustus 2017;
1328. 2 (dua) lembar fotocopy surat permohonan yang ditujukan kepada Bapak Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta UP. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat di Labuan Bajo tanggal 08 Agustus 2017;
1329. 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan Riwayat hak milik ha katas tanah, Nomor: Pem.593/2600/VIII/2017 Tanggal 08 Agustus 2017;
1330. 1 (satu) lembar fotocopy surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Sporadik, yang telah di tanda tangani oleh Amran Aliman selaku Pembuat Pernyataan, Abdul Haji (Terdakwa 1), H. Ente Puasa (Terdakwa II) dan Sarifudin Malik,S.ST selaku Kepala Desa/Lurah tanggal 08 Agustus 2017;

Hal 216 dari 281 hal Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1331. 1 (satu) lembar fotocopy surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, tanggal 08 Agustus 2017;
1332. 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan penanaman tanda batas tanah tanggal 08 Agustus 2017;
1333. 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan tanah tidak dalam keadaan sengketa, tanggal 08 Agustus 2017;
1334. 1(satu) lembar fotocopy surat keterangan kepemilikan tanah, Nomor: Pem.593/2601/VII/2017 Tanggal 08 Agustus 2017;
1335. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Panitia Pemeriksaan Tanah A;
1336. 6 (enam) lembar fotocopy surat Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas;
1337. 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan waris yang telah di tanda tangani oleh 4 (empat) ahli waris masing-masing. Amran Aliman, Gairia Aliman, Sahrudin Aliman, Ar Rahman Aliman. Tanggal 13 Juni 2017;
1338. 1 (satu) lembar fotocopy Lembar Kendali Berkas an. Pemohon Amran Aliman tanggal 10 Agustus 2017;
1339. 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan penolakan warisan tanggal 10 Agustus 2017;
1340. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Kematian, Nomor: Pem.470/KLB/320/II/2016 tanggal 24 Februari 2016;
1341. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhitung Pajak Bumi dan Bangunan Tahun an. Ansamudin tanggal 01 Mei 2017;
1342. 1 (satu) lembar fotocopy KTP an. Amran Aliman
1343. 1 (satu) lembar fotocopy KTP an. H. Sukri;
1344. 1 (satu) lembar fotocopy KTP an. Ente Puasa.
1345. 1 (satu) lembar asli Tanda terima tanpa nomor, diterima dari Kantor Notaris Billy Yohanes Ginta, SH., M.Kn berupa Sertifikat Hak Milik nomor: 02492, Nomor Surat Ukur : 604/Labuan Bajo/2016, Luas : 6094, tercatat atas nama GREGORIUS ANTAR AWAL. Akta Jual Beli nomor 15/2017 PPAT Carolina Desiani Djerabu, BPHTB Gregorius Antar Awal. Untuk keperluan PPJB Nomor 01 tanggal 02 Februari 2017, tanggal 17 Maret 2017 yang ditanda tangani oleh MATHEUS SANIANG NAGA SIAGIAN (penerima) dan BILLY YOHANES GINTA, SH., M.Kn (yang menyerahkan);
1346. 1 (satu) lembar asli Slip Setoran Bank Mandiri tanggal 17 Februari 2017 kepada PT. BAKA INTENSI GANI dengan nomor rekening BRI : 383501121442536 sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
1347. 1 (satu) lembar asli Slip Setoran Bank Mandiri tanggal 17 Februari 2017 kepada MATHEUS SANIANG NAGA SIAGIAN dengan nomor rekening mandiri: 1610022888882 sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
1348. 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) an. GREGORIUS ANTAR AWAL sebesar Rp 64.500.000,- (enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
1349. 1 (satu) lembar asli Akta Jual Beli nomor 15 / 2017 antara MATHEUS SANIANG NAGA SIAGIAN dan GREGORIUS ANTAR AWAL tanggal 21 Januari 2017;
1350. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan berupa Hotel "Cahaya Adrian" beralamat di Cowang Ndereng, Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1351. Gedung / Bangunan berupa hotel "CF Komodo" dan sebidang tanah seluas 3.250 m2 yang beralamat di Jl. Alo Tanis, Lamtoro, Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat.
1352. 1 (satu) bendel asli Surat Perintah Pencairan Dana, dengan No. SPM: 0013/1.20.3.2/SPM-GU/RKUD/2015 tanggal 11 Mei 2015;
1353. 1 (satu) bendel asli Surat Perintah Pencairan Dana, dengan No. SPM: 0017/1.20.3.2/SPM-GU/RKUD/2015 tanggal 08 Juni 2015.
1354. 1(satu) bundel scan Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 10 Tahun 2020 tentang Ketentuan Pemanfaatan Ruang dan Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang tanggal 05 Februari 2020;
1355. 1 (satu) lembar scan Rencana Pola Ruang Perkotaan Labuan Bajo.
1356. 1 (satu) unit laptop merk HP type HP 348 G4 SN# 5CG8363523;
1357. 1 (satu) unit handphone merk Samsung type SM-N96OF/DS, dengan nomor IMEI 1 : 359447/09/587293/3 dan IMEI 2 : 359448/09/587293/1, S/N: RR8K906LSVH.
1358. 1 (satu) bendel rekening koran BNI TAPLUS No. Rekening 0496529379 An. Bpk MARTHEN NDEO periode 01 Januari 2016 sampai dengan 16 Desember 2020
1359. asli rekening koran Bank BRI dengan No. Rekening 467601024327538 atas nama Bpk MARTHEN NDEO periode 01 Januari 2016 sampai dengan 31 Januari 2016;
1360. asli rekening koran Bank BRI dengan No. Rekening 467601024327538 atas nama Bpk MARTHEN NDEO periode 01 Januari 2017 sampai dengan 31 Januari 2017;
1361. asli rekening koran Bank BRI dengan No. Rekening 467601024327538 atas nama Bpk MARTHEN NDEO periode 01 Januari 2018 sampai dengan 31 Januari 2018;
1362. asli rekening koran Bank BRI dengan No. Rekening 467601024327538 atas nama Bpk MARTHEN NDEO periode 01 Januari 2019 sampai dengan 31 Januari 2019;
1363. asli rekening koran Bank BRI dengan No. Rekening 467601024327538 atas nama Bpk MARTHEN NDEO periode 01 Januari 2020 sampai dengan 31 Januari 2020.
1364. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Tanda Terima Setoran tanggal 01 Maret 2017;
1365. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tanggal 01 Mei 2016, nama Wajib Pajak Day Kayus, obyek Pajak di Wae Cicu Utara;
1366. 1 (satu) lembar fotokopy BPHTB tanggal 10 April 2017, wajib pajak Ismail Hirawan/Kevin Natasaputra
1367. Fotocopy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor: Pem.593/KLB/290/II/2015 tanggal 21 Februari 2015 beserta lampirannya (19 lembar)
1368. 1 (satu) buah Dokumen Akta Jual Beli (AJB) No. 170/2017, PPAT LALU MUHAMAD SUPRIANDI, SH., M.Kn dari Dai Kayus (pihak pertama)/penjual dengan Ismail Hirawan dan Kevin Natasaputra (pihak kedua)/pembeli.
1369. 1 (satu) lembar sketsa peta yang saya terima dari Unyil/Kandi/Mathius yang ditanda tangani oleh Ismail Hirawan.
1370. 1 (satu) jepitan fotocopy surat perjanjian jual beli tanah antara Gories Mere dan Gabriel Mahal tanggal 07 bulan Agustus tahun 2017;
1371. 1 (satu) jepitan fotocopy surat perjanjian jual beli tanah antara Gories Mere dan Muhammad Achyar tanggal 07 bulan Agustus tahun 2017;

Hal 218 dari 281 hal Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1372. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kuasa nomor: 011/MAA-SK/X/2017/ptd tanggal 03 Oktober 2017;
1373. 1 (satu) lembar print out peta bertuliskan Tanah Pemda L=242.212 m2;
1374. 1 (satu) lembar printout peta tanah dengan bidang kapling nama-nama kaplingan tanah;
1375. 1 (satu) lembar printout peta tanah dengan tulisan Google.
1376. 1 (satu) lembar fotocopy Silsilah Keluarga Besar Ahmad Dg. Malewa tanggal 05 Januari 2016;
1377. 1 (satu) lembar fotocopy Riwayat Kepemilikan Tanah Wae Cicu Utara tanggal 19 Januari 2016 yang ditandatangani oleh Muhamad Qurais Dg. Maga, Muhammad Naser, Muhammad Tahir Dg. Paguli;
1378. 2 (dua) lembar fotocopy surat tanpa nomor tanggal 05 maret 2016 perihal bukti-bukti tentang adanya raja-raja Labuan Bajo, sebelum adanya raja Manggarai yang pertama : ALEXANDER BARUK, yang ditandatangani oleh Muhamad Naser (hli Waris Abdulah Tengku Dg. Malewa beserta lampiran;
1379. 3 (tiga) lembar fotocopy surat perjanjian penyerahan tanah sebagian tanggal 22 februari 2016 yang ditandatangani oleh Dai Kayus selaku yang menyerahkan Tanah (pihak pertama) dan Muhammad Naser,cs selaku yang menerima tanah/ahli waris alm. Abdullah Tengku Daeng Malewa (Pihak Kedua);
1380. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan tulis tangan tanggal 22 Februari 2016, yang dibuat oleh Muhamad Naser, M. Qurais Dg. Maga, Muhamad Tahir, dan Dai Kayus.
1381. 1 (satu) lembar Surat Bukti Penyerahan Tanah tanggal 10 Oktober 1986 oleh Usman Pota kepada Dai Kayus;
1382. 2 (dua) lembar fotocopy Riwayat Peralihan Hak Atas Sebidang Tanah di Desa L. Bajo kepada Pemerintah Kecamatan Komodo, Kab. Manggarai tanggal 6 Juli 1987 yang ditandatangani oleh Usman Pota.
1383. 2 (dua) lembar fotocopy Surat tanpa nomor perihal keberatan atas Proses Pensertifikatan Tanah tanggal 22 Juni 2016;
1384. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat nomor: 1251/53.15/200.3/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015.
1385. 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Kuasa Substitusi Nomor: 09/MAA-SKSUB/VIII/2016 tanggal 12 Agustus 2016
1386. 6 (enam) lembar fotocopy Perjanjian Jual Beli Tanah dari Hasanuding Dg. Mantara, Cs kepaa Sukarni Ilyas, SH.
1387. 7 (tujuh) lembar Print Out Foto TranTerdakwa Pembayaran Tanah;
1388. 2 (dua) lembar Print Out Foto lokasi tanah atas kepemilikan oleh Rudyanto Suliawan.
1389. Akta Jual Beli No. 187/2016 tanggal 18 Agustus 2016 asli;
1390. Akta Jual Beli No. 186/2016 tanggal 18 Agustus 2016 asli;
1391. Akta Jual Beli No. 185/2016 tanggal 18 Agustus 2016 asli;
1392. Asli Akta Notaris dan PPAT Lalu Muhamad Supriandi, SH., M.Kn., No 04 tanggal 14 September 2017;
1393. 1 (satu) jepitan asli Kwitansi senilai Dua Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah untuk Pembelian tanah tanggal 14 September 2017;
1394. Asli 14 (empat belas) lembar kwitansi pembayaran tanah senilai Rp 25.154.000.000.000,-;
1395. 14 (empat belas) lembar fotocopy CEK dari Permata Bank tanggal 10 Agustus 2016 senilai Rp 25.154.000.000.000,-;
1396. 1 (satu) lembar Fotocopy surat kuasa dari Rudyanto Suliawan kepda Saniatma Adinoto tanggal 3 Agustus 2016;

Hal 219 dari 281 hal

Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1397. 1 (satu) lembar Fotocopy surat kuasa dari Rudyanto Suliawan kepada Saniatma Adinoto tanggal 8 September 2017;
1398. 1 (satu) lembar fotocopy Print Out Rekening Koran Permata Bank nomor rekening 701463226 periode 01 Agustus 2016 sampai 31 Agustus 2016;
1399. 1 (satu) lembar fotocopy Print Out Rekening Koran Permata Bank periode 01 September 2017 sampai dengan 30 September 2017.
1400. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kartu Kendali dari Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk pengurusan jenis izin TDUP Hotel;
1401. 2 (dua) lembar asli surat Berita Acara Pemeriksaan Penyediaan Akomodasi yang telah di tandatangani oleh Yohanes B.D.Madul,SE selaku Ketua Tim Teknis;
1402. 1 (satu) lembar asli surat Lampiran yang telah di tanda tangani oleh Yohanes B.D.Madul,SE selaku Ketua Tim Teknis pada tanggal 20 November 2020;
1403. 1 (satu) lembar asli surat Daftar Hadir Pemeriksa Lapangan telah di tandatangani oleh Yohanes B.D.Madul,SE, Gilbertus E. Muwa, Ermilinda Murniwati, Isabela Y. Pratiwi. Pada tanggal 20 November 2020;
1404. 1 (satu) lembar asli surat Chek List CF Komodo Hotel yang di tandatangani atas nama pemohon Veronika Syukur dan di tanda tangani oleh petugas Front Office atas nama Menthy pada tanggal November 2020;
1405. 2 (dua) lembar asli surat Formulir Permohonan Izin Usaha Pariwisata (Penyediaan Akomodasi) yang di tandatangani oleh Veronika Syukurtanggal 11 November 2020;
1406. 1 (satu) lembarasli Surat Pernyataan Keabsahan Dan Kebenaran Dokumen yang telah di tandatangani oleh Veronika SyukurTanggal 11 November 2020;
1407. 1 (satu) lembarasli Surat dari Badan Pimpinan Cabang Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia/ BPC.PHRI Kabupaten Manggarai Barat, Nomor:01/CFKH/MB/2012 tanggal 22 Juni 2012, Perihal Permohonan Surat Rekomendasi dari PHRI Cab. Manggarai Barat;
1408. 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Badan Pengelolaan Keuangan Daerah atas nama : CF KOMODO yang di tandatangani oleh VERONIKA SYUKUR Tanggal 28 Februari 2020;
1409. 1 (satu) Lembar Fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD - Pajak Hotel) atas nama CF KOMODO tanpa tandatangan penyeter tanggal 28 Februari 2020;
1410. 1 (satu) Lembar asli Surat dari Pemerintah Republik Indonesia IZIN LOKASI atas nama VERONIKA SYUKUR dengan lokasi yang di setuju di Jl.Alo Tanis.Lamtoro Kel.Labuan Bajo Kec.Komodo Kab.Manggarai Barat yang di terbitkan tanggal 30 Juli 2019 oleh Bupati Kab.Manggarai Barat;
1411. 1 (satu) Lembar asli surat Izin Usaha (Tanda Daftar Usaha Pariwisata) atas nama pemilik Veronika Syukur, nama usaha CF Komodo yang di terbitkan tanggal 4 Agustus 2020;
1412. 1 (satu) lembar asli surat Izin Lingkungan kepada Veronika Syukur yang diterbitkan pada tanggal 27 Oktober 2020 oleh Bupati Kabupaten manggarai Barat;
1413. 1 (satu) lembar fotocopy surat dari Pemerintah Republik Indonesia, Nomor Induk Berusaha (NIB) 0220202810745 kepada Veronika Syukur yang di terbitkan tanggal 4 Agustus 2020 oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal;

Hal 220 dari 281 hal

Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1414. 4 (empat) lembar fotocopy surat DPLH Operasional Hotel CF Komodo Di Jl. Alo Tanis, Lamtoro Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat Nomor: DLHK.660.1/08/VII/2020 Tanggal 07 Juli 2020;
1415. 1 (satu) lembar asli surat Rekomendasi Nomor: PPT.503.650/017/IX/2012 Tanggal 25 September 2012 untuk Ijin Prinsip Lokal (IPL) pekerjaan Pembangunan Hotel yang telah di tanda tangani oleh Drs. Naaman M. Jalesy,MM selaku Kepala Kantor Perijinan Terpadu Kabupaten Manggarai Barat;
1416. 1 (satu) lembar fotocopy surat Rekomendasi Nomor: DPMPTSP.503.650/092/VII/2019 Tanggal 30 Juli 2019 untuk Ijin Ptrinsip Pemanfaatn Ruang (IPPR) pekerjaan Hotel yang telah di tanda tangani oleh Ir. Abdurahman,MM selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
1417. 1 (satu) lembar fotocopy surat dari Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu untuk Izin Mendirikan Bangunan Nomor: KPPT.503.640/IMB/007/X/2012 tanggal 1 Oktober 2012 yang di berikan kepada Veronika Syukur dan telah di tanda tangani oleh Drs. Naaman M.Jalesy,MM selaku Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu;
1418. 1 (satu) lembar asli Surat Izin Jasa Penyedia Akomodasi Wisata Nomor : KPPT.503.556/09/XI/2012 Tanggal 10 November 2012;
1419. 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama Veronika Syukur;
1420. 1 (satu) lembar fotocopy NPWP atas nama Veronika Syukur;
1421. 1 (satu) lembar fotcopy Surat Keterangan Persetujuan Penyitaan Pemenuhan Komitmen Tanggal 27 Oktober 2020;
1422. 2 (dua) lembar fotocopy surat Perihal Rekomendasi UKL-UPL Nomor: BLH.660.1/Rek/62/VI/2012 Tanggal 20 Juni 2012;
1423. 1 (satu) unit Mesin Ketik merek Brother Deluxe 2213;
1424. 1 (satu) berkas copian Permohonan Realisasi Permohonan Pendaftaran Tanah dari H. M. ADAM DJUDJE Di Lokasi Torro Lemma Batu Kallo, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat tanggal 12 November 2014.
1425. 1 (satu) Lembar asli slip aplikasi transfer / slip penyetoran Permata Bank atas nama pengirim Massimiliano De Reviziis kepada Supardi Tahiya sebesar Rp. 1,405,000,000,- (Satu Miliar Empat Ratus Lima Juta Rupiah) ke Nomor Rek. 1610003304453 Tanggal 12 Agustus 2016 sebagai pelunasan Karangan Supardi dan Suaib;
1426. 1 (satu) Lembar asli slip aplikasi transfer / slip penyetoran Permata Bank atas nama pengirim Massimiliano De Reviziis kepada Theresia Dewi Koroh Dimu sebesar Rp. 123,270,000,- (Seratus Dua Puluh Tiga Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah), ke Nomor Rek. 1610001345078 Tanggal 12 Agustus 2016 sebagai Honorarium PPAT Karangan;
1427. 1 (satu) Lembar asli slip aplikasi transfer / slip penyetoran Permata Bank atas nama pengirim Massimiliano De Reviziis kepada Ulce Irithrina Sudjateruna, SH. sebesar Rp. 605,000,000,- (Enam Ratus Lima Juta Rupiah), ke Nomor Rek. 1450005164252 Tanggal 12 Agustus 2016 sebagai Kembalikan Uang di Pinjam;
1428. 1 (satu) Lembar asli slip aplikasi transfer / slip penyetoran Permata Bank atas nama pengirim Massimiliano De Reviziis kepada Andrea Ferrero sebesar Rp. 50,000,000,- (Lima Puluh Juta Rupiah), ke Nomor Rek. 0265020446 Tanggal 12 Agustus 2016 (Uang dari Manfredi);
1429. 1 (satu) Lembar asli slip aplikasi transfer / slip penyetoran Permata Bank atas nama pengirim Massimiliano De Reviziis kepada Theresia Dewi

Hal 221 dari 281 hal Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Koroh Dimu sebesar Rp. 440,250,000,- (Empat Ratus Empat Puluh Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), ke Nomor Rek. 1610001345078 Tanggal 12 Agustus 2016 sebagai Pajak Penjual Karangan;
1430. 1 (satu) Lembar asli slip aplikasi transfer / slip penyetoran Permata Bank atas nama pengirim Massimiliano De Reviziis kepada Theresia Dewi Koroh Dimu sebesar Rp. 1,000,000,000,- (Satu Miliar Rupiah), ke Nomor Rek. 1610001345078 Tanggal 12 Agustus 2016 sebagai Titipan Uang Untuk Jalan;
1431. 1 (satu) Lembar asli slip aplikasi transfer / slip penyetoran Permata Bank atas nama pengirim Massimiliano De Reviziis kepada H. Sukri sebesar Rp. 2,453,000,000,- (Dua Miliar Empat Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah), ke Nomor Rek. 1610003304289 Tanggal 12 Agustus 2016 sebagai Pelunasan Karangan;
1432. 3 (tiga) Lembar Fotocopy Surat Perjanjian yang telah ditanda tangani oleh H.Sukri dan Veronika Syukur sebagai Pihak Pertama tanggal 13 September 2013;
1433. 1 (satu) buku copy Kuasa yang dibuat oleh Notaris/PPAT SITI ZUBAIDAH, SH. tanggal 07 Oktober 2013, Nomor: 07.
1434. Uang Sejumlah Rp. 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah);
1435. 1 (satu) Lembar fotocopy Kwitansi pembayaran Harga Sebuah Mobil Rush Dengan Nomor Polisi EB 1219 GA sebesar Rp 47.500.000 (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) Tanggal 1 Oktober 2020 yang telah di tanda tangani oleh bapak Blasius Beo selaku penerima dan Bapak Agus Subagio selaku Terdakwa;
1436. 2 (dua) lembar foto mobil Rush;
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain.
1437. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kpg, tanggal 30 Juni 2021 tersebut, Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 5 Juli 2021 telah mengajukan permintaan banding sesuai dengan Akta Pernyataan Banding Nomor 24/Akta Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Kupang, demikian pula Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 7 Juli 2021 telah mengajukan permintaan banding sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Kupang;

Menimbang bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 8 Juli 2021 telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum, demikian pula atas permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 8 Juli 2021 telah

Hal 222 dari 281 hal Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan kepada Terdakwa sesuai dengan Akta Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 20/Akta.Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 9 Agustus 2021 dan memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 12 Agustus 2021 sesuai dengan Relas Pemberitahuan/Penyerahan Memori Banding yang ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kupang yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :

A. JUDEX FACTIE SECARA NYATA TELAH MENGABAIKAN FAKTA-FAKTA HUKUM YANG SECARA MUTLAK TERBUKTI DALAM PEMERIKSAAN SIDANG PERKARA A QUO.

Bahwa fakta hukum yang terbukti dalam pemeriksaan sidang perkara *a quo* adalah sebab adanya (*raison d'etre*) yang dalam perkara *a quo* disebut sebagai Tanah Aset Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, yang awalnya diminta oleh Sdr. Gaspar Parang Ehok selaku Bupati Kepala Daerah Tingkat II Manggarai (sebelum mekarnya Kabupaten Manggarai barat) kepada Fungsionaris Adat atas nama H. Ishaka, untuk rencana pembangunan sekolah perikanan.

Bahwa terungkap pula fakta hukum yang tidak terbantahkan, bahwa segala hal menyangkut rencana pembangunan sekolah perikanan di Labuan Bajo, Manggarai Barat oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Manggarai yang saat itu dijabat oleh Sdr. Gaspar Parang Ehok, tidak kunjung terealisasi, bahkan hingga yang bersangkutan tidak menjabat lagi selaku Bupati Kepala Daerah Tingkat II Manggarai, sampai dengan saat ini (setelah mekarnya Kabupaten Manggarai Barat), yang disebabkan adanya masalah terkait penyerahan tanah adat dari Fungsionaris Adat yang faktanya tidak diterima atau disetujui oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Manggarai, dengan alasan adanya perbedaan lokasi tanah dari yang awalnya diminta atau diinginkan oleh Sdr. Gaspar Parang Ehok selaku Kepala Daerah Tingkat II Manggarai yang sedari awalnya menginginkan obyek tanah yang berlokasi di KERANGAN dan yang diserahkan oleh Fungsionaris Adat atas nama H. Ishaka yang faktanya ternyata berlokasi di TOROH LEMA BATU KALO.

Bahwa terhadap kegagalan pembangunan sekolah perikanan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Manggarai tersebut, akibat dari persoalan lokasi tanah yang tidak pernah disetujui dan diterima oleh Sdr. Gaspar

Hal 223 dari 281 hal Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Parang Ehok selaku Kepala Daerah Tingkat II Manggarai tersebut bahkan sampai dengan meninggalnya yang bersangkutan, dalam perjalanannya telah menyisakan tugas berat yang diemban oleh Terdakwa/ Pembanding selaku Bupati Kabupaten Manggarai Barat, untuk berupaya memperjelas status dari obyek tanah yang konon pernah diserahkan oleh Fungsionaris Adat atas nama H. Ishaka kepada Pemerintah Daerah Tingkat II Manggarai, yang mana dalam perjalanannya memperoleh begitu banyak kendala, terutama terhadap klaim masyarakat di atas obyek tanah yang sama, sebagai akibat dari kesalahan/ kekeliruan obyek tanah yang diserahkan oleh Fungsionaris adat kepada Pemerintah Daerah Tingkat II Manggarai di awal rencana pembangunan sekolah perikanan yang diprakarsai oleh Sdr. Gaspar Parang Ehok selaku Kepala Daerah Tingkat II Manggarai.

Bahwa berdasarkan pengantar singkat dari ulasan fakta tersebut di atas, maka sangat patut dalam uraian yang lebih spesifik dalam memori banding ini, akan Pembanding ketengahkan kembali beberapa fakta hukum menyangkut kedudukan dari obyek tanah dalam perkara ini, yang akan berujung pada jawaban tentang apakah benar obyek tanah yang berlokasi di Toroh Lema Batu kalo tersebut merupakan Tanah Aset yang telah secara mutlak dimiliki Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat ataukah sebaliknya belum merupakan tanah Aset milik Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, sehingga tentunya dapat menjadi pedoman yang tepat dan benar kepada yang terhormat Majelis Hakim Tinggi dalam memutus perkara ini.

1. Keterangan Gaspar Parang Ehok selaku mantan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Manggarai Periode I tahun 1989 s/d 1994 dan periode II tahun 1994 s/d 1999, yang sekaligus merupakan fakta hukum dan bukti mengenai DIMANA sesungguhnya letak dari lokasi obyek tanah yang diminta Sdr. Gaspar Parang Ehok kepada Fungsionaris Adat atas nama H. Ishaka dan yang diserahkan H. Ishaka kepada Sdr. Gaspar Parang Ehok.
 - a. Bahwa yang menjadi Obyek Perkara dalam Sidang Perkara *a quo* adalah tidak lain daripada tanah yang diminta oleh Sdr. Gaspar Ehok kepada Fungsionaris Adat H. Ishaka sebagaimana yang diserahkan oleh Fungsionaris Adat H. Ishaka kepada Gaspar Ehok.
 - b. Bahwa berdasarkan perihal lokasi yang tepat dari tanah obyek perkara tersebut, dengan jelas dapat diketahui berdasarkan Keterangan Gaspar Ehok yang tercantum dalam Dokumen Kesimpulan Rapat Muspida



tentang Pembahasan Tanah Pemda Di Kerangan, Kelurahan Labuan Bajo, tanggal 27 Nopember 2014, (Vide Barang Bukti Nomor 52 yang diajukan Penuntut Umum) dalam Sidang Perkara ini jelas menyatakan tanah Pemda yang diminta Gaspar Ehok kepada H. Ishaka sebagaimana yang diserahkan H. Ishaka kepada Gaspar Ehok adalah tanah di "KERANGAN", Kelurahan Labuan Bajo.

- c. Bahwa memperkuat perihal point b di atas, adapun faktanya terdapat Keterangan Gaspar Ehok dalam Surat Pernyataan/Penegasan yang dibuat dan ditandatangani Gaspar Ehok pada tanggal 22 Oktober 2014 yang dalam Sidang Perkara ini merupakan Barang Bukti Penuntut Umum No. 555 "Foto Copy Surat Pernyataan/Penegasan Dari Drs. Gaspar P. Ehok, Tanggal 22 Oktober 2014" secara jelas dan tegas menyatakan: *"Bahwa permintaan saya telah langsung dikabulkan oleh kraeng Dalu dengan menyebut dan menunjuk tanah ulayat di Kerangan"* (Poin 2 Surat Pernyataan/Penegasan Gaspar Ehok).
- d. Bahwa menjawab lebih lanjut kekeliruan obyek tanah yang diupayakan kepemilikannya oleh Pemda Manggarai Barat, yang telah dijelaskan diawal terkait obyek tanah yang berlokasi di Toroh Lemma Batu Kalo, faktanya tidak pernah diterima oleh Gaspar Parang Ehok (dalam rencana pembangunan sekolah perikanan), dikuatkan berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat dan ditandatangani Gaspar Ehok pada tanggal 10 Mei 2013 yang merupakan Barang Bukti Penuntut Umum Nomor: 541 "Foto Copy Surat Keterangan Dari Drs. G.P. Ehok, Tanggal 10 Mei 2013" dalam Perkara *a quo* secara jelas menegaskan yang pada intinya bahwa Gaspar Ehok tidak pernah menerima tanah di Toroh Lemma Batu Kalo seluas ± 30 Ha (300.000 m²).
- e. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan bukti-bukti hukum tersebut di atas, maka tanah yang merupakan Obyek Perkara ini adalah tanah yang berlokasi di "KERANGAN".
- f. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan bukti-bukti hukum tersebut di atas, nama KERANGAN dan nama TOROH LEMMA BATU KALLO adalah nama dua lokasi/ tempat yang berbeda dengan karakter kontur tanah yang berbeda pula. Kerangan adalah tanah pantai pasir putih yang rata terletak di lembah (dalam bahasa Manggarainya disebut



- “lengkong”), sedangkan Toroh Lemma Batu Kallo adalah tanah bukit dengan pantai karang yang terjal.
- g. Bahwa pada 9 April 2021 Judex Facti melakukan Pemeriksaan setempat (sidang lokasi) dan telah melihat dan mengetahui dimana lokasi tanah yang disebut Kerangan, dan dimana lokasi tanah yang disebut Toroh Lemma Batu Kallo.
- h. Bahwa sekalipun Judex Facti telah melihat dan mengetahui Kerangan dan Toroh Lemma Batu Kallo tersebut merupakan nama dua lokasi yang berbeda, dan sekalipun terungkap fakta-fakta hukum dan bukti-bukti hukum dalam Sidang Perkara *a quo* sebagaimana tersebut di atas, namun Judex Facti tetap menyatakan dalam Putusan No.33 bahwa tanah aset Pemda Manggarai Barat adalah berlokasi di “Kerangan/Toroh Lemma Batu Kallo”.
- i. Bahwa ketika Judex Facti menyatakan dalam Putusan No. 33 bahwa tanah aset Pemda Manggarai Barat seluas ± 30 Ha (300.000 m²), maka hal tersebut berarti yang dimaksudkan Judex Facti adalah tanah yang berada/ terletak di Toroh Lemma Batu Kallo. Dan hal tersebut merupakan “*Error In Objecto*”, sebab Gaspar Parang Ehok sudah menyatakan tidak pernah menerima tanah di Toroh Lemma Batu Kallo. Yang diakui Gaspar Ehok adalah tanah yang disebutkan dan ditunjuk oleh Fungsionaris Adat atas nama H. Ishaka di “Kerangan” (sejalan dengan Barang Bukti Penuntut Umum No. 555 “Foto Copy Surat Pernyataan/Penegasan Dari Drs. Gaspar P. Ehok, Tanggal 22 Oktober 2014).
- j. Bahwa tindakan Judex factie yang mana dalam putusannya terhadap Terdakwa/ Pembanding, yaitu mencantumkan nama tanah Obyek Perkara dengan sebutan “Kerangan/Toroh Lemma Batu Kallo” yang dibaca Kerangan atau Toroh Lemma Batu Kallo, menunjukkan dan membuktikan bahwa Judex Facti berada dalam keragu-raguan dan ketidakpastian hukum mengenai Obyek Perkara tanah aset Pemda Manggarai Barat dalam Perkara *a quo*. Dan sudah seharusnya Judex Facti tidak boleh membuat putusan ketika berada dalam keragu-raguan dan ketidakpastian hukum mengenai Obyek Perkara tanah aset Pemda Manggarai Barat, apalagi ketika putusan yang dibuat Judex Facti



merugikan Terdakwa. Sebab, hal itu bertentangan dengan asas hukum "*in dubio pro reo*".

2. Fakta Tumpang Tindihnya Lokasi Obyek Tanah Yang Diklaim Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat Dengan Beberapa Oknum Yang Masing-Masing Memegang Alas Hak Yang Sah Secara Hukum; (*Bukti-Bukti Alas Hak Para Pihak Tersebut Disita Oleh Pihak Kejaksaan Sebagai Bukti Dalam Perkara A Quo*).

a. Tumpang Tindihnya lokasi Tanah Pemda Manggarai Barat Berdasarkan Surat Pelepasan Hak Tahun 1997, Dengan Obyek Tanah Milik Ir. Nicolaus Naput Berdasarkan Surat Pelepasan Hak Tertanggal 21 Oktober 1991.

- Bahwa dalam pembuktian persidangan *a quo*, muncul fakta yang tidak terbantahkan bahwa terhadap obyek tanah seluas ± 30 Ha yang di klaim oleh Pemda kabupaten Manggarai Barat yang berlokasi di Toroh lema Battu Kallo, ternyata tumpang tindih dengan obyek tanah yang dikuasai pula oleh Ir. Nicolaus Naput Berdasarkan Surat Pelepasan Hak dari Fungsioner Adat Ngorang kepada Ir. NICOLAUS NAPUT tertanggal 21 Oktober 1991, atas obyek tanah yang terletak di Toroh Lema Battu Kallo (Vide Barang Bukti No. 1156 yang diajukan Penuntut Umum).
- Bahwa selain Barang Bukti Penuntut Umum Nomor 1156 berupa Surat Bukti Penyerahan Tanah Adat Dari Fungsioner Adat Ngorang kepada Ir. NICOLAUS NAPUT tertanggal 21 Oktober 1991, juga dikuatkan dengan Kuitansi pembayaran obyek tanah yang terletak di Toroh Lema Battu Kallo tertanggal 21 Oktober 1991 sebesar Rp.7.500.000 (Vide Barang Bukti No. 1157 yang diajukan Penuntut Umum) yang dimana kedua bukti tersebut telah terbukti dalam persidangan merupakan dokumen asli dan sah secara hukum.
- Bahwa adapun mengenai kondisi tumpang tindihnya lokasi obyek tanah yang diklaim oleh Pemda Manggarai barat dengan obyek yang sama yang dimiliki oleh Sdr. Ir. Nicolaus Naput yang berlokasi di Toroh Lema Batu kallo, adalah berasal pula dari keterangan Hj. RAMANG ISHAKA, yang berkedudukan selaku anak kandung/ ahli waris dari Fungsionaris Adat atas nama H. Ishaka, yang tercantum dalam Notulen Rapat Masalah tanah Pemerintah daerah Di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keranga, Kelurahan Labuan Bajo, tanggal 22 Oktober 2014, (Vide Barang Bukti Nomor 52 yang diajukan Penuntut Umum), dimana dalam dokumen tersebut dengan jelas terekam ungkapan/keterangan dari Hj. RAMANG ISHAKA yang menyatakan bahwa *"Posisi di atas tanah sengketa (yang di klaim Pemda) saat ini dalam antara Bapak Niko Naput dengan Pemda. Perlu kita luruskan untuk mencari jalan yang baik, kita mencari titik temu atau jalan keluar antara bapak Nico Naput dan Pemda"*.

- Bahwa begitu pula di dalam pembuktian persidangan perkara a quo, Hj. RAMANG ISHAKA yang juga berkedudukan sebagai saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, di dalam persidangan telah menegaskan bahwa memang benar perihal fakta bahwa telah terjadi tumpang tindih atas obyek tanah yang di klaim oleh Pemda Kab. Manggarai Barat dengan tanah yang sudah diserahkan fungsioner adat ngorang kepada Ir. NICOLAUS NAPUT" atas lokasi obyek yang sama (Vide Uraian Keterangan Saksi Hj. Ramang Ishaka di dalam Putusan Nomor: 33/PID.SUS-TPK /2021/PN Kpg, Tanggal 30 Juni 2021).
- Bahwa pada tahun 2015 Ir. NICOLAUS NAPUT melalui kuasa hukumnya, juga telah mengajukan surat keberatan tertanggal 17 Juni 2015 ke BPN Kab. Manggarai Barat atas permohonan penerbitan sertifikat yang di ajukan oleh PEMDA Kab.Manggarai Barat atas tanah yang berlokasi di Toroh Lema Battu Kallo (bukti terlampir dalam memori ini). Sehingga berangkat dari hal tersebut telah semakin membuktikan bahwa klaim Pemda Kabupaten Manggarai Barat terhadap obyek tanah yang berlokasi di Toroh Lema Battu kallo, dalam faktanya mengalami tumpang tindih dengan obyek tanah milik Ir. NICOLAUS NAPUT, dan atas peristiwa saling klaim obyek tanah antar kedua pihak tersebut, faktanya pula belum pernah menemukan titik temu untuk menyelesaikan masalah tersebut.
- Bahwa terhadap perangkat bukti-bukti formil kepemilikan obyek tanah dari Ir. Nicolaus Naput di atas tanah obyek perkara a quo, belum pernah diuji sehingga dinyatakan untuk dibatalkan atau tidak sah oleh otoritas lembaga yang berwenang, sehingga patut

Hal 228 dari 281 hal

Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipandang masih memiliki kekuatan hukum yang mengikat terkait klaim terhadap obyek tanah perkara a quo.

b. Tumpang Tindihnya lokasi Tanah Pemda Manggarai Barat Berdasarkan Surat Pelepasan Hak Tahun 1997, Dengan Obyek Tanah Milik H. Muhamad Adam Djuje, berdasarkan Surat Pelepasan Hak Tertanggal 10 April 1990.

- Bahwa dalam fakta persidangan diperoleh fakta selain terdapat tumpang tindih klaim tanah Pemda Kabupaten Manggarai Barat dengan Sdr. Ir. Nicolaus Naput, juga terdapat pula tanah dari SDR. MUHAMAD ADAM DJUJE (Alm) yang mengklaim obyek tanah yang sama dengan klaim dari Pemda Manggarai Barat dengan total luas obyek tanah yang tercantum didalam Surat Pelepasan hak tertanggal 10 April 1990 milik Sdr. Muhamad Adam Djuje (Alm) seluas 30 Ha, yang berlokasi di Toroh Lemma Batu Kallo (Vide Barang Bukti No. 875 yang diajukan Penuntut Umum), lokasi mana juga diklaim oleh Pemda Kabupaten Manggarai Barat dengan total luasan yang sama.
- Bahwa klaim Sdr. Muhamad Adam Djuje (Alm) atas obyek tanah dalam perkara ini, adalah seperti yang telah dijelaskan diawal diperoleh juga dari pihak yang sama yakni berasal dari Fungsionaris Adat nggorang atas nama H. Ishaka.
- Bahwa menanggapi klaim Sdr. Muhamad Adam Djuje (Alm) atas tanah obyek perkara ini, maka pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat Melalui Terdakwa / Pembanding selaku Pejabat Bupati Kepala Daerah Kabupaten Manggarai Barat telah melakukan upaya untuk melakukan rapat khusus yang melibatkan pihak Forkopimda dan menghadirkan pula para pelaku sejarah untuk membahas obyek tanah yang berlokasi di "Kerangan", pada tanggal 21 dan 22 Oktober 2014, walaupun tanpa disadari bahwa upaya pihak Pemda untuk pensertifikatan obyek tanah perkara adalah faktanya berada di lokasi Toroh Lemma Batu Kallo (*Error In Objecto*), sehingga jelas menimbulkan banyak persoalan yang bahkan belum terselesaikan sampai dengan saat ini.
- Bahwa begitu pula sebagai reaksi atas klaim Pemda Manggarai Barat atas obyek tanah milik Sdr. Muhamad Adam Djuje (Alm)



berdasarkan bukti kepemilikan dan penguasaannya terhadap obyek tanah perkara tersebut, maka Sdr. Muhamad Adam Djuje (Alm) melalui kuasa hukumnya, pernah melayangkan Surat yang ditujukan kepada Bupati Kepala Daerah Kabupaten Manggarai Barat dan pihak Badan Pertanahan Nasional Manggarai Barat sebagai tembusannya tertanggal 8 September 2017 (Bukti terlampir), yang berisi pada pokoknya yaitu meminta penjelasan/klarifikasi terkait hak milik atas obyek tanah di Toroh Lemma Batu Kallo, kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo Manggarai Barat.

- Bahwa pihak Pemda Kabupaten Manggarai Barat melalui Terdakwa/ Pembanding selaku Pejabat Bupati, faktanya tetap dalam pendiriannya untuk mempertahankan obyek tanah di Toroh Lemma Batu Kallo seluas \pm 30 Ha, dengan melakukan serangkaian upaya untuk persiapan menghadapi klaim beberapa pihak termasuk Sdr. Muhamad Adam Djuje (Alm) atas tanah obyek perkara, walaupun dengan perpegang pada surat-surat bukti yang tidak memadai untuk mendukung klaim pemerintah daerah atas tanah obyek perkara tersebut (Vide barang bukti Penuntut Umum Nomor. 493 Huruf k, berupa Surat Pelepasan hak dari Fungsionaris adat H. Ishaka Kepada Pemda Manggarai yang tidak memuat luas tanah, Batas-batas tanah, dan tidak ditandatangani oleh Sdr. Gaspar Parang Ehok selaku mantan bupati Manggarai sebagai penerima obyek tanah tersebut).
 - Bahwa atas peristiwa saling klaim obyek tanah antar kedua pihak tersebut, faktanya pula belum pernah menemukan titik temu untuk menyelesaikan masalah tersebut, sehingga pihak BPN Kabupaten Manggarai Barat belum sama sekali menerbitkan sertifikat baik bagi pihak Pemda Kabupaten Manggarai Barat maupun kepada Sdr. Muhamad Adam Djuje (Alm)/ ahli warisnya sampai dengan saat ini.
- c. Tumpang Tindihnya lokasi Tanah Pemda Manggarai Barat dengan Sdr. DAY KAYUS yang memperoleh bagian di atas tanah obyek perkara berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor: 6/Pdt/2016/PN.Lbj Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pembuktian perkara a quo, diketahui dan telah terbukti pula perihal salah satu Terdakwa dalam perkara ini atas nama DAY KAYUS, yang faktanya juga memiliki bagian obyek tanah di lokasi tanah obyek perkara, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor: 9/Pdt/2016/PN.Lbj, Yang telah berkekuatan hukum tetap dan atas dasar putusan tersebut BPN Kabupaten Manggarai Barat telah menerbitkan sertifikat hak milik terhadap yang bersangkutan.
 - Bahwa meskipun telah dengan jelas dan terang terungkap dalam fakta persidangan terkait hal berdasarkan point a di atas, namun Judex factie/ Majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangan putusannya tidak sama sekali memuat tentang adanya putusan Pengadilan Negeri tersebut karena Majelis Tindak Pidana Korupsi tidak memiliki kewenangan untuk menilai dan membatalkan putusan perdata yang sudah berkekuatan hukum tetap tersebut, yang mana dengan jelas menimbulkan suatu pertentangan dari produk hukum peradilan yang tumpang tindih sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pencari keadilan.
- d. Tumpang Tindihnya lokasi Tanah Pemda Manggarai Barat dengan Sdr. H. SUKRI yang memperoleh bagian di atas tanah obyek perkara berdasarkan Surat Keterangan riwayat Kepemilikan hak atas tanah Nomor: Pem.593/5205/VIII/2013 tanggal 27 agustus 2013, ternyata memperoleh tanah diatas lokasi Tanah Obyek Perkara karena hibah dari KETANG dari tahun 1997, dan KETANG memperoleh tanah tersebut karena pembagian keluarga dari HABE pada tahun 1965 dan HABE menguasai tanah tersebut karena usaha sendiri pada tahun 1959, sehingga ditilik dari waktu kepemilikan maka jelas tanah tersebut telah dikuasai oleh HABE sejak tahun 1959.
- e. Tumpang Tindihnya lokasi Tanah Pemda Manggarai Barat dengan Sdr. SUPARDI TAHIYA memperoleh tanah di atas lokasi Tanah Obyek Perkara sejak tahun 1993, sesuai surat keterangan riwayat Kepemilikan Hak Atas Tanah Nomor: LBJ.593/6022/IX/2013 tanggal 16 September 2013.
- f. Bahwa Fakta Hukum tersebut tentu saja menimbulkan Sengketa hukum segitiga antara oknum-oknum yang menguasai tanah obyek perkara

Hal 231 dari 281 hal

Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



tersebut dengan Fungsionaris Adat Nggorang, di satu sisi dan pada sisi lain sengketa kepemilikan antara oknum-oknum tersebut dengan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat.;

g. Bahwa hingga kini belum ada suatu kepastian hukum tentang siapa yang paling berhak atas tanah obyek perkara tersebut dan pula belum ada Putusan Pengadilan yang menyatakan bahwa alas hak dari pihak-pihak yang mengklaim bagian di atas tanah obyek perkara tersebut palsu, batal atau tidak mengikat secara hukum dan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat dinyatakan sebagai Pemilik yang sah atas tanah tersebut.

h. Bahwa ternyata pula bahwa penerbitan Sertifikat-Sertifikat di atas tanah obyek perkara tersebut turut direstui pula oleh Ahli Waris dari Fungsionaris Adat nggorang atas nama H. Ishaka yang mengaku sebagai Pemangku Ulayat Nggorang saat ini, sehingga lebih menimbulkan ketidakpastian hukum pula tentang siapakah yang paling berhak atas tanah tersebut, hal mana terungkap dalam surat undangan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat Nomor : 125.53.15/200.3/XII/2015, dimana H. Ramang Ishaka selaku ahli waris dari Fungsionaris Adat atas nama H. Ishaka (Alm) adalah salah satu pihak yang diundang perihal Permohonan hak atas tanah atas nama Day Kayus;

3. Fakta Dokumen Alas Hak Milik Pemda Kabupaten Manggarai Barat, Berupa Surat Pelepasan Hak (SPH) atas Tanah Obyek Perkara Yang Tidak Jelas Dan Tidak Berkekuatan Hukum.

a. Bahwa tak dapat disangkal dan telah terbukti dalam persidangan perkara *a quo*, perihal dokumen alas hak kepemilikan tanah obyek perkara dari Pemda Kabupaten Manggarai Barat, terutama Surat Pelepasan Hak Atas Tanah tertanggal 14 Mei 1997, dari Fungsionaris Adat atas nama H. Ishaka (Barang Bukti Penuntut Umum Nomor. 493 Huruf k), adalah tidak jelas sehingga mutlak tidak memiliki kekuatan hukum. Hal tersebut dilatar belakangi alasan sebagai berikut:

1) Bahwa dalam Surat Pelepasan Hak (SPH) tidak tercantum luas obyek tanah yang diserahkan oleh Fungsionaris Adat atas nama H. Ishaka kepada Pemda Kabupaten Tingkat II Manggarai pada tanggal 14 Mei 1997 tersebut.



- 2) Bahwa selain itu dalam SPH tidak tercantum pula batas-batas obyek tanah yang diserahkan.
 - 3) Bahwa dalam SPH juga tidak ada tanda tangan dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II Manggarai yang saat itu dijabat oleh Sdr. GASPAR PARANG EHOK, sebagai pejabat yang menerima penyerahan obyek tanah tersebut.
 - 4) Bahwa terlebih lagi seluruh dokumen kepemilikan Pemda Manggarai Barat atas tanah obyek perkara, yang dijadikan Barang Bukti oleh Penuntut Umum, hanyalah dokumen Foto Copy tanpa surat asli yang sudah tidak ditemukan lagi bahkan sebelum Terdakwa/ Pembanding menjabat sebagai Bupati Kabupaten Manggarai Barat.
- b. Bahwa perihal lokasi yang tercantum di dalam Surat Pelepasan Hak Atas Tanah pada tanggal 14 Mei 1997 milik Pemda Kabupaten Tingkat II Manggarai/ Pemda Kabupaten Manggarai Barat saat ini dengan jelas dicantumkan adalah berlokasi di "KERANGAN" dan bukan di "Toroh Lemma Batu Kalo" apa lagi di lokasi yang bernama Kerangan/ Toroh lema batu kallo sebagaimana dicantumkan sebagai lokasi obyek perkara berdasarkan putusan *judex factie* pengadilan tingkat pertama.
- c. Bahwa fakta ketidakjelasan alas hak kepemilikan tanah obyek perkara *a quo* dari Pemda Manggarai Barat tersebut, yang faktanya harus dihadapi oleh Terdakwa/ Pembanding yang faktanya telah melakukan segala cara untuk memperoleh kejelasan status atas tanah obyek perkara *a quo*, yang di tengah jalan dari proses tersebut harus dijadikan pesakitan dalam perkara *a quo*, hal yang tentu saja tidak dapat dibenarkan secara hukum berdasarkan fakta yang harus diterima oleh Terdakwa / pembanding dalam perkara ini.
4. Fakta Dari sikap dan Pernyataan Bupati-Bupati Terdahulu Sebelum Terdakwa/ Pembanding Menjabat Sebagai Bupati Kabupaten Manggarai Barat, Yang Faktanya Lepas Tangan untuk Mengurus Tanah Obyek Perkara.
- a. Bahwa sehubungan dengan obyek tanah perkara *a quo*, tidak lepas perihal urusannya dengan para bupati-bupati terdahulu, sebelum Terdakwa/ Pembanding menjabat sebagai Bupati Manggarai Barat. Pihak-pihak mantan bupati tersebut antara lain:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) GASPAR PARANG EHOK, selaku mantan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Manggarai Periode I tahun 1989 s/d 1994 dan periode II tahun 1994 s/d 1999.
 - 2) Drs. ANTONY BAGUL DAGUR, M.si, selaku mantan Bupati Manggarai periode 1999 s/d 2004.
 - 3) Drs. W. FIDELIS PRANDA, selaku mantan Bupati Kab. Manggarai Barat periode I tahun 2003 s/d 2005 dan Periode II tahun 2005 s/d 2010.
- b. Bahwa Tanah Obyek Perkara, faktanya tidak pernah dikuasai secara fisik, dan diurus status administrasi kepemilikannya baik pada masa Pemerintahan Kabupaten Manggarai maupun pada masa Pemerintahan Kabupaten Manggarai Barat, sebelum Terdakwa/ Pemanding menjabat sebagai Bupati Manggarai Barat pada tahun 2010.
- c. Bahwa Bapak Drs. Gaspar Parang Ehok, selaku Mantan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Manggarai, melalui Surat Keterangan yang dibuat dan ditandatangani di atas materai tertanggal 10-05-2013 (Barang Bukti Penuntut Umum Nomor: 541), sehubungan dengan obyek tanah perkara telah menerangkan secara jelas bahwa "Bapak Drs. G.P. EHOK sebagai Bupati Kepala Daerah Tingkat II Manggarai, dari tahun 1989 s/d tahun 1994 dan tahun 1994 s/d tahun 1999, tidak pernah menerima dan menandatangani surat penyerahan tanah adat yang diserahkan oleh Haji Ishaka dan Haku Mustafa sebagai Fungsionaris Adat/Tua adat Nggorang. Tanah tersebut terletak di Lokasi Toroh Lemma Batu Kallo, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat".
- d. Bahwa selanjutnya Pernyataan dari Drs. ANTONIUS BAGUL DAGUR, M.Si, selaku Mantan Bupati Manggarai periode tahun 1999 s/d tahun 2004, yang dibuat dan ditandatangani di atas materai pada tanggal 24-10-2014 (bukti Terlampir dalam memori ini), yang pada pokoknya menyatakan hal-hal, sebagai berikut :
- "Bahwa pada masa jabatan Bapak Drs. Antonius Bagul Dagur sebagai Bupati Manggarai periode tahun 1999 sampai tahun 2004, Bapak Drs. Antonius Bagul Dagur sebagai Bupati Manggarai tidak pernah mengetahui dan melihat dokumen surat bukti penyerahan tanah adat di

Hal 234 dari 281 hal

Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lokasi Toroh Lemma Batu Kallo seluas ±30 Ha yang diserahkan oleh Fungsionaris adat/ tua Nggorang kepada Pemerintah Kabupaten Manggarai yang dibuktikan bahwa tanah tersebut tidak terdaftar dalam daftar lampiran Berita Acara Penyerahan Aset Daerah (PAD) dari Pemerintah Kabupaten Manggarai kepada Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat”.

e. Bahwa adapun Surat keterangan yang dibuat dan ditandatangani di atas materai oleh Bapak DRS. W. FIDELIS PRANDA (Bukti Terlampir dalam Memori Ini), yang menyatakan/ menerangkan dengan sebenar-benarnya, hal-hal sebagai berikut:

1) Bahwa Bapak Drs. W. Fidelis Pranda sebagai Bupati Manggarai Barat dari tahun 2003 s/d tahun 2005 dan dari tahun 2005 s/d tahun 2010, tidak pernah mengetahui dan mendapat informasi dari Pemerintah Kabupaten Manggarai tentang adanya dokumen Penyerahan Tanah Adat di lokasi Toro Lemma Batu Kallo, yang diserahkan oleh Haji Ishaka dan Haku Mustafa sebagai Fungsionaris adat/ Tua Adat Nggorang kepada pemda Tk. II Manggarai pada tahun 1997, luas ±30 Ha dengan batas, sebagai berikut :

Sebelah Utara : jalan pertigaan menuju Pantai/ laut

Sebelah Selatan : laut flores/ tanah Negara

Sebelah Timur : jalan pertigaan menuju Toro Lemma Batu Kallo.

Sebelah Barat : Laut Flores/ tanah Negara.

2) Bahwa tanah luas ± 30 Ha di lokasi Toro lemma Batu Kallo, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, tidak terdaftar dalam daftar lampiran berita acara penyerahan asset daerah pemkab Manggarai kepada pemkab Manggarai Barat. Berdasarkan dari tahun 1989 s/d tahun 1994 dan dari tahun 1994 s/d tahun 1999, Drs. G.P Ehok sebagai Bupati Kepala Tk. II Manggarai tidak pernah menerima dan menandatangani surat penyerahan tanah adat, yang diserahkan oleh Haji Ishaka dan Haku Mustafa sebagai Fungsionaris Adat/Tua Adat Nggorang, seperti tersebut dalam surat keterangan Drs. G.P. Ehok, Mantan Bupati Kepala Daerah Tk. II Manggarai yang dibuat di Ruteng pada tanggal 10-5-2013.



5. Fakta Tanah Obyek Perkara Yang Belum Pernah dikuasai Oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Dan Tidak Pernah Terdaftar Dalam Buku Inventaris Barang Milik Daerah Kabupaten Manggarai.
- Bahwa dalam fakta persidangan *a quo*, terungkap bahwa Tanah obyek perkara sejak diserahkan oleh Fungsionaris Adat, dalam faktanya belum pernah dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai maupun Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat dan tidak pernah terdaftar dalam BUKU INVENTARIS BARANG Milik Daerah Kabupaten Manggarai maupun Kabupaten Manggarai Barat.
 - Bahwa Serah terima dokumen P3D atas tanah obyek perkara yang dilakukan oleh Bupati Manggarai DRS. ANTONY BAGUL DAGUR, M.Si sebagai Pihak Pertama yang menyerahkan dan DRS. DJIDON de HAAN, M.Si sebagai Pihak Kedua yang menerima dan disaksikan oleh Ketua DPRD Kabupaten Manggarai ONGGE YOHANES, BA dan Ketua DPRD Manggarai Barat MATEUS HAMSI pada tanggal 24 januari 2005 tersebut hanyalah berupa dokumen yang berisi daftar inventaris barang belaka, sedangkan tanah obyek perkara berupa bukti alas hak yang seharusnya dilampirkan belum pernah diserahterimakan;
 - Bahwa sejak tahun 2005 hingga Terdakwa/ Pembanding menjabat sebagai Bupati Manggarai barat, tanah obyek perkara, tidak pernah dikuasai, tidak memiliki sertifikat, tidak terdaftar dalam kartu Inventaris Barang Milik Daerah Kabupaten Manggarai Barat, tidak terlapor dalam laporan Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai Barat; dan tidak pernah menjadi temuan dalam LHP BPK;
6. Fakta Upaya Terdakwa/ Pembanding Yang Menjadi Satu-Satunya Pejabat Bupati Manggarai Barat Yang Serius Dan Gigih Dalam Melakukan Upaya Untuk Memperjelas Status Obyek Tanah Perkara Agar Dapat Dimiliki Secara Mutlak Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat.
- Bahwa Terdakwa/ Pembanding faktanya telah berusaha keras agar tanah obyek perkara tersebut menjadi barang milik Daerah Kabupaten Manggarai Barat, meskipun Bupati-Bupati sebelumnya dari tahun 1989 hingga 2010, tidak ada yang peduli dan berusaha untuk mengurus dan menjadikan tanah obyek perkara ini menjadi Barang Milik Daerah.



- b. Bahwa Terdakwa/ Pembanding belum berhasil memperoleh Sertifikat Hak Milik Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat atas tanah obyek perkara karena berbagai hambatan dan kendala, yaitu:
- a. Surat bukti sebagai alas hak yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat atas tanah ini hanya berupa fotocopy belaka, dan secara formil belum sempurna karena SPH (Surat Pelepasan Hak) atas tanah obyek perkara faktanya tidak mencantumkan luas obyek tanah, tidak dicantumkan batas-batas dari obyek tanah, tidak ditandatangani oleh Bupati Manggarai GASPAS PARANG EHOE sebagai sebagai pihak penerima, tanpa nomor Legalisasi dan belum ditandatangani oleh PPAT *Ex Officio* Kepala Badan Pertanahan Nasional.
- b. Bahwa sejak Terdakwa/ Pembanding menjadi Bupati Manggarai Barat pada tahun 2010 tidak pernah menerima dan menguasai tanah obyek perkara seluas ±30 Ha yang terletak di Kerangan, keluarahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dari Bupati sebelumnya.
- c. Tanah Obyek Perkara, ternyata sudah dikuasai oleh oknum-oknum masyarakat dengan dasar alas hak yang diperoleh jauh sebelum tanah tersebut diserahkan kepada Bupati Gaspar Parang Eho.
- d. Fakta dari beberapa saksi yang melihat dan mendengar secara langsung tentang tanah yang ditunjuk dan diserahkan oleh fungsionaris Adat atas nama H. Ishaka kepada GASPAS PARANG EHOE pada tahun 1989, adalah bukan dilokasi yang dimaksud oleh Gaspar Parang Eho yaitu di "Kerangan", melainkan tanah lain yang berlokasi di "Toroh Lemma Batu Kallo" sebagaimana terungkap pula dalam persidangan perkara *a quo*, dan atas penyerahan tanah oleh fungsionaris adat yang berlokasi di "Toroh Lemma Batu Kallo" tersebut langsung di tolak oleh Gaspar Parang Eho yang kemudian terbukti berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 10 Mei 2013 (Vide Bukti Penuntut Umum nomor: 493 huruf G);
- e. Pandemi Covid 19 yang membuat program Pemohon untuk Menggugat pihak-pihak yang menguasai obyek tanah perkara melalui jalur hukum pada tahun 2020 tidak dapat berjalan;



- f. Sikap pihak Kejaksaan yang melakukan Intervensi Pengurusan tanah ini dengan menggunakan Instrument tindak pidana korupsi dan justru menjadikan Terdakwa/ Pembanding sebagai Tersangka dengan dugaan Tindak Pidana korupsi yang merugikan Negara 3T (Tiga triliyun rupiah), karena dianggap tidak mengamankan dan memelihara tanah ini;
- c. Bahwa Terdakwa/ Pembanding baru mendengar informasi tentang adanya tanah seluas 30 Ha dalam Perkara ini pada tahun 2014 pada saat mencari lokasi tanah untuk Pembangunan Listrik Tenaga Batubara dan berdasarkan informasi dari berbagai pihak, Terdakwa/ Pembanding berinisiatif untuk mencari tahu kepastian tentang kebenaran atas informasi tentang tanah milik Pemda seluas ±30 Ha tersebut;
- d. Bahwa dalam rangka untuk memperoleh tanah tersebut agar dijadikan Barang Milik Daerah Kabupaten Manggarai Barat, Terdakwa/ Pembanding mulai melakukan berbagai upaya dengan menugaskan Bagian Tatapem untuk menelusuri kembali dokumen-dokumen terkait tanah Pemda itu dan ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:
- 1) Bahwa ditemukan BERITA ACARA SERAH TERIMA DOKUMEN HASIL KLARIFIKASI P3D ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI DENGAN PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT, yang ditandatangani oleh Bupati Manggarai DRS. ANTONY BAGUL DAGUR, M.Si sebagai Pihak Pertama yang menyerahkan dan DRS. DJIDON de HAAN, M.Si sebagai Pihak Kedua yang menerima dan disaksikan oleh Ketua DPRD Kabupaten Manggarai ONGGE YOHANES, BA dan Ketua DPRD Manggarai Barat ONGGE YOHANES, BA dan Ketua DPRD Manggarai barat MATEUD HAMSI, yang dalam lampiran berita acara serah terima Bagian Umum dan perlengkapan, Nomor urut 55 sampai dengan 59 tertulis dokumen-dokumen berupa: Nomor 55. Surat Pelepasan hak atas tanah tanpa nomor, tanpa tanggal asli (4 berkas), Nomor 56. Kwitansi panjar dari uang ganti rugi tanah sebesar Rp. 10.000.000,-; tanpa nomor, tanggal 14 mei 1997 asli (5 lembar); Nomor 57. Kwitansi Pelunasan Uang Ganti Rugi tanah seperti tersebut dalam kwitansi tanggal 14 mei 1997 tanggal 9 januari 1998 tanpa nomor asli (4 lembar); Nomor 58. Legalisasi nomor .../S/PUMH/1997 tanpa tanggal, asli (4 lembar),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 59. Kwitansi uang ganti rugi tanah kumunal/ tanah adat yang terletak di lokasi Kerangan, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai dengan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

- 2) Bahwa berdasarkan temuan itu maka dicarilah dokumen-dokumen itu, dan ternyata yang ditemukan hanyalah berupa fotocopy saja, sedangkan aslinya tidak ditemukan;
- e. Bahwa selanjutnya untuk memastikan kebenaran tentang adanya tanah seluas 30 Ha itu, Terdakwa/ Pembanding melakukan berbagai upaya dengan menyuruh stafnya untuk mencari tahu lebih lanjut informasi dan data terkait tanah 30 Ha tersebut, dan salah satu yang fenomenal adalah Terdakwa/ Pembanding berhasil menghadirkan Mantan Bupati Manggarai atas nama Drs. Gaspar Parang Ehok di Kantor Bupati Manggarai Barat untuk mengklarifikasikan keberadaan tanah tersebut dalam rapat yang dihadiri seluruh anggota MUSPIDA, Unsur BPN MABAR, Ahli Waris dari Fungsionaris Adat atas nama H. ishaka dan para pelaku sejarah terkait tanah obyek perkara, dan dari pertemuan tersebut baru diperoleh kepastian terkait beberapa hal pokok :
 - 1) Bahwa benar Drs. Gaspar Parang Ehok meminta tanah kepada Fungsionaris Adat atas nama H. ishaka untuk mendirikan Sekolah Perikanan dan Kelautan dan H. Ishaka mengabulkan Permintaan Bupati Gaspar Parang Ehok dengan menunjuk tanah di "Kerangan" yang topografisnya cocok untuk sekolah Perikanan dan Kelautan;
 - 2) Bahwa untuk menyelesaikan urusan Adat dan Administrasi tanah tersebut, pada tahun 1991 GASPAR PARANG EHOK mengutus Ir. NIKO NAPUT untuk bertemu Dalu Ishaka.
 - 3) Bahwa oleh karena urusannya belum tuntas maka pada tahun 1997 Bupati GASPAR PARANG EHOK membentuk Tim khusus untuk menyelesaikan urusan Administrasi Tanah tersebut dan dilakukan pengukuran, sehingga menghasilkan dokumen-dokumen yang Pemohon temukan berupa foto copy saja, tanpa surat asli.
 - 4) Bahwa benar GASPAR PARANG EHOK tidak pernah menandatangani Surat Pernyataan Pelepasan hak atas tanah yang diserahkan oleh Fungsionaris Adat atas nama H. ishaka seluas 30 Ha yang terletak di Toroh Lemma Batu Kalo, halmana ditegaskan dalam

Hal 239 dari 281 hal Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surat Keterangan atas nama Drs. G.P. Ehok tertanggal 10 Mei 2013 yang menerangkan bahwa Drs. G.P. Ehok sebagai Bupati Kepala tingkat II Manggarai dari tahun 1989 s/d tahun 1994 dan tahun 1994 s/d 1999, tidak pernah menerima dan menandatangani Surat Penyerahan Tanah Adat yang diserahkan oleh Haji Ishaka dan Haku Mustafa sebagai Fungsionaris Adat / Tua Adat Nggorang;

- 5) Bahwa benar GASPAS PARANG EHOK tidak pernah menyebutkan luas tanah yang diterimanya dari Fungsionaris Adat atas nama H. ishaka tersebut;
- 6) Bahwa benar ahli waris dari Fungsionaris Adat atas nama H. Ramang ishaka mengakui berdasarkan cerita bahwa orangtuanya memberikan Tanah kepada Pemda Manggarai pada tahun 1997 tetapi tidak menyebut luasnya dan bersedia membuat Surat Pernyataan.
- 7) Bahwa GASPAS PARANG EHOK bersedia dan membuat surat pernyataan yang turut disaksikan oleh Terdakwa/ Pembanding, sebagaimana tertuang dalam surat pernyataan/penegasan atas nama Drs. Gaspar Parang Ehok tertanggal 22 Oktober 2014 (Barang Bukti Penuntut Umum No. 555 "Foto Copy Surat Pernyataan/Penegasan Dari Drs. Gaspar P. Ehok, Tanggal 22 Oktober 2014") yang menyatakan dan menegaskan kembali tentang lokasi obyek tanah yang diminta oleh Gaspar Parang Ehok kepada Fungsionaris Adat Kedualan Nggorang, atas nama H. Ishaka yaitu tanah ulayat yang berlokasi di "Kerangan" dan bukan di "Toroh Lemma Batu kallo" sebagaimana yang dijadikan tanah obyek perkara saat ini.

- f. Bahwa berdasarkan foto copy dokumen-dokumen tersebut dan surat pernyataan dari berbagai pihak terkait, maka pada tahun 2015, Terdakwa/ Pembanding mengajukan Permohonan Pendaftaran Tanah tersebut kepada BPN Kabupaten Manggarai Barat dengan Surat Nomor : Pe.130/84/III/2015 Tanggal 17 maret 2015 perihal Permohonan Pemsertifikatan Tanah Pemda di Toroh Lemma Batu Kalo seluas ±30 Ha kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Manggarai Barat, akan tetapi karena luasnya melebihi batas kewenangannya maka pengukuran atas tanah tersebut dilakukan oleh BPN PROVINSI NTT dengan dikawal oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Manggarai Barat dengan menanam pilar-pilar tanda batas tanah yang di ukur itu, sesuai surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas nomor : 094/56/POL.PP/V/2015 yang menugaskan Ir. Fransiskus Partono untuk mendampingi petugas Pertanahan Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam rangka pengamanan Pengsertifikatan Tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat , di Batu Gosok, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, selama 2 (dua) hari, dari tanggal 20 s/d 21 Mei 2015; Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : 094/56/Pol/2015 menugaskan Ir. Fransiskus Partono untuk mendampingi petugas Pertanahan Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam rangka pengamanan pengsertifikatan tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat, di Batu Gosok, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, selama 2 (dua) hari, dari tanggal 20 s/d 21 Mei 2015 dan laporan perjalanan Dinas Ir. Fransiskus Partono, pelaksanaan kegiatan pengamanan Penataan tanah milik Pemda di Batu Gosok berjalan dengan lancar dan aman, dan dari hasil Pengukuran tersebut ditemukan bahwa di atas tanah 30 Ha itu sudah ada 6 buah Sertifikat dengan rincian terbit tahun 2014 sejumlah 3 buah, yang terbit tahun 2015 sejumlah 1 sertifikat dan yang terbit tahun 2016 sejumlah 2 sertifikat, dan sisanya yang belum bersertifikat adalah seluas kurang lebih 24 Ha (242,212, M²).

- g. Bahwa dalam rangka mengamankan lokasi tanah tersebut Terdakwa/ Pembanding mengajukan Surat kepada BPN Manggarai Barat dengan tembusan kepada berbagai instansi terkait agar tidak melayani permohonan PENERBITAN SERTIFIKAT ATAS TANAH tersebut dari siapapun; surat pernyataan kepemilikan tanah nomor : Pem.130./189/IV/2015 atas nama Rofinus Mbon, S.H., M.Si Jabatan Sekertaris Daerah Kabupaten Manggarai Barat menerangkan bahwa pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat memiliki tanah di Toroh Lemma Batu Kallo, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo dengan luas ±30 Ha; surat nomor : Pem. 131/137/V/2015 mengenai penjelasan tentang Tanah Pemda oleh Bupati Manggarai Barat, Drs. Agustinus C.H. Dula kepada Sdr. Hj. Muhhamad Abubakar Adam Djudje perihal belum ditandatanganinya berita Acara Penyerahan oleh Bupati Manggarai Barat (Bapak Drs. Gaspar Parang Ehok) disebabkan karena beberapa dokumen Keagrariaan belum lengkap;

Hal 241 dari 281 hal Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- h. Bahwa kurang lebih selama 3 tahun Terdakwa/ Pembanding menunggu keluarnya Sertifikat atas tanah tersebut, namun demikian hingga tahun 2018 sertifikat atas tanah tersebut belum juga keluar dengan alasan karena dokumen-dokumen pendukung permohonan sertifikat tersebut berupa fotocopy sedangkan sesuai ketentuan harus berupa dokumen asli dan diminta oleh BPN agar dilengkapi dengan Surat Pernyataan dari Ulayat, Permintaan mana oleh Terdakwa/ Pembanding telah memenuhi pula tahun 2018 itu juga;
- i. Bahwa setelah memasukan dokumen berupa surat dari Fungsionaris Adat untuk mendukung Permohonan penerbitan sertifikat atas tanah 30 Ha tersebut pada tahun 2018, namun hingga tahun 2019 sertifikat belum diperoleh juga, maka pada tahun 2020 Terdakwa/ Pembanding memprogramkan untuk menyelesaikan masalah tanah kerangan tersebut melalui jalur hukum, akan tetapi karena masalah pandemi Covid-19 dan diambilalihnya masalah tanah ini oleh Kejaksaan Tinggi NTT dengan menetapkan Terdakwa/ Pembanding sebagai Tersangka Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Aset Tanah Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat karena menganggap Terdakwa/ Pembanding tidak mengamankan dan memelihara "Asset Tanah" tersebut sesuai pasal 9 Permendagri Nomor 19 tahun 2016, sehingga program tersebut tidak terlaksana.

B. KEKELIRUAN MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA DALAM MENILAI UNSUR-UNSUR PASAL YANG DIDAKWAKAN KEPADA PEMOHON BANDING.

1. Kekeliruan Judex Facti Mengenai Unsur "Melawan Hukum".

Bahwa Judex Facti/ Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melakukan kekeliruan, terutama dalam mempertimbangkan terkait perbuatan Terdakwa/ Pembanding selaku Bupati Manggarai Barat, yang mana dianggap secara melawan hukum:

- a. Tidak mencatatkan tanah seluas 30 Ha di Karang/Toro lema batu kalo, kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo ke dalam Kartu Inventaris Barang sebagai Aset Tanah Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat.
- b. Pada Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2015 telah menandatangani Data Yuridis Permohonan Sertifikat Hak Milik atas nama SUPARDI TAHIYA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUHAB TAHIYA, H.SUKRI, MAHMUD NIP, DAI KAYUS dilokasi tanah obyek perkara seluas ± 30 Ha di Karangan/Toro Lema Batu Kallo, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat.

- c. Menyetujui peta bidang tanah milik pemerintahan kabupaten manggarai barat seluas kurang lebih 24 Ha dari yang semula seluas ± 30 Ha.

Bahwa pertimbangan Judex Facti tersebut sebagaimana tersebut di atas, didasarkan pada pendapat Judex Facti bahwa tanah yang terletak di Kerangan/Toroh Lemma Batu kallo, Kelurahan Labuan bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, seluas ± 30 Ha merupakan TANAH ASET PEMDA KABUPATEN MANGGARAI BARAT. Pendapat Judex Facti tersebut keliru dan karena itu PEMBANDING menolak pendapat Judex Facti tersebut dengan alasan, sebagai berikut:

1. Bahwa suatu barang diklasifikasikan sebagai barang milik daerah atau negara diatur dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik Negara/ Daerah yang menentukan sebagai berikut :

- *Ayat 1: Barang milik Negara/daerah meliputi:*

- a. *barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/ Daerah; dan*
- b. *barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah*

- *Ayat 2: Barang yang sebagaimana yang dimaksud dalam Ayat 1 huruf b meliputi :*

- a. *Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis.*
- b. *Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian atau kontrak.*
- c. *Barang yang diperoleh sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; atau*
- d. *Barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap."*

2. Bahwa dalam Putusan Perkara *a quo* Judex Facti pada intinya menyatakan bahwa tanah aset Pemda Manggarai Barat seluas ± 30 Ha, yang berlokasi di Kerangan/Toroh Lemma Batu Kallo, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Manggarai Barat, adalah berasal dari

Hal 243 dari 281 hal Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyerahan adat oleh Fungsionaris adat Kedaluan Nggorang atas nama H. Ishaka dan Haku Mustafa berdasarkan penunjukkan secara lisan pada tahun 1989. Hal ini berarti tanah aset Pemda Manggarai Barat seluas ± 30 Ha, yang berlokasi di Kerangan/Toroh Lemma Batu Kalo merupakan "barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah" sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik Negara/Daerah ayat (1) huruf b.

3. Bahwa perbuatan hukum penyerahan tanah secara adat itu di satu sisi, dan pengadaan tanah Pemda di sisi yang lain, haruslah dibuktikan berasal dari perolehan yang sah dan dilakukan secara sah menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Terhadap hibah atau pemberian atau penyerahan terhadap tanah adat/ulayat kepada pihak lain, misalnya, haruslah dilakukan secara terang, seketika dan tunai oleh pemimpin atau tokoh adat yang memiliki kewenangan untuk itu setelah melalui proses musyawarah persekutuan masyarakat adat yang ada. Tanah adat/ ulayat adalah tanah kepunyaan persekutuan masyarakat adat, yang pada dasarnya tidak bisa dialihkan atau diperjualbelikan menjadi hak kepemilikan perorangan tanpa kesepakatan seluruh persekutuan masyarakat adat, sebab penggunaan tanah adat sepenuhnya hanya untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat persekutuan adat.

4. Bahwa dalam proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum, Pemda dalam hal ini wajib menjunjung tinggi dan menekankan prinsip penghormatan terhadap hak atas tanah. Peringatan kepada Pemda agar memberikan penghormatan terhadap hak atas tanah bermakna bahwa pengadaan tanah harus dilakukan secara terencana sesuai Peraturan Daerah mengenai rencana tata ruang atau rencana strategis pengembangan dan pembangunan wilayah, disamping itu Pemda harus melakukan penelitian mengenai status hukum tanah yang hak atasnya akan dilepaskan atau diserahkan serta dokumen yang mendukungnya, menaksir dan mengusulkan besarnya ganti kerugian atas tanah yang hak atasnya akan dilepaskan atau diserahkan, dan yang terpenting adalah Pemda harus mengadakan musyawarah antara pihak pemegang hak atas tanah dengan Instansi Pemerintah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau



besarnya ganti kerugian, melaksanakan penyerahan uang ganti kerugian kepada pemegang hak atas tanah, serta wajib membuat berita acara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah. Pengadaan tanah tanpa didahului perencanaan dan tanpa melakukan penelitian mengenai status hukum tanah yang hak atasnya akan dilepaskan atau diserahkan serta terhadap dokumen yang mendukungnya dapat memberikan peluang kepada pemda untuk bertindak sewenang-wenang, pengadaan tanah yang pada akhir tidak dapat digunakan sesuai tujuan pengadaan, dapat merugikan keuangan negara/Pemda terkait penetapan pajak dan ganti rugi, serta dapat merugikan pihak lain yang juga memiliki hak atas tanah terhadap objek tanah yang sama.

5. Bahwa terhadap prosedur pengadaan tanah yang dilakukan oleh Pemerintah/Pemda, Presiden Republik Indonesia telah menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
6. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, pengadaan tanah untuk kepentingan sekolah perikanan tersebut, pemerintah Kabupaten Manggarai melakukan pengadaan tanah di Karanga/Toroh Lemma Batu Kallo, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai (sekarang Manggarai Barat) tidak berdasarkan Keppres Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum, sehingga bukan merupakan "barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah" sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik Negara/Daerah ayat (1) huruf b.
7. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam Persidangan Perkara a quo sampai saat ini tanah tersebut belum dimasukkan dalam Daftar Aset Daerah atau Barang Milik Daerah Pemda Kabupaten Manggarai Barat, Sementara tercatatnya barang milik daerah berupa tanah dalam Daftar Aset Daerah atau Barang Milik Daerah merupakan syarat penting dan menentukan apakah tanah tersebut merupakan tanah aset Daerah/Barang Milik Daerah atau bukan, sebagaimana



dalam keterangan saksi-saksi dalam persidangan a quo yang intinya sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan keterangan saksi atas nama I Gusti Made Anom Keler sebagai Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Manggarai Barat yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang intinya sebagai berikut:

"Bahwa mengenai pencatatan tanah di KKP menjadi kewenangan Kasi Infrastruktur Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat, namun untuk tanah Pemda Manggarai Barat seluas kurang lebih 24 Ha belum kami catat di KKP BPN Kabupaten Manggarai Barat karena data yuridis dan peta bidang yang kami dapat dari Kanwil BPN Provinsi NTT berupa foto copy, sehingga secara teknis kami tidak bisa mencatatnya" (Vide Hal. 201 sampai dengan Hal. 202 Putusan No. 8).

- 2) Berdasarkan fakta yang terungkap dalam Persidangan tersebut, Pemda Kabupaten Manggarai Barat belum memiliki Sertifikat Kepemilikan atas tanah sebagai Bukti Tanda Kepemilikan Tanah sebagai Aset Daerah/Barang Milik Daerah, meskipun sudah dilakukan pengukuran sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada bulan Mei tahun 1997 dengan keluarnya surat ukur, gambar ukur dan peta bidang tertanggal 17 Mei 1997 tanpa nomor dan pengukuran yang dilakukan pada tanggal 20 Mei 2015 oleh Kanwil BPN Provinsi NTT yang surat ukur, gambar ukur dan Peta bidang sudah diterbitkan sebanyak 2 (dua) kali tanpa berita acara pergantian atau perubahan, yaitu peta bidang tertanggal 26 Mei 2015 dengan luas tanah lebih 28 HA dan Peta Bidang tertanggal 29 Juni 2015 dengan luas tanah 24,22 HA.
8. Bahwa tidak ada kepastian hukum dimana letak tanah aset Pemda Manggarai Barat berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam Persidangan. Letak lokasi tanah yang diserahkan oleh Fungsionaris Adat H. Ishaka kepada Gaspar Ehok, Bupati Kepala Daerah Tingkat II Manggarai (sebelum pemekaran Kabupaten Manggarai) adalah tanah di lembah datar tepi pantai pasir putih berlokasi di Kerangan, belum ada luasnya, dengan tujuan untuk pendirian Sekolah Perikanan (Barang Bukti Penuntut Umum Nomor 52



dan Barang Bukti Penuntut Umum Nomor 555). Sementara pengukurannya pada tahun 1997 dilakukan di tanah bukit Toroh Lemma Batu Kalo seluas ± 30 Hektar (300.000 m²), tanah yang menurut Barang Bukti Penuntut Umum Nomor 541, diakui Gaspar Ekok sebagai tanah yang tidak pernah diterima dari Fungsionaris Adat H. Ishaka dan Haku Mustafa. Ketidakpastian tersebut ditunjukkan/dibuktikan pula dalam Putusan Juris Facti yang menyebut letak tanah aset Pemda Manggarai Barat sebagai Obyek Perkara itu di "Toroh Lemma Batu Kalo/Kerangan" (*yang dibaca: Toroh Lemma Batu Kalo atau Kerangan*). Faktanya, Toroh Lemma Batu Kalo dan Kerangan tersebut adalah dua lokasi yang letaknya berbeda.

9. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam Persidangan banyak pihak yang mengklaim mempunyai hak milik atas tanah di Toroh Lemma Batu Kalo itu, di antaranya Para Ahli Waris Tengku Daeng Malewa, H. Adam Djudje, Amran, dan bahkan Kantor BPN Manggarai Barat telah menerbitkan 6 (enam) Sertifikat Hak Milik atas nama orang perorangan di tanah Toroh Lemma Batu Kalo tersebut, sehingga seharusnya diselesaikan terlebih masalah sengketa kepemilikan atas tanah tersebut (sengketa hukum perdata) untuk mendapatkan kepastian hak menurut hukum. Di samping itu, ada Putusan Pengadilan Negeri Labua Bajo yang berkekuatan hukum tetap atas sengketa tanah di Toroh Lemma Batu Kalo yang disebut dalam Perkara a quo sebagai tanah aset Pemda Manggarai Barat antara DAI KAYUS lawan ENTE PUASA dalam Perkara Perdata Nomor: 09/Pdt.G/2016/PN. Lbj, tanggal 28 Juni 2016.

➤ Bahwa perihal pertimbangan hukum *judex factie* terkait tindakan Terdakwa/ Pembanding yang dikatakan tidak mencatatkan tanah seluas 30 Ha di Karangan/Toro Lemma Batu kallo, kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo ke dalam Kartu Inventaris Barang sebagai Aset Tanah Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, adalah berdasarkan alasan sebagai berikut:

1. Berdasarkan fakta dimana Pemda Kabupaten Manggarai Barat belum memiliki Sertifikat Kepemilikan atas tanah sebagai Bukti Tanda Kepemilikan Tanah obyek perkara sebagai Aset Daerah/Barang Milik Daerah, sehingga jelas obyek tanah perkara belum dapat dikatakan sebagai aset atau dimiliki secara mutlak oleh Pemda kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- manggarai Barat, sehingga belum dapat dicatat sebagai salah satu inventaris aset milik pemda Manggarai barat.
2. Bahwa adapun faktanya Terdakwa/ Terbanding baru menjabat sebagai Bupati Kabupaten Manggarai Barat sejak Tahun 2010, sedangkan setelah mekarnya kabupaten Manggarai Barat pada tahun 2003, diikuti dengan serah terima aset (P3D) dari Kabupaten Manggarai ke Kabupaten Manggarai Barat pada tahun 2005, faktanya tidak diketahui sama sekali oleh Terdakwa/ Pembanding, dengan alasan yang jelas bahwa pada saat itu yang bersangkutan belum menjabat selaku Bupati Kabupaten Manggarai Barat, sehingga tanggung jawab pencatatan tanah seluas 30 Ha di Karang/Toro lema batu kalo, kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo ke dalam Kartu Inventaris Barang sebagai Aset Tanah Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, seharusnya menjadi urusan tanggung jawab dari bupati-bupati terdahulu sebelum Terdakwa/ Pembanding menjabat sebagai Bupati Manggarai Barat pada tahun 2010-2020.
 3. Bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan a quo terungkap dengan jelas dimana serah terima dokumen P3D atas tanah obyek perkara dilakukan oleh Bupati Manggarai DRS. ANTONY BAGUL DAGUR, M.Si sebagai Pihak Pertama yang menyerahkan dan DRS. DJIDON de HAAN, M.Si sebagai Pihak Kedua yang menerima dan disaksikan oleh Ketua DPRD Kabupaten Manggarai ONGGE YOHANES, BA dan Ketua DPRD Manggarai Barat MATEUS HAMSI pada tanggal 24 januari 2005, fakta mana pula penyerahan yang dilakukan hanya berupa dokumen yang berisi daftar inventaris barang belaka, sedangkan terkait tanah obyek perkara berupa bukti alas hak yang seharusnya dilampirkan belum pernah diserahkan;
 4. Bahwa Terdakwa/ Pembanding baru mendengar informasi tentang adanya tanah seluas 30 Ha dalam Perkara ini pada tahun 2014 pada saat mencari lokasi tanah untuk Pembangunan Listrik Tenaga Batubara dan berdasarkan informasi dari berbagai pihak, Terdakwa/ Pembanding berinisiatif untuk mencari tahu kepastian tentang kebenaran atas informasi tentang tanah milik Pemda seluas ±30 Ha tersebut;

Hal 248 dari 281 hal

Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa dalam rangka untuk memperoleh tanah tersebut agar dijadikan Barang Milik Daerah Kabupaten Manggarai Barat, Terdakwa/ Pembanding mulai melakukan berbagai upaya dengan menugaskan Bagian Tatapem untuk menelusuri kembali dokumen-dokumen alas hak tanah obyek perkara dan ternyata yang berhasil ditemukan hanyalah berupa dokumen fotocopy saja, sedangkan aslinya tidak ditemukan lagi, antara lain:
- Asli Berita Acara Serah Terima Dokumen P3D antara Pemerintah Kabupaten Manggarai dengan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Nomor: PEM.115/30.a/I/2005, tanggal Januari 2005 (BB.996);
 - Foto copy Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dari HAJI ISHAKA kepada Drs. G.P. EHOK selaku Bupati Manggarai, tanggal tidak terbaca, bulan Mei 1997 terletak di Kerangan, tetapi tidak memuat luas dan batas-batas serta tidak ditandatangani oleh Drs. G.P. EHOK selaku Penerima (BB. 111);
 - Foto copy kwitansi panjar ganti rugi tanah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), tanggal 14 Mei 1997;
6. Berdasarkan hasil temuan dokumen tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa/ Pembanding, yang hanya berupa foto copy alas hak kepemilikan pemda terhadap tanah obyek perkara, maka jelas tidak memadai untuk dapat langsung dilakukan pencatatan aset tanah seluas 30 Ha di Karang/Toro lema batu kalo, kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo ke dalam Kartu Inventaris Barang sebagai Aset Tanah Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, belum lagi kendala lain sehubungan dengan penguasaan beberapa oknum di atas obyek tanah perkara, sehingga sebagai jalan terbaik dalam upaya untuk menjamin secara mutlak agar obyek tanah tersebut dimiliki oleh pemda Manggarai Barat dalam bentuk Sertifikat Hak Milik (SHM), maka Terdakwa/ Terbanding berusaha dengan berbagai cara untuk mewujudkan hal tersebut, tindakan mana telah dijelaskan sebelumnya dalam memori ini di atas.
7. Bahwa tindakan judex Factie Pengadilan Tingkat pertama, yang seolah-oleh menyerahkan dan membebaskan semua tanggung jawab pencatatan aset tanah seluas 30 Ha di Karang/Toro lema



batu kalo, kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo ke dalam Kartu Inventaris Barang sebagai Aset Tanah Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat kepada diri Terdakwa/ Pembanding adalah tidak berdasar dan patut untuk tidak dibenarkan secara hukum, sebab sesungguhnya Terdakwa/Pembanding dalam hal ini justru menjadi satu-satunya pejabat Bupati Manggarai Barat yang perduli dan berjuang untuk mendapatkan kejelasan kepemilikan obyek tanah perkara yang faktanya sarat akan masalah dan hambatan, bahkan dapat dikatakan selaku pemberes pekerjaan yang diabaikan oleh bupati-bupati sebelumnya terhadap Obyek Tanah Perkara, dengan harapan kedepan setelah memperoleh kejelasan kepemilikan dalam bentuk Sertifikat Hak Milik baru akan dilaksanakan pencatatan obyek tanah perkara tersebut sebagai sebagai Aset Tanah Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, sehingga berangkat dari uraian fakta tersebut telah secara jelas dan terang menyangkut point tudingan judex factie pengadilan tingkat pertama tersebut agar patut untuk dikesampingkan.

- Bahwa perihal pertimbangan hukum Judex Factie terkait tindakan Terdakwa/ Pembanding Pada Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2015, yang telah menandatangani Data Yuridis dan data fidsik Permohonan Sertifikat Hak Milik atas nama SUPARDI TAHIYA, SUHAB TAHIYA, H.SUKRI, MAHMUD NIP, DAI KAYUS dilokasi tanah obyek perkara seluas ±30 Ha di Karang/Toro Lema Batu Kallo, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat.
1. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya di atas bahwa fakta kumpulan dokumen alas hak yang dimiliki oleh Pemda Kabupaten Manggarai Barat yang ditemukan oleh Terdakwa/ Pembanding faktanya hanya berupa foto Copy tanpa asli;
 2. Menyadari terkait hal tersebut, faktanya pula Terdakwa/ Pembanding dalam mengurus obyek tanah perkara juga dihadapkan dengan berbagai kesulitan dan hambatan dimana salah satunya adalah terkait beberapa oknum yang mengklaim kepemilikan terhadap obyek tanah yang berlokasi di Toroh Lemma Batu Kallo/ di atas tanah obyek perkara, termasuk diantaranya adalah beberapa pihak antara lain atas nama SUPARDI TAHIYA, SUHAIB TAHIYA, H.SUKRI, MAHMUD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- NIP, dan DAI KAYUS, yang masing-masing memegang alas hak kepemilikan yang sah dan faktanya pula diperoleh lebih dahulu dibanding pihak Pemda Manggarai Barat;
3. Bahwa upaya untuk melakukan pensertifikatan obyek tanah oleh beberapa oknum atau pihak-pihak tersebut di atas tanah obyek perkara adalah hak yang didasarkan atas alas hak yang dimiliki oleh pihak-pihak tersebut, dan oleh pihak BPN Kabupaten Manggarai Barat setelah mempelajari secara cermat alas hak yang dimiliki oleh pihak-pihak tersebut menyatakan layak untuk dilanjutkan proses pensertifikatannya, dengan tidak lupa melakukan koordinasi dengan pihak Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, melalui Bupati yang saat itu dijabat oleh Terdakwa/ Pembanding;
 4. Bahwa menyikapi kewenangan BPN Kabupaten manggarai Barat yang mana telah menilai dan menyatakan proses permohonan sertifikat berdasarkan alas hak yang dimiliki oleh pihak-pihak tersebut adalah layak dan dapat dilanjutkan, maka sebagai pejabat yang dalam arti lain memimpin dan pelayan masyarakat Kabupaten Manggarai Barat, maka Terdakwa/ Pembanding tidak memiliki pilihan selain menyetujui permohonan sertifikat dari keenam orang tersebut, dengan catatan kepada pihak BPN agar dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan terlebih Terdakwa/ Pembanding menyadari persis bahwa alas hak yang dimiliki Pemda Manggarai Barat sangat lemah dan tidak legitimatif secara formil dan materil, dikarenakan fakta dokumen alas hak yang hanya berupa foto copy dan terlebih data-data fisik obyek tanah juga tidak jelas yang terlihat dalam dokumen Surat Pelepasan hak milik Pemda Jabar yang tidak menyebut luas tanah, batas-batas tanah bahkan tidak ditandatangani oleh mantan bupati Gaspar Parang Ekok selaku Penerima, sehingga Terdakwa/ Pembanding tidak memiliki posisi hukum yang memadai untuk menghambat proses pensertifikatan tanah para pihak tersebut atau membawa sengketa tanah a quo pada jalur hukum, karena alas hak yang dimiliki pemda adalah invalid secara hukum.
 5. Bahwa tindakan judex Factie Pengadilan Tingkat pertama, yang membuat pertimbangan hukum dengan sangat intimidatif, tanpa

Hal 251 dari 281 hal

Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



mempertimbangkan dan mencermati kesulitan yang kompleks sebagaimana dialami oleh Terdakwa/ Pembanding dalam hal mengurus tanah obyek Perkara, sehingga berangkat dari uraian fakta tersebut diatas telah secara jelas dan terang menyangkut point tudingan judex factie pengadilan tingkat pertama tersebut agar patut untuk dikesampingkan.

➤ Bahwa perihal pertimbangan hukum Judex Factie terkait tindakan Terdakwa/ Pembanding yang Menyetujui peta bidang tanah milik pemerintahan kabupaten manggarai barat seluas kurang lebih 24 Ha dari yang semula seluas ± 30 Ha.

1. Bahwa benar terkait upaya Terdakwa/ Pembanding untuk mengurus tanah obyek perkara, telah sampai pada tahap obyek tanah pemda manggarai barat, yang semula kabur dan tidak jelas, telah menemui titik terang dengan masuk di dalam peta bidang BPN Kabupaten Manggarai Barat.
2. Bahwa perihal ukuran obyek tanah tersebut seluas 24 Ha adalah berdasarkan pengukuran resmi yang dilakukan oleh Kanwil BPN Provinsi NTT, dan sebagai catatan penting bahwa permohonan sertifikat obyek tanah oleh Pemda Manggarai Barat adalah tetap dengan luasan obyek tanah seluas ± 30 Ha, yang dalam fakta pengukuran dilapangan ternyata menjadi 24 Ha, ukuran mana disetujui oleh Terdakwa/ Pembanding sebagai luasan resmi yang dirilis oleh pihak BPN melalui petugas ukur dari Kanwil BPN Provinsi NTT, sehingga berdasarkan pertimbangan hukum judex factie yang memaksakan luasan 30 Ha tanah pemda seharusnya menimpakan tanggung jawab tersebut pada pihak BPN yang memiliki kewenangan mutlak untuk mengukur obyek tanah berdasarkan permohonan dari pihak yang berkepentingan, oleh karena itu telah secara jelas dan terang menyangkut point tudingan judex factie pengadilan tingkat pertama tersebut agar patut untuk dikesampingkan.

Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "melawan hukum" tidak terpenuhi, dan oleh karena salah satu unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP, Jo Pasal 64 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa AGUSTINUS CHRISTOFORUS DULA haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut.

2. Kekeliruan Judex Facti Pengadilan Tingkat Pertama Mengenai Unsur "Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri, Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi".

- a. Bahwa perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi artinya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa/ Pembanding tersebut telah mendatangkan keuntungan, baik keuntungan bagi diri sendiri, orang lain maupun suatu korporasi. Khusus kata memperkaya artinya orang yang sudah kaya masih menambah kekayaannya atau orang lain tidak harus kaya kemudian menjadi kaya karena bertambah kekayaannya.
- b. Bahwa berdasarkan penjelasan pada unsur secara melawan hukum, telah terbukti bahwa status tanah obyek perkara seluas \pm 30 Ha di Kerangan/ Torro Lemma Batu Kalo Belum Merupakan Barang Milik Daerah karena cara perolehan dan letak sesungguhnya yang belum jelas, sehingga terjadi saling klaim antar pemerintah dan masyarakat serta alas haknya juga masih berupa foto copy, sehingga perbuatan yang dituduhkan kepada Terdakwa/ Pembanding selaku Bupati Manggarai Barat tidak memerintahkan pejabat struktural dibawahnya untuk melakukan pencatatan, mengamankan sebagai Barang Milik Daerah bukanlah tergolong perbuatan melawan hukum terhadap Peraturan Pemerintah Nomor: 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah maupun Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah maka perbuatan Terdakwa/ Pembanding tersebut tidak termasuk perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
- c. Bahwa menurut penjelasan pada point b di atas, Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2004 Tentang Perbedaharaan Negara Jo. Peraturan

Hal 253 dari 281 hal Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor: 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah serta dihubungkan dengan keterangan Ahli Dr. SARJONO YOHANES, SH.,MH maupun Ahli Drs. SISWO SUJANTO, DEA dalam persidangan menerangkan “sebidang tanah dapat dikategorikan sebagai Barang Milik Daerah harus jelas perolehannya dan memiliki dokumen kepemilikan yang sah (Sertifikat)”.

- d. Bahwa oleh karena tanah seluas \pm 30 Ha di Karanga/ Torro Lemma Batu Kallo, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat, statusnya BELUM MERUPAKAN BARANG MILIK DAERAH maka Perbuatan Terdakwa/ Pembanding sebagaimana disebutkan sebelumnya tidak dapat dikualifisir sebagai perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi dalam lingkup Tipikor; yaitu sebagai perbuatan yang memperkaya David Andrew Pratama, Haji Adam Djudje, Abdul Ipur, Supardi Tahiya, Suaib Tahiya, H Sukri, H Mustajib, Day Kayus, Mahmud Nip, Ente Puasa, Andi Rizki Nur Cahya, Veronika Syukur, Burhanudin, H Armansyah, Masimilliano De Reviziis, Nazardo Pabio, Alfandri (andi), Afrisal (unyil), Sirutarahmi, Fredy E.J Maramis, Marthen Ndeo, Muhammad Achcyar.

Berdasarkan uraian tersebut di atas sangat terang dan jelas unsur “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi” TIDAK TERPENUHI PADA PERBUATAN TERDAKWA. Dan karena unsur “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi” tidak terpenuhi, maka Terdakwa AGUSTINUS CHRISTOFORUS DULA harus dibebaskan dari seluruh dakwaan perkara *a quo (vrijspraak)* vide Pasal 191 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

3. Kekeliruan Judex Facti Pengadilan Tingkat Pertama Mengenai Unsur “Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara”.

- a. Bahwa Ahli Dr. SIMPLEXIUS ASA, SH. MH menerangkan bahwa *bestandelen delict* dari Pasal 2 UU Tipikor adalah Sifat Melawan Hukum dan *bestandelen* dari Pasal 3 UU Tipikor adalah Menyalahgunakan kewenangan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara;

Hal 254 dari 281 hal Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



- b. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam analisis unsur perbuatan melawan hukum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan karena tanah seluas \pm 30 Ha di Karanga/ Torro Lemma Batu Kallo, statusnya BELUM MERUPAKAN BARANG MILIK DAERAH dengan demikian perbuatan terdakwa bukan merupakan perbuatan melawan hukum dalam konteks tipikor yang menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 1.301.011.161.288,- (satu trilyun tiga ratus satu milyar sebelas juta seratus enam puluh satu ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah);
- c. Bahwa perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh ahli akuntan Bono Jatmiko, Ak.Ca.CACPK, tidak nyata dan pasti jumlahnya sebagaimana dimatkan dalam Pasal 1 angka 22 UU No,1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara, bahkan tidak dapat digunakan sebagai dasar menilai akibat perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 1.301.011.161.288,- (satu trilyun tiga ratus satu milyar sebelas juta seratus enam puluh satu ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah) dengan alasan:
- 1) Bahwa sesuai dengan keterangan ahli akuntansi Bono Jatmiko, Ak.Ca.CACPK bahwa ahli menghitung kerugian keuangan negara dengan *total loss* berdasarkan laporan yang dibuat ahli Penilai Aset JACOBUS MAKIN, ST.M.Ec.Dev tahun 2020 (nomor laporan: BPAD.A1.3/000.031/2072/2020 tanggal 11 Desember 2020);
 - 2) Bahwa menurut ahli JACOBUS MAKIN, ST.M.Ec.Dev ada prinsip *cut-off* dalam Ketentuan Standar Penilaian Indonesia (SPI) yaitu prinsip tempus dan lokus penilaian artinya, hasil penilaian berlaku sesuai saat penilain dan tidak berlaku surut, sebaliknya fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, bahwa tempus terjadinya atau berkurangnya tanah pemda ketika terjadi pengalihan-pengalihan pada tahun 2016; sehingga menurut ahli JACOBUS MAKIN, ST.M.Ec.Dev hasil penilaian tahun 2020 tidak dapat digunakan untuk peristiwa pengalihan tahun 2016, sehingga dengan sendirinya produk perhitungan kerugian Negara yang oleh ahli atas nama JACOBUS MAKIN, ST.M.Ec.Dev menyatakan tidak dapat digunakan, maka secara hukum produk perhitungan tersebut secara patut harus dinyatakan batal dan tidak dapat digunakan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Bahwa ahli akuntan Bono Jatmiko, Ak.Ca.CACP tidak memiliki kompetensi untuk menyatakan kerugian keuangan negara, melainkan yang memiliki kompetensi untuk menyatakan kerugian Keuangan Negara adalah BPK-RI sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Jo. Undang-Undang Nomor: 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas sangat terang dan jelas unsur “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi” TIDAK TERPENUHI PADA PERBUATAN TERDAKWA. Dan karena unsur “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi” tidak terpenuhi, maka Terdakwa AGUSTINUS CHRISTOFORUS DULA harus dibebaskan dari seluruh dakwaan perkara *a quo (vrijspraak)* vide Pasal 191 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang memberi putusan sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan Permintaan Banding dan Memori Banding dari Terdakwa AGUSTINUS CHRISTOFORUS DULA untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 33/PID.SUS-TPK /2021/PN Kpg, Tanggal 30 Juni 2021, serta mengadili sendiri dan memutus dengan amar putusan, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUSTINUS CHRISTOFORUS DULA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam seluruh Dakwaan Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa AGUSTINUS CHRISTOFORUS DULA dari seluruh Dakwaan;
3. Membebaskan Terdakwa AGUSTINUS CHRISTOFORUS DULA dari Tahanan;
4. Memulihkan (merehabilitasi) hak Terdakwa AGUSTINUS CHRISTOFORUS DULA dalam kedudukan, kemampuan dan harkat serta martabatnya seperti semula;
5. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada negara.

Hal 256 dari 281 hal Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 13 Agustus 2021 telah mengajukan Memori Banding Tambahan sesuai dengan Tanda Terima Memori Banding Tambahan Nomor 24/Akta.Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg yang ditandatangani oleh Panitera Muda Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang, dan telah diberitahukan/diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 19 Agustus sesuai Relas Pemberitahuan/Penyerahan Memori Banding Tambahan yang ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kupang, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Perkara No. 4/PDT.G/2021/PN.Lbj adalah perkara gugatan perbuatan melawan hukum dengan Penggugat I Ismail Hirawan dan Penggugat II Kevin Natasaputra melawan Tergugat I Pemerintah Negara Republik Indonesia Cq. Kejaksaan Agung Republik Indonesia Cq. Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur, dan Tergugat II Dai Kayus, dan Tergugat III Lalu Muhmmad Supriandi, S.H., MKn., serta Turut Tergugat I Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Cq. Kecamatan Komodo Cq. Kelurahan Labuan Bajo dan Turut Tergugat II Badan Pertanahan Republik Indonesia Cq. Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat.
2. Bahwa Putusan PERKARA NO. 4/PDT.G/2021/PN.LBJ, tertanggal 28 Juli 2021 tersebut berbunyi:
 - 2.1. Mengabulkan Gugatan Para PENGUGAT sebagian;
 - 2.2. Menyatakan gugatatan Para Penggugat berdasarkan hukum;
 - 2.3. Menyatakan Akta Jual Beli, Nomor: 170/2017, tertanggal 09 Agustus 2017, antara Tergugat II/Dai Kayus selaku penjual dengan Penggugat I/Ismail Hirawan dan Penggugat II/Kevin Natasaputra selaku Pembeli, yang dibuat oleh dan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Tergugat III/Lalu Muhamad Supriandi, S.H., M. KN, adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;
 - 2.4. Menyatakan 1 (satu) bidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 02482/Labuan Bajo, NIB: 24.16.01.16.02651, seluas 12.020 M2 (dua belas ribu dua puluh meter persegi) sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam Surat Ukur Nomor: 489/Labuan Bajo/2015, tanggal 05-09-2015 (lima September tahun dua ribu lima belas), terletak di Propinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Manggarai Barat, Kecamatan Komodo, Kelurahan Labuan Bajo, terdaftar atas nama Ismail Hirawan dan Kevin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Natasaputra, adalah sah dan berkekuatan hukum mengikat milik Para Penggugat.

- 2.5. Menyatakan Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
- 2.6. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.3.633.00,- (Tiga Juta Enam Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Rupiah).
3. Bahwa tanah yang merupakan Obyek Perkara No. 4/PDT.G/2021/PN.Lbj merupakan bagian tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dengan tanah 30 Hektar yang dinyatakan sebagai tanah aset Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat yang merupakan Obyek Perkara dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 33/PID.SUS-TPK /2021/PN Kpg, Tanggal 30 Juni 2021 yang dimohonkan Banding oleh Pembanding.
4. Bahwa berdasarkan Putusan PERKARA NO. 4/PDT.G/2021/PN.LBJ, tertanggal 28 Juli 2021 sangat terang dan jelas tanah yang merupakan Obyek Perkara Putusan Nomor: 33/PID.SUS-TPK /2021/PN Kpg, Tanggal 30 Juni 2021, bukan aset tanah Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat.
5. Bahwa dalam Putusan PERKARA NO. 4/PDT.G/2021/PN.LBJ, tertanggal 28 Juli 2021, dinyatakan: Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Tergugat I dalam Perkara No.4/PDT.G/2021/PN.LBJ adalah Pemerintah Negara Republik Indonesia Cq. Kejaksaan Agung Republik Indonesia Cq. Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur.
6. Bahwa berdasarkan Putusan tersebut pada poin 5 di atas, Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
7. Bahwa berdasarkan azas hukum "*falsus in uno, falsus in omnibus*" - yang berarti kesalahan dalam satu hal akan jadi kesalahan untuk semua hal – maka, perbuatan melawan hukum yang dilakukan Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur terkait tanah yang merupakan obyek PERKARA NO. 4/PDT.G/2021/PN.LBJ akan menjadi perbuatan melawan hukum untuk semua bidang tanah seluas 30 Ha (tiga puluh hektar) yang diklaim sebagai aset tanah Pemda Manggarai Barat, mengingat tanah obyek PERKARA NO. 4/PDT.G/2021/PN.LBJ satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari bidang tanah seluas 30 Ha (tiga puluh hektar) yang merupakan obyek Perkara Nomor: 33/PID.SUS-TPK /2021/PN Kpg, Tanggal 30 Juni 2021.

Hal 258 dari 281 hal Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan asas hukum "*ex dolo malo non oritur actio*" yang sama dengan asas hukum "*ex mala causa non oritur actio*" yang berarti tidak ada tindakan yang dilakukan berdasarkan pada perbuatan yang melawan hukum (*illegal act*). Berdasarkan Putusan PERKARA NO. 4/PDT.G/2021/PN.LBJ yang berkaitan dengan tanah obyek Perkara yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari tanah obyek Perkara Nomor: 33/PID.SUS-TPK /2021/PN Kpg, Pengadilan Negeri Labuan Bajo telah memutuskan bahwa Pemerintah Negara Republik Indonesia Cq. Kejaksaan Agung Republik Indonesia Cq. Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur telah melakukan perbuatan melawan hukum (*illegal act*). Berdasarkan asas hukum tersebut di atas membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 33/PID.SUS-TPK /2021/PN Kpg, Tanggal 30 Juni 2021 yang berdasarkan pada perbuatan melawan (*illegal act*) oleh Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur.
9. Bahwa Perkara Korupsi yang sedang berlangsung sekarang ini terhadap Terdakwa/ Pembanding Agustinus Christoforus Dula, yang telah diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang dengan pidana 7 tahun, menjadi tidak berarti apa-apa secara Pidana, karena sifat Pelanggaran hukum dari pasal-pasal yang di dakwakan menjadi hilang karena hak dari Pemda Manggarai Barat atas klaim terhadap tanah obyek perkara menjadi hilang, dan konsekuensinya terhadap tindakan Jaksa atas Perkara Korupsi yang telah diputus dan yang sekarang ini sudah berada dalam Kewenangan Pengadilan Tinggi untuk mengadilinya, adalah tidak menjadi sebuah kejahatan karena hak Pemda Manggarai Barat atas tanah obyek perkara yang di klaim sebagai Aset daerah, ternyata dipandang sebaliknya sebagai bukan aset daerah milik Pemerintah daerah Kabupaten Manggarai Barat, sehingga Pembedaan atas Sdr. Terdakwa/ Pembanding atas nama Agustinus Christoforus Dula adalah hal yang sia-sia.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang memberi putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

- Menerima dan mengabulkan Permintaan Banding dan Memori Banding dari Terdakwa Agustinus Christoforus Dula untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 33/PID.SUS-TPK /2021/PN Kpg, Tanggal 30 Juni 2021, serta mengadili sendiri dan memutus dengan amar putusan, sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Agustinus Christoforus Dula tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam seluruh Dakwaan Penuntut Umum;
 2. Membebaskan Terdakwa Agustinus Christoforus Dula dari seluruh Dakwaan;
 3. Membebaskan Terdakwa Agustinus Christoforus Dula dari Tahanan;
 3. Memulihkan (merehabilitasi) hak Terdakwa Agustinus Christoforus Dula dalam kedudukan, kemampuan dan harkat serta martabatnya seperti semula;
 4. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada negara.

Namun demikian, sekiranya Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang sering-ringannya.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 15 Juli 2021 telah mengajukan Memori Banding sesuai dengan Tanda Terima Memori Banding Nomor 24/Akta Pid.Sus-TPK/ 2021/PN Kpg yang ditanda tangani oleh Panitera Muda Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut

Ad.1 Kurangnya pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim yang dapat menjadi alasan pemberatan pidana karena tidak mempertimbangkan akibat yang telah ditimbulkan dari perbuatan terdakwa.

1. Bahwa kami Penuntut Umum pada prinsipnya sependapat dengan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam putusannya.
2. Bahwa terhadap amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Klas IA tersebut, Penuntut Umum tidak sependapat dengan pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa, dengan alasan sebagai berikut :
3. Bahwa terdakwa pernah menjabat sebagai Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat setelah pemekaran wilayah dan yang menerima dan mengetahui adanya dokumen yang berkaitan dengan tanah aset Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat di Karanga/ Toro Lema Batu Kalo seuas 30 Ha yang diserahkan pada saat pemekaran wilayah tahun

Hal 260 dari 281 hal Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2003 dan tahun 2005 berdasarkan Berita Acara Serah Terima P3D dari Pemerintah Kabupaten Manggarai kepada Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat.

4. Bahwa terdakwa pada tahun 2010 terdakwa menjabat sebagai Bupati Manggarai Barat, akan tetapi tidak melakukan tindakan pengamanan terhadap tanah aset Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat tersebut.
5. Bahwa terdakwa memberikan persetujuan data yuridis dan data fisik melalui Camat Komodo Abdullah Nur setelah melaporkan adanya permohonan tanda tangan data fisik dan data yuridis dari H.Sukri, Suaib dan Supardi.
6. Terdakwa telah memberikan surat keterangan dapat diproses permohonan SHM atas nama FATIMA BADO SALAM dan AMRAN ALIMAN diatas objek tanah aset Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat sehingga kemudian sesuai fakta persidangan perbuatan terdakwa juga telah menguntungkan AMRAN ALIMAN telah menjual tanah tersebut kepada RUDIANTO SULIAWAN dari total harga Rp.6.000.000.000,00 (enam miliar) yang sudah dibayar DP sebesar Rp.2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) , fakta hukum ini yang tidak ikut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang sebagai hal yang dapat memberatkan hukuman kepada terdakwa.
7. Bahwa selain itu terdakwa juga telah memberikan persetujuan kepada AMBROSIOUS SUKUR untuk menandatangani Surat Ukur tanah Pemda yang diserahkan Petugas dari Pertanahan pada Kanwil Proinsin NTT dan walaupun terdakwa telah mendapat laporan dari AMBROSIOUS SUKUR bahwa pengukuran awal tanah Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat seluas 28 Ha, namun berkurang menjadi 24 Ha, akan tetapi terdakwa tetap memerintahkan agar AMBROSIOUS SUKUR menandatangani Gambar Ukur tanah Pemda Kabupaten Manggarai Barat yang telah berkurang tersebut.
8. Bahwa terdakwa juga menyadari bahwa ada Aset tanah Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat sejak terdakwa menjabat sebagai Wakil Bupati Manggarai Barat tahun 2005, akan tetapi kemudian mengeluarkan surat keterangan tanggal 8 Januari 2018 yang isinya sebagai berikut :

Hal 261 dari 281 hal

Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Tanah tersebut tidak memiliki dokumen atau bukti penyerahan yang asli.
2. Tanah tersebut tidak terdaftar dalam dokumen penyerahan tanah adat dari fungsionaris adat/ Tua adat Nggorang kepada Pemda Tk.II Manggarai.
3. Tanah atau lahan tersebut tidak terdaftar dalam daftar lampiran Berita Acara Penyerahan Aset Daerah dari Pemkab Manggarai kepada Pemkab Manggarai Barat.
4. Tanah tersebut tidak terdaftar dalam daftar Inventaris aset milik Pemda Manggarai Barat.
5. Para Bupati terdahulu mengakui tidak mengetahui dan tidak pernah menerima dan menandatangani Surat Penyerahan Tanah Adat yang diserahkan oleh Haji Ishaka dan Haku Mustafa sebagai fungsionaris adat/tua adat Nggorang seluas 30 Ha kepada Pemda Tk.II Manggarai tersebut.
6. Tanah tersebut tidak dalam status sengketa hukum antara pembak dengan pihak lain.
7. Banyak keterangan para saksi yang tidak mendukung pemilikan lahan tersebut oleh Pemkab.
9. Bahwa dengan adanya surat keterangan terdakwa tersebut, dijadikan sebagai data pendukung permohonan Hak Milik yang diajukan oleh MUHAMAD ACHYAR, SH untuk dan atas nama GORIS MERE, SUKARNI ILYAS dan GABRIEL MAHAL.
10. Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum mengenai penjatuan hukuman kepada terdakwa AGUSTINUS CH DULA selama 7 (tujuh) tahun, oleh Penuntut Umum sangat tidak sependapat karena perbuatan terdakwa yang adalah sebagai Kepala Daerah dan Kuasa atas barang Daerah harusnya melaksanakan kepentingan hukum dalam upaya penyelamatan tanah aset Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat dan bukannya melepaskan secara tidak bertanggungjawab atas barang daerah dimaksud.
11. Bahwa dengan memperhatikan argumentasi hukum dan fakta tersebut diatas, maka untuk kepentingan Hukum, perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yang turut andil mengakibatkan kerugian negara dan menguntungkan orang lain secara melawan hukum maka adalah tepat



kepada terdakwa seharusnya dijatuhi pidana yang lebih berat atau setidaknya sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang telah mempertimbangkan dampak / efek jera yang lebih besar dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan dalam kaitan dengan penataan tanah Aset Pemerintah Daerah secara tertib (*Op.Cit. Dr.E.Utrecht,SH rangkaian sari kuliah Hukum Pidana 1 penerbit Univeritas 1960 halaman 361-362*).

12. Bahwa sebagaimana fakta –fakta hukum yang telah diuraikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, menurut Penuntut Umum, Majelis Hakim tidak memperhatikan dampak dan akibat dari perbuatan terdakwa yakni tujuan pelaksanaan pembangunan kepada masyarakat menjadi tidak terlaksana dan Pemerintah Daerah menghabiskan energi, waktu dan biaya yang tidak seharusnya dikeluarkan untuk persoalan tanah aset Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat yang telah diberikan oleh fungsionaris adat Kedaluan Nggorang, Pemda Kabupaten Manggarai Barat telah kehilangan Aset tanah tersebut.

13. Bahwa disadari, bahwa Hakim dalam penjatuhan hukuman kepada terdakwa siftnya mandiri dan bebas dari tekanan apapun, akan tetapi pemidanaan yang dijatuhkan sudah seharusnya berdasarkan kaidah – kaidah hukum yang berlaku sehingga tidak menimbulkan disparitas pemidanaan yang mencolok dan oleh karenanya, Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai dasar penjatuhan pidana.

14. Bahwa didalam penjatuhan pidana kepada terdakwa, Majelis Hakim telah tidak mempedomani Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang – Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan alasan dari Penuntut Umum sebagai berikut :

- o Bahwa Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) sendiri dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tidak diatur dalam susunan hierarki Peraturan Perundang-Undangan. Pasal 7 Undang-



Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menjelaskan yang termasuk dalam hierarki Peraturan-Undang adalah Undang-Undang Dasar 1945, Ketetapan MPR, Undang-Undang/ atau Perpu, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Akan tetapi dalam Pasal 8 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, diatur mengenai bentuk peraturan perundang-undangan yang lainnya, dan menegaskan bahwa peraturan perundang-undangan tersebut diakui keberadaannya serta mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan, termasuk Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) di dalamnya.

- o Bahwa Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) dapat dikatakan sebagai keputusan normatif yang mengatur kepentingan umum dalam arti mengikat untuk para Hakim, Jaksa, Advokat, dan masyarakat pencari keadilan yang hendak beracara di pengadilan, walaupun menurut Hakim Agung Mahdi Soroinda, PERMA hanya berlaku internal. Menurut pendapat Ronald S. Lumbuun yang tidak sependapat dengan pandangan Mahdi Soroinda, karena berdasarkan penjelasan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang No 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang No 3 Tahun 2009 yang masih berlaku sampai saat ini yang di dalam salah satu kalimatnya menyatakan bahwa, “.....*Dalam hal peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dibedakan dengan peraturan yang disusun oleh pembentuk undang-undang....* Dengan demikian Mahkamah Agung tidak akan mencampuri dan melampaui pengaturan tentang hak dan kewajiban warga negara pada umumnya. Namun sering kali bentuk-bentuk peraturan yang dibuat oleh lembaga lembaga independen seperti Mahkamah Agung tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai peraturan umum yang tunduk pada hierarki hukum berdasarkan tata urutan peraturan perundang-undangan yang lazim. Oleh karena itu, kedudukan



peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh lembaga-lembaga khusus itu lebih tepat disebut juga sebagai peraturan yang bersifat lebih khusus (*lex specialis*).

- o Bahwa dengan mengacu pada argumentasi Penuntut Umum sebagaimana tersebut diatas, Perma 1 Tahun 2020 tentang pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka Majelis Hakim harus mempedomani ketentuan tersebut secara objektif sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 Perma ini, dengan mempedomani Peraturan Mahkamah Agung ini, maka Pidana yang dijatuhkan dapat dikategorikan sebagai berikut :
 - *Dari Aspek Kategori Kerugian Keuangan Negara , perbuatan terdakwa masuk dalam Kategori Paling berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf a Perma 1 tahun 2020.*
 - *Dari Aspek Tingkat Kesalahan, Dampak dan Keuntungan, perbuatan terdakwa masuk dalam Kategori Aspek Kesalahan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a poin 1 Perma Nomor 1 Tahun 2020.*
 - *Dari Aspek dampak, perbuatan terdakwa memenuhi syarat Dampak rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b angka 1 Perma Nomor 1 Tahun 2020.*
- o Bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum dan ketentuan Pemidanaan, maka kepada terdakwa tidak tepat dijatuhi pidana 7 (tujuh) Tahun melainkan masuk dalam kategori pemidanaan diatas 10 (sepuluh) tahun berdasarkan peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan pasal 3 Undang – Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- o Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, maka penjatuhan pidana oleh Majelis hakim haruslah putusan yang mempunyai daya jangkau yang panjang untuk masa mendatang (*Attribute of intention universal application*) Prof.Dr.Achamd Ali,SH,M.H /Menguak tabir Hukum edisi kedua halaman 65) .
- o Bahwa Majelis hakim dalam pertimbangan penjatuhan pidana tidak mempertimbangkan efek jera dalam hal Pemidanaan terhadap setiap pegawai negeri/ pejabat negara untuk kepentingan negara/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah secara luas yang tidak hanya berdampak kepada terdakwa semata akan tetapi memiliki dampak yang luas kepada pihak lain dalam hal pengelolaan aset Pemerintah Daerah.

Dengan demikian telah nyata bahwa Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa dalam penjatuhan pidana KURANG PERTIMBANGAN HUKUM.

Ad.2. Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya tidak tepat menghitung kerugian keuangan negara.

1. Bahwa benar, Majelis Hakim juga berwenang menghitung kerugian keuangan negara berdasarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2016 Tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang mana dalam pasal 6 yang menekankan sebagai berikut :

Instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan Negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/ Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan Negara namun tidak berwenang menyatakan atau men-declare adanya kerugian keuangan Negara. Dalam hal tertentu Hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian Negara dan besarnya kerugian Negara.

2. Bahwa dalam perkara A Quo, Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya pada unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara pada halaman 671 s/d halaman 678 yang pada pokoknya Majelis Hakim berpendapat bahwa nilai indikasi kerugian keuangan negara berdasarkan transaksi jual beli yang dilakukan oleh Muhamad Achyar dengan David Andrew Pratama pada tahun 2019 sebesar Rp.100.000/M2 untuk 5 Ha tanah seharga Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), sedangkan pada sisi lain pada bulan Agustus 2016 adanya transaksi jual beli tanah Pemda dengan harga Rp.700.000/M2 antara Saniatma Adinoto dengan Supardi, Sukri dan Suaib merupakan harga dari Makelar Tanah dengan objek yang bersebelahan dengan transaksi jual beli yang dilakukan oleh Muhamad Achyar dengan David Andrew Pratama tahun 2019, sehingga sangat tidak tepat perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh

Hal 266 dari 281 hal Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Majelis Hakim sekalipun majelis Hakim di berikan kewenangan untuk melakukan perhitungan berdasarkan fakta persidangan.

3. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : Mahkamah Konstitusi Nomor : 003/PUT- IV/ 2006 yang dalam salah satu pertimbangan hukumnya sebagai berikut :

Adanya kerugian negara atau perekonomian negara tidak merupakan akibat yang harus nyata terjadi, Mahkamah berpendapat bahwa hal demikian ditafsirkan bahwa unsur kerugian negara harus dibuktikan dan harus dapat dihitung, meskipun sebagai perkiraan atau meskipun belum terjadi. Kesimpulan demikian harus ditentukan oleh seorang ahli di bidangnya.

4. Bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa perhitungan nilai wajar tanah yang dilakukan oleh Ahi Apraisal yang dihadirkan Penuntut dalam perhitungannya telah menggunakan data pembanding 1 yakni harga tanah antara Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah)/ M2, data pembanding 2 yakni seharga Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan data pembanding 3 seharga Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), maka berdasarkan data pembanding sebagaimana tersebut dan dengan melihat perkembangan Kabupaten Manggarai Barat yang semakin berubah dan kenaikan harga tanah selalu naik berkisar antara 40 % s/d 60%, maka harga tanah yang dinilai wajar adalah sebesar Rp.4.452.468,04 (empat juta empat ratus lima puluh dua ribu empat ratus enam puluh delapan rupiah dan empat sen).

5. Bahwa dengan demikian maka kerugian yang nyata dan riil atas objek tanah Pemda Kabupaten Manggarai barat di Karanga/ Toro Lema Batu Kalo adalah sejumlah Rp. 1.301.011.161.288 (satu triliun tiga ratus satu miliar sebelas juta seratus enam puluh satu ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah) dan bukan sebesar Rp.35.710.000.000,00 (tiga puluh lima miliar tujuh ratus sepuluh ribu rupiah)

Dengan demikian, telah nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang telah kurang dalam pertimbangan hukumnya terkait dengan unsur merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian negara.

Maka berdasarkan hal-hal yang kami uraikan diatas, kami Jaksa Penuntut Umum memohon dengan hormat agar Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang :

Hal 267 dari 281 hal Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Permohonan Banding Penuntut Umum
2. Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Kupang Nomor : 33/PID.SUS-TPK /2021/PN Kpg tanggal 30 Juni 2021 sekedar tentang pemberatan Pidana Penjara.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang menyatakan bahwa :

1. Menyatakan terdakwa AGUSTINUS CHRISTOFORUS DULA terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama – sama dan berlanjut sebagaimana Dakwaan Primiar.
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) Tahun dan Denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan
3. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan jenis Rutan.

Menimbang, bahwa pada tanggal 16 Agustus 2021 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding sesuai dengan Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 24/Akta.Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg yang ditandatangani oleh Panitera Muda Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :

Ad.1. Kekhilafan Hakim mengenai unsur secara melawan hukum

1. Bahwa setelah mempelajari Materi Memori Banding yang diajukan Penasihat Hukum terdakwa sebagaimana yang diuraikan pada halaman 24 s/d halaman 35 memori Bandingnya, Penuntut Umum tidak sependapat dengan dalil – dalil yang dibangun Tim Penasihat Hukum terdakwa.
2. Bahwa keberatan Penuntut Umum tersebut cukup beralasan karena fakta – fakta hukum yang diuraikan Tim Penasihat hukum terdakwa adalah pengulangan atas fakta – fakta hukum yang secara relevan dan sesuai dengan kaidah pembuktian, telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Klas IA.
3. Bahwa selain itu Penuntut Umum perlu juga menanggapi dan membantah keberatan Tim Penasihat hukum terdakwa pada halaman 27 khususnya pada angka 4 s/d angka 7 memori banding terdakwa yang penenkanannya pada Keputusan Presiden Nomor 55 tahun 1993 tentang Pengadaan tanah untuk kepentingan umum.....dst.

Hal 268 dari 281 hal Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa terhadap keberatan Tim Penasihat Hukum tersebut, Penuntut Umum menanggapi sebagai berikut :
- Bahwa pemberlakuan Keputusan Presiden Nomor 55 tahun 1993 tentang Pengadaan tanah untuk Kepentingan Umum secara legal formal tidak dapat dinyatakan berlaku surut, karena pemberian tanah adat oleh fungsionaris adat telah dilakukan sesuai dengan kaidah hukum adat yang berlaku sejak tahun 1989 dan sesuai dengan kaidah hukum adat tidak dikenal berbagai proses sebagaimana dalam tata kelola pemerintahan dan mengenai hal tersebut menjadi kewajiban Pemerintah Daerah dalam penataan dan penyelenggaraan pemerintahan.
 - Bahwa penerapan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan tanah untuk kepentingan umum, Penuntut Umum menanggapi bahwa penerapan suatu ketentuan Perundang – Undangan haruslah tetap mengedepankan Azas Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (2) KUHP .
 - Bahwa fakta hukum persidangan telah membuktikan bahwa penyerahan tanah Adat milik Kedaluan Nggorang di Kabupaten Manggarai Barat kepada Pemerintah Kabupaten Manggarai sebelum pemekaran telah terjadi penyerahan pada tahun 1989 sehingga sesuai dengan Asas Hukum Adat, penyerahan tersebut sudah dianggap SAH. Sehingga pendapat Tim penasihat Hukum Terdakwa yang mempersoalkan bahwa tindakan Pemerintah Kabupaten Manggarai saat itu adalah bertentangan dengan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan umum adalah tidak tepat dan tidak sesuai dengan Azas hukum Pasal 1 Ayat (2) KUHP.
 - Bahwa proses penyerahan tanah adat Kedaluan Nggorang tahun 1989 telah sesuai dengan Pasal 26 UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang – Undang Pokok Agraria.
5. Bahwa terkait dengan keberatan Tim penasihat hukum terdakwa sebagaimana pada angka 8 halaman 28 Memori banding yang pada pokoknya keberatan mengenai objek tanah Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat.....dst.
6. Bahwa terhadap keberatan Tim Penasihat Hukum terdakwa sebagaimana tersebut, menurut hemat Penuntut Umum, hal tersebut telah terjawab dan telah terbantahkan dengan adanya proses pengukuran tanah Pemerintah

Hal 269 dari 281 hal

Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Manggarai Barat bersama pihak Kantor Wilayah Pertanahan Propinsi NTT tanggal 20 Mei 2015 dan hal mana sesuai juga dengan proses sidang setempat bersama Majelis Hakim, Penuntut Umum, Penasihat Hukum para terdakwa dan saksi sejarah serta petugas ukur pad bulan Mei 1997 dan lokasi yang ditunjuk adalah benar sesuai dengan yang diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Manggarai sebelum pemekaran dan kemudian diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat setelah pemekaran wilayah tahun 2003.

7. Bahwa selain itu Penuntut Umum juga perlu menanggapi keberatan Tim Penasihat Hukum terdakwa sebagaimana pada poin 1 s/d poin 7 pada halaman 29 s/d halaman 32 Memori bandingnya yang pada pokoknya terdakwa menyalahkan Pemerintahan sebelumnyadst , Penuntut Umum menanggapi sebagai berikut :

a. bahwa proses penyelenggaraan Pemerintahan adalah suatu proses yang berlangsung secara terus menerus dan berkembang dan mengalami perubahan sesuai dinamika kehidupan berbangsa, sehingga proses penyelenggaraan Pemerintahan tetap berjalan sebagaimana yang diharapkan.

b. Bahwa sesuai fakta persidangan diketahui bahwa terdakwa Drs.Agustinus CH Dula adalah Wakil Bupati pertama sejak adanya pemekaran wilayah dari Kabupaten Manggarai menjadi Kabupaten Manggarai Barat.

Bahwa benar didalam UU Otonomi Daerah adanya pemisahan penyelenggaraan pemerintahan antara Bupati dan Wakil Bupati akan tetapi dalam tataran penyelenggaraan Pemerintahan terdakwa selaku Wakil Bupati adalah membantu Bupati dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bar terbentuk dalam berbagai aspek pembangunan,, penyelenggaraan kesejahteraan masyarakat, dan Penyelenggaraan Pemerintahan secara luas termasuk didalamnya adalah pencatatan dan pengamanan terhadap segala harta kekayaan Pemerintah Daerah, sehingga tidak hanya dapat menyalahkan pemerintahan sebelumnya dan hal tersebut sudah seharusnya disadari oleh terdakwa pada saat menjabat sebagai Wakil Bupati Manggarai Barat tahun 2005.

Hal 270 dari 281 hal Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa selain itu Penuntut Umum juga perlu menanggapi materi keberatan Tim penasihat hukum terdakwa pada angka 9 Memori bandingnya pada halaman 29 yang pada pokoknya menguraikan mengenai SHM diatas tanah Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat atas nama Day Kayus sesuai putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo.....dst.
9. Bahwa terhadap materi tersebut, Penuntut Umum perlu menanggapi sebagai berikut :
 - a. Bahwa alas hak atas nama Day Kayus objek tanahnya di Ua Cicu Utara dan bukan di Karanga/ Toro lema Batukalo.
 - b. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Labuan bajo Nomor 09/Pdt.G/2016/Pn.Lbj tanggal 28 Juni 2018 adalah objek tanahnya di Ua Cicu Utara sebagaimana alas hak.
 - c. Bahwa pada proses pengukuran bersama dengan pihak pertanahan Kabupaten Manggarai Barat, DAY KAYUS yang menjadi terdakwa dalam berkas terpisah telah menunjuk objek tanahnya di Karanga/ Toro Lema Batu Kalo tepatnya diatas tanah Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat.
 - d. Bahwa luasan tanah sesuai alas hak adalahh 6000 M2, akan tetapi terdakwa menunjuk batas – batas tanah yang kemudian diukur menjadi 12.000 M2.
 - e. Bahwa penerbitan SHM yang dikeluarkan oleh Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat baru dilakukan setelah keluarnya peta bidang oleh Kantor Wilayah Pertanahan Propinsi NTT Juni 2016, sehingga secara yuridis telah nyata adanya permufakatan jahat yang dilakukan antara terdakwa dengan pihak Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat.

Dengan demikian, telah nyata bahwa keberatan Tim Penasihat Hukum terdakwa tidak cukup beralasan, sehingga sudah sepatutnya keberatan dalam memori Banding tersebut haruslah di kesampingkan.

Ad.2.Kekhilafan Hakim mengenai unsur Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi.

1. Bahwa setelah Penuntut Umum mempelajari Materi Memori banding yang diajukan penasihat Hukum terdakwa terhadap unsur ini, menurut hemat Penuntut Umum, fakta – fakta hukum sebagaimana tersebut telah dipertimbangkan secara tepat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang bahwa tanah aset di Karanga/ Toro

Hal 271 dari 281 hal Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lema Batu Kalo adalah kepunyaan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat yang belum selesai proses pengurusan bukti kepemilikannya.

2. Bahwa oleh karena tanah aset tersebut adalah kepunyaan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat dan jika dialihkan secara melawan hukum dan orang lain telah mendapat untung atas peralihan objek tanah dimaksud, maka secara hukum telah memperkaya orang lain secara melawan hukum.

Bahwa berdasarkan alasan – alasan sebagaimana tersebut, maka keberatan Penasihat Hukum terdakwa dalam memori bandingnya tidak berdasar hukum sehingga wajib di kesampingkan.

Ad.3. Kekhilafan Hakim mengenai unsur Dapat merugikan Keuangan Negara atau perekonomian negara .

1. Bahwa setelah Penuntut Umum mempelajari Materi Banding Penasihat hukum terdakwa sebagaimana pada halaman 36 s/d halaman 38 Memori Bandingnya, Penuntut Umum menanggapi sebagai berikut :

- Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pendapat Penasihat hukum terdakwa sebagaimana dalam Memori bandingnya.
- Bahwa selain itu Penuntut Umum juga sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim mengenai tanah Aset Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat yang termasuk dalam pengertian Aset yang dapat dinilai dengan uang.
- Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim mengenai perhitungan kerugian keuangan negara, Penuntut Umum berbeda pendapat dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. Bahwa benar, Majelis Hakim juga berwenang menghitung kerugian keuangan negara berdasarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2016 Tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang mana dalam pasal 6 yang menekankan sebagai berikut :

Instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan Negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/ Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan Negara namun tidak berwenang menyatakan atau men-declare adanya

Hal 272 dari 281 hal

Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian keuangan Negara. Dalam hal tertentu Hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian Negara dan besarnya kerugian Negara;

b. Bahwa dalam perkara A Quo, Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya pada unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian yang pada pokoknya Majelis Hakim berpendapat bahwa nilai indikasi kerugian keuangan negara berdasarkan transaksi jual beli yang dilakukan oleh Muhamad Achyar dengan David Andrew Pratama pada tahun 2019 sebesar Rp.100.000/M2 untuk 5 Ha tanah seharga Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), sedangkan pada sisi lain pada bulan Agustus 2016 adanya transaksi jual beli tanah Pemda dengan harga Rp.700.000/M2 antara Saniatma Adinoto dengan Supardi, Sukri dan Suaib merupakan harga dari Makelar Tanah senilai Rp. 25.154.000.000,00 (dua puluh lima miliar seratus lima puluh empat juta rupiah) dengan objek yang bersebelahan dengan transaksi jual beli yang dilakukan oleh Muhamad Achyar dengan David Andrew Pratama tahun 2019, sehingga sangat tidak tepat perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh Majelis Hakim sekalipun majelis Hakim di berikan kewenangan untuk melakukan perhitungan berdasarkan fakta persidangan.

c. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : Mahkamah Konstitusi Nomor : 003/PUT- IV/ 2006 yang dalam salah satu pertimbangan hukumnya sebagai berikut:

Adanya kerugian negara atau perekonomian negara tidak merupakan akibat yang harus nyata terjadi. Mahkamah berpendapat bahwa hal demikian ditafsirkan bahwa unsur kerugian negara harus dibuktikan dan harus dapat dihitung, meskipun sebagai perkiraan atau meskipun belum terjadi. Kesimpulan demikian harus ditentukan oleh seorang ahli di bidangnya.

d. Bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa perhitungan nilai wajar tanah yang dilakukan oleh Ahi Apraisal yang dihadirkan Penuntut dalam perhitungannya telah menggunakan data pembanding 1 yakni harga tanah antara Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah)/ M2, data pembanding 2 yakni seharga Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan data pembanding 3 seharga

Hal 273 dari 281 hal Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), maka berdasarkan data pembandingan sebagaimana tersebut dan dengan melihat perkembangan Kabupaten Manggarai Barat yang semakin berubah dan kenaikan harga tanah selalu naik berkisar antara 40 % s/d 60%, maka harga tanah yang dinilai wajar adalah sebesar Rp.4.452.468,04 (empat juta empat ratus lima puluh dua ribu empat ratus enam puluh delapan rupiah dan empat sen).

e. Bahwa dengan demikian maka kerugian yang nyata dan riil atas objek tanah Pemda Kabupaten Manggarai barat di Karanga/ Toro Lema Batu Kalo adalah sejumlah Rp. 1.301.011.161.288 (satu triliun tiga ratus satu miliar sebelas juta seratus enam puluh satu ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah) dan bukan sebesar Rp.35.710.000.000,00 (tiga puluh lima miliar tujuh ratus sepuluh ribu rupiah)

Dengan demikian, telah nyata bahwa keberatan Penasihat Hukum terdakwa tidak cukup beralasan sehingga wajib dikesampingkan dan juga Majelis Hakim kurang dalam pertimbangann hukum mengenai perhitungan kerugian keuangan negara

Maka berdasarkan hal-hal yang kami uraikan diatas, kami Jaksa Penuntut Umum memohon dengan hormat agar Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang :

1. Menolak Permohonan Banding dari Penasehat hukum terdakwa DRS. AGUSTINUS CH DULA untuk seluruhnya.
2. Menerima Kontra memori Banding dari Penuntut Umum untuk seluruhnya.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang Memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa AGUSTINUS CHRISTOFORUS DULA terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama – sama dan berlanjut sebagaimana Dakwaan Primiar.
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) Tahun dan Denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan
3. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan jenis Rutan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Berkas Perkara yang dimintakan Banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang, sesuai dengan surat dari Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang masing-masing Nomor W26.UI/2109/HN.01.10/VII/2021 dan Nomor W26.UI/2108/HN.01.10/VII/2021 tertanggal 5 Juli 2021;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg telah dijatuhkan pada tanggal 30 Juni 2021 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya, sedangkan Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 5 Juli 2021 dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan permintaan banding pada tanggal 7 Juli 2021, dengan demikian permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karenanya maka permintaan Banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tipikor Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kpg tanggal 30 Juni 2021, Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, Memori Banding dan Tambahan Memori Banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, serta Kontra Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama yang dalam putusannya menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Primer Jaksa Penuntut Umum, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding tentang tindak pidana yang telah dilakukan Terdakwa sesuai dengan perannya;

Hal 275 dari 281 hal Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Tipikor Tingkat Banding tidak sependapat, mengacu pada PERMA Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Tingkat Banding berpendapat bahwa dengan memperhatikan nilai kerugian keuangan Negara, aspek kesalahan, aspek dampak dan aspek keuntungan yang senyatanya dinikmati oleh Terdakwa, maka lamanya pidana penjara dan denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang paling tepat dan memenuhi rasa keadilan adalah sebagaimana tersebut di bawah;

Menimbang, bahwa mengenai besarnya denda Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Tingkat Banding juga tidak sependapat, oleh karenanya maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama akan diperbaiki mengenai lamanya pidana penjara dan besarnya denda yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam pengajuan permintaan bandingnya, Terdakwa telah mengajukan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut :

- A. Putusan Judex Factie secara nyata telah mengabaikan fakta-fakta hukum yang secara mutlak terbukti dalam pemeriksaan sidang perkara a quo;
1. Keterangan Gaspar Parang Ekok selaku mantan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Manggarai Periode I tahun 1989 s/d 1994 dan Periode II Tahun 1994 s/d 1999, yang sekaligus merupakan fakta hukum dan bukti mengenai DIMANA sesungguhnya letak dari lokasi obyek tanah yang diminta Sdr. Gaspar Parang Ekok kepada Fungsionaris Adat atas nama H. Ishaka dan yang diserahkan H. Ishaka kepada Adr. Gaspar Parang Ekok;
 2. Fakta tumpang tindihnya lokasi obyek tanah yang diklaim oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat dengan beberapa oknum yang masing-masing memegang alas hak yang sah secara hukum (bukti-bukti alas hak para pihak tersebut disita oleh pihak Kejaksaan sebagai bukti dalam perkara a quo);
 3. Fakta dokumen alas Hak Milik Pemda Kabupaten Manggarai Barat berupa Surat Pelepasan Hak (SPH) atas tanah obyek perkara yang tidak jelas dan tidak berkekuatan hukum;
 4. Fakta dari sikap dan pernyataan Bupati-Bupati terdahulu sebelum oleh Terdakwa/Pembanding menjabat sebagai Bupati Kabupaten Manggarai Barat, yang faktanya lepas tangan untuk mengurus tanah obyek perkara;

Hal 276 dari 281 hal Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fakta tanah obyek perkara yang belum pernah dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat dan tidak pernah terdaftar dalam Buku Inventaris Barang Milik Daerah Kabupaten Manggarai;
6. Fakta upaya Terdakwa/Pembanding yang menjadi satu-satunya Pejabat Bupati Manggarai Barat yang serius dan gigih dalam melakukan upaya untuk memperjelas status obyek tanah perkara agar dapat dimiliki secara mutlak oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat;
- B. Kekeliruan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menilai unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada Pemohon Banding;
 1. Kekeliruan Judex Facti mengenai unsur "Melawan Hukum";
 2. Kekeliruan Judex Facti Pengadilan Tingkat Pertama mengenai unsur "Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi"
 3. Kekeliruan Judex Facti Pengadilan Tingkat Pertama mengenai unsur "Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara"

Menimbang, bahwa karena pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama dapat dibenarkan dan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Tingkat Banding maka Memori Banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam Tambahan Memori Bandingnya, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan alasan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan putusan perkara No.4/Pdt.G/2021/PN Lbj tanggal 28 Juli 2021 sangat terang dan jelas bahwa tanah yang merupakan obyek perkara putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg tanggal 30 Juni 2021 bukan aset tanah Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa dalam putusan perkara No.4/PDT.G/2021/PN Lbj tertanggal 28 Juli 2021, dinyatakan Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Tergugat I dalam perkara No.4/PDT.G/2021/PN Lbj adalah Pemerintah Negara Republik Indonesia Cq Kejaksaan Agung Republik Indonesia Cq Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa berdasarkan putusan tersebut Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
- Bahwa berdasarkan asas hukum '*ex dolo malo non oritur actio*' yang sama dengan asas hukum '*ex mala causa non oritur actio*', yang berarti tidak ada tindakan yang dilakukan berdasarkan pada perbuatan yang melawan

Hal 277 dari 281 hal Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum (illegal act), membatalkan putusan Pengadilan Tipikor Kupang Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg tanggal 30 Juni 2021 yang berdasarkan pada perbuatan melawan hukum (illegal act) oleh Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Tambahan dari Terdakwa dengan alasan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan SEMA nomor 04 Tahun 1980 pengertian sengketa tentang *Prejudicieel geschil* dibagi menjadi 2 (dua) yaitu :
 1. *Question prejudicielle a l'action* adalah mengenai perbuatan-perbuatan pidana tertentu yang disebut dalam KUHP, antara lain pasal 284 KUHP, yang dalam hal ini diputuskan ketentuan perdata dulu sebelum dipertimbangkan penuntutan pidana;
 2. *Question prejudicielle au jugement* adalah menyangkut permasalahan yang diatur dalam pasal 81 KUHP, pasal tersebut sekedar memberi kewenangan, bukan kewajiban, kepada Hakim Pidana untuk menanggukkan pemeriksaan, menunggu putusan Hakim Perdata mengenai persengketaannya;
- Bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 1956, Hakim Pidana tidak terikat pada putusan Hakim Perdata yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Tingkat Banding, Memori Banding Tambahan dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak beralasan sehingga dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam Memori Bandingnya dan Kontra Memori Bandingnya, Penuntut Umum pada pokoknya hanya meminta agar Terdakwa dijatuhi putusan sesuai dengan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, terutama mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Tingkat Banding dalam pertimbangannya sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang dalam putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg, maka tidak ada hal-hal yang secara substansi harus dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 33/Pid.Sus-TPK.2021/PN Kpg tanggal

Hal 278 dari 281 hal Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 Juni 2021 akan diperbaiki mengenai lamanya pidana penjara dan denda yang dijatuhkan, serta menguatkan putusan selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk membebaskan Terdakwa dari dalam tahanan, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHPjo pasal 197 ayat (1) butir k KUHP, masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf i jo pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang ditingkat banding besarnya ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 64 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kpg tertanggal 30 Juni 2021 yang dimintakan Banding mengenai lamanya pidana penjara dan denda yang dijatuhkan, serta menguatkan putusan selain dan selebihnya, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
- 1. Menyatakan Terdakwa Agustinus Christoforus Dula terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut, sebagaimana dalam dakwaan Primair;
- 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp.600.000.000; (enam ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (bulan) bulan;

Hal 279 dari 281 hal Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam rumah tahanan Negara;
5. menguatkan putusan selain dan selebihnya;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500; (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Jum'at tanggal 3 September 2021 oleh kami : Hariono, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Cening Budiana, S.H., M.H. dan Endang Subekti Ayu Sumarmaningsih, S.H., M.H. Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas, dibantu oleh Rohbinson K. Tobo, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

TTD

1. Cening Budiana, S.H., M.H.

TTD

2. Endang Subekti Ayu Sumarmaningsih, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

TTD

Hariono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Rohbinson K.Tobo, S.H.

Salinan Resmi Turunan Putusan, PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG

Hal 280 dari 281 hal

Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SUHAIRI Z., S.H., M.H.
N I P.196207191985031002

Hal 281 dari 281 hal Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)